

**STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA  
ANTIFRAUD INSPEKTORAT KABUPATEN SLEMAN**

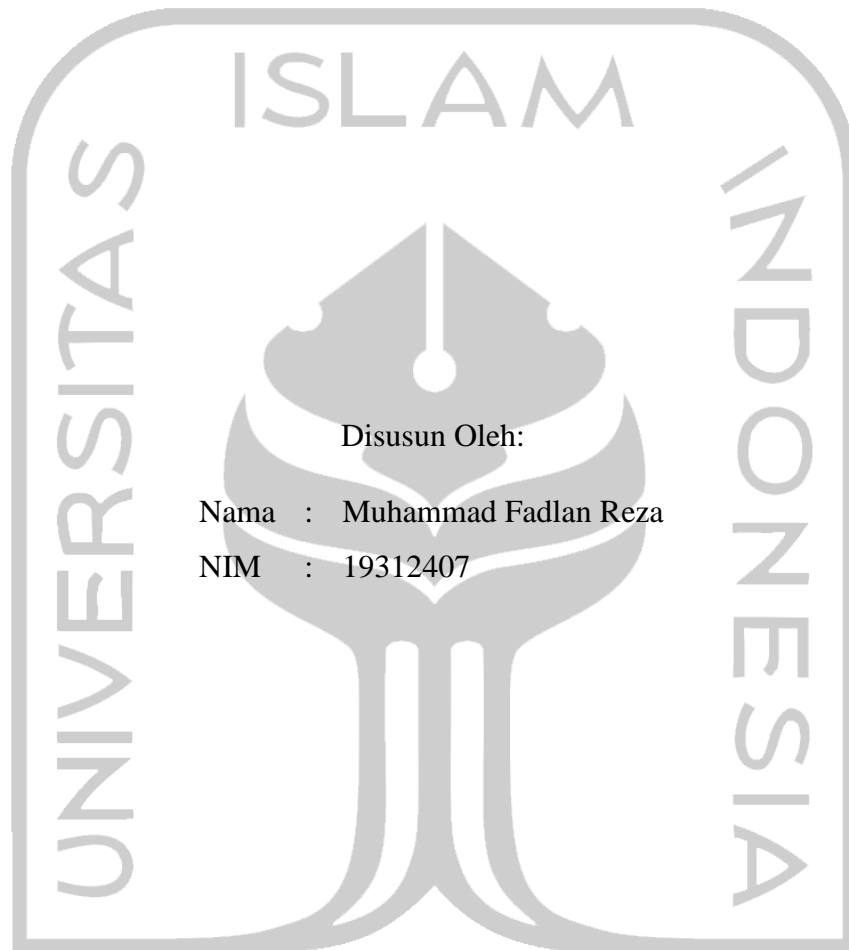


**2023**

**STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA  
ANTIFRAUD INSPEKTORAT KABUPATEN SLEMAN**

Skripsi

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai derajat  
Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII



Disusun Oleh:

Nama : Muhammad Fadlan Reza

NIM : 19312407



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

# PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 13 September 2023

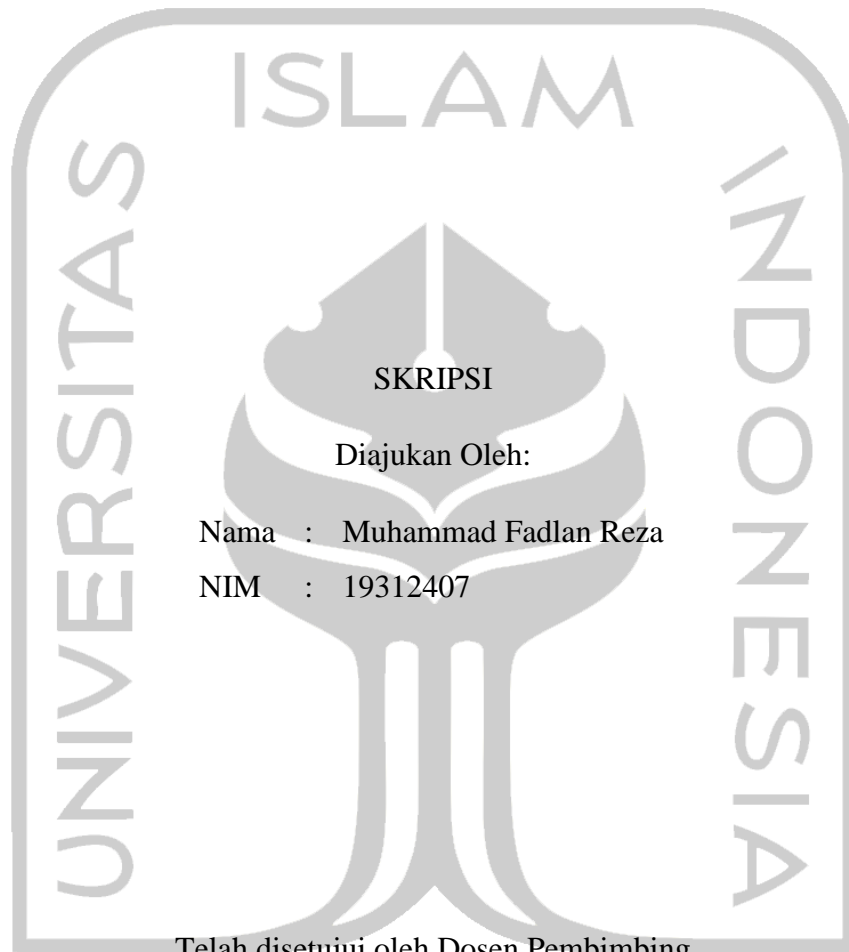
Penulis,



(Muhammad Fadlan Reza)

**STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA  
ANTIFRAUD INSPEKTORAT KABUPATEN SLEMAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**



Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 13 September 2023

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hendi Yogi Prabowo', is written over the text 'Dosen Pembimbing'.

Hendi Yogi Prabowo S.E., M.For.Accy., Ph.D.

# BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

## SKRIPSI BERJUDUL

Strategi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Anti Fraud Inspektorat Kabupaten Sleman

Disusun oleh : MUHAMMAD FADLAN REZA

Nomor Mahasiswa : 19312407

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus  
pada hari, tanggal: Senin, 02 Oktober 2023

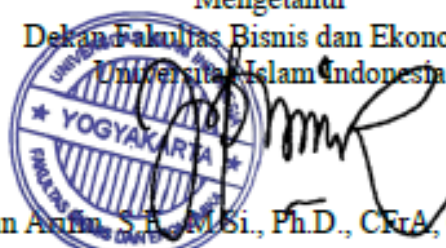
Penguji/Pembimbing Skripsi : Hendi Yogi Prabowo, SE., M.ForAccy., CFra.,  
Ph.D.

Penguji : Reni Yendrawati, Dra., M.Si., CFra.



Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia



Johan Arifin, S.Pd, M.Si., Ph.D., CFA, CertIPSAS.

اجتهدوا في العلم

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis persembahkan untuk:*

*Kedua orang tua yang saya cintai (Bapak Ade Yunus dan Ibu Nikmah) yang sangat pengertian kepada saya tentang tugas penulisan skripsi ini dan yang mendukung saya sekolah di perguruan tinggi. Kemudian kepada adik-adik tercinta yang mampu menghibur saya kemudian kepada keluarga besar saya yang senang mengingatkan, memotivasi, dan mengarahkan saya untuk meraih kesuksesan. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan berlipat-lipat.*

الجمعة المباركة  
الاستاذة الانيسة

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

*Alhamdulillahil ladzii binimatihi tatimmushalihat*, Segala Puji bagi Allah yang karena nikmatnya segala amal kebajikan dapat menjadi sempurna dan seluruh niat baik hamba dapat terlaksana. Salawat beriring salam saya ucapkan untuk Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wassallam yang mendidik umatnya dan wahyu dan menyucikan hati orang-orang beriman sehingga keluar dari kegelapan menuju cahaya Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Skripsi dengan judul **“Strategi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Antifraud Inspektorat Kabupaten Sleman”** telah selesai disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak melibatkan berbagai pihak yang memiliki kebaikan masing-masing untuk penulis yaitu doa, bimbingan, dukungan, bantuan, dan hiburan. Oleh karena itu, penulis ingin merangkai segenap ucapan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Ade Yunus dan Ibu Nikmah Wahyuningsih, yang selalu memberikan dukungan berupa doa, tantangan, tips dan ilmu serta finansial. Semoga Allah *Subhanahuwata'ala* membalas Ayah dan Mama dengan kebaikan yang banyak. Juga kepada adik-adik penulis yang selalu mampu menghilangkan penat penulis ketika menulis skripsi.
2. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan FBE UII yang memberikan izin penulis untuk penelitian skripsi ke Inspektorat Kabupaten Sleman.
3. Bapak Prof. Rifki Muhammad, Ph.D. selaku ketua program studi Akuntansi FBE UII yang memberikan arahan, sosialisasi ketika akan menulis skripsi.
4. Bapak Hendi Yogi Prabowo, S.E., M.For.Accy., Ph.D., CFrA, CAMS selaku dosen pembimbing, yang sudah sabar dalam membimbing penulis dari awal hingga selesainya karya tulis ini dan juga atas segala ilmu beserta masukan-masukan yang diberikan.

5. Bapak Rizki Hamdani, S.E., M.Ak., Ak., CA selaku ketua Takmir Masjid Al-Muqtashidin FBE UII yang selalu memberikan optimisme kepada penulis untuk mengerjakan skripsi.
6. Seluruh Pegawai Inspektorat Kabupaten Sleman yang telah ramah kepada penulis dan bekerja sama dengan baik dengan penulis dalam melaksanakan penelitian yaitu Bapak Hery selaku inspektur, Ibu Puji, Ibu Heri, Ibu Pipit, Ibu Ngatiyah, Ibu Ika, dan Ibu Retno serta Ibu Virgo dan Ibu Etik yang menghubungkan penulis dengan narasumber.
7. Keluarga besar penulis, nenek, om dan tante yang selalu memberikan arahan dan motivasi agar terus berproses dengan baik mengerjakan skripsi.
8. Teman-teman Takmir Masjid Al-Muqtashidin FBE UII yang luar biasa menemani, mengingatkan, menyertai, dan memahami penulis dalam menulis skripsi, memberikan suatu dukungan yang hebat dalam penulisan skripsi.
9. Bung Udin dan Mas Rizal yang telah menjadi panutan penulis dalam skripsi ini.
10. Jamaah kajian Masjid Al-Muqtashidin FBE UII yang selalu dapat mengingatkan penulis untuk tetap belajar agama meskipun di tengah kesibukan menulis skripsi.
11. Ustaz-ustaz yang juga menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini, dan
12. Seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, yang telah memberikan doa, bantuan, serta dukungan yang sangat berharga. Semoga Allah membalas kebaikan semuanya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak sekali kekurangan. Maka penulis dengan senang hati dan dada yang lapang akan menerima kritik dan saran agar mampu memperbaiki kekurangan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.



## DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Pengenalan Bab.....	1
1.2 Latar Belakang.....	1
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Fokus Penelitian .....	6
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA .....	9
2.1 Pengenalan Bab.....	9
2.2 Audit.....	9
2.2.1 Definisi Audit .....	9
2.2.2 Tujuan Audit.....	10
2.2.3 Jenis-Jenis Audit .....	10
2.2.4 Jenis-Jenis Auditor.....	13
2.3 Auditing Sektor Publik.....	14
2.4 Auditor Internal Pemerintah.....	15
2.4.1 Aparat Pengawas Intern Pemerintah.....	15
2.4.2 Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).....	16
2.4.3 Inspektorat .....	17
2.4.4 SPIP.....	17
2.5 <i>Fraud</i> .....	18
2.5.1 Definisi <i>Fraud</i> .....	18
2.5.2 Jenis-Jenis <i>Fraud</i> .....	19

2.5.3	Faktor Terjadinya <i>Fraud</i> .....	20
2.5.4	Pencegahan <i>Fraud</i> .....	21
2.5.5	Deteksi <i>Fraud</i> .....	22
2.6	Audit Forensik .....	22
2.6.1	Pekerjaan Audit Forensik .....	23
2.7	Audit Investigatif .....	24
2.8	Sumber Daya Manusia .....	26
2.9	Pengembangan Kompetensi .....	26
2.9.1	Karakteristik Kompetensi Auditor .....	27
2.9.2	Prinsip-Prinsip Dasar Kompetensi Auditor .....	28
2.9.3	Manfaat Kompetensi .....	29
2.9.4	Standar Kompetensi .....	30
2.10	Penelitian Terdahulu .....	31
<b>BAB 3</b>	<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>
3.1	Pengenalan Bab .....	36
3.2	Jenis Penelitian .....	36
3.3	Instrumen Penelitian .....	37
3.4	Fokus Penelitian .....	37
3.5	Sistematika Penelitian .....	37
3.5.1	Menentukan Topik Penelitian .....	39
3.5.2	Menentukan Rumusan Masalah .....	39
3.5.3	Kajian Literatur .....	39
3.5.4	Pengumpulan Data .....	39
3.5.5	Analisis Data .....	40
3.5.6	Kesimpulan .....	43
3.6	Sumber dan Jenis Data .....	43
3.6.1	Sumber Data Primer .....	43
3.6.2	Sumber Data Sekunder .....	44
3.7	Objek Penelitian .....	45
3.8	Teknik Pengumpulan Data .....	45
3.9	Pengujian Keabsahan Data .....	46
<b>BAB 4</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>49</b>
4.1	Pengenalan Bab .....	49
4.2	Profil Objek Inspektorat Kabupaten Sleman .....	49

4.2.1	Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Sleman.....	50
4.2.2	Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Sleman.....	50
4.2.3	Tugas Pokok dan Fungsi Serta Lingkup Pengawasan Inspektorat Kabupaten Sleman .....	51
4.2.4	Kode Etik dan Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah.....	56
4.2.5	Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Sleman .....	56
4.3	Mekanisme <i>Antifraud</i> yang Dilakukan Inspektorat Kabupaten Sleman .....	61
4.3.1	Pencegahan .....	62
4.3.2	Pendeteksian .....	66
4.3.3	Investigasi.....	67
4.4	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia <i>Antifraud</i> Inspektorat Kabupaten Sleman.....	70
4.5	Kekurangan dan Kendala dalam Pengembangan Kompetensi SDM <i>Antifraud</i> .....	92
4.6	Cara Mengatasi Kendala dan Saran Perbaikan dalam Pengembangan Kompetensi SDM <i>Antifraud</i> .....	98
BAB 5	KESIMPULAN DAN SARAN .....	110
5.1	Pengenalan Bab.....	110
5.2	Kesimpulan.....	110
5.3	Keterbatasan Penelitian .....	112
5.4	Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	.....	114
LAMPIRAN	.....	120

الجمعة الإسلامية الأندلسية

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Fraud Triangle.....	20
Gambar 3.1 Sistematika Penelitian.....	38
Gambar 4.1 Logo Inspektorat Kabupaten Sleman.....	49
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Sleman.....	57
Gambar 4.3 Analytical Maps Mekanisme Antifraud.....	61
Gambar 4.4 Analytical Maps Pengembangan Kompetensi Sumber Antifraud dan Mekanisme Antifraud .....	74
Gambar 4.5 Analytical Maps Kekurangan dan Kendala .....	92
Gambar 4.6 Analytical Maps Cara Mengatasi Kendala .....	98
Gambar 4.7 Analytical Maps saran mengatasi kendala dari peneliti.....	106



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Narasumber Wawancara .....	43
Tabel 4.1 Struktur Pegawai Inspektorat Kabupaten Sleman 2023 .....	57
Tabel 4.2 Matrix Coding Query Pengembangan Kompetensi dan Mekanisme Antifraud .....	75



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian .....	120
Lampiran 2 Wawancara Ibu Puji (30 Maret 2023) .....	121
Lampiran 3 Wawancara Ibu Puji (19 Mei 2023) .....	131
Lampiran 4 Wawancara Ibu Heri dan Ibu Pipit (18 Juli 2023).....	143
Lampiran 5 Wawancara Ibu Ngatiah (28 Juli 2023).....	161
Lampiran 6 Wawancara Ibu Puji (28 Juli 2023).....	172
Lampiran 7 Wawancara Ibu Ika (31 Juli 2023) .....	173
Lampiran 8 Wawancara Ibu Retno (01 Agustus 2023).....	182
Lampiran 9 Wawancara Bapak Inspektur Hery (01 Agustus 2023) .....	195
Lampiran 10 Framework Matrices Rumusan Masalah 1: Mekanisme Antifraud .....	200
Lampiran 11 Framework Matrices Rumusan Masalah 2: Pengembangan Kompetensi	283
Lampiran 12 Framework Matrices Rumusan Masalah 3: Kekurangan dan Kendala...	461
Lampiran 13 Framework Matrices Rumusan Masalah 4 Cara Mengatasi Kendala .....	503



## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan kompetensi sumber daya manusia *antifraud* Inspektorat Kabupaten Sleman dalam rangka menjalankan tugas *antifraud* di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sleman sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada narasumber dari Inspektorat Kabupaten Sleman dan mengumpulkan dokumen terkait pengembangan kompetensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala yang dialami oleh Inspektorat Kabupaten Sleman pada pengembangan kompetensi pegawai dalam rangka *antifraud* yaitu terbatasnya kuota peserta yang mengikuti setiap diklat, masih sedikit pengembangan kompetensi digital forensik, volume pekerjaan yang banyak dan belum maksimal menggunakan media online. Langkah yang ditempuh oleh Inspektorat Kabupaten Sleman dalam mengatasi kendala antara lain memberikan ruang untuk kreatif mengembangkan kompetensi bagi pegawai, melibatkan pelaksana tugas dalam rapat kerja untuk menentukan waktu penugasan dan objek pemeriksaan, menggunakan audit berbasis teknologi untuk mempercepat pekerjaan dan saling backup pekerjaan anggota tim yang belum selesai pekerjaannya.

**Kata kunci:** Auditor Internal Pemerintah, Pengembangan Kompetensi, *Antifraud*



## ABSTRACT

This research was conducted with the aim of understanding how the development of human resource competencies in the *antifraud* division of the Sleman District Inspectorate is carried out in order to perform *antifraud* duties within the Sleman District Government as Government Internal Supervisory Officials. This research was conducted using a qualitative research method with a case study approach. Data collection techniques involved interviews with informants from the Sleman District Inspectorate and the collection of documents related to competency development. The research findings indicate that there are several challenges faced by the Sleman District Inspectorate in developing employee competencies for *antifraud* purposes, including limited participant quotas for each training, limited development in digital forensic competencies, a high volume of work, and suboptimal use of online media. Steps taken by the Sleman District Inspectorate to address these challenges include providing space for creative competency development for employees, involving task implementers in work meetings to determine assignment times and examination objectives, using technology-based audits to expedite work, and mutual backup for team members whose work is incomplete.

**Keywords:** *Government Internal Auditor, competence development, Antifraud*

الجمهورية الإسلامية  
الاندونيسية



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Pengenalan Bab

Pada Bab ini peneliti menguraikan latar belakang masalah yang menjadi dasar bagi penelitian mengenai Strategi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia *Antifraud* Inspektorat Kabupaten Sleman. Pada bagian bab selanjutnya, peneliti menguraikan persoalan rumusan masalah yang diangkat mengenai penelitian ini. Kemudian peneliti menjelaskan tujuan, fokus, dan manfaat dari penelitian ini.

### 1.2 Latar Belakang

*Fraud* yang banyak terjadi dalam sektor publik telah meresahkan masyarakat. Berbagai macam *fraud* seperti korupsi, gratifikasi, penyelewengan realisasi anggaran dan semisalnya telah dilakukan oleh penghianat-penghianat dalam pemerintahan, tercatat *fraud* ditemukan dalam lembaga pemerintahan pusat, organisasi perangkat daerah sampai dalam perangkat desa. Masyarakat pada umumnya menolak keras tindakan *fraud* tersebut karena merugikan negara, memperlambat pertumbuhan ekonomi, meningkatnya krisis kepercayaan kepada lembaga sektor publik, dan bahkan dalam beberapa kasus mengancam keamanan dan kesehatan masyarakat, seperti tindakan *fraud* dalam sektor publik sosial. Sebagai contoh yang terjadi di pemerintahan pusat, pada akhir tahun 2020 saat masih pandemi Covid-19 terungkap skandal korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial -dulu- Juliari Peter Batubara dalam bentuk menerima suap lebih dari 32 miliar rupiah dari rekanan penyedia bantuan sosial (bansos) di kementerian sosial (kemensos) (BBC, 2021). Jatah bansos tersebut seharusnya diterima utuh oleh warga yang kesulitan ekonomi karena dampak Covid-19, namun mantan menteri sosial tersebut menilap setiap paket bansos tersebut. Akibatnya, warga harus menerima jatah bansos yang berkurang, kualitas bahan pangan yang buruk menjadi lebih buruk namun tetap harus mengolah itu karena hanya itu yang mereka punya. Kemudian contoh *fraud* ditingkat daerah, Mantan Kepala Desa Panisihan, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, periode 2016-2022 bernama Jawahir ditahan polisi karena tersangka menyalahgunakan anggaran desa yang menimbulkan kerugian negara senilai 784 juta rupiah (Detik, 2023). Dana yang diselewengkan adalah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2020 dan tahap 1 tahun anggaran 2021. Menurut Kasat Reskrim Polresta Cilacap, AKP Gubarcov mengatakan bahwa tersangka sengaja korupsi untuk kepentingan pribadi, kemudian tersangka juga diketahui memberikan tekanan kepada perangkat desa di bawahnya. Berdasarkan bukti yang telah ditemukan, uang korup itu telah ludes digunakan sehingga nihil untuk diamankan. Di D.I Yogyakarta, beberapa contoh kasus *fraud* juga terjadi dalam tiga tahun belakangan dan sebagian masih dalam proses pemeriksaan, seperti kasus suap Walikota Yogyakarta, kasus korupsi Stadion Mandala Krida, kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G, sampai kasus korupsi dana desa di Kalurahan Getas, Kabupaten Gunung Kidul. Perilaku-perilaku *fraud* yang dilakukan oleh pegawai atau pejabat pemerintahan membuat masyarakat heran dan bertanya-tanya terkait alasan pelaku *fraud* tersebut. Masyarakat menilai bahwa para pelaku yang merupakan pegawai atau pejabat pemerintahan tersebut tentu memiliki hidup yang sejahtera dengan posisi strategis di instansi dan gaji yang banyak.

ICW melalui dataindonesia.id (2023) menyebutkan bahwa sepanjang 2022 telah menindak 579 kasus korupsi di Indonesia, jumlah tersebut meningkat 8,63% dibandingkan tahun 2021. Dari kasus-kasus tersebut, jumlah tersangka korupsi di dalam negeri sebanyak 1.396 orang, jumlah ini juga naik hampir 20% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 1.173 tersangka. Dari 579 kasus itu sebanyak 155 kasus terjadi dalam sektor wilayah desa, 88 kasus dalam sektor utilitas, 54 kasus dalam sektor pemerintahan, 40 kasus dalam sektor pendidikan, kemudian terjadi juga dalam sektor sumber daya alam dan perbankan masing-masing sebanyak 35 kasus. *Transparency International* (2023) pada 31 Januari 2023 telah menerbitkan hasil Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun pengukuran 2023 secara serentak di seluruh dunia. Dalam hasil CPI tersebut, Wawan Suyatmiko, Deputi Sekjen *Transparency International* Indonesia mengungkapkan bahwa CPI Indonesia pada tahun 2022 mencatat skor 34/100, dan mendapat ranking ke 110 dari 180 negara, skor ini turun 4 poin dari tahun sebelumnya dan menjadi penurunan terburuk sejak 1995. Dalam skala ASEAN, Indonesia menduduki rangking 7 dari 11 negara, terpaut jauh dari negara serumpun Malaysia dan Singapura. Penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK/CPI) Indonesia pada tahun 2022 dikontribusikan oleh beberapa faktor yaitu risiko politik di suatu negara yang tercermin dalam *Political Risk Service (PRS) International Country Risk Guide*.

Laporan hasil CPI 31 Januari 2023 oleh *Transparency International* sebenarnya mengangkat tema ‘Korupsi, Konflik dan Keamanan’. Tema ini dipilih untuk membuat pemerintah di seluruh dunia melek dengan praktik korupsi yang dapat memperkeruh kehidupan sosial, stabilitas politik dan merusak ekonomi dan berujung pada terancamnya perdamaian dan ketertiban dunia. Di samping itu, tindakan-tindakan ekstrem berpotensi muncul akibat adanya praktek korupsi seperti terorisme, bahkan perang karena impunitas masih saja terjadi ketika pejabat publik maupun penegak hukum yang menjadi terdakwa korupsi.

Permasalahan *fraud* harus terus diberi perhatian dengan sungguh-sungguh bagi masyarakat dan menjadi materi pembelajaran untuk dapat mencegah, mengurangi, dan menangani *fraud* dengan baik. Upaya ini tidak boleh dianggap remeh oleh seseorang, terlebih pegawai dan pejabat pemerintahan negara dan daerah yang berkewajiban memberi kesejahteraan, menjaga keamanan, dan menjamin keadilan sosial bagi warga negara. Kunci untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan dan memastikan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya publik adalah dengan cara memberantas *fraud* dalam tubuh pemerintahan. Penting bagi penegak hukum beserta aparat-aparat pengawas pemerintahan untuk terus meningkatkan sistem deteksi, dan juga keahlian investigasi serta tegas dan tepat dalam membuat hukum dan menjatuhkan sanksi kemudian selalu memaksimalkan upaya pencegahan *fraud* yang merupakan upaya di garda terdepan untuk mengurangi, menjauhkan pemerintah dan rakyat dari segala bentuk tindakan *fraud* serta bibit-bibit *fraud*. Dalam rangka menciptakan sebuah negara yang berkeadilan, berintegritas, dan berdaya saing tinggi membutuhkan sikap yang tegas dan tidak memberikan celah toleransi terhadap korupsi dan *fraud* di pemerintahan. Keberhasilan pemberantasan *fraud* di sektor publik sangat berkaitan erat dengan komitmen politik yang kuat, kolaborasi yang bagus antar berbagai lembaga, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan perilaku *fraud*.

Pemerintah yang menjamin keutuhan prinsip integritas dan komitmen *antikorupsi* serta konsisten membangun sistem *antikorupsi* sebagaimana arahan *Transparency International Indonesia* pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada hasil laporan CPI adalah pekerjaan rumah atau bagian dari program kerja utama yang wajib diprioritaskan bagi pemerintah saat ini untuk mencegah dan mengurangi *fraud* agar tidak berkembang lagi di Indonesia pada periode-periode berikutnya. Usaha untuk memberantas dan

mencegah *fraud* dalam tubuh instansi dan lembaga penyelenggara negara harus terus dilakukan dengan kesungguhan maksimal walaupun dalam masa-masa bertambahnya pelaku *fraud*. Meskipun begitu tetap harus ada sekelompok orang khususnya yang memiliki kewajiban berkecimpung dengan *fraud* bekerja keras melaksanakan tugas mulia ini dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas *fraud* dengan mengacu pada UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Indonesia memiliki lembaga pengawas internal yang disebut Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang telah dibentuk dengan tujuan menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Salah satu target yang diharapkan adalah pemerintahan yang bebas *fraud*. Kepala BPKP Pusat, Muhammad Yusuf Ateh dikutip dari situs [bcpk.go.id](http://bcpk.go.id) menerangkan bahwa dalam kegiatan pencegahan *fraud* APIP memiliki *strategic positioning* yang tepat dalam membantu pencegahan *fraud* yang efektif. APIP yang juga menjalankan fungsi audit internal harus mampu menguatkan pengendalian risiko termasuk *fraud* dalam mengawal pencapaian tujuan organisasi pemerintah (2023).

Inspektorat Kabupaten Sleman merupakan salah satu APIP yang menjalankan peran mencegah *fraud* dalam organisasi perangkat daerah wilayah kabupaten. Salah satu program Inspektorat yang dilaksanakan adalah melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, sumber daya manusia yang didelegasikan oleh pihak manajemen inspektorat harus memiliki kapabilitas yang baik dalam memahami selak-beluk *fraud* khususnya pemahaman *fraud* yang berkaitan dengan berbagai bentuk kasus yang terjadi dan mungkin terjadi dalam sektor publik. Langkah yang krusial dalam pencegahan dan deteksi *fraud* harus dimulai dengan investasi yang tepat dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia, termasuk pelatihan etika, peningkatan kesadaran terhadap risiko dan pendalaman pemahaman proses pelayanan. Oleh karena itu, untuk mengetahui pembentukan kualitas sumber daya manusia yang akan menangani pencegahan dan deteksi *fraud* penelitian ini dilakukan dengan mengetahui Strategi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia *Antifraud* Inspektorat Kabupaten Sleman.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian ini, peneliti mengangkat rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme *antifraud* yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sleman di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sleman?

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman dan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencegah, mendeteksi, dan investigasi *fraud*. Kemudian mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan dan audit yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sleman untuk mengidentifikasi potensi *fraud*.

2. Bagaimana pengembangan kompetensi SDM yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Sleman dalam rangka *antifraud*?

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui apa saja program pelatihan dan pengembangan yang diberikan kepada SDM Inspektorat Kabupaten Sleman berkaitan dengan *antifraud*. Kemudian mengetahui bagaimana hubungan program pengembangan kompetensi SDM *antifraud* dengan pelaksanaan kegiatan *antifraud* Inspektorat Kabupaten Sleman.

3. Apa saja kendala dan kekurangan dalam pengembangan kompetensi SDM *antifraud* yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Sleman?

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui kendala dan kekurangan dalam pengembangan kompetensi SDM *antifraud* yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Sleman. Kemudian mengetahui persepsi dan kebutuhan SDM *antifraud* yang diungkapkan oleh pegawai Inspektorat Kabupaten Sleman.

4. Bagaimana strategi Inspektorat Kabupaten Sleman mengatasi kendala dan kekurangan dalam pengembangan kompetensi SDM *antifraud*?

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui langkah konkret apa yang telah diambil oleh Inspektorat Kabupaten Sleman untuk mengatasi kendala dan kekurangan dalam pengembangan kompetensi SDM *antifraud*. Kemudian agar

dapat memberikan rekomendasi bagi Inspektorat Kabupaten Sleman untuk membuat perencanaan pengembangan kompetensi SDM *antifraud* terbaru.

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang dan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme *antifraud* dalam praktek, serta pelaksanaan pengawasan dan audit berkaitan dengan *fraud* dan juga pelaporan *fraud* yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui strategi, program, dan proses pengembangan kompetensi SDM *antifraud* yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Sleman.
3. Untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Sleman dalam mengelola dan mengembangkan kompetensi SDM *antifraud* yang menghambat proses pengembangan kompetensi.
4. Untuk memberikan rekomendasi pemecahan masalah, membuat strategi-strategi dan perencanaan program-program dalam pengembangan kompetensi SDM *antifraud* Inspektorat Kabupaten Sleman

#### 1.5 Fokus Penelitian

Dalam Penelitian ini, untuk mencapai tujuan penelitian dan menjawab masalah yang telah dirumuskan, peneliti menentukan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Tempat Penelitian : Inspektorat Kabupaten Sleman yang berlokasi di Jalan Roro Jonggrang Nomor 2 Beran Tridadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (Telepon/Fax: 0274 866820).
2. Aspek Penelitian : Strategi pengembangan kompetensi sumber daya manusia *antifraud* di lembaga APIP Inspektorat Kabupaten Sleman dalam rangka pemberantasan *fraud* di organisasi sektor publik perangkat daerah selama

tahun 2020-2023.

3. Objek Penelitian : Pihak atau divisi bagian yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program *antifraud*, Pihak atau divisi bagian yang bertanggung jawab atas pengembangan kompetensi sumber daya manusia
4. Waktu Penelitian : 20 Februari 2023 – 15 Agustus 2023

## 1.6 Manfaat Penelitian

### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada peneliti berupa peningkatan kemampuan yaitu peneliti dapat memperoleh pemahaman yang aktual tentang pengembangan kompetensi sumber daya manusia *antifraud* di aparat pengawas intern pemerintah. Kemudian pengembangan keterampilan yaitu melalui proses penelitian ini dapat mengembangkan keterampilan dalam melakukan penelitian, menganalisis data, mengelola waktu dan kemampuan komunikasi secara lisan dan tulisan.

### 2. Bagi Inspektorat Kabupaten Sleman

Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada inspektorat kabupaten Sleman berupa membantu inspektorat dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia *antifraud*. dengan memahami strategi yang efektif, inspektorat dapat mengadopsi pendekatan yang tepat dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang ada untuk menghadapi tantangan pencegahan *fraud*.

### 3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam ruang ilmiah yaitu dengan memberikan pengetahuan akademik tentang pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam mencegah *fraud* dan diharapkan hasil penelitian ini dapat dipublikasikan dalam media ilmiah atau disajikan dalam

konferensi ilmiah sehingga berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dibidang tersebut. Kemudian untuk lembaga pemerintah lainnya yang sejenis yaitu mereka dapat mengadopsi strategi yang relevan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki untuk memperkuat upaya pencegahan *fraud*.





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengenalan Bab

Pada bab ini, peneliti menjelaskan landasan teori dan pengertian yang mendukung serta berkaitan dengan istilah-istilah dan masalah penelitian. Tinjauan pustaka dalam bab ini diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, artikel, situs resmi, dan juga beberapa penelitian terdahulu. Pembahasan disajikan dalam bentuk definisi umum seperti, auditor internal pemerintah, *fraud* dan pengembangan kompetensi.

#### 2.2 Audit

##### 2.2.1 Definisi Audit

Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2015) audit adalah tindakan pengumpulan serta evaluasi bukti dengan tujuan menilai dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi dengan standar yang telah ditetapkan. Tindakan ini dilakukan oleh individu yang memiliki kompetensi dan menjalankannya secara independen.

Menurut Mulyadi (2014) audit merupakan langkah sistematis yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti dengan obyektivitas terkait peristiwa ekonomi. Proses ini bertujuan untuk menentukan sejauh mana kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan dan untuk memberikan laporan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait

Menurut Agoes (2012) audit adalah tindakan pemeriksaan yang dilakukan secara teliti dan terstruktur terhadap laporan keuangan yang telah disiapkan oleh manajemen, termasuk catatan-catatan akuntansi dan bukti-bukti pendukungnya. Pemeriksaan ini dilakukan oleh pihak yang independen dengan maksud memberikan penilaian mengenai kesesuaian dan kepatuhan laporan keuangan tersebut

Berdasarkan beberapa definisi yang disebut diatas, dapat disimpulkan bahwa audit adalah langkah yang dilakukan seseorang yang ahli untuk

menghimpun dan menilai bukti dengan maksud memberikan penilaian mengenai kelayakan suatu laporan keuangan untuk mengkomunikasikan nya kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Orang yang melakukan audit disebut sebagai auditor sedangkan pihak yang sedang diperiksa (audit) disebut sebagai auditi.

### 2.2.2 Tujuan Audit

Menurut Arens *et al.* (2015) tujuan dari audit adalah memberikan para pengguna laporan keuangan pendapat yang diberikan oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan tersebut disajikan dengan tepat dalam segala aspek yang penting dan sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat yang diberikan oleh auditor ini bertujuan untuk meningkatkan keyakinan pengguna laporan terhadap keandalan laporan keuangan tersebut.

Tuanakotta (2014) menyebutkan bahwa tujuan audit adalah meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap laporan tersebut. Hal ini dicapai melalui pemberian pendapat oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dalam semua aspek yang penting.

Berdasarkan penjelasan dari tujuan audit oleh dua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa istilah audit merujuk kepada audit laporan keuangan sementara diketahui ada jenis-jenis audit selain audit laporan keuangan. Namun tujuan audit dapat simpulkan dengan arti untuk meningkatkan kepercayaan pihak-pihak yang membutuhkan laporan atas suatu peristiwa yang telah terjadi baik itu keuangan maupun kinerja manajemen dan teknis.

### 2.2.3 Jenis-Jenis Audit

Setiap proses pemeriksaan dimulai dengan menetapkan tujuan serta menentukan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan dan standar yang harus diikuti oleh pemeriksa. Menurut Arens *et al.* (2015) membagi audit menjadi tiga jenis yaitu:

a. Audit Operasional

Audit operasional dilakukan dengan tujuan menilai efisiensi dan efektivitas dari tindakan operasional yang dilakukan di berbagai bagian atau divisi perusahaan. Hasil dari audit operasional berupa rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan operasional.

b. Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan adalah suatu pemeriksaan yang bertujuan untuk menilai apakah sebuah perusahaan telah mematuhi pedoman, prosedur, peraturan, atau regulasi yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

c. Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan adalah audit yang paling umum dilakukan oleh seorang auditor. Audit laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini terkait kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku.

Agoes (2014) menyebutkan dua jenis audit yang berbeda dari menurut Arens dalam empat jenis audit yang disebutkan yaitu:

a. Pemeriksaan Internal

Audit internal perusahaan adalah proses pemeriksaan yang mencakup evaluasi laporan keuangan, pencatatan akuntansi perusahaan, serta tingkat kepatuhan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Secara umum, pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal biasanya lebih terperinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

b. *Computer Audit*

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan yang menggunakan sistem Pengolahan Data Elektronik (*Electronic Data Processing/EDP*) untuk mengolah data akuntansi perusahaan.

Dalam penerapan, ada dua metode yang dapat dilakukan auditor:

1. *Audit Around the Computer*

Auditor hanya memeriksa bagian input dan output dari *EDP* sistem tanpa melakukan uji coba terhadap proses sistem *EDP* tersebut.

2. *Audit Through the Computer*

Dalam hal ini auditor melakukan tes proses *EDP* selain memeriksa input dan output. Pengetesan ini disebut *compliance test* yang dilakukan memakai *Generalized Audit Software*, *Audit Command Language (ACL)*, dan lain-lain.

Jenis audit yang tercantum dalam SPKN BPK RI (2017) atau lingkup pemeriksaan BPK RI (UU RI No.15 tahun 2004 Pasal 4) adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan keuangan adalah tindakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan maksud untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar dalam segala aspek yang penting sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia berdasarkan basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

b. Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja adalah suatu tindakan yang melibatkan evaluasi aspek ekonomi dan efisiensi, bersama dengan penilaian terhadap efektivitas yang biasanya dilaksanakan oleh badan pengawasan internal pemerintah demi kepentingan manajemen. Dalam proses pemeriksaan kinerja ini, pemeriksa juga menilai tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta efektivitas pengendalian internal. Selama pemeriksaan kinerja, pihak pemeriksa mengadopsi pendekatan yang objektif dan terstruktur dalam mengevaluasi berbagai jenis bukti guna

memberikan penilaian yang independen terhadap kinerja entitas atau program/kegiatan yang sedang diperiksa.

Contoh pemeriksaan kinerja atas hasil dan efektivitas program serta pemeriksaan atas ekonomi dan efisiensi adalah penilaian atas:

- 1) Sudah sejauh mana pencapaian dari tujuan peraturan perundang-undangan
- 2) Alternatif lain yang mungkin diperlukan agar dapat meningkatkan kinerja program atau menghilangkan faktor-faktor yang menghalangi efektivitas program
- 3) Komparasi antara biaya dan manfaat atau efektivitas biaya dan program
- 4) Sejauh mana program memenuhi kriteria hasil yang diharapkan atau membuat dampak yang tidak diharapkan
- 5) Sejauh mana program duplikasi, bertumpang tindih atau bertentangan dengan program lain yang semisalnya
- 6) Sejauh mana entitas yang diperiksa telah mematuhi ketentuan pengadaan yang masuk akal
- 7) Validitas dan keandalan standar hasil dan efektivitas program, atau ekonomi dan efisiensi
- 8) Validitas, keandalan, dan relevansi informasi keuangan yang dibuat dengan kinerja suatu program.

#### c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) adalah tindakan pemeriksaan yang ditujukan untuk menyimpulkan mengenai suatu aspek tertentu yang sedang diperiksa. PDTT dapat mengambil berbagai bentuk, seperti eksaminasi, ulasan, atau pelaksanaan prosedur yang telah disetujui. PDTT mencakup beragam jenis pemeriksaan, termasuk pemeriksaan keuangan, investigatif, dan pemeriksaan sistem pengendalian internal.

#### 2.2.4 Jenis-Jenis Auditor

Menurut Arens, Elder, dan Beasley yang diterjemahkan oleh Jusuf (2012) secara umum auditor terdiri dari empat jenis yaitu:

### 1. Auditor independen (akuntan publik)

Seorang auditor yang bekerja secara independen dan biasanya berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan historis yang telah diterbitkan oleh perusahaan.

### 2. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah merupakan instansi pemerintah yang independen untuk memeriksa keuangan, program, dan kinerja suatu fungsi dan perangkat pemerintah lainnya. Di Indonesia auditor pemerintah seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat pada setiap departemen pemerintah dan setiap daerah.

### 3. Auditor Pajak

Auditor pajak berasal dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang bertugas untuk memberlakukan peraturan pajak.

### 4. Auditor Internal

Auditor internal merupakan karyawan yang ditempatkan oleh perusahaan untuk melakukan audit internal dalam rangka membantu manajemen. Tugas-tugas auditor internal sangat bervariasi dan bergantung pada entitas yang memperkerjakannya.

Umumnya, pemangku kepentingan tidak hanya mengandalkan informasi yang telah diaudit oleh auditor internal, tetapi juga oleh auditor independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP).

## 2.3 Auditing Sektor Publik

Audit di sektor publik adalah langkah pengidentifikasian permasalahan, analisis dan penilaian yang dilakukan secara independen, obyektif, dan dengan tingkat profesionalitas tinggi sesuai dengan pedoman pemeriksaan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi keakuratan, ketelitian, kredibilitas, dan keandalan informasi

terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan dalam organisasi sektor publik (Mahmudi, 2016)

#### 2.4 Auditor Internal Pemerintah

Audit dalam lembaga pemerintah merupakan lembaga independen, obyektif, dan profesional yang melibatkan pengenalan permasalahan, analisis serta penilaian bukti dengan merujuk pada standar audit. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi akurasi, ketepatan, kepercayaan, kinerja, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas serta fungsi lembaga pemerintah (Tambunan, 2016).

Menurut Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (2014) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, audit intern merupakan tindakan independen serta objektif yang mencakup pemberian keyakinan dan konsultasi, yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan efisiensi operasional suatu entitas organisasi. Dalam hal ini, kegiatan tersebut berperan dalam membantu organisasi mencapai sasaran mereka dengan menerapkan pendekatan yang terstruktur dan terencana untuk mengevaluasi serta meningkatkan efisiensi dari proses manajemen risiko pengendalian, dan tata kelola di sektor publik.

##### 2.4.1 Aparat Pengawas Intern Pemerintah

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 tahun (2010), “Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) merupakan aparat yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawas yang lainnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun (2008b), APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi lembaga pemerintah termasuk pertanggungjawaban keuangan negara. APIP melakukan pengawasan internal melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya”.

Asosiasi Auditor Intern Pemerintah (AAIPI) Indonesia menyebutkan dalam anggaran dasar asosiasi yang berlaku sejak tahun 2012 bahwa yang definisi dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/unit pengawasan pada kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

APIP memiliki peran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yaitu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Kemudian memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

#### 2.4.2 Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan menyebutkan bahwa BPKP dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan nasional pengawasan internal akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan lintas sektoral, kegiatan perbendaharaan umum negara berdasarkan penetapan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan presiden. Kemudian penyelenggaraan pemeriksaan, penelaahan, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pendapatan negara/daerah, dan pertanggungjawaban belanja nasional dan/atau kegiatan lain yang keuangannya seluruhnya atau sebagian dibiayai oleh pemerintah. Kemudian anggaran dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta pertanggungjawaban



pembiayaan keuangan negara daerah. Lalu pengawasan internal terhadap perencanaan dan pelaksanaan barang milik negara/daerah.

#### 2.4.3 Inspektorat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 peran inspektorat adalah menjalankan tugas pengawasan internal, termasuk audit, review, evaluasi, pemantauan, serta aktivitas pengawasan lainnya terhadap tanggung jawab dan fungsi organisasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien, sebagai bentuk tanggung jawab dari pimpinan.

#### 2.4.4 SPIP

Sistem Pengendalian Intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah “Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”. SPIP terdiri dari lima unsur yaitu lingkungan pengendalian penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern.

Adapun penyelenggaraan SPIP terintegrasi terdiri dari tiga komponen yang akan mempengaruhi kualitas penyelenggaraan SPIP yaitu komponen penetapan tujuan, struktur dan proses, dan pencapaian tujuan SPIP. Penilaian pelaksanaan SPIP dievaluasi berdasarkan nilai kematangan SPIP. Nilai kematangan SPIP mencerminkan sejauh mana SPIP telah mencapai tujuan pengendalian yang mencakup efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan, keandalan, pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (BPKP, 2021). Skor kematangan penyelenggaraan SPIP ditentukan dengan menghitung rerata tertimbang dari hasil evaluasi.

Cara untuk meningkatkan nilai maturitas (kematangan) SPIP membutuhkan lima unsur SPIP yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko,

kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Lingkungan pengendalian adalah sesuatu yang harus ditegakkan pertama karena yang akan menggambarkan kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern, lingkungan pengendalian yang akan mencerminkan etika umum, kesadaran, dan perilaku pejabat, manajemen, serta pihak lain dalam organisasi mengenai pentingnya pengendalian internal dalam organisasi (Moeller, 2011). Tanpa pengendalian internal yang efektif, empat komponen lainnya mustahil menghasilkan pengendalian internal yang baik. Untuk menginternalisasi dan mengimplementasikan SPIP maka membutuhkan lingkungan pengawasan yang baik dan efektif (Andhika, 2017). Upaya tersebut harus sesuai pendekatan BPKP yang benar sebagai wali dan badan eksekutif otoritas audit di masing-masing otoritas (Leke *et al.*, 2022)

## 2.5 *Fraud*

### 2.5.1 Definisi *Fraud*

Albrecht *et al.*, (2012) mengatakan bahwa secara umum *fraud* mencakup keseluruhan sarana dari rancangan kecerdasan manusia untuk digunakan seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan cara yang palsu. Tidak ada aturan yang pasti dan merata untuk ditetapkan sebagai definisi dari *fraud*, dikarenakan aturan tersebut mencakup cara mengejutkan, kelicikan, tipu daya, serta dengan cara-cara lain yang membuat orang lain ditipu. Sebuah ungkapan yang pernah dibuat oleh Lord Acton dalam menghubungkan korupsi dan kekuasaan, yakni *power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*, yakni korupsi cenderung berasal dari kekuasaan, dan kekuasaan yang mutlak cenderung korupsi yang tidak terbatas (Djaja, 2008).

Yanti dan Agustina, (2012) menjelaskan bahwa *fraud* adalah penyajian fakta yang menyesatkan, kebohongan, ketidakjujuran serta kejahatan yang berasal dari individu, korporasi maupun manajemen. Kebohongan, ketidakjujuran, kecurangan dan memperoleh keuntungan dengan mengambil keuntungan dari orang lain secara tidak baik. Secara garis besar, *fraud* dapat diartikan sebagai tindakan kecurangan yang dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri maupun kelompok.

Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia mendefinisikan *fraud* sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau dengan niat untuk menghilangkan uang dan atau harta seseorang dengan cara melakukan penipuan (SKKNI, 2009). Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 362 menjelaskan *fraud* adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dengan diaturnya *fraud* dalam undang-undang membuktikan dengan jelas bahwa sebuah kecurangan akan mendapatkan perlawanan hukum yang di atur oleh negara.

#### 2.5.2 Jenis-Jenis *Fraud*

Rahayu dan Suhayati (2013) Secara skematis, *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)* menggambarkan cabang-cabang dari *fraud* sebagai berikut:

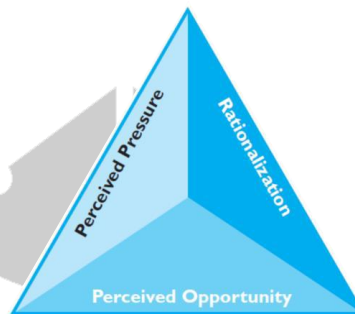
1. Penipuan Aset (*Aset Misappropriation*) dibagi menjadi dua kategori:
  - a. Penyalahgunaan aset dalam bentuk uang tunai. Misalnya: penyelewengan uang tunai, penerimaan cek dari pelanggan, pemotongan gaji pemasok.
  - b. Penyalahgunaan aset non-cash. Misalnya: penggunaan fasilitas dari perusahaan untuk kepentingan pribadi.
2. *Fraudulent Statements in financial statement -ACFE*. Jenis *fraud* ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu keuangan dan non-keuangan. Segala tindakan yang membuat laporan keuangan tidak sesuai dengan laporan keuangan yang asli. Misalnya bukti transaksi yang dipalsukan atau transaksi besar atau transaksi lebih kecil yang diakui dari yang sebenarnya.
3. Korupsi (*Corruption*). ACFE membagi jenis-jenis perbuatan korupsi menjadi 2 kelompok, yaitu:
  - a. Benturan kepentingan (*conflict of interest*) sebagai contoh: seorang atau sekelompok orang di dalam perusahaan (biasanya level manajemen) memiliki hubungan khusus dengan eksternal (baik itu orang atau badan usaha) saat mengambil suatu

keputusan lebih mementingkan dan melindungi kepentingannya yang dapat merugikan perusahaan.

- b. Menyuap atau menerima suap, imbal balik (*briberies and excoiation*) merupakan tindakan kecurangan atau *fraud*. Seperti menerima komisi, membocorkan rahasia perusahaan apapun bentuknya, kolusi dalam tender tertentu.

### 2.5.3 Faktor Terjadinya *Fraud*

Gambar 2.1 *Fraud Triangle*



Sumber: Albrecht et al. (2012)

Menurut SAS 99 (AU 316) yang dikutip oleh Tunggal (2016) terdapat tiga faktor seseorang melakukan kecurangan yang dikenal dengan istilah *fraud triangle*, yaitu:

1. Tekanan (*Pressure*)

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan seseorang berani melakukan tindakan kecurangan atau *fraud* adalah tekanan ekonomi atau biasa juga dikarenakan jaminan kesejahteraan yang ditawarkan perusahaan ataupun organisasi tempat dia bekerja kurang ataupun pola hidup yang bermewah-mewahan.

2. Kesempatan (*Opportunity*)

Faktor yang disebabkan karena adanya suatu kesempatan. Setiap kedudukan memiliki kesempatan untuk melakukan kecurangan dan dapat didukung dengan memiliki jabatan yang tinggi dengan memanfaatkan kesempatan untuk mengambil suatu keuntungan pribadi atau kelompok.

3. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Pembenaran yang dilakukan yang akan memengaruhi pihak lain dan setuju dengan tindakan yang telah dibuatnya.

#### 2.5.4 Pencegahan *Fraud*

Pencegahan kecurangan (*Fraud*) adalah penggunaan pengendalian pencegahan yang dapat mencakup berbagai aspek seperti kebijakan, prosedur, pelatihan, dan komunikasi, yang semuanya diciptakan untuk menghindari terjadinya penipuan. Meskipun pengendalian pencegahan tidak dapat menjamin sepenuhnya mencegah kecurangan, mereka berperan sebagai lapisan pertahanan awal yang penting dalam mengurangi risiko terjadinya penipuan (Enderson, 2013)

Pencegahan *fraud* menurut Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau biasa disebut Pusklatwas BPKP (2008) adalah “pencegahan *fraud* merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud* (*fraud triangle*)”, yaitu:

1. Peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat *fraud* diperkecil.
2. Tekanan kepada pegawai diturunkan agar pegawai dapat memenuhi kebutuhannya.
3. Menghilangkan alasan untuk membenarkan atau membenarkan kecurangan atau *fraud*.

Menurut Stamler, dkk (2014) menyatakan bahwa: “Pencegahan didasarkan pada desain kontrol untuk mengurangi risiko kecurangan terhadap korporasi atau pelanggaran pidana atas nama korporasi (khususnya, penyuapan dan pencucian uang) agar tidak terjadi”.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan pencegahan *fraud* adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menekan segala risiko kecurangan dan memperkecil peluang yang ada agar dapat mengurangi kerugian apabila terjadi *fraud*.

### 2.5.5 Deteksi *Fraud*

Mendeteksi kecurangan adalah upaya dalam memperoleh kecukupan informasi awal adanya indikasi tindakan kecurangan dan mempersempit ruang gerak pelaku kecurangan yakni ketika pelaku telah menyadari aksinya telah diketahui sehingga terlambat dalam berkelit (Hardinto et al., 2018). Sebagian besar *fraud* yang tidak terdeteksi dikarenakan kecurangan tersebut dimulai dari jumlah yang sangat kecil yang dilakukan secara konsisten baru kemudian akan berhenti sejenak jika ada ancaman yang datang dalam bentuk audit. Barulah jika ancaman yang datang tidak terdeteksi maka kecurangan itu akan berlanjut dengan jumlah yang jauh lebih besar.

Deteksi *fraud* oleh internal auditor merupakan identifikasi indikator-indikator *fraud* yang mengarahkan perlu tidaknya dilakukan pengujian (Pusdiklatwas, 2008). Kemampuan mendeteksi *fraud* adalah sebuah kecakapan atau keahlian yang dimiliki auditor untuk menemukan indikasi mengenai *fraud*. Mendeteksi *fraud* adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindakan *fraud*, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku kecurangan (Kumaat, 2011). Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) penerapan Whistle-blowing Systems merupakan mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran (KNKG, 2008). Oleh karena itu pendeteksian *fraud* sebagai upaya deteksi awal harus dilakukan agar tindakan *fraud* dapat dicegah untuk tidak dilakukan dan untuk mengetahui perlu tidaknya dilakukan pengujian.

## 2.6 Audit Forensik

Audit forensik atau yang biasa dikenal dengan Akuntansi Forensik adalah ilmu akuntansi yang luas dalam penerapannya, termasuk auditing dan hukum di dalamnya guna menyelesaikan perkara hukum baik yang terjadi di dalam maupun luar pengadilan (Tuanakotta, 2016). Wiratmaja (2010) mendefinisikan audit forensik sebagai prosedur standar audit yang diperluas ke arah pengumpulan bukti dalam persidangan di pengadilan. Islam et al., (2011) mengatakan bahwa audit forensik merupakan analisis akuntansi yang cocok untuk presentasi di pengadilan dalam mengungkapkan kemungkinan adanya penipuan.

Definisi audit forensik juga disampaikan oleh Kayo (2013) bahwa audit forensik merupakan ilmu dalam mengumpulkan dan menyajikan informasi dengan format yang bisa diterima oleh hukum di pengadilan untuk melawan pelaku kejahatan ekonomi. Sedangkan Enofe et al., (2015) mengatakan audit forensik sebagai gabungan antara akuntansi, investigasi, kriminologi, serta keterampilan dalam litigasi yang bertujuan menganalisis, mengidentifikasi serta mengkomunikasikan bukti atas pokok peristiwa yang dilaporkan. Dalam ukuran pembuktian di persidangan auditor forensik lebih menekankan pada penilaian kesesuaian bukti atau temuan audit (Wiratmaja, 2010). Lebih lanjut Kayo (2013:46) mengatakan bahwa hal ini terjadi karena adanya perpaduan antara akuntansi, auditing dan hukum. Berdasarkan pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa audit forensik adalah bidang ilmu yang tidak terbatas pada masalah keuangan saja melainkan perpaduan antara ekonomi dan hukum.

Dengan adanya kasus-kasus korupsi di Indonesia yang semakin banyak terjadi maka kebutuhan akan penggunaan audit forensik juga semakin tinggi. Kebutuhan tersebut tidak membatasi pada kalangan pemerintah saja, namun di sektor swasta ataupun individu juga bisa menggunakan jasa audit forensik dalam pemecahan atau penelusuran adanya indikasi terjadinya tindakan *fraud*. Audit forensik secara mendalam dapat mencakup review dokumentasi keuangan dengan tujuan tertentu yang bisa saja berkaitan dengan masalah litigasi (Kayo, 2013:46). Secara garis besar Tuanakotta (2009) menegaskan bahwa wilayah akuntansi terkait dengan hitung-menghitung, sementara wilayah audit adalah pada saat memastikan adanya kewajaran serta kebenaran dalam penyajian laporan. Misalnya pada kasus korupsi, penghitungan besaran kerugian keuangan negara masuk ke ranah akuntansi. Sedangkan untuk ranah audit untuk tindakan korupsi adalah pada saat menelusuri pelaku, bagaimana korupsi dilakukan, serta kapan, di mana dan mengapa korupsi dilakukan.

#### 2.6.1 Pekerjaan Audit Forensik

Auditor forensik atau auditor investigatif harus mampu melihat dan menelusuri hingga dibalik angka-angka yang terlihat, serta dapat mengaitkan dengan kondisi bisnis yang tengah berkembang agar dapat mengungkapkan informasi yang lebih akurat, objektif serta dapat menemukan adanya

penyimpangan (Miqdad, 2008). Selanjutnya Miqdad (2008) menguraikan pekerjaan audit forensik sebagai berikut:

a. *Fraud Auditor*

*Fraud* auditor memiliki peran dalam mengoreksi dan mencegah terjadinya kecurangan yang umumnya terjadi di dunia bisnis. Keahlian tersebut dapat dikembangkan diantaranya untuk melakukan laporan keuangan terkait adanya *window dressing* yang menyesatkan investor dalam pengambilan keputusan.

b. *Expert Witness* (Saksi Ahli)

Jika diminta oleh penyidik untuk memberikan keterangan keahlian sesuai dengan kompetensi yang dimiliki diharapkan memperjelas perkara pidana khusus yang sedang ditangani oleh penyidik.

c. Konsultan Litigasi

Auditor forensik berperan sebagai konsultan litigasi terbatas dalam memberikan nasihat dan konsultasi pada pengacara.

## 2.7 Audit Investigatif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Setiawan (2019) investigatif adalah penyelidikan yang dilakukan dengan merekam atau mencatat fakta serta melakukan percobaan, peninjauan dan sebagiannya yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penyidikan. Pemeriksaan yang mendalam sangat perlu dilakukan untuk mengidentifikasi adanya tindakan kecurangan, dan audit investigatif adalah salah satu cara. Secara sederhana investigatif dapat didefinisikan sebagai upaya pembuktian. Secara umum pembuktian tersebut berakhir di pengadilan dengan ketentuan hukum yang berlaku (Tuanakotta, 2016). Menurut Ihulhaq et al., (2019) audit investigatif adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan dengan pembatasan periode, lingkup tertentu, di spesifik kan pada area pertanggungjawaban yang menjadi dugaan indikasi penyalahgunaan wewenang atau mengandung inefisiensi berupa rekomendasi dari hasil audit untuk ditindaklanjuti tergantung pada tingkat penyimpangan wewenang yang ditemukan.

Sesuai dengan peraturan BPKP No. 17 Tahun 2017, audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti



secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen dalam mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku (BPKP, 2019). Menurut Wiratmaja (2010) forensik investigatif merupakan teknik-teknik auditing yang ditujukan dan dirancang khusus untuk diterapkan dalam mencari serta menemukan bukti dan pembuktian dari suatu pengungkapan kasus keuangan yang dapat dipergunakan dalam proses persidangan di pengadilan.

Bramastyo et al., (2014) menjelaskan bahwa audit investigatif berjalan berdasarkan temuan mengenai *fraud* (kecurangan) atau adanya laporan sehingga salah satu bentuk penegakan hukum yang dilakukan secara represif disebut audit investigasi. Tujuan dari audit investigatif adalah upaya membuktikan suatu kasus yang berakhir di pengadilan sehingga hasil audit investigatif yang bersifat reaktif atau proaktif harus dapat digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai dasar penyelidikan dan penyidikan kejahatan (Hardinto et al., 2018).

Selain itu, Anggraini et al., (2019) mengatakan bahwa audit investigatif bertujuan untuk melakukan identifikasi dan pengungkapan kecurangan atau kejahatan oleh karena itu proses audit investigatif berbeda dengan audit keuangan, audit kinerja maupun audit dengan tujuan tertentu baik dari segi pendekatan, prosedur, maupun teknik yang digunakan. Penggunaan audit investigatif tersebut bersifat investigatif yang mana menghubungkan peraturan perundang-undangan dengan kemampuan audit di ilmu ekonomi sehingga dapat dipertahankan dalam proses administratif maupun peninjauan Yudisial (Bramastyo et al., 2014).

Audit investigatif dalam kaitannya terkait pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilihat dari bagaimana bukti-bukti itu dapat dikumpulkan kemudian dianalisis berdasarkan data-data yang diperoleh untuk nantinya diperhitungkan berdasarkan ilmu audit yang bertujuan untuk menemukan hubungan suatu perbuatan yang disinyalir berpotensi adanya tindak pidana korupsi.

Tuanakotta (2016) mengatakan bahwa audit investigatif dalam pelaksanaannya selalu diarahkan untuk menentukan kebenaran dari sebuah permasalahan melalui proses pengujian, pengumpulan dan evaluasi terhadap bukti-bukti yang relevan atas perbuatan *fraud* serta untuk pengungkapan fakta-fakta *fraud*, hal ini mencakup:

- a. Adanya perbuatan *fraud* (Subjek)
- b. Mengidentifikasi pelaku *fraud* (Objek)
- c. Menjelaskan modus operasi *fraud* (Modus)
- d. Mengkuantifikasi nilai kerugian dan dampak yang ditimbulkannya

## 2.8 Sumber Daya Manusia

Menurut Samsuni (2017) untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif diperlukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolan terhadap SDM. Keberhasilan pencapaian tujuan organisasi ditentukan oleh kemampuan SDM dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap aktivitas organisasi. SDM merupakan suatu modal dasar dan yang utama bagi organisasi, tanpa adanya SDM maka roda organisasi tidak akan bergerak (Yusuf, 2015).

Dalam kaitannya dengan kinerja SDM untuk mencegah, mendeteksi, memastikan terjadi atau tidaknya *fraud*, menghitung kerugian materiil atas terjadinya *fraud* serta membantu proses penyelesaian hukum dan upaya pemulihan aset melalui penelusuran aset, menurut LPFA (Lembaga Pengembangan *Fraud* Auditing) diperlukan SDM yang berkompentensi dalam bidang audit forensik yang sesuai dengan Standar 55 Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Audit Forensik (SKKNI AF). Kompetensi yang harus dimiliki adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan dan pendeteksian *fraud*
2. Pelaksanaan audit forensik
3. Pemberian pernyataan ahli
4. Penghitungan kerugian dan penelusuran aset.

## 2.9 Pengembangan Kompetensi

Dalam melaksanakan tugas *antifraud*, dari pencegahan, pendeteksian, dan investigasi, seorang auditor wajib memiliki kompetensi untuk melakukan pekerjaan tersebut agar menciptakan hasil yang diharapkan yaitu berkurangnya *fraud* dan penanganan kasus dengan mekanisme yang benar. Kompetensi adalah kecakapan untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai profesi yang dimiliki (Agoes & Hardana, 2009). Dengan seseorang memiliki kompetensi dalam menjalankan suatu tugas maka hasilnya akan berkualitas. Kompetensi juga didefinisikan sebagai kemampuan kinerja dalam area

tertentu yang dibutuhkan oleh pekerja baik itu kemampuan kognitif, etik, dan psiko motorik (Ashworth & Saxton, 1990).

### 2.9.1 Karakteristik Kompetensi Auditor

Seorang auditor harus memiliki karakteristik dalam pengetahuan yang luas terkait prinsip-prinsip pemeriksaan serta pengetahuan ilmu hukum baik perdata maupun pidana yang dibutuhkan (Kayo, 2013). Spencer dan Spencer menyebutkan karakteristik kompetensi auditor yang dikutip oleh Kayo (2013) yaitu:

- a. *Motives*, adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang dalam keadaan berpikir secara konsisten.
- b. *Traits*, adalah watak yang menjadi ciri perilaku seseorang dan cara dalam merespon sesuatu.
- c. *Self-Concept*, adalah nilai-nilai yang dimiliki oleh seseorang.
- d. *Knowledge*, adalah pengetahuan berupa informasi yang dimiliki seseorang.
- e. *Skills*, adalah kemampuan secara fisik dan mental seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan.

Pengetahuan (*Knowledge*) dan keahlian (*Skills*) merupakan karakteristik yang paling menonjol sebagai kompetensi yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan motivasi (*Motives*) dan watak (*Trait*) cenderung dikaitkan dengan kepribadian seseorang. Pengetahuan dan keahlian dapat dikembangkan dengan memaksimalkan program-program pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia. Sementara motivasi dan watak sangat berbeda cara untuk mengembangkannya karena merupakan kepribadian seseorang. Cara yang efektif untuk kedua kompetensi tersebut adalah seleksi karakteristik yang dibutuhkan (Azmy, 2015).

Auditor harus memiliki kemampuan dalam berpikir kognitif, keahlian detektif dan investigatif, memiliki kemampuan dalam beroperasi pada situasi yang tidak terstruktur, memiliki pendidikan, terlatih dan berpengalaman (Okoye & Akamobi, 2009).

## 2.9.2 Prinsip-Prinsip Dasar Kompetensi Auditor

Dasar-dasar kompetensi auditor melibatkan asumsi-asumsi mendasar, prinsip-prinsip yang umumnya diterima, dan persyaratan yang diterapkan dalam pembentukan kompetensi auditor berdasarkan tingkat jabatan mereka. Prinsip-prinsip ini membentuk fondasi kompetensi seorang auditor. Ada tiga kategori yang tergolong sebagai prinsip-prinsip dasar kompetensi sebagai berikut (BPKP, 2010):

### a. Kewajiban Auditor

- 1) Untuk melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan tingkat jabatannya, auditor harus memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan
- 2) Untuk memastikan bahwa kompetensi mereka sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perubahan dalam lingkungan pengawasan, auditor harus secara terus-menerus meningkatkan kemampuan mereka melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.

### b. Kewajiban APIP

- 1) Dalam setiap tugas pengawasan yang diberikan, APIP harus memastikan bahwa tim yang terlibat secara bersama-sama memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas tersebut.
- 2) Menyempurnakan kemampuan auditor sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi dalam pengawasan

### c. Kerangka Konseptual Standar Kompetensi Auditor

- 1) Definisi standar kompetensi auditor. Panduan kompetensi yang menjelaskan tingkat minimum kemampuan yang diperlukan oleh seorang auditor, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk berhasil menjalankan tugas-tugas dalam peran auditor fungsional
- 2) Kompetensi umum. Untuk menjadi seorang auditor, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus memenuhi persyaratan fisik tertentu dan harus memiliki kompetensi dasar dalam berperilaku dan bersikap

- yang memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menjalankan setiap tugas yang ada dalam tanggung jawab mereka.
- 3) Kompetensi teknik pengawasan. Agar dapat menjalankan tugas pengawasan yang sesuai dengan tingkat jabatan mereka, auditor harus memiliki kompetensi teknis dalam pengawasan.
  - 4) Kompetensi kumulatif. Kompetensi pada tingkat atau jabatan yang lebih tinggi adalah hasil akumulasi kompetensi yang dimiliki pada tingkat atau jabatan yang di bawahnya, ditambah dengan kompetensi khusus yang sesuai dengan jabatan tersebut.

### 2.9.3 Manfaat Kompetensi

APIP memiliki peran krusial dalam mendorong peningkatan mutu akuntabilitas keuangan di tingkat nasional maupun regional. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan berkualitas tinggi guna memungkinkan APIP untuk memainkan peranannya secara efektif. Untuk memastikan terwujudnya audit yang berkualitas, penting bagi setiap auditor yang terlibat dalam proses audit untuk memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Auditor yang kompeten adalah mereka yang dapat melakukan audit secara independen, teliti, dan mendalam berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka (Anugerah & Sony, 2014).

Dalam pengembangan kompetensi diharapkan terdapat hasil dan efek yang positif bagi auditor dalam melaksanakan tugasnya. Manfaat ini umumnya baru akan terasa saat pegawai kembali menjalankan tugasnya. Setiadiputra (2017) mengutip penjelasan dari Prihadi pada tahun 2004 tentang manfaat kompetensi antara lain:

#### 1. Prediktor Kesuksesan Kerja

Model kompetensi yang akurat akan dapat menentukan dengan tepat pengetahuan serta keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk berhasil dalam suatu pekerjaan. Jika seseorang yang memiliki posisi dapat memiliki kompetensi yang dijadikan syarat pada posisinya maka dia akan diprediksikan bisa sukses.

## 2. Merekrut Karyawan yang kompeten

Jika telah berhasil mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan untuk suatu posisi, maka kompetensi ini dapat menjadi standar yang digunakan dalam proses perekrutan karyawan baru dengan lebih mudah.

## 3. Menjadi Dasar Penilaian dan Pengembangan Karyawan

Pengenalan dengan cermat terhadap kompetensi yang diperlukan dalam pekerjaan dapat menjadi ukuran yang berguna untuk menilai kemampuan seseorang. Dengan menggunakan sistem kompetensi ini, dapat diketahui apakah seseorang telah mengembangkan kemampuannya melalui pelatihan dan pembinaan, atau mungkin perlu dipertimbangkan untuk pindah ke divisi lain.

### 2.9.4 Standar Kompetensi

Standar kompetensi adalah standar yang mendasari pembuatan dan peningkatan program pendidikan, pelatihan, serta pengembangan auditor profesional. Standar kompetensi juga memainkan peran penting dalam proses pengangkatan, pengembangan karir, penetapan sertifikasi, evaluasi kinerja, perubahan jabatan, dan pemecatan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dalam jabatan fungsional. Sebagai tambahan, remunerasi auditor juga merupakan elemen yang tak terpisahkan dari fungsi standar kompetensi (Hardinto et al., 2018)

Kayo (2013) dan BPKP (2010) menjelaskan bahwa standar kompetensi auditor adalah pedoman yang menetapkan tingkat minimal kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mencakup pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan perilaku yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas dalam peran auditor fungsional dengan berhasil. Untuk seorang auditor forensik maka standar kompetensi meliputi sejumlah area keterampilan, termasuk kemampuan untuk mencegah dan mengidentifikasi tindakan penipuan, kemampuan dalam pelaksanaan audit forensik, kemampuan memberikan pernyataan yang berdasarkan keahlian, serta kemampuan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan dan melacak aset (SKKNI, 2009).

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia menegaskan bahwa sebagai persyaratan untuk memiliki kompetensi dalam suatu bidang seorang auditor perlu memiliki pemahaman terhadap hal-hal berikut; perilaku yang mencurigakan, evaluasi risiko kecurangan, penilaian nilai bisnis, pencucian uang, pelacakan aset, memberikan keterangan sebagai ahli, teknik audit pada transaksi keuangan, kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa, kerangka hukum dan peraturan, pencegahan serta deteksi tindakan kecurangan, teknik wawancara dan komunikasi tingkat lanjut, serta pengetahuan dalam komputer dan teknologi informasi. Hal ini juga mencakup empat area materi yang terkait dengan *Certified Fraud Examiner (CFE)*, yaitu *Financial Transaction and Fraud Schemes, Criminology & Ethics, Law and Investigation* (SKKNI, 2009)

Apabila seorang auditor menguasai standar kompetensi yang telah dijelaskan diatas, maka auditor yang bersangkutan akan mampu untuk:

1. Mengerjakan tugas yang diberikan
2. Mengorganisasikan tugas dengan baik agar dapat dikerjakan maksimal
3. Mengambil langkah yang tepat bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula
4. Menggunakan seluruh kemampuannya untuk menyelesaikan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda

## 2.10 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti menyebutkan beberapa penelitian sebelumnya yang terdapat relevansi terhadap topik penelitian ini sebagai referensi, bahan perbandingan, dan pendukung bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu tersebut:

Agustomi *et al.*, (2022) melakukan penelitian “Analisis Pengalaman Kerja dan Kompetensi dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai pada Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian adalah implementasi pengalaman kerja pegawai dalam meningkatkan kinerja pegawai Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung sudah cukup baik karena mengutamakan pegawai dengan masa kerja yang lebih lama dan berpengalaman dalam menyelesaikan tugas. Pegawai yang ada saat ini

dapat mengimplementasikan pengetahuannya yang berasal dari diklat-diklat untuk meningkatkan kinerjanya. Kendala yang terdapat yaitu kurangnya motivasi kerja para pegawai, komunikasi antar pegawai dengan pimpinan belum maksimal, masih adanya perilaku pegawai yang tidak disiplin, belum maksimalnya pelaksanaan pelatihan dan pendidikan/bimbingan teknis pegawai. Ketidaksesuaian antara bidang kerja pegawai dengan latar belakang pendidikan formalnya. Sementara upaya yang dapat diambil adalah meningkatkan pelaksanaan pendidikan dan latihan pegawai serta meningkatkan pengawasan terhadap kinerja pegawai. Penelitian Agustomi ini berfokus pada pengalaman kerja pegawai. Adapun variabel kualitatif penelitian ini adalah pada program pengembangan kompetensi yang telah diikuti pegawai Inspektorat Kabupaten Sleman dalam rangka *antifraud*.

Lumempow *et al.*, (2021) melakukan penelitian kualitatif “Analisis Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dalam Pencegahan dan Pendeteksian *Fraud* Biaya Perjalanan Dinas (Studi Kasus Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara)”. Hasil penelitian menemukan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan realisasi peran APIP secara efektif seperti yang dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 dan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 yaitu peran *assurance* dan *consulting* dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud* biaya perjalanan dinas. Namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan peran *assurance* dan *consulting* yang dilakukan dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud* biaya perjalanan dinas yaitu keterbatasan waktu, SDM, dan anggaran, lalu kurangnya partisipasi *auditee* dalam pemeriksaan (dicegah), lalu minimnya pemahaman mengenai *Risk-based audit*, dan belum dibentuknya unit *consulting*. Penelitian Lumempow ini berfokus pada peran inspektorat daerah sebagai APIP dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud* secara khusus pada Biaya Perjalanan Dinas. Adapun penelitian ini mendukung penelitian lumempow tersebut karena meneliti pengembangan kompetensi pegawai inspektorat daerah yang diadakan atau dibutuhkan untuk *antifraud* baik pencegahan maupun pendeteksian dan ditambah investigasi *fraud* di lingkungan pemerintahan daerah.

Jannah *et al.*, (2021) melakukan penelitian “Penerapan Akuntansi Forensik dan Kompetensi SDM Terhadap Upaya Pencegahan *Fraud* Dana Desa”. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi



literatur. Hasil penelitian menemukan bahwa *fraud* dalam pengelolaan dana desa dapat ditekan dengan penerapan akuntansi forensik dan adanya kompetensi dari aparat pengelolaan dana desa. Penerapan akuntansi forensik yang dilakukan adalah dalam konteks preventif, detektif dan represif secara aksiomatik dengan menyediakan pendekatan-pendekatan yang efektif. Pencegahan kasus kecurangan berkaitan erat dengan kompetensi SDM, karena kecurangan pada dasarnya tergantung dari SDM itu sendiri. SDM merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen lain seperti modal, teknologi dan uang karena sejatinya manusia pengendali elemen yang lain. Penelitian Jannah menunjukkan salah satu mekanisme fraud yang dilakukan oleh aparat daerah yaitu dengan penerapan akuntansi forensik oleh sumber daya manusia yang dimiliki aparat daerah. Penelitian ini mendukung hasil penelitian Jannah yaitu dengan mengetahui pengembangan kompetensi yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kemampuan akuntansi forensik oleh sumber daya manusia yang dimiliki instansi khususnya instansi milik pemerintah.

Rahmanda dan Yuniarti (2019) melakukan penelitian “Pendeteksian Kecurangan (*Fraud*) Yang Di Pengaruhi Oleh Independensi dan Kompetensi Auditor Internal (Studi Kasus Pada Inspektorat Wilayah II Kementerian Agama Republik Indonesia). Penelitian tersebut menggunakan metode explanatory. Teknik pengumpulan data adalah dengan survei melalui kuesioner, serta penelitian kepustakaan. Populasi dalam penelitian ini adalah 50 orang auditor internal di Inspektorat Wilayah II Kementerian Agama Republik Indonesia dan semuanya menjadi sampel dalam penelitian ini. Kemudian analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian adalah independensi auditor internal dan kompetensi auditor internal berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan. Namun terkait kompetensi di bidang akuntansi dan sektor publik masih kurang memiliki keahlian dan mendapatkan pelatihan terkait. Penelitian Rahmanda dan Yuniarti menemukan hasil penelitian yaitu pengaruh independensi dan kompetensi auditor internal terhadap pendeteksian kecurangan yang hasilnya adalah positif. Jika pada penelitian tersebut telah positif menunjukkan pengaruh kompetensi auditor internal terhadap *antifraud* pendeteksian, maka penelitian ini akan memberikan wawasan terkait kegiatan pengembangan kompetensi yang sesuai bagi auditor internal pemerintah yaitu inspektorat daerah dalam meningkatkan kemampuan *antifraud* di lingkungan pemerintah.

Rozak dan Gayah (2017) melakukan penelitian kualitatif “Peranan Strategi *Antifraud* dan Audit Kepatuhan Dalam Mencegah *Fraud* Pada Inspektorat Kabupaten Ciamis”. Teknik pengumpulan data adalah dengan melakukan wawancara dan analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian tersebut adalah pelaksanaan strategi *Antifraud* dalam mencegah *fraud* oleh Inspektorat Kabupaten Ciamis sudah dilakukan dengan positif. Namun untuk saat itu, Inspektorat Kabupaten Ciamis hanya bisa meminimalisir terjadinya *fraud*. Inspektorat Kabupaten Ciamis belum bisa menghilangkan *fraud* secara total disebabkan Inspektorat belum sepenuhnya independen sehingga menimbulkan *conflict of interest*, dan adanya unsur politik praktek menggunakan dana untuk mendapatkan satu jabatan tertentu. Kemudian dalam pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan dalam mencegah *fraud* oleh Inspektorat Kabupaten Ciamis juga sudah dilakukan dengan positif. Upaya pencegahan *fraud* yang dilakukan inspektorat antara lain yang pertama melakukan proses rekrutmen pemeriksa melalui open bidding dari SKPD-SKPD dengan persyaratan melakukan beberapa program pendidikan/pelatihan pengawasan. Kedua, merancang PKPT berdasarkan pengentasan risiko. Ketiga, berupaya meminta komitmen terhadap pimpinan/ kepala daerah bahwa sudah mengeluarkan piagam audit sehingga bisa masuk kapan pun terhadap PABU dan penjamin objektivitas terhadap pengungkapan hasil audit. Jika penelitian Razak dan Gayah untuk mengetahui peranan strategi *antifraud*, maka penelitian ini mendukung penelitian tersebut dengan mengetahui program pengembangan kompetensi apa yang dibutuhkan serta strategi dalam pengembangan kompetensi yang menunjang pegawai inspektorat daerah dalam rangka menjalankan peran inspektorat dalam *antifraud* di lingkungan pemerintahan

Sujana (2012) melakukan penelitian “Pengaruh Kompetensi, Motivasi, Kesesuaian Peran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Auditor Internal Pemerintah Kabupaten (Studi Kasus Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Badung dan Buleleng). Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi penelitian sebanyak 154 auditor dan seluruhnya digunakan sebagai sampel. Hasil penelitian tersebut adalah yang pertama, rendahnya kompetensi, lemahnya motivasi, dan persepsi kesesuaian peran yang rendah berpengaruh terhadap komitmen organisasi pegawai Inspektorat. Yang kedua, rendahnya kompetensi, lemahnya motivasi, dan persepsi kesesuaian peran yang rendah serta lemahnya komitmen organisasi

berpengaruh terhadap kinerja pegawai Inspektorat. Maka peningkatan kinerja auditor internal pemerintah daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan kompetensi, motivasi, kesesuaian peran dan memperkuat komitmen organisasi. Penelitian Sujana masih dalam lingkup pekerjaan menyeluruh inspektorat dalam hal mengetahui pengaruh kompetensi auditor Inspektorat terhadap kinerjanya. Adapun penelitian ini akan memfokuskan pada tanggung jawab baru inspektorat yaitu kegiatan antifraud di lingkungan pemerintahan dalam hal program pengembangan kompetensi yang dibutuhkan oleh pegawai inspektorat yang akan melaksanakan tugas mekanisme *antifraud*.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Pengenalan Bab

Pada bab ini, peneliti memaparkan metode penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian Strategi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia *Antifraud* Inspektorat Kabupaten Sleman. Pembahasan pada bab ini menjelaskan proses penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Uraian pembahasan pada bab ini mencakup jenis penelitian, fokus penelitian, sistematika penelitian, sumber dan pengumpulan data, objek penelitian dan teknik pengumpulan data.

#### 3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dengan mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa sesuai konteks alamiah tertentu dan menggunakan metode alamiah tertentu (Moleong, 2017).

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang merupakan pendekatan dalam penelitian kualitatif dimana peneliti menelusur permasalahan-permasalahan kehidupan nyata guna mengetahui berbagai kasus dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan data yang sangat rinci dari pihak-pihak yang berhak memberikan informasi (Cresswell, 2015).

Alasan peneliti memilih metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dalam melakukan penelitian ini karena untuk mengetahui secara terperinci terkait penerapan dan permasalahan pengembangan kompetensi sumber daya manusia *antifraud* di Inspektorat Kabupaten Sleman sebagai salah satu lembaga APIP. Untuk mengumpulkan data yang relevan berkaitan dengan rumusan masalah penelitian, tidak bisa dikumpulkan dalam bentuk skala angka saja, melainkan membutuhkan data berupa narasi-narasi yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dari Inspektorat Kabupaten Sleman. Kemudian dari data yang diperoleh dihasilkan jawaban-jawaban yang lebih relevan dan terperinci yang tidak dapat digali dari data-data yang bersifat numerik.

### 3.3 Instrumen Penelitian

Cresswell (2017) menyebutkan bahwa Instrumen kunci dalam penelitian kualitatif adalah penelitiannya, dimana peneliti yang melaksanakan proses pengumpulan data secara mandiri dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sebagai instrumen krusial dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan alat-alat modern untuk memudahkan proses penelitian. Berbagai alat bantu yang digunakan oleh peneliti antara lain adalah aplikasi *notes* pada smartphone untuk daftar pertanyaan wawancara, sehingga wawancara dapat berlangsung lancar dan sistematis serta peneliti dapat mengubah pertanyaan dengan cepat menyesuaikan jawaban narasumber. Alat bantu lainnya adalah handphone untuk merekam wawancara yang kemudian jawaban narasumber ditranskrip utuh dalam bentuk tulisan. Setelah pengumpulan data selesai, peneliti melakukan pengolahan data dan analisis menggunakan alat bantu berupa *software* olah data yaitu NVIVO 14 yang membantu peneliti untuk menganalisis data.

### 3.4 Fokus Penelitian

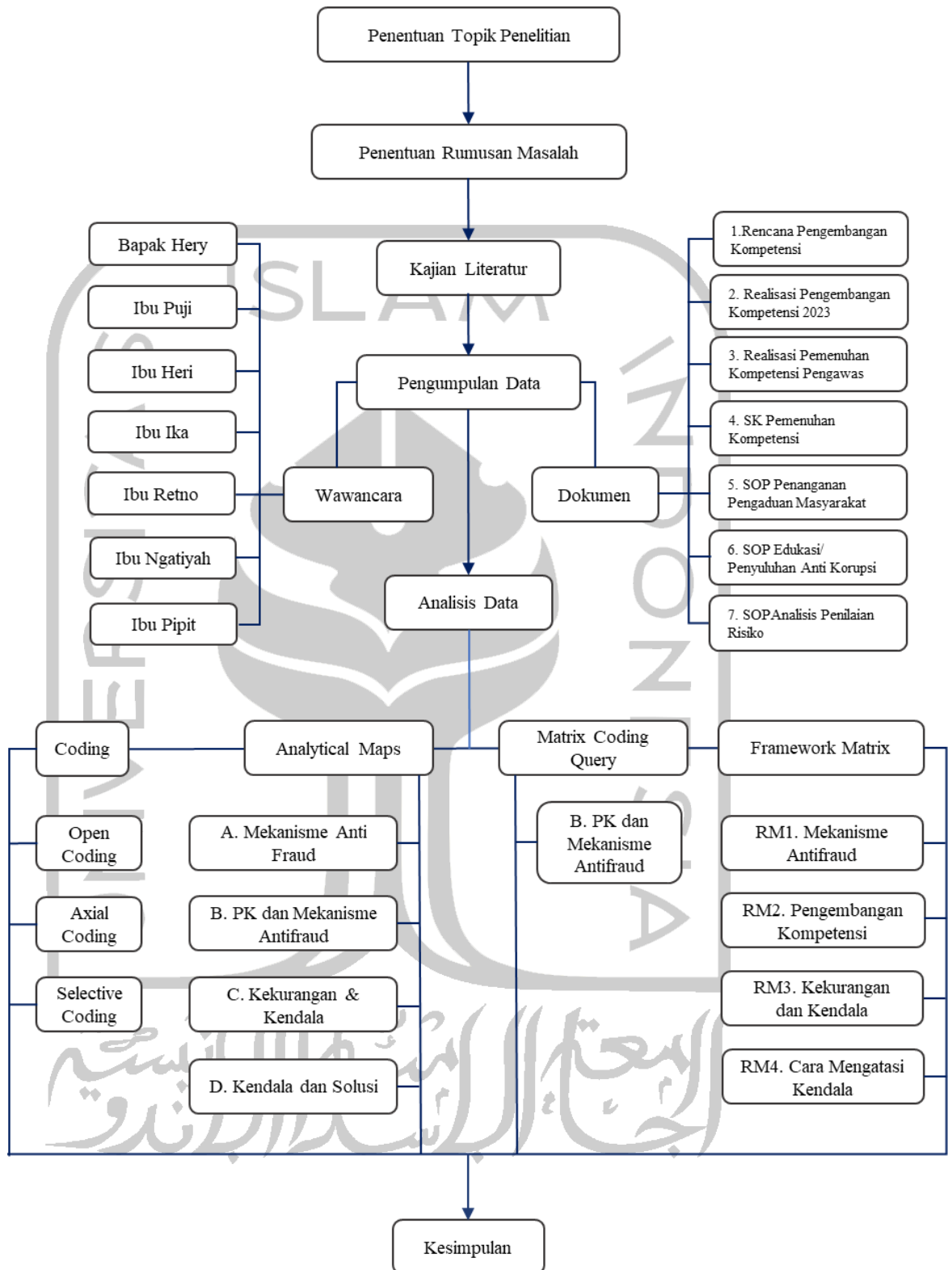
Peneliti menetapkan fokus penelitian untuk penelitian ini agar penelitian yang dilakukan memiliki batasan sehingga dapat membuat penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat dan tidak keluar membahas yang bukan dari tujuan penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Mekanisme *antifraud* yang sudah diterapkan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sleman
2. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait *antifraud* Inspektorat Kabupaten Sleman selama tahun 2020 sampai dengan 2023, serta strategi dalam pengembangan kompetensi
3. Kendala yang dihadapi dan kekurangan Inspektorat Kabupaten Sleman dalam pengembangan sumber daya manusia berkaitan dengan *antifraud*.
4. Cara Inspektorat Kabupaten Sleman dalam menghadapi kendala dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia *antifraud*.

### 3.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan peneliti untuk dapat menghasilkan kesimpulan yang benar dari penelitian yang dilakukan. Sistematika penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1 Sistematika Penelitian



Sumber: Peneliti

### 3.5.1 Menentukan Topik Penelitian

Langkah awal memulai penelitian ini adalah menentukan topik penelitian dengan mencermati kemungkinan fenomena yang bisa diangkat. Setelah menemukan fenomena yang relevan untuk diteliti pada masa kini dan mempertimbangkannya sebagai topik penelitian, peneliti berkonsultasi dengan dosen pembimbing untuk meminta pandangan maupun masukan terkait topik yang akan diangkat peneliti. Setelah berkonsultasi dan dosen pembimbing memberikan masukan, maka peneliti mengangkat topik Strategi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia *Antifraud* Inspektorat Kabupaten Sleman.

### 3.5.2 Menentukan Rumusan Masalah

Setelah ditentukannya topik penelitian, peneliti merancang rumusan masalah. Penting dalam suatu penelitian untuk memikirkan rumusan masalah dengan matang lalu menguraikannya dengan jelas, sederhana, dan tuntas karena seluruh unsur penelitian berpangkal pada rumusan masalah tersebut (Moleong, 2017). Rumusan masalah dibuat dengan tujuan agar penelitian dilakukan sesuai dengan topik yang sudah ditentukan dan menjadi patokan agar penelitian terarah mencapai tujuan penelitian. Rumusan masalah pada penelitian ini dibuat setelah peneliti berdiskusi dengan dosen pembimbing agar rumusan masalah tidak keluar dari topik penelitian.

### 3.5.3 Kajian Literatur

Setelah rumusan masalah dibuat, peneliti menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian melalui proses kajian literatur. Kajian literatur diuraikan dalam Bab II penelitian ini.

### 3.5.4 Pengumpulan Data

Selanjutnya peneliti melaksanakan proses pengumpulan data. Data yang dikumpulkan peneliti adalah data primer yaitu data diperoleh dari sumber pertama kemudian juga data sekunder yang menjadi pendukung data primer. Peneliti memperoleh data primer dengan melakukan wawancara kepada narasumber dari pegawai Inspektorat Kabupaten Sleman mengenai mekanisme *antifraud* dan juga pengembangan kompetensi sumber daya *antifraud* yang dimiliki. Setelah wawancara, peneliti membuat transkrip wawancara tersebut

untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data. Sedangkan data sekunder yang dikumpulkan peneliti adalah dokumen, yaitu laporan realisasi kegiatan pemenuhan kompetensi SDM sekretariat dan SDM pengawas dan surat keterangan rencana pengembangan kompetensi tahun 2023.

### 3.5.5 Analisis Data

Setelah mengambil data dan mengumpulkannya, peneliti melakukan analisis data untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat. Analisis data untuk penelitian ini melalui tiga tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman pada tahun 1994 (Morrisan, 2019). Tiga tahapan itu adalah reduksi data (*Data Reduction*) yaitu pemilihan, pemusatan dan penyederhanaan terhadap data, pemberian gambaran umum yang singkat atas peristiwa yang diteliti. Kemudian tampilan data (*Display Data*) yaitu visualisasi berupa grafik, matriks, pola jaringan dan semisalnya dari kumpulan informasi yang diperoleh dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion and Verification*) yaitu proses peninjauan ulang hasil analisis data terkait implikasi makna dari pertanyaan penelitian dan mengkonfirmasi data yang diberikan sudah sesuai. Peneliti melakukan analisis data menggunakan *software* sebagai alat bantu peneliti yaitu *NVIVO 14*. *NVIVO 14* merupakan salah satu *software* yang dikembangkan oleh QSR International. *Software* dipergunakan untuk membantu menganalisis, mengelola dan membentuk data kualitatif (Creswell, 2015). Peneliti menggunakan *NVIVO 14* sebagai alat bantu analisis data karena mampu melakukan *coding* data secara efektif dan efisien sehingga data dapat direpresentasikan dengan baik dalam bentuk tabel, diagram, grafik, serta model lainnya untuk penelitian kualitatif. Berikut analisis data dalam penelitian ini yang dilakukan peneliti menggunakan *NVIVO 14*.

#### 1) Coding

Coding merupakan salah satu cara mereduksi data serta pekerjaan mendasar dalam sebagian penelitian kualitatif. Dalam prosesnya, *coding* merupakan langkah berkelanjutan dalam menganalisis data dengan tujuan menggolongkan data-data utama berdasarkan informasi yang berhasil dikumpulkan (Bandur, 2016). Dalam penelitian kualitatif coding berbentuk



berupa kata atau frasa yang memberikan atribut simbolis, menonjol, menyimpan esensi, dan atau memunculkan data berupa bahasa atau visual (Saldana, 2016). *Coding* akan dimasukkan ke dalam *codes* pada Nvivo 14. *Coding* dan *codes* adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. *Codes* merupakan kumpulan referensi yang berisi tema, kasus, ide pokok atau hubungan tertentu. Creswell (2017) menguraikan langkah-langkah *coding* sebagai berikut:

a. *Open Coding*

Dalam langkah awal, ini dilakukan untuk mengelompokkan informasi yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini, peneliti membuat beberapa kategori *codes* berdasarkan hasil wawancara yang diorganisir sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

b. *Axial Coding*

Setelah itu, memilih satu dari kelompok tersebut dan memasukkannya dalam suatu model teoritis. Pada tahap ini, peneliti memasukkan data *open coding* ke dalam kelompok *codes* yang telah dibuat sebelumnya.

c. *Selective Coding*

Selanjutnya merangkai sebuah narasi dari korelasi antar kelompok. Pada tahap ini, peneliti mendeskripsikan berbagai korelasi dari kelompok data yang telah dibuat sebelumnya.

Pada prosesnya, peneliti mengumpulkan data dari setiap wawancara yang telah dilakukan dan dokumen yang dikumpulkan untuk melakukan *coding*, lalu memasukkan data tersebut ke dalam *codes* yang telah disiapkan. Di samping itu, peneliti juga membuat *case codes*, lalu menyimpan semua hasil wawancara ke masing-masing *case codes* yang sesuai dengan nama narasumber. Terakhir, peneliti membuat *relationship* untuk menghubungkan *codes* yang telah dibuat sebelumnya, sehingga antar *codes* yang saling terdapat kesamaan bisa saling terhubung.

## 2) *Analytical Maps*

*Analytical Maps* adalah representasi visual dari hasil *coding* yang telah dilakukan. *Analytical Maps* memiliki peranan penting dalam penelitian kualitatif untuk menggambarkan model penelitian dari rumusan masalah yang akan memperlihatkan hubungan antara satu *codes* dengan *codes* lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti membuat empat *analytical maps* dari fitur *project maps* NVivo 14 yang sesuai dengan rumusan masalah, yaitu:

- i. *Analytical Maps* tentang mekanisme *antifraud* Inspektorat Kabupaten Sleman.
- ii. *Analytical Maps* tentang hubungan pengembangan kompetensi SDM dengan mekanisme *antifraud* Inspektorat Kabupaten Sleman.
- iii. *Analytical Maps* tentang kekurangan dan kendala pengembangan kompetensi SDM
- iv. *Analytical Maps* tentang cara mengatasi kendala

## 3) *Matrix Coding Query*

Dalam penelitian ini, peneliti membuat *matrix coding query* untuk melihat keterkaitan antar *codes* dalam satu rumusan masalah dengan *codes* pada rumusan masalah lainnya. *Matrix coding query* dalam penelitian ini disandingkan dengan *analytical maps* yang berarti juga menunjukkan hubungan antar data yang telah di *coding*. *Matrix coding query* yang dibuat untuk penelitian ini adalah melihat keterkaitan antara pengembangan kompetensi SDM dengan mekanisme *antifraud* yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sleman.

## 4) *Framework Matrices*

*Framework matrices* adalah suatu struktur yang membantu peneliti menyusun ringkasan dari hasil wawancara menjadi jumlah yang lebih terkelola dengan mudah. Melalui *framework matrices* ini, peneliti dapat memperoleh wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang data yang telah dikumpulkan. Dalam *framework matrices*, peneliti menyusun data hasil wawancara dari narasumber ke dalam format tabel berdasarkan pengodean kasus yang telah disiapkan sebelumnya. *Framework matrices* ini disajikan

dalam lampiran penelitian yang disusun berdasarkan setiap rumusan masalah yang ditetapkan.

### 3.5.6 Kesimpulan

Langkah akhir dalam rangkaian penelitian adalah membuat kesimpulan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Penarikan kesimpulan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan dan juga untuk mengungkap hasil akhir dari pembahasan yang dilakukan dalam penelitian tersebut.

## 3.6 Sumber dan Jenis Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif terdiri dari kata-kata, tindakan, dan data tambahan sebagai pelengkap seperti dokumen dan semisalnya (Lofland dan Lofland, 1984) dalam (Moleong, 2017). Peneliti mendapatkan data berupa kata-kata dari wawancara peneliti dengan pegawai struktural dan fungsional Inspektorat Kabupaten Sleman, sementara data tambahan yaitu dokumen diperoleh dari Kepala Bidang Subbagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Sleman.

### 3.6.1 Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang bersifat *up to date* dan terbaru yang ditemukan oleh peneliti pertama kali secara langsung dari sumber datanya (Siyoto & Sodik, 2015). Salah satu yang termasuk dalam sumber data primer adalah ucapan dari wawancara dan perbuatan dari mengamati orang-orang yang menjadi sumber data (Moleong, 2017). Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data primer dengan mewawancarai narasumber pegawai Inspektorat Kabupaten Sleman.

- Wawancara

Tabel 3.1 Narasumber Wawancara

No.	Nama	Gender	Usia (Tahun)	Jabatan	Lama Bekerja (Tahun)
1.	Hery Dwi Kuryanto, S.H., M.Hum.	Laki-Laki	55-59	Inspektur	30-35

2.	Ir. Sri Puji Lestari	Perempuan	55-59	Sekretaris	30-35
3.	Heri Setyawati, S.E., M.Acc.	Perempuan	50-54	Inspektur Pembantu Bidang Investigasi	25-29
4.	Ika Sulistyio Devi	Perempuan	40-45	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	15-19
5.	Retno Isni Satiti, S.E.	Perempuan	50-54	Auditor Madya	25-29
6.	Ngatiyah, S.H.	Perempuan	45-49	Auditor Muda	25-29
7.	Pipit Tyas Ratna Puspita, S.H., MPA	Perempuan	36-39	Auditor Muda	10-14

Sumber: Kasubag Umum an Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Sleman

### 3.6.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari kumpulan data yang sudah ada (Siyoto & Sodik, 2015). Berdasarkan definisi data sekunder, maka sumber data sekunder merupakan data tambahan yang bisa ditemukan dari sumber tertulis seperti buku dan majalah ilmiah, dari arsip-arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi (Moleong, 2017). Sumber sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini merupakan dokumen, yaitu:

1. Rencana Pengembangan Komptensi Inspektorat Kabupaten Sleman Tahun 2023
2. Laporan Realisasi Diklat/Kegiatan Pemenuhan Kompetensi SDM Sekretariat Inspektorat Kabupaten Sleman Tahun 2023
3. Laporan Realisasi Diklat/Kegiatan Pemenuhan Kompetensi SDM Pengawas Inspektorat Kabupaten Sleman Tahun 2023
4. Surat Keterangan Rencana Pengembangan Kompetensi Tahun 2023

### 3.7 Objek Penelitian

Lokasi atau objek penelitian ini dilakukan di Inspektorat Kabupaten Sleman. Alasan memilih Inspektorat Kabupaten Sleman yang merupakan salah satu instansi Aparat Pengawas Intern Pemerintah karena fungsi dan tugas Inspektorat yang sudah bertambah dengan adanya koordinasi pencegahan *anti* korupsi yang ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat 3 Peraturan Bupati Sleman Nomor 2 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, objek penelitian yang dipilih oleh peneliti ini sesuai dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini.

### 3.8 Teknik Pengumpulan Data

Pada Penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah melakukan wawancara dengan narasumber dan juga meminta dokumen-dokumen terkait kepada Inspektorat Kabupaten Sleman dan juga mencari data di website Inspektorat Kabupaten Sleman. Berikut penjabaran dari teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti:

1. Untuk memenuhi data mengenai mekanisme *antifraud* yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sleman, pengembangan kompetensi SDM dan kekurangan dan kendala dalam pengembangan kompetensi SDM serta cara Inspektorat mengatasi kendala, peneliti melakukan wawancara pertama kali dengan narasumber yang menjabat sebagai sekretaris Inspektorat Kabupaten Sleman yang mengetahui seluruh kegiatan Inspektorat Kabupaten Sleman dan juga merupakan senior selama 31 tahun mengabdikan di Inspektorat Kabupaten Sleman dan juga auditor yang sudah bertugas selama lebih 20 tahun di Inspektorat Kabupaten Sleman.
2. Untuk menghindari subyektivitas data, peneliti juga melakukan wawancara dengan narasumber yang menjadi atasan dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kabupaten Sleman dan juga senior selama 27 tahun mengabdikan di Inspektorat Kabupaten Sleman, kemudian juga kepada auditor madya dan auditor muda yang merupakan pelaksana kegiatan Inspektorat Kabupaten Sleman serta Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Sleman kemudian dengan Bapak Inspektur Kabupaten Sleman.

3. Untuk mendukung hasil wawancara, penulis meminta dokumen yang berhubungan dengan mekanisme *antifraud* Inspektorat Kabupaten Sleman dan pengembangan kompetensi SDM di Inspektorat Kabupaten Sleman masing-masing kepada Sekretaris dan Kepala Bidang Subbagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab terhadap data-data tersebut.

### 3.9 Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data perlu dipastikan oleh peneliti, maka dari itu diperlukan pemeriksaan data menggunakan teknik tertentu agar keabsahan data bisa tercapai. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sangat sulit menghindari kenyataan untuk mengumpulkan data yang sudah sesuai dengan asumsi, konsep, dan teori yang sudah menjadi pemahaman peneliti (Budiastuti & Bandur, 2018).

(Moleong, 2017) mengatakan bahwa diperlukan teknik-teknik pemeriksaan tertentu untuk menetapkan keabsahan data, yaitu kepercayaan (*credibility*), peralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Berikut penjelasan keempat teknik pemeriksaan tersebut dalam penelitian ini:

#### 1. Kepercayaan (*Credibility*)

Pengujian kredibilitas memiliki beberapa teknik, antara lain yaitu perpanjangan pengamatan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif, dan pengecekan anggota (Moleong, 2017).

##### a. Perpanjangan Pengamatan

Untuk memperjelas pengamatan yang sedang dilakukan, peneliti diminta untuk melakukan wawancara ulang dengan narasumber. Hal ini dikarenakan dari wawancara sebelumnya, peneliti belum memperoleh data yang diperlukan. Dengan demikian, peneliti melakukan wawancara kembali dengan narasumber yang sebelumnya sudah diwawancarai. Diantara narasumber yang berulang kali wawancara dengan peneliti adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sleman.

##### b. Triangulasi

Triangulasi adalah metode pengujian keabsahan yang menggunakan sumber lain di luar data untuk tujuan pemeriksaan atau sebagai

pembandingan data yang telah diperoleh (Moleong, 2017). Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya mewawancarai satu individu, tetapi juga beberapa pegawai lain yang memiliki kesesuaian dengan fokus dari penelitian ini, sehingga jawaban yang diperoleh tidak bersifat subjektif dan tidak hanya tergantung dengan satu orang. Selain itu, peneliti tidak hanya melakukan wawancara dalam satu waktu, melainkan dilakukan pada hari dan waktu yang berbeda, sehingga jawaban dari narasumber menjadi lebih dalam dan memiliki kepastian dalam jawabannya. Peneliti juga melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan jawaban dari narasumber dan membandingkannya dengan jawaban dari wawancara yang dilakukan. Peneliti melakukan triangulasi wawancara dengan pegawai struktural atau sekretariat dan dengan pegawai fungsional atau auditor secara bergantian di waktu yang berbeda dengan pertanyaan yang sama. Kemudian peneliti mencocokkan juga hasil wawancara dengan dokumen yang peneliti peroleh dari Kepala Bidang Subbagian Umum dan Kepegawaian.

## 2. Peralihan (*Transferability*)

Pengujian *transferability* adalah aspek keabsahan eksternal dalam penelitian kualitatif. Nilai dari pengujian ini terkait dengan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan dalam konteks situasi yang berbeda. Pengujian ini bergantung pada pemahaman peneliti tentang konteks pengirim dan penerima (Moleong, 2017). Dalam penelitian ini peneliti memberikan informasi yang rinci, termasuk dalam sistematika penelitian yang mencakup langkah-langkah penelitian dari awal hingga penarikan kesimpulan. Selain itu, peneliti juga menyajikan peta analisis yang menggambarkan jawaban dan rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya. Dalam setiap wawancara dengan narasumber yang berbeda, peneliti menyampaikan alasan wawancara yang sedang berlangsung dan menyajikan *analytical maps* sederhana dari wawancara dengan narasumber lain kepada narasumber yang sedang di wawancara saat itu.

### 3. Kebergantungan (*dependability*)

Pada penelitian kualitatif, pengujian *dependability* dilakukan melalui audit atau pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh proses penelitian (Moleong, 2017). Dalam konteks penelitian ini, peneliti melibatkan dosen pembimbing sebagai pembina yang berkewajiban untuk memeriksa secara komprehensif seluruh proses penelitian, memberikan saran dan pandangan selama berlangsungnya penelitian. Peneliti melakukan bimbingan setiap mengalami kemajuan dari penelitian yang sedang dilakukan melalui *online meeting* dengan dosen pembimbing peneliti sejak awal memulai penelitian.

### 4. Kepastian (*Confirmability*)

Agar penelitian kualitatif menjadi lebih objektif karena pada dasarnya penelitian kualitatif bersifat subjektif, maka diperlukan pengujian bersifat konfirmasi dalam prosesnya. Dalam pengujian konfirmasi, kepastian objektivitas suatu hal tidak bergantung pada persetujuan beberapa individu terhadap pandangan, pendapat dan temuan seseorang (Moleong, 2017). Dalam konteks penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan lebih dari satu individu agar jawaban-jawaban yang dihasilkan tidak bersifat subjektif saja dan tidak hanya berpegang dengan pandangan satu orang saja. Kemudian peneliti juga melibatkan dosen pembimbing yang berkapasitas dan berpengalaman dalam penelitian tersebut untuk memeriksa keseluruhan proses, melakukan evaluasi, serta memberikan pandangan selama berlangsung penelitian. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian ini dapat diterima dengan baik.

الجمعة الاستاذة الانيسة



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Pengenalan Bab

Pada bab ini, peneliti memaparkan hasil penelitian yang dilakukan di Inspektorat Kabupaten Sleman terkait Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia *Antifraud*. Di awal bab, peneliti mengenalkan profil dari objek penelitian yaitu Inspektorat Kabupaten Sleman. Setelah itu, peneliti menjabarkan jawaban dari rumusan masalah yang sudah dirumuskan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dan dokumen yang dikumpulkan. Peneliti juga memvisualisasikan data dalam bentuk *Project Maps* dan *Matrix* yang terdapat di awal pembahasan setiap rumusan masalah. Peneliti juga menyertakan beberapa kutipan langsung dan transkrip wawancara dengan narasumber objek penelitian dan kutipan tidak langsung sebagai dasar jawaban dari rumusan masalah penelitian ini.

#### 4.2 Profil Objek Inspektorat Kabupaten Sleman

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten bahwa Inspektorat Kabupaten Sleman merupakan unsur pengawas pemerintahan daerah yang dipimpin oleh inspektur yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada bupati melalui sekretaris daerah. Inspektorat Kabupaten Sleman dibentuk menjadi aparat yang melaksanakan tugas pengawasan, pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah untuk menciptakan tertib dan lancarnya pembangunan dan jalannya pemerintah serta meningkatkan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Gambar 4.1 Logo Inspektorat Kabupaten Sleman



**INSPEKTORAT**  
**KABUPATEN SLEMAN**  
Jalan Roro Jonggrang No. 2 Beran Tridadi Sleman DIY 55511  
Telepon (0274) 866820 Email: [inspektorat@slemankab.go.id](mailto:inspektorat@slemankab.go.id)

**Nyawiji lan Murakabi**  
*Sesarengan Mbangun Sleman*

Sumber: Website Resmi Inspektorat Kabupaten Sleman

#### 4.2.1 Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Sleman

Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Sleman adalah inspektur, sekretariat, inspektur pembantu dan subbagian kemudian ada jabatan fungsional. Sekretariat terdiri dari Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Keuangan dan Perencanaan dan Subbagian Evaluasi dan Pelaporan. Inspektur Pembantu ada macam-macam yaitu Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat, Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan dan yang terbaru Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi.

Secara hirarki, Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Kemudian Inspektur Pembantu yang dipimpin oleh Inspektur Pembantu berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Jabatan fungsional bertugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan sebagian tugas Inspektorat Kabupaten sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Penetapan, pengangkatan dan penempatan jabatan fungsional disesuaikan berdasarkan bidang keahlian dan keterampilannya, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Jenis dan jumlah jabatan fungsional disusun sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan juga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, kelompok jabatan fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu.

#### 4.2.2 Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Sleman

Visi dan Inspektorat Kabupaten Sleman mengikuti visi dan Pemerintah Kabupaten Sleman yaitu “Terwujud Sleman Sebagai Rumah Bersama Yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa Gotong Royong”

Kemudian Misi antara lain:

- a. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.
- c. Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan
- d. Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan bencana
- e. Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terwujudnya kabupaten cerdas
- f. Memperkuat budaya masyarakat yang saling menghargai dan jiwa gotong royong.

Inspektorat Kabupaten Sleman berperan dalam melaksanakan misi kesatu

#### 4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Serta Lingkup Pengawasan Inspektorat Kabupaten Sleman

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Kabupaten kemudian satuan organisasi di dalam inspektorat kabupaten memiliki fungsi masing-masing. Fungsi Inspektorat Kabupaten secara umum antara lain:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, asistensi, dan kegiatan pengawasan lainnya
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi
- g. Pengawasan pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan

- h. Pelaksanaan kesekretariatan Inspektorat dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi sekretariat antara lain:

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Inspektorat Kabupaten
- b. Penyusunan program kerja pengawasan
- c. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan
- d. Pelaksanaan urusan umum
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian
- f. Pelaksanaan urusan keuangan
- g. Pelaksanaan urusan perencanaan
- h. Pelaksanaan urusan evaluasi dan pelaporan
- i. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Inspektorat Kabupaten

Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian. Dalam pelaksanaan tugas tersebut subbagian ini memiliki fungsi antara lain:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian
- c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan
- d. Pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan
- e. Pelaksanaan dan pengoordinasian perencanaan kebutuhan dan pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pengendalian aset
- f. Pengelolaan dokumentasi dan informasi
- g. Pelaksanaan analisis kebutuhan jumlah dan jenis jabatan
- h. Penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai
- i. Pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian
- j. Pengoordinasian penilaian kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah; dan

- k. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Keuangan dan Perencanaan bertugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan dan urusan perencanaan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut subbagian ini memiliki fungsi antara lain;

- a. Penyusunan rencana kerja subbagian keuangan dan perencanaan
- b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan dan urusan perencanaan
- c. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja Inspektorat Kabupaten
- d. Pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan
- e. Penyusunan program kerja pengawasan tahunan
- f. Pengoordinasian pelaksanaan dan pengembangan inovasi Inspektorat Kabupaten; dan
- g. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan dan Perencanaan.

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan bertugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan evaluasi dan pelaporan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut subbagian ini memiliki fungsi antara lain:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
- b. Perumusan kebijakan teknis urusan evaluasi dan pelaporan
- c. Pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja Inspektorat Kabupaten; dan
- d. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja subbagian Evaluasi dan Pelaporan

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur bertugas melaksanakan dan mengoordinasikan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, urusan penunjang kepegawaian, keuangan, pengawasan, pelayanan DPRD, dan

penyelenggaraan Kapanewon dan Pemerintahan Kalurahan, serta pengawasan pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan. Dalam menjalankan tugasnya Inspektur Pembantu bidang ini memiliki fungsi antara lain:

- a. Penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur
- b. Perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur
- c. Pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan untuk tujuan tertentu bidang pemerintahan dan aparatur
- d. Pengawasan pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan bidang pemerintahan dan aparatur
- e. Penyusunan laporan hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur
- f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Bidang Pemerintahan dan Aparatur.

Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat bertugas melaksanakan dan mengoordinasikan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan serta pengawasan pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan. Dalam menjalankan tugasnya Inspektur Pembantu bidang ini memiliki fungsi antara lain:

- a. Penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat
- b. Perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan bidang kesejahteraan rakyat
- c. Pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan untuk tujuan tertentu bidang kesejahteraan rakyat
- d. Pengawasan pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan bidang kesejahteraan rakyat
- e. Penyusunan laporan hasil pengawasan bidang kesejahteraan rakyat; dan

- f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan bertugas melaksanakan dan mengoordinasikan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan, perikanan, lingkungan hidup, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pariwisata, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, dan urusan penunjang perencanaan dan penelitian dan pengembangan, serta pengawasan pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan. Dalam melaksanakan tugasnya inspektur pembantu bidang ini memiliki fungsi antara lain:

- a. Penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan
- b. Perumusan Kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan bidang perekonomian dan pembangunan
- c. Pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan untuk tujuan tertentu bidang perekonomian dan pembangunan
- d. Pengawasan pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan bidang perekonomian dan pembangunan
- e. Penyusunan laporan hasil pengawasan bidang perekonomian dan pembangunan
- f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

Inspektur Pembantu Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi merupakan bidang yang baru dibentuk tahun 2023 bertugas melaksanakan dan mengoordinasikan pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan penanganan pengaduan masyarakat, investigasi dan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah dan kalurahan, serta pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Pembantu Bidang ini memiliki fungsi antara lain:

- a. Penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi
- b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengoordinasian pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan penanganan pengaduan masyarakat, investigasi dan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah dan kalurahan, serta pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi
- c. Pelaksanaan dan pengoordinasian pencegahan tindak pidana korupsi
- d. Pelaksanaan dan pengoordinasian investigasi dan penghitungan kerugian negara/daerah dan kalurahan
- e. Pemberian keterangan ahli dalam persidangan kasus korupsi
- f. Pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi
- g. Pengawasan pelaksanaan pembangunan zona dan integritas
- h. Pengawasan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah
- i. Penyusunan laporan hasil pengawasan bidang investigasi dan reformasi birokrasi
- j. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Pembantu Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi.

#### 4.2.4 Kode Etik dan Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah

Piagam Audit Intern menjelaskan bahwa kewajiban auditor internal pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus selalu mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

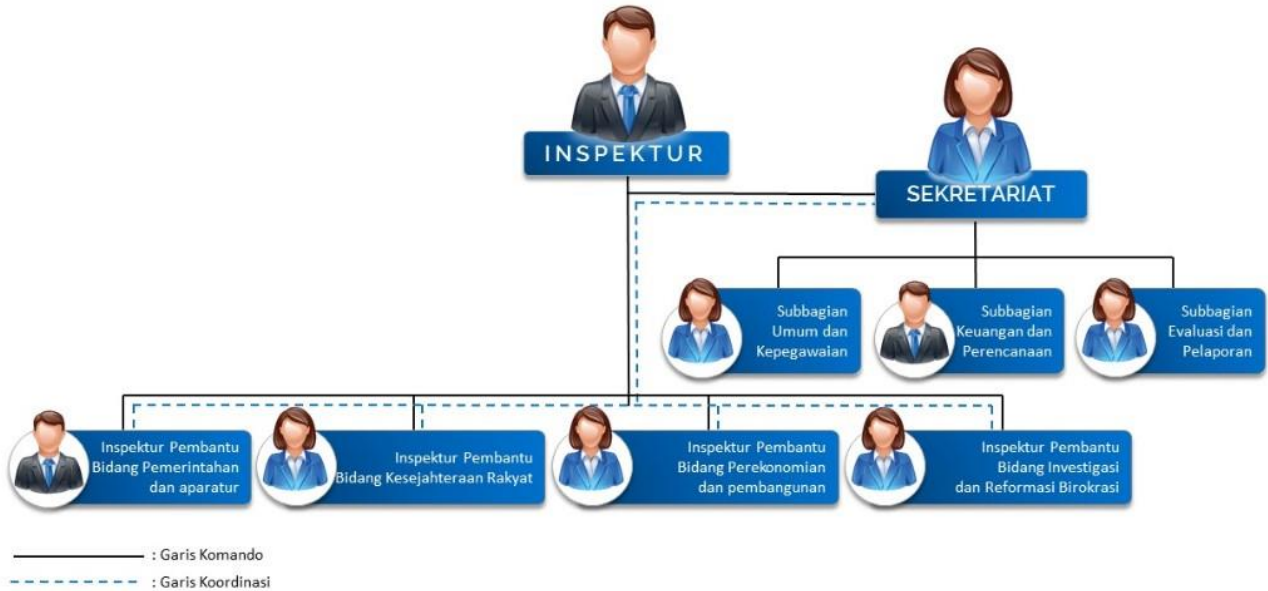
#### 4.2.5 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Sleman

Berikut adalah struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Sleman yang diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 52 Tahun 2022



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Sleman

## STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN SLEMAN



Sumber: Website resmi Inspektorat Kabupaten Sleman

Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Sleman dikategorikan dalam dua jenis yaitu Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional. Pejabat Struktural terdiri dari Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, dan Kepala Subbagian, sedangkan Pejabat Fungsional terdiri dari Auditor Madya, Auditor Pertama, Auditor Muda, dan Pelaksana Auditor.

Tabel 4.1 Struktur Pegawai Inspektorat Kabupaten Sleman 2023

No	Nama	Jabatan
1	Hery Dwi Kuryanto, S.H., M.Hum.	Inspektur
2	Ir. Sri Puji Lestari	Sekretaris
3	Aisyah Inayati Suryani, S.E, M.Si.	Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat
4	Heri Setyawati, S.E., M.Acc.	Inspektur Pembantu Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi

5	Alhalik, S.Sos.	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur
6	Tintin Marlina, SPMH	Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan
7	Virgolia Pritaningsih Rosa Putri, S.Sos.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
8	Ika Sulistyio Devi	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
9	Sujadi, S.E.	Kepala Subbagian Keuangan dan Perencanaan
10	Nenci Wulandari, S.E.	Bendahara pada Subbagian Keuangan dan Perencanaan
11	Sri Sulasmi	Pengadministrasi Keuangan pada Subbagian Keuangan dan Perencanaan
12	Andri Iswantoro, A.Md	Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan pada Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
13	Listiyani Natalia, S.E.	Analisis Laporan Hasil Pengawasan Pada Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
14	Warjana	Pengadministrasian Umum dan Subbagian Evaluasi dan Pelaporan

15	Ninik Mulyani	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana pada Subbagian Umum dan Kepegawaian
16	Dawam	Pengadministrasian Kepegawaian pada Subbagian Umum dan Kepegawaian
17	Krismanti Arifah, S.E.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris pada Subbagian Umum dan Kepegawaian
18	Drs. Isnainy Usman	Auditor Madya
19	Endang Setyarini, S.Sos	Auditor Madya
20	Drs. Slamet Sujadi	Auditor Madya
21	Retno Isni Satiti, S.E	Auditor Madya
22	Rr. Sari Rachmawati, S.Sos	Auditor Madya
23	Evi Heni Yusiati, S.Sos	Auditor Madya
24	Rini Hastuti, S.E., Ak	Auditor Madya
25	Sutarjo, S.H.	Auditor Madya
26	Kunti Rochaningsih, S.H.	Auditor Madya
27	Ashari, S.Sos	Auditor Muda
28	Ch. Arum Susyanti, S.E., Ak	Auditor Muda
29	Ngatiyah, S.H.	Auditor Muda
30	Rokhimah, S.IP	Auditor Muda
31	Pipit Tyas Ratna Puspita, S.H., MPA	Auditor Muda
32	Ardeno Kurniawan, S.E., Ak	Auditor Muda
33	Anita Yulianti, S.T.	Auditor Muda
34	Anissa Adriana, S.E., M.Acc.	Auditor Muda
35	Syahrul Malik, S.E.	Auditor Pertama
36	Nabila Tia Delita, S.E.	Auditor Pertama

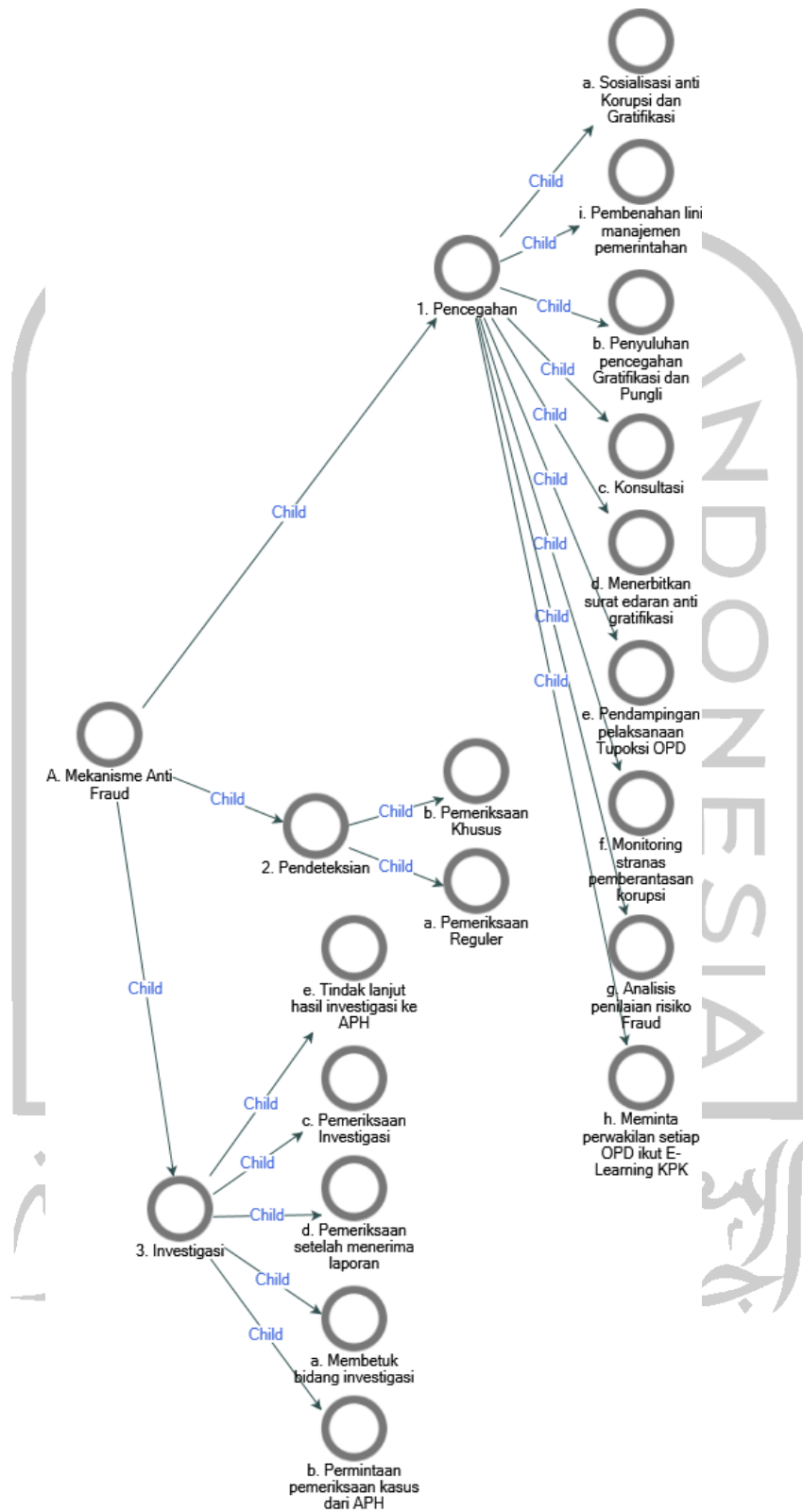
37	Naji Hatul Mutohharo, S.E.	Auditor Pertama
38	Nurhadi Priyanto, A.Md.	Pelaksana Auditor
39	Sunarno, A.Md.	Pelaksana Auditor
40	Kusnardiyanto, A.Md.	Pelaksana Auditor
41	Deni Ari Saputra, A.Md.	Pelaksana Auditor
42	Pro Yeni Eka Pratiwi, A.Md.	Pelaksana Auditor
43	Wendi Albeta Septiano, A.Md.	Pelaksana Auditor
44	Denny Setiawan, A.Md.	Pelaksana Auditor
45	Afif Fardiansyah, A.Md.	Pelaksana Auditor
46	Nursusanty, S.E.	Auditor Pertama
47	Lathifah Nur Sulthan, A.Md.	Pelaksana Kearsipan

#### 1.1. Pengembangan Kompetensi Pegawai Inspektorat Kabupaten Sleman

Upaya pemenuhan kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sleman dan pemantauan kompetensi telah diatur dalam Keputusan Inspektur Kabupaten Sleman Nomor 001.d/Kep.Inspektur/2023 Tentang Kebijakan Pemenuhan Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sleman.

الجمهورية الإسلامية  
الاندونيسية

### 4.3 Mekanisme Antifraud yang Dilakukan Inspektorat Kabupaten Sleman



Gambar 4.3 Analytical Maps Mekanisme Antifraud

#### 4.3.1 Pencegahan

##### a. Sosialisasi *anti* korupsi dan gratifikasi

Salah satu kegiatan inspektorat dalam pencegahan *fraud* adalah melakukan sosialisasi terkait *anti* korupsi dan gratifikasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD, kalurahan, pengusaha dan ke masyarakat (Lestari, 2023). Dalam pelaksanaannya, tidak selalu inspektorat yang menjadi inisiator untuk melakukan sosialisasi tersebut ke berbagai OPD, terkadang OPD yang meminta inspektorat untuk melakukan sosialisasi di kantor mereka contohnya dinas kesehatan, dinas kepegawaian, dan dinas pendidikan kemudian mereka mengumpulkan sub unit kerja mereka seperti puskesmas dan sekolah-sekolah untuk mengikuti sosialisasi yang berkaitan *anti* korupsi dan gratifikasi (Lestari, 2023). Ibu Ngatiyah, S.H. (2023) selaku auditor muda mengatakan bahwa sosialisasi ini diharapkan agar para pegawai yang dimaksud dengan *fraud* korupsi dan gratifikasi sehingga mereka dapat mengantisipasi sendiri *fraud* tersebut. Pencegahan *fraud* yang dilakukan inspektorat ini mengacu pada MCP KPK (*Monitoring Center for Prevention*).

##### b. Penyuluhan pencegahan gratifikasi dan pungli

Program pencegahan *fraud* setelah adanya sosialisasi berikutnya adalah penyuluhan *anti* gratifikasi dan berantas pungli (Lestari, 2023). Untuk penyuluhan gratifikasi, inspektorat melakukannya sendiri yang dikhususkan kepada sekolah-sekolah, sementara penyuluhan berantas pungli dilakukan inspektorat melalui kerjasama dengan pihak kepolisian dan Kejaksaan yang disebut Saber Pungli (Satuan Bersih Pungutan Liar). Kerjasama ini dibentuk melalui MOU (*Memorandum of Understanding*) antara Inspektorat, Kepolisian dan Kejaksaan yang disebut sebagai Tiga Pilar Penegak (Setyawati & Puspita, 2023). Untuk pembagian lingkup penyuluhan pungli, inspektorat melakukan di berbagai Perangkat Daerah dan unit-unit pelayanan publik seperti UPT pasar, sedangkan kepolisian di masyarakat-masyarakat melalui Babinsa.

Contoh pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan inspektorat adalah memanggil satu perwakilan dari setiap dinas-dinas dan untuk sub unit dinas

inspektorat mengumpulkan setiap kepala-kepala unit seperti kepala-kepala sekolah SD dan SMP, guru-guru dan pengawas sekolah. Untuk materi penyuluhan sumbernya sama dengan materi sosialisasi yaitu dari website resmi KPK dan disesuaikan dengan objek yang dilakukan penyuluhan (Lestari, 2023)

c. Konsultasi

Pencegahan *fraud* juga dapat dilakukan melalui konsultasi (Setyawati, 2023). Konsultasi dilakukan dalam banyak kesempatan seperti inspektorat diundang oleh OPD untuk rapat koordinasi terkait masalah tertentu di kantor OPD tersebut. Jika dalam sebuah kegiatan OPD merasa ada kesulitan dan keraguan untuk mengambil langkah maka melalui konsultasi inspektorat akan memberikan saran-saran yang dapat ditempuh oleh OPD. contoh permasalahan yang dikonsultasikan oleh Perangkat Daerah kepada tim auditor itu seperti dalam pengadaan barang dan jasa atau pengadaan tanah kas desa, mereka konsultasi agar dapat menghindari penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya (Ngatiyah, 2023). Kesempatan lain untuk konsultasi adalah ketika inspektorat sedang melakukan pengawasan (Puspita, 2023). Disela-sela pengawasan, OPD yang sedang diawasi inspektorat mengambil kesempatan untuk konsultasi kepada tim auditor yang sedang memeriksa. Contohnya ketika tim auditor sedang memeriksa keuangan pegawai Perangkat Daerah yang memiliki permasalahan atau kesulitan dalam pekerjaan akan langsung berkonsultasi selama proses pengawasan yang sedang dilakukan. Konsultasi tidak hanya dengan berbincang-bincang saja, namun mereka juga diminta menunjukkan berkas-berkas *hard file* yang menjadi bahasan konsultasi walaupun sebenarnya file dalam bentuk softcopy sudah ada di handphone yang biasanya tidak begitu jelas isi file nya (Devi, 2023). Tim auditor yang sedang melakukan pengawasan itu dianggap sudah memiliki ilmu terkait apapun permasalahan yang dihadapi oleh OPD, jadi para pegawai OPD tidak ragu untuk konsultasi dan tim auditor pun menyanggupi karena sudah mumpuni (Puspita, 2023). Konsultasi ini mampu mencegah *fraud*. dengan pengetahuan langkah yang bagaimana dan prosedur seperti apa setelah konsultasi dengan auditor

inspektorat maka diharapkan tidak membuka peluang melakukan *fraud* dalam realisasi kegiatan OPD (Ngatiyah, 2023). Konsultasi ini lebih efektif daripada sosialisasi karena sosialisasi biasanya harus terjadwal, dan tergantung permintaan kemudian menyesuaikan jadwal pegawai inspektorat yang membutuhkan konfirmasi bisa atau tidak (Puspita, 2023)

d. Menerbitkan surat edaran *anti* gratifikasi

Upaya lainnya pencegahan *fraud* yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sleman adalah menerbitkan surat edaran *anti* gratifikasi dan selebaran. inspektorat telah membagi selebaran berisi konten pencegahan gratifikasi kepada sub-sub unit perangkat daerah dan setiap hari raya inspektorat mengeluarkan surat edaran yang ditandatangani oleh bupati yang berisi pencegahan gratifikasi untuk diberikan kepada seluruh perangkat daerah sampai desa kemudian kepada konsorsium kelompok pengusaha, dan lain-lain dengan isi agar tidak perlu memberi ke pegawai pemerintah atas pelayanan yang diberikan (Lestari, 2023). Sekarang juga sudah di pasang banner di depan kantor-kantor OPD, kecamatan dan kalurahan bertuliskan melayani tanpa gratifikasi. Tujuannya agar masyarakat mengetahui kalau Perangkat Daerah memberikan layanan gratis tidak ada pungutan terutama di layanan-layanan umum seperti MPP, DPMPTSP yang merupakan layanan perizinan dan juga dinas catatan sipil (Ngatiyah, 2023)

Kemudian jika ada laporan penerimaan gratifikasi, maka wajib dilaporkan lanjut ke KPK atau bisa melaporkan melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Inspektorat dan UPG kemudian melaporkan ke KPK (Lestari, 2023). ini merupakan rangkaian kegiatan kesekretariatan subbagian perencanaan evaluasi dan pelaporan (Satiti, 2023).

e. Pendampingan pelaksanaan Tupoksi OPD

Upaya *antifraud* lainnya yang dilakukan oleh inspektorat adalah pendampingan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah agar tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dapat berjalan dengan baik (Setyawati, 2023). Pendampingan atau pembinaan inspektorat itu bermacam-macam, bisa melalui pengawasan, dalam pengawasan itu ada pemeriksaan, review, monitoring, evaluasi (Satiti, 2023). Pendampingan pelaksanaan



tupoksi OPD ini berdampak untuk mencegah *fraud*. Jika *nanti* dalam pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah ada yang akan melenceng dari perencanaan maka inspektorat akan menunjukkan proses yang seharusnya (Devi, 2023). Jika semua berjalan dengan baik maka akan menghindarkan dari *fraud* (Setyawati, 2023).

f. Monitoring pencegahan korupsi

Ibu Ir. Sri Puji Lestari (2023) selaku sekretaris Inspektorat Kabupaten Sleman mengatakan bahwa sekarang banyak kegiatan KPK yang diturunkan ke daerah. Bentuk kegiatan KPK itu adalah MCP KPK dan Stranas PK monitoring pemberantasan korupsi. Maka Inspektorat harus melakukan monitoring penerapan stranas (Strategi Nasional) pemberantasan korupsi. Program ini merupakan turunan dari program MCP KPK.

g. Analisis penilaian risiko *fraud*

Analisis penilaian risiko *fraud* dalam pelaksanaan kegiatan OPD adalah pekerjaan baru inspektorat untuk mencegah *fraud*. kegiatan ini merupakan program baru SPIP berkaitan dengan IEPK (Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi). Kalau dulu yang ada masih sebatas analisa risiko-risiko yang menghambat atau menggagalkan capaian tujuan kegiatan, namun SPIP sekarang mengalami perkembangan baru. Kegiatan ini berlangsung sejak 2022 dan diharapkan akan terus berlanjut. Analisis risiko ini akan memberikan penilaian risiko *fraud* terjadi (Lestari, 2023). Analisis penilaian risiko *fraud* juga dilakukan sebelum pemeriksaan. Biasanya dilakukan identifikasi risiko pada program-program krusial OPD yang mana dalam mengidentifikasi itu termasuk mengidentifikasi apakah kemungkinan terjadi ketidaktertiban, namun belum tentu penyimpangan (Puspita, 2023).

h. Meminta perwakilan setiap OPD ikut E-Learning KPK

Ibu Puji (2023) mengatakan bahwa ke depannya terkait dengan pendidikan *antikorupsi* itu tidak hanya akan di Inspektorat saja. Sejak tahun 2022 inspektorat sudah mengeluarkan surat ditujukan kepada seluruh OPD untuk mengirimkan personil nya agar mengikuti e-learning KPK bersama inspektorat

i. Pembentukan Lini Manajemen Pemerintahan

Dengan dibentuknya bidang investigasi dan reformasi birokrasi, maka inspektorat memiliki tugas tambahan terkait birokrasi pemerintahan. Ibu Puji (2023) menerangkan bahwa adanya bidang investigasi dan reformasi birokrasi yang baru dibentuk itu akan membantu pembentukan di semua lini manajemen pemerintahan supaya tercapai *good governance*.

4.3.2 Pendeteksian

a. Pemeriksaan Reguler

Inspektorat melaksanakan program pemeriksaan reguler berupa pemeriksaan kinerja, pemeriksaan keuangan, pemeriksaan dengan sasaran tertentu baik pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan (Lestari, 2023). Sebelumnya pemeriksaan masih ditangani oleh sekretariat, namun sekarang program pemeriksaan reguler dilaksanakan oleh semua inspektur pembantu kecuali inspektur pembantu investigasi dan reformasi birokrasi. Pemeriksaan pertama disebut dengan pemeriksaan reguler. Auditor akan mengidentifikasi kecurangan dalam pemeriksaan reguler (Setyawati, 2023). Dalam pemeriksaan reguler auditor akan mendeteksi *fraud* (Ngatiyah, 2023). Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara mencocokkan antara rencana dengan realisasi kegiatan OPD (Devi, 2023).

b. Pemeriksaan Khusus

Tindak lanjut dari pemeriksaan reguler jika terdapat bukti-bukti kecurangan adalah pemeriksaan khusus (Puspita, 2023). Jadi, bahwa jika ada indikasi *fraud* yang diperiksa di pemeriksaan reguler tidak cukup waktu, dan sumber daya maka setelah terbit LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) akan dilanjutkan ke pemeriksaan khusus (Setyawati, 2023). Pemeriksaan khusus ini dilakukan untuk lebih memperdalam pemeriksaan penyimpangan yang terjadi.

### 4.3.3 Investigasi

#### a. Membentuk bidang investigasi

Sejak bulan Maret 2023 organisasi dalam inspektorat mengalami perubahan yaitu dengan adanya bidang yang menangani investigasi dan reformasi birokrasi yang mana sebelumnya tidak ada. Dulu penanganan investigasi dilakukan oleh semua inspektur pembantu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dan untuk saat ini pemeriksaan investigasi yaitu pemeriksaan atas dugaan korupsi dilaksanakan oleh inspektur pembantu bidang investigasi dan reformasi birokrasi. Terbentuknya bidang investigasi dan reformasi birokrasi atas perintah dari KPK (Lestari, 2023). Bidang baru ini dibentuk dan disahkan oleh Perbub di bulan Desember 2022. Personil bidang ini ada delapan orang termasuk Inspektur Pembantu nya (Setyawati, 2023).

#### b. Permintaan pemeriksaan kasus dari APH

Selain pengembangan dari pemeriksaan sendiri terhadap laporan OPD, inspektorat juga memenuhi permintaan pemeriksaan kasus dari APH untuk investigasi (Puspita, 2023). Contohnya ketika kejaksaan ada menerima aduan dari masyarakat maka kemudian kejaksaan meminta inspektorat untuk melakukan pemeriksaan (Ngatiyah, 2023). Ngatiyah (2023) mengatakan bahwa dirinya pernah menangani kasus sampai di putusan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi). Berawal dari BPKP masuk ke kalurahan dan mendapat temuan-temuan setelah itu disampaikan ke APH, lalu APH meminta inspektorat untuk perhitungan kerugian negara dan hasil pemeriksaan akan digunakan APH di pengadilan. Jadi kalau ada penyimpangan disitu baru ada koordinasi APH dengan inspektorat. Proses investigasi ini tergantung permintaan APH seperti apa data yang disuplai, apa yang harus diperiksa itu sudah difokuskan.

#### c. Pemeriksaan investigasi

Dengan adanya Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi maka akan ada pemeriksaan investigasi. Kalau dulu masih disebut pemeriksaan khusus sebagai kelanjutan dari pemeriksaan reguler, sekarang akan jadi pemeriksaan investigasi (Setyawati, 2023). Sebelumnya bentuk investigasi yang

dilakukan adalah temuan pemeriksaan akan di monitoring di sub bagian evaluasi dan pelaporan. Monitoring dilakukan melalui sistem pengawasan dan tindak lanjut. Jadi temuan-temuan akan di input ke dalam sistem, kemudian ditindaklanjuti oleh OPD atau auditee. Ada dua metode, yang pertama melewati sistem tersebut OPD bisa upload bukti tentang SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) kurang lengkap. Kemudian bukti tersebut akan diverifikasi oleh tim auditor sedangkan yang kedua adalah secara manual melalui program pemantauan yang dijadwalkan tiga bulan sekali secara periodik. Jadi OPD mana yang masih memiliki tunggakan, temuan, jika belum selesai menindaklanjuti SPJ akan dipanggil ke inspektorat untuk ditindaklanjuti oleh tim auditor (Devi, 2023). Ada juga Jika dalam dua bulan belum selesai, maka berdasarkan ketentuan harus dilimpahkan ke APH, namun tindakan ini tidak bisa serta merta begitu saja karena Inspektorat tetap harus membina karena memiliki fungsi pembinaan (Satiti, 2023)

d. Pemeriksaan setelah menerima laporan

Inspektorat juga melakukan tindak lanjut pemeriksaan atas laporan dari OPD lain atau dinas teknis lain (Setyawati, 2023). Di luar pemerintahan daerah, inspektorat juga melakukan pemeriksaan setelah menerima laporan dari masyarakat (Devi, 2023). Pengaduan masyarakat ini akan digali terlebih dahulu sebelum naik ke pemeriksaan kasus. Ibu Ika Sulistyio Devi (2023) selaku kepala subbagian evaluasi dan pelaporan memberikan contoh jika ada masyarakat yang mengadukan adanya pelanggaran di kecamatan, maka inspektorat akan mempertimbangkan tingkat pelanggarannya, jika ringan maka inspektorat meminta bantuan kecamatan sendiri yang menyelesaikannya namun dengan tetap melaporkan *progress* penyelesaiannya kepada inspektorat. Jika pelanggaran yang dilaporkan berat seperti korupsi maka inspektorat akan langsung turun tangan.

e. Tindak lanjut hasil investigasi ke APH

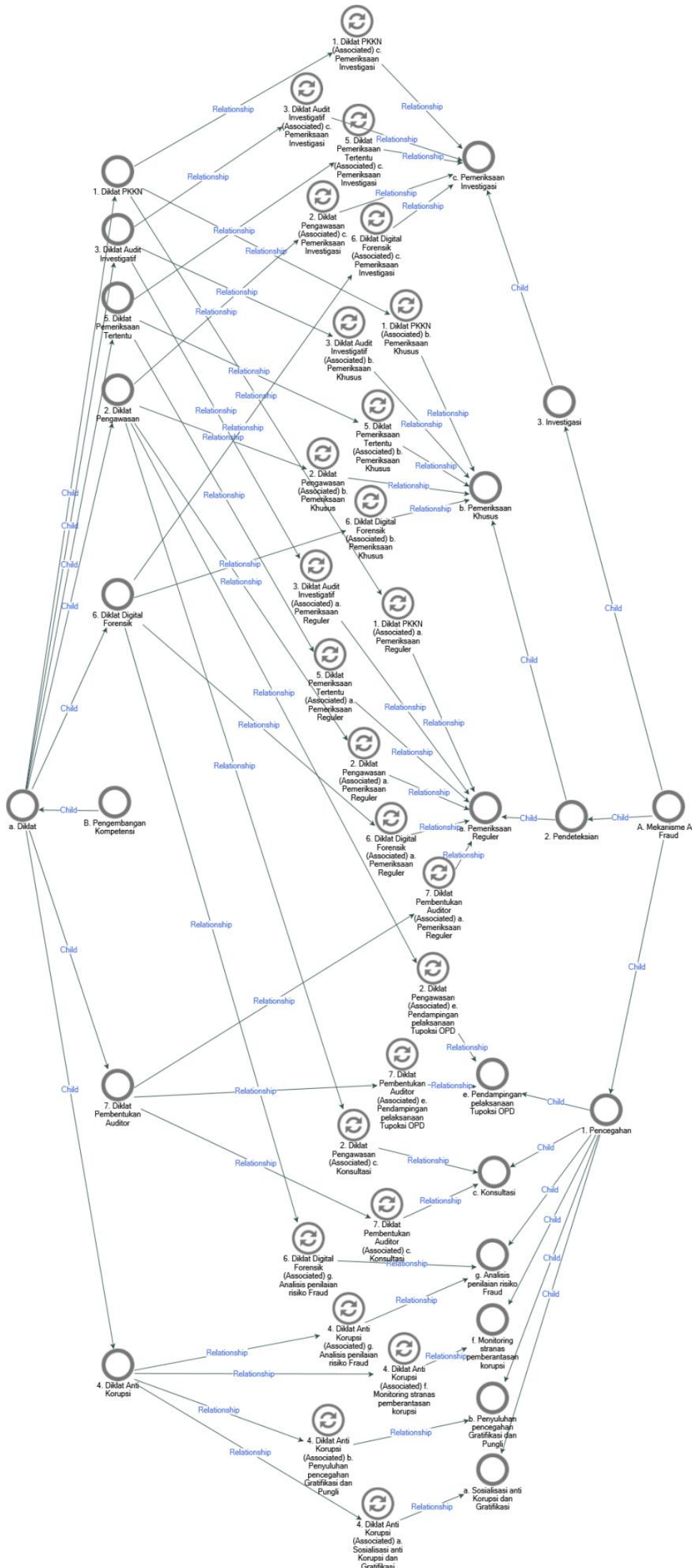
Kelanjutan dari hasil investigasi adalah tindakan hukum. Tindakan hukum bukan ranah inspektorat. Inspektorat hanya melakukan penghitungan dan pemeriksaan sesuai kompetensi dan keahlian standar selaku auditor (Puspita, 2023). Maka hasil investigasi inspektorat bisa dilimpahkan ke APH

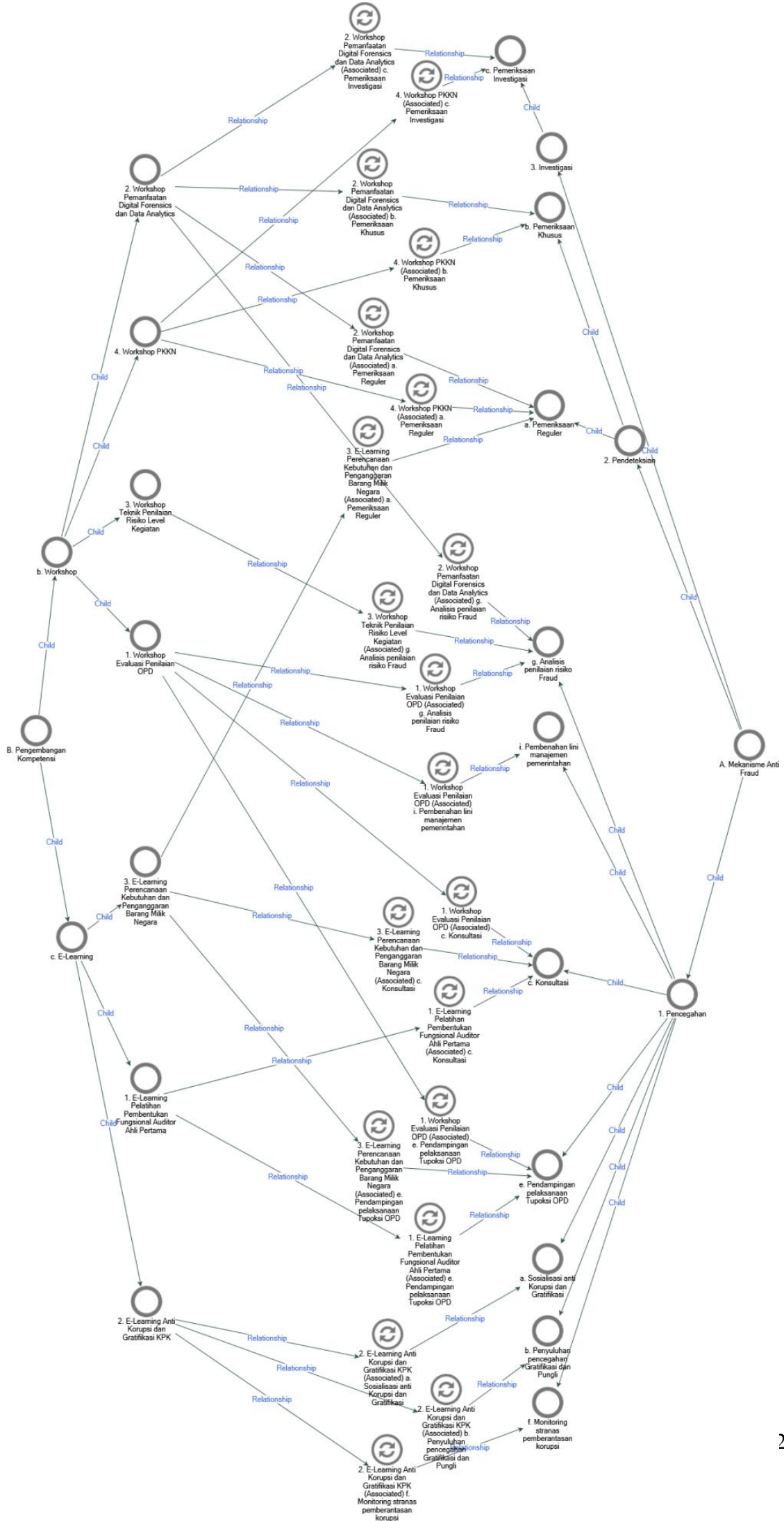
(Setyawati, 2023). Inspektorat terbatas mengurus disiplin pegawai, adapun penegakan hukum bukan ranah inspektorat.



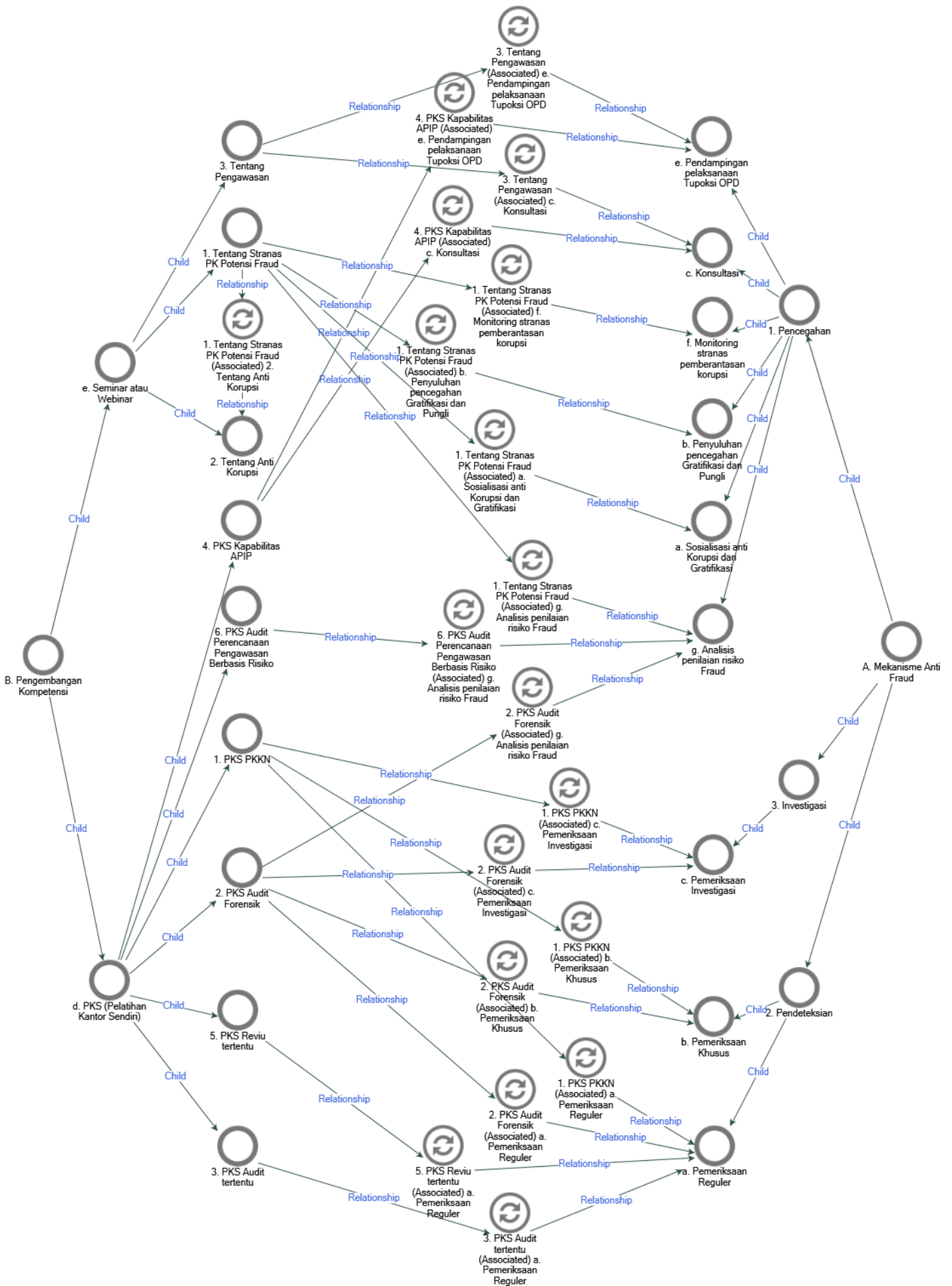
4.4 Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia *Antifraud* Inspektorat  
Kabupaten Sleman

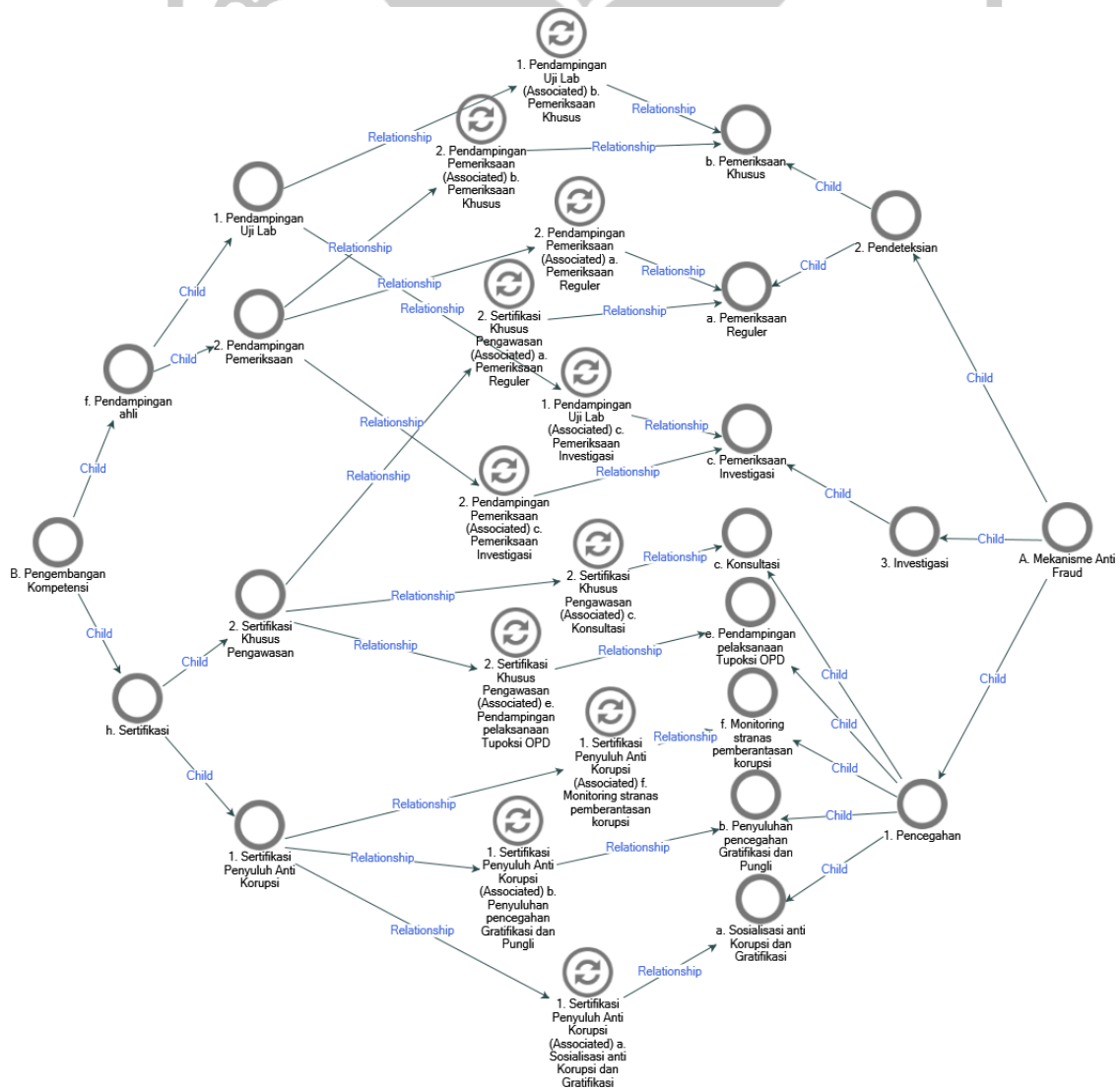
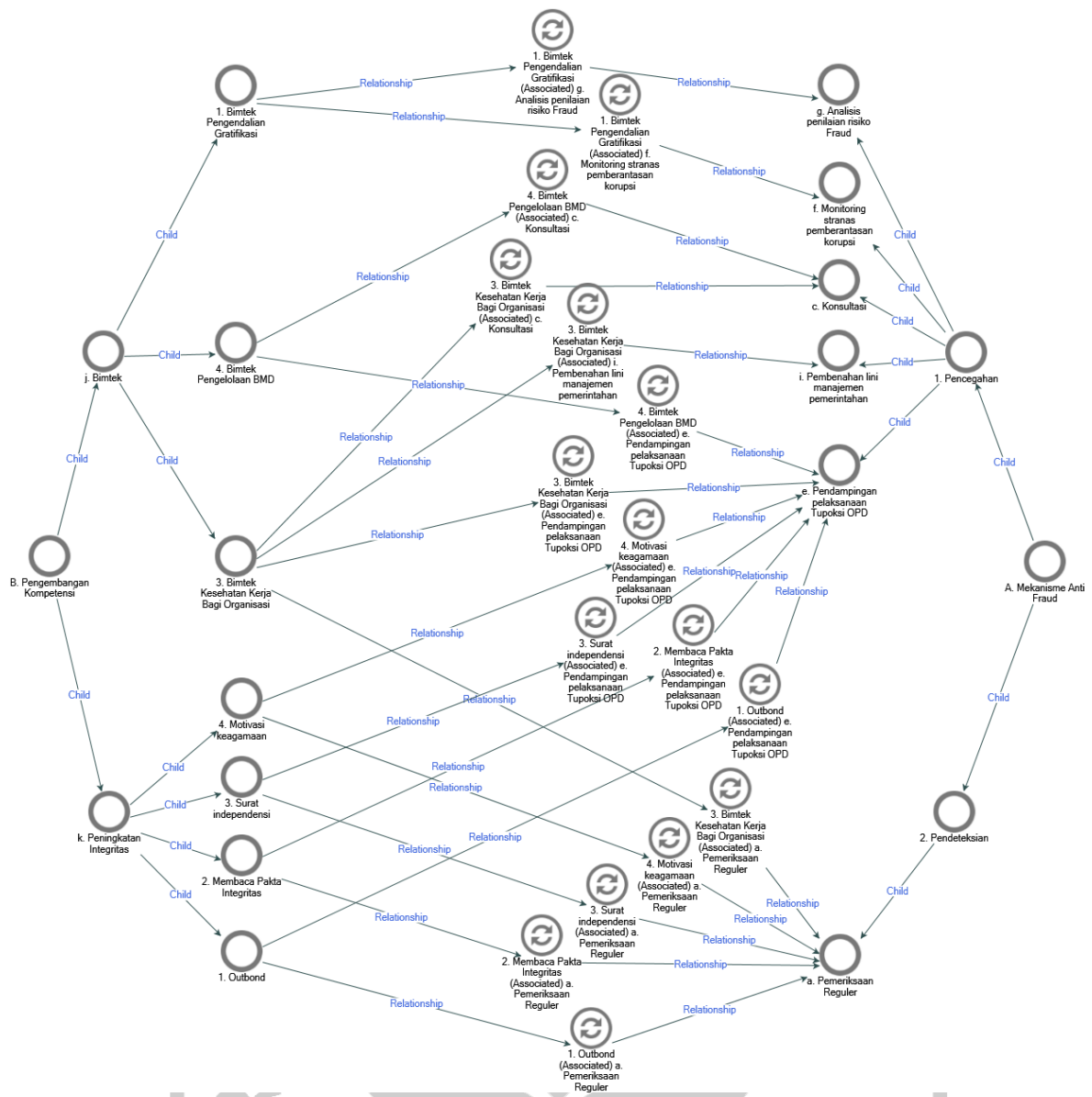












Gambar 4.4 Analytical Maps Pengembangan Kompetensi Sumber Antifraud dan Mekanisme Antifraud

PENGEMBANGAN KOMPETENSI	MEKANISME																		
	a. Pencegahan	1. Sosialisasi anti Korupsi dan Gratifikasi	2. Penyuluhan pencegahan Gratifikasi dan Pungli	3. Konsultasi	4. Menerbitkan surat edaran anti gratifikasi	5. Pendampingan pelaksanaan Tupoksi OPD	6. Monitoring stranas pemberantasan korupsi	7. Analisis penilaian risiko Fraud	8. Meminta perwakilan setiap OPD ikut E-Learning KPK	9. Pembinaan lini manajemen pemerintahan	b. Pendeteksian	1. Pemeriksaan Reguler	2. Pemeriksaan Khusus	c. Investigasi	1. Membutuk bidang investigasi	2. Permintaan pemeriksaan kasus dari APH	3. Pemeriksaan Investigasi	4. Pemeriksaan setelah menerima laporan	5. Tindak lanjut hasil investigasi ke APH
a. Diklat																			
1. Diklat PKKN																			
2. Diklat Pengawasan																			
3. Diklat Audit Investigatif																			
4. Diklat Anti Korupsi																			
5. Diklat Pemeriksaan Tertentu																			
6. Diklat Digital Forensik																			
7. Diklat Pembentukan Auditor																			
b. Workshop																			
1. Workshop Evaluasi Penilaian SKPD																			
2. Workshop Pemanfaatan Digital Forensics dan Data Analytics																			
3. Workshop Teknik Penilaian Risiko Level Kegiatan																			
4. Workshop PKKN																			
c. E-Learning																			
1. E-Learning Pelatihan Pembentukan Fungsional Auditor Ahli Pertama																			
2. E-Learning Anti Korupsi dan Gratifikasi KPK																			
3. E-Learning Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Negara																			
d. PKS (Pelatihan Kantor Sendiri)																			
1. PKS PKKN																			
2. PKS Audit Forensik																			
3. PKS Audit tertentu																			
4. PKS Kapabilitas APIP																			
5. PKS Reviu tertentu																			
6. PKS Audit Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko																			
e. Seminar atau Webinar																			
1. Tentang Stranas PK Potensi Fraud																			
2. Tentang Anti Korupsi																			
3. Tentang Pengawasan																			
f. Pendampingan ahli																			
1. Pendampingan Uji Lab																			
2. Pendampingan Pemeriksaan																			
g. Sertifikasi																			
1. Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi																			
2. Sertifikasi Khusus Pengawasan																			
h. Bimtek																			
1. Bimtek Pengendalian Gratifikasi melalui Aplikasi Online																			
2. Bimtek Penghitungan Angka Kredit Pengangkatan Pertama																			
3. Bimtek Kesehatan Kerja Bagi Organisasi																			
4. Bimtek Pengelolaan BMD																			
i. Peningkatan Integritas																			
1. Pembelajaran Alam Outbond																			
2. Setiap Senin bergantian membaca Pakta Integritas																			
3. Surat independensi setelah surat tugas																			
4. Mengundang Pihak Luar untuk motivasi keagamaan																			

Tabel 4.2 Matrix Coding Query Pengembangan Kompetensi dan Mekanisme Antifraud

Pengembangan Kompetensi pegawai Inspektorat Kabupaten Sleman sangat berhubungan dengan seluruh kegiatan *antifraud* Inspektorat Kabupaten Sleman. Seluruh pegawai di Inspektorat dianggap mumpuni oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman.

Bapak Hery Dwi Kuryanto, S.H., M.Hum. (2023) selaku inspektur mengatakan *“Ya, jadi tujuannya kalau untuk inspektorat, Pasti pelatihan apapun itu, pasti mendukung itu. Jadi kecurangan semua itu kalau yang namanya APIP, Pasti dalam rangka untuk menghindari kecurangan. Tidak ada pelatihan yang di sini tanpa...Aktifitas yang dilakukan oleh inspektorat itu semua menuju ke sana”*

Ibu Ngatiyah (2023) selaku auditor muda juga menuturkan *“Itu sih saling berhubungan ya mas ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi fraud nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada fraud lah disini kayak gitu.”*

Dilihat dari program pengembangan kompetensi pegawai Inspektorat Kabupaten Sleman maka terdapat dua jenis yaitu yang berkaitan dengan *fraud* dan yang tidak langsung berkaitan dengan *fraud*, namun karena fungsi pengawasan yang dimiliki oleh inspektorat maka program yang tidak berkaitan langsung dengan *fraud* juga berguna bagi pegawai inspektorat untuk lebih ahli memeriksa selak beluk potensi *fraud*.

Ibu Ngatiyah juga menerangkan keterkaitan program pengembangan kompetensi yang tidak berkaitan dengan *fraud* dengan kegiatan *antifraud* Inspektorat. Beliau mengatakan *“Maksudnya yang diluar fraud tapi bisa menunjang fraud gak? Gitu ya?, kalau aku sih bisa juga sih, kan misalnya pengembangan kompetensi kita mendapat sosialisasi tentang kesehatan lah kayak gitu ya, tentang kesehatan, tentang TIK, tentang apa padahal kita kan meriksanya itu kita nyari fraudnya di masing-masing opd dibanyak opd yang memang kayak misalnya kita ke rumah sakit kita butuh juga ilmu kesehatan kan jadi menunjang juga ya mas ya misalnya kita sosialisasi atau dapat sosialisasi kesehatan tentang ini,ini,ini terus kita ke rumah sakit gitu meriksa itu kan nanti bisa dipakai lah gitu, terus misalnya tentang teknologi informasi kita ke kominfo disitu ada aplikasi-aplikasi apa yang kita gak tau, karna kita tadi sudah workshop apa diklat ini kan bisa menunjang kesitu soalnya saking luasnya cakupan kita ya, jadi*

*semuanya bisa masuk, kan kalau auditor kan mau dituntut tau segala hal karena kita memang obrik nya, objek pemeriksaannya kan banyak, cakupannya kan banyak ya memang harus tau macem-macam makanya ilmu apapun kita bisa pakai tau untuk itu.”*

Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, setiap pegawai akan diarahkan atau diperintahkan mengikuti program yang sesuai dengan bidang maupun kebutuhan tugas yang akan dilaksanakan. Ibu Ika (2023) selaku Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mengatakan *“Itu, jadi si A, si B, si C itu dia harus memenuhi apa gitu dia sebagai pegawai, misalnya auditor. Auditor di bidang investigasi itu harusnya lebih banyak dia melakukan audit keinvestigasian. Berarti nanti yang didiklatkan lebih banyak investigasi yang di bidang investigasi. Kemudian nanti kalau yang di auditor di pemerintahan itu banyak melakukan pemeriksaan di kalurahan, mereka diklat di tentang pengelolaan keuangan kalurahan. Jadi tergantung, tergantung apa ya, kebutuhan mereka.”*

Setelah mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi, pegawai inspektorat dapat melaporkan telah selesai mengikuti kegiatan untuk menghitung angka kredit pemenuhan jam pembelajaran yang telah diwajibkan bagi pegawai inspektorat. Dalam satu tahun, setiap pegawai harus memenuhi minimal 120 jam pembelajaran sebagai kewajiban pegawai inspektorat dan untuk menilai peningkatan profesi pegawai. Berikut berbagai program pengembangan kompetensi yang diikuti atau diadakan Inspektorat Kabupaten Sleman yang berguna untuk menjalankan tugas *antifraud* di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sleman, antara lain:

#### 1.2. Diklat

Inspektorat mengirim pegawai baik fungsional maupun struktural untuk mengikuti diklat setiap bulan sebagai peningkatan kompetensi dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan. Diklat yang diikuti bisa berasal dari BPK, KPK, dan BPKP. Diklat ini merupakan kewajiban program pengembangan kompetensi bagi pegawai inspektorat untuk memenuhi jam pembelajaran. Dalam pelaksanaannya pegawai inspektorat dikirim secara bergiliran setiap ada diklat yang sesuai kebutuhan pegawai dan dengan kuota yang terbatas karena menyesuaikan dengan anggaran diklat yang dikelola oleh BKPP.

*“Kalau masalah peningkatan SDMnya ya memang kita upayakan untuk mengirim ke berbagai diklat yang menurut kami itu berguna untuk bekerja di bidang masing-masing seperti itu, misalnya tadi ada bidang investigasi baru, kemarin Mba Pipit dan Mba Retno itu di ikutkan untuk diklat masalah perhitungan keuangan negara” (Setyawati, 2023).*

Berikut adalah berbagai diklat yang diikuti oleh pegawai Inspektorat Kabupaten Sleman:

a. Diklat PKKN

Diklat Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dibutuhkan oleh auditor inspektorat dalam melaksanakan tugas pemeriksaan reguler, pemeriksaan khusus dan pemeriksaan investigasi. Dalam pemeriksaan investigasi, inspektorat bisa bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH), APH ketika melakukan penyidikan akan meminta auditor inspektorat untuk melakukan penghitungan kerugian negara akibat kasus yang sedang mereka tangani. Melalui diklat PKKN pegawai inspektorat mampu memiliki keahlian untuk melaksanakan tugas penghitungan kerugian keuangan negara. Pegawai inspektorat yang dikirim mengikuti diklat hanya satu atau dua orang saja dalam satu tahun berdasarkan anggaran BKPP dan juga keputusan manajemen inspektorat memberikan surat tugas kepada pegawai inspektorat yang membutuhkan kompetensi PKKN. Angka kredit JPL (Jam Pembelajaran) yang dapat di akumulasi dari kegiatan diklat adalah 50, dan angka ini menjadi angka kredit terbanyak diantara berbagai program pengembangan kompetensi.

*“Saya begitu bulan Maret dapat SK Surat Perintah Melaksanakan Tugas di bidang itu memang saya dikirim dengan anggaran BKPP Anggarannya BKPP, tapi by name-nya kebetulan saya sama Mbak Pipit, mungkin Mbak Pipit pernah ketemu, kami di diklat kan PKKN, Penghitungan kerugian keuangan negara” (Satiti, 2023)*

b. Diklat Pengawasan

Diklat pengawasan merupakan diklat yang khusus diikuti bagi pegawai baru inspektorat. Diklat ini merupakan program langsung dari BPKP selaku pembina inspektorat.

*“Dan yang baru itu ada diklatnya, setelah masuk sini ada diklat khusus pengawasan, kita diklat kan, khusus pengawasan dari dasar”* (Lestari, 2023).

*“Diklat pengawasnya bpkp sama Balai Diklatnya BPK, programnya langsung pengawasan, dan mereka pembina juga ya”* (Setyawati, 2023)

Karena untuk auditor baru, hanya satu atau dua peserta yang ikut serta diklat pengawasan yang diadakan BPKP. Dengan bekal ilmu yang diperoleh dari diklat ini seorang auditor dapat melakukan tugas pemeriksaan baik reguler, khusus, dan investigasi serta mendampingi OPD dalam pelaksanaan tupoksi dan juga mampu memberikan konsultasi bagi pegawai OPD dalam pelaksanaan kegiatan.

c. Diklat Audit Investigatif

Diklat audit investigatif merupakan salah satu diklat yang baru diikuti oleh beberapa pegawai inspektorat karena diklat ini berkaitan dengan baru terbentuknya bidang investigasi dan reformasi birokrasi, maka auditor dalam bidang tersebut harus mengikuti diklat tentang investigasi.

*“Auditor di bidang investigasi itu harusnya lebih banyak dia melakukan audit keinvestigasian. Berarti nanti yang didiklatkan lebih banyak investigasi yang di bidang investigasi”* (Devi, 2023)

*“Tahun ini itu sudah tiga kali pengiriman diklat yang kaitannya sama investigatif” dan “jadi memang ada diklatnya sendiri sih, insvestigasi”* (Puspita, 2023)

Pegawai inspektorat yang mengikuti diklat ini baru satu orang yaitu inspektur pembantu dari bidang investigasi dan reformasi birokrasi. Setelah mengikuti diklat ini diharapkan nanti auditor bidang investigasi dan

reformasi birokrasi dapat melaksanakan tugas pemeriksaan baik pemeriksaan reguler, khusus dan juga investigasi

d. Diklat *Anti Korupsi*

Berbeda dengan diklat yang lainnya yang mana hanya menyesuaikan kebutuhan pegawai dalam penugasan, diklat *anti korupsi* dibutuhkan oleh seluruh pegawai inspektorat dalam rangka mendukung kegiatan pencegahan *fraud*. Pegawai inspektorat yang mengikuti diklat ini bisa dalam jumlah yang lebih banyak dari diklat lainnya yaitu tujuh sampai sembilan orang.

*“Kalau terkait dengan untuk pencegahan fraud sebetulnya kita itu sudah ada (apa namanya) mengirimkan SDM ya, mengirimkan SDM untuk mengikuti pelatihan atau diklat terkait dengan penyuluh anti korupsi. Nggih, sebelum jadi penyuluh ada pelatihan dulu ya, itu kita sudah mengirimkan ada kalau nggak salah ada 9 orang atau 7 orang untuk mengikuti diklat tersebut”* (Lestari, 2023)

Materi yang diberikan dalam kegiatan diklat *anti korupsi* banyak berasal dari KPK. Setelah mengikuti diklat ini, *nantinya* pegawai inspektorat yang akan melakukan sosialisasi *anti korupsi*, penyuluhan dan mampu memonitoring pemberantasan korupsi sedangkan dalam tugas pengawasan ilmu dari diklat *anti korupsi* ini akan berguna bagi pegawai inspektorat saat pendampingan pelaksanaan tupoksi OPD dan ketika analisis penilaian risiko *fraud* dalam rangka SPIP.

e. Diklat Pemeriksaan tertentu

Contoh diklat pemeriksaan tertentu adalah diklat pemeriksaan infrastruktur jalan dan jembatan. Diklat tersebut telah diikuti oleh tiga orang pegawai. Kemudian ada diklat pemeriksaan pendapatan daerah yang akan diikuti oleh dua orang pegawai. Ada diklat IT audit dan diklat audit kinerja yang masing-masing akan diikuti oleh dua dan satu pegawai Inspektorat Kabupaten Sleman. Dengan mengikuti diklat pemeriksaan tertentu ini akan meningkatkan keahlian auditor inspektorat dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, baik pemeriksaan reguler, khusus dan investigasi



f. Diklat Digital Forensik

Era transformasi digital saat ini semua sistem pemerintahan didorong untuk menggunakan sistem berbasis elektronik. BPKP selaku pembina inspektorat juga mengadakan diklat terkait digital forensik yang diikuti oleh pegawai inspektorat. Baru satu orang pegawai inspektorat yang mengikuti diklat digital forensik ini dan diakui oleh auditor lain di inspektorat hasilnya ilmu dari diklat tersebut luar biasa.

*“Digital forensik kemarin ada di diklatnya, Yang ikut baru satu orang”*  
(Devi, 2023)

*“Kemarin ada satu mbak untuk lebih digital forensik, barusan ada yang diklat namanya mbak Tiwi, dan dia kemarin hasilnya luar biasa”* (Satiti, 2023)

Kelak pengetahuan dan kemampuan digital forensik akan sangat berguna bagi auditor inspektorat untuk melakukan analisis risiko *fraud* dalam kegiatan OPD dan mempercepat serta mempermudah tugas auditor dalam pemeriksaan reguler, khusus maupun investigasi.

g. Diklat Pembentukan Auditor

Diklat pembentukan auditor adalah diklat yang akan diikuti oleh pegawai baru sebagai fungsional agar dapat menjalankan fungsi auditor inspektorat dalam menjalani tugas pokok inspektorat seperti pemeriksaan reguler dan juga akan mampu menjadi tempat konsultasi bagi pegawai OPD serta mampu dalam penugasan pendampingan pelaksanaan tupoksi OPD. Setelah mengikuti diklat pembentukan auditor ini maka pegawai fungsional akan ditentukan sebagai jenis auditor yang sesuai dengan kompetensinya.

*“Jadi auditor, seorang auditor, ketika dia mau menjadi fungsional auditor, di awal sudah dibentuk dengan diklat. Yang diikuti diklat sertifikasinya. Lulus peran misalnya auditor terampil, auditor muda, auditor terampil itu anggota tim, auditor ahli muda itu ketua tim, auditor madya itu pengendali teknis. Nah Ketika sebelum dibentuk itu, kami itu sudah dilalui seleksi saat itu.”* (Satiti, 2023)

### 1.3. Workshop

Workshop juga menjadi kegiatan pengembangan kompetensi bagi pegawai inspektorat. Workshop dilakukan dengan cara mengundang pihak dari luar inspektorat untuk memberi pelatihan di kantor inspektorat atau pegawai inspektorat yang mendatangi lokasi diadakan workshop atau lokasi pemateri workshop untuk pelatihan workshop. Workshop merupakan program yang inspektorat mengelola anggaran sendiri untuk mengikuti workshop dan menentukan materi yang diinginkan serta mengirim pegawai yang sesuai dengan bidang atau penugasan. Workshop juga program pengembangan kompetensi yang memiliki angka kredit jam pembelajaran bagi pegawai. Angka kredit JPL yang bisa di akumulasi dari workshop berkisar lima sampai delapan poin. Pegawai inspektorat yang mengikuti workshop tidak dalam jumlah banyak seperti diklat, yang berkaitan dengan *antifraud* bisa hanya diikuti oleh satu atau dua orang pegawai sesuai kebutuhan penugasan.

Contoh-contoh workshop yang diikuti oleh pegawai inspektorat antara lain pelatihan mengenai evaluasi penilaian risiko OPD, workshop teknik penilaian risiko level kegiatan yang lebih spesifik daripada risiko OPD secara keseluruhan, kemudian ada workshop pemanfaatan digital forensik dan data analytics, serta workshop PKKN. Workshop terkait penilaian risiko OPD dan kegiatannya dibutuhkan oleh inspektorat untuk penugasan pendampingan pelaksanaan tupoksi OPD tersebut karena masing-masing OPD punya tupoksi masing-masing. Kemudian juga menambah pengetahuan pegawai inspektorat untuk tempat konsultasi bagi pegawai OPD. Workshop tersebut juga akan meningkatkan kemampuan auditor inspektorat dalam melakukan analisis risiko *fraud* di berbagai OPD. Sedangkan Workshop pemanfaatan digital forensik dan PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) menjadi kegiatan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan auditor inspektorat untuk melakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan reguler, khusus maupun investigasi. Dengan mengikuti workshop digital forensik juga diharapkan auditor inspektorat semakin baik dalam melakukan analisis risiko *fraud* karena penggunaan basis teknologi elektronik dalam menganalisa nya.

#### 1.4. E-Learning

Inspektorat juga memanfaatkan perkembangan media komunikasi online sebagai sarana pengembangan kompetensi dengan mengikuti berbagai e-learning sesuai kebutuhan. E-learning sebenarnya hampir sama dengan diklat secara tatap muka hanya saja e-learning diselenggarakan secara online dan anggarannya dikelola sendiri oleh inspektorat. Pegawai yang mengikuti e-learning bisa berdasarkan surat perintah contohnya seperti Ibu Pipit selaku auditor muda bidang investigasi dan reformasi birokrasi yang mendapat perintah mengikuti e-learning dari Ibu Heri selaku inspektur pembantu bidang tersebut dan ada juga e-learning yang sifatnya hanya saran dan tidak wajib. Pegawai inspektorat yang mengikuti e-learning dapat mengakumulasi angka kredit jam pembelajaran. Jumlah angka kredit yang dapat diakumulasikan dari mengikuti e-learning berbeda setiap e-learning.

Beberapa e-learning yang telah diikuti oleh pegawai inspektorat antara lain:

##### 1. E-Learning Pelatihan Pembentukan Fungsional Auditor Ahli Pertama

Peserta yang mengikuti e-learning ini tidaklah banyak hanya satu atau dua orang saja dalam setiap kesempatan. Angka kredit yang dapat di akumulasi dari mengikuti e-learning ini adalah 60 poin. Kegiatan e-learning ini akan berguna bagi auditor dalam pendampingan pelaksanaan tupoksi OPD dan melakukan konsultasi kepada pegawai OPD tersebut.

##### 2. E-Learning *Anti* Korupsi dan Gratifikasi KPK

E-learning ini merupakan e-learning yang berasal dari KPK. Pegawai inspektorat yang bisa mengikuti e-learning ini bisa tujuh sampai sembilan orang (Lestari, 2023). Materi yang disampaikan dalam e-learning *anti* korupsi dan gratifikasi diambil dari website KPK. Kegiatan ini dibutuhkan oleh pegawai inspektorat dalam melaksanakan tugas *antifraud* seperti sosialisasi *anti* korupsi dan gratifikasi, penyuluhan pencegahan *fraud* dan monitoring stranas pemberantasan korupsi.

“Kalau sekarang modelnya anu ya zoom, e-learning gitu, kalau yang anti korupsi itu e-learning dengan KPK. Jadi e-learning kalau yang KPK itu kita menjadwalkan sendiri. Kecuali yang gratifikasi. Yang gratifikasi itu harus mengikuti jadwal dari sana.” (Devi, 2023)

### 3. E-Learning Perencanaan Kebutuhan BMN (Barang Milik Negara)

E-learning ini diadakan oleh Kemenkeu Learning Center yang diikuti oleh pegawai struktural inspektorat. Dalam setiap kesempatan setidaknya hanya satu orang pegawai struktural yang mengikuti e-learning ini yaitu penyusun kebutuhan barang inventaris. Angka kredit JPL yang dapat di akumulasi dari e-learning ini adalah sembilan poin. E-learning ini dibutuhkan oleh penyusun kebutuhan barang inventaris agar dapat melakukan konsultasi saat pengadaan barang atau jaga agar dapat menghindari langkah-langkah yang berpotensi *fraud*, kemudian berguna juga untuk kegiatan pemeriksaan reguler jika memeriksa barang inventaris OPD.

#### 1.5. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)

Pelatihan kantor sendiri atau yang disebut PKS merupakan program internal tersendiri bagi Inspektorat Kabupaten Sleman. PKS diadakan oleh inspektorat dengan mengandalkan narasumber dari pembina inspektorat yaitu BPKP atau pemateri dari pegawai inspektorat sendiri. Misalnya ada sebagian pegawai inspektorat yang sudah mengikuti diklat, maka yang sudah mengikuti diklat akan menjadi pemateri dalam PKS untuk membagi juga ilmunya kepada sebagian pegawai yang belum berkesempatan mengikuti diklat tersebut. Kegiatan PKS ini dapat diadakan setiap bulan oleh inspektorat. Dalam setiap kesempatan PKS, pegawai inspektorat yang mengikuti berjumlah 20 sampai 29 orang. Pegawai inspektorat yang mengikuti PKS juga dapat mengakumulasi angka kredit jam pembelajaran. Angka kredit yang dapat di akumulasi oleh setiap pegawai yang mengikuti PKS adalah 3,5 poin.

Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) pada umumnya dibutuhkan untuk kegiatan pemeriksaan yang dilakukan inspektorat, jadi kegiatan PKS ini berguna untuk

meningkatkan kemampuan auditor inspektorat dalam melaksanakan tugas pemeriksaan reguler, khusus, maupun investigasi.

*“Untuk beberapa hal ketika kita ingin membahas sesuatu yang fokus gitu kayak kemarin pernah kita, karna kemarin kita di mintai APH untuk menghitung kerugian, itu diminta untuk kerja sama dengan BPKP, mendatangkan mereka untuk melakukan pelatihan kantor sendiri intens untuk membahas tentang PKKN dengan bahasan kasus yang sedang kami kerjakan”* (Puspita, 2023)

Beberapa PKS yang diadakan Inspektorat Kabupaten Sleman yaitu PKS PKKN, PKS Audit Forensik, PKS Audit Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko, PKS Audit tertentu seperti audit dana keistimewaan, audit kinerja serta PKS Kapabilitas APIP yang dapat meningkatkan kualitas pegawai inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

#### 1.6. Seminar atau Webinar

Seminar atau webinar merupakan program pengembangan kompetensi yang sifatnya pilihan bagi pegawai inspektorat. Ibu Puji selaku sekretaris juga sering membagikan informasi adanya seminar atau webinar yang dapat diikuti oleh pegawai inspektorat. Pegawai yang berencana mengikuti seminar atau webinar diberikan kemudahan oleh manajemen inspektorat berupa anggaran ikut serta. Namun, seminar atau webinar yang diikuti harus sesuai dengan kebutuhan inspektorat. Saat ini, dalam setiap kesempatan seminar atau webinar baru diikuti sekitar satu sampai empat orang pegawai baik yang struktural maupun fungsional. Kegiatan seminar atau webinar juga dapat di akumulasi menjadi angka kredit JPL, jumlah angka kredit yang dapat di akumulasi oleh pegawai yang telah mengikuti seminar atau webinar adalah empat poin.

Beberapa seminar atau webinar yang mampu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia inspektorat kabupaten sleman dalam *antifraud* yang telah diikuti sebagian pegawai inspektorat yaitu seperti Webinar Bincang Strategi Nasional (stranas) Pemberantasan Korupsi, Seminar Nasional Pencegahan Gratifikasi dan Konflik Kepentingan dan juga yang berkaitan dengan pengawasan. Dengan mengikuti seminar tersebut pegawai inspektorat akan mampu menambah pengetahuan yang berguna dalam melaksanakan tugas sosialisasi, penyuluhan, monitoring dan juga analisis *fraud* dalam rangka

mencegah *fraud* di lingkungan pemerintahan kabupaten. Kemudian untuk seminar yang membahas seputar pengawasan akan meningkatkan kompetensi pegawai inspektorat yang bertugas dalam melakukan pemeriksaan reguler atau melakukan konsultasi saat pengawasan ke OPD atau saat pendampingan kegiatan OPD.

### 1.7. Pendampingan Ahli

Pendampingan ahli merupakan salah satu bentuk kerja inspektorat dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan, pendampingan ahli bisa dari akademisi maupun lembaga pemerintah lainnya. Pendampingan ahli bukanlah program khusus yang dimiliki inspektorat dalam pengembangan kompetensi. Namun ketika inspektorat didampingi oleh ahli artinya mereka belum memiliki keterampilan yang cukup terhadap suatu kasus atau subjek yang sedang diperiksa dan setelah pendampingan ahli tersebut auditor inspektorat mendapatkan ilmu dari ahli tadi sebagai bekal untuk kegiatan pemeriksaan berikutnya.

*“Kemudian itu kemudian untuk melakukan apa namanya kegiatan pemeriksaan probity audit terkait untuk pencegahan korupsi, itu ya selain apa namanya materi biasa juga ada uji lab nya. Tapi kita kerja sama, kerja sama dengan UII, dengan labnya, Fakultas Teknik.”* (Lestari, 2023)

*“Kalau masih umum ya pernah sama ugm pernah sama UII anu ya untuk menjadi narasumber pas mau pemeriksaan fisik gedung dan jalan”* (Setyawati, 2023)

*“Jadi kan kalau pendampingan ahli itu yang misalnya untuk pemeriksaan gedung kan walaupun kami punya Sarjana Teknik tapi kan ya karna kami SDM nya gak banyak, padahal kami meriksanya beberapa tim itu pakai ahli di luar juga. Terus kayak uji lab itu juga pakai UII juga kan kita kerja sama dengan UII uji lab nya, terus disamping itu kita sama BPKP juga minta BPKP untuk pendampingan yang memang bener-bener membutuhkan ahli disamping yang uii”* (Ngatiyah, 2023)

*“Dulu sebelum ada teman-teman ini kan auditor itu dulu belum ada teman-teman dari PU, dari teknik gitu. Kita pernah minta bantuan ke PU untuk memeriksa bangunan, Karena dulu nggak ada tenaga teknik sama sekali”* dan

*“Tapi kan kalau yang teman-teman PU kayaknya sudah dasarnya sudah punya ya mas kayak dulu pemeriksaan, pada saat saya menjadi auditor, pemeriksaan jalan nah itu kami belajarnya sama BPK kami mendampingi BPK pemeriksaan ukur jalan itu, kualitas jalan itu, terus kami menerapkannya sendiri.”* (Devi, 2023)

Pendampingan oleh ahli ini bisa dilakukan saat pemeriksaan atau hanya saat melakukan uji lab saja. Pendampingan ahli berguna bagi pegawai inspektorat untuk melakukan pemeriksaan khusus maupun investigasi terhadap hal-hal baru yang ditemukan auditor di lapangan sehingga mereka mampu memahami subjek dari pemeriksaan.

#### 1.8. Sertifikasi

Sertifikasi merupakan kelanjutan dari program-program diklat atau e-learning. Pegawai inspektorat tidak semua harus mengikuti sertifikasi namun ada juga sertifikasi yang diwajibkan hanya bagi pegawai yang akan melaksanakan tugas tertentu. Contohnya seperti sertifikasi penyuluh *anti* korupsi yang berguna bagi pemilik sertifikat tersebut dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi *anti* korupsi dan gratifikasi, penyuluhan nya serta monitoring pemberantasan korupsi. saat ini baru satu orang yang lulus sertifikasi penyuluh *anti* korupsi di inspektorat dari dua orang yang mengikuti sertifikasi, dan untuk mengikuti sertifikasi ada syarat minimal angka kredit yang harus terpenuhi dari diklat terkait *anti* korupsi.

*“Ada kalau nggak salah ada 9 orang atau 7 orang untuk mengikuti diklat tersebut, setelah lulus diklat tersebut, kemudian yang bersangkutan harapannya mengikuti sertifikasi penyuluh anti korupsi, tetapi dari tujuh orang itu baru satu yang mengikuti penyuluhan anti korupsi, tadinya dua yang mengikuti tapi yang lulus baru satu”* (Lestari, 2023)

*“Kemarin diklatnya banyak yang mengikuti yang sampai mendapat sertifikasi penyuluhnya itu baru, karena mungkin ini ya kesibukannya yang lain jadi mereka juga ini sih kalau jadi penyuluh itu kan harus pakai angka kredit ini juga kan mereka juga jadi belum ke sana sih, tapi yang diklat juga ada sih diklat penyuluh korupsi itu, sementara yang sudah sertifikasi itu baru bu tintin*

*terus sekarang sering penyuluhan kemana-mana juga sih seperti itu”* (Ngatiyah, 2023)

Kemudian ada sertifikasi pengawasan yang wajib bagi pegawai yang akan bertugas sebagai auditor pengawas OPD. Dengan telah mendapatkan sertifikasi terkait pengawasan, pegawai akan lebih dipercaya melakukan konsultasi dan juga mendampingi OPD dalam pelaksanaan tupoksi.

*“Karena untuk melakukan kegiatan pengawasan harus mereka memiliki sertifikat, sertifikasi khusus pengawasan ya dan itu syaratnya harus PNS iya. Jadi kalau PHL itu gak bisa”* (Lestari, 2023)

#### 1.9. Bimtek

Bimtek atau bimbingan teknis merupakan kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti pegawai inspektorat ketika akan melaksanakan tugas secara tim untuk membangun tim kerja yang efektif dan teknik komunikasi dalam konteks pelayanan prima. Kegiatan bimtek tentu diikuti oleh satu sampai delapan orang setiap bimtek. Mengikuti bimtek juga dapat memperoleh angka kredit JPL, jumlah angka kredit yang dapat di akumulasi dari mengikuti kegiatan bimtek berkisar antara empat sampai enam poin.

Beberapa bimtek yang diikuti oleh pegawai inspektorat antara lain:

1. Bimtek Pengendalian Gratifikasi Tahun 2023 melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL),

Bimtek ini diikuti oleh sembilan pegawai Inspektorat Kabupaten Sleman baik pegawai struktural maupun pegawai fungsional. Dengan mengikuti bimtek ini pegawai inspektorat mendapatkan peningkatan kompetensi untuk melakukan monitoring pemberantasan *fraud*.

2. Bimtek Kesehatan Kerja Bagi Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman

Pegawai inspektorat yang mengikuti bimtek ini adalah penyusun kebutuhan barang inventaris dari sekretariat. Dengan mengikuti bimtek ini pegawai inspektorat memperoleh peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugas pendampingan pelaksanaan tupoksi OPD dan melakukan konsultasi serta mampu membantu melakukan pembenahan



dalam manajemen pemerintahan yang menjadi fungsi dari bidang investigasi dan reformasi birokrasi.

### 3. Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bimtek ini juga sama diikuti oleh penyusun kebutuhan barang inventaris dari sekretariat Inspektorat Kabupaten Sleman. Dengan mengikuti bimtek pegawai inspektorat tersebut memperoleh keahlian terkait pengelolaan barang milik daerah yang akan berguna dalam melaksanakan tugas pendampingan terhadap OPD yang berkaitan dengan pengelolaan barang serta melakukan konsultasi yang berkaitan dengan hal tersebut.

#### 1.10. Peningkatan Integritas

Inspektorat juga konsisten memperhatikan kualitas integritas pegawai. Disamping program pengembangan kompetensi secara teknis sebagai auditor internal pemerintah, integritas juga diperhatikan oleh inspektorat karena etika integritas adalah etika wajib seorang auditor. Inspektorat memandang kualitas audit dan hasil dari upaya pencegahan *fraud* juga tergantung dari integritas yang tinggi seorang auditor. Kegiatan peningkatan integritas ada yang bersifat program pengembangan kompetensi dengan mendapat angka kredit pemenuhan JPL ada yang budaya organisasi inspektorat. Kegiatan peningkatan integritas yang dilakukan atau diikuti oleh pegawai inspektorat antara lain :

##### 1. Pembelajaran Alam Outbond

Outbond bisa diikuti oleh empat orang pegawai inspektorat, kegiatan ini dapat diakumulasikan menjadi empat poin angka kredit JPL. Contoh tema outbond yang sudah diikuti oleh sebagian pegawai inspektorat adalah *Capacity Building* Inspektorat Sleman. Dengan meningkatnya integritas pegawai setelah mengikuti outbond akan membuat kualitas pekerjaan pegawai seperti pemeriksaan, pendampingan dan pengawasan menjadi lebih berkualitas hasilnya.

##### 2. Setiap Senin Membaca Pakta Integritas

Inspektorat memiliki pakta integritas yang ditanda tangani semua pegawai inspektorat, dan setiap apel pada hari senin akan dibacakan ulang bergiliran setiap anggota dalam rangka mengingatkan untuk selalu

menjaga integritas sebagai auditor yang profesional dalam melaksanakan fungsi-fungsi auditor internal pemerintah.

*“Integritas nya itu kan audit, bukan auditor nya aja, tapi semua pegawai ya. Itu kan menandatangani pakta integritas, ada poin satu sampai tujuh kalau ndak salah, nah itu setiap hari senin dibacakan perwakilan, urut dari yang”* (Lestari, 2023)

*“Dan di tempat kita ada yang namanya, setiap apel kita membaca yang namanya pakta integritas. Ada delapan pakta atau berapa. Itu yang sebetulnya akan membangun kepribadian dari mereka untuk bisa menegakkan profesionalisme mereka.”* (Kuryanto, 2023)

### 3. Surat Independensi Setelah Surat Tugas

Tim auditor inspektorat yang akan melaksanakan tugas pengawasan akan diminta tanda tangan surat independensi sebelum turun melaksanakan tugas untuk tetap mempertahankan integritas dan objektivitas ketika melakukan tugas pengawasan di OPD yang menjadi objek pemeriksaan atau pengawasan.

*“Kode etik ada, kemudian yang apa setelah surat tugas kita bikin yang mba lasmi yang setiap tim harus tanda tangan, independensi, dalam melakukan proses harus independensi. Jadinya kita yang selaku menugaskan kita harus tau apa namanya, jangan sampai kita menugaskan di tempat yang independen gitu. Kan mungkin ada yang kakaknya kerja disini, akhirnya gak disitu. Selagi saya inget, selagi kita inget tidak akan kita tugaskan. Ada itu, kita udah buat daftarnya”*

(Lestari, 2023)

### 4. Mengundang pihak luar untuk motivasi keagamaan

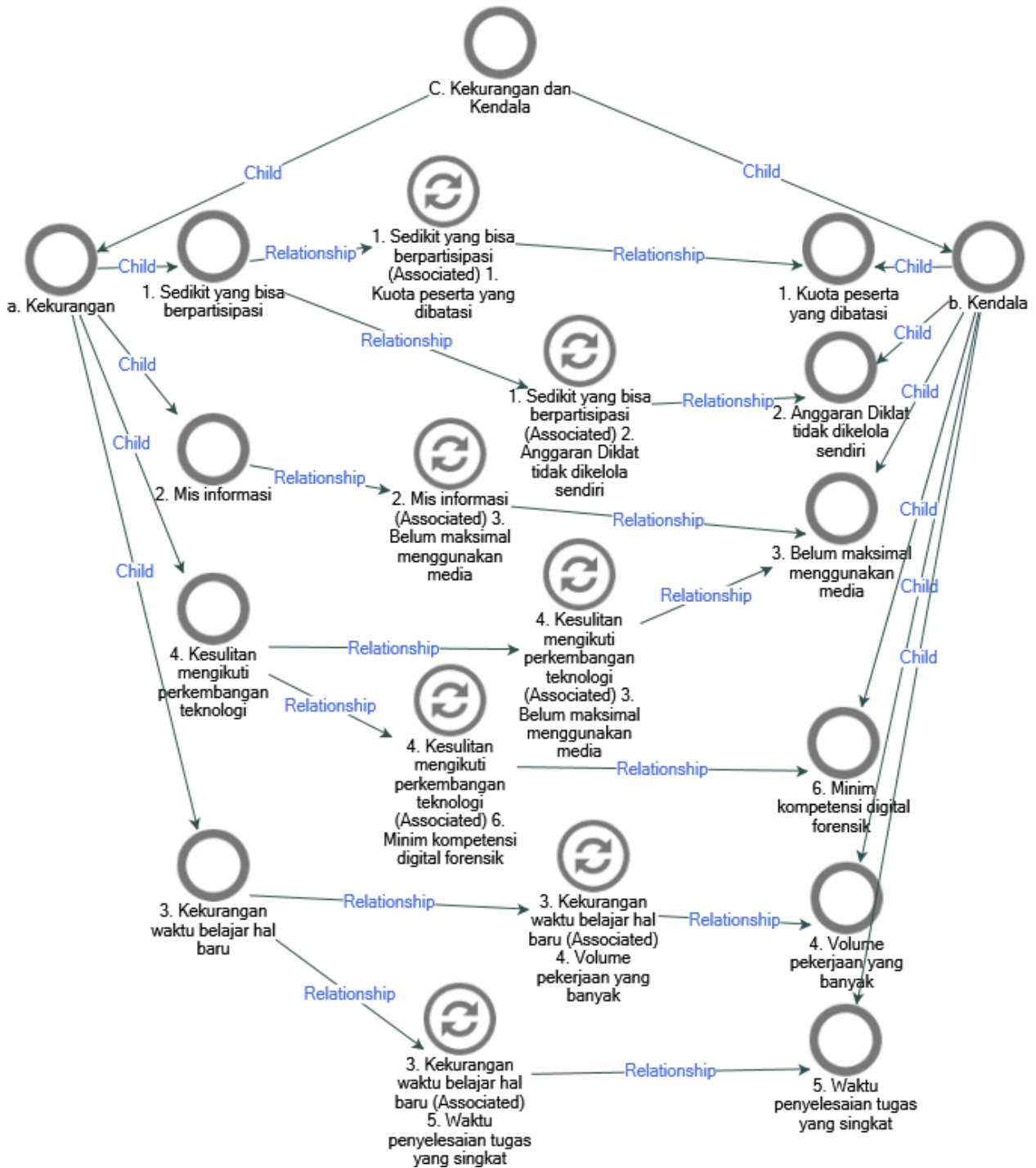
Upaya lainnya yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman dalam meningkatkan integritas adalah dengan motivasi profesionalisme dan keagamaan. Pemberian motivasi ini dilakukan dengan mengundang pihak dari luar seperti motivator ataupun ahli agama. Setiap orang punya faktor pendorong berbeda-beda untuk menjadi pribadi yang berintegritas, maka selain didorong oleh kewajiban sebagai auditor harus memiliki integritas, tidak dinafikan

nilai-nilai integritas yang sudah dimiliki yang berasal dari pendidikan keluarga atau sekolah sebelum menjadi auditor harus terus dijaga dan ditingkatkan.

*“Terus kita juga, ada kita pelatihan, bukan, pemberian motivasi dari pihak luar. Motivasi kaitannya dengan profesional, bagaimana bekerja secara profesional, maupun dari aspek keagamaan. Itu yang paling terpenting.” (Kuryanto, 2023)*



4.5 Kekurangan dan Kendala dalam Pengembangan Kompetensi SDM Antifraud



Gambar 4.5 Analytical Maps Kekurangan dan Kendala

1. Sedikit yang bisa berpartisipasi

Dalam beberapa pengembangan kompetensi sumber daya manusia *antifraud* Inspektorat Kabupaten Sleman terdapat program yang hanya bisa diikuti sedikit peserta, seperti diklat (pendidikan kilat). Kendala yang mengakibatkan sedikit SDM yang bisa mengikuti diklat yaitu:

a. Kuota peserta yang dibatasi

Kuota terbatas hanya terjadi pada kegiatan diklat. Hal ini karena bukan inspektorat yang berwenang menentukan jumlah peserta yang boleh diikutkan diklat.

Ibu Puji (2023) selaku sekretaris menjelaskan *“Untuk peningkatan SDM nya begitu, kalau jumlahnya tidak bisa. Jumlahnya ya memang seperti ini, gak bisa menambah dengan seenaknya, gak bisa, hanya peningkatan kualitas”*

b. Anggaran diklat tidak dikelola sendiri

Anggaran diklat untuk pegawai inspektorat dikelola oleh BKPP. Karena anggaran dibawah BKPP, inspektorat tidak bisa menentukan sendiri jumlah peserta yang ingin diikutkan diklat, dan juga tidak selalu bisa mengikuti setiap kali ada diklat.

Ibu Ngatiah (2023) selaku auditor muda menerangkan dengan berkata *“Kalau itu sih kalau misalkan diklat itu memang keterbatasan ini juga sih anggaran, karna anggarannya itu kan masih dipegang bkpp ya kepegawaian pemda ya, gak di inspektorat sendiri, jadi disana itu kan hanya ada anggaran untuk struktural sama fungsional ya, fungsional itu auditor masuk ke anggaran diklatnya fungsional ya, ke anggaran fungsional, padahal anggaran fungsional di pemda itu kan banyak ya. Karena keterbatasan anggaran ya kami datang diklatnya jadi cuman sedikit itu”*

Ibu Ika (2023) selaku Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan mengakui dengan mengatakan mengatakan *“tapi sayangnya kalau Diklat di luar itu kan anggaran inspektorat itu jadi satu di badan kepegawaian untuk diklat itu, bukan di inspektorat sendiri. Jadi nanti diklat di sana misalkan katakanlah 100 juta, itu untuk ASN,*

*Kebupaten Sleman keseluruhan. Jadi modelnya cepet-cepetan gitu loh mas, yang mengajukan anggaran siapa gitu”*

## 2. Mis Informasi

Mis informasi juga menjadi kekurangan dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia *antifraud* Inspektorat Kabupaten Sleman. Biasanya mis informasi terjadi pada program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara online. Mis informasi bisa terkait jadwal pelaksanaan dan juga informasi adanya kegiatan pengembangan kompetensi.

Ibu Puji (2023) mengatakan *“pendaftaran e-learning KPK kan melalui inspektorat ya, jadi dari OPD mengirimkan nama ke kita, kita daftarkan ke KPK, kemudian dari KPK nanti mendapatkan notifikasi untuk pelatihan ini maka pelatihan ini nanti akan dibuka tanggal berapa tanggal berapa. Nah pada saat tanggalnya tersebut kita sampaikan kepada yang bersangkutan, mungkin yang bersangkutan lupa ya, nah kita juga tidak mengecek yang bersangkutan tanggal segini harusnya mengikuti e-learning gitu lo, nah itu satu menjadi catatan juga, terus yang kedua kita belum memberi peringatan pada OPD-OPD yang belum mengirimkan personil nya gitu, itu tidak efektifnya”*

Dan Ibu Puji (2023) juga mengatakan *“kadang-kadang kita sudah menganggarkan workshop, seminar, mengirim, ternyata kita tidak bisa mendapatkan informasi itu, maksudnya saya. Jadi informasi ada seminar kita kirimkan pengawasan saya gak diberitahukan. Padahal juga saya sebarkan ke teman-teman kalau ada informasi seperti ini tolong diberitahu, supaya saya juga bisa mengirim peserta. Kendalanya itu saya kurang dapat informasi yang dari luar.”*

Kendala yang mengakibatkan mis informasi terjadi adalah belum maksimal dalam menggunakan media online.

Ibu Puji (2023) mengatakan *“Penyebabnya apa ya, aku itu jarang bukanya ya, buka informasi di web, tapi sebetulnya kekurangan saya itu sudah saya lemparkan ke teman-teman yang muda-muda”*

### 3. Kekurangan waktu untuk belajar hal baru

Untuk mengembangkan kompetensi, sebagian pegawai fungsional mengeluhkan kurangnya waktu untuk belajar hal baru ini disebabkan oleh sangat padatnya penugasan sehingga volume pekerjaan mereka menjadi banyak dan kendala ini juga diakui oleh pegawai struktural Inspektorat Kabupaten Sleman.

Ibu Pipit Tyas Ratna Puspita, S.H., M.P.A. (2023) yang merupakan auditor muda atau pegawai fungsional mengatakan *“jadi ketika ada penugasan karna penugasan volumenya sangat banyak jadi mungkin jadi kurang fokus, karna satu waktu dan dua kapasitas saya pribadi selaku auditor itu kan untuk mempelajari banyak hal dalam waktu yang bersamaan itu bisa, mungkin tidak maksimal, Cuma separuh-separuh dulu, yaitu tertatih-tatih sih ketika mengikuti tuntutan, mandatori, dan mengikuti perkembangan.”*

Ibu Ngatiyah (2023) yang juga merupakan auditor muda atau pegawai fungsional mengatakan yang sama dengan Pipit *“karna kami banyak pekerjaan yang mandatory yang dari pusat itu banyak sekali disamping kami punya program pemeriksaan sendiri jadi karna waktu itu jadi kita membagi waktunya juga susah, pinginnya kita berkembang tapi karena surat tugas banyak kadang kita gak ada waktu juga ya untuk seperti itu, untuk mengikuti”* dan *“Hm em kemampuan SDMnya, ya itu kita itu bingung bagi waktunya bingung gitu ya disamping kita dituntut pekerjaannya juga selesai tepat waktu, hasilnya maksimal kita juga pengembangan kompetensinya juga harus ini juga kayak gitu kan”*

Ibu Ika (2023) selaku pegawai struktural mengakui kendala volume pekerjaan yang banyak bagi auditor inspektorat mengatakan *“Kendalanya karena banyak ketugasan di kami, Jadi kalau misalnya harus satu auditor itu misalnya 2 bulan sekali harus mengikuti diklat gitu, waktunya ya nggak ada. waktunya itu sudah tidak cukup”*. Ika juga menambahkan *“Tapi ya itu tadi terkendala waktu. Kalau mereka berangkat diklat lama, nanti ketugasan di kantor pasti tertunda. Kalau nggak ikut diklat, nanti kompetensi mereka juga nggak akan ter-upgrade.”*

Kendala berikutnya yang mengakibatkan kurangnya waktu belajar hal baru bagi SDM *antifraud* inspektorat disamping volume pekerjaan yang banyak juga waktu penyelesaian tugas yang sangat singkat.

Ibu Ngatiyah mengatakan *“kadang kami telat juga sih buat laporan seperti itu. Kalau dari ketua tim sih alokasi waktunya sama dengan yang di surat tugas itu. Kalau disini kan waktu pemeriksaan Cuma 10 hari, padahal 10 hari itu kan kita belum dapat jatah apa-apa. di inspektorat manapun kendala nya seperti itu sama”* lanjut beliau *“kemampuan SDMnya, ya itu kita itu bingung bagi waktunya bingung gitu ya disamping kita dituntut pekerjaannya juga selesai tepat waktu, hasilnya maksimal kita juga pengembangan kompetensinya juga harus ini juga kayak gitu kan, kadang kita ya itu tadi karena banyaknya pekerjaan kadang kita gak bisa jalan dua-duanya, mengalahkan salah satu ya”*

Ibu Retno Isti Satiti, S.E. (2023) selaku auditor madya yang merupakan pengendali teknis menuturkan *“semua laporan harus selesai dalam satu bulan setelah pemeriksaan di lapangan dengan tim yang berbeda, itu jelas akan terhambat tapi bagaimana pinter-pinter nya si auditor itu sendiri untuk membagi waktu bahkan kayak saya itu, saya rasa gak cuma saya ya temen-temen itu sampai rumah memang jam kerja kita sampai jam setengah 4 tapi di rumah, kadang saya sampai jam 12 malam itu masih ngoreksi LHP-nya punya ketua tim saya harus ngisi”*

#### 4. Kesulitan untuk mengikuti perkembangan teknologi

Kekurangan kesulitan mengikuti perkembangan teknologi terjadi di Inspektorat Kabupaten Sleman, baik dari segi pegawai menggunakan untuk pengembangan kompetensi maupun menggunakan basis teknologi dalam kegiatan *antifraud* inspektorat.

Ibu Heri Setyawati, S.E., M.Acc. (2023) sebagai Inspektur Pembantu Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi mengatakan *“terus sekarang yang pakai digital-digital itu kan kita masih lemah audit tentang itu.”*

Ibu Pipit (2023) sebagai auditor muda mengakui serta menerangkan kendala sulitnya mengikuti perkembangan teknologi dengan mengatakan *“kalau secara umum kami mengikuti perkembangan teknologi itu juga*



*sangat apa ya tertatih tatih, karna apa ya, sdm kami kan banyak yang muda tapi banyak juga yang sudah senior, jadi saya aja usia segini tapi untuk mengikuti perkembangan jaman yang terlalu cepat itu saya juga kadang-kadang gak bisa basenya gak bisa secepat mengikuti anak-anak muda sih. Dan disini lebih banyak yang senior daripada yang muda.”*

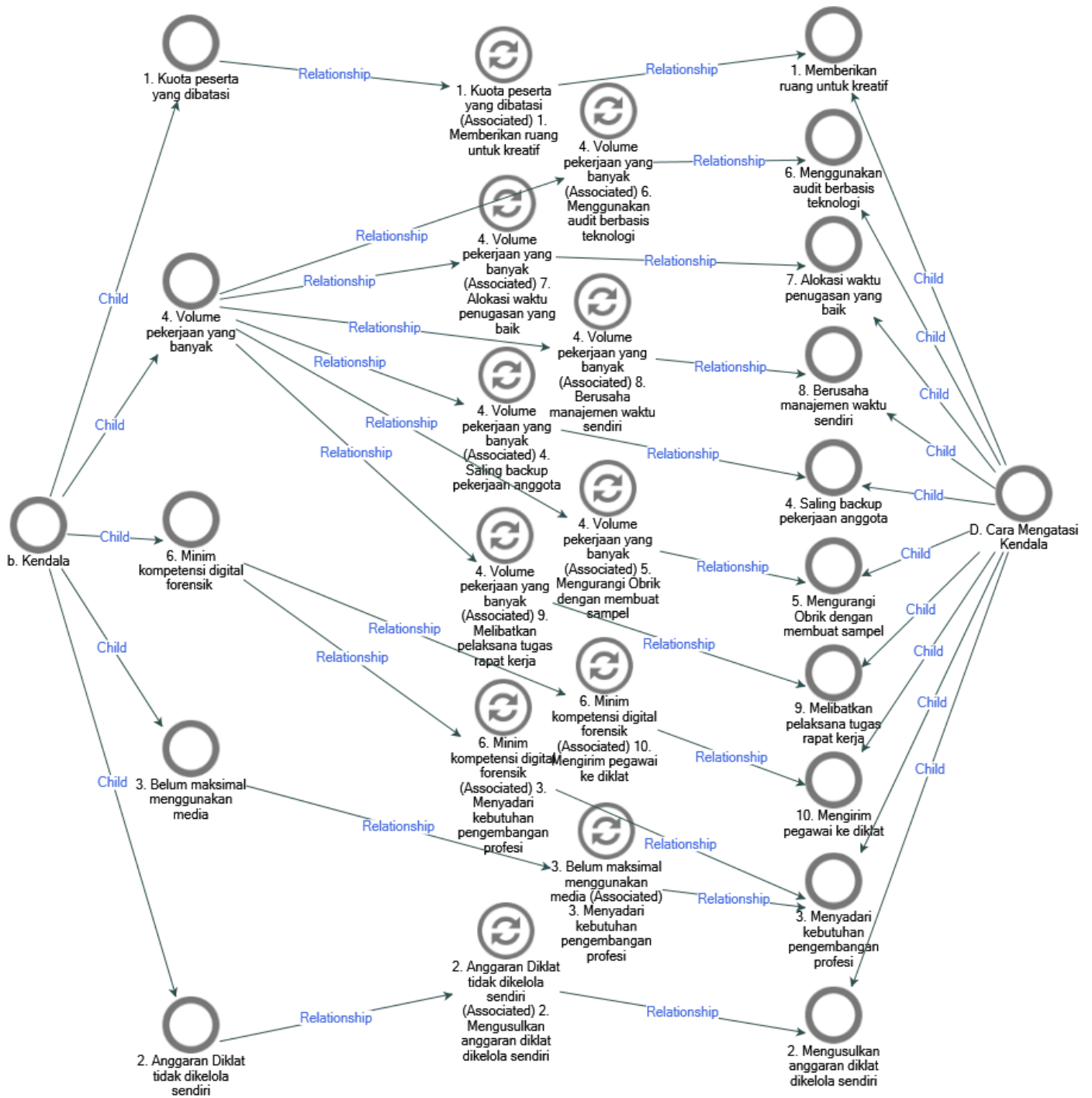
Ibu Ika (2023) selaku Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan menjelaskan juga terkait kesulitan mengikuti perkembangan teknologi dengan mengatakan *“Ada. Terutama mungkin yang usianya juga sudah di atas 50 gitu kan, kadang pemahamannya kan untuk IT-nya kan kurang ya”*

Kendala yang mengakibatkan kesulitan mengikuti perkembangan teknologi antara lain adalah volume pekerjaan yang banyak sehingga kurangnya waktu belajar hal baru seperti yang telah dijelaskan dan ditambah masih minim kompetensi digital forensik.

Ibu Heri (2023) mengatakan terkait kebutuhan SDM *antifraud* inspektorat terhadap penggunaan digital, beliau mengatakan *“Kalau tantangannya kan sekarang era digital itu yang lebih banyak apa kita juga tidak bisa tutup mata dengan perkembangan jaman, sekarang era digital yang sementara ini kan banyak yang kita laksanakan itu masih yang sistemnya manual, sehingga perlu pengetahuan tentang yang ini forensik audit”*

الجمعة ١٤٤٤هـ  
الاستاذة الدكتورة  
الانيسية

#### 4.6 Cara Mengatasi Kendala dan Saran Perbaikan dalam Pengembangan Kompetensi SDM Antifraud



Gambar 4.6 Analytical Maps Cara Mengatasi Kendala

i. Saran dari pegawai Inspektorat Kabupaten Sleman

1. Kuota peserta yang dibatasi

Kuota peserta yang dibatasi untuk mengikuti diklat mengakibatkan sedikit pegawai inspektorat khususnya auditor yang mendapatkan ilmu baru dari kegiatan diklat tersebut padahal inspektorat memiliki banyak auditor. Untuk mengatasi kendala ini manajemen inspektorat atau pegawai struktural membuka ruang kreatif artinya mengizinkan pegawai untuk mengembangkan kompetensinya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di luar lingkup inspektorat namun harus berkaitan dengan kebutuhan kegiatan inspektorat.

Bapak Hery (2023) selaku inspektur Inspektorat Kabupaten Sleman mengatakan *“Kita anu, kita memberikan kebebasan. Program peningkatan kompetensi itu berdasarkan kebutuhan kita. Ataupun atas usulan teman-teman. Tapi usulan teman-teman juga harus yang itu mendukung program. Tidak bisa... Mereka usul kalau itu tidak memberikan kontribusi ataupun mendukung program kegiatan kita. Tidak mungkin”*

Ibu Puji (2023) juga mendorong pegawai inspektorat untuk mengikuti pengembangan kompetensi yang bebas untuk diikuti di lingkup inspektorat, beliau mengatakan *“Itu setiap ada berita saya share di grup untuk mengikuti kan gitu. Tapi ada juga yang mengikuti ada juga yang enggak, kan gitu, kan orang macem-macem ya”* dan *“Iya, saya kalau ada informasi dari BPKP ‘ada ini, ada ini’ saya sebar. Silahkan mengikuti ini, nanti kan buktinya, buktinya nanti kan ada sertifikatnya dia, kemudian dia membuat notulen, notulen pelaksanaan yaitu apa materinya. Baru kami buat surat tugas.”*

Pegawai inspektorat mengakui bahwa mereka diizinkan untuk mengikuti pengembangan kompetensi di luar lingkup inspektorat. Ibu Pipit (2023) mengatakan *“Ya kalau misalnya ada informasi tentang webinar, atau seminar, atau anu pasti dishare di grup sih, tapi itu istilahnya bukan*

*perintah ya, jadi silakan kalau mau ikut, silakan ikut, kalau enggak ya enggak. Jadi kalau mau pada kesadaran ya ikut”*

## 2. Anggaran diklat tidak dikelola sendiri

Anggaran diklat yang melekat pada BKPP merupakan sebab dari sedikitnya pegawai inspektorat yang bisa mengikuti diklat karena harus berbagi dengan dinas pemerintahan lainnya. Cara untuk mengatasi kendala ini adalah dengan mengusulkan agar anggaran diklat dikelola sendiri oleh Inspektorat Kabupaten Sleman sebagaimana Inspektorat Kabupaten Gunung Kidul mengelola sendiri anggaran diklat pegawai mereka.

Ibu Ngatiyah (2023) selaku auditor muda mengatakan *“kalau enak sih anggaran diklat seperti itu di kami sendiri, kantor kami sendiri kayak gitu enak, jadi lebih ini sih orangnya jadi lebih kayak di gunung kidul lah satu itu auditor itu dijatah minimal satu kali diklat kayak gitu, kami gak bisa sih, karna memang keterbatasan anggaran itu, semuanya masih menjadi satu disana, jadi kita gak bisa memploting anggarannya besar misalnya khusus inspektorat kayak gitu”*

## 3. Belum maksimal menggunakan media informasi dan komunikasi

Teknologi media informasi dan komunikasi memang menjadi sarana percepatan kemajuan suatu kegiatan termasuk di dalam pengembangan kompetensi. Ada banyak informasi pengembangan kompetensi yang dapat dengan cepat diakses untuk meningkatkan kualitas kerja seorang pegawai. Jika belum maksimal menggunakan teknologi media informasi untuk pengembangan kompetensi, maka kompetensi seorang pegawai bisa tertinggal dari kebutuhan kompetensi saat ini. Salah satu upaya untuk memaksimalkan penggunaan media informasi adalah dengan menyadari selalu kebutuhan pengembangan profesi. Seorang pegawai harus terus mengembangkan kompetensinya meskipun banyak hambatan agar kualitas profesinya meningkat.

Ibu Puji (2023) mengatakan *“Pengembangan profesionalitas itu seperti diklat-diklat segala macam itu kan masuk pengembangan profesionalitas*

*dan itu mereka itu harus. Makanya kalau yang kreatif dia mengikuti seminar, diklat-diklat online itu, pelatihan-pelatihan online itu cepat dia mendapatkan kredit pengembangan profesional”*

Oleh karena itu di inspektorat sendiri sudah ada kewajiban pemenuhan jam pembelajaran pengembangan kompetensi untuk mendorong kesadaran pegawai meningkatkan kompetensi. Ibu Ngatiah (2023) mengatakan *“Kalau di auditor itu harus memenuhi setahunnya harus 120 JPL jam pelajaran, berarti kita memang harus meningkatkan kompetensi kita, soalnya harus lapor kan lewat aplikasi itu 120 JPL itu harus terpenuhi, kan 1 JPL nya 45 menit ya, berarti 45 menit kalikan 120 berarti berapa ya setahun itu. Jadi disamping tuntutan itu kita memang butuh ilmunya juga sih”*

4. Volume pekerjaan yang Banyak dan waktu penyelesaian tugas yang singkat.

Banyaknya tugas yang dimiliki inspektorat atau dilimpahkan kepada inspektorat berupa tugas mandatory serta pekerjaan yang harus selesai dalam waktu yang singkat mengakibatkan berkurangnya waktu pegawai inspektorat untuk benar-benar dapat belajar dalam rangka mengembangkan kompetensi. Selain ini dalam pelaksanaan tugas tersebut sebagian pegawai mengeluhkan susah untuk konsentrasi dalam satu tugas karena bertumpuknya tugas-tugas tersebut. Solusi yang dapat diberikan terlebih dahulu adalah membuat pekerjaan yang sangat banyak tersebut dapat diselesaikan dengan cepat. Cara yang dapat ditempuh antara lain:

a. Saling backup pekerjaan anggota

Saling backup pekerjaan artinya pegawai yang sudah menyelesaikan bagian pekerjaannya harus segera membantu rekannya yang masih belum selesai bagian pekerjaannya atau rekannya yang masih lemah kompetensinya dalam ketugasan. Bahkan ketua tim bisa jadi mem backup pekerjaan anggotanya.

Ibu Puji (2023) mengatakan *“kalau di inspektorat kan kebanyakan pekerjaan harus dikerjakan dengan tim, ada tim. Ya*

*diantara tim itu yang harusnya saling koordinasi bagaimana caranya supaya selesai kan gitu. Anggota, harusnya ketua meng backup anggota-anggota yang anu, terus nya si pengendali teknis harusnya juga harus mengawasi sebetulnya, mengawasi timnya itu ke bawah, iya pengendali teknis itu diatas ketua tim. Kan harusnya yang perlu dipantau dari anggota dulu, apakah langkah kerja yang udah ditetapkan itu sudah dilaksanakan belum oleh anggota? Kan gitu. kalau ada anggota yang lemah ketua timnya harus membackup kalau cara kerjanya kan seperti itu, harusnya seperti itu.”*

b. Mengurangi Obrik dengan menggunakan sampel

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Kabupaten Sleman memiliki kewajiban mengawasi atau memeriksa seluruh Organisasi Perangkat Daerah. Cara yang memungkinkan untuk mempercepat pemeriksaan suatu Obrik (Objek Pemeriksaan) adalah menggunakan sampel.

Ibu Puji (2023) mengatakan *“Terkait volume pekerjaan, dulu kami memang memeriksa seluruh OPD, namun kami sekarang hanya melakukan pemeriksaan dengan sampel. Jadi yang paling memiliki risiko tinggi berdasarkan metode penilaian kami, itulah yang kami jadikan sampel. Contohnya di kabupaten Sleman ini ada 86 desa yang akan kami lakukan audit, namun kami hanya menjadikan 16 desa yang memiliki risiko tinggi untuk diperiksa sebagai sampel”*.

c. Menggunakan audit berbasis teknologi

Teknologi merupakan alat yang dapat membuat pekerjaan dikerjakan lebih cepat dua kali lipat atau lebih dari cara manual. Inspektorat sangat membutuhkan menggunakan audit berbasis teknologi dalam mempercepat penyelesaian tugas yang menumpuk. Ibu Ngatiah (2023) mengatakan bahwa penggunaan teknologi misalnya membuat aplikasi untuk pemeriksaan dapat mempercepat pekerjaannya.

Ibu Ngatyah (2023) mengatakan *“Ya itu tadi kita terus kebanyakan terus kita jadi lembur-lembur seperti itu terus kita juga pakai ini juga sih kalau bisa pakai aplikasi-aplikasi seperti itu lah kayak evaluasi LKJIP itu kemarin kita manual-manual maksudnya manual excel sih excel manual terus kita buat aplikasi biar kita lebih cepet lebih memudahkan seperti itu”*.

Solusi berikutnya untuk mengatasi volume pekerjaan yang banyak berkaitan dengan waktu untuk belajar dalam rangka mengembangkan kompetensi antara lain:

a. Mengalokasikan waktu penugasan dengan baik

Agar dapat membuat banyaknya pekerjaan tidak terasa berat, Maka manajemen inspektorat harus mengalokasikan waktu penugasan dengan baik. Salah satu contohnya adalah bidang masing-masing di inspektorat memiliki hak prerogatif menentukan waktu pelaksanaan tugas.

Ibu Pipit (2023) mengatakan *“Kalau misalnya dari sekarang kan penugasan itu sudah dari bidang, jadi mungkin irban sendiri, buheri selaku irban juga sudah mengalokasikan waktu biar apa menjadwalkan kegiatan yang sebisa mungkin tidak bertumpuk-tumpuk, kalau dulukan berpusat di sekretariat, jadi penugasan dan lain-lain itu yang ngeplot waktu dan ngeplot tim dari sekretariat, kalau sekarang kan hak prerogatifnya bidang”*.

b. Berusaha manajemen waktu sendiri

Walaupun memiliki kewajiban menyelesaikan tugas yang banyak, pegawai inspektorat harus tetap berusaha memiliki waktu belajar yang baik untuk mengembangkan kompetensi. Maksudnya adalah belajar dengan konsentrasi tanpa teralihkan dengan tugas-tugas yang menumpuk. Bapak Hery (2023) sebagai inspektur mengingatkan berkaitan harus manajemen waktu sendiri.

Bapak Hery mengatakan *“Iya, bagaimana manage waktu. Kemudian bagaimana kita punya tanggung jawab. Ya kan? Tanggung jawab itu harus, artinya disiplin untuk memanfaatkan waktu.”*

Ibu Retno (2023) selaku auditor madya juga mengatakan berkaitan dengan waktu belajar dan menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk. Beliau mengatakan *“Iya betul. Harus pinter-pinter alokasi waktu. Memanfaatkan peluang yang ada”*

c. Melibatkan pelaksana tugas rapat kerja

Salah satu upaya yang bagus dilakukan inspektorat untuk mengatasi keluhan volume pekerjaan yang banyak adalah melibatkan pegawai fungsional dalam rapat kerja bersama pegawai struktural.

Ibu Puji (2023) yang merupakan bagian pegawai struktural mengatakan *“Pertama kalau untuk penugasan, pada saat kita menyusun program kerja, seluruh bidang kan kita libatkan yang menentukan programnya mereka, hanya kita melakukan (apa) garis besarnya aja, kalau pemeriksaan fokusnya harus ini, yang wajib dilaksanakan kegiatan ini, ini, ini, ini. Kemudian pemilihan unit kerjanya silakan pilih, kan gitu yang menentukan. Terus sekop pemeriksaan, sasaran, ruang lingkup mereka yang menentukan supaya bisa ngukur, kan ruang lingkup yang ditetapkan itu kan juga untuk membatasi itu. Terus yang kedua itu terkait dengan kerja ya jadi mereka kita libatkan dia yang menentukan, tujuannya melakukan pengawasan juga, pemeriksaan saya suruh buat sendiri tujuannya apa. Supaya dia bisa timnya maksudnya dibidang. Kalau dulu kan kita yang menentukan, sasarannya, obrihnya kan kita dari sekretariat menentukan dari seksi perencanaan. Kalau sekarang kita melibatkan mereka gitu. Jadi sekop nya kalau terlalu besar ya apa sekop nya gitu. Iya, mereka yang tentukan, tujuannya mau diperiksa sampai sejauh mana mereka yang tentukan. Itu iya. Terus kemudian*



*kapan pekerjaan itu dilaksanakan waktunya juga mereka yang saya menjadwalkan, jadi bukan saya lagi, kalau dulu kan saya. Sekarang enggak sudah saya rubah”.*

5. Masih minim kompetensi digital forensik.

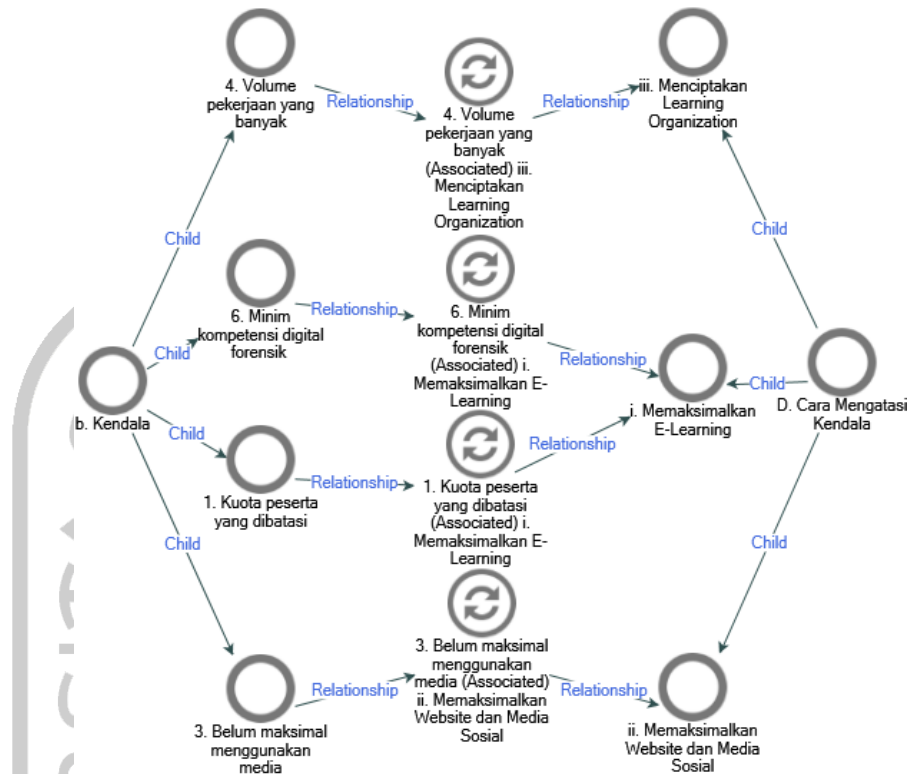
Digital forensik sudah dibutuhkan untuk membantu investigasi suatu kasus pada zaman ini. Cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kompetensi digital forensik adalah mengirimkan pegawai inspektorat ke diklat-diklat yang berkaitan dengan digital forensik serta menyadari kebutuhan pengembangan profesi seperti yang telah disebutkan, karena keterbatasan anggaran diklat.

Ibu Pipit (2023) mengatakan *“jadi kalau kendala kompetensi pasti dengan diklat diklat yang berkaitan,”*.

Ibu Retno (2023) menyebutkan urgensi kompetensi yang berhubungan dengan digital dengan mengatakan *“Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi nanti pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak mengembangkan diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas membantu untuk pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi fraud maupun yang bukan. Sangat-sangat”*.

الجمعة ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٥ هـ  
الاستاذة الدكتورة

## ii. Saran dari peneliti



Gambar 4.7 Analytical Maps saran mengatasi kendala dari peneliti

### 1. Kuota peserta diklat yang dibatasi

Salah satu solusi dari mengatasi kendala keterbatasan kuota peserta dalam mengikuti diklat adalah meningkatkan aksesibilitas pelatihan dan pengembangan. Contohnya inspektorat dapat menggandeng lembaga pelatihan atau perguruan tinggi lokal yang memiliki kapasitas untuk memberikan pelatihan dengan metode online dan atau jarak jauh. Pendekatan ini akan memungkinkan lebih banyak orang untuk pelatihan mengakses dan mengembangkan kompetensi secara efisien, yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Inspektorat Kabupaten Sleman tanpa terkendala oleh kuota peserta yang terbatas. Inspektorat sebenarnya sudah melaksanakan program pengembangan kompetensi e-learning, namun manajemen inspektorat harus mampu membuat banyak peserta yang mengikuti e-learning dan menyesuaikan dengan materi diklat yang telah diikuti oleh seorang atau dua

orang pegawai agar mengurangi waktu dalam mengejar memperoleh ilmu dari pegawai yang telah mengikuti diklat.

Diperlukan strategi agar para pegawai inspektorat bisa banyak yang mengikuti program e-learning tersebut. Cara yang dapat ditempuh inspektorat agar banyak pegawai yang bisa mengikuti e-learning antara lain dengan mengundang pemateri yang cukup terkenal, kemudian memberikan fasilitas e-learning seperti semakin banyak bertanya semakin meningkatkan poin untuk pengembangan profesi pegawai yang melalui angka kredit jam pembelajaran pegawai inspektorat.

## 2. Volume pekerjaan yang banyak

Volume pekerjaan yang banyak menjadi keluhan sebagian pegawai inspektorat yang mengakibatkan kurangnya waktu belajar. Berdasarkan wawancara peneliti dengan pegawai inspektorat, dalam melaksanakan tugas mereka akan bekerja secara tim. Oleh karena itu menurut peneliti sangat dimungkinkan bagi pegawai inspektorat untuk membentuk budaya berbagi ilmu dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga membentuk *learning organization* dimana inspektorat bukan hanya menjadi instansi yang melaksanakan tugas namun juga tempat tumbuh dan berkembang yang dapat dirasakan bagi seseorang. Senge (1990) mengatakan terkait *learning organization* bahwa dimana suatu organisasi yang para pegawainya secara konsisten meningkatkan kompetensinya untuk menciptakan hasil yang benar-benar diinginkan, pola pikir baru yang ekspansif tumbuh, aspirasi bersama di kembangkan secara bebas dan anggotanya juga dengan konsisten belajar bagaimana instansi mereka mengembangkan belajar bersama-sama. Dengan menjadikan tugas sebagai momen untuk saling belajar dari anggota tim, akan mengurangi dampak kurangnya waktu belajar hal baru karena kendala volume pekerjaan yang banyak.

## 3. Masih sedikit pengembangan kompetensi digital forensik

Belum merata kemampuan digital forensik diantara auditor inspektorat karena masih sedikit pengembangan kompetensi digital forensik. Kebutuhan

digital forensik sangat dibutuhkan di zaman ini mengingat sistem informasi dan komunikasi yang berkembang cepat serta sedang meningkatnya kasus *fraud* di Indonesia. Untuk mengatasi kendala masih sedikitnya pengembangan kompetensi digital forensik, dapat dilakukan cara sebagaimana saran peneliti pada masalah kuota peserta diklat yang dibatasi yaitu dengan menggandeng lembaga pelatihan atau perguruan tinggi lokal yang memiliki kapasitas untuk memberikan pelatihan dengan metode online dan atau jarak jauh. Jika secara tatap muka akan terhambat oleh banyaknya pekerjaan, maka secara online adalah solusinya. Karena pembelajaran secara online bisa dengan banyak cara dan media seperti Whatsapp Learning Grup dengan broadcast materi-materi audit forensik atau digital forensik rutin setiap hari dengan durasi materi yang tidak lama lima sampai sepuluh menit setiap hari misalnya.

4. Belum maksimal menggunakan media informasi dan komunikasi

Media informasi dan komunikasi online saat ini sangat dibutuhkan di instansi dimana pun saat ini. Kendala belum maksimal menggunakan media informasi dan komunikasi di Inspektorat Kabupaten Sleman dapat diatasi dengan memaksimalkan karyawan khusus yang bertanggung jawab terhadap media informasi dan komunikasi online. Jika saat ini fungsi dari karyawan itu adalah mengurus website Inspektorat Kabupaten Sleman hanya berkaitan dengan informasi profil dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Sleman maka saat ini perlu untuk memaksimalkan website ataupun media online lainnya dengan informasi pengembangan kompetensi dari berbagai pihak penyelenggara agar pegawai inspektorat dapat secara leluasa memilih dan menyesuaikan program pengembangan kompetensi yang ingin mereka ikuti tanpa mis informasi jika menunggu pemberitaan program pengembangan kompetensi dari sekretariat. Dengan adanya informasi ini pada website inspektorat atau media lainnya pegawai inspektorat jadi lebih mudah mengingat kemana mereka harus mencari program pengembangan kompetensi secara kreatif tanpa harus mencari-cari sendiri yang memakan waktu lagi sedangkan volume pekerjaan mereka yang banyak.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Pengenalan Bab

Pada bab ini, peneliti memaparkan mengenai kesimpulan dari hasil analisis data yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, dan juga memberikan saran untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

#### 5.2 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan yang dijabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme *antifraud* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang telah dilakukan Inspektorat Kabupaten Sleman sejak tahun 2020 sampai 2023 yaitu:
  - a. Pencegahan *fraud* dilakukan dengan berbagai program yaitu sosialisasi dan penyuluhan *anti* korupsi, gratifikasi, satuan berantas pungutan liar, konsultasi dan pendampingan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah, menerbitkan surat edaran *anti* gratifikasi ke organisasi perangkat daerah, monitoring pemberantasan korupsi, analisis penilaian risiko *fraud* di setiap kegiatan, dan pembenahan lini manajemen pemerintahan
  - b. Deteksi *fraud* dilakukan dalam kegiatan pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus.
  - c. Investigasi dilakukan ketika ada temuan dalam pemeriksaan khusus, permintaan pemeriksaan dari Aparat Penegak Hukum (APH), serta laporan dugaan *fraud* dari masyarakat.

Kemudian secara organisasi Inspektorat Kabupaten Sleman telah menambah suatu bidang khusus pada tahun 2023 dan memiliki Irban (Inspektur Pembantu) dalam bidang tersebut yaitu Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi yang akan fokus menangani kasus-kasus kecurangan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sleman

2. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia *antifraud* Inspektorat Kabupaten Sleman antara lain adalah diklat, workshop, e-learning, pelatihan kantor sendiri (PKS), seminar atau webinar, pendampingan ahli dalam pemeriksaan, sertifikasi, bimbingan teknis, program peningkatan integritas seperti mengundang motivator atau penceramah.

Setiap program memiliki anggaran, ketentuan, acara, jumlah peserta dan penilaian pemenuhan kompetensi yang berbeda-beda dan disesuaikan oleh manajemen inspektorat dengan kebutuhan masing-masing pegawai saat itu. Pemenuhan nilai kompetensi merupakan kewajiban bagi pegawai inspektorat setiap tahunnya yang bisa diperoleh dengan cara mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi. Tujuannya pemenuhan nilai kompetensi pegawai yaitu untuk pengembangan profesi serta mampu bekerja saat diberi penugasan.

3. Kekurangan serta kendala yang terdapat dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia *antifraud* Inspektorat Kabupaten Sleman antara lain:
  - a. Sedikit pegawai inspektorat yang dapat mengikuti setiap ada diklat karena kuota peserta yang terbatas dan anggaran diklat bukan dikelola oleh inspektorat,
  - b. Mis informasi antara sekretariat dan pegawai fungsional terhadap program pengembangan kompetensi yang dapat diikuti secara online karena belum maksimal dalam menggunakan sarana atau media online
  - c. Para pegawai merasa kekurangan waktu untuk belajar hal baru dan juga mengikuti perkembangan teknologi karena volume pekerjaan yang sangat banyak, target waktu penyelesaian tugas yang singkat, dan masih minimnya kompetensi melakukan pekerjaan secara digital.
4. Cara mengatasi kendala yang dapat ditempuh oleh Inspektorat Kabupaten Sleman antara lain:
  - a. Mencari alternatif lain dari sedikitnya pegawai yang bisa mengikuti diklat dengan memberikan ruang kreatif bagi pegawai inspektorat mengikuti program pengembangan kompetensi yang diinginkan dan sesuai kebutuhan pekerjaan
  - b. Mencoba untuk mengambil langkah dari anggaran diklat yang dikelola sendiri agar diusulkan untuk dikelola sendiri dengan mencontoh organisasi

lain yang mengelola anggaran peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mandiri

- c. Mendorong belum maksimal nya penggunaan media online dengan cara menyadarkan kebutuhan pengembangan profesi yang sebenarnya juga bisa diperoleh melalui program online
- d. Mengatasi volume pekerjaan yang banyak dan waktu penyelesaian tugas yang singkat dengan cara membuat sampel terhadap objek pemeriksaan yang memiliki risiko tertinggi, menggunakan audit berbasis teknologi, mengalokasikan waktu pekerjaan dengan baik, berupaya manajemen waktu sendiri, saling backup pekerjaan anggota tim dan melibatkan pelaksana tugas ketika rapat kerja.
- e. Meningkatkan penggunaan *digital tools* dengan cara mengirim pegawai ke diklat digital forensik yang ada dan juga mempelajarinya melalui media online dengan kesadaran kebutuhan pengembangan profesi yang dibutuhkan pada masa kini.

### 5.3 Keterbatasan Penelitian

Selama melakukan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa keterbatasan yaitu:

1. Tidak adanya dokumen yang peneliti butuhkan terkait program pengembangan kompetensi pada tahun 2020 sampai 2022 karena pergantian Kepala Bidang Sub Bagian Kepegawaian dan Umum yang baru dilantik pada tahun 2023.
2. Peneliti belum bisa mendapatkan informasi yang lengkap terkait bidang yang baru dibentuk yaitu Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi karena bentuk-bentuk kegiatan dan program masih dalam formulasi anggota.

### 5.4 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberi saran teruntuk penelitian yang akan dilakukan berikutnya, diantaranya:

1. Mengiringi wawancara dengan pengamatan terhadap program pengembangan kompetensi yang diikuti pegawai Inspektorat Kabupaten Sleman untuk mengetahui hasil dan evaluasi terhadap pegawai yang mengikuti setiap



program pengembangan kompetensi sejauh mana peningkatan kompetensi yang didapatkan

2. Merespon penelitian ini dengan melanjutkan melakukan penelitian terkait pengembangan kompetensi digital forensik yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman serta dampak kompetensi digital forensik terhadap kecepatan menyelesaikan pekerjaan dan mengurangi akibat kekurangan waktu belajar hal baru karena volume pekerjaan yang banyak
3. Melakukan penelitian khusus untuk Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi yang baru dibentuk di masing-masing inspektorat kabupaten di berbagai daerah apabila sudah berjalan program-program kegiatannya untuk mengukur kinerja *antifraud* dan kompetensi sumber daya *antifraud* dalam bidang tersebut pengaruhnya terhadap berkurangnya kasus *fraud* di sektor publik tingkat daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, W., Steve, Chad O, Albrecht, Conan, C., Albrecht, Mark. F. Z. (2012). *Fraud Examination*. USA: South-Western Cengage Learning.
- Anggraini, Dewi, Eri, T., Helen, A. (2019). Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Dalam Pengungkapan *Fraud*. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 2, 272–280.
- Anugerah, Rita, Sony, H., A. (2014). Pengaruh Kompetensi, Kompleksitas Tugas dan Skeptisme Profesional Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Akuntansi*, 2, 139-148
- Arens, Alvin A, Elder, Randal J, Beasley, M. S. (2015). *Auditing and Assurance Service* (Edisi 12). Jakarta: Erlangga.
- Aryo, N. (2014). Laporan Audit Investigasi Sebagai Bukti Permulaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Skripsi Hukum Universitas Brawijaya*.
- Ashworth, P. D., Saxton, J. (1990). On Competence. *Journal of Further and Higher Education*, 14, 3–25.
- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah. (2012). *Anggaran Dasar*. Diakses 12 September 2023. [http://aaipi.or.id/mcont/get\\_content/3](http://aaipi.or.id/mcont/get_content/3)
- Azmy, Ahmad. (2015). Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Mencapai Career Ready Professional Di Universitas Tanri Abeng. *Jurnal Binus Business Review*, 6, 220–232.
- Bandur, Agustinus, P. (2016). Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, Dan Teknik Analisis Data Dengan NVivo 11 Plus. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Bayu, D. (2023, Maret 21). ICW Penindakan Kasus Korupsi Meningkat Pada 2022. *Dataindonesia.id*. diakses dari <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022>
- Bbc.com. (2021, Agustus 26). Juliari Batubara Divonis 12 Tahun Penjara Korban Masak Bantuan Tak Layak Terpaksa Kami Olah, Karena Itu Yang Kami Dapatkan. *BBC Online*. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58301733>

- BPKP. (2010). Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (Nomor: PER-211/K/JF/2010). Jakarta.
- BPKP. (2019a). Grand Design: Proajtive Auditing Instrumen Pencegahan Fraud. Jakarta: Deputi Bidang Investigasi.
- BPKP. (2023). Kepala BPKP APIP Posisi Strategis Dalam Pencegahan Kecurangan. Diakses 1 Juli 2023, dari <https://www.bpkp.go.id/berita/read/41430/0/Kepala-BPKP-APIP-Posisi-Strategis-dalam-Pencegahan-Kecurangan>
- Budiastuti, D., Bandur, A. (2018). Validitas dan Reabilitas Penelitian. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Creswell, J. (2015). Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan (Edisi 3). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. (2017). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitaif, dan Mixed(Edisi 3). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Devi, I. S. (2023). *Wawancara Ibu Ika Sulistyo Devi 31 Juli 2023*
- Enderson, K. F. (2013). Internal auditing 3th edition. Florida: the institute of internal Auditors Research Foundation (IIARF).
- Firmansyah, A. (2023, Februari 23). Eks Kades Cilacap Korupsi Dana Desa Rp 784 Juta Ditangkap. *Detikcom*. diakses dari <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6584328/eks-kades-di-cilacap-korupsi-dana-desa-rp-784-juta-ditangkap>
- Hardinto, W., Siwi, F. W., Handoyo, S. (2018). Melawan Kecurangan: Perlukah Mengembangkan Kompetensi Auditor Investigatif (Studi Kasus Auditor Investigatif BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta). *Future Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 6, 10–14.
- Ihulhaq, Nasha, Sukarmanto, E., Purnamasari, P. (2019). Pengaruh Akuntansi Forensik Dan Audit Investigasi Terhadap Pendeteksian *Fraud*. *Jurnal Prosiding Akuntansi Seminar Penelitian Sivitas Akademika Universitas Islam Bandung*, 5, 309-319

- Inspektorat Kabupaten Sleman. (2023). 1 Agustus 2023, <https://inspektorat.slemankab.go.id/>
- Inspektorat Kabupaten Sleman. (2023). Program dan Kegiatan, Diakses 1 Agustus 2023, dari <https://inspektorat.slemankab.go.id/>
- Inspektorat, P. K. S. (2023). Keputusan Inspektur Kabupaten Sleman Tentang Kebijakan Pemenuhan Kompetensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sleman. Yogyakarta. No. 001.d/Kep.Inspektur/2023.
- Inspektorat, P. K. S. (2023). Realisasi Diklat atau Kegiatan Pemenuhan Kompetensi SDM Sekretariat Inspektorat Kabupaten Sleman Tahun 2023. Yogyakarta
- Inspektorat, P. K. S. (2023). Realisasi Diklat atau Kegiatan Pemenuhan Kompetensi SDM Pengawas Inspektorat Kabupaten Sleman Tahun 2023. Yogyakarta
- Inspektorat, P. K. S. (2023). Rencana Pengembangan Kompetensi Tahun 2023. Yogyakarta
- Kayo, Sutan, A. (2013). Audit Forensik: Penggunaan Dan Kompetensi Auditor Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Buku Kesatu. Aturan Umum.
- KNKG. (2008). Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran - SPP (Whistleblowing Systems - WBS). Komite Nasional Kebijakan Governance, 3.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022), Kenapa Masih Banyak Yang Korupsi Ini Penyebabnya. Diakses tanggal 1 Juli 2023, <https://aclc.kpk.go.id/action-information/lorem-ipsum/20220407-null>
- Kumaat, V. G. (2011). Internal Audit. Jakarta: Erlangga.
- Kuryanto, H. D. (2023). *Wawancara Bapak Hery Dwi Kuryanto 01 Agustus 2023*
- Leke, A. A. C. M., Irawati, R. I., Candradewini, C. (2022). Analisis Lingkungan Pengendalian dalam Pelaksanaan SPIP di Inspektorat Kabulaten Nagekeo. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6, 136–146.

- Lembaga Pengembangan *Fraud Auditing*. *Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Forensik*. Jakarta. <http://lpfa.co.id>
- Lestari, S. P. (2023). *Wawancara Ibu Sri Puji Lestari 19 Mei 2023*
- Lestari, S. P. (2023). *Wawancara Ibu Sri Puji Lestari 28 Juli 2023*
- Lestari, S. P. (2023). *Wawancara Ibu Sri Puji Lestari 30 Maret 2023*
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press
- Miqdad, M. (2008). Mengungkapkan Praktek Kecurangan (*Fraud*) Pada Korporasi Dan Organisasi Publik Melalui Audit Forensik. *Journal of Economics Fakultas Ekonomi Universitas Jember*, 3, 45–55.
- Moeller, R. R. (2011). *COSO enterprise risk management: establishing effective governance, risk, and compliance processes* (Vol. 560). John Wiley & Sons.
- Moleong, L. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Morissan. (2019). *Riset Kualitatif*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ngatiyah. (2023). *Wawancara Ibu Ngatiyah 28 Juli 2023*
- Okoye, Emma I., dan Ndidika L. Akamobi. (2009). The Role of Forensic Accounting in *Fraud Investigation and Litigation Support*. *A Multi Disciplinary Journal*, 17, 39–44.
- Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor: S-01/AAIP/3/2014 Tentang Aturan Perilaku dan Etika Auditor Intern dalam Kode Etik AAIPI.
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sleman.
- Peraturan Pemerintah. (2008). *Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*.
- Peraturan Presiden RI. (2010). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.

- Peraturan Presiden RI. (2023). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembagunan*.
- Pusdiklatwas BPKP. (2008). *Fraud Auditing*. Edisi Kelima. Jakarta: BPKP.
- Puspita, P. T. R. (2023). *Wawancara Ibu Pipit Tyas Ratna Puspita 18 Juli 2023*
- Rahayu, E. S. (2013). *Auditing: Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Saldana, Johny. (2016). *The Coding Manual for Qualitative Research* (3 Edition). London: SAGE
- Samsuni, S. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia. *Al-Falah Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 17, 113-124.
- Saptohutomo, A. P. (2023, Januari 31) Indeks Korupsi Indonesia Menurun Sektor Politik Jadi Sorotan. *Kompas.com*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/31/23325521/indeks-korupsi-indonesia-2022-menurun-sektor-politik-jadi-sorotan>
- Satiti, R. I. (2023). *Wawancara Ibu Retno Isni Satiti 01 Agustus 2023*
- Setiadiputra, Pradiyo, R. Y. (2017). Urgensi Program Pengembangan Kompetensi SDM Secara Berkesinambungan Di Lingkungan Instansi Pemerintah. *Jurnal SAWALA*, 5, 16–22.
- Setiawan, Ebta. (2019). Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa)*. Retrieved April 17, 2020 (<https://kbbi.web.id/investigasi>).
- Setyawati, H. (2023). *Wawancara Ibu Heri Setyawati 18 Juli 2023*
- Siyoto, S., Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- SKKNI. (2009). *Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Audit Forensik*.

- Stamler, R. dkk. (2014). *Fraud Prevention and Detection: Warning Sign and Red Flags System*. Britania Raya: Taylor & Francis.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukrisno, A. (2012). *AUDITING Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik (Edisi 4)*. Jakarta: Salemba Empat
- Sukrisno, A., Ardana, I. C. (2009). *Etika Bisnis Dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tambunan, S. T. (2016). *Glosarium Istilah Pemerintahan*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Transparency International. (2023, 31 Januari). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022. *Ti.co.id*. diakses dari <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>
- Tuanakotta, T. M. (2014). *Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tuanakotta, T. M. (2016). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif (Edisi 2)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tunggal, A. W. (2016). *Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan*. Jakarta: Harvarindo.
- Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Wiratmaja, I., Dewa, N. (2010). Akuntansi Forensik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi i Dewa Nyoman Wiratmaja. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis. Universitas Udayana*, 5, 1-26
- Yanti, Budi, H., Agustina, E. (2012). Pemahaman Auditor Tentang Skema Kecurangan, Red Flags, Mekanisme Deteksi Dan Mekanisme Preventif Kecurangan. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 7, 17–42.
- Yusuf, B., Al Arif, M. N. R. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.





Lampiran 2 Wawancara Ibu Puji (30 Maret 2023)

Narasumber : Ibu Ir. Sri Puji Lestari

Usia : 55-59 Tahun

Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sleman

Lama Bekerja : 31 Tahun

Waktu : Kamis, 30 Maret 2023, 13.42 WIB

Lokasi : Lobby Inspektorat Kabupaten Sleman

Durasi : 43 menit 3 detik

Reza : Bismillah, mungkin ini dulu bu, karena penelitian saya mengenai strategi (Rz) pengelolaan SDM, Sumber Daya Manusia khususnya yang Tim *Antifraud*, entah itu mungkin pencegahan atau investigatif. Kalau di inspektorat ini bu, bagaimana bu mekanisme *antifraud* yang sudah diterapkan?

Bu : Ya, sebetulnya sekarang itu semenjak Maret, bulan maret ya, itu organisasi Puji inspektorat ada perubahan. Sekarang sudah ada bidang yang menangani terkait (Pj) dengan bidang investigasi dan reformasi birokrasi sekarang, kalau dulu memang belum ada, jadi terkait itu masih campur ya di sekretariat. Sekretariat, kalau sekarang sudah ada sebetulnya gitu tapi kan dan terkait dengan itu bidang investigasi dan reformasi birokrasi itu, tugasnya itu yang pertama, melakukan pencegahan terhadap tindakan e yang terkait dengan korupsi, dari pencegahan kemudian tindak pemeriksaannya atau penanganannya gitu. Kalau dulu masih ditangani oleh sekretariat, jadi di sekretariat masih e kalau dulu kan bidang-bidangnya belum ad aitu masih di sekretariat kita menangani terkait dengan *fraud* segala macem. Kalau di inspektorat, itu kan di inspektorat itu kan inspektorat itu selaku e apa ya? Unit sekretariat unit ee pengendali gratifikasi atau UPG kemudian ekhm inspektorat itu juga sebagai kalau dulu sebagai pembina atau pendamping OPD dalam melakukan analisa *fraud* di setiap kegiatan OPD

Rz : OPD...

Pj : OPD itu unit kerja

Rz : Unit kerjanya pemerintah?

Pj : Unit kerjanya pemerintah daerah

Rz : Owh..

Pj : Dinas-dinas, dinas-dinas lah...

Rz : OPD

Pj : Kita yang melakukan, apa namanya, pembinaan atau penembilan kepada mereka untuk melakukan analisa resiko *fraud* dalam pelaksanaan kegiatan

Rz : Oh iya, ini yang bidang investigative dan reformasi birokrasi ini terbentuknya baru maret 2023 ini bu?

Pj : Iya

Rz : Oh pantas saya waktu baca website nya itu ya saya lihat itu bidang pas say abaca website nya inspektorat...

Pj : He eh he eh

Rz : Di struktur struktur itu saya lihat ada bidang itu baru ya bu ya?

Pj : Baru

- Rz : Itu bagaimana asal usulnya bisa terbentuk itu bu? Karna ada, karna alasan apa bu?
- Pj : Alasannya itukan perintah dari KPK
- Rz : Dari KPK?
- Pj : Iya dari KPK, jadi sekarang di setiap inspektorat itu harus ada bidang khusus yang menangani investigative, karna kan sekarang banyak kegiatan kegiatan dari KPK yang diturunkan ke daerah, banyak sekali. Kemarin itu karena belum ada bidang sendiri maka ditangani oleh kantor. Jenengan bisa bayangkan secretariat harunya menangani masalah interen kantor, tapi juga menangani masalah-masalah dari luar, jadi kegiatannya belum ditampung oleh bidang semuanya masuk ke secretariat. Jadi secretariat kita menangani. Di KPK itu ada kegiatan monitoring percepatan pemberantasan korupsi atau mjb, kalau mungkin jenengan kenal, mjb KPK, kemudian ada lagi inspektorat yang harus melakukan monitoring, kemudian juga adalagi monitoring penerapan stranas pemberantasan korupsi KPK, adalagi. Kemudian ada lagi kpk juga ngobli dia ee dia.
- Pj : Kemudian adalagi dari KPK itu juga terkait disetiap kabupaten harus membentuk, harus membentuk unit yang menangani pengelolaan gratifikasi, itu juga ada di inspektorat. Itu, itu semuanya diri mjb Kpk itu agar apa tindakan-tindakan korupsi terutama pencegahannya itu bisa efektif bahkan di setiap APIP atau setiap inspektorat harus ada bidang khusus investigative, kita semuanya.
- Rz : Oh gitu, itu tu kayak perintah langsung dari pusat ya bu?
- Pj : Dari pusat
- Rz : Oh gitu
- Pj : Tadinya itukan hanya perintah dari BPKP
- Rz : Oh BPKP
- Pj : BPKP selaku pembina inspektorat, tapi kan belum apa ya belum begitu untuk masing-masing kabupaten daerah itu belum begitu well ya gitu ya. Tapi setelah diinstruksikan ada amanat KPK ya harus.
- Rz : Hmm, kalau untuk ini nya bu, gambaran, kan baru maret ini terbentuk ya bu, gambaran ya projek nya dari bidang investigative dan reformasi birokrasi tadi kira-kira ke depannya udah ada bu? Atau mau ngapain aja
- Pj : Gambarnya itu harus melakukan pencegahan terkait dengan korupsi, nanti banyak disosialisasi di
- Rz : Banyak disosialisasi?
- Pj : Harus, sosialisasi nya itu tidak hanya kepada unit-unit kerja, tapi juga kepada masyarakat, kepada pengusaha, sampai DPRD
- Rz : Luas ke pengusaha juga
- Pj : Itu amanatnya seperti itu
- Rz : Oh amanatnya kek gitu?
- Pj : Hm m, itu khusus yang bidang investigasi nya, yang bidang reformasi itu kan juga saling terkait, reformasi itu kan pembenahan di semua lini manajemen pemerintahan supaya bisa tercapai good governance gitu. Itu, jadi ada bidangnya itu ada kegiatan lagi yang menyokong itu, yang reformasi itu kan harus perbaikan di manajemen nya, terus perbaikan di manajemen perubahan, ada di perbaikan di pembentukan regulasi, ada di SDM nya, pengelolaan SDM, pengelolaan pengawasan nya, pengelolaan pelayanan publik nya, itu di reformasi birokrasi itu kan juga terkait dengan investigasi, gitu, mungkin kalau saat ini belum banyaklah, belum banyak.
- Rz : Oh ya, karena itu baru ya bu, memang baru banget, baru bulan in imaret.
- Pj : Karna baru mungkin untuk sementara dulu baru saya yang bisa menyampaikan,

- mungkin ditanya yang baru mungkin belum, makanya tidak saya tunjuk sebagai narasumber.
- Rz : Oh iya iya
- Pj : Sebetulnya ada irbad nya kan gitu yang baru, tadi kan sudah saya tanyakan, sementara saya dulu aja
- Rz : Iya-iya. Kalau adanya ini bu yang tadi bidang investigative dan reformasi birokrasi itu ee mekanisme *antifraud* nya seperti apa bu?
- Pj : *Antifraud* nya kan
- Rz : Yang sudah berjalan saja
- Pj : Oh ya betul, itu juga kita juga dapat bimbingan dari BPKP juga ya dalam rangka SPIP, SPIP ngerti?
- Rz : Tau bu, saya lupa kepanjangan nya, cuman intern
- Pj : Tau ya?
- Rz : Tau bu, saya tau bu
- Pj : Salah satu dari SPIP itu, SPIP yang tahun sekarang itu kan mengalami pengembangan, apa namanya, materinya itu bertambah, tidak hanya SPIP melulu, tapi dalam SPIP itu sekarang ada, unit apa sub-sub penilaian SPIP terkait dengan IUPK itu indeks IUPK Korupsi hm em. Amanat dari SPIP itu y aitu, SPIP itu kan ada terkait juga apa namanya IUPK indeks indeks pengendalian korupsi juga Maka langkah pertama Yang dilakukan itu adalah melakukan analisis penilaian kejadian *fraud* di setiap kegiatan yang dilakukan, jadi memang baru tahun kemarin kita lakukan karena kalau tahun-tahun dulu itu SPIP Tidak sampai ke *fraud* jadi Hanya analisis risiko, risiko-risiko yang apa Menghambat atau menggagalkan capaian tujuan kegiatan Tapi SPIP itu kan mengalami perkembangan baru kemarin Itu ada tambahan sekarang Tambahan iupk itu
- Rz : Analisis apa tadi bu?
- Pj : Iupk itu apa ya singkatannya ya. Indeks Iupk Penanganan pencegahan korupsi intinya Coba *nanti* dicari Dek iupk ,Iupk itu salah satu materi SPIP Baru kemarin kalau dulu belum ada gitu iupk, Terus karena itu maka Langkah pertama yaitu kita melakukan analisis *Fraud*
- Rz : Sejak ada sistem yang baru tadi ya?
- Pj : Iya
- Rz : Baru tahun kemarin bu?
- Pj : Baru tahun kemarin ya
- Rz : Itu berlanjut *nantinya*
- Pj : Harusnya Iya tetap berlanjut, Saya harus membantu opd Meyakinkan opd membuat
- Rz : Oh iya Bu
- Pj : Jadi kalau kemarin karena baru-baru Jadi kita mencoba membuat, Kemudian kita share itu semua ke unit-unit kerja Contohnya seperti ini menyesuaikan dengan kegiatannya Itu kadang opd juga belum ngeh gitu loh laporannya tidak ada *fraud* tidak ada *fraud* tambah akan yang namanya penilaian resiko itu penilaian yang terjadi atau yang mungkin terjadi kan gitu Jadi kalau dalam pikirannya nggak pernah ada jadi seakan-akan yang sudah terjadi kan gitu, mungkin kalau penilaian resiko seperti itu ya itu jadi langkah pertama ya itu kalau terkait dengan *fraud*. Penilaian risiko *fraud* Terjadi, Tapi saya itu sendiri tidak bisa membedakan ya antara *fraud* dengan agenda *anti* korupsi lainnya Oh ya kalau untuk pencegahan Kita yaitu melakukan sosialisasi-sosialisasi pencegahan pungli Kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan Khusus pungli. Tapi kalau pencegahan gratifikasi Maka hanya

inspektorat yang melakukan Kita melakukan kepada seluruh opd Seluruh unit kerja, Dan kemarin kita khususkan kepada Sekolah. Sekolah SD SMP itu kita lakukan penyuluhan pencegahan gratifikasi iya

- Rz : Itu untuk guru-guru?  
Pj : untuk guru-guru dan kepala sekolah dan pengawas gitu  
Rz : Berarti itu masuk programnya dari inspektorat juga?  
Pj : dari inspektorat iya  
Rz : Owh gitu  
Pj : Kan di inspektorat sebagai PG unit pengendalian gratifikasi Nya kabupaten ,Salah satu kegiatannya itu Terus yang kedua kita membagi selebaran brosur pencegahan gratifikasi kepada sub-sub unit dan juga kita menerima nah ini setiap hari raya kita mengeluarkan surat edaran yang ditandatangani oleh Bupati kepada seluruh perangkat daerah sampai desa dan kepada ini konsorsium Kelompoknya pengusaha kelompok-kelompok pengusaha koperasi Kelompok Kadit segala macam gitu kelompok pengusaha dan itu kita sampaikan pencegahan gratifikasi maksudnya tidak usah memberi ke pegawai pemerintahan. ini besok mau kita mau tekankan lagi. Salah satunya itu kemudian dari surat itu *nanti* kalau ada pelaporan penerimaan gratifikasi maka wajib melaporkan melaporkan kemarin bisa langsung ke KPK bisa juga langsung melalui UPG UPG kita *nanti* kita yang melaporkan ke KPK dan dari pengalaman ada garam yang Kok itu kayak gratifikasi Dan harus kita kirim ke peminta kita kirim ke KPK,  
Rz : Ke KPK?  
Pj : Iya kita kirim ke KPK *nanti* dari KPK mendapatkan surat atensi itu benar kita sampaikan kepada yang bersangkutan lagi itu, Itu untuk gratifikasi kalau untuk saber pungli kita kerjasama kepolisian dan kejaksanaan  
Rz : Saber Pungli?  
Pj : Itu satuan bersih pungutan liar, Kalau kita penyuluhan pungli nya hanya di opd opd kita, tapi kalau ke masyarakat-masyarakat itu tugasnya Kepolisian karena kepolisian itu kan punya Babinsa  
Rz : Tau bu babinsa yang di daerah-daerah desa-desa dusun.  
Pj : Dia itu udah Kukuh menyatakan penyuluhan terkait pungli di kelompok-kelompok masyarakat itu.  
Rz : Kalau ini bu kan penyuluhan sama sosialisasi mungkin telah banyak dilakukan ya bu ya, itu pernah cari tahu dampaknya yang dihasilkan setelah sosialisasi itu bagaimana, apa memajukan masyarakat bisa menghindari itu lebih signifikan apa bagaimana bu setelah sosialisasi?  
Pj : Pada saat sosialisasi  
Rz : Antusias nya semuanya gitu?  
Pj : Kadang-kadang apa ya mereka itu kaget, oh ternyata seperti termasuk gratifikasi ya, terutama hal yang sudah dianggap umum sebagai budaya, itu ternyata sesuai dengan aturan itu oh itu teridentifikasi gratifikasi gitu, akhirnya menambah juga anu apa namanya pengetahuan ke mereka kan gitu. Kan ada pemberian gitu yang termasuk gratifikasi yang harus dilaporkan dan ada juga pemberian-pemberian yang tidak termasuk gratifikasi. Yang tidak termasuk gratifikasi yaitu pemberian orang tua ke kita, menambah harta kita pemberian apa, pemberian diskon. Diskon itu kalau diskon itu diberikan secara umum nah itu enggak gratifikasi, tapi kalau diskon saya beli sesuatu tapi yang dapat diskon hanya saya itu gratifikasi  
Rz : Kaget akhirnya, baru tahu?

- Pj : Ya kan mereka akhirnya toh baru tau, padahal sepertinya kan enggak kan gitu. Ya itu dengan adanya itu kalau saya rasa ya sekarang memang lebih hati-hati, maksudnya apa pegawai kita ya lebih hati-hati. Sasarannya akhirnya kan tau juga.
- Rz : Berarti mungkin secara garis besarnya, masyarakat ini menerima dikasih penyuluhan gitu dan kalau ini nya bu kalau dampak setelah itu apa mereka langsung mengerti dan mengurangi yang tadi mereka tidak tau jadi mereka menerapkannya atau mereka biarkan aja, kayak menganggap 'aku dah biasa kek gini?' atau berkurang?
- Pj : Kayak nya ngerti, kayak nya ngerti, karena sekarang karena begitu sekarang, pejabat-pejabat kalau menerima kas itu lapor, ini gratifikasi gak?, ini gratifikasi gak?
- Rz : Oh.. dia hati-hati juga ya bu?
- Pj : Iya lebih hati-hati, gratifikasi gak itu? Gitu
- Rz : Kalau di kabupaten ini sendiri bu di Sleman bu untuk yang di sekitar ini nya opd opd atau kalau untuk dinas-dinas yang lainnya apa inspektorat ada tugas ke situ bu? ke dinas pendidikan dan lainnya. Itu termasuk OPD bukan dinas pendidikan dan lainnya?
- Pj : OPD Pendidikan
- Rz : Oh ya bidang pendidikan. Itu mereka juga diberikan penyuluhan?
- Pj : Iya, kalau untuk dinas-dinas kita perwakilan setiap dinas kita ambil satu orang, kita lakukan penyuluhan, kemarin waktu di, kemudian kita juga melakukan penyuluhan di unit-unit pelayanan publik UPT UPT, UPT pasar
- Rz : Ke pelayanan publik ya?
- Pj : Itu kepala-kepala upt nya kita kumpulkan kita lakukan penyuluhan juga. Terus yang kepala-kepala sekolah dan guru-guru, kepala-kepala sekolah kemarin bukan guru-guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah, SD dan SMP meskipun belum semua. Kan mestinya butuh nya kan se Sleman, jadi kemarin baru dua Angkatan baru bisa.
- Rz : Owh begitu bu?
- Pj : Iya, untuk mencegah pungutan kepada siswa. Iya, kepada siswa itu kan kadang-kadang dianggap biasa toh.
- Rz : Kalau kayak memberikan hadiah gitu, misalkan mengumpulkan uang untuk membeli hadiah kepada guru gitu itu termasuk?
- Pj : Ha kan yaitu itu dianggap biasa toh itu biasanya toh, sebetulnya itu kan gratifikasi, kemarin juga ke puskesmas-puskesmas kita kumpulkan juga, ada tip dari dokter, dari eh, yang menyuplai obat itu namanya apa?
- Rz : Yang menyuplai obat ya? Supplier
- Pj : Itu gratifikasi.
- Rz : Ohh dikasih tip ya?
- Pj : Kan selama itu gak tau toh itu gratifikasi, seakan-akan itu biasa.
- Rz : Hmm waktu melakukan sosialisasi nya itu bagaimana bu? Apakah berdasarkan?
- Pj : Saya tau nya karena mereka bertanya, ooh ternyata itu gratifikasi ya
- Rz : Oh gitu, lumayan hati-hatilah
- Pj : Ya sekarang hati-hati, sekarang memanfaatkan sponsorship itu juga harus hati-hati
- Rz : Sponsorship, ada juga?
- Pj : Dan itu juga termasuk bibit-bibit gratifikasi. Kita melakukan kegiatan ya toh, kita minta dia dananya, tapi dia maunya apa, itu kan bibit-bibit gratifikasi
- Rz : Oh iya bu, saya baru tau juga bu.
- Pj : Itu termasuk bibit-bibit meskipun belum dikatakan dilarang kan gitu. Soalnya kita

- kan punya banyak kegiatan-kegiatan besar yang pakai sponsor ya, kalau gak pakai sponsor gak jalan.
- Rz : Iya dia minta iklankan produknya.
- Pj : Iya, asalkan wajar mungkin gak apa-apa. Makanya dikatakan bibit-bibit gratifikasi, takutnya dia meminta lebih dari yang apa. kesepakatan kontrak kerja
- Rz : Hmm, tadi bu balik ke terkait penyuluhan yang sudah dilakukan itu, materinya tu apa bagaimana bu
- Pj : Nah itu irban nya yang baru tuh, irbad investigasi nya itu
- Rz : Apa namanya bu irbad?
- Pj : Inspektur pembantu
- Bu Dari UII ya
- Heri (H)
- Rz : Iya bu
- Pj : Ini juga mantan UII
- Rz : Siapa namanya bu?
- H Saya Heri Setiawati
- Rz : Saya ini bimbingan pak hendi yogi, pernah tau bu
- H Kalau saya rombongan yang udah sepuh-sepuh
- Pj : Dia masih di Condong Catur dulu ya kampusnya
- Rz : Masih di Condongcatur sekarang
- Pj : Oh masih, oh tak kira
- Rz : Masih
- H Oh.. itu rencananya mau dipakai D3nya benar?
- Rz : Belum, masih. S1 juga masih disitu juga sama S2 yang internasional program juga masih disitu semuanya. Cuma hukum yang udah pindah ke jalan kaliurang
- H Trus yang disana dipakai?
- Rz : SMA UII. Saya izin lanjut ya bu ya.
- H Iya Monggo
- Rz : Tadi terkait penyuluhan mungkin terkait materinya itu bagaimana penyampaiannya terus materinya itu apakah darimana saja apa mungkin digabung atau kombinasi antara budaya, agama atau Undang-Undang itu bagaimana bu menyampaiannya?
- Pj : Kalau materi gratifikasi banyak dari....
- H KPK
- Pj : KPK, kita buka web nya KPK, materi banyak banget ya, kita ambil dari situ, disesuaikan. Kalau pada saat kita nyuluh sekolah, *nanti* materi-materi yang terkait dengan sekolah. Pada saat puskesmas kita ngambil yang puskesmas. Makanya saya juga jadi tau sponsorship segala macam itu obat supplier apa supplier obat itu termasuk juga apa ralang gratifikasi. Itu ngambil materi dari situ. Tergantung *nanti* audiencenya yang mau diberi ya gitu.
- Rz : Kalau dari sisi materi, itu paling cepat mereka menerima itu apa langsung dari Undang-Undang mungkin atau dari budaya atau dari agama mungkin bu, biasanya orang kan diingatkan takut dosa kan juga langsung ngerti atau dari Undang-Undang takut terjerat hukum?
- Pj : Lebih ke peraturan, lebih ke peraturan. Kan kita sudah punya peraturan bupatinya. Jelas. Kalau cuman agama, karena mungkin dah biasanya ya kurang mempan. Budaya, kalau udah budaya, itu budaya menganggap itu biasa, tidak gratifikasi, begitu

- Rz : Kalau dari segi mekanisme nya sendiri, yang tadi apa untuk *antifraud* tadi itu ada ini gak bu kayak kolaborasi sama inspektorat yang lain mungkin atau Cuma khusus Sleman ya Sleman aja?
- Pj : Sementara ini kalau baru yang untuk penilaian *fraud* cuman sleman aja,
- Rz : Sleman saja, sama apa, sama BPKP?
- Pj : Sama bpkp oh ya, *nantikan* hasilnya kita kan dibaca oleh BPKP. Kan yang melakukan penilaian SPIP kan dia. Tapi selama ini kayak nya gak ada catatan ya biasa-biasa aja ya Mba Heri ya e hasil penilaian *fraud* kita. Cuman kita yang mengkritisi teman-teman kita laporannya tidak ada *fraud* kan gitu. Ada juga opd yang belum dong gitu. Tidak ada *fraud*, tidak ada kejadian *fraud* kan gitu.
- Rz : Inshaallah udah cukup luas yang saya dapatkan untuk rumusan masalah nomor satu ini bu
- Pj : Oke
- Rz : Kalau yang ini bu, menjawab rumusan masalah nomor 2 tentang pengembangan kompetensi SDMnya
- Pj : SDM
- Rz : Iya, disini untuk...
- Pj : Kalau pengembangan kompetensi pakai itu, kita mendatangkan narasumber dari BPKP, internal, dari BPKP ya toh, kemudian juga PKS, PKS itu pelatihan kantor sendiri dengan narasumber dari dalam
- H : Atau dinaspagis
- Pj : Kemarin itu terkait dengan *fraud* dari BPKP udah, dari dalam itu yang ini yang penyuluh *anti* korupsi itu. Kita punya penyuluh *anti* korupsi satu, bersertifikat itu. Ada apa namanya dia melakukan sosialisasi juga ke teman-teman, teman-teman dalam maksudnya. Supaya *nanti* yang melakukan sosialisasi gak dia aja. Termasuk Bu Heri kemarin juga bertugas sosialisasi ke secretariat daerah gitu. Jadi kalau cuman satu kan gak hmm.
- Rz : Hmm iya, kalau pengembangan kompetensi ini bagaimana bu dari sisi yang teknologi mungkin. Apa udah memanfaatkan software bu mereka dalam melakukan audit-audit. Kayak saya baca ada audit kesejahteraan rakyat, audit apalagi bu ya yang di inspektorat ini?
- H : Yang apa tadi yang apa
- Rz : Pengembangan kompetensi nya , SDM yang auditor itu, misalnya yang dari sisi teknologi, karakter itu bagaimana bu. Teknologi apa mereka menguasai? Bagaimana caranya? Untuk bisa jadi ahli disitu?
- Pj : Kalau pengembangan kompetensi kan kalau di kita itu tidak hanya terkait dengan *fraud* aja, tidak terkait kecurangan aja gitu. Tapi ya semuanya. Seperti pada saat, ya seperti itu ada kaitannya sih kalau kita melakukan review apa, anggaran itu kita juga salah satunya kan mengurangi apa, apa toh jeneng e, ee kesalahan ya, kesalahan penganggaran. Kalau itu juga pakai pakai ini pake aplikasinya e sana keuangan *nanti* kita dikasih password kita bisa melakukan dari situ. Kemudian itu kemudian untuk melakukan apa namanya kegiatan pemeriksaan probity audit terkait untuk pencegahan korupsi, itu ya selain apa namanya materi biasa juga ada uji lab nya. Tapi kita kerja sama, kerja sama dengan UII, dengan labnya, Fakultas Teknik.
- Rz : Oh, oke
- Pj : Iya, jadi *nanti* soalnya kan kalau uji lab itu kan harus dikeluarkan oleh lembaga yang kompeten yang legal kan gitu. Tapi kita mendampingi kan gitu. Terus kalau dalam bidang IT, memang kita belum melakukan pemeriksaan terkait dengan IT.

Kita kemarin baru wacana aja sih, wacana mau kerja sama dengan dinas, tapi kok dinas ya, padahal dinas yang mau kita periksa kan, dinas Kominfo maksudnya, nah itu yang belum. Kan harusnya kita kerja sama sama luar UGM rencananya iya gitu. Kalau yang kita gak bisa kita kerja sama.

- Rz : Iya, untuk pembekalan keterampilan dan pengetahuan yang diberikan itu apa saja bu? Terhadap SDM-SDM yang dimiliki inspektorat?
- Pj : Kalau pembekalan yaitu kita ngirim diklat, kita ngirim diklat, materi-materi yang dibutuhkan kita, kita kirim ke diklat ke BPK
- Rz : BPK bu?
- Pj : Badan Pemeriksa Keuangan
- Rz : Pusat Bu? Ada di Jogja ya bu?
- Pj : Di Jogja kan ada perwakilan, iya ada ke BPKP, ngirim, atau mengikutkan workshop, ya kita ada jadwalnya setahun itu dua kali untuk mengirim peserta workshop secara fisik lo,
- Rz : Secara fisik?
- Pj : Ya, kalau workshop online kan banyak ya
- Rz : Iya banyak bu
- Pj : Itu setiap ada berita saya share di grup untuk mengikuti kan gitu. Tapi ada juga yang mengikuti ada juga yang enggak, kan gitu, kan orang macam-macam ya.
- Rz : Iya, kalau yang diwajibkan ada bu?
- Pj : Ada, kalau yang diwajibkan sudah saya tunjuk personil nya, wajib gitu. Trus pelatihan kantor sendiri rutin setiap bulan.
- Rz : Latihan di kantor?
- Pj : Narasumber nya bisa dari luar, bisa dari dalam, untuk meningkatkan SDM gitu
- Rz : Kalau bentuk-bentuk keterampilan itu apa saja bu? Yang diajarkan gitu? Apa aja bu kira-kira?
- Pj : Semua materi
- Rz : Terkait?
- H : Terkait keuangan, bisa kepegawaian, bisa teknik, pokoknya yang membantu tugas pokok dan fungsi.
- Pj : Macem-macam
- H : Banyak Mas, 50 jenis aja lebih ya, pokoknya tergantung kita tugasnya ke depannya apa.
- Rz : Oh iya, kemudian kalau bicara tentang auditor mungkin ini juga ya bu, auditor juga memiliki kayak syarat-syarat dalam..., yang saya pelajari kayak sifat integritas gitu. Kalau untuk pengembangan karakter baiknya itu bagaiman bu diberikannya, melalui apa?
- Pj : Untuk integritas nya ya
- Rz : Iya, selain kan tadi keterampilan teknis, ini tentang sifat dan sikap
- Pj : Integritas nya itu kan audit, bukan auditor nya aja, tapi semua pegawai ya. Itu kan menandatangani pakta integritas, ada poin satu sampai tujuh kalau ndak salah, nah itu setiap hari senin dibacakan perwakilan, urut dari yang
- H : Pas Apel Pagi
- Pj : Pas Apel Pagi, dari yang pangkatnya paling tinggi sampai yang paling rendah
- Rz : Seminggu sekali bu?
- Pj : Seminggu sekali, jadi untuk mengingatkan, nah besok, besok itu baru mau saya bikin ini apa namanya kayak gini *nanti* banner atau apa yang *nanti* ada apa namanya maklumat pelayanan kita apa integritas *nanti* harus ditandatangani oleh semuanya,



- ini baru mau kita buat
- Rz : Disitu termasuk ini gak bu? Untuk menjaga independensi juga bu?
- Pj : Oh ya disitu ada, salah satu pakta integritas nya, kemudian di setiap surat tugas, surat tugas teman-teman melakukan kegiatan itu disitu ada maklumat inspektorat tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Kemudian juga ada surat independensi
- H Piagam audit ada
- Pj : Piagam audit ada
- H H Kode etik
- Pj : Kode etik ada, kemudian yang apa setelah surat tugas kita bikin yang mba lasmi yang setiap tim harus tanda tangan, independensi, dalam melakukan proses harus independensi. Jadinya kita yang selaku menugaskan kita harus tau apa namanya, jangan sampai kita menugaskan di tempat yang independen gitu. Kan mungkin ada yang kakaknya kerja disini, akhirnya gak disitu. Selagi saya inget, selagi kita inget tidak akan kita tugaskan. Ada itu, kita udah buat daftarnya
- Rz : Iya iya bu, mungkin kemudian terkait ini nya bu, proses rekrutmen anggota disini atau peraturan-peraturan pemberian hadiah dan sanksi yang dilakukan disini bagaimana bu?
- Pj : Kalau rekrutmen itukan BKBP, pengusulan nya, kebutuhan-kebutuhan formasi, kebutuhan usulan nya kita kirim kesana, *nanti* pakai ASN itu penerimaan CPNS itu, satu.
- Rz Iya CPNS
- Pj : Yang kedua, pindahan dari luar ke dalam
- Rz : Mutasi tugas?
- Pj : Mutasi dari dinas lain ke sini, kemudian kalau sanksi segala macam sesuai dengan kode etik. Kode etik kan punya Pemda itu kan punya kode etik untuk pegawai sekabupaten atasnya itu aturan PP apa, kalau dulu PP30, sekarang PP40
- H Disiplin pegawai
- Pj : Disiplin pegawai negeri
- Rz : Itu merata bu? Semua dinas?
- Pj : Sama itu, sama, gak ada yang khususon
- Rz : Oh..
- Pj : Gak ada, kalau kita sih ada khususon yang ada di kode etik memang ada tambahannya ya mba ya, ya kan ada kode etik Pemda tu, *nanti* masing-masing unit kerja bikin kode etik yang lokal, nambah kan apa yang lokal gitu
- Rz : Kalau tadi kan berarti waktu mau proses rekrutmen dari inspektorat sendiri kek usul kebutuhannya apa gitu ya bu?
- Pj : Ada kebutuhan pegawai kan ada
- Rz : Sama disitu ada strateginya bu untuk meng-hire orang yang direkrut ini tepat gitu, ada strateginya bu? Mengingat zaman juga sama kondisi yang terus berkembang?
- Pj : Gak kalau itu penerimaan itu sesuai dengan pusat
- Rz : Sesuai dengan pusat?
- Pj : Pusat
- Rz : oh
- H Kuota nya yang menentukan Kemenpan
- Pj : Kemenpan
- H Dari masing-masing pemerintah daerah,
- Pj : kan ada tes nya sama itu. Yang makai cap itu lo tes nya.

- Rz : Hmm, kalau berarti disini bu terhadap pendaftar atau anggota baru di inspektorat ni dari senior-senior yang disini tugasnya terhadap yang itu tadi bagaimana bu, bagaimana membina yang baru tadi bu disini? Apa cuma membina aja atau yang lain?
- Pj : Ya kewajiban membina ya yang lama kepada yang baru kan gitu.
- H : Ya kan dikumpulkan disini, yang senior ngajari yang junior
- Rz : Hmm, berarti rekrutmen...
- Pj : Dan yang baru itu ada diklatnya, setelah masuk sini ada diklat khusus pengawasan, kita diklat kan, khusus pengawasan dari dasar
- Rz : Hmm berarti untuk poses rekrutmen, yang apa.. wewenang nya banyak dari pusat?
- Pj : Dari pusat, he eh, cuman kita kan anu melatar belakang keilmuannya aja ya, kita butuh akuntansi, kita butuh teknik
- Rz : Memberitahu itu aja bu ya?
- Pj : Iya
- Rz : Oh. Tentang mau memberi tahu misalkan yang cocok yang orangnya yang kek gini,gini,gini itu
- Pj : Gak bisa
- Rz : Gak bisa ya bu ya?
- Pj : Orang yang pintar ngomong gitu? Gak bisa
- Rz : Oh.. iya iya. Biasanya kan setau kita kan kita yang selama ini disini lebih tau kondisi disini
- Pj : Gak bisa gitu, aturannya aturan pusat itu
- Rz : Termasuk ini nya, kek pemberian hadiah dan sanksinya, prestasi?
- Pj : Kalau sanksi, kalau sanksi pakai PP disiplin itu, tapi kalau reward internal
- H : Inspektorat ,Kasih hp gitu,
- Rz : Hehe, iya udah bu
- H : Kan sudah reward itu namanya
- Pj : Kalau kita itu setiap tahun ada pemilihan pegawai terbaik itu, ada pemilihan, yang menilai teman-temannya sendiri. Jadi menilai diri temannya sendiri dan semuanya menilai
- Rz : Hmm gitu. Dampaknya bu setelah adanya sanksi mungkin atau hadiah-hadiah itu bagaimana bu terhadap kinerja seseorang tadi? Apakah semakin lebh baiknya jadi jauh meningkat atau..?
- Pj : Kalau sanksi-sanksi otomatis yang bersangkutan dia akan lebih hati-hati lagi, buat janji lagi. Karna kalau udah nerima sanksi ini, jika dia besok terkena sanksi lagi kan sanksi yang lebih berat, dia akan lebih hati-hati. Dan yang lainnya saya kira juga bagaimana caranya supaya tidak terlibat kena sanksi, dan kita selaku atasan masing-masing juga mengingatkan jangan sampai teman-teman itu juga kena sanksi, mengingatkan kan gitu. Kalau gak mau diingatkan ya sudah. Kalau penghargaan kalau dalam bentuk materi memang kita wajar anu tidak tidak-tidak apa ya jarang lah ya. Tapi penghargaan dalam ya kalau orang kita ya mengucapkan terimakasih kita sampaikan kalau ini dulu hasilnya, kita sampaikan ke teman-teman itu kan penghargaan juga. Dan kalau yang tadi itu penilaian yang semuanya itu memang kita kasih hadiah batik sesuai yang disampaikan Mba Heri
- Rz : Hmm, iya-iyaa. Lanjut ini bu tentang yang SDM khusus *antifraud* nya, apa ada?
- Pj : SDM khusus yang *antifraud* sementara belum ada. Tapi besok cikal bakal nya harusnya dari bidang investigasi. Kalau sementara ini memang belum ada
- Rz : Karna baru banget maret.., berarti waktu saya disini Januari kemarin itu belum ada

- ya?
- Pj : Belum ada
- Rz : Oh iya iya
- Pj : Itu juga sedang dalam pelatihan. Kemarin kita udah ngirim pelatihan penghitungan kerugian kan gitu. Besok ngirim audit investigasi, besok ngirim apalagi
- Rz : Hmm untuk saat ini mungkin itu saja bu yang ingin saya ambil datanya bu. Dan itu mungkin *nanti* misalkan saya ada mungkin arahan dari dosen pembimbing saya untuk cari data lagi,
- Pj : Oke
- Rz : saya masih bisa nggih menghubungi Ibu Etik dan lainnya? Dan misalkan saran dari dosen saya *nanti* cari narasumber lain mungkin saya juga bisa minta pandangan dari ibu kepada siapa cocok nya berwawancara
- Pj : Yang terkait dengan *fraud-fraud* ini ya
- Rz : Terkait dengan SDM tim *antifraud* terutama bu
- Pj : SDM *antifraud*, ke penyuluh *anti* korupsi?. Sementara sekarang ini Mba Titi sama Mba Ika ya. Ada. Coba envelope saya itu yang meng administrasi kan terkait dengan kemari napa ee korupsi-korupsi gitu loh e sama mungkin *nanti* penyuluhan *anti* korupsi mungkin samain bu irbad investigasi. Meskipun baru gak apa apa. Sudah..
- Rz : Dan karna mungkin baru bulan maret terbentuk
- Pj : Sudah kewenangannya.
- Rz : Mungkin yang bisa dibicarakan tentang perencanaan ke depannya
- Pj : Oke iya
- Rz : Iya insyaallah
- Pj : Gitu iya. Iya kalau masih dibutuhkan ya
- Rz : Siap. Mungkin itu saja bu yang bisa saya tanyakan untuk hari ini. Insyaallah *nanti* saya setelah bimbingan sama dosen lagi dapat arahan saya insyaallah bakal menghubungi lagi
- Pj : Iya
- Rz : Gak apa-apa toh bu saya nggak ganggu
- Pj : Enggak
- Rz : Saya terimakasih banyak atas waktu yang telah diberikan dan izin untuk meneliti di sini bu
- Pj : Semoga Lancar
- Rz : Iya Bu.

Lampiran 3 Wawancara Ibu Puji (19 Mei 2023)

Narasumber : Ibu Ir. Sri Puji Lestari

Usia : 55-59 Tahun

Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sleman

Lama Bekerja : 31 Tahun

Waktu : Jumat, 19 Mei 2023, 09.30 WIB

Lokasi : Lobby Inspektorat Kabupaten Sleman

Durasi : 50 menit 26 detik

Reza (Rz) : Bismillah, alhamdulillah kemarin sudah banyak terjawab dari rumusan masalah satu dan duanya bu yang tentang mekanisme dan tentang pengembangan kompetensi SDM tapi itu khusus yang *antifraud*, cuma saya belum tau apa tanggapan dari dosen pembimbing saya, karena ibu sendiri pada wawancara sebelumnya bilang belum ada secara khusus tim *antifraud* disini, yang ada baru terbentuk bidang investigasi dan reformasi birokrasi ya bu ya

Bu Puji (Pj) : He eh.

Rz : Kalau yang sekarang ini masih akan menjawab rumusan masalah yang umum bu tentang apa aja bu permasalahan atau kekurangan dan kendala dalam mengelola SDM di inspektorat, dan bagaimana strategi inspektorat dalam menanggapi masalah-masalah tersebut?

Pj : Terkait dengan *Fraud*?

Rz : Terkait dengan SDM bu, kekurangan dan kendala dalam mengelola.

Pj : SDM maksudnya SDM di Inspektorat dalam rangka kegiatan inspektorat atau kegiatan inspektorat dalam kaitannya sama pencegahan *fraud*?

Rz : Lebih ke pencegahan *fraud* bu.

Pj : Oke, njih, kalau terkait dengan untuk pencegahan *fraud* sebetulnya kita itu sudah ada (apa namanya) mengirimkan SDM ya, mengirimkan SDM untuk mengikuti pelatihan atau diklat terkait dengan penyuluh *anti* korupsi. Nggih, sebelum jadi penyuluh ada pelatihan dulu ya, itu kita sudah mengirimkan ada kalau nggak salah ada 9 orang atau 7 orang untuk mengikuti diklat tersebut, setelah lulus diklat tersebut, kemudian yang bersangkutan harapannya mengikuti sertifikasi penyuluh *anti* korupsi, tetapi dari tujuh orang itu baru satu yang mengikuti penyuluhan *anti* korupsi, tadinya dua yang mengikuti tapi yang lulus baru satu, jadi kita baru mempunyai penyuluh *anti* korupsi yang telah bersertifikat oleh KPK itu satu orang, tetapi meskipun demikian, ketujuh orang yang pernah kita diklat kan pencegah *anti* korupsi ini juga bisa dimanfaatkan dalam rangka sosialisasi ke OPD-OPD. Kemudian kalau dibidang investigasi itu kan kegiatannya tidak hanya investigasi saja tapi juga reformasi birokrasi, itu memang personil nya baru delapan orang. Meskipun demikian bisa dibantu dengan bidang yang lain karena ketujuh orang itu tidak seluruhnya itu menyebar di bidang lain yang sudah mendapatkan pelatihan terkait dengan pencegahan korupsi. Kemudian untuk ke depannya terkait dengan (apa namanya) pendidikan *anti* korupsi ini tidak hanya di inspektorat, kami juga mengeluarkan mulai tahun kemarin mengeluarkan surat kami tujukan kepada seluruh OPD untuk mengirimkan personil nya guna mengikuti pelatihan atau melalui e-learning nya KPK, tapi memang belum efektif hanya beberapa OPD yang mengirimkan personil nya untuk mengikuti pelatihan tersebut. Nah ini, metode seperti ini besok tahun ini juga akan kita kirimkan lagi kepada seluruh OPD untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut melalui e-learning dari KPK gitu termasuk juga inspektorat. Rencananya seluruh auditor disini harus mengikuti e-learning tersebut dengan materi berbeda-beda disesuaikan dengan keinginan mereka gitu. Untuk peningkatan SDM nya begitu, kalau jumlahnya tidak bisa. Jumlahnya ya memang seperti ini, gak bisa menambah dengan seenaknya, gak bisa, hanya peningkatan kualitas

Rz : Kalau terkait kendala dan kekurangannya, termasuk yang ibu sampaikan tadi 'masih kurang efektif' itu apa penyebabnya bu? Dan bagaimana cara menghindarinya biar

- bisa efektif?
- Pj : Iya, kan itu pendaftaran e-learning KPK kan melalui inspektorat ya, jadi dari OPD mengirimkan nama ke kita, kita daftarkan ke KPK, kemudian dari KPK *nanti* mendapatkan notifikasi untuk pelatihan ini maka pelatihan ini *nanti* akan dibuka tanggal berapa tanggal berapa. Nah pada saat tanggalnya tersebut kita sampaikan kepada yang bersangkutan, mungkin yang bersangkutan lupa ya, nah kita juga tidak mengecek yang bersangkutan tanggal segini harusnya mengikuti e-learning gitu lo, nah itu satu menjadi catatan juga, terus yang kedua kita belum memberi peringatan pada OPD-OPD yang belum mengirimkan personil nya gitu, itu tidak efektifnya. Jadi sekedar (apa) karena tidak wajib kan gitu maka tidak mengirimkan gak apa-apa kan gitu, tapi kalau besok ya kita monitoring siapa opd yang belum mengirimkan, nah itu kita minta untuk segera mengirimkan personil.
- Rz : Dan terkait program e-learning tadi bu, tadi e-learning apa bu? Mohon maaf bu..
- Pj : e-learning nya macem-macam tapi melalui link nya KPK, kalau materinya *nanti* kita pilih macam-macam terkait dengan pengendalian korupsi, pencegahan dan segala macam
- Rz : Terus tadi ada yang mengirim, mengirim anggota ke diklat tadi ya bu?
- Pj : Mengirim ke diklat juga ada
- Rz : Oh iya, itu bu apa ada aspek atau area tertentu dalam pengembangan kompetensi auditor yang itu lebih sulit dibandingkan yang lain? Mana yang lebih sulit antara e-learning sama yang ngirim ke diklat tadi?
- Pj : Sebetulnya kalau fokusnya sih fokus mengikuti diklat ya, tapi kalau untuk mengikuti diklat hanya sedikit sekali kesempatan yang diberikan oleh KPK. KPK itu kebanyakan e-learning melalui online jarang sekali yang melalui diklat. Diklat itu tahun kemarin itu hanya ada satu kesempatan, jadi memang dibuka melalui online. Itu iya
- Rz : Mengapa bu yang dipilih yang e-learning? Yang KPK mengapa lebih memilih e-learning?
- Pj : Yang KPK?
- Rz : Iya bu, kenapa itu?
- Pj : Mungkin ya, kalau ini cuman kalau KPK ya, saya sendiri gak ngerti kenapa kok tatap mukanya sedikit ya. KPK itu tatap mukanya sangat sedikit sekali. Jadi syarat untuk mengikuti diklat nya KPK itu ada satu e-learning dengan materi khusus yang itu harus lulus, setelah lulus baru bisa mengikuti diklat nya KPK. Setelah diklat nya KPK ini lulus baru bisa *nanti* mengikuti sertifikasi *anti* korupsi, jadi ada beberapa tingkatan. Tapi ada e-learning khusus yang bisa mengikuti diklat tersebut kan gitu, ada. Kan e-learning nya KPK itu macem-macam macamnya. Macam-macam tapi ada satu materi khusus yang bisa untuk dasar untuk mengikuti diklat nya KPK
- Rz : Hmm, kalau dari fokusnya sendiri bu, di E-learning itu paling menonjol itu apa bu?
- Pj : Teman-teman kalau kemarin karena e-learning nya ini kan kemarin baru sekali teman-teman mengikuti jadi kami harapkan mengambilnya adalah dasar-dasar dari pengendalian korupsi iya, setelah dasar-dasar *nanti* ada lagi macam-macamnya. Banyak sekali disitu materi yang *nanti* kalau untuk teman-teman auditor disini memang kita pilihkan-kita yang memilihkan materi, jadi yang kalau yang dasarnya kemarin sudah mengikuti maka untuk tahun kita akan beri untuk materi yang lainnya gitu. Jadi kita punya daftar gitu jangan sampai satu orang *nanti* mengikuti e-learning dengan materi yang sama
- Rz : Kalau dari sisi kekurangannya yang e-learning tadi bagaimana bu? Ada

- kekurangannya?
- Pj : Kalau kekurangannya
- Rz : Yang berdampak sama kinerja atau tidak bu?
- Pj : Kalau saya (kalau apa namanya) sementara ini kami baru fokus ya personil yang mengikuti. Karna personil yang mengikuti belum seperti yang kita harapkan kan gitu. Masih sedikit kan gitu. Kalau dampaknya setelah dia mengikuti kemudian dia bagaimana nah itu belum. Belum kami evaluasi. Hanya saja teman-teman yang sudah mengikuti itu pada saat kita memang ada undangan untuk melakukan pembinaan kepada OPD, mereka itu termasuk daftar yang perlu kita kirimkan untuk memberikan pembinaan.
- Rz : Kalau *nanti* sekiranya akan dilakukan evaluasi. Seperti apa evaluasi yang akan ibu lakukan?
- Pj : Evaluasi nya kalau yang sudah mengikuti pelatihan ya, kan kita juga punya kegiatan ya untuk melakukan pembinaan pencegahan *anti* korupsi, baik itu melalui... ini sudah kita rencanakan audiencenya ya, audiencenya itu ada kepala desa, ada seperti kita PNS, ada juga *nanti* di sekolah, ada juga kepada pengusaha, kepada juga DPR
- Rz : DPR?
- Pj : DPRD, itu juga sudah masuk rencana kita. Kemudian *nanti* pada saat melakukan sosialisasi tersebut, itu bisa memanfaatkan teman-teman me riko kalau yang DPRD karena *nanti* teman-teman yang sudah bersertifikat itu, kemudian *nanti* ditambah kita kerja sama dengan kejaksaan. Kemudian kalau ke desa, *nanti* kita kan kita juga ada tim ya, tim terkait SABER PUNGLI antar kejaksaan dan kepolisian ini *nanti* kita ajak juga. *Nanti* kalau ke desa kita ajak juga kejaksaan. Kemudian *nanti* ke pengusaha mungkin *nanti* kita sendiri tidak mengajak kejaksaan gitu. Kemudian sekolah-sekolah *nanti* full dari teman-teman semua yang mengisi materi. Jadi memanfaatkan mereka kan gitu, tidak hanya satu orang penyuluh *anti* korupsi, tapi teman-teman yang sudah mendapatkan materi tersebutlah
- Rz : Mereka diminta bu?
- Pj : Iya, ditugaskan untuk memberikan
- Rz : Model nya mereka memberikan materi *nanti* bagaimana bu?
- Pj : Pakai ini (apa) pertemuan, dan sekarang sudah beberapa unit kerja sih yang menyurati kita untuk memberikan materi. Jadi tidak kita yang berinisiatif tapi mereka juga sudah mengundang, dari dinas kesehatan kemarin, seluruh puskesmas dikumpulkan, mereka meminta kita, kemudian dari dinas badan kepegawaian juga meminta kita, dari sekolah dinas pendidikan kemarin ada di SMP negeri Sleman itu juga meminta kita
- Rz : Oh iya bu, baik. kalau terkait ini bu pengembangan kompetensi nya dan acara-acara yang kayak diklat tadi dan e-learning itu, apa ada perbedaan persepsi atau pandangan antara pihak manajemen sama auditor nya bu? Terkait pengembangan kompetensi itu.
- Pj : Sebenarnya enggak sih ya, kalau untuk manajemen kan bagaimana caranya kita meningkatkan mereka-mereka semua itu paham sehingga membantu lembaga juga pada saat kita memang mempunyai program, kita juga diminta untuk membantu OPD, itu dari pihak manajemen, disamping itu juga itu merupakan juga karena itu keahlian bagi mereka karena mereka itu fungsional, mereka juga perlu angka kredit ya itu juga semakin banyak kegiatan juga mereka kan angka kredit nya semakin banyak. Angka kredit untuk pengembangan profesi mereka, untuk *nanti* akhirnya untuk menaikkan angka fungsi dalam kerja. Sebenarnya gak ada perbedaan sih.

- Rz : Kalau dari pemerintah sendiri bu, kan inspektorat kabupaten bertanggung jawab ke bupati bu ya melalui sekretaris daerah. Itu bagaiman ibu melihat peran pemerintah dan pihak yang terkait untuk membantu mengatasi kekurangan sama kendala dalam pengembangan kompetensi auditor di inspektorat?
- Pj : Sebetulnya kalau Pemda kita itu selama ini kalau untuk pengembangan kompetensi kan terkait dengan kesempatan, kalau kesempatan banyak, kesempatan banyak, kita pengembangan kompetensi bisa melalui diklat-diklat yang dilaksanakan oleh BPKP atau BPK, BPKP dan BPK ada dua ya, ada dua instansi itu sama-sama pembina nya auditor juga. Untuk mengirimkan tersebut, sementara ini juga sudah kita (apa namanya) kita rencanakan daftar-daftar materi yang lembaga butuhkan, bukan person-person, tapi lembaga, lembaga itu butuh materi apa sih untuk meningkatkan kinerja lembaga. Nah ini kemudian kita pilihkan person-person yang memang secara keilmuan atau secara keahliannya itu masuk ke materi tersebut, nah itu kita usulkan, surat sudah kita layang kan baik itu kepada BPK untuk materi A,B,C,D kepada BPKP terkait materi A,B,C,D. kemudian terkait dengan anggarannya sebenarnya sudah terpenuhi sih Pemda. Kemudian itu terkait itu, kemudian yang lainnya untuk peningkatan kompetensi lainnya kita sendiri yang mengadakan pelatihan dengan mengundang narasumber dari luar iya.
- Rz : Itu bisa dari luar pemerintah bu?
- Pj : Iya bisa, bisa dari luar, maksudnya luar Pemda? Swasta?
- Rz : Di luar PNS, maksudnya ngundang pemateri nya itu di luar pengurus pemerintahan
- Pj : Bisa, kita pernah ngundang dari UII, pernah ngundang dari UGM juga. Kan yang bisa memberikan materi kan ya narasumber atau pakar gitu iya
- Rz : Misalkan nanti ibu setelah evaluasi program-program pengembangan kompetensi yang tadi seperti mengirim anggota ke diklat dan itu syaratnya harus bisa mengikuti ada syarat di yang e-learning tadi bu ya baru bisa mengirim ke diklat ya?
- Pj : Kalau sekarang semua pelatihan pakai e-learning, habis e-learning baru bisa mengikuti diklat nya yang offline ya, sekarang gak ada yang gak pakai e-learning, semuanya pakai. Jadi persyaratan offline itu harus ada e-learning dulu
- Rz : Dan yang e-learning tadi setelah ibu melihat ada kekurangan-kekurangan dan kendala lainnya, apakah mungkin ada opsi lainnya bu cara mengembangkan kompetensi auditor ini bu?
- Pj : Sebetulnya kalau auditor nya kreatif sih banyak ya, tergantung kreatifitas mereka juga ya, tapi ya lembaga memang sih memang harus mendorong kreatif kan gitu, nah itu. Sebetulnya banyak, kan kesempatan kalau sekarang (apa) melalui (apa namanya) web ya itu banyak sekali terkait dengan peningkatan kompetensi ya. Sebetulnya banyak, dan kalau mereka mengikuti itu juga sebetulnya keuntungan juga bagi mereka. Kalau dari lembaga kan kita minta ilmunya mereka, kalau mereka selain mereka dapat ilmu itu juga dapat kredit, kan sebetulnya gitu, ya berarti gitu ada dua sisi yang mungkin ; 1) memang kepentingan lembaga, yang kedua menggugah mereka itu untuk meningkatkan kompetensi, kadang-kadang harus setengah memaksa kalau untuk sementara ini. Jadi tidak semua orang itu mau, mau kan gitu
- Rz : Kreatif?
- Pj : Iya, jadi setengah dipaksa gitu.
- Rz : Dan mereka itu kayak ibu sampaikan di wawancara sebelumnya itu dari seleksi CPNS ya bu untuk diterima disini . yang SDM SDM yang ada yang sudah masuk ke inspektorat ini dari seleksi CPNS itu bu ya yang masuk sini?

- Pj : Iya, kalau yang untuk di belakang ini harus PNS semua, tidak bisa yang PHL gitu enggak bisa. Iya, karena untuk melakukan kegiatan pengawasan harus mereka memiliki sertifikat, sertifikasi khusus pengawasan ya dan itu syaratnya harus PNS iya. Jadi kalau PHL itu gak bisa, jadi ada teman-teman phl tidak di belakang tapi di kita.
- Rz : Itu bagaimana bu untuk cara dapat sertifikasi nya?
- Pj : Sertifikasi nya kalau sertifikasi harus mengikuti diklat pembentukan, kalau auditor pembentukan auditor, kalau OPD pembentukan OPD. Itu syarat mendasar. Supaya mengikuti diklat tersebut ya harus bekerja di inspektorat, berarti harus mengikuti itu, lulus, baru *nanti* bisa mendapatkan sertifikat baru *nanti* diangkat menjadi auditor, setelah diangkat menjadi auditor ya *nanti* ada bukti-bukti pekerjaan, dan bukti-bukti pekerjaan itu salah satu syaratnya adalah pengembangan profesi. Pengembangan profesionalitas itu seperti diklat diklat segala macam itu kan masuk pengembangan profesionalitas dan itu mereka itu harus. Makanya kalau yang kreatif dia mengikuti seminar, diklat-diklat online itu, pelatihan-pelatihan online itu cepat dia mendapatkan kredit pengembangan profesional
- Rz : Ooh, berarti selain dari program yang dibuat oleh inspektorat sendiri mereka juga di suruh untuk kreatif sendiri juga bu?
- Pj : Iya, saya kalau ada informasi dari BPKP ‘ada ini, ada ini’ saya sebar. Silahkan mengikuti ini, *nanti* kan buktinya, buktinya *nanti* kan ada sertifikatnya dia, kemudian dia membuat notulen, notulen pelaksanaan yaitu apa materinya. Baru kami buat surat tugas.
- Rz : Oh itu sebagai bukti tadi bu?
- Pj : Iya, sebagai bukti *nanti* untuk pengisian angka kredit gitu
- Rz : Termasuk misalkan ikut program yang ada di luar negeri?
- Pj : Luar negeri, kayaknya teman-teman belum pernah ada ya.
- Rz : Lebih banyak ikut yang webinar-webinar sekarang ya bu?
- Pj : Iya, setiap ada yang berkaitan dengan pengawasan pasti saya informasikan, tapi ya itu,
- Rz : Poin nya tadi kredit ya bu ya?
- Pj : Tapi ya itu, belum semuanya itu tergugah untuk mengikuti gitu loh mas
- Rz : Penyebabnya kalau boleh tau apa bu? Kenapa belum semua? apakah yang mengikuti juga belum mengajak atau bagaimana?
- Pj : Penyebabnya apa ya, kalau bilang apa ya, bahasa kasarnya apa ya malas atau apa ya, jadi belum tergugah untuk apa ya meningkatkan dengan kemauan sendiri gitu loh. Jadi kadang-kadang harus kita paksa. Emang pertama ya memang harus dipaksa mengikuti ini, mengikuti ini, yang kedua mungkin kalau udah, tadi ada beberapa sih, dia tidak usah disuruh, dia mengikuti, ada, “bu saya sudah mengikuti ini, ini, ini, ini, terkait dengan pengawasan, ini buktinya” nah baru saya berikan surat keterangan kalau dia sudah mengikuti gitu. Nah itu sebagai dasar untuk mendapatkan angka kredit, ada juga yang seperti itu, luar biasa, iya tapi orang seperti itu satu diantara 10 ternyata
- Rz : Satu diantara 10? Jauh kali bu
- Pj : Iya
- Rz : Itu bagaimana bu pengaruhnya bu sama kinerja? Kan berarti berbeda kinerjanya
- Pj : Beda banget,
- Rz : Bagaimana bu pengaruhnya terhadap kinerja yang itu kerja sama?
- Pj : Kalau teman-teman yang sudah punya kemauan ya untuk selalu meningkatkan



kapabilitasnya di kinerja juga dia tinggi, dari target waktu dia bisa menyelesaikan sebelum target yang ditentukan, terus dalam segi kualitas juga dia kualitasnya lebih baik daripada yang lain, kelihatan sekali daripada orang yang harus dipaksa untuk meningkatkan kompetensi, beda, beda, beda

- Rz : Kalau dari sisi dia mengaudit?
- Pj : Disisi mengaudit, sedikit banyak sih sama aja berpengaruh, kan kalau mengaudit itu kan memang ada aturannya ya tapi kan juga perlu improf ya, perlu improf bagaimana mencari jalan yang sedikit metode tapi langsung kena kan gitu. Iya itu, untuk mengimprof itu kan juga perlu (apa ya) pemikiran, pengalaman, pengalaman sih iya sih gitu, tapi ada juga yang kalau cuman apa adanya saya dikasih langkah kerja seperti ini hanya langkah kerja ini aja, tidak perlu memperdalam segala macam dengan improfnya dia
- Rz : Kemudian kalau dari sisi program-program yang diharapkan dari manajemen ke auditor dan auditor ke manajemen itu bagaimana bu? Mungkin bisa dari harapan manajemen ke auditor dulu bu?
- Pj : Ya kalau harapan dari manajemen satu, program kerja yang sudah kita buat bisa dilaksanakan oleh mereka tepat waktu, kadang kualitasnya pun harusnya ya bagus kan gitu, itu harapannya. Kemudian, tapi kan gak semuanya (apa) yang diharapkan oleh manajemen terwujud. Bagaimana cara mewujudkannya pasti ada kendala-kendala gitu ya. Kita juga selalu mengingatkan secara bertahap, berjenjang. Kalau kami mengingatkan kepada irbadnya, para irbadnya harusnya juga mengingatkan lagi ke bawah ke timnya. Di tim itu juga kan ada strukturnya, ada pengendali teknis, ada ketua tim, ada anggota tim nah itu juga yang harus diingatkan kan gitu, supaya program yang sudah kita tetapkan ya tercapai gitu. Saya itu mengingatkan setiap waktu sih, setiap bulan pasti saya floorkan di WA grup kita ya mana mana saja pekerjaan yang belum selesai, saya sebutkan namanya pengendali teknisnya siapa, ketuanya siapa, irbadnya siapa, pekerjaannya apa target waktunya harusnya apa, itu setiap bulan pasti saya sampaikan, itu juga sebagai evaluasi juga
- Rz : Bagaimana responnya terkait yang tadi?
- Pj : Responnya kalau diingatkan gitu ya langsung gageh, gageh itu ngerjakan lah, tapi ada juga yang beralasan yang ini belum selesai lah, yang ini susah lah kan gitu, ada juga yang seperti itu.
- Rz : Hmm, kalau misalkan, saya juga baru kenal bu kayak di organisasi itu ada saling membackup gitu, bagaimana mekanismenya bu kalau di inspektorat misalkan untuk tanggung jawab ini harusnya yang ini tapi kemudian beliau berhalangan, mekanismenya harus dikerjakan sama yang lain itu bagaimana bu?
- Pj : Iya kalau di inspektorat kan kebanyakan pekerjaan harus dikerjakan dengan tim, ada tim. Ya diantara tim itu yang harusnya saling koordinasi bagaimana caranya supaya selesai kan gitu. Anggota, harusnya ketua meng backup anggota-anggota yang anu, terus nya si pengendali teknis harusnya juga harus mengawasi sebetulnya, mengawasi timnya itu ke bawah, iya pengendali teknis itu diatas ketua tim. Kan harusnya yang perlu dipantau dari anggota dulu, apakah langkah kerja yang udah ditetapkan itu sudah dilaksanakan belum oleh anggota? Kan gitu. kalau ada anggota yang lemah ketua timnya harus membackup kalau cara kerjanya kan seperti itu, harusnya seperti itu.
- Rz : Oh iya, yang harapannya auditor ke manajemen bagaimana bu?
- Pj : Harapannya?
- Rz : Iya, yang pernah mungkin auditor nya sampaikan atau ibu ketahui?

- Pj : Kalau harapannya sih mereka (apa ya) tugas itu tidak terlalu banyak diberikan surat tugas, kedua, (apa ya) tidak bertumpuk-tumpuk kan gitu, kemudian juga ada (Bell istirahat menyanyikan lagu Indonesia Raya pada pukul 10.00 AM)
- Rz : Tadi sampai yang bahas harapan auditor ke manajemen
- Pj : Satu, penugasan kalau bisa sedikit mungkin maksudnya tidak tumpang tindih ya, kedua juga penghargaan dari Pemda itu ke teman-teman auditor tunjangan nya juga kalau bisa meningkat kan seperti itu, itu harapannya itu. Kalau di kita kan memang ada, kalau di pusat itu kan ada tunjangan kinerja, kalau di kita kan gak ada, adanya tambahan penghasilan. Kan sekarang sudah tidak ada honor lagi. Tunjangan itu sudah tidak ada honor lagi.
- Rz : Tidak ada apa bu?
- Pj : Honor, upah kan dilarang, yang ada tunjangan itu, tunjangan tambahan penghasilan kalau di kita baru itu, belum ada tunjangan kinerja. Kalau bisa itu meningkat kan gitu. Harapannya itu
- Rz : Hmm iya, upaya apa bu yang dilakukan untuk memenuhi harapan dari manajemen ke auditor atau auditor ke manajemen tadi bu?
- Pj : Pertama kalau untuk penugasan, pada saat kita menyusun program kerja, seluruh bidang kan kita libatkan yang menentukan programnya mereka, hanya kita melakukan (apa) garis besarnya aja, kalau pemeriksaan fokusnya harus ini, yang wajib dilaksanakan kegiatan ini, ini, ini, ini. Kan ada kegiatan-kegiatan mandatory itu wajib dari pusat
- Rz : Mandatory?
- Pj : Mandatory dari pusat itu wajib. Kemudian pemilihan unit kerjanya silakan pilih, kan gitu yang menentukan. Terus sekop pemeriksaan, sasaran, ruang lingkup mereka yang menentukan supaya bisa ngukur, kan ruang lingkup yang ditetapkan itu kan juga untuk membatasi itu. Terus yang kedua itu terkait dengan kerja ya jadi mereka kita libatkan dia yang menentukan, tujuannya melakukan pengawasan juga, pemeriksaan saya suruh buat sendiri tujuannya apa. Supaya dia bisa timnya maksudnya dibidang. Kalau dulu kan kita yang menentukan, sasarannya, obrihnya kan kita dari sekretariat menentukan dari seksi perencanaan. Kalau sekarang kita melibatkan mereka gitu. Jadi sekop nya kalau terlalu besar ya apa sekop nya gitu
- Rz : Mereka yang menentukan jadinya?
- Pj : Iya, mereka yang tentukan, tujuannya mau diperiksa sampai sejauh mana mereka yang tentukan. Itu iya. Terus kemudian kapan pekerjaan itu dilaksanakan waktunya juga mereka yang saya minta menjadwalkan, jadi bukan saya lagi, kalau dulu kan saya. Sekarang enggak sudah saya rubah. Jadi kalau ini mau kapan, mau kapan *nanti* pada saat bulan ini, tanggal ini maka saya mengeluarkan surat tugas sesuai dengan masukannya mereka. Jadi tidak ada lagi pertanyaan 'ngopo toh mba puji mengeluarkan pemeriksaan ini untuk apa?', justru saya yang bertanya gitu.
- Rz : Oh iya iya
- Pj : Yang sudah saya rubah seperti itu,.
- Rz : Itu istilahnya apa bu kalau di inspektorat sendiri?
- Pj : Apanya
- Rz : Istilahnya apa tadi bu? Pertama metode nya itu yang nentuin, sekarang dari mereka. Itu apa istilahnya kalau di inspektorat?
- Pj : Metode nya apa ya, istilahnya apa ya, penyusunan kinerja dengan melibatkan bidang ya, memang kalau sesuai dengan butir-butir pelaksanaan auditor, auditor yang tingkatnya tinggi itu mereka harus sudah merencanakan kegiatan. Pengendali teknis

harus dia sudah mampu membuat perencanaan sebetulnya itu. Nah itu memang saya kembalikan, memang itu tugas mu kan gitu.

Rz : Oh begitu bu

Pj : Iya

Rz : Kemudian setelah itu *nanti*, bagaimana evaluasinya bu dan biasanya kekurangan apa aja yang ditemukan setelah evaluasi tadi? Kan itu tadi mereka sendiri yang tentukan, mekanisme evaluasi seperti apa yang dibuat *nanti*?

Pj : Kalau evaluasinya kalau dari saya, ya itu setiap bulan ya, saya selalu mengevaluasi kerja mana yang sudah di keluarkan surat tugasnya belum selesai pada batas waktunya. Ya mereka setelah itu mengevaluasi kenapa belum selesai itu urusan di masing-masing bidang, masing-masing bidang juga melakukan koordinasi sendiri, kemudian pak inspektur juga pada kegiatan-kegiatan yang hampir sama misalnya pemeriksaan di desa itu melibatkan banyak tim itu mereka harus mengevaluasi bareng kan gitu, karena dimungkinkan di desa ini, desa ini, desa ini, mungkin permasalahannya sama. Ya jadi untuk kegiatan-kegiatan yang sama tetap seluruh tim itu untuk berkumpul koordinasi merembuk permasalahan apa sih yang ada di fokusnya itu, karena dimungkinkan permasalahan disini jalan keluarnya disini mungkin sama yang dengan disini, dengan di desa ini, meskipun yang melakukan pemeriksaan berbeda, ini bisa saling apa tukar informasi untuk pemecahannya. Iya soalnya ada beberapa kegiatan yang memang kayak tematik gitu loh. “pemeriksaan keuangan di Desa” kita melakukan pemeriksaan di 18 desa gitu.

Rz : Oh iya, kemudian bagaimana pihak dari manajemen inspektorat ini bu, tadi setelah mereka yang menyusun tugas teknis mereka sendiri. Bagaimana manajemen memastikan kesesuaian antara kompetensi mereka dengan tugas tadi?

Pj : Oh ini, jadi untuk menyusun itu sebelum kami sampaikan ke mereka kita sudah tetapkan rambu-rambunya, misalnya dibidang A, bidang A harus melakukan pemeriksaan di desa sebanyak ini, kemudian harus melakukan review atas A,B,C,D,E sesuai dengan tupoksi bidangnya, sudah saya kasih rambu-rambu. Bidang B, pekerjaanmu adalah kan kita punya tugas mandatory dari pusat banyak sekali

Rz : Oh iya bu

Pj : Iya itu saya yang membagi mandatory ABCD dibidang ini yang mandatory EF di bidang ini, dibidang ini saya yang bagi. Saya membaginya sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang, seperti review RKBD, itu *nanti* ada di bidang perekonomian dan pembangunan, karena bidang itu yang membawahi OPD Bappeda, karena RKBD itu yang melaksanakan adalah Bappeda itu. Tapi *nanti* kalau review SHBJ, analisis tanda biaya karena itu yang menangani adalah badan keuangan, maka *nanti* ada dibidang pemerintahan, karena bidang pemerintahan itu yang menangani bidang keuangan, itu saya bagi. *Nanti* mandatory terkait dengan reformasi birokrasi, SPIP segala macam saya kasih dibidang investigasi dan RB. Itu kalau garis besarnya sudah saya bagi, hanya mereka *nanti* merencanakan secara teknisnya lagi. Ini kapan di lakukan, kemudian ruang lingkupnya apa, *nanti* dia mau ngambil berapa sampel itu mereka gitu. (Bahasanya apa sekarang gitu), intinya seperti itu. Jadi membuat perencanaan dengan melibatkan dari atas sampai bawah gitu

Rz : Untuk kesesuaian antara kompetensinya sama kerajaannya itu yang kasih rambu-rambu itu?

Pj : Iya, sesuai dengan tupoksinya tidak melenceng dari tupoksi mereka. Otomatis kan sesuai dengan kemampuannya mereka.

- Rz : Oh iya Bu, mungkin untuk rumusan masalah ketiga itu saja data yang bisa saya ambil,
- Pj : Oh gitu
- Rz : Apakah ada tambahan mungkin bu, kendala dan kekurangan yang mungkin ada lagi yang selama ini terjadi
- Pj : Kendala dan kekurangan
- Rz : Selama pengembangan kompetensi?
- Pj : Pengembangan kompetensi ya
- Rz : He em
- Pj : Kalau di undang-undangnya ASN itu kan memang ada aturan setiap pegawai itu setiap pegawai itu harus mendapatkan pelatihan atau pengembangan kompetensi itu sekurang-kurangnya 20 CPL, harus 20 CPL, kalau untuk kita semuanya pake, ada beberapa sih gak semuanya pegawai kita kirim ke luar tapi ada juga kita mengadakan sendiri untuk seluruhnya termasuk sekretariat, karena untuk memenuhi minimal 20 CPL itu. Terus yang ketiga juga teman-teman pada saat ada sosialisasi dari luar ,OPD itu juga pengembangan kompetensi juga, itu juga sesuai dengan bidangnya masing-masing sih itu. Kemudian ya kita menggalakkan itu webinar yang dari online-online itu
- Rz : Oh iya
- Pj : Iya, itu kan ora ragat, maksudnya tidak mengeluarkan uang
- Rz : Tidak mengeluarkan uang ya
- Pj : Iya tidak mengeluarkan uang, kita juga menganggarkan seminar workshop ada kita kirimkan mereka paling endak setahun dua kali
- Rz : Kemana bu?
- Pj : Terkait materi pengawasan tapi seputar DIY sih
- Rz : Seputar DIY
- Pj : Tidak menginap, biasanya itu universitas yang mengadakan. Workshop, seminar itu kita anggarkan mereka
- Rz : Iya workshop
- Pj : Kalau kendala nya apa ya, kendala nya kadang-kadang kita sudah menganggarkan workshop, seminar, mengirim, ternyata kita tidak bisa mendapatkan informasi itu, maksudnya saya. Jadi informasi ada seminar kita kirimkan pengawasan saya gak diberitahukan
- Rz : Oh gitu
- Pj : Gitu loh, iya itu
- Rz : Iya-iya
- Pj : Padahal juga saya sebarkan ke teman-teman kalau ada informasi seperti ini tolong diberitahu, supaya saya juga bisa mengirim peserta. Kendala nya itu saya kurang dapat informasi yang dari luar.
- Rz : Apa penyebabnya bu? Kok bisa?
- : Penyebabnya apa ya, aku itu jarang buka anu ya, buka informasi di web, tapi sebetulnya kekurangan saya itu sudah saya lemparkan ke teman-teman yang muda-muda. Kalau muda-muda kan kalau ada informasi segera informasikan. Kalau ada seminar, tapi khusus seminar terkait yang berhubungan dengan pengawasan, baru bisa mengirimkan peserta
- Rz : Menarik sih bu kalau saya dengar ternyata dari inspektorat sendiri yang base nya itu di bawah pemerintahan negeri ternyata juga mengizinkan mengikuti seminar yang dari pihak swasta dan yang lain.

- Pj : Oh iya
- Rz : Apakah itu ada pemanfaatan, atau bagaimana bu untuk mencari informasi seperti itu pemanfaatan media sosialnya bagaimana bu
- Pj : Pemanfaatan media sosial
- Rz : Untuk informasi-informasi webinar..
- Pj : Oh iya, kan itu ya, saya itu sadar saya itu udah generasi tua ya untuk media sosial tidak begitu paham ya, tapi teman-teman saya kan juga banyak yang muda-muda, yang sepantaran nya anak-anak itu ya mereka itu yang saya tugaskan itu, jadi kalau ada informasi seperti itu ya informasikan, kan kita punya anggaran kan gitu. Yang sering itu UGM, kemudian UII, belum pernah kek nya kita seminar disana toh, di semarang malah pernah sekali, tapi soalnya kan terbatas terkait dengan pengawasan
- Rz : Iya ya pengawasan, inspektorat tugasnya pengawasan
- Pj : Kalau seminar yang anu gak bisa
- Rz : Iya terbatas pengawasan, anggarannya untuk pengawasan
- Pj : Iya, hanya terkait dengan materi pengawasan
- Rz : Untuk workshop dan seminar juga?
- Pj : Workshop, seminar iya kita selalu menganggarkan dua kali, mengirimkan peserta
- Rz : Hmm iya, apa masih ada bu kira-kira kendala dan kekurangannya?
- Pj : Gak ada kek nya, udah itu kek nya, apalagi ya
- Rz : Mungkin saya boleh gak bu menanya di luar rumusan masalah tadi?
- Pj : Boleh
- Rz : kayak tadi yang nyanyi lagu indonesia ini bu, itu termasuk program apa bu?
- Pj : Oh itu, itu kan anjuran dari pemerintah provinsi, jadi pemerintah provinsi untuk apa meningkatkan cintanya kepada tanah air setiap jam 10, eh bukan setiap jam 10, terserah sih jamnya, jamnya terserah, paling endak setidaknya-tidaknya satu hari itu diperdengarkan lagu tersebut dengan sikap berdiri gitu. Kemudian kalau di Pemda Sleman kita tetapkan jam 10, pokoknya jam 10 itu kita memperdengarkan atau kita ikut menyanyikan lagu indonesia Raya. Sebetulnya tidak hanya di instansi pemerintah, harusnya di seluruh lembaga termasuk sekolah harusnya
- Rz : Oh iya bu
- Pj : Iya, saya itu pernah itu (dimana itu) di bandara itu juga jam 10 lewat sih diperdengarkan itu, alhamdulillah itu juga pada berdiri pada saat itu lo
- Rz : Owh, bandara mana bu? Adisucipto?
- Pj : Sini, iya harusnya itu
- Rz : Selain itu bu apa ada lagi program-program unik yang dilakukan oleh inspektorat
- Pj : Kalau yang ini bukan inspektorat, ini semuanya
- Rz : Semua, berarti di luar pemerintah pun harus ya? Kayak kami di swasta
- Pj : Harusnya iya, harusnya iya, tapi keknya yang diswasta tidak terpantau ya
- Rz : Mungkin kurang bu, karna belum pernah bu saya sama sekali.
- Pj : Belum pernah ya?
- Rz : Sama sekali belum pernah
- Pj : Pada saat itu di bandara, pada berdiri semua sih. Tapi kalau di pasar-pasar enggak. Pasar keknya kalau dulu di Bering Harjo iya, karna dekat, itu berdiri. Kan anak-anak kecil sekarang gak bisa nyanyi lagu indonesia raya
- Rz : Iya bu, kurang, mereka udah terkontaminasi tiktok
- Pj : Iya
- Rz : Kemudian bu terkait kan udah jalan, berarti udah dua bulan ya bu sejak terakhir saya wawancara disini yang bidang investigasi dan reformasi birokrasi. Itu saya ingin

- wawancara lanjut kepada siapa bu?
- Pj : Bu Heri, yang kemarin
- Rz : Ke bu heri saja bu ya, itu kalau boleh tau apa sudah ada menyusun program dan udah terlaksana belum bu?
- Pj : Belum
- Rz : Udah ada nyusun program atau udah melaksanakannya?
- Pj : Kalau udah melaksanakan iya, tapi kalau program tertulis begitu belum, meskipun kemarin juga saya minta untuk kita masukkan ke program kerja tapi belum menyusun secara detail begitu. Tapi sudah dijalankan sampai saat ini.
- Rz : Oh baik, begitu bu. Dan untuk yang rincian yang lainnya, kayak yang kemarin yang rumusan masalah pertama kayak mekanisme *antifraud* sama pengembangan kompetensi SDM sama yang ini tadi yang permasalahan ini, kalau untuk detailnya saya bisa wawancara ke siapa bu biar dapat insigt yang lebih luas lagi. Kalau dari UII sendiri bu sebenarnya ada syarat 9 narasumber, tapi kalau dari dosen pembimbing saya itu misalkan 3 orang sudah mencukupi semuanya data yang beliau anggap cukup, maka cukup
- Pj : Sama Mba Ika, mba ika itu adalah adminya UPG (Unit Pengendali Gratifikasi).
- Rz : Oh pengendali gratifikasi, *nanti* saja bu, mungkin kalau untuk hari ini, ini saja bu karna hari jumat
- Pj : Kebetulan dia juga yang menangani kegiatan Saber Pungli, kalau Bu Heri yang menangani kegiatan monitoring pencegahan korupsi, memang sudah saya serahkan ke bu heri. Kalau dulu kan masih disini, masih di kantor, tahun ini sudah di irbad investigasi
- Rz : Bu ika itu?
- Pj : Bu Heri, kalau yang gratifikasi sama saber pungli masih di isi sekretariat *nanti* mba ika
- Rz : Hmm begitu bu
- Pj : Kalau pencegahan korupsinya monitoringnya disini
- Rz : Mungkin itu untuk kemudian hari saya datang lagi bu setelah saya transkrip yang ini
- Pj : Oke
- Rz : Terus kan sebelumnya saya menghubungi bu etik untuk konfirmasi wawancara kesini, selanjutnya kepada siapa bu?
- Pj : Saya gak apa apa deh
- Rz : Walaupun ibu etik selalu bilang saya insyaallah selalu bantu masnya. Ke ibu gak apa apa
- Pj : Gak apa-apa, insyaallah.
- Rz : Saya lupa, sebenarnya saya juga membutuhkan dokumen-dokumen yang mendukung mungkin tentang untuk mungkin laporan-laporan evaluasi pengembangan kompetensi yang dimiliki inspektorat, atau yang lainnya kayak prestasi terkait kompetensi nya SDM, auditor terutama
- Pj : *Nanti* sama mba virgo ya, dulu yang pekerjajanya Mba Etik itu di UPEG
- Rz : Hmm, itu saya bisa dapat filemnya soft file atau hard file?
- Pj : Soft file atau hard file ya? Itu sebenarnya untuk pengembangan kompetensi itu yang tadi saya bilang minimal 20 jam per CPL per tahun itu masing-masing pegawai harus meng upload sertifikatnya di SIMPEGnya masing-masing
- Rz : Simpeg?
- Pj : Simpeg itu, sistem informasi kepegawaian, jadi sudah disimpan disitu, iya, jadi memang wajib. Wajib meng upload bukti kalau kita sudah mendapatkan pelatihan

minimal 20 CPL per tahun. Setelah itu harus masukkan ke situ, jadi dokumen nya dimana kalau gitu, karena itu di upload di masing-masing akunnya mungkin nanti bisa diperlihatkan sama Mba Virgo ya, dia mungkin bisa membuka semua sim nya teman-teman. Kalau saya kan bisa membuka sim nya saya aja, akun nya saya. Ya itu dimasukkan kesitu.

- Rz : Sama dokumen-dokumen yang kayak evaluasi kinerja mungkin yang mendukung  
Pj : Kalau evaluasi pekerjaan sih *nanti* di ibu ika itu, kebetulan dia kan laporannya toh, laporan ikhtisar dia buat, bu ika yang itu, karena dia selain admin saber pungli sama UPG juga kasubag evlap evaluasi pelaporan.  
Rz : Kalau dokumen *nanti* insya Allah pas wawancara saya sudah mencukupi saya ambil itu gak apa-apa sih bu, gak harus sekarang kalau terkait dokumen. Baik mungkin itu saja bu terkait hari ini, saya terima kasih banyak atas waktu yang telah ibu berikan.  
Pj : Sama-sama  
Rz : Kemudian ke depannya masih dapat membantu saya lagi bu untuk mencari datanya, saya terimakasih banyak semoga Allah membalas kebaikan ibu dan teman-teman inspektorat  
Pj : Baik, sama-sama  
Rz : Saya tutup bu ya ini ya  
Pj : Oh nggih  
:

#### Lampiran 4 Wawancara Ibu Heri dan Ibu Pipit (18 Juli 2023)

##### Wawancara 3

- Narasumber 1/Jabatan : Ibu Heri Setyawati, S.E., M.Acc. / Inspektur Pembantu Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi  
Usia : 50-54 Tahun  
Lama bekerja : 27 Tahun  
Narasumber 2/Jabatan : Ibu Pipit Tyas Ratna Puspita, S.H., MPA. / Auditor Muda  
Usia : 35-39 Tahun  
Lama Bekerja : 13 Tahun  
Waktu : Selasa, 18 Juli 2023, 13.00 WIB  
Lokasi : Ruang Investigasi Inspektorat Kabupaten Sleman  
Durasi : 1 Jam 14 menit 16 detik  
Keterangan Transkrip : “Rz” adalah Pewawancara/Peneliti  
“H” adalah Ibu Heri Setyawati, S.E., M.Acc.  
“P” adalah Ibu Pipit Tyas Ratna Puspita, S.H., MPA.

- Rz : Bismillah, Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh, sebelumnya sudah perkenalan dengan Ibu Heri dan Ibu Puji yang merupakan narasumber pertama. Dan ini baru pertama kalinya bertemu dengan Ibu Pipit. Jadi, Alhamdulillah sebelumnya saya sudah berwawancara dengan Ibu Puji dan mendapatkan data yang cukup detail, dan ini merupakan tahapan selanjutnya dari pengumpulan data yaitu perpanjangan pengamatan dan juga uji keabsahaan data, yang mana kalau

perpanjangan pengamatan ini tujuannya menurut Moleong tahun 2017 dia mengatakan agar data tidak berasal dari satu sumber yang mana bisa subjektif dan mendapatkan data dari narasumber lainnya agar lebih bersifat objektif, begitu dan untuk uji keabsahan data, agar data yang didapatkan lebih valid dan lebih teruji, seperti itu.

Mungkin ini saya langsung saja ke rumusan masalah saya yang pertama yaitu tentang mekanisme *antifraud* yang dilakukan di inspektorat kabupaten sleman. Ini untuk mengetahui bagaimana kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam mencegah dan mendeteksi *fraud*. Kemudian mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan dan audit yang dilakukan untuk mengidentifikasi potensi *fraud* dan bagaimana sistem pengaduan dan pelaporan *fraud* diatur dan dioperasikan oleh inspektorat. Yang pertama, bagaimana bu struktur organisasi inspektorat kabupaten sleman terkait dengan pencegahan dan deteksi *fraud*?

H : Ini untuk nomer a, ini kebetulan di awal tahun ya untuk perubunya sih katanya di bulan desember 2022 itu sudah disahkan perub yang terbaru untuk inspektorat kabupaten sleman dan disitu ada irban, bidang baru yaitu bidang investigasi dan reformasi birokrasi, walaupun kalau posisinya itu tetap sama, Cuma *ganti* istilah bidang ya mba ya

P : Nggih

h : Kalau keputusannya sama kek gitu, tapi untuk assestnya baru mulai maret 2023, sehingga masih baru kami untuk bidang investigasi dan reformasi birokrasi, kalau saya dilantiknya akhir januari 2023, Cuma untuk plotting auditornya baru february akhir atau maret ya

P : Maret

H : Awal maret 2023

R : Gitu, apa ini sudah ada struktur yang terbentuk dan berapa orang didalamnya begitu bu? Untuk bidang tadi

H : Sudah, kalau bidang investigasi sendiri termasuk irbannya ada 8 orang

R : Oh begitu, ada 8 orang, ada tambahan dari bu pipit mungkin?

P : Kalau yang kaitannya investigasi kan memang baru mas, jadi saya gak tau apa pertimbangannya penempatannya auditornya masing-masing seperti apa, Cuma kalau kaitannya dengan deteksi *fraud* inikan berarti kemungkinan ada di bidang kami memang. Cuman karna baru mulai tahun ini, jadi mungkin yang kami tangani belum sempurna. Kan waktu juga baru, secara struktur juga masih nyicil ya bu

H : Hm em masih mencari

P : Jadi beberapa beberapa data dan lain-lainnya itu mungkin masih belum mendekati sempurna, tapi baru dimulai. Tapi kalau sebenarnya untuk pelaksanaan pemeriksaan dan lain-lain yang kaitannya dengan investigasi dan lain-lain mungkin sebetulnya sudah melakukan, cuman dikhususkan bidang investigasi kan baru mulai

H : Sebetulnya pernah sih

Rz : Dan kayak ibu bilang sudah pernah ada sebelumnya walaupun belum ada terbentuk kayak struktur organisasi khusus kayak investigasi ini, kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh inspektorat kabupaten sleman ini untuk mencegah dan mendeteksi *fraud* itu apa saja bu?

H : Kalau dulu masih berinduknya pada penanganan kasus

P : Jadi jenis pemeriksaannya mas



- H : SOP
- P : Dulukan kami punya jenis pengawasan dulu itu tiga dari yang sudah dijalankan itu. Pengawasan reguler khusus, dengan tujuan tertentu dan yang ketiga itu kasus. Untuk yang *fraud* dan penyimpangan yang kaitannya dengan laporan atau indisiplin dan lain-lain itu masuknya ke yang kasus, gitu, SOPnya sudah ada ya bu?
- H : Sudah kalau Irbad, modelnya kan dulu masih penanganan kasus
- P : Kalau untuk peraturan yang ini bisa pakai SOPnya itu jadi apa, prosedur kami melakukan pemeriksaan kasus
- Rz : Hmm, iya iya, lalu bagaimana bu proses identifikasi potensi kecurangan yang dilakukan inspektorat ini?
- H : Kalau dulu dan sekarang sebenarnya kan sama ya artinya karna ketugasannya kan hampir sama, Cuma sekarang ada pembidangan yang lebih khusus lagi untuk yang bidang investigasi yang baru itu, tapi untuk yang identifikasi kecurangan potensi kecurangan itu biasanya kami mulai dengan pemeriksaan reguler. Dari pemeriksaan reguler ketika kami kok ada indikasi untuk korupsi lah untuk kami selesaikan di reguler gak cukup waktunya, gak cukup sumber dayanya dan sebagainya kemudian setelah LHP kami yang reguler terbit itu baru kami lanjutkan untuk pemeriksaan yang khusus, dan sekarang masuk ke bidang investigasi. Pemeriksaan investigasi *nantinya*, seperti itu
- Rz : Hmm, ada tambahan bu Pipit mungkin? Terkait proses identifikasi potensi *fraud*
- P : Kalau yang tadi kan kaitannya dengan pemeriksaan yang dikhususkan ketika sudah ada, jadi dari pemeriksaan reguler terus kemudian diketahui ada kecurangan terus dilanjutkan dengan kasus pemeriksaan kasus dengan lebih diperdalam di penyimpangannya ya. Tapi kalau yang untuk pemeriksaan-pemeriksaan reguler itu biasanya kami identifikasinya kami sebelum melakukan pemeriksaan itu ada identifikasi risiko, disitukan termasuk mengidentifikasi program-program krusial yang dikerjakan oleh OPD sebelum kami masuk biasanya kan kami identifikasi risikonya dulu, kayak misalnya pemeriksaan desa, pengawasan desa. Itu kita mengidentifikasi risikonya itu dari ketepatan pelaporan terus pertanggungjawaban terus banyak tidaknya temuan itu termasuk salah satu yang dipertimbangkan kita untuk memilih objek yang akan kami periksa, nah disitu termasuk cara mengidentifikasi disitu apakah kemungkinan terjadi ketidaktertiban belum tentu penyimpangan, maksudnya itu identifikasi awal di desa itu tertib apa enggak dari situ.
- Rz : Oh begitu bu, kemudian bagaimana langkah-langkah atau apa saja langkah-langkah konkret yang sudah diambil inspektorat untuk mencegah *fraud* di berbagai sektor atau unit kerja kayak opd tadi bu untuk mencegah *fraud*nya
- P : Yang mana?
- H : Nomor d nomor d
- P : Yang anu itu ya buk, surat edaran
- H : Ya mengeluarkan surat edaran tentang *anti* gratifikasi, kemudian kita juga ada sosialisasi *anti* korupsi ke berbagai hampir ke semua skpd, kemudian pendampingan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepada SKPD, artinya biar *nanti* untuk mencegah itu kan, pendampingannya kia laksanakan dulu jangan sampai *nanti* maksudnya pendampingan biar tugas pokok dan fungsinya SKPD itu berjalan baik, kemudian kalau semuanya baik kan berarti menghindarkan dari *fraud*, kemudian kita juga, apa istilahnya itu Mba Pipit

- P : Kalau yang secara tidak langsung sih biasanya di sela-sela pengawasan kan mereka juga kebetulan ada beberapa opd atau beberapa
- H : Konsultasi
- P : Yang konsultasi, selama kita memeriksa keuangan itu mereka mungkin ada kesulitan atau ada permasalahan yang dihadapi mereka itu sekalian konsultasi lewat pengawasan yang sedang kami kerjakan gitu. Jadi tidak mesti terjadwal atau terprogram, tapi melalui pengawasan yang kami lakukan biasanya mereka juga ketika ada masalah langsung konsultasi ke auditor yang memeriksa tim yang memeriksa
- Rz : Oh iya, dan itu tadi juga berfungsi untuk mencegah *fraud* di sektor-sektor tadi itu?
- H : Selama ini berhasil ya
- P : Maksudnya malah lebih efektif ketika, kalau sosialisasi mungkin terjadwal tergantung permintaan atau tergantung jadwal kami bisa apa enggakya, tapi kalau yang konsultasi itu kan sesuai kebutuhan mereka dan temanya kan sesuai sama yang mereka butuhkan, ada jawabannya kadang-kadang, malah lebih efektif yang konsultasi itu atau yang melalui pengawasan ketika kita melakukan pemeriksaan
- Rz : Yang konsultasi ini bentuknya seperti apa bu? Tanya jawab bu atau seminar?
- H : Bisa lewat konsultasi itu kami artikan luas, artinya ketika kami mendapatkan surat undangan dari SKPD untuk membahas suatu permasalahan disana dalam bentuk rapat koordinasi, itu juga kami artikan dalam konsultasi. Artinya kan mereka punya kesulitan dan sebagainya mungkin ragu untuk melangkah seperti ini kemudian ngundanglah kami inspektorat. Kemudian dalam rapat koordinasi itu kan kami juga memberikan saran-saran yang akan ditempuh oleh SKPD gitu.
- Rz : Hmm iya bu, terimakasih atas jawabannya, lalu bagaimana bu inspektorat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan mekanisme *antifraud* tadi?
- H : Kalau yang khusus ini nggih, kalau yang mekanisme *antifraud* sendiri khususnya saya kira belum ada
- P : Organisasinya belum terbentuk
- H : Karna kan memang kami baru ya mas ya tadi saya mengatur untuk baru, kalau yang kemarin-kemarin kan bukan terus menjadi khusus untuk *fraud* seperti apa tidak
- P : Tidak ada sama sekali
- H : Tapi kalau sekarang karna sudah bidang baru ya memang ini dalam pemikiran kami seperti itu mesti ada tapi kan masih dalam proses untuk pelaksanaan kesitu
- P : Atau mungkin gini ya ketika kami masuk melakukan pengawasan biasanya kami menemukan temuan-temuan yang jadi permasalahan di objek yang kami periksa tertuang di laporan, bisa jadi temuan tersebut masih dibawa sampai kita selesai periksa masih ada, nah itu mungkin dari evaluasi dan pelaporan selalu monitoring tindak lanjutnya itu seperti apa, apakah itu bisa termasuk untuk dianggap sebagai monitoring untuk mekanisme *antifraud* ini mungkin mendekati kali ya, jadi kalau untuk organisasinya, mekanismenya yang bener-bener tertuang dan terstruktur memang belum ada, tapi sambil antara dengan mekanisme tindak lanjut monitoring dan evaluasi tindak lanjut temuan pemeriksaan itu mungkin bisa dianggap sebagai monitoringnya ini
- Rz : Owh baik-baik, memang baru awal maret kalau gak salah terbentuk yang bidang investigasi dan reformasi birokrasi ini
- P H : Iya, jadi memang baru masih meraba-meraba formulanya seperti apa

- Rz : Baik kalau untuk yang sebelum-sebelumnya sebelum ada terbentuk yang bidang ini, kalau seperti yang ibu pipit bilang tadi, mungkin dari temuan-temuan itu melakukan monitoring dan evaluasinya?. Lalu lanjut, sumber daya manusia dan teknologi ataupun metode analisis yang digunakan inspektorat untuk mendukung pencegahan *fraud* itu apa saja? Sdmnya, teknologinya, atau metode analisis.
- P : Kalau SDMnya berarti kan peningkatan kompetensi kami selaku auditor yang melakukan pengawasan kan biasanya sekarang juga ada kewajiban untuk apa pemenuhan jam diklat dan lain-lain, jadi diklat rutin itu pasti sih. Terus baru tahun ini sudah berapa yang bu yang kaitannya dengan investigasi ini? Dua
- H : Keuangan negara saat aku investigatif, baru dua yang langsung menjurus kek gitu, oh mba yeni satu yang infrastruktur, tapi kan ada selingan forensik digital.
- P : Oh digital forensik untuk investigatif, jadi kalau yang kaitannya dengan SDM, itu peningkatan kompetensinya, tahun ini itu sudah tiga kali pengiriman diklat yang kaitannya sama investigatif, perhitungan keuangan negara, dan forensik untuk audit investigatif. Kalau untuk teknologi,
- H : Belum
- P : Belum sih, selama ini yang ada itu baru aplikasi untuk pemantauan monitoring tindak lanjut temuan sama satu lagi itu untuk pengawasan desa tapi itu bukan produknya kami, itu produknya BKPP, kita tinggal menggunakan teknologi itu. Kalau metode analisis ya seperti kita metode audit sih mas, kalau kita meriksa
- Rz : Menggunakan tahapan tahapan audit gitu ya bu ya?
- P : Hm em
- Rz : Ada tambahan bu dari bu heri?
- H : Udah itu
- Rz : Selanjutnya bagaimana kerja sama dan koordinasi antara inspektorat dengan instansi atau pihak lain terkait dalam rangka pencegahan dan penanganan *fraud* ini?
- H : Ini ada surat MOU ya tiga antara pemerintah kabupaten sleman, dalam hal ini inspektorat bekerja sama dengan kejaksaan dan kepolisian dalam rangka pencegahan dan penanganan *fraud*, salah satunya adalah dengan mengundang dari kepolisian atau kejaksaan untuk memberikan materi mengenai pencegahan *anti* korupsi kepada masyarakat bisa, kemudian personal pegawai disini juga bisa, kemudian *nanti* misalkan ada yang dari hasil investigatifnya inspektorat *nanti* bisa dilimpahkan ke APH.
- Rz : itu kerjasamanya dari instansi pemerintah ya bu ya?
- H : Iya
- P : Tiga pilar penegak
- Rz : Kalau dari luar mungkin, dari eksternal pemerintahan kayak kampus-kampus gitu
- H : Enggak
- Rz : Ada tambahan bu pipit?
- P : Kalau yang ini memang MOU itu sih, MOU dengan kejaksaan dan kepolisian,
- Rz : Baik untuk selanjutnya mungkin ini terkait penanganan kasus *fraud* yang telah terjadi itu bagaimana bu dan proses investigasi dan tindak hukum yang dilakukan seperti apa oleh inspektorat
- H : Kalau ini, ini berawal dari, yang pernah ya, yang dua-duanya pernah sih. Artinya pengembangan temuan dari hasil pemeriksaan inspektorat sendiri kemudian ada laporan dari SKPD yang lain, maksudnya dari dinas teknis yang lain, kemudian oleh inspektorat ditindak lanjuti dengan, kalau dulu-dulu sih namanya bukan

investigasi ya, masih pemeriksaan kasus seperti itu dan selama ini yang kami laksanakan istilahnya dengan pengenaan tuntutan *ganti* rugi, artinya kalau ada ketekoran kas maksudnya kerugian yang berkaitan dengan keuangan daerah itu untuk segera disetorkan kembali ke kas daerah, kek gitu, tapi belum pernah kami melimpahkan ke APH.

Rz : Hmm dari ibu sendiri sebagai auditor bu pipit gimana?

P : Kalau selama ini belum eksplisit sebagai investigasi gitu, pernah ada selain pengembangan dari pemeriksaan sendiri laporan OPD, juga pernah ada permintaan dari APH memang, permintaan untuk kami inspektorat melakukan pemeriksaan kasus yang mereka tangani, nah waktu itu juga pernah investigatif, pernah di PKKN, Cuma waktu itu PKKN nya tidak jadi, jadi kalau yang ini memang kalau proses investigasi tergantung ya mas, tergantung kalau misalnya permintaan APH ya berarti kita tergantung permintaan APH, suplai data ke kita apa, mereka maunya kita meriksa apa, ini sudah terfokus. Kalau yang investigasi yang dari laporan OPD juga kebanyakan sudah mengerucut ya bu ya,

H : Hm em

P : Jadi tinggal kami, tinggal materinya yang anu kita periksa secara dengan teknik audit yang biasanya kita untuk entah membuktikan atau entah untuk mengungkap apa yang di mau dari OPD yang melaporkan, satu lagi tadi apa bu? Pengembangan laporan, kalau yang untuk permintaan APH tergantung permintaannya APH nya

H : Permintaan APH

P : Kalau tindakan hukum, koreksi aja ya mas, kalau tindakan hukum tidak di ranah kami, jadi ketika permintaan dari APH, mereka meminta kami menghitung, menghitung ya udah, kami menghitung hitungan kami seperti ini dengan kompetensi dan keahlian kami selaku auditor cara-cara yang kami lakukan dengan standar kita serahkan hasil hitungan kami untuk proses hukum selanjutnya tetap kembali ke APH, kalau kami tidak ke ranah hukum.

Rz : Tetap kembali ke APH kayak kepolisian

P : Nggih, kalau kami kan ke disiplin pegawai gitu, kalau penegakan hukumnya bukan di kami

Rz : Baik baik, lalu mungkin ini langsung ke rumusan masalah kedua saja, ini sebenarnya tentang inti dari penelitian saya itu, tentang pengelolaan dan pengembangan sdm *antifraud* yang dimiliki inspektorat kabupaten sleman, ini untuk mengetahui bagaimana proses rekrutmen, seleksi dan penempatan sdm yang memiliki kompetensi dalam mencegah dan mendeteksi *fraud*, kemudian mengetahui apa saja program pelatihan dan pengembangan yang diberikan kepada sdm inspektorat kabupaten sleman terkait *antifraud*, dan mengetahui bagaimana evaluasi kinerja dan penghargaan terhadap sdm *antifraud* diatur dan dilaksanakan oleh inspektorat. Mungkin yang pertama bu bagaimana inspektorat mengidentifikasi kebutuhan kompetensi sdm dalam upaya pencegahan dan penanganan *fraud*

H : Kalau mengidentifikasi kebutuhan kompetensi SDM, artinya ini bukan dari awal ya, artinya kan kita itu pokoknya pegawai inspektorat, yang diberdayakan ya juga itu, artinya kita tidak mencari-mencari awal untuk SDM yang memang mau didudukkan di investigasi itu enggak, ini dari awal memang adanya ini, kemudian ditata ulang dengan adanya bidang baru kek gitu bidang investigasi, diambil dari dari auditor yang lama, cuma sekarang bidangnya disini dengan pertimbangan tertentu kek gitu, artinya diratakanlah, misalnya dari masing-masing bidang itu ada

yang jurusan akuntansi, ada yang hukum, ada yang teknik seperti itu, pertimbangannya hanya itu, kalau masalah peningkatan SDMnya ya memang kita upayakan untuk mengirim ke berbagai diklat yang menurut kami itu berguna untuk bekerja di bidang masing-masing seperti itu, misalnya tadi ada bidang investigasi baru, kemarin Mba Pipit dan Mba Retno itu di ikutkan untuk diklat masalah perhitungan keuangan negara, kemudian saya dan juga teman saya kemarin ikut audit investigatif, ada teman lagi yang ikut untuk forensik digital seperti itu

P : Digital forensik

H : Artinya kita mengikutilah, berarti saya itu butuh keahlian seperti ini sehingga kami mengirimkan auditor kami untuk mengikuti seperti itu

Rz : Ada tambahan dari mba pipit mungkin?

P : Untuk beberapa hal ketika kita ingin membahas sesuatu yang fokus gitu kayak kemarin pernah kita, karna kemarin kita di mintai APH untuk menghitung kerugian, itu diminta untuk kerja sama dengan BPKP, mendatangkan mereka untuk melakukan pelatihan kantor sendiri intens untuk membahas tentang PKKN dengan bahasan kasus yang sedang kami kerjakan, jadi kalau untuk ini memang ke pelatihan kantor sendiri dan diklat-diklat sesuai dengan pengembangan kompetensinya.

Rz : Hmm, tadi itu berarti udah termasuk, atau ada selain kirim ke diklat kayak jenis pelatihan lainnya, workshop atau seminar yang telah di adakan di inspektorat ini untuk meningkatkan kompetensi sdm dalam menghadapi fenomena *fraud* yang ada ini apa ada bu selain tadi mengirim ke diklat dan pelatihan dari internal? Apa ada yang lainnya?

P : Pelatihan kantor sendiri itu biasanya kami dengan BPKP karna instansi pembina kami kan BPKP dan workshop dan lain-lain itu kalau kami disini mungkin istilahnya pelatihan kantor sendiri ya workshop pelatihan kantor sendiri ya setipe dengan itu sih, tapi kalau seminar kami tidak mengadakan sendiri, biasanya kami sesuai ada entah bahas mengenai apa itu temanya termasuk kebutuhan kami biasanya kami auditornya dikirim seminar gitu

Rz : Kemudian untuk dalam rangka dukungan pengembangan kompetensi sdm dalam hal *antifraud* ini misalnya melalui dukungan keuangan atau yang diberikan lainnya itu bagaimana bu? Untuk pengembangan kompetensi sdm

P : Kalau dukungan anggaran untuk pelatihan kami disupport penuh sama bkpp

Rz : Bkpp?

P : Badan kepegawaian dan pelatihan itu, jadi semua diklat yang kami butuhkan kita daftarkan, auditornya juga kita plotting, kemudian anggaran disupport penuh oleh bkpp dan kebetulan juga ada mandatori untuk pemenuhan jam minimal ya bu apa sih namanya itu yang ada kebutuhan jam diklat minimal untuk auditor untuk pengembangan kompetensinya itu ada di mandatorinya KPK jadi mau tidak mau itu dengan itu bkpp juga support penuh itu kaitannya dengan anggaran, kalau untuk waktu ya karna waktu satu jam, jam kerja ya cuman segitu kan, jadi kalau untuk waktu ya sudah default, artinya tidak ada tambahan dan tidak ada kekhususan sih nek untuk yang kami dibidang kami jadi biasa aja cuman kalau dari anggaran diklat apapun pasti anggaran disupport oleh Bkpp

Rz : Hmm, kalau dari bu heri apa ada tambahan bu terkait dukungan yang diberikan untuk pengembangan sdm *antifraud* tadi.

H : Udah

Rz : Ini bagaimana bu inspektorat memonitor dan mengevaluasi efektifitas program

- pengembangan kompetensi *antifraud* yang telah dilakukan tadi?
- P : Kalau efektifitas itu kan tercapainya tujuan ya, kalau misalnya untuk pengembangan kompetensi ya berarti kalau diberangkatkan diklat dengan harapan setelah pulang dari diklat, pengetahuannya bertambah ketika ada permasalahan kaitannya itu kami sebagai auditor yang diberangkatkan diklat bisa menangani sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku, nah kalau untuk efektifitasnya mengevaluasinya gimana ya bu
- H : Langsung bisa kerja besok kalau ada kasus
- P : Nah posisinya sekarang alhamdulillah belum ada aduan, kemarin ada aduan cuman tidak investigatif sih kemarin anu ya bu
- H : Ini mendekati ngadain insert investigatif di doble sebentar lagi
- P : Jadi mungkin efektifitasnya itu kali ya, kalau misalnya kami kemarin baru menangani satu kasus pengaduan pengadaan barang jasa yang melalui lkpp, jadi lkpp memerintahkan untuk melakukan istilahnya pendalaman atas aduannya tersebut itu sih mungkin efektifitasnya kalau mungkin diukur dari bisa tidaknya bekerja insyallah bisa sih
- Rz : Baik baik, yak kita lanjut mungkin untuk mengukur keberhasilan tadi bu pengelolaan dan pengembangan kompetensi sdm *antifraud*, sebelumnya saya pernah saya dengan dari bu puji kayak ada sistem kredit disini, itu bagaimana tanggapan dari ibu
- H : Sistem kredit PAK maksudnya
- P : Gimana mas mohon diulang
- Rz : Yang bagian i, yang tentang bagaimana inspektorat itu mengukur keberhasilan pengelolaan dan pengembangan kompetensi sdm tadi bu kayak ada saya dengar dari bu puji sebelumnya itu ada sistem tambahan kredit gitu, kayak kalau ikut seminar ini, seminar itu, ikut diklat ini, atau program e-learningnya kpk, coba bagaimana bu penjelasan dari ibu terkait program-program tersebut.
- P : Keberhasilannya itu kan berarti kan ini “mengukur keberhasilan dan pengembangan kompetensi SDM” kalau ini kan keknya yang lebih mengerti bagian kepegawaian ya, keberhasilan pengelolaan pengembangan kompetensi SDM, mengukurnya. Kalau mengukur kayaknya yang lebih tau bagian kepegawaian karna mereka yang bikin matriks kebutuhan diklat untuk pegawai jadi keknya itu ada datanya semua auditor, terus masing-masing itu sudah pernah melakukan diklat apa dimatriks itu jadi masing-masing *nanti* dia masih butuh diklat apa, diklat yang harus wajib apa, yang opsional apa sesuai dengan kebutuhan kami di per bidang itu apa keknya kepegawaian yang lebih ngerti soalnya kan mereka yang punya data kalau saya kan auditor yang dikirim jadi kalau untuk keberhasilan pengelolaan pengembangan kompetensi ini saya kurang bisa valid kalau menjawab jauh, ini kayaknya bagian kepegawaian,
- Rz : Baik, mungkin kita bisa tunggu bu heri sebentar mba
- P : Iya
- Rz : Kalau mba sendiri pengalamannya ikut latihan untuk workshop dan seminar ini, bagaimana mba, sendiri-sendiri atau bareng-bareng sama pegawai-pegawai dari opd lainnya mungkin, gimana ibu yang ikut jenis pelatihan, workshop, seminar.
- P : Kalau saya, kalau jenis pelatiahannya ya mas, kita milih sesuai sama kebutuhan kami inspektorat, jadi kebanyakan itu pelatihan yang disediakan oleh bpkp atau oleh bpk kan kaitannya dengan audit kan, dan untuk kalau mereka yang mengadakan kan biasanya tetap bareng-bareng entah bareng pemda lain entah

dengan institusi lain yang setipe bedanya inspektorat jenderal itu, jadi bukan terus saya nyari sendiri terus saya keluar, jadi tetap terorganisir lewat kantor, kantor koordinasi dengan apa lembaga diklatnya, kemudian juga koordinasi dengan apa badan kepegawaian kaitannya dengan dukungan anggaran, jadi analisis kebutuhan masing-masing auditor, jadi saya butuh diklat apa dan lain-lain bukan saya yang menentukan tapi tetap bagian kepegawaian dan sekretaris yang menentukan, dan itu bisanya pertimbangannya dari posisi kami dibidang sih tergantung bidangnya apa.

- Rz : Apa itu bentuk pelatihannya berbeda antara yang untuk khusus auditor sama yang khusus untuk investigasi *fraud* tadi, apa berbeda?
- P : Sama sih, kalau investigasi itu kan anu ya lebih ke maksudnya tujuannya pemeriksaan, sebetulnya kalau tekniknya mengaudit dan lain-lain itu sama, cuma kalau investigasi mungkin secara prosedural sama secara tujuannya untuk pemeriksaan itu berbeda, jadi memang ada diklatnya sendiri sih, insvestigasi, terus penghitungan keuangan negara yang berkaitan dengan ini ya yang *fraud* ini, itu ada, terus kemarin ada juga digital forensik untuk investigasi jadi emang temanya sudah disesuaikan sama , dan mereka biasanya di kami biasanya ngikut alurnya bpkp sebagai pembina sama kpk biasanya yng menentukan jadi kebanyakan kita tidak merancang sendiri pengembangan kompetensi ini kecuali yang pelatihan tadi, kalau pelatihan tadi kan sesuai kebutuhan kita sedang menangani kasus apa biasanya sekali konsultasi sekalian dibuat workshopnya
- Rz : Oh begitu ya, jadi kita melaporkan ke pembina kita butuh ini seperti ini atau ke bpk atau melaporknya ke siapa gitu bu?
- P : Sebenarnya mereka yang menyediakan terus biasanya karna yang disediakan itu memang yang kita butuhkan jadi otomatis aja, jadi bukan kita yang, kita pengen diklat ini bukan, jadi memang biasanya mereka menyediakan itu sesuai sama yang kami butuhkan jadi sudah ngikut settingan mereka, soalnya mereka kan juga programnya dari mungkin dari pusat maunya seperti ini, auditor inspektorat seperti ini, auditor bpk seperti ini terus dibuatkan diklat seperti itu
- Rz : Dari bu heri tadi terkait pertanyaan nomor i tadi bu, yang mengukur keberhasilan dan pengembangan kompetensi sdm tad bu pipit bilang itu yang mengetahui adalah bidang kepegawaian, dari itu apa ada mungkin tambahan bu, terkait itu?
- P : Iya kalau keberhasilan ini kan mba virgo mesti yang punya data ya bu? Dari berapa sekian yang sudah diberangkatkan diklatnya apa aja
- H : Kalau keberhasilan apa enggak itu ya kan terus *nanti* akhirnya kan bisa kerja dengan baik atau enggak dari hasil pengembangan kompetensi, artinya kalau saya kemarin investigatif, kan berarti besok kalau ada kasus saya bisa menerapkan sesuai dengan peraturan itu kek gitu loh, mengukur keberhasilan pengelolaan dan pengembangan.
- Rz : Baik tentang ini bu, tentang bagaimana kerja sama antara inspektorat dengan institusi pendidikan atau lembaga lain dalam rangka pengembangan kompetensi sdm *antifraud*?
- H : Kalau khusus enggak kami dengan institusi, cuma kalau pas butuh aja misalnya
- P : Biasanya kami koordinasinya anu ya bu sama balai diklat pengawasnya bpkp sama balai diklatnya bpk itu kalau mereka programnya ya langsung pengawasan, jadi kami seringnya ngikut diklat yang digratisin
- H : Diklat pengawasnya bpkp sama balai diklatnya bpk, programnya langsung pengawasan, dan mereka pembina juga ya

- P : Ya
- H : Kalau dari akademisi kan ngasih teori, mereka gak tau praktiknya seperti apa
- P : Dan mungkin karna pemda itu khusus ya bu, tidak bisa menerapkan prinsip-prinsip auditing perusahaan ketika kita mengaudit di pemda kemudian kami lebih fokus ke ya sudah kita ngikuti pembinanya kami aja, karna sudah pasti ilmunya bakal kita pakai
- H : Sama ilmunya sama
- P : Karna kalau untuk kerjasama gitu jarang ya bu ya, karna biasanya lebih, karna lebih kalau dengan bpkp dan bpk itu lebih mengarah ke pemerintahan sih, jadinya lebih fokus dan lebih tertuju ke pekerjaan kami.
- Rz : Dengan institusi pendidikan kayak mungkin dari ugm, atau dari uii gitu yang kampus-kampus di jogja ini, apa ada
- H : Enggak ada  
: dalam rangka pengembangan sdm *antifraudnya* bu?
- P : Kalau lingkup besar belum ya bu, kalau dulu infrastruktur dan bangunan
- H : kalau masih umum ya pernah sama ugm pernah sama UII anu ya untuk menjadi narasumber pas mau pemeriksaan fisik gedung dan jalan, tapi kalau khusus *fraud* belum.
- P : Tapi mungkin *fraudnya fraud* secara general penyimpangan yang gak melulu mendekati kearah korupsi dan lain-lain tapi mungkin penyimpangan-penyimpangan yang kaitannya dengan pemeriksaan rutin yang kami kerjakan itu beberapa kali memang memanggil, mengundang narasumber dari uii kaitannya dengan pekerjaan fisik, dulu beton dengan itu, terus untuk tenaga ahli itu untuk uji ekstraksi, uji labolatorium untuk aspal dan lain-lain, tapi kalau *fraud* yang. Kalau disini kan saya menangkapnya *fraud* yang cenderung kearah korupsi
- Rz : Korupsi, gratifikasi gitu itu.
- P : Nggih, kalau yang khusus itu kami belum pernah, biasanya kami langsung ke bpkp dan bpk karna ini satu arus, satu alur.
- Rz : Mungkin selanjutnya ini bu di rumusan masalah saya yang ketiga terkait dengan permasalahan, baik itu kendala atau kekurangan, tantangan maupun hambatan dalam mengelola sdm *antifraud* yang dihadapi inspektorat kabupaten sleman. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui kendala dalam pengelolaan dan pengembangan kompetensi sdm *antifraud* yang dimiliki oleh inspektorat kabupaten sleman, kemudian mengetahui persepsi dan kebutuhan sdm terkait *antifraud* yang diungkapkan oleh pegawai inspektorat, bagaimana bu tantangan utama yang dihadapi atau apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh inspektorat kabupaten sleman dalam mengelola sdm *antifraud*.
- P : Ini anu eh, kalau ini bu puji ya bu?
- Rz : Waktu itu bu puji menyampaikan tentang inisiatif disitu ada kurang inisiatif, bagaimana tanggapan dari ibu sendiri?
- P : Kalau saya gak bisa bicara secara general ya, saya bicaranya berarti. Inikan misalnya dibaca berarti tantangannya kantor mengelola saya, karna saya termasuk SDM, sdm yang dimaksud disini kan. Ya mungkin kalau saya yang jawab saya mungkin subjektif. Kalau saya pribadi saya merasa memang karna volume pekerjaan yang sangat banyak, jadi sering kali itu, ini pribadi ya jadi tidak bisa dipukul rata dengan yang lain. Saya kurang fokus, karna sebenarnya untuk pemeriksaan yang membutuhkan konsentrasi tersendiri kayak investigasi atau pkkn itu tu memang apa ya memang dibutuhkan konsentrasi dan kefokuskan. Cuman



kan kalau disini kan kami tidak bisa terus kalau dapat surat tugas ini, ini aja yang dikerjain, kan gak bisa karna memang satu kekurangan orang dua memang volume pekerjaan entah mandatori entah yang program kerja sendiri sangat banyak, jadi mungkin tantangan utamanya ya itu sih karna volume pekerjaannya yang banyak, jadi mungkin kalau saya pribadi itu saya gak fokus, dan ketika sesuatu yang dikerjakan tidak dengan fokus kan saya juga tidak maksimal seperti yang diharapkan.

- Rz : Ada tanggapan bu terkait tantangan utama yang dihadapi inspektorat dalam mengelola sdm *antifraud*?
- H : Kalau tantangannya kan sekarang era digital itu yang lebih banyak apa kita juga tidak bisa tutup mata dengan perkembangan jaman, sekarang era digital yang sementara ini kan banyak yang kita laksanakan itu masih yang sistemnya manual, sehingga perlu pengetahuan tentang yang ini forensik audit, terus sekarang yang pakai digital-digital itu kan kita masih lemah audit tentang itu.
- Rz : Lalu bagaimana dari inspektorat mengidentifikasi adanya kendala atau masalah yang mungkin timbul dalam pengelolaan sdm *antifraud* itu seperti apa?
- P : Ini mengidentifikasi kendala, kalau misalnya apa pegawainya bermasalah apa mencegah biar mereka tidak itu apa
- Rz : Mungkin kek gini, untuk mengidentifikasi itu kayak kelihatan ini bakal ada kendala ni dalam program yang ini, seperti itu bu, dalam pengelolaan sdm mungkin timbul kendala-kendala seperti a,b,c dan mungkin seperti kelalaian, atau yang lainnya seperti apa yang telah dilakukan inspektorat
- P : Berarti anu ya kemungkinan permasalahan kami sebagai auditor ketika kita dihadapkan pada ketugasan yang berkaitan dengan *antifraud*. Berarti kan bu heri sebagai irbad misalnya, berarti waktu membentuk tim itu sudah diperkirakan masalahnya ini, berarti komposisinya timnya sebaiknya ini, ini, ini gitu kan ya, mungkin bu heri yang lebih bisa menjawab.
- H : Sama mba pipit aja lah, bingung saya
- P : Kayaknya kalau di kami itu kasuistis mas, jadi tergantung ya, kadang-kadang kalau memang dibutuhkan orang ini tapi ketika orang ini sudah di tugaskan untuk mengerjakan surat tugas yang lain, ya terpaksa harus yang ada siapa harus kita pakai itu tapi mungkin dengan tetap mempertimbangkan pertimbangan apa tergantung kondisi seperti itu, jadi mungkin pengaturan komposisi tim dan lain-lain mungkin yang jadi apa kalau ada permasalahan
- Rz : Baik, lalu kekurangan dan kelemahan seperti apa bu yang terdapat dalam sdm yang ada di inspektorat dan khususnya terkait dengan pencegahan dan penanganan *fraud*?
- P : Kalau ini, anu
- Rz : Mungkin kalau dari bu pipit sebagai auditor mungkin bisa melihat sendiri dilapangan kekurangan dan kelemahan seperti apa bu terkait sdm
- P : Kalau ini berarti kelemahan dan kekurangan kami sebagai auditor, mungkin ini kalau pribadi bisa lagi-lagi jawabnya secara subjektif menilai diri sendiri ya, kalau ini ya satu yang itu tadi bu heri bilang, karna perkembangannya cepat, kadang-kadang apa kami selaku auditor juga harus mengikuti tapi apa secara waktu entah secara tenaga itu kami kurang, jadinya mungkin apa istilahnya kalau istilahnya tertatih-tatih mengikutinya ketika perkembangannya terlalu cepat, tapi kami dituntut dengan, kan kami tidak fokus ya jadi misalnya kami ngerjain ini ngerjain itu aja itu enggak. Jadi ya kami ngerjain ini, ya apa *nanti* kpk *nanti* minta kita juga

mengerjakan *nanti* irbad minta apa kita juga mengerjakan, jadi mungkin kendalanya itu disitu terus, jadi ketika ada penugasan karna penugasan volumenya sangat banyak jadi mungkin jadi kurang fokus, karna satu waktu dan dua kapasitas saya pribadi selaku auditor itu kan untuk mempelajari banyak hal dalam waktu yang bersamaan itu bisa, mungkin tidak maksimal, Cuma separuh-separuh dulu, yaitu tertatih-tatih sih ketika mengikuti tuntutan, mandatori, dan mengikuti perkembangan. Aturan kan berubah cepat banget nggih, jadi kadang-kadang kami baru mau diterapkan baru mau belajar, baru mau menguasai, itu seperti itu juga jadi kendala, saya pribadi merasakannya seperti itu selaku SDM yang dimaksud disini.

- Rz : Hmm iya iya kalau dari bu heri sendiri melihat kepada sdm yang ada itu apa aja bu kekurangannya yang terdapat dalam sdm terutama dalam masalah *antifraud*
- H : Yang tadi masalah forensik audit mas.
- P : Digital forensik audit untuk audit investigasi, itu mungkin maksudnya, kalau secara umum kami mengikuti perkembangan teknologi itu juga sangat apa ya tertatih tatih, karna apa ya, sdm kami kan banyak yang muda tapi banyak juga yang sudah senior, jadi saya aja usia segini tapi untuk mengikuti perkembangan jaman yang terlalu cepat itu saya juga kadang-kadang gak bisa basenya gak bisa secepat mengikuti anak-anak muda sih. Dan disini lebih banyak yang senior daripada yang muda.
- Rz : Baik, mungkin ini lanjut ke apakah terdapat hambatan dalam hal komunikasi, koordinasi, kolaborasi antara tim atau unit kerja di inspektorat terkait dengan pencegahan dan penanganan *fraud*?
- H : Tidak ada,
- P : Kalau ini lancar-lancar aja sih, satu bidang isinya cuma itu-itu aja, dan kita ketemu setiap hari dan kalau kaitannya sama koordinasi dan komunikasi kayaknya tidak ada masalah.
- Rz : Kalau koordinasinya ke atas, ke manajemennya kayak mana bu selama ini?
- H : Gak masalah, mendukung kok.
- Rz : Baik baik, lanjut bu yang di nomor g ini, apakah ada bu permasalahan dalam hal kesadaran atau kepatuhan pegawai terhadap kebijakan atau prosedur *antifraud* yang telah ditetapkan.
- P : Ini pegawai inspektorat secara keseluruhan berarti, berarti bukan khusus untuk bidang kami kan
- Rz : Iya, terkhususnya itu pelanggaran atau permasalahan kesadaran kepatuhannya itu terhadap prosedur *antifraud* yang sudah ditetapkan itu bu, apa ada selama ini, apa ada kesadaran selama ini. Mungkin kayak kata ibu pipit tadi kayak harus karna ada dapat kasus ini harus bisa belajar ini gitu. Tapi mungkin gak bergerak, kalau bu puji sebelumnya menyampaikan ke saya tentang itu kurang kesadaran mau mengikuti perkembangan itu dan bu puji menyampaikan itu sendiri gitu, jadi bu puji menyampaikan ada sekitar satu per sepuluh mungkin mas yang betul-betul sadar untuk sadar cepat berkembang
- P : Iya pakai jawaban bu puji aja
- Rz : Baik bu, saya cuma mengkonfirmasi saja disini
- P : Mungkin saya diantara 9, yang anu 1/10, mungkin saya diantara yang 9. Kalau dari ini mungkin bu puji yang bisa lebih punya gambaran umum secara satu kantor ya, kalau saya kan sebagai yang diamati oleh bu puji.
- Rz : Baik baik bu, lalu bagaimana inspektorat ini memonitor dan mengevaluasi

efektifitas langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi permasalahan dalam mengelola sdm *antifraud* tadi bu, sebelumnya saya sampaikan bu puji menyampaikan tentang bu puji sering share kata bu puji di grup itu untuk kreatif sendiri ngikutin seminar-seminar yang ada gitu, apa benar seperti itu bu?

- P : Ya kalau misalnya ada informasi tentang webinar, atau seminar, atau anu pasti dishare di grup sih, tapi itu istilahnya bukan perintah ya, jadi silakan kalau mau ikut, silakan ikut, kalau enggak ya enggak. Jadi kalau mau pada kesadaran ya ikut, tapi kalau dibidang kami sendiri kalau bu heri itu aktif sekali mensortir webinar-webinar sama yang memang kami butuhkan dibidang, jadi bu heri itu “ini ada webinar itu dari bpkp, tolong bidang investigasi ikut semua” kalau kami khusus dibidang ini bu heri yang aktif dan mau gak mau diperintah untuk ikut, jadi kami memang merasanya memang itu kita butuhkan, jadi kami ikut.
- Rz : Baik baik, lalu ini, apakah ada ini bu masalah keterbatasan anggaran atau sumber daya lainnya yang dapat mempengaruhi pengelolaan sdm *antifraud*?
- P : Kalau anggaran sih keknya support penuh,
- H : Iya
- P : Kalau diklat apapun pasti mereka tidak ada masalah
- Rz : Kalau dari sumber daya sendiri apa ada bu yang jadi masalah dalam pengelolaan sdm *antifraud* ini?
- P : Kalau dari sarpras kayaknya gak ada masalah mas, kami selama ini kan disupport penuh ya, jadi ketika kami butuh apapun, ketika kita minta pun pasti disediakan, jadi gak masalah.
- Rz : Baik, lanjut ke rumusan masalah saya yang keempat ya, ini kita bicara tentang strategi yang telah dilakukan atau pun akan dilakukan inspektorat kabupaten sleman dalam mengatasi kendala dan kekurangan yang telah ibu sebutkan tadi dalam mengelola sdm *antifraud*?. Ini bertujuan untuk mengetahui langkah konkret apa yang telah diambil inspektorat kabupaten sleman untuk mengatasi kendala dan kekurangan dalam pengelolaan sdm *antifraud*, kemudian mengetahui adanya kerja sama atau kolaborasi dengan pihak eksternal dalam upaya mengatasi kendala dan kekurangan dalam mengelola sdm *antifraud*
- P : Ini keknya sudah terjawab ketika kebutuhan kompetensi, jadi kalau kendala kompetensi pasti dengan diklat diklat yang berkaitan,
- H : Kalau jumlahnya ya memaksimalkan, mengoptimalkan yang ada, gak bisa untuk terus-terus minta nambah-nambah gitu gak bisa.
- P : Kalau kendala kompetensi itu, kalau kendala kuantitas sdmnya iya tidak bisa diapa-apakan lagi karna memang adanya itu, mungkin kalau ada rekrutmen pun mungkin juga tidak bisa serta merta, tetap harus berproses dengan pengadaan cpns yang tapi kan juga belum tentu ada penambahan baru pun
- H : Kuotanya tergantung dari kemenpan juga, dari bkpp, kita gak bisa milih,
- P : Kalau pengembangan kompetensi itu tadi diklat-diklat yang berkaitan.
- Rz : Mungkin dari bu pipit terkait masalah tadi yang ibu sebutkan masalah kurang fokus, sulit untuk mengejar perkembangan zaman itu apa udah ada dirumuskan strategi untuk mengatasi masalah seperti itu dari ibu dan teman-teman auditor mungkin atau dari bu heri juga
- P : Kalau itu keknya kendala subjektif ya, belum tentu saya mengalami seperti itu dan yang lain tidak sih, kalau itu kan. Kalau misalnya dari sekarang kan penugasan itu sudah dari bidang, jadi mungkin irban sendiri, bu heri selaku irban juga sudah mengalokasikan waktu biar apa menjadwalkan kegiatan yang sebisa mungkin tidak

bertumpuk-tumpuk, kalau dulukan berpusat di sekretariat, jadi penugasan dan lain-lain itu yang ngeplot waktu dan ngeplot tim dari sekretariat, kalau sekarang kan hak prerogatifnya bidang

- H : Hmm
- P : Jadi mungkin lebih terorganisir disitu karena fokus bu heri mengatur kami saja dibidang itu dan penugasannya juga sesuai yang harus dikerjakan oleh bu heri dan kami, jadi timeline dan waktunya pun lebih terjadwal. Tapi kalau untuk volume pekerjaan kami juga tidak bisa milih, karna itu kebanyakan juga penugasannya juga mandatori dari pusat, jadi mau tidak mau harus dikerjakan.
- Rz : Jadi memang lebih sering ini ya bu ya, kayak mandatori, menerima mandat?
- P : Iya
- Rz : Daripada kayak kita ngusul sendiri ya di inspektorat?
- P : Iya, inspektorat sekarang lebih banyak mandatorinya daripada program yang dibuat sendiri
- Rz : Oh baik baik, saya juga kemarin-kemarin waktu baca-baca ada indeks persepsi korupsi di indonesia itu meningkat tinggi banget
- P : Hm em, kpk juga nyatanya juga sampai ke pemda, pemda siapa lagi kalau bukan kami yang bisa mereka ajak.
- Rz : Baik baik, lalu ini terkait komunikasi lagi mungkin ini bu ya, bagaimana inspektorat kabupaten sleman ini melibatkan pegawai atau pihak terkait dalam merumuskan strategi atau langkah-langkah peningkatan sdm *antifraud*, mungkin dari manajemen ke auditor itu saling bertukar ide itu seperti apa bu? Untuk meningkatkan kualitas sendiri,
- H : Ya info tentang diklat-diklat ini,
- P : Ya itu ketika kami dikirim diklat, biasanya kan pihak penyelenggara diklatnya kan suka ngasih tawaran tu, besok ada kemungkinan diklat ini, diklat ini , ketika kami kembali ke kantor kami sampaikan, kalau kantor membutuhkan kan bisa dijadwalkan. Mungkin itu sih mas komunikasi dari kami yang dikirim ketika kami pulang memberi info, manajemen yang memutuskan siapa besok entah itu diambil diklatnya apa tidak.
- Rz : Lalu untuk ini bu, harapan selanjutnya untuk pengembangan kompetensi sdm khusus yang *antifraud* ini dari ibu sendiri bagaimana bu harapannya?
- P : Saya
- Rz : Iya dan dari bu heri juga khusus pengembangan kompetensi *antifraud* ini terutama dalam menghadapi masalah yang sudah ada kayak yang ibu sampaikan tadi tentang mengikuti perkembangan zaman harapannya bagaimana?
- H : Sesuai jawaban saya tadi aja mba, sama saja digital forensik
- P : Harapannya berarti anu ya mas ketika perkembangannya pesat maka auditornya juga mau gak mau harus juga lebih pesat, mungkin saya dan temen-temen juga mau gak mau harus, mungkin bu puji yang disampaikan bu puji tadi, inisiatif kami sebagai yang pelaksana bakal turun ke lapangan mungkin memang diharuskan lebih berniat lagi, terus mau belajar dan itu mengikuti perkembangan, jadi tidak boleh cuman mengikuti apa yang ada terus ya udah, bisanya cuma segini, padahal kan kita tuntutan juga banyak kek gitu. Kalau pribadi sih itu, jadi mau gak mau memang saya harus belajar, belajar dan berusaha mengikuti arus, karena memang tuntutan seperti itu kek gitu
- Rz : Tapi kalau terkait ini bu, perubahan perubahan dalam strategi pengembangan kompetensi sdm tu apakah terjadi bu di inspektorat ini, mungkin per tahun, pertiga

- bulan mungkin, dicoba coba terus untuk mengembangkan kompetensi sdm itu apa seperti itu atau dalam jangka waktu yang lama sekali
- P : Kalau setiap tahun, malah hampir setiap bulan mengirim diklat ya bu ya, hampir tiap bulan dijadwalkan, mungkin yang tau anunya sekretariat ya, sudah ada matriksnya, sudah ada jadwal diklatnya sudah ada plotnya siapa yang akan berangkat untuk diklat itu, biasanya siapa yang akan berangkat untuk diklat itu biasanya disesuaikan sama bidang, entah bidang entah background studinya kami entah kebutuhan pemeriksaan di tahun itu. Tergantung kebutuhan
- Rz : Berarti lebih banyak yang ditentukan oleh bpkp atau bpk tadi ya
- P : Cuma tetap pertimbangan itu diikuti atau tidak tetap pertimbangannya kantor, karna kantor yang paling tau ini diklat dibutuhkan atau tidak, siapa yang sebaiknya berangkat itu kan tetap kita yang memutuskan, misalkan juga mereka menawarkan diklat tapi kok diklatnya tidak kita butuhkan tidak kita ambil
- Rz : Baik, kalau terkait kayak pelatihan tadi kan ada yang bakal jadi, tadi ada program mekanisme *antifraudnya* kayak sosialisasi terus tadi ada konsultasi itu sdm yang dipilih untuk melakukan itu tu bagaimana menentukannya bu, atau punya kompetensi apa ditentukan orangnya sehingga menjadi orang yang melakukan sosialisasi dan konsultannya tadi, apa ada kriteria tertentu terkait
- P : Kalau konsultasi yang dilakukan saat pengawasan pembinaan itu kan kami auditor kan dianggap sudah
- H : Mumpuni semuanya
- P : Sudah ada ilmunya jadi sudah mengetahui jadi semua auditor itu ketika melakukan fungsi pengawasan juga sekaligus konsultasi ketika mereka membutuhkan sesuatu atau membutuhkan solusi dari kami, tapi kalau untuk sosialisasi disini sudah ada satu penyuluh *anti* korupsi, mas itu sudah bersertifikat
- H : Belum, mba itu yang sudah
- P : Ada satu irban pembangunan itu yang sudah tersertifikasi penyuluh *anti* korupsi untuk penyuluhan dan lain-lain memang sudah dilakukan oleh yang tersertifikasi gitu
- Rz : Itu beliau kerja, maksudnya melakukannya sendiri atau punya tim untuk penyuluhan *anti* korupsi tadi?
- P : Kalau penyuluh *anti* korupsi itu kan
- H : Masing-masing tugas
- P : fungsionalnya yang dibentuk KPK diluar fungsionalnya yang sudah ada, jadi kayak memang KPK itu dibidang pencegahannya punya program sendiri buat APIP itu beberapa itu harus menjadi penyuluh *anti* korupsi, mba tintin itu sudah terverifikasi, bukan tim sih, memang perorangan, tapi untuk melakukan penyuluhan dan lain-lain itu tidak memprogramkan sendiri kayaknya bu
- H : Iya
- P : Kecuali, maksudnya tidak mba tintin memprogramkan sendiri beliaunya pengen menyuluh dimana, tapi kantor yang memprogramkan yang melaksanakan kalau tidak irban ya penyuluhnya, sama tergantung permintaan, kalau ada yang minta, bu heri sering jadi narasumber diminta ke opd opd untuk menyuluh *anti* korupsi ni.
- Rz : Jadi tadi terkait sosialisasi dan konsultasi itu ya dianggap mumpuni semualah auditornya disini
- P : Iya karna objek yang kita apa ruang lingkup sama tujuan yang kita lakukan juga sesuatu yang kita lakukan kan juga secara rutin dan memang bagian dari pengawasannya kita jadi memang tau memang yang sudah mungkin tidak belum

tentu semua menguasai tapi tau permasalahan itu dan secara pengawasan memang apa yang harus dilakukan apa yang tidak boleh dilakukan kami sudah tau ketentuannya.

- Rz : Baik baik, berarti yang tadi tentang mengirim pegawai ke diklat itu, itu tu disediakan oleh bpkp atau bpk, cuman yang tetap menentukan dari kantor ya bu ya menentukan kebutuhannya ya bu
- P : Iya.
- Rz : Oh ya, kalau untuk evaluasi dari mereka sendiri ke inspektorat terkait itu apa ada bu?
- P : Ada gak ibu
- H : kayaknya gak ada
- P : Kayaknya belum pernah saya dengar ada maksudnya kayak mereka bagi kuesioner
- Rz : Kayak bilang, ini kok sedikit yang datang? Ada gak kira kira evaluasi?
- P : Trus, kalau ada mungkin bu puji sekretariat yang tau, tapi setau saya belum ya bu, gak ada, apa mungkin mereka juga ada tertentu ketika mereka evaluasi sendiri mereka dengan cara mereka yang kita tidak tau, kan kita tidak yang jelas selama ini belum pernah di mintai jadi responden atau. Kalau waktu kita diklat ada survei pelaksanaan kepuasan itu ada karna kita langsung ngisi disitu kan tapi kalau evaluasi secara institusi kayaknya belum.
- Rz : Kalau untuk program intinya yang untuk pengembangan kompetensi SDM tu berarti diklat tadi yang paling inti ya kalau yang lainnya
- P : Iya
- Rz : kayak kata bu puji ada e learning KPK itu, itu syarat ya bu ya
- P : Iya
- Rz : Untuk bisa ikut diklat harus bisa ikut dulu atau
- P : e-learning itu kan sebenarnya diklat juga, cuma bentuknya jarak jauh, kalau diklat yang konvensional namanya kita datang kita pelatihan tatap muka, kalau e-learning itu kan separuh belajar mandiri habis itu ada yang lewat apa dengan tetap zoom ya, itu kan tatap muka juga tapi cuman daring kan, kalau e-learning itu kan kayak cuman caranya, caranya pembelajaran. Jadi kita sekarang enggak harus konvensional yang harus datang bertatap muka, tapi e-learning itu kan salah satu cara menjembatani ketika dari segi waktu sama segi jarak karna biasanya kan kalau nasional itu gak mungkin kan, terus diadakan di satu KPKnya, bisanya ya dari KPK terus KPKnya datang ke setiap daerah, kalau e-learning itu sebenarnya sama-sama diklat, cuman caranya belajar.
- Rz : Itu macam-macam ya materinya di e-learning tadi itu ya, itu bagaimana partisipasi dari auditor sendiri atau pegawai inspektorat untuk mengikuti e-learning tadi, apakah tinggi
- H : Belum banyak, tapi ada beberapa yang sudah, termasuk saya juga belum
- P : Kalau saya beberapa kali e-learning itu karna beberapa perintah tugas, jadi memang bukan inisiatif kami sendiri, jadi kami memang cari-cari bimtek terus ikut itu enggak, tapi kalau yang kaitannya sama ketugasan memang sudah dari kantor memerintahkan saya, saya jadi ikut gitu, kalau saya cari sendiri, terus apa inisiatif gitu, karna gini ya mas, kadang-kadang kan yang kita butuhkan yang lebih tau kantor, jadi kan kalau saya sebenarnya tertarik ini, tapi menurut kantor saya tidak butuh ya tidak saya kerjakan.
- Rz : Iya iya, baik mungkin untuk yang wawancara sampai sini saja bu, mungkin selanjutnya akan saya evaluasi lagi wawancara hari ini, kalau saya berkebutuhan

- untuk wawancara lagi insyaallah masih bisa nggih bu?
- H P : Insyaallah bisa
- Rz : Ya saya minta lagi waktunya, dan saya butuh lagi sebenarnya kalau ada dokumen yang mendukung terkait pelatihan ataupun pengembangan kompetensi sdm *antifraud* ini bu, kalau bisa seperti modul gitu, apakah dimiliki oleh inspektorat?
- P : Anu kayak materinya investigasi, materi diklat maksudnya?
- Rz : Lebih ke, iya yang di inspektorat ini seperti apa di modul ada tertulis gitu bu, saya butuh ada yang tertulis dokumen, atau bisa juga laporan evaluasi sdm
- P : Kalau anu mungkin ini mas, surat perintah diklat?
- Rz : Ya seperti itulah bu
- P : Kalau itu mungkin bisa ke bu puji sama mba virgo
- H : Hm em
- P : Jadi tahun ini siapa yang sudah diberangkatkan diklat, diklatnya apa aja di mba virgo atau bu puji
- Rz : Mba Virgo ya namanya
- P : Mba virgo itu kasubag kepegawaian kami yang baru
- Rz : Sama yang tadi terkait pengukuran keberhasilan pengembangan kompetensi sdm tadi, mengukurnya tadi yang kayak satuan kredit itu atau nilai kredit tadi, itu saya bisa minta ke siapa ya kira-kira bu? Dokumen-dokumen yang berisi kayak gitu.
- P : Kalau angka kredit itu bukan untuk mengukur keberhasilan sih mas, kalau itu kan cuman karna kami fungsional kami harus mengumpulkan angka kredit, nah pengembangan kompetensi dari pengembangan profesi itu kan termasuk, eh pengembangan kompetensi itu kan dari kami bisa dilihat dari pengembangan profesi disitu kalau kita ikut diklat kita dapat angka kredit sekian sebagai angka kredit kita sebagai jabatan fungsional, kalau untuk menilai keberhasilan kayaknya bukan itu sih.
- Rz : Oh iya, ini ada yang lupa saya tanyakan bu, tentang ini pemberian penghargaan dan sanksi mungkin untuk sdm khusus yang sebenarnya *antifraud* itu selama ini bagaimana berjalannya dari bu pipit sendiri?
- P : Kalau yang khusus untuk *antifraud* itu dikantor itu tidak ada, berarti kami ya melakukan ketugasan kami ya seperti biasa, cuman kantor itu ada penghargaan untuk pegawai teladan atau pegawai terbaiknya, yang pengukurannya itu ada sendiri, nah itu memang ada, baru kemarin diumumkan semester ini siapa pegawai terbaiknya itu ada sih penghargaan itu
- Rz : Itu pertahun, per semester atau per bulan, atau bagaimana bu terkait penghargaan itu?
- P : Kayaknya, saya kurang tau, bu puji yang tau.
- Rz : Atau sesuai pekerjaan yang dilakukan, tingkat kesulitannya?
- P : Tidak juga sih, kriterianya kayaknya umum enggak mengarah untuk khusus *antifraud* itu, untuk sdm ini, terus ada penilaian tersendiri dengan penghargaan seperti itu enggak.
- Rz : Itu bagaimana keinginan dari pegawai sendiri untuk mendapatkan penghargaan itu, apakah ada seperti perasaan berlomba-lomba ya dalam arti baik untuk mendapatkan itu, jadi itu bisa jadi pemicu sebagai meningkatkan kemampuannya.
- P : Kalau itu kayaknya harus pakai kuesioner sendiri, disebarkan ke setiap auditor, kalau saya jawab *nanti* saya subjektif, kalau saya jawab saya termasuk orang yang tidak terlalu termotivasi untuk mendapatkan penghargaan jadi kalau apa biasa aja kalau menurut saya, tapi kalau pegawai lain kan saya tidak bisa berpikiran untuk

- pegawai lain, jadi sepertinya kalau mau data itu, bagi kuesioner aja.
- Rz : Itu apa ibu pipit sendiri tidak melihat di lingkungan sesama auditor gitu kelihatan kayak berlomba-lomba mendapatkan penghargaan seperti itu?
- P : Saya tidak bisa menilai,
- Rz : Biasanya kan terasa itu hawa-hawa perlombaan, ingin mengejar prestasi itu, dalam suatu unit pekerja biasanya, ibu sendiri apa ada merasakan hal-hal seperti itu bu?
- P : Kalau saya kan bisa lihatnya cuma dari satu bidang saya ya, kalau kami sih sebenarnya gak terlalu, ini saya pribadi lagi ya gak bisa kami ya, saya pribadi sih yang penting itu saya bisa melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya, penghargaan itu urusan belakangan, kalau dihargai alhamdulillah, kalau enggak yang penting kerjaan saya itu sudah sesuai sama yang diharapkan, sudah sesuai sama standar, tidak menyimpang dari apa yang sedang saya kerjakan, itu aja sih, kalau penghargaan sih urusan belakangan, sebenarnya saya sebagai pegawai saya diberi ketugasan saya melakukan sebaik yang saya bisa sesuai dengan aturan, sesuai dengan yang diharapkan ketika diberi tugas itu aja sih mas.
- Rz : Dari bu heri ada tanggapan terkait?
- H : Udah
- P : Soalnya saya mungkin sering kali tidak memenuhi ekspektasi bu heri ya sebagai anak buahnya.
- Rz : Tujuannya untuk itu ya pengembangan kompetensi, mungkin itu dulu bu wawancara yang bisa saya lakukan untuk hari ini, dan mudah-mudahan dapat banyak manfaat saya dari wawancara hari ini dan untuk selanjutnya mungkin tadi ya dokumen-dokumen bisa saya ajukan, minta ke bu puji ya yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi
- P : Iya, kaitannya untuk pengiriman diklat yang lain-lain itu bisa membuat sebagai data pendukung, itu kepegawaian yang punya mas, jadi siapa aja yang dikirim itu kepegawaian yang pasti punya datanya.
- Rz : Itu apa hardfile
- P : Coba *nanti* langsung dengan Mba Virgo aja.
- Rz : Mungkin untuk siang hari ini sampai sini aja bu, alhamdulillah sudah lumayan banyak yang saya dapat wawasan dan insight terkait topik skripsi yang saya angkat, terima kasih atas waktunya bu pipit dan bu heri,
- H P : Sama-sama
- Rz : Mohon maaf mengganggu waktunya
- P : Semoga membantu ya, kualitatif ini berarti ya mas
- Rz : Iya, ibu alumni mana bu?
- P : Saya ugm, saya hukum, ini akuntansi ya?
- Rz : Ibu hukum?
- P : Saya hukum.
- Rz : Bu *nanti* saya ingin ketemu langsung kalau ada bu virgo nya
- P : Oh nggih kesana saja monggo
- Rz : Terima kasih atas waktunya bu heri dan bu pipit.
- H : Nggeeh
- P : Semoga lancar skripsinya. Saya carikan mba virgo.
- Rz : Aamiin



Lampiran 5 Wawancara Ibu Ngatiyah (28 Juli 2023)

Narasumber /Jabatan : Ibu Ngatiyah, S.H. / Auditor Muda  
Usia : 45-49 Tahun  
Lama Bekerja : 28 Tahun  
Waktu : Jumat, 28 Juli 2023, 13.30 WIB  
Lokasi : Inspektorat Kabupaten Sleman  
Durasi : 48 Menit 37 Detik  
Keterangan : “Rz” adalah Pewawancara/Peneliti  
Transkrip “G” adalah Ibu Ngatiyah

- Rz Ini pertama kali bu, inspektorat ini apa ada melakukan ini bu kegiatan kayak pencegahan, terus pendeteksian, sama investigasi *fraud*? Ada ya bu ya inspektorat melakukan itu?
- G Ada, iya
- Rz Terus kalau macam-macam *fraud* yang terjadi di sekitar pemerintahan kabupaten Sleman ini apa aja bu contohnya? Macam-macam *fraud* nya
- G Itu kemarin yang udah, yang udah ya, yang udah itu kayak ini kalau *fraud* ini kemarin ada yang penyalahgunaan dana yang sampai kejaksaan juga ya, kan itu tahun 2020 atau 2021 ya itu, itu sampai di vonis di kejaksaan juga. Terus ada yang biasanya sih yang masuk ke APH APH itu ya *fraud* nya yang terjadi disini ada juga yang kasus-kasus di DPU itu juga, kalau itu untuk penindakannya ya, kalau untuk pencegahannya sih kita macam-macam ya, ada sosialisasi-sosialisasi juga, ada UPG, ada apa itu.
- Rz Kalau dari macam-macam *fraud*nya dulu aja bu apa aja bu yang pernah di tangani oleh inspektorat?
- G Yang itu tadi yang penyalahgunaan dana, jadi penyalahgunaan dana dd, terus sama yang *fraud* nya itu arahnya ke korupsi sih sini kalau kebanyakan, sama itu yang kemarin yang ada kasus di DPU itu. Mungkin kalau udah yang sudah di APH itu yang udah kita pastikan udah *fraud* ya, kalau yang belum itu ya memang baru indikasi sih, belum terjadi *fraud* gitu.
- Rz Hmm, kayak gratifikasi?
- G Gratifikasi selama ini sudah ada sarana tersendiri, kalau ada gratifikasi akan dilaporkan kayak gitu sudah ada sih, tapi belum semuanya ini juga sih, belum semuanya melapor, mungkin ya. Terus kalau gratifikasi kan ada gratifikasi yang diperbolehkan ada yang enggak, ya yang itu yang dilaporkan. Kemarin banyak yang dilaporkan sih terutama kalau hari raya itu, tapi kesini-kesini akhirnya sekarang hampir sudah gak ada sih gratifikasi karna kita udah kesadaran ya kita udah sering sosialisasi kayak gitu jadi kita sudah jarang ada gratifikasi sekarang, makanya gak ada yang lapor karna memang gak ada nggih kayak dalam pbj, dalam apa itu gak seperti itu sih
- Rz Kalau kayak untuk money laundering bu dan penggelapan aset ada bu?
- G Kalau penggelapan aset itu yang saya tau sih gak ada ya, cuman yang kasus belum lama itu yang sampai ke media massa itu, cuman yang penjualan bongkaran itu loh, jadikan ada bangunan di bongkar terus dijual gitu ada, tapi kalau penggelapan aset sih enggak ada setau saya
- Rz Iya iya, jadi secara umum tadi yang berpotensi atau yang sudah terjadi apa tadi bu? Oh keuangan
- G Biasanya di keuangannya sih, di pengelolaan keuangan, kalau aset aset kayak gitu enggak sih, soalnya aset juga kita pantau terus, kalau misalnya ada kehilangan aset itu kita telusuri, kan kalau inspektorat kan tugasnya memang sampai disitu juga ya, kalau ada aset yang

hilang kita telusuri ada unsur kelalaian gak? Seperti apa kayak gitu? Trus kita juga punya aplikasi SIM aset itu untuk menginventarisasi semua aset, jadi sudah diantisipasi sih kalau aset-asetnya sendiri

Rz Oh ya baik bu, lalu ini ini saya informasi yang saya butuhkan itu berkisaran tahun 2020 bu sampai sekarang

G Oh 2020 ya, iya

Rz Jadi semenjak pergantian bupati kabupaten Sleman terhitungnya, jadi untuk yang kedua itu gimana bu mekanisme pencegahan *fraud* yang dilakukan?

G Kalau pencegahan di kita sering, kan sekarang ada mcb kpk juga ya, mcb kpk itu kan disitu kan banyak banget program-programnya dari KPK baik untuk pencegahannya, terutama untuk pencegahan ya, itu kan ada disitu ada UPG ada apa macem-macem lah, terus ada sosialisasi terus *nanti* itu kita sosialisasi ke masing-masing OPD *nanti* OPD juga di masing-masing itu sosialisasi ke masing-masing pegawai juga untuk gratifikasi, untuk macem-macem lah. Terus ada untuk pembuatan, untuk pengendalian risiko di masing-masing instansi itu ada juga

Rz Itu termasuk pencegahan juga bu?

G Hm em itu termasuk pencegahan juga ya, jadi macam macam gitu, terus kita juga di inspektorat sering juga diminta untuk menjadi narasumbernya, ini beberapa di tempatnya bu puji itu kan sosialisasi sampai ke kelurahan juga, *nanti* diharapkan semuanya juga sudah mengetahui sih seperti apa yang dimaksud gratifikasi, korupsi gini-gini mereka bisa *antisipasi* seperti itu

Rz Kalau kayak ini bu, membagi selebaran, menerbitkan surat edaran saat hari saya itu sejak tahun 2020 bu?

G He em, setiap mau hari raya kita kan ada edaran tu tidak menerima gratifikasi tidak menerima gratifikasi apa-apa itu ada sih, terus di kantor-kantor di depan itu ada banner ya, kami melayani tidak gratifikasi seperti yang di inspektorat *nanti* mungkin bisa di foto ya

Rz Itu baru ya bu? Soalnya sebelumnya saya gak perhatiin

G Kayaknya udah agak lama deh, mungkin dulu cuma tempelan sekarang dibuat kayak banner-banner gitu biar lebih kelihatan kan, kalau dulu sih bentuknya aja yang lain ya, kayak di kelurahan itu sudah kayak tidak menerima pungutan kalau untuk pelayanan apapun itu sudah dipasang itu, di kecamatan di kelurahan seperti itu. Itu salah satu pencegahan biar masyarakat tau kalau memang kami memberikan layanan sudah gratis gitu loh gak ada gratifikasi gak ada apa seperti itu. Terutama di pelayanan-pelayanan umum seperti yang mpp itu dpmpstsp itu yang perizinan sama yang catatan sipil itu di pasang di depan semua kayak gitu untuk pencegahannya.

Rz Kalau untuk ini bu mendampingi perangkat desa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya termasuk bisa mencegah *fraud* gak bu pendampingan itu?

G Bisa juga sih. Mereka kan misalnya ya mau pengadaan barang jasa atau mau pengadaan tanah kas desa kan mereka juga konsultasi dulu ke kami nggih seperti apa *nanti* biar gak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya seperti itu.

Rz Baik bu, kalau pendeteksian *fraud* nya itu seperti apa bu yang dilakukan oleh inspektorat?

G Kalau deteksi *fraud* itu kita kan ada pemeriksaan seperti itu, *nanti* kan kita lihat bukti, misalkan pengadaan ini bukti per tanggung jawabannya seperti ini, kan kita ya, terus *nanti* kita konfirmasi ke pihak ketiga kalau sudah bener apa belum kayak gitu *nanti* ada temuan-temuan yang harus ditindak lanjuti dan di evaluasi seperti itu, deteksinya dari situ sih kalau kita, di OPD juga kita periksa, *nanti* ada penyimpangan-penyimpangan kan kelihatan dari hasil pemeriksaan kami seperti itu ya

Rz Itu dalam pas mendeteksi itu juga cara mengidentifikasi potensi *fraud* nya itu bagaimana

bu?

- G Kalau kami itu mungkin karena sudah lama memeriksa ya jadi kan kami tau juga ya kalau ini disitu ada penyimpangan atau enggak kayak gitu kan sudah disamping feeling juga ya, disamping feeling kita juga lihat administrasi ini lah, administrasinya jadi beres, terus kita konfirmasi. Kalau administrasinya amburadul kita konfirmasi kok ternyata ini berarti ada sesuatu nih disini kayak gitu, cenderung seperti itu kalau kita.
- Rz Iya iya, kemudian ini bu lanjut kalau mekanisme investigasi *fraud* yang dilakukan itu seperti apa? Tahapan-tahapannya itu dan prosedurnya
- G Kalau investigasi itu gini kami itu kan, kalau saya sendiri pernah menangani yang sampai di putusan tipikor ya, pengadilan tipikor ya, itu dulu kan jadi itu permasalahan ada BPKP masuk untuk kelurahannya terus ada temuan dari BPKP setelah itu sampai ke APH, terus APH meminta kami untuk penghitungan kerugian negara nya. Terus akhirnya dipakai APH ke pengadilan, seperti itu sih, APH jadi APH kan sering meminta laporan hasil pemeriksaan kami ya, diminta, terus *nanti* didalami, kalau ada penyimpangan disitu baru koordinasi dengan kami lagi untuk menghitung kerugian negaranya, kalau karena mereka juga gak berhak ya menghitung kerugian ya, harus dari auditor atau bpkp, bpk maupun inspektorat.
- Rz Oh gitu, lalu untuk penanganan kasusnya seperti apa bu tindak lanjutnya misalnya udah terbukti *fraud*
- G Yang kayak itu kemarin sih udah di vonis APH terus akhirnya kan lurah nya ini di penjara terus non aktif, udah di berhentikan ya kemarin sama PMK itu terus selanjutnya kita sih pendampingan ya ke kalurahan itu terus mereka juga lebih hati-hati sih setelah ada kasus seperti itu, apapun mereka konsultasi ke kita biar gak terjadi lagi seperti itu, disamping kelurahan kelurahan yang lain itu juga karna udah ada kasus seperti itu mereka lebih hati-hati. Cuma kalau untuk permasalahan yang tanah kas desa ini kan kami gak anu ya, tanah kas desa kan punya nya provinsi jadi yang inspektorat provinsi sih yang kemarin penghitungan kerugiannya tapi lokasinya memang banyak di sleman ya yang kasus kemarin itu
- Rz Kalau untuk konsultasi tadi itu bu, itu ternasuk bisa mencegah *fraud* bu?
- G Bisa, karena mereka gini ya mau seperti ini langkahnya seperti apa yang bener, kayak gitu kan diharapkan mereka juga jadi tau prosesedurnya seperti apa, usaha yang harus dilakukan bagaimana jadi itu kan gak, diharapkan sih gak membuka peluang untuk melakukan *fraud* seperti itu nggeh disamping pemeriksaan pemeriksaan kami yang sudah ada itu
- Rz Iya, iya berarti kalau yang investigasi tadi itu lebih ke ini ya bu ya kayak dari APH itu minta memeriksa
- G Hm em
- Rz Kayak apa itu polisi aja atau?
- G Kejaksaaan bisa, kebanyakan malah kejaksaaan. Kejaksaaan kan misalnya ada aduan masyarakat ya, pengaduan masyarakat terus mereka itu nanya ke kami lah ini kondisinya seperti apa akhirnya kami periksa terus hasilnya seperti ini lah *nanti* itu dari kejaksaaan kan penyelidikan dulu ya bisa dilanjut penyidikan atau enggak itu *nanti* kejaksaaannya sih
- Rz Yang melakukan penyidikan tadi inspektorat atau kejaksaaan?
- G Kejaksaaan kalau penyidikan iya, kan kalau penyelidikan penyidikan APH ya, bedanya kalau penyelidikan masih indikasi sih, kalau penyidikan sudah ada perbuatan melawan hukumnya, sudah ada tersangkanya itu kalau naik penyidikan, tapi kalau enggak *nanti* cuman paling sampai penyelidikan aja gitu.
- Rz Oh gitu, baik bu ini mungkin langsung ke rumusan masalah yang kedua tentang pengembangan kompetensi, itu apa aja bu pengembangan kompetensi SDM yang berkaitan

- dengan *antifraud* di inspektorat bu?
- G Diklat-diklat ya, kemarin belum lama juga saya sama bu heri itu diklat audit investigasi terus ada diklat PPKN kayak gitu terus *nanti* sosialisasi-sosialisasi itu disamping kita memberi kita dapat juga dari KPK ya, terus dari yang MCB itu juga mcb dari KPK itu kan banyak sekali indikator-indikatornya harus dipenuhi pemda ya itu kan diharapkan dapat mencegah *fraud* itu juga karna disitu banyak sekali laporan-laporan yang seperti apa sudah dilakukan oleh pemda terkait dengan pencegahannya, penindakannya, maupun itu.
- Rz Selain diklat tadi bu, apa aja bu untuk program pengembangan kompetensi SDM inspektorat ini bu?
- G Selain itu pelatihan kantor sendiri ada juga di kami ya, jadi misalnya kami itu mau meningkatkan kompetensi dengan PKS misalnya kami mau ada pemeriksaan, pemeriksaan tentang apa gitu kita mengundang narasumber tentang itu, misalnya tentang ppj kayak gitu, ngundang narasumbernya dari UII juga kemarin, terus *nanti* tentang apa lagi gitu, jadi PKS terus diklat itu, kita banyaknya kesitu sih ya
- Rz Kayak e-learning?
- G He eh, e-learning juga sih, terus kita ikut zoom-zoom apapun, kan banyak sekali itu kita zoom-zoom kayak gitu ya, itu kan salah satu pengembangan komperensi SDM. KPK itu rutin juga sih mengadakan Zoom macem-macem kayak gitu tema nya macem-macem ya
- Rz Itu untuk APIP banyak bu?
- G Hm em, untuk umum ada juga, untuk APIP ada juga, terus kita seminar-seminar itu ikut juga, webinar, seminar kayak gitu. Kita memang dianggarkan ya, di kantor juga seminar-seminar kemana, kalau enggak ya webinar-webinar, kalau sekarang ya seringnya webinar-webinar. Kalau dulu ya harus seminar datang masih kalau sekarang enggak
- Rz Kalau untuk ini workshop?
- G Workshop sih kita ada juga sih program dari kita beberapa tahun yang lalu misalnya workshop keuangan di UGM kayak gitu, jadi *nanti* kita kerja sama dengan sana kita yang kesana gitu ya, terus ada juga kita mengikuti workshop-workshop yang diadakan oleh pihak ketiga lah kayak gitu, kemarin kayak belum lama workshopnya bpkp kayak gitu terus disamping itu ya kayak diklat teknis tadi bpkp ada juga, bpk itu juga.
- Rz Hm em, kalau untuk pendampingan ahli ada bu?
- G Pendampingan ahli ada
- Rz Itu juga bisa meningkatkan kompetensi?
- G Jadi kan kalau pendampingan ahli itu yang misalnya untuk pemeriksaan gedung kan walaupun kami punya Sarjana Teknik tapi kan ya karna kami SDM nya gak banyak, padahal kami meriksanya beberapa tim itu pakai ahli di luar juga. Terus kayak uji lab itu juga pakai UII juga kan kita kerja sama dengan UII uji lab nya, terus disamping itu kita sama BPKP juga minta BPKP untuk pendampingan yang memang benar-bener membutuhkan ahli disamping yang uii itu
- Rz Itu membantu ya bu ya untuk pengembangan komptensi itu?
- G Hm em
- Rz Pas bertugas misalnya untuuk mendeteksi *fraud*
- G He eh kita kan juga belajar dari mereka juga ya, oh seperti ini, seperti ini kayak gitu kan jadi kita bisa sih walaupun gak se ahli mereka, paling tidak sedikit-sedikit kita bisa belajar.
- Rz Lalu untuk sertifikasi ini bu penyuluh *anti* korupsi
- G Sini kayaknya baru ada satu apa ya, bu tintin itu
- Rz Kalau pegawai lainnya apa ada mengikuti?
- G Kemarin diklatnya banyak yang mengikuti yang sampai mendapat sertifikasi penyuluhnya itu baru, karna mungkin ini ya kesibukannya yang lain jadi mereka juga ini sih kalau jadi

penyuluh itu kan harus pakai angka kredit ini juga kan mereka juga jadi belum ke sana sih, tapi yang diklat juga ada sih diklat penyuluh korupsi itu, sementara yang sudah sertifikasi itu baru bu tintin terus sekarang sering penyuluhan kemana-mana juga sih seperti itu

- Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya
- G Itu sih saling berhubungan ya mas ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi *fraud* nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada *fraud* lah disini kayak gitu.
- Rz Baik bu, apakah ada program pengembangan kompetensi lainnya selain program-program yang mungkin udah dibentuk kayak diklat, e-learning, PKS, workshop, seminar atau sertifikasi penyuluh, itu apa ada program yang dilakukan dari kantor atau dari pegawainya sendiri?
- G Sepertinya itu sih sudah komplit ya apalagi ya
- Rz Baik-baik bu, terus bu apakah program pengembangan kompetensi lainnya yang tidak secara khusus mengarah ke *antifraud* itu membantu meningkatkan kompetensi pegawai inspektorat dalam kegiatan *antifraud*? Apa bisa meningkatkan kemampuan *antifraud*?
- G Maksudnya yang diluar *fraud* tapi bisa menunjang *fraud* gak? Gitu ya?, kalau aku sih bisa juga sih, kan misalnya pengembangan kompetensi kita mendapat sosialisasi tentang kesehatan lah kayak gitu ya, tentang kesehatan, tentang TIK, tentang apa padahal kita kan meriksanya itu kita nyari *fraud*nya di masing-masing opd dibanyak opd yang memang kayak misalnya kita ke rumah sakit kita butuh juga ilmu kesehatan kan jadi menunjang juga ya mas ya misalnya kita sosialisasi atau dapat sosialisasi kesehatan tentang ini, ini, ini terus kita ke rumah sakit gitu meriksa itu kan *nanti* bisa dipakai lah gitu, terus misalnya tentang teknologi informasi kita ke kominfo disitu ada aplikasi-aplikasi apa yang kita gak tau, karna kita tadi sudah workshop apa diklat ini kan bisa menunjang kesitu soalnya saking luasnya cakupan kita ya, jadi semuanya bisa masuk, kan kalau auditor kan mau dituntut tau segala hal karena kita memang obrik nya, objek pemeriksaannya kan banyak, cakupannya kan banyak ya memang harus tau macem-macem makanya ilmu apapun kita bisa pakai tau untuk itu.
- Rz Hmm baik-baik, kalau untuk partisipasinya sendiri dari pegawai terhadap program-program tadi itu bagaimana?
- G Kalau kami memang anu sih sangat antusias ya, terutama untuk diklat, untuk apa itu, terus sekarang kan memang dari kepegawaian di pemda sini juga mensyaratkan ya untuk pengembangan kompetensi tiap pegawai. Kalau di auditor itu harus memenuhi setahunnya harus 120 JPL jam pelajaran, berarti kita memang harus meningkatkan kompetensi kita, soalnya harus lapor kan lewat aplikasi itu 120 JPL itu harus terpenuhi, kan 1 JPL nya 45 menit ya, berarti 45 menit kalikan 120 berarti berapa ya setahun itu. Jadi disamping tuntutan itu kita memang butuh ilmunya juga sih, jadi memang dari bpkp sini mensyaratkan seperti itu
- Rz Kalau dukungan dari internal dan eksternal sendiri bagaimana bu terkait anggaran sarana dan prasarana terkait pengembangan kompetensi apakah mendukung?
- G Kalau itu sih kalau misalkan diklat itu memang keterbatasan ini juga sih anggaran, karna anggarannya itu kan masih dipegang bkpp ya kepegawaian pemda ya, gak di inspektorat sendiri, jadi disana itu kan hanya ada anggaran untuk struktural sama fungsional ya, fungsional itu auditor masuk ke anggaran diklatnya fungsional ya, ke anggaran fungsional, padahal anggaran fungsional di pemda itu kan banyak ya. Karena keterbatasan anggaran ya

kami datang diklatnya jadi cuman sedikit itu. Sebenarnya sih kalau pada diklat itu seneng juga sih karena kok jadi lebih pintar lah ya cuman karena keterbatasan itu jadi ya. Kan fungsionalnya ada pustakawan ada pertanian ada apa itu kan jadi satu semua anggarannya jadi gak bisa kami terus minta banyak kayak gitu karena dibagi-bagi sama yang lain ya, kalau enak sih anggaran diklat seperti itu di kami sendiri, kantor kami sendiri kayak gitu enak, jadi lebih ini sih orangnya jadi lebih kayak di gunung kidul lah satu itu auditor itu dijatah minimal satu kali diklat kayak gitu, kami gak bisa sih, karna memang keterbatasan anggaran itu, semuanya masih menjadi satu disana, jadi kita gak bisa memploting anggarannya besar misalnya khusus inspektorat kayak gitu. Tapi kalau kayak yang webinar yang gratis-gratis kita selalu ikut, kan seneng toh pengetahuan kita tambah gak pakai anggaran gitu kan, maka kan antusiasnya disitu

Rz Iya bu, lanjut bu ini terkait kendala dan kekurangan pengembangan kompetensi bu, tadi kan fokusnya dari tahun 2020 sampai tahun sekarang ya bu ya, apa aja bu biasanya kendala yang menghambat pengembangan kompetensi sumber daya manusia di inspektorat

G Kendalanya ya satu itu tadi anggaran ya kedua itu kalau, terutama sih anggaran, kalau yang lain sebenarnya ya mungkin karena ini juga sih banyak karna kami banyak pekerjaan yang mandatory yang dari pusat itu banyak sekali disamping kami punya program pemeriksaan sendiri jadi karna waktu itu jadi kita membagi waktunya juga susah, pinginnya kita berkembang tapi karena surat tugas banyak kadang kita gak ada waktu juga ya untuk seperti itu, untuk mengikuti. Jadi ya itu tadi anggaran sama kita waktunya aja enggak karena kita kan SDMnya juga kurang ya jadi kan kadang pemeriksaannya banyak kita yang sedikit jadi kita memang itu waktunya kurang, kadang gimana ya. Misalnya kemarin kita satu tim itu Cuma tiga orang aja dapat berapa OPD kayak gitu jadi tadi keterbatasan waktu sama anggaran itu yang kendalanya, padahal kita udah juga lembur-lembur juga sih kalau di rumah kayak gitu, tapi karna banyak pekerjaan. Kalau di Inspektorat kabupaten kan seperti itu mas, jadi kan memang ada tugas-tugas mandatory yang banyak sekali dari KPK lah dari Kementrian Dalam Negeri dari Menpan mana mana kayak gitu disamping kita punya program sendiri yang harus dilaksanakan kalau di BPK sama BPKP kan enggak ya karena mereka gak ada mandatory ya, jadi beda ya APIP nya sini sama APIP nya BPKP lah seperti itu kita, hampir disetiap inspektorat sih kendalanya sama seperti itu SDM nya sedikit pekerjaannya banyak nggih, padahal kalau kayak di kami itu misalnya ada pegawai harian lepas gitu aja kan gak bisa masuk ke auditor ya karena memang banyak hal-hal yang gak bisa diketahui banyak orang. Jadi memang kalau di OPD lain kan banyak tu PHL PHL jadi pekerjaannya dibantu kayak gitu, sekarang kan ini ya penerimaan pegawai juga sedikit juga ya, terus jadi kan terbatas padahal objek pemeriksaannya sama yang dulu itu lebih banyak, pekerjaannya lebih banyak dengan SDM yang sedikit gitu kan jadi kita kadang gak mampu

Rz Baik baik, kalau untuk ini bu, kreatifitas auditornya bagaimana untuk mencari program-program sendiri dalam pengembangan kompetensinya

G Kalau kreatifitas sih ya kami memang ini sih disamping keterbatasan waktu itu tadi, kita juga kurang ini sih jadi kurang bisa, tapi ada juga sih kayak ini seperti nulis buku ada yang tapi itu butuh keahlian khusus gak semua orang ya sebenarnya pengen sih kreatif gitu, tapi karena keterbatasan kompetensi masing masing beda-beda ya

Rz Kalau kesempatan untuk mengikuti diklat bagaimana bu?

G Kalau kesempatan sih ini sih semuanya pengen, Cuma karena keterbatasan anggaran jadi gak bisa semua, kayak kemarin yang diklat investigasi cuman dua orang yang dikirim, karena memang biayanya lumayan juga ya sekali diklat kadang sampai lima juta berapa kayak gitu kan, jadi memang yang dikirim gak bisa semuanya, jadi harapannya memang yang dikirim *nanti* bisa inilah kita kan ada pelatihan kantor sendiri, mungkin disampaikan

disitu lah, kalau gak materinya disampaikan ke temen-temen biar semuanya tau juga kayak gitu, selama ini kita seperti itu sih kalau memang gak bisa ikut diklat semua, yang diklat itu yang anu temen-temennya lah itu. Kalau diklat kan disini ada diklat sertifikasi, diklat fungsional sendiri sama diklat teknis ya, kalau yang sertifikasi sih karna tuntunan peran jadi memang harus diklat sih seperti itu jadi misalnya kayak auditor itu ada bentuk tim ada ketua tim, ada pengendali teknis ya itu masing-masing kalau naik peran gitu harus diklat memang, harus lulus, harus diklat dan harus lulus seperti itu

Rz Oh iya, kalau ini bu, tadi kendala-kendala itu apa semuanya berkaitan bu terkait pengembangan kompetensi yang *antifraud* tadi, apa itu mempengaruhi?

G Pengaruh juga sih, kalau misalnya kita lebih kompeten gitu kan lebih ini ya lebih bisa mendeteksi *fraud* lah lebih ini ya karna tidak semua, kompetensinya beda-beda nggih jadi kita keterbatasan juga dalam mendeteksi *fraud*. Maksudnya gini ya gak semuanya terus langsung tau gitu loh tapi lama-lama sih dengan pengalaman kita-kita tau juga sih. Terus dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang sudah ada seperti itu kita jadi pengalaman ya, kalau seperti ini berarti *fraud* nya disini kayak gitu bisa ini sih emang

Rz Hmm, kalau untuk ini bu mengikuti perkembangan digital bagaimana bu?

G Kalau itu sih anu kita memang walaupun banyak yang, kalau yang muda-muda sih gak masalah ya kalau yang udah tua kayak aku itu sih tetap berusaha mengikuti sih karena sekarang semuanya udah banyak aplikasi tapi tetap mau belajar sih dari temen-temennya dari yang muda dari yang apa kayak gitu, kalau keinginan belajar sih masih ada ya tapi kebanyakan dari kita sih udah ini bisa mengikuti lah sampai dengan sekarang itu masih bisa mengikuti masih ini lah keinginan belajarnya ada walaupun semua pakai aplikasi tetep kita berusaha kesitu asalkan gak terlalu rumit-rumit sih. Tapi selama ini kalau pemeriksaan masih ini sih masih bisa lah itu

Rz Lalu untuk kekurangan dan kendala dalam pengembangan kompetensi itu khususnya terkait *antifraud* itu menurut ibu apa aja bu kekurangannya?

G Maksudnya kekurangan dengan dengan kendala apa ya tadi ya hampir sama ya?

Rz Kalau kendala ini menghambat proses berlangsungnya kalau kekurangan masih ada yang perlu di perbaiki?

G Masukan ya berarti ya

Rz Iya tapi lebih ke mau tau aja bu kekurangannya

G Ke internal gitu ya

Rz Kekurangannya terkait programnya atau terkait masing-masing programnya tadi?

G Kalau aku sih ya itu tadi ya, kalau kayak kayak kami di auditor itu kan memang kayaknya seperti garda terdepan dalam pencegahan *fraud*, dalam penindakan dalam apa itu loh, jadi memang harus banyak diini sih SDMnya itu banyak ditingkatkan, jadi misalnya dengan diklat dengan apa itu tadi makanya kayak sebenarnya sih sudah ada ya kayak mcb KPK itu yang menyarankan kalau inspektorat itu anggarannya itu paling enggak 0,5 dari APBD,, tapi karna standar harga disini itu kecil kita gak bisa buat kegiatan yang bisa menyerap anggaran seperti itu, terus anggaran itu juga terbatas hanya untuk poin-poin yang di boleh APBD ya di jumlah APBD nya kalau diluar itu kan gak boleh padahal kita memang sebenarnya banyak sekali ini sih butuh anggaran yang salah satunya untuk pengembangan kompetensi itu, jadi kekurangannya ya menambah-nambah anggaran itu tadi ya, penambahan sarprasnya juga, kayak sekarang itu sarprasnya memang kurang sekali sih tak akui maksudnya kalau kayak kita lebih ini kan lebih enak gitu loh jadi kita dalam melangkah itu kan enak sarprasnya terpenuhi apa disini kayak mobil aja kan ya kurang gitu loh operasional gitu kan, jadi kalau bisa itu sih

Rz Kurang banyak itu bu?

- G Kurang banyak kan, mobilnya kan cuman kan empat bidang ya, itu aja melekat di irbadnya ya mobilnya satu, padahal satu bidang itu paling enggak dua tim, tapi kalau pemeriksaannya beda-beda kita udah bingung, itu tadi karna aturannya seperti itu karena mobil itu aturannya harus melekat di pejabatnya gitu jadi bingung kita gak bisa kan satu bidang itu dua mobil gitu, padahal timnya kan seperti itu kita, jadi kadang-kadang sarprasnya kurang jadi kita gak makmisa lah dalam ini nya pemeriksaannya
- Rz Kalau terkait ini bu, komunikasi untuk memberitahu informasi pengembangan kompetensi bagaimana bu? Selama ini lancar-lancar saja atau ada mis
- G Selama ini sih lancar-lancar saja, cuman ya karna keterbatasan anggaran walaupun kita tau kita gak bisa kan oh aku pengen ini pengen ini gitu, pengen diklat ini pengen diklat ini kan gak bisa ya, dan harus giliran lah kan gitu
- Rz Lalu bagaimana bu evaluasi dari program-program itu?
- G Kita sih udah sering ini sih udah sering ngasih masukan-masukan ya kayak kaitan dengan kendala-kendala kita misalnya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari kayak gitu kayak ke kantor sendiri atau ke bkpp sudah seperti itu sih ya udah ada sebagian yang ditindak lanjuti ya juga ada yang belum, ya kalau bisa sih harapannya masih ini sih masih apa ya, kalau ditindak lanjuti semuanya kan kita enak juga ya, ya kita gak muluk-muluk sih yang penting ini aja kerjaan lancar gitu aja yang dapat menunjang kesitu gitu, ini jadinya malah curhat ya hehe, tapi harapannya seperti itu ya, kalau semuanya terpenuhi kan lancar ya kerjanya, apalagi mendukung juga kan program-programnya *nanti* yang dilaksanakan itu
- Rz Kalau untuk ini bu, tadi langkah-langkah konkret apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi kendala itu, ini kembali dari tahun 2020 sampai sekarang
- G Itu kendala-kendala yang tadi itu ya?
- Rz Hm em, apa aja yang sudah dilakukan?
- G Kita sudah ini sih, misalnya kekurangan SDM ya, kekurangan SDM itu kita sudah kemarin itu banyak minta pegawai-pegawai pindahan kayak kami kan kurang tenaga teknik ya teknik itu kemarin udah banyak pindahan dari DPU dimasukkan kesini terus *nanti* kalau yang kurang kurang yang lainnya itu sudah dalam usulan usulan juga sih, kalau yang SDM yang ditambah itu baru tahun berapa ya 2021 kemarin itu udah lumayan sih nambah pegawai kayak gitu, jadi kita sih harapannyaimbang antara OPD yang diperiksa dengan auditor yang ada seperti itu loh, biar kita kerjanya juga jadi bisa maksimal lah
- Rz Kalau terkait ini bu langkah yang udah dilakukan untuk mengatasi kendala volume pekerjaan yang banyak tadi apa aja bu?
- G Ya itu tadi kita terus kebanyakan terus kita jadi lembur-lembur seperti itu terus kita juga pakai ini juga sih kalau bisa pakai aplikasi-aplikasi seperti itu lah kayak evaluasi LKJIP itu kemarin kita manual-manual maksudnya manual excel sih excel manual terus kita buat aplikasi biar kita lebih cepet lebih memudahkan seperti itu.
- Rz Kalau itu kaitannya sama pengembangan kompetensi berarti dengan adanya digital-digital tadi itu bu sama yang kurang SDM dengan adanya pindahan, itu apa dengan itu pekerjaan jadi lebih terorganisasi itu atau apakah membuat ada waktu untuk yang tadi pengembangan kompetensi setelah itu, apa masih ada?
- G Sebenarnya gini anu sudah mengurangi sih, karna volume pekerjaan kita juga banyak terus kita juga tambah SDM ini, kita masih bisa sih walaupun kadang kita zoom kayak gitu sambil fokus zoom tapi ngerjain yang lain kayak gitu sering juga sih kayak gitu, tapi sudah ini sih lumayan ada waktu lah gitu
- Rz Baik bu, kalau ini untuk bagaimana inspektorat memberikan masukan terkait kendala dan kekurangan terkait program-program dari luar atau yang dari dalam sendiri bu?
- G Itu pengembangan kompetensi yang untuk auditor disini apa untuk yang instansi luar?



- Rz Untuk pengembangan kompetensi pegawai yang dari luar kayak tadi kan ada kayak workshop, seminar, pendampingan ahli, terus ada diklat itu bagaimana bu?
- G Jadi masukan inspektorat untuk itu gitu ya?
- Rz Pengembangan kompetensinya disini apa ada ide-ide atau masukan terkait kendala dan kekurangan?
- G Untuk orang luar gitu ya? Kita sering juga sih kalau misalnya kita pengen maksudnya gini kita pengen materi sesuatu maksudnya kayak gitu ya materi tentang apa yang belum kita ketahui kita sering juga sih disamping kita cari narasumber dari luar tentang materi apa yang kita minta itu, kita kerja sama lah sama luar itu, kita pengennya diklat ini loh kayak gitu kalau kita kalau ada anggaran dikita, kalau enggak ya kita ikuti aja diklat yang kita adakan di luar atau workshop-workshop apa berkaitan tentang gitu
- Rz Kalau menurut ibu kira kira apa yang perlu ditingkatkan lagi terkait pengembangan kompetensi bu khususnya yang berkaitan dengan *antifraud*?
- G Kalau itu sih anu ya, jadi diharapkan semua auditor sudah ini sih sudah menguasai yang pengembangan kompetensi, sudah menguasai banyak permasalahan gitu loh mas, jadi *nanti* kan kalau kita sosialisasi, kalau kita dimintai narasumber, dimintai sama orang luar kita juga sudah bisa gitu loh. Tapi selama ini kita keterbatasan macem-macem lah belum semuanya kompeten dalam hal itu gitu
- Rz Jadi yang perlu ditingkatkan lagi kemampuan sosialisasi?
- G Hm em kemampuan SDMnya, ya itu kita itu bingung bagi waktunya bingung gitu ya disamping kita dituntut pekerjaannya juga selesai tepat waktu, hasilnya maksimal kita juga pengembangan kompetensinya juga harus ini juga kayak gitu kan, kadang kita ya itu tadi karna banyaknya pekerjaan kadang kita gak bisa jalan dua-duanya, mengalahkan salah satu ya
- Rz Kalau yang dari ibu ketahui bu apa rencana inspektorat ini bu kedepannya terkait pengembangan kompetensi *antifraud*?
- G Kalau itu sih, kalau kemarin itu yang kemarin itu yang di program yang SPIP, yang SPIP itu kemarin ada salah satu indikatornya untuk OPD OPD luar itu harus ada sosialisasi tentang gratifikasi, tentang korupsi gitu kan, jadi mereka kalau udah sosialisasi itu kan ada nilainya ya disini ya, ada nilainya di SPIP nya
- Rz Yang sosialisasi itu OPD?
- G OPD he eh, OPD ke masing-masing pegawai seperti itu, jadi kita ngasih masukan ke mereka untuk sosialisasi biar mereka tau juga, jadi *nanti* kalau kita anu itu kan, kalau tupoksi itu kan disini ya terus mereka juga disamping itu mereka sudah pengetahuan tentang *fraud* tentang apa itu sudah tau semua gitu loh, diharapkan *nanti* satu pemda ini lah sudah menguasai semua gitu, kemarin sudah awal-awal tahun ini kayaknya sudah banyak sih OPD yang minta narasumber kesini untuk itu, untuk gratifikasi, untuk korupsi macem-macem itu disamping kita yang ke kemarin itu ke tempatnya mba puji itu ke kelurahan-kelurahan untuk sosialisasi juga
- Rz Kalau menurut ibu melibatkan auditor atau pelaksana program kerja itu merumuskan program kerja itu bisa mengatasi ini gak bu kendala yang banyaknya volume pekerjaan tadi bu?
- G Ya ngurangi dikit sih, kalau mengatasi sih belum ya soalnya memang harus ini sih butuh waktu, ada proses yang panjang seperti itu karena misalnya kami kekurangan SDM gitu ya kalau volume pekerjaan banyak gitu kekurangan SDM kan, sebenarnya di kami itu paling enggak ada minimal 40 atau 45 apa auditornya ya, kalau sekarang udah 30 ya auditornya kan enggak bisa langsung kami minta kekurangannya segini langsung dipenuhi kan, jadi Cuma bertahap aja kita ya naiknya bertahap lah gitu

- Rz Kalau untuk ketua timnya mengalokasikan waktu penugasan yang baik itu bagaimana bu pengaruhnya?
- G Kalau ini sih mas, kalau kita kan surat tugas dari sini ya dari bu puji ini ya sekretaris yang buat surat tugas dalam beberapa hari kayak gitu, tapi nani kita gak bisa terpatok jangka waktu disurat tugasnya ya karna kita memang lihat kondisi objek pemeriksaannya juga, kadang kita sampai lewat waktu dari situ, tapi memang modelnya sih sesuai surat tugas, *nanti* laporan cukup selesai, tapi karena banyak hal banyak kendala seperti itu nggih, kadang kami telat juga sih buat laporan seperti itu. Kalau dari ketua tim sih alokasi waktunya sama dengan yang di surat tugas itu. Kalau disini kan waktu pemeriksaan Cuma 10 hari, padahal 10 hari itu kan kita belum dapat jatah apa-apa, terutama kalau di kelurahan ya
- Rz 10 hari bu?
- G 10 hari
- Rz Saya pernah denger teman saya kerja di KAP itu sebulan bu?
- G Itu kalau di bpk itu, bpkp itu 3 bulan satu bulan untuk satu objek pemeriksaan, kalau di kita satu bulan itu kadang tiga surat tugas, tiga obrik, tiga hal yang beda, kita aja bagi fokusnya itu agak bingung, dan di daerah seperti itu sih, di inspektorat manapun kendalanya seperti itu sama, misalnya ya dari kita kelurahan, dari kita udah pindah ke puskesmas itu beda banget ya, dua hal yang beda banget ya
- Rz Ibu ini berarti sebagai ini ya bu ya pelaksana untuk memeriksa-memeriksa
- G Hem em, saya ketua tim ya kalau saya
- Rz Apa harapan ibu terkait pengembangan kompetensi dalam rangka *antifraud* bu?
- G Yang khusus *antifraud* ya
- Rz Iya
- G Kalau saya ini sih lebih di ini lagi, lebih ditingkatkan lagi lah untuk semua auditor biar kita *nanti* mendeteksi *fraud* terus apa itu gampang gitu, masuk ke objek pemeriksaan itu kita langsung tau gitu loh seperti itu sih
- Rz Kalau program-program yang ibu harapkan itu mengikuti program-program seperti apa bu untuk yang *anti fraud*
- G Programnya apa ya kalau diluar, ya kayak itu tadi diklat, pelatihan-pelatihan kayak gitu sih
- Rz Kalau untuk digital forensik bagaimana bu?
- G Digital forensik oke juga sih, kemarin pas audit investigasi disinggung cuman dikit sih digital forensik itu, misalnya kita tau, dikirimin foto ya kita bisa melihat orang itu berada dimana dari foto itu kemarin itu, cuman sedikit sih, kalau itu katanya ada diklatnya sendiri sih, tapi bagus juga itu, sangat mendukunglah kalau digital forensik, jadi kita enggak ini sih, jadi tau itu fotonya diedit apa enggak kayak gitu ya kayak gitu kan digital forensik
- Rz Itu memang terjadi ya yang kayak gitu bu?
- G He eh, kan bisa juga ya, terus misalnya ada file-file surat penting, kayak sekarang masalah kas desa itu kan yang lagi rame itu kan, ada file-file di hp apa di laptop itu, *nanti* di edit-edit itu tau yang asli yang mana yang belum editan itu *nanti* tau kan *nanti* ada tu waktu-waktunya kayak gitu, kalau digital forensik sih asik sih sebetulnya diklatnya kayak gitu lebih ini sih, sangat mendukung itu kalau untuk ini
- Rz Pelatihan digital forensik
- G Itu boleh juga lah untuk mendukung kompetensi *fraud* itu usulan kayak gitu kalau semuanya auditor itu diklatkan digital forensik itu enak jadi kita tau lah oh ini ternyata filenya gak asli oh ini ternyata filenya di edit ini sudah di apalah kan kita tau, kan kadang memang kita ada indikasi kecurangan ya terus kita lihat bukti-buktinya kadang bukti-buktinya sudah di rubah ya, kalau ikut digital forensik tau itu ini sudah di rubah ini kayak

gitu

Rz Ternyata digital forensik sampai gitu ya bu

G Hm em, kemarin ya diajarinya cuman itu sih, dikirimin foto dia ngakunya disini padahal foto ini kalau di gatoke map itu ternyata lokasinya gak disitu kayak gitu, tau

Rz Untuk pelatihan itu sendiri belum banyak bu atau baru mau berjalan?

G Kalau disini sih belum ada yang ikut sih karna memang belum lama ya itu

Rz Hm oh iya iya, kalau untuk meningkatkan pengembangan kompetensi tadi apa perlu bu Pemda itu meningkat penghargaan terhadap PNS-PNS yang di pemerintah kabupaten ini?

G Kalau aku sih he eh, jadi kan kalau, pns ya, kesejahteraan meningkat otomatis kinerja meningkat ya, tapi kalau Pemda gak memperhatikan gini gini kan mereka juga gak semangat juga ya, salah satu rewardnya kan misalnya ada kenaikan tambahan penghasilan lah kayak gitu, itu kan jadi lebih semangat lagi lah

Rz Hmm baik-baik, kalau dari ini bu inspektorat sendiri apa memberikan ruang kreatifitas bu untuk pegawainya untuk pengembangan kompetensi?

G He eh sih, sangat mendukung sih disamping mereka juga menganggarkan di DPA itu kan juga ada itu anggaran-anggaran untuk seminar, kalau seminar di kami sendiri ya, kalau diklat disana, terus anggaran-anggaran untuk studi banding kemana cuman karena ini lagi rasionalisasi jadi mungkin banyak yang di potong kan karna mau pemilu kada ya, pemilu kada itu jadi banyak anggaran yang di plotting untuk pemilu kada sendiri, jadikan banyak yang di potong-potong gitu anggarannya, termasuk anggaran studi banding anggaran apa itu, tapi kalau untuk kondisi normal sih sangat mendukung ya, terus kalau misalnya ada sosialisasi apa, ada workshop apa itu diumumkan juga siapa yang mau ikut kayak gini gini sih tetap ini

Rz Kalau untuk mengatasi kendala tadi sendiri kurangnya anggaran sehingga yang mengikuti diklat sedikit, apa inspektorat dari manajemen nya mengeluarkan surat perintah mengikuti e-learning itu, itu apa membantu mengatasi kendala tadi?

G Kalau e-learning itu kan anu ya mas ya, biasanya tetap, e-learning itu kan dilaksanakan sebelum diklat, tapi memang pesertanya itu dibatasi juga gak semuanya bisa ikut e-learning, kecuali e-learning yang memang gak ada pembatasan peserta, itu baru, baru semuanya bisa, kalau enggak kayak gitu, tetap personil yang ditunjuk aja yang bisa ikut

Rz Pakai surat perintah?

G Surat tugas he eh, tapi kalau misalnya yang zoom-zoom biasa, misalnya sosialisasi apa itu tetap semuanya bisa ikut sih, pokoknya yang kaitannya biaya kan tetap terbatas

Rz Kayak seminar webinar tadi bu?

G Nah kayak webinar-webinar pun ada yang gratis ada yang enggak ya,

Rz Oh iya?

G Kalau yang gratis ya semuanya ikut tambah pengetahuannya sih

Rz Oh iya bu siap-siap, mungkin bersama ibu sampai disini aja wawancaranya bu.

Lampiran 6 Wawancara Ibu Puji (28 Juli 2023)

**Wawancara**

Narasumber : Ibu Ir. Sri Puji Lestari

Usia : 55-59 Tahun

Jabatan : Sekretaris

Lama Bekerja : 31 Tahun

Waktu : Jumat, 19 Mei 2023, 09.30 WIB

Lokasi : Inspektorat Kabupaten Sleman

Durasi : 20 Menit

- Reza : Terkait dengan kendala-kendala dalam pengembangan kompetensi SDM (Rz) inspektorat kabupaten Sleman yang berkaitan dengan *antifraud*, bagaimana strategi inspektorat mengatasi kendala tersebut?
- Ibu Puji : Kami mengirim diklat sebagian karena terbatas anggarannya, dan yang tidak (Pj) mengikuti diklat kami perintahkan mengikuti e-learning. Jadi program pengembangan kompetensi ini ada yang berbayar ada yang gratis
- Rz : Terkait dengan volume pekerjaan yang banyak yang dikeluhkan oleh pelaksana kegiatan inspektorat karena mengurangi waktu belajar mereka, bagaimana langkah yang diambil inspektorat untuk mengatasi permasalahan itu
- Pj : Terkait volume pekerjaan, dulu kami memang memeriksa seluruh OPD, namun kami sekarang hanya melakukan pemeriksaan dengan sampel. Jadi yang paling memiliki risiko tinggi berdasarkan metode penilaian kami, itulah yang kami jadikan sampel. Contohnya di kabupaten Sleman ini ada 86 desa yang akan kami lakukan probity audit, namun kami hanya menjadikan 16 desa yang diperiksa sebagai sampel.
- Rz : Kalau terkait penggunaan digital bagaimana bu?
- Pj : Terkait penggunaan digital kami memang sudah ada itu satu untuk pengawasan.
- Rz : Kalau untuk digital forensik bagaimana bu?
- Pj : Kalau digital forensik belum ada, tapi kita sudah mengikutkan itu kemarin satu orang mengikuti diklat digital forensik
- Rz : Terkait evaluasi program pengembangan kompetensi, seperti apa dilakukan?
- Pj : Sebenarnya ada yang saya belum tau bagaimana metode untuk evaluasi yang e-learning lain, tapi kalau yang e-learning KPK itu memang sudah dibuat runtut, jadi untuk bisa mengikuti e-learning tingkat selanjutnya, harus selesai e-learning yang ini dulu, dan itu ada post test, jadi untuk yang KPK saya yakin. Kalau yang e-learning lain bahkan bisa gak maksimal diikuti, karena ada yang sambil mengerjakan sesuatu ketika e-learning sedang berlangsung. Tapi kadang saya ya menunjuk mereka menjadi pengisi materi sosialisasi, jadi mungkin disitu saya evaluasi keikutsertaan mereka dalam e-learning pengembangan kompetensi
- Rz : Baik bu, kemudian ini sedikit tentang mekanisme *antifraud* yang dilakukan inspektorat kabupaten Sleman. Pencegahan, pendeteksian, dan investigasi, ini saya memfokuskan informasi sejak tahun 2020 sampai sekarang. Apakah ada perbedaan mekanisme *antifraud* sebelum tahun 2020 dan setelah tahun 2020? Dan bagaimana

- perubahan itu?
- Pj : Kalau sekarang itu berdasarkan SPIP inspektorat meminta opd melakukan analisis risiko *fraud* di setiap kegiatan opd dan kemudian kita yang koreksi, kalau dulu belum ada, ini baru tahun lalu, tahun 2022. Dulu inspektorat hanya melakukan analisis risiko kegiatan, sedangkan yang analisis risiko *fraud* itu langsung dari BPKP
- Reza : Baik bu, apakah dengan adanya penambahan kerja tersebut, ada penambahan jumlah SDM
- Pj : Sedang diupayakan, kalau formasi sudah kita bentuk, sudah kita beritahu. Hanya untuk menambahkan sdm tidak bisa langsung dari inspektorat

Lampiran 7 Wawancara Ibu Ika (31 Juli 2023)

Narasumber /Jabatan : Ibu Ika Sulityo Devi / Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan  
 Usia : 40-44 Tahun  
 Lama Bekerja : 17 Tahun  
 Waktu : Senin, 31 Juli 2023, 13.30 WIB  
 Lokasi : Inspektorat Kabupaten Sleman  
 Durasi : 34 Menit 11 Detik  
 Keterangan : "Rz" adalah Pewawancara/Peneliti  
 Transkrip "I" adalah Ibu Ika

Rz : Ini bu untuk yang pertama, terkait mekanisme *antifraud*, inspektorat ada ya bu ya melakukan program-program pencegahan terus melakukan pendeteksian dan investigasi *antifraud*?

I : Ada

Rz : Kalau untuk pencegahan itu bagaimana bentuknya?

I : Pencegahannya untuk *anti-fraud* misalnya adanya SOP dalam pelaksanaan kegiatan, entah itu *nanti* terutama yang di kami ya, di kami itu tentang SOP pendistribusian LHP, laporan hasil pemeriksaan, kemudian tentang pemutakhiran tindak lanjut gitu, kalau yang di keuangan juga ada, bagaimana SOP untuk penyusunan dokumen pelaksana anggaran, Kemudian untuk SOP pengelolaan barang juga ada. Salah satunya itu. Kemudian ada lagi yang kita juga *anti-fraud*, *fraud* kan anu ya kecurangan ya. Itu juga misalnya pelatihan. Jadi kan peningkatan kompetensi itu kan diharapkan *nantifraudnya* kalau hilang sama sekali sih mungkin bertahap ya, tapi peningkatan kompetensi itu kan juga diharapkannya berkurang lah *fraudnya* itu. Kemudian juga ada untuk pakta integritas, kami setiap ASN di inspektorat terutama itu harus menandatangani pakta integritas.

Rz : Itu yang menandatangani itu sekali selama dia masuk sebagai pegawai inspektorat atau bertahap

I : Setiap tahun diperbarui.

- Rz Itu untuk menjaga independensi atau?
- I Integritas.
- Rz Integritas? Termasuk independensi tadi
- I Ya termasuk di dalamnya independensi, kemudian *anti* korupsi, begitu
- Rz Jadi di perbaharui setiap tahun ya bu?
- I Iya.
- Rz Lalu kalau ini bu di lingkungan pemerintahan kabupaten Sleman ini apa saja jenis-jenis *fraud* yang terjadi? Dan ini penelitian saya fokusnya dari tahun 2020 sampai sekarang, itu selama masa itu apa saja bu *fraud* yang sering terjadi
- I penyelewengan dalam pengelolaan barang dan jasa seperti misalnya kemarin itu pernah di tahun 2021 apa ya kebetulan kan dulu juga auditor jadi pernah itu ikut kasus itu penjualan barang rongsokan besi-besi gitu itu
- Rz Berang bekas?
- I Besi bekas jembatan kemudian reklame itu ada kemarin terjadi dijual oleh Oknum lah
- Rz Selain itu ada lagi bu jenis-jenisnya?
- I Apa ya, kalau kalurahan mungkin penyelewengan dana desa Tapi kalau ada lurah yang memang pernah masuk ke penjara ya mas. Tapi itu tahun 2018-19 kalau yang di tahun 2000 kesini gak sampai masuk ke sel tapi hanya pada saat kita pemeriksaan itu ada kurang bukti pertanggungjawaban, kemudian pekerjaan fisik kekurangan volume, kelebihan pembayaran.
- Rz Kalau untuk kayak gratifikasi bagaimana bu?
- I Apa ya, kalau kalurahan mungkin penyelewengan dana desa Tapi kalau ada lurah yang memang pernah masuk ke penjara ya mas. Tapi itu tahun 2018-19 kalau yang di tahun 2000 kesini gak sampai masuk ke sel tapi hanya pada saat kita pemeriksaan itu ada kurang bukti pertanggungjawaban, kemudian pekerjaan fisik kekurangan volume, kelebihan pembayaran.
- Rz Lalu untuk korupsi bagaimana bu?
- I Korupsi? Korupsi salah satu contohnya kalurahan tadi, dana desa.
- Rz Lalu untuk pendeteksian *fraud* nya bagaimana bu?
- I Mendeteksi *fraud*?
- Rz Hm em
- I Salah satunya kami melakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya kan harus mencocokkan antara rencana dengan realisasinya. Misalnya dari rencana dan realisasi itu ada perbedaan, ya kita konfirmasi, ya konfirmasi. Kemudian mereka menjawab apa, kita cocokkan dengan bukti-buktinya. Kalau buktinya tidak sesuai, ya kami misalnya itu kekurangan bukti pertanggungjawaban. Ini hanya kekurangan atau memang pekerjaan ini gak dilaksanakan? Kalau memang hanya kekurangan bukti pertanggungjawaban tapi pekerjaan ini dilaksanakan kami tunggu bukti pertanggungjawabannya agar segera diselesaikan. Tetapi kalau ini adalah tidak dilaksanakan, tetapi ada misalnya ada kwitansinya, misalnya pembelian kursi. Ini memang kursinya enggak dibelikan, tetapi di situ ada kwitansi pembelian kursi yang mereka harus mengembalikan uangnya. Kalau di kalurahan ya ke kalurahan, kalau di organisasi perangkat daerah ya di OPD tersebut.
- Rz Itu tadi itu masuk ke cara mengidentifikasi *fraud* ya itu tadi bu?
- I Hm em, pemeriksaan, pendampingan, konsultasi, kami juga membuka

konsultasi misalnya perangkat daerah ataupun auditee ya, istilahnya ya auditee yang kami periksa itu ada permasalahan mereka bisa langsung ke sini konsultasi dengan membawa berkas tentunya. Soalnya kalau nggak membawa berkas hanya by phone gitu kan kadang nggak jelas permasalahannya itu apa. Tapi kalau kita lihat berkas-berkasnya kan oh ini *nanti* solusinya seperti ini begitu

Rz Hmm baik bu, lalu jika perlu investigasi itu bagaimana investigasi yang dilakukan dari inspektorat?

I Kalau perlu investigasi, investigasi itu kadang dari pengembangan pemeriksaan ya. Kalau yang sudah dilakukan di sini misalnya dari pemeriksaan reguler atau pemeriksaan kinerja itu ditemui bahwa disitu ada ketekoran kas misalnya gitu, kekurangan kas pada saat opname ternyata tidak langsung bisa selesai pada saat pemeriksaan kinerja nah ini kita lanjutkan ke investigasi tapi disini audit investigasi itu baru sebatas seperti itu padahal kan aturannya enggak ya, aturannya malah lebih audit investigasi itu bisa juga dari permintaan dari APH. di kami masih sebatas itu.

Rz Lalu kalau untuk ini bu, pendampingan pelaksanaan tupoksi perangkat-perangkat daerah apa itu berdampak untuk mencegah *fraud* tadi bu?

I Oh iya, berdampak. Karena kan mereka pada saat pendampingan itu kan kita, kayak kemarin ya MPP, pembangunan gedung MPP, ini kan kita kerjasama dengan BPKP juga, inspektorat itu juga banyak mas, karena pemeriksaan, pendampingan itu tidak dilakukan pada saat akhir kan, jadi ini pekerjaan jalan kita dampingi jadi misalnya ada *nanti* yang mau melenceng dari perencanaan kan bisa kita benarkan ini harusnya salah, ini harusnya begitu

Rz Lalu untuk di investigasi tadi bu Inspektorat bagaimana melakukan monitoring temuan-temuan pemeriksaan bu?

I Kebetulan kalau monitoring temuan-pemeriksaan kan di subbag saya ya. Itu kami buat ada sistem, sistem pengawasan dan tindak lanjut namanya. Jadi *nanti* temuan-temuan itu kami input di dalam sistem itu, kemudian setiap 3 bulan, jadi ada 2 metode melakukan tindak lanjut oleh OPD, oleh Auditee. Itu yang pertama melewati sistem itu, mereka bisa upload bukti misalnya tindak lanjutnya temuannya itu tentang SPC kurang lengkap tadi. Mereka bisa upload bukti tindak lanjutnya ke sistem tersebut kemudian diverifikasi oleh tim auditor sedangkan yang kedua adalah secara manual kita disini ada program yang sudah periodik ya mas tentang pemantauan tindak lanjut itu kami jadwalkan 3 bulan sekali jadi mana OPD yang masih memiliki tunggaaan, temuan, setelahnya belum selesai menindaklanjuti itu kita panggil di sini. *Nanti* yang eksekusi, memverifikasi tindak lanjutnya tetap tim, tim auditor, tim pemeriksaannya kemarin.

Rz Tadi SPC tadi apa itu?

I Surat pertanggungjawaban. Jadi nota, kwitansi, begitu. Bukti, bukti pertanggungjawaban. SPJ itu surat pertanggungjawaban.

Rz Baik Bu, ini untuk lanjut ke rumusan masalah kedua saya, Bu, yang merupakan inti dari penelitian saya ini, tentang pengembangan kompetensi berkaitan dengan *anti-fraud*. Itu apa saja bu program pengembangan kompetensi SDM yang sudah dilakukan Inspektorat rangka *antifraud*?

- I *Anti-fraud*, Pelatihan kantor sendiri itu bisa dilaksanakan di sini dengan mengundang narasumber dari luar yang sudah kita lakukan biasanya mengundang dari BPKP karena kan pusat pembinaannya JFA, Jabatan Fungsional Auditornya kan ada di BPKP nah kita mengadap aturan dari sana, kita manggil untuk pelatihan kantor sendiri di inspektorat yang kedua kita mengikuti pelatihan di luar, misalnya BPKP mengadakan pelatihan itu kami mengirimkan beberapa personel kesana, BPK juga ada pelatihan gitu, kami mengirimkan kesana.
- Rz Lalu apa ada lagi, bu, program-programnya selain itu?
- I Kalau sekarang modelnya anu ya zoom, e-learning gitu, kalau yang *anti korupsi* itu e-learning dengan KPK.
- Rz KPK Pusat?
- I Iya.
- Rz KPK itu nggak punya kantor ya bu di daerah-daerah?
- I Nggak ada.
- Rz Dari Pusat Langsung?
- I Langsung
- Rz Programnya mereka untuk APIP APIP di daerah?
- I Iya. Jadi e-learning kalau yang KPK itu kita menjadwalkan sendiri. Kecuali yang gratifikasi. Yang gratifikasi itu harus mengikuti jadwal dari sana. Tapi kalau yang pendidikan dasar *anti korupsi* atau kegiatan diklat yang lain itu kita sendiri. Jadi dikasih waktu 3 hari misalnya gitu, kita terserah mau milih sewaktu-waktu, bisanya kapan gitu.
- Rz Lalu kalau terkait diklat, bu, diklat kan macam-macam ya bu ya? Itu apa semua diklat yang baik yang khusus untuk *anti-fraud* ataupun yang di luar itu, apa itu semuanya bisa membantu untuk meningkatkan kompetensi SDM untuk dalam *anti-fraud* tadi?
- I Harapannya sih membantu tapi kan kadang pemahaman masing-masing peserta diklat kan juga beda-beda ya mas ada yang bisa langsung itu dipahami dan diterapkan ada juga yang masih bingung gitu harus ada diklat selanjutnya gitu
- Rz Oh, untuk workshop sendiri bagaimana programnya?
- I Workshop, saya agak anu. Tapi kita biasanya lebih banyaknya ke pelatihan kantor sendiri itu. Kalau workshop itu dianggarkan atau enggak ya? Tapi lebih banyak ke pelatihan kantor sendiri. Kayaknya satu tahun itu dua belas kali pa ya pelatihan kantor. Jadi pelatihan kantor sendiri itu juga kayak workshop itu.
- Rz Baik. Kalau workshop ini apa? Juga mengundang narasumber dari luar?
- I Iya.
- Rz Oh, Lalu untuk pendampingan ahli dalam pelaksanaan tugas, Apa itu termasuk pengembangan kompetensi juga?
- I Pendampingan ahli maksudnya kita mendatangkan ahli dari luar?
- Rz Ya, untuk kayak tugas-tugas meriksa bangunan dan lain-lain?
- I dulu sebelum ada teman-teman ini kan auditor itu dulu belum ada teman-teman dari PU, dari teknik gitu. Kita pernah minta bantuan ke PU untuk memeriksa bangunan, Karena dulu nggak ada tenaga teknik sama sekali. Tetapi sekarang karena sudah ada tenaga tekniknya, kita lebih banyak sendiri. Tapi kadang kalau misalnya butuh sekali, kita minta bantuan.



- Kayak kemarin pemeriksaan desa atau apa ya, itu yang di mana melati itu kayaknya minta bantuan ke PU.
- Rz Itu dari situ teman-teman yang tadi dibantu sama itu apa kemudian belajar kemudian menjadi paham?
- I Belajar. Jadi mereka gimana caranya. Tapi kan kalau yang teman-teman PU kayaknya sudah dasarnya sudah punya ya mas kayak dulu pemeriksaan, pada saat saya menjadi auditor, pemeriksaan jalan nah itu kami belajarnya sama BPK kami mendampingi BPK pemeriksaan ukur jalan itu, kualitas jalan itu, terus kami menerapkannya sendiri.
- Rz Oh iya bu, Lalu terkait dukungan dari internal inspektorat atau dari external inspektorat terkait pengembangan kompetensi bagaimana? Apakah support dari anggaran atau saran dan prasarannya?
- I Oh iya, support dari anggaran sudah kita anggarkan untuk PKS maupun Diklat di luar ya tapi sayangnya kalau Diklat di luar itu kan anggaran inspektorat itu jadi satu di badan kepegawaian untuk diklat itu, bukan di inspektorat sendiri. Jadi *nanti* diklat di sana misalkan katakanlah 100 juta, itu untuk ASN, Kabupaten Sleman keseluruhan. Jadi modelnya cepet-cepetan gitu loh mas, yang mengajukan anggaran siapa gitu. Kalau dari luar itu sebenarnya banyak sih, diklat yang bisa kita ikuti hanya waktunya aja kita yang kadang nggak bisa karena berbenturan sama surat tugas. Surat tugas kan penugasan disini juga banyak.
- Rz Lalu untuk ini bu untuk rumusan masalah ketiga tentang kekurangan dan kendala dalam melaksanakan program tadi atau di dalam program itu? Mungkin dari kekurangannya dulu, Bu. Kekurangan apa yang Ibu temukan atau yang Ibu amati mungkin dari program-program pengembangan kompetensi yang sudah berlangsung?
- I Apa ya? Karena saya tuh sekarang lebih banyak di sekretariat ya, jadi gak begitu begitu paham dengan yang di auditor kalau saya melihatnya itu karena penumpukan surat tugas jadi teman-teman itu gak bisa bener-bener fokus di satu penugasan gitu misalnya penugasan di OPD ini misalnya gitu *nanti* di pertengahan penugasan ini mereka dapat tugas mandatory dari pusat. Harus melakukan review apa, review apa, jadi kan gak fokus untuk satu penugasan.
- Rz Hm, apa kalau ini berkait informasi, apa ada misinformasi tentang pengembangan kompetensi dari auditor ke manajemennya, atau manajemen ke auditor?
- I Enggak sih, selama ini juga kerjasamanya, menurut saya loh ya, ke manajemen di kami toh?
- Rz Iya di inspektorat ke pegawai lainnya tentang informasi-informasi
- I Enggak sih biasanya di kami itu sekretariat yang malah melihat. Misalnya di BPKP, jadwalnya apa sekarang? Itu siapa yang mau ikut didiklatkan gitu siapa yang mau diklat, kita komunikasi dengan Irban, inspektur pembantu kayak Bu Heri kemarin tuh inspektur pembantu dan BPK ada diklat kapan kita tawarkan ke mereka gitu.
- Rz Kalau dari auditor sendiri yang pengen mengajukan pengembangan kompetensi untuk meningkatkan kualitas dirinya apa ada bu?
- I Selama ini kayaknya enggak. Kayaknya dari jadwal itu mereka ditunjuk siapa, siapa gitu. Karena waktunya enggak sempat mereka untuk nyari-

- nyari diklat, untuk melakukan pemeriksaan aja kurang waktunya.
- Rz Lalu untuk program-program apa ada dievaluasi untuk semua program pengembangan kompetensi tadi bu? Dan bagaimana untuk evaluasinya?
- I Ada, Setiap bulan, terutama tentang program kegiatan pelaksanaan anggaran ya, itu setiap bulan kami struktural itu rapat untuk mengevaluasi ini program A, kegiatan A, ini mau dilaksanakan kapan, mau gimana cara melaksanakannya, terus misalnya ini kok belum dilaksanakan kegiatan ini, kendalanya apa, terus *nanti* Pak Inspektur itu ngasih solusi, ini harus bagaimana, jadi bentuknya hanya rapat gini aja, *nanti* siapa yang nulis notulen, saya biasanya yang notulennya.
- Rz Hmm iya iya, Kalau untuk cara mengevaluasi peserta yang mengikuti pelatihan, diklat dan workshop itu, tentang dia sudah paham belum apa ada bu?
- I Pretest sama posttest.
- Rz Posttest, oke. Lalu itu tadi terkait kekurangannya bu, sekarang terkait kendala dalam menjalankan atau melaksanakan program-program pengembangan kompetensi *antifraud* tadi, apa aja bu kendalanya?
- I Kendalanya karena banyak ketugasan di kami, Jadi kalau misalnya harus satu auditor itu misalnya 2 bulan sekali harus mengikuti diklat gitu, waktunya ya nggak ada.
- Rz Waktu untuk apa ini maksudnya bu?
- I Untuk ikut diklat. Karena mereka kan penugasannya banyak.
- Rz Kalau terkait anggaran gimana bu kendalanya?
- I Anggaran sementara ini cukup, maksudnya kami mengajukan itu di Badan Kepegawaian itu masih ada anggaran, tapi kan ya itu tadi cepet-cepetan dengan SKPD yang lain. Karena bukan kita pegang inspektorat sendiri, Anggaran untuk keseluruhan Pemkab.
- Rz Kalau partisipasi dari pegawai sendiri untuk mengikuti program bagaimana?
- I Kalau mengikuti program kegiatan yang ada di inspektorat?
- Rz Apa sajakah itu tadi entah itu yang e-learning, diklat, atau yang pelatihan kantor sendiri?
- I Kalau pelatihan kantor sendiri jelas mereka ikut. Kalau e-learning itu kan berdasarkan surat tugas tadi, penugasan. Karena untuk auditor itu ada pengembangan kompetensi untuk yang di angka kredit itu. Jadi PKS, pelatihan kantor sendiri itu mereka harus ikut. Kalau enggak mereka enggak bisa terpenuhi *nanti* kredit poinnya. Mereka kan dinilai berdasarkan angka kredit. Harus mencapai pengembangan profesi berapa gitu
- Rz *Nanti* gunanya angka kredit tadi untuk apa?
- I Kenaikan pangkat.
- Rz Kenaikan pangkat?
- I Sementara lo ini, besok katanya sudah nggak ada angka kredit.
- Rz Oh, mau diterapkan kapan? Mau diterapkan kapan tidak ada angka kredit lagi?
- I Nggak ada, karena kan sekarang sudah nggak ada angka kredit, tapi mereka berdasarkan penilaian standar kinerja pegawai. Harus predikatnya baik semua.
- Rz Lalu, tentang auditornya tadi ingin cari perkembangan kompetensi yang lain,

- yang mungkin gratis atau mereka cari di luar inspektorat itu, apa ada kreativitas dari mereka sendiri untuk melakukan kayak gitu itu?
- I Selama ini tidak ada, karena itu tadi, waktunya itu sudah tidak cukup.
- Rz Pekerjaan yang banyak ya bu ya?
- I He eh, Banyak sekali, dan harus ketelitian kalau auditor itu.
- Rz Hmm baik, Lalu untuk kesempatan mengikuti diklat, atau pelatihan itu bagi para pegawai itu rata atau bagaimana? Itu apa, rata atau bagaimana selama ini? Atau sedikit sekali kesempatan yang diberikan?
- I Diratakan, karena kita juga punya gap kompetensi.
- Rz Gap kompetensi?
- I Itu, jadi si A, si B, si C itu dia harus memenuhi apa gitu dia sebagai pegawai, misalnya auditor. Auditor di bidang investigasi itu harusnya lebih banyak dia melakukan audit keinvestigasian. Berarti *nanti* yang didiklatkan lebih banyak investigasi yang di bidang investigasi. Kemudian *nanti* kalau yang di auditor di pemerintahan itu banyak melakukan pemeriksaan di kalurahan, mereka diklat di tentang pengelolaan keuangan kalurahan. Jadi tergantung, tergantung apa ya, kebutuhan mereka.
- Rz Kebutuhan mereka. Baik baik. Nah lalu ini untuk cara mengatasi kendala-kendala tadi seperti gimana bu cara mengatasi kendala untuk pengembangan kompetensi mereka ketika tadi volume pekerjaan yang banyak cara dari inspektoran mengatasi?.
- I Mau gak mau harus ada yang dikorbankan. Salah satunya mereka harus mengikuti diklat 5 hari. Ya LHP, laporan hasil pemeriksaan mereka jadi nggak jadi-jadi, jadi terlambat. Itu dampaknya.
- Rz Oh Dampaknya. kalau Solusinya untuk biar nggak kayak gitu, efektif dan waktunya mengembangkan kompetensi cukup? Dan kerja juga cukup bagaimana bu?
- I Selama ini saya rasa ya *nanti* terus lembur mas.
- Rz Lembur?
- I Iya lembur. Kayak kemarin Bu Heri itu karena diklat 5 hari audit investigasi atau apa gitu di BPK, ada evaluasi LKJIP itu yang memang harus mereka kerjakan hari Rabu, hari Minggu, hari Libur, mereka harus masuk mengerjakan itu. Jadi, solusinya ya harus mereka waktu ekstra di hari Libur pun harus mengerjakan.
- Rz Kalau dari pengamatan Ibu sendiri kepada beberapa inspektorat ini untuk meningkatkan kompetensi mereka itu apa? Semangatnya bagaimana? Keinginannya juga bagaimana?
- I Keinginan mereka besar Ya, Anu ya, Mereka kan meningkatkan kompetensi untuk pekerjaan mereka juga. Mereka harus bisa mengaudit ini, mengaudit itu. Kan Harus pengembangan terus sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya Misalnya teknologi, mereka juga harus ikut audit TI, IT gitu. Tapi ya itu tadi terkendala waktu. Kalau mereka berangkat diklat lama, *nanti* ketugasan di kantor pasti tertunda. Kalau nggak ikut diklat, *nanti* kompetensi mereka juga nggak akan ter-upgrade.
- Rz Baik bu Kalau ini, Bu, cara mengalokasikan waktu biar volume kerjaan yang tadi nggak terasa menumpuk Bu, itu bagaimana cara inspektorat mengatasinya?
- I Cara mengatasinya dibawa pulang Di rumah pun masih ngerjain laporan

- Rz Kalau ini bu melibatkan pegawai atau pelaksana atau auditor tadi untuk merumuskan program kerja, atau itu membantu mengurangi volume tadi? Pekerjaan yang banyak?
- I Sebenarnya itu program kegiatan kita itu sudah mandatory semua. Jadi dari pusat. Iya, hampir semua itu adalah mandatori dari pusat, jadi nggak bisa dikurangi. Kita juga harus mereview kegiatan dari pusat, harus kita review *nanti* agar dana itu bisa cair. Sedangkan kami kan juga harus mengawal program kerjanya Bupati. Jadi ya... Ya dilema.
- Rz Ini kembali terkait kendala, apa ada kendala dalam mengikuti perkembangan teknologi?
- I Ada. Terutama mungkin yang usianya juga sudah di atas 50 gitu kan, kadang pemahamannya kan untuk IT-nya kan kurang ya. Itu ya pelatihan kantor sendiri tentang IT dengan kominfo, kemudian *nanti* teman-teman auditor yang masih fresh, masih muda-muda itu diberdayakan. Misalnya yang pengendali teknisnya sudah usianya sudah 50 ke atas itu *nanti* kan tetap dia hanya managerial *nanti* yang teknisnya kan yang anggota yang masih muda-muda
- Rz Hmm baik bu, tu yang penggunaan digital tadi, untuk yang *antifraud* itu apa ada bu dikhususkan pelatihan digital forensik?
- I Audit forensik?
- Rz Digital Forensik
- I Digital forensik kemarin ada di diklatnya, Yang ikut baru satu orang apa ya?
- Rz Karena apa baru satu orang? Kenapa?
- I Karena memang yang dibutuhkan baru satu orang, diminta untuk ikut satu orang
- Rz Oh itu diminta berarti dari mana? BPK?
- I Dari BPK atau mana ya, saya kok lupa ya
- Rz Bukan kayak Inspektorat pengen mgusulin ikut ini bagian dari bidang investigasi reformasi birokrasi berangkatkan semua? nggak kayak gitu bu?
- I Enggak saya kok saya juga kurang paham itu kemarin hanya satu orang Mbak Tiwi yang ikut
- Rz oh gitu
- I karena saya gak di kepegawaian jadi saya juga gak begitu mengikuti
- Rz Hmm, kalau dari Ibu sendiri Bu kira-kira apa Bu yang perlu ditingkatkan lagi terkait pengembangan kompetensi khusus yang berkaitan *antifraud*?
- I Apa ya, pemahaman teman-teman itu tentang *antifraud*. Kemudian banyak-banyak pelatihan mengikuti perkembangan teknologi. Misalnya tadi digital forensik kita melakukan pemeriksaan pakai IT ya
- Rz Itu lewat mana Bu? Rencananya Inspektorat mau Ini rencananya Inspektorat berdepannya terkait pengembangan kompetensi *antifraud*? Kira-kira bagaimana Bu?
- I Ya mungkin pelatihan kantor sendiri itu tadi, yang paling mungkin kita lakukan itu adalah pelatihan kantor sendiri karena kan itu program kegiatan kita, kita bebas memilih tema apa dan *nanti* nyari narasumber dari BPKP, BPK, ataupun mana gitu. Kalau yang pengembangannya lewat kita mengirim diklat, itu kan tergantung mereka punya diklat, BPK atau BPKP itu punya diklat tersebut atau enggak. Paling mungkin ya pelatihan kantor

- sendiri.
- Rz Kalau dari Inspektorat ini, apa ada memberikan masukan usulan terkait kendala, kekurangan dalam pengembangan kompetensi ini ke pihak luar? Kayak BPK, BPKP KPK mungkin untuk pengembangan kompetensi?
- I Oh iya. Awal tahun atau akhir tahun itu biasanya kita diminta oleh BPKP, karena tadi pusat pembinaan kita kan BPKP, itu diminta questionnaire, diklat apa yang dibutuhkan, terus *nanti* mereka programkan.
- Rz Berarti questionnaire yang mereka minta usulan dan saran dari inspektorat sendiri. Dan itu untuk, apa namanya, kayak apa istilahnya, ditanggapinya bagaimana?
- I Ya, kadang terus mereka memang membuka program kegiatan diklat yang judul ini gitu, yang usulan dari inspektorat gitu
- Rz Lalu ini ini terakhir, Bu, harapan dari Ibu. Tapi Ibu, sebagai ini, Ibu di... Kalau di inspektorat ini, manggilnya apa ya bu? Antara manajemen dan pelaksana tadi?
- Rz Atau pejabat atau pelaksana ya? Apa sebutannya? Fungsional dan struktural ya?
- I Iya
- Rz Jadi ibu sebagai struktural, apa harapan ibu sendiri terkait pengembangan kompetensi *anti-fraud*? dalam segi program yang...
- I Iya, mungkin lebih ditekankan dan lebih diperbanyak lagi kegiatan untuk pengembangan kompetensi yang *anti-fraud* sehingga pemahaman teman-teman khususnya teman-teman auditor itu kan untuk mendeteksi *fraud* itu kan bisa lebih tajam lagi kalau untuk teman-teman struktural ya jadi tau, jangan sampai melakukan *fraud*, apa sih yang dimaksud dengan *fraud*, kemudian kegiatan-kegiatan apa yang menjurus ke *fraud*. Kan biasanya kalau yang didiklatkan kan lebih banyak yang auditor ya, pengembangan kompetensinya, sedangkan yang struktural ataupun teman-teman saya di sekretariat itu jarang untuk diklat-diklat itu.
- Rz Ini mungkin pertanyaan di luar penelitian saya, terkait bidang Ibu sendiri, evaluasi dan pelaporan ya Bu. Itu pelaporan apa aja yang masuk ke Ibu? Apa cuma dari Inspektorat sendiri atau dari luar? Kayak *fraud* gitu dari luar
- I Pelaporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat, kemudian hasil pemeriksaan dari Provinsi, BPK, BPKP itu masuk di saya. Kemudian ada juga yang pengaduan
- Rz Pengaduan dari masyarakat?
- I Iya, pengaduan masyarakat ataupun juga di pengaduan dari OPD, itu pertama kali masuk di saya *nanti* direkap oleh Mas Andri, terus ini harus di distribusi ke bidang apa, misalnya pengaduan tentang pendidikan *nanti* di bidang kesra, pengaduan tentang desa kalurahan di bidang pemerintahan.
- Rz Pengaduan tadi kalau dihubungkan sama program-program *anti-fraud* tuh, atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan *anti-fraud* tuh masuknya ke mana Bu? Apa itu pencegahan, pendeteksian, atau investigasi?
- I Macem-macem. Ada yang memang masih pengaduannya tadi ya, ada yang memang pendeteksi, ada juga yang sudah bisa di investigasi.
- Rz Dan biasanya pengaduan itu apa hanya dugaan atau sudah bisa, mau ada dugaan, mau bukti juga boleh diadakan
- I Ada yang memberikan hanya dugaan Kalau hanya Dugaan itu kadang kita

kesulitan, kita harus lebih menggali lagi, ini bisa ditingkatkan atau enggak, misalnya ditingkatkan ke pemeriksaan kasus atau enggak. Itu kita hubungi dengan, itu kita auditee misalnya OPD, PU misalnya. PU mengadukan ini ada yang tidak masuk kerja, tidak masuk kerja kan jelas *nanti* di presensi, berarti kan bisa kita langsung proses, *nanti* kita konfirmasi ke atasan langsungnya, kemudian ada juga yang tentang pengaduan masyarakat itu kita gali dulu, Kita ini di desa mana, kalurahan mana, kita cari informasi ke kecamatan, ke Kapanewon. Di sana apakah benar ada seperti ini, seperti ini. Kalau misalnya itu sebenarnya hanya ringan dan bisa dilakukan oleh Kapanewon. Kita minta bantuan Kapanewon untuk menyelesaikan. *Nanti* mereka melaporkan ke kita progres penyelesaiannya. Tapi kalau memang ini berat dan berkaitan dengan korupsi, itu kita turun sendiri.

Rz Kalau untuk syarat itu pengaduan-pengaduan dari OPD, masyarakat, ataupun teman-teman inspektorat itu apa syaratnya supaya itu ditindak lanjutin?

I Pengaduan harus jelas, ada buktinya ya dan pengaduannya bisa kita hubungi ya Kita hubungi dalam arti kita bisa tanya kembali. Ini maksudnya kalau pengaduannya tidak jelas, itu kan kita kesulitan. Kesulitan untuk, ini maksudnya bagaimana berhubungan lagi. Tapi kadang kalau memang berkaitan dengan pungutan liar misalnya gitu, dukuh gitu ya, ini pengadunya kan mengatasnamakan warga, masyarakat. Kita tanya ke kak Nurahan atau kak Panewan tadi. Yang penting ada bukti dan itu kronologis. Kronologis.

Rz Berarti enggak semua pengaduan itu ditindak? Enggak. Tapi banyak yang masuk.

I Enggak banyak sih.

Rz Enggak banyak juga. Baik Ibu mungkin itu aja yang bisa saya dapatkan informasi dari bu. Saya terima kasih banyak atas waktu yang ibu berikan. Dan semoga data ini bermanfaat buat penelitian saya dan inspektorat

I ya amin, semoga bermanfaat

#### Lampiran 8 Wawancara Ibu Retno (01 Agustus 2023)

Narasumber /Jabatan : Ibu Retno Isni Satiti, S.E. / Auditor Madya

Usia : 50-54 Tahun

Lama Bekerja : 27 Tahun

Waktu : Selasa, 01 Agustus 2023, 13.30 WIB

Lokasi : Inspektorat Kabupaten Sleman

Durasi :

Keterangan : “Rz” adalah Pewawancara/Peneliti

Transkrip “Rno” adalah Ibu Retno

Rz Ini pertanyaan pertamanya tentang inspektorat ini apa ada melakukan pencegahan, pendeteksian atau investigasi *fraud* di OPD-OPD itu?

Rno Di P2OPD, P2OPD itu jabatan,

Rz di OPD.

- Rno Jadi Mas Reza Auditor itu ada dua, kalau di APIP itu Auditor yang binaannya BPKP, itu fungsional. Pembina nya BPKP, ada yang auditor tapi dia binaan kementerian dalam negeri, namanya P2OPD Kalau kami dalam rangka pembinaan, apa tadi?
- Rz Pencegahan
- Rno pencegahan jelas, kami jelas itu ada salah satunya inspektorat melakukan sosialisasi, BIMTEK, terus menjadi narasumber di dalam kegiatan OPD yang berkaitan dengan pencegahan atau *anti* korupsi.
- Rz Kalau untuk mekanisme pencegahannya sendiri bagaimana bu?
- Rno Mekanisme penjagaan kan di masing-masing OPD sudah ada komitmen, ada pakta integritas, itu salah satu untuk membangun OPD itu untuk care terhadap terjadinya *fraud*. Jadi bagaimana jangan sampai OPD itu di dalamnya ada *fraud*, kami berusaha seperti itu Dan kami itu pembinaannya bisa melalui pengawasan, pengawasannya inspektorat itu kan melalui pemeriksaan, lalu review, monitoring, evaluasi, monitoring dan evaluasi maupun pendampingan seperti itu
- Rz Hm iya bu, Terkait ini menyebar atau membagi selebaran-selebaran tentang *anti* korupsi atau *anti* gratifikasi itu sering gak dilakukan?
- Rno Kalau Inspektur Sleman kan di situ, di depan kan sudah ada membangun itu apa? Itu loh mas, slogan yang apa Slogan yang di depan itu.
- Rz Pelayanan.
- Rno He eh, jadi kan terus kami kan juga ada, sebenarnya kalau inspektorat lebih pada fungsi mengawal membina ya, artinya tidak terus seperti OPD, kayak dinas kesehatan, misalnya saya contoh kan dinas kesehatan, dengan bidangnya kesehatan, mereka kan, ayo kita hidup sehat, caranya apa, nyebar di jalanan kuesioner, apa menyebar seolah-olah segan kami enggak kalau kami kan ada mekanisme ketika rapat pimpinan dalam hal ini kepala daerah itu kan ada namanya pantry ya di pantry atau coffee morning atau apa ya istilahnya itu rutin nah di rutin itu KDH kan menginfokan atau ya istilahnya membangun biar OPD itu sadar untuk care terhadap TPK, tindak pidana korupsi Nah mereka kan di forum itu, kepala daerah, disitu ada inspektur hadir, kemudian yang datang kan kepala dinas nah kepala dinas akan menyampaikan atau menginformasikan kepada masing-masing stafnya di dinas-dinas tersebut yang bersangkutan, Jadi tidak secara langsung terus inspektorat apa, mencetak selebaran terus dikasih kan. Enggak, cuma memang ada kami melakukan sosialisasi khususnya di tahun 2023 ini memang kami kalau sosialisasi itu artinya kan berkaitan dengan anggaran ya anggaran kita kan selama ini banyak dipotong dari pusat akhirnya
- Rz Pusat ini maksudnya pemerintah?
- Rno iya pemerintah, Pusat kan kita dalam rangka Banyak sekali rasionalisasi kegiatan kan Nah itu, kegiatan itu kan berdampak pada anggaran Nah itu kan, terus Otomatis, kalau yang namanya sosialisasi kan kita butuh anggaran, ketika anggaran dipotong, ya memang yang ideal kami melakukan sosialisasi, tapi sosialisasi kan tidak perlu harus face to face, harus mencetak slogan yang banyak, enggak. Apalagi dengan dunia sekarang, teknologi itu kan masing-masing punya WhatsApp itu kan sangat bermanfaat ya. Ada perkumpulan kepala dinas, perkumpulan sekretaris, perkumpulan auditor, perkumpulan Kasubag keuangan gitu misalnya seperti itu. Di mana memang disitu bisa disisipkan, ya kami masuk untuk mengajak, ayo kita bangun zona integritas. Maksudnya seperti itu.

- Rz Baik bu, Lalu ini, penelitian saya ini berkaitan dengan informasi-informasi yang ada di tahun 2020 sampai sekarang, fokusnya. Jadi terbatas sampai situ. Untuk secara umum, macam-macam *fraud* yang terjadi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sleman ini apa aja? Secara umumnya saja.
- Rno Alhamdulillah kalau di... Kalau *fraud* itu kan kecurangan ya. Kecurangan itu kan, sebenarnya kalau kita bicara dalam arti formal hukum apa sih kecurangan, kecurangan itu kan dampaknya *nanti* ke Tindak pidana, misalnya tindak pidana korupsi kan, terjadinya *fraud*, itu kan karena ada peluang, kan ada kesempatan, karena ada tekanan, kan macam-macam tuh banyak yang kita bicara Karena suatu tekanan bisa dari, tekanan mungkin dari keluarga, bisa dari atasan nah seperti itu, cuma kalau lebih spesifik, tadi apa yang disampaikan mas?
- Rz Macam-macamnya dari tahun 2020
- Rno kalau macamnya, kita enggak anu ya alhamdulillah nya ya ketika mereka melanggar ketentuan kan ada, kecurangan tidak harus berdampak pada kerugian, terjadinya kerugian. *Fraud* itu bisa saja terjadi ketika kita jam kerja tidak tepat, kan seperti itu, yang dimasukkan di sini *fraud* yang lebih pada dampaknya terjadi kerugian, akibatnya terjadi kerugian.
- Rz Terjadi kerugian pada negara atau pemerintah
- Rno Alhamdulillah, kita kan enggak anu ya mas, Karena lebih pada fungsi pembinaan ketika terjadi indikasi kerugian, kan kita berusaha untuk OPD maupun yang bersangkutan, pelaksana kegiatan itu untuk segera, kalau memang berarti segera disetor kembali ke kas daerah kan karna ada fungsi pembinaan kecuali kalau dia memang secara pidana kan kita bicaranya kalau hukum pidana apa perdata tidak menggugurkan pidana. Tapi kalau macam-macam yang terjadi, ya itu kalau terjadi indikasi kerugian memang betul terpenuhi kriteria nya, ya sudah dia sanggup mengembalikan, dikembalikan di setor ke kas daerah kan selesai.
- Rz Kalau untuk penyalahgunaan aset, apa ada bu terjadi?
- Rno Penyalahgunaan aset kan semua memakai berita acara, bentuknya yang bagaimana dulu penyalahgunaan aset? Kalau kan kita berusaha, misalnya saya dikasih, saya memakai inventaris kantor, misalnya laptop, ya saya rawat, saya jaga, bagaimana itu? Nggak Nggak saya larikan atau saya jual, nggak. Kalaupun itu terjadi, *nanti* inspektorat pasti akan melakukan pemeriksaan khusus kalau di kami itu pemeriksaan khusus, kalau yang lain itu bilangnya investigasi Padahal investigasi itu kan ada, kenapa harus ada audit investigasi? Itu kan ada unsur-unsur yang harus dipenuhi ya, 5W, 1H
- Rz Berarti kalau untuk investigasi tadi inspektorat ini lebih ke pemeriksaan khusus tadi bu?
- Rno Sebenarnya iya, jadi pemahamannya di Sleman seperti itu, tapi khusus itu tidak hanya terjadi indikasi kerugian, jadi misalnya pelanggaran atas disiplin ASN itu kan ada pemeriksaan khusus kasus itu seperti itu, padahal kalau konsep kita bicara konsep audit investigasi mesti larinya adalah audit yang memenuhi 5 kriteria, 5 W, 1 H, kan seperti itu tapi kalau Kita tuh nggak seperti BPK, kalau BPK kan dia tidak meriksa tentang kasus seperti kasus kita kalau ada yang melanggar disiplin PNS Mereka kan yang namanya investigasi, mesti larinya ke keuangan negara, keuangan negara atau keuangan daerah.
- Rz Baik, Lalu untuk mendeteksi *fraud*, bagaimana yang dilakukan inspektorat untuk mekanisme pendeteksian *fraud*?
- Rno Ya kami terus terang kalau kita baru sebatas *fraud* indikasi lho bukan investigasi



kan kalau ada investigasi kan ada permintaan mekanismenya ada permintaan mengenai pengembangan dari pemeriksaan reguler bisa juga atas permintaan APH

Rz Hm baik-baik lalu kalau dalam hal monitoring temuan bagaimana?

Rno Temuan ada, kami itu ada pemutakhiran tindak lanjut itu saya tidak hafal ya karena itu ranahnya di Kasubag evaluasi, evaluasi itu, ketika kita melakukan pemeriksaan nah yang namanya kan audit pemeriksaan itu juga akan berhasil ketika kita ada catatan pemeriksaan atau temuan pemeriksaan dan kita merekomendasikan, rekomendasi ini bisa ditindaklanjuti oleh auditee, auditee itu obyek yang diperiksa, itu bisa ditindaklanjuti, itu namanya auditnya berhasil. Ketika dalam waktu 60 hari mereka belum menyelesaikan, mereka kan harus 60 hari menyelesaikan 2 bulan, menyelesaikan tindak lanjut. Entah itu tindak lanjutnya yang akibat dari kerugian daerah, atau karena pelanggaran suatu disiplin, atau karena sesuatu hal yang kami sarankan, kami rekomendasikan, itu mereka harus menyelesaikan dalam waktu 60 hari. Nah ketentuannya memang sih kalau 60 hari nggak selesai kan bisa dilimpahkan ke APH. Tapi kan tidak serta merta seperti itu, inspektorat kan punya fungsi pembinaan. Ya kan nggak bisa dong kami begitu 60 hari ga selesai kami serahkan ke APH. *Nanti* ya anu semua noh. Kan belum tentu bisa saja terjadi kerugian daerah karena lalai, bukan karena kesengajaan

Rz Kalau untuk gratifikasi sendiri bu, itu bagaimana inspektorat mendeteksi kemungkinan gratifikasi atau selain itu korupsi juga?

Rno Kalau gratifikasi kan sebenarnya, Sleman ya, Sleman saya cerita Sleman dulu, pada saat menjelang hari raya kemarin Kami ada SE dari bupati, tidak boleh menerima gratifikasi kan seperti itu. Kalau terjadi, OPD itu kan wajib melaporkan pada inspektorat. Kenyataannya sampai saat ini, saya kurang tahu karena kami itu kan auditor. Kalau auditor itu kan bukan pada rangkaian kegiatan kesekretariatan dalam arti kayak Kasubag perencanaan evaluasi kan itu ranahnya dia kan gitu, Kalau auditor, saya ini kan auditor, saya auditor madya Ada surat tugas saya jalani gitu

Rz Lalu ini terkait pengembangan kompetensi SDM-nya, untuk dalam rangka *antifraud* baik tadi dari pencegahan, deteksi, dan investigasi. Itu apa saja program-program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh pegawai inspektorat terkait *antifraud*?

Rno Saya pegawai inspektorat, khususnya saya bicara di ranahnya auditor ya, bukan di ranahnya. Jadi inspektorat itu kan ada auditor, jadi susunannya kan inspektur. Ada irban, ada sekretaris. Irban itu kemudian ada auditor, auditor. Lalu sekretaris itu ada Kasubag, Kasubag. Untuk ranah pengembangan itu kita itu tergantung pada BKPP namanya Badan Kepegawaian Pengembangan, dulu BKD Kepegawaian kalau istilahnya lebih mudah Badan Kepegawaian gitu saja biar mudah familiar yang kita dengar. Nah itu, anggaran ada di sana mas Jadi bagaimana kalau saya kebetulan saat ini saya memang di bidang investigasi sejak bulan Maret 2023 Tapi saya nggak ngerti kriteria apa yang kok saya tiba-tiba dari auditor madya bidang kesra tiba-tiba melalui per 31 Maret saya dapat SK saya lupa ya, 31 atau hari apa, yang jelas Maret itu saya dapat SK untuk mengikuti, pindah bidang, bidang investigasi Itu satu. Yang kedua, ketika pengembangan kompetensi dari awal, itu kan yang mapping adalah Kasubagnya kepegawaian dan BKPP jadi kalau saya ditanya bagaimana kok seorang Retno

bisa tiba-tiba duduk menjadi auditor di situ bidang investigasi saya nggak bisa jawab kalau itu saya hanya ada surat tugas itu saya laksanakan. Saya ada surat perintah melaksanakan tugas, itu yang saya lakukan. Jadi itu di ranah nya pimpinan tentunya pertanyaan itu.

- Rz Kalau yang ibu ketahui sendiri program-program yang pernah ibu ikuti apa saja?
- Rno Oh ya, saya begitu bulan Maret dapat SK Surat Perintah Melaksanakan Tugas di bidang itu memang saya dikirim dengan anggaran BKPP Anggarannya BKPP, tapi by name-nya kebetulan saya sama Mbak Pipit, mungkin Mbak Pipit pernah ketemu, kami di diklat kan PKKN, Penghitungan kerugian keuangan negara. Keuangan negara itu kan di dalamnya keuangan daerah ya, kalau kita bicara keuangan negara itu ya keuangan seluruh bukan yang cuma di APBN, enggak, maksudnya di APBD, BUMD kita seperti itu
- Rz Selain tadi diklat PKKN, Apa aja bu jenis Diklat yang berkaitan dengan *antifraud*?
- Rno Oh, kita sering ikutin seminar, Zoom, webinar, itu yang berkaitan dengan *anti* korupsi, mengikuti Bimtek itu, terus pelatihan di kantor sendiri dengan mengundang narasumber dari BPKP atau dari internal. Kebetulan kan inspektorat Sleman ini punya satu penyuluh *anti* korupsi. Nah di awal-awal belai menjadi narasumber kami dalam media PKS pelatihan di kantor sendiri.
- Rz Jadi dari internal sendiri ya?
- Rno Dari internal Ya, kadang kalau gak melulu dari dalam, kadang dari luar Memang misalnya BPKP tersedia narasumber untuk yang kami butuhkan berkaitan dengan itu ya kami kesana Tapi kalau memang sih, kalau semacam PKS itu memang dari internal bukan kita tergantung BKPP pada kepegawaian tadi, bukan
- Rz Baik, lalu bu kan ada nih program-program pengembangan potensi lainnya yang memang mungkin tidak secara khusus mengarah ke *anti-fraud* kayak mungkin tentang teknik atau yang lainnya. Itu apa juga membantu meningkatkan kompetensi dari Ibu sebagai fungsional?
- Rno Hm em, Fungsional.
- Rz Untuk Meningkatkan kompetensi dalam *antifraud* dalam program lainnya, selain khusus yang mengarah *antifraud*?
- Rno Selain *fraud*?
- Rz Iya Apa itu membantu meningkatkan kompetensi untuk *antifraud*?
- Rno Memang kan ada kewajiban auditor itu untuk meningkatkan kompetensi. Bahkan dalam kami kenaikan peran dari seorang anggota tim, keketua tim, pengendali teknis, itu memang dituntut untuk mengembangkan namanya pengembangan profesi. Kalau kemarin dalam setiap pengajuan, setiap satu semester kami kan harus menilaikan berapa sih dalam satu semester melakukan pengawasan, berapa sih dalam satu semester melakukan pengembangan profesi, Atau terus berapa sih dalam satu semester kita melakukan pengembangan kompetensi, penunjang pendukung. Kalau pendukung itu misalnya ikut seminar atau kita menjadi narasumber tapi tidak berkaitan dengan pemeriksaan. Kadang seperti itu. Tapi kalau pengembangan profesi itu menunjang atas peran kita jabatan kita selaku fungsional auditor jadi kalau kita nggak mengembangkan kalau kemarin sebelum ada, jadi kemarin ada aplikasi namanya si Bijak, kita itu baru tahun ini masih debatable, sampai sekarang belum keluar. Yang mulai 1 Januari 2023 itu kita masih menunggu regulasinya dari Kemenpan kaitannya dengan penilaian angka

kredit tapi untuk yang kemarin sebelum-sebelumnya kami itu tetap pakai yang penilaian angka kredit si bijak itu, lah kalau kita nggak mengembangkan kompetensi kita, nggak bakalan naik pangkat. Bisa seorang-seorang yang sudah bertahun-tahun, sudah senior, bahkan sudah mau pensiun bisa jadi anggota tim terus iya

Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan *antifraud* tadi?

Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku saya auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi *nanti* pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak mengembangkan diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas membantu untuk pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi *fraud* maupun yang bukan. Sangat-sangat.

Rz Lalu bagaimana bu, dukungan dari internal inspektorat ini, walaupun dari eksternal, entah itu dari pusat atau dari BPKB, terlihat pengembangan kompetensi *antifraud*?

Rno Oh, sangat anu Saya merasa terdukung ya, apalagi dari internal. Karena gini, satu karena memang auditor itu butuh pengembangan profesi. Itu butuh sekali kalau kita bicara tentang kenaikan pangkat, itu kita harus selalu mengembangkan. Terus untuk pengembangan untuk karena tadi untuk pemenuhan, seketika gini, jadi auditor itu kan dituntut serba tahu. Serba tahu di semua lini. Artinya bahwa menjadi rujukan bagi para pelaksana di dinas-dinas itu untuk bertanya kepada kami, auditor. Misalnya, saya kebetulan dari akuntansi, saya bisa saja tiba-tiba ditanyai tentang teknik. Nah, teman-teman teknik kuliah 5 tahun, mereka familiar dengan itu. Nah, saya juga harus belajar tentang apa itu HPS, apa itu tentang proses lelang Sementara teman-teman dari juga harus belajar tentang apa itu laporan keuangan pemerintah daerah apalagi laporan keuangan setiap tahun kan kita diaudit oleh BPK untuk diberikan opini, nah itu kan tidak semua auditor itu berlatar belakang akuntansi nah padahal kami ada Ini contoh ya, kita harus ada melakukan review sebelum diserahkan ke BPK, laporan keuangan pemerintah daerah itu harus di review oleh Inspektorat. Kalau kita mengandalkan tenaga akuntansi yang di inspektorat, sedikit, Saya tuh, karena dari UII, ada teman itu UII, mungkin yang dari ekonomi akuntansi mungkin sekitar nggak sampai 10. Padahal tim big size review laporan keuangan itu bisa 16 orang. Nah dari mana kalau nggak menghire dari yang lain, seperti itu. Menghire dari yang lain itu disiplin ilmu lain. Jadi kalau ditanya bagaimana supporting dari internal, internal sangat men-support untuk pengembangan kompetensi, bagaimana dari sisi auditor apakah perlu? Sangat perlu sekali, Itu saya jawab seperti itu. nggih

Rz Ini selanjutnya terkait kekurangan dan kendala dalam perumahan kompetensi bu. Pertama mungkin kekurangannya dulu, dalam program-program pengembangan kompetensi yang sudah dilakukan ataupun yang mungkin yang sebelum-sebelumnya, Bu. Menurut Ibu, apa saja kekurangan yang terdapat?

- Rno Kekurangan dalam?
- Rz Program-program pengembangan kompetensi, menurut Ibu?
- Rno Jadi, karena keterbatasan. Jadi, karena pengembangan kompetensi itu kan anggaran tidak melekat di inspektorat, ya. Tidak semua melekat di inspektorat, khususnya untuk yang kalau PKS, pelatihan di kantor sendiri yang dilaksanakan internal memang ada di kami anggarannya tapi ketika itu kami harus misalnya menjadi seorang penyuluh itu kan harus diklat di KPK kalau kami mau katakanlah mau seseorang jadi BPK itu kan juga harus diklat nya di luar bukan di internal kita, inspektorat penyelenggara nya, mesti pihak luar. Nah sekarang kalau badan kepegawaian nya daerah itu, itu kan mengurus 48 SKPD, mengurus 46 dinas kalau sekarang dulu 48, sekarang 46, karena ada regulasi di RSUD yang menggabung di dinas kesehatan kami Sleman, punya 2 RSUD, dulu merupakan yang berdiri sendiri, sekarang di bawahnya Dinas Kesehatan menjadi 46. Setiap OPD butuh pengembangan khusus masing-masing dinas teknisnya, dan itu anggarannya diambil dari BKPP. Kalau saya bicara BKPP, tolong diartikan itu Badan Kepegawaian Daerah ya. BKPP. Nah, ketergantungan ini mereka kan harus membagi anggaran yang di sana untuk seluruh dinas yang ada di Kabupaten Sleman termasuk inspektorat. Kalau kami harusnya mengikuti sertifikasi, katakanlah sertifikasi pengadaan barang jasa, atau sertifikasi medris misalnya CRNO, itu kan biayanya mahal mas. Kalau mereka nggak mengol kan ya sudah, kami mundur, nggak jadi. Kan seperti itu. Jadi kami itu tergantung kalau untuk yang eksternal tergantung banget dengan BKPP. Pengembangan kompetensi yang eksternal dalam arti butuh sertifikasi ya. Harus buktinya nanti mengikuti ini kita lulus dengan sertifikasi itu bergantung banget lagi kalau di pelatihan kantor sendiri di internal cukup dengan inspektorat
- Rz baik bu, kalau kekurangan terkait informasi bagaimana bu terkait pengembangan kompetensi apakah ada miskomunikasi atau misinformasi terkait program-program pengembangan kompetensi antara yang struktural atau fungsional atau dari eksternal ke inspektorat?
- Rno Kalau miskomunikasi itu sebenarnya dimanapun tidak hanya pengembangan kompetensi mesti selalu ada, cuma yang dimaksud miskomunikasi ini kan tidak harusnya tidak selayaknya menghambat atas tujuan organisasi ya, tujuan inspektorat itu. Tapi kan gini mas, gimana ya, saya bilang nya kalau misalnya kami itu di awal tahun BBKP itu sudah mengeshare, ini loh kami satu tahun itu diklat nya di Ciawi sana, kami itu akan mempunyai program diklat seperti itu.
- Rz Ciawi itu?
- Rno itu, Ciawi mas Bogor. ya itu yang eksternal ya, itu yang tergantung anggarannya dengan BKD tadi, itu kan dia share, nah kami mengupload-upload, nah ketika sekali lagi, ketika sekali lagi kami mendaftar kemudian dana yang nggak tersedia ya otomatis kami kan gagal berangkat seperti itu, itu yang kaitannya dengan external Kalau internal sih biasa lah Menurut saya bisa terkendali
- Rz Terkendali bu?
- Rno Iya  
Lalu dalam hal Mengevaluasi Program-program pengembangan yang udah diikuti tadi, apa evaluasi nya lancar atau ada ya sebagian program yang belum di evaluasi menurut Ibu? Lebih kayak Ibu setelah ikut pengembangan potensi terus, yang di evaluasi seperti itu?

- Rno Oh, enggak, enggak seperti itu mas. Jadi auditor, seorang auditor. Ketika dia mau menjadi fungsional auditor, di awal sudah dibentuk dengan diklat. Yang diikuti diklat sertifikasi ya. Lulus peran misalnya auditor terampil, auditor muda, auditor terampil itu anggota tim, auditor ahli muda itu ketua tim, auditor madya itu pengendali teknis. Nah Ketika sebelum dibentuk itu, kami itu sudah dilalui seleksi saat itu.
- Rz Seleksi setelah diterima CPNS tadi?
- Rno Kalau saya kebetulan kan disini pendatang. Saya dulu kan enggak di inspektorat, saya dulu di BPK. Saya memang auditor dari BPK, begitu masuk saya mengikuti diklat BPK disana diklat auditor. BPK kan punya kampus sendiri untuk badan diklat nya ya. Kalau APIP, BPK itu kan external auditor, APIP itu internal auditor. Nah kalau di sini kan saya tadi bilang ada dua ya, fungsi auditor yang dari BPKP sama fungsional P2OPD yang dari Kementerian Dalam Negeri seperti itu.
- Rz Ini, lalu ini Bu, sekarang tadi kekurangannya, sekarang kendala yang menghambat tadi dalam mengikuti program-program kompetensi itu. Mungkin saya tanya secara konfirmasi, bagaimana dengan partisipasi dari pegawai yang ada di inspektorat ini?
- Rno Jelas, karena kami itu butuh, Kami itu jelas butuh pengembangan profesi. Jadi dari awal tahun itu sudah mapping kemana. Jadi kami, karena ya bagaimanapun tuh sesuai dengan apa yang dishare oleh BPKP, sekiranya yang masuk bisa diikuti auditor madya, ya auditor madya. Yang diikuti auditor ahli muda, ya ahli muda atau yang terampil cuma ya itu mas, memang pengembangan kompetensi bagi saya pribadi itu sebuah kebutuhan malu rasanya mas kalau ditanya sampai enggak bisa jawab oleh dinas gitu, makanya harus mengasah terus. Kalau terkait ini bu, kesempatan yang diberikan untuk para pegawai inspektorat dalam pengembangan kompetensi itu bagaimana? Apa banyak atau sedikit?
- Rno Kalau yang internal sama peluangnya, karena penyelenggara nya internal. Kalau yang di external kan kita enggak bisa mengendalikan tergantung dari mapping BKPP.
- Rz Kalau menurut Ibu itu sudah cukup banyak atau sedikit?
- Rno Sebenarnya itu kalau sebenarnya walaupun ya, toh seseorang menjadi jabatan fungsional itu entah itu anggota tim, ketua tim, entah itu pengendali teknis, tidak semua harus, menurut saya ya, ini saya pribadi, tidak semuanya harus tergantung anggaran di sana. Yang namanya belajar bisa melalui mengikuti live streaming dari entah itu youtube, entah itu kita ngikuti adanya seminar, webinar, kan gitu. Kan sekarang banyak yang gratis dilaksanakan oleh kementerian. Cuma kini mas kendala nya itu justru waktu, alokasi waktu. Karena biasanya kayak gitu di webinar, seminar, terus yang Zoom itu pagi hari. Sementara pagi hari itu kami biasanya kan, kalau yang kemarin-kemarin sebelum bidang Itu kan di lapangan ya, seringnya di lapangan. Nah itu padahal kalau setiap hari kan kapan selesainya penugasan? Salah satu tinggal, kan seperti itu. Misalnya ini saya meriksa desa. Kebetulan kan ada Zoom tentang *anti* korupsi. Ada sosialisasi atau bimtek *anti* korupsi yang di situ bebas biaya, free bebas Mengikuti, kalau kuota nya habis, kita bisa mengikuti melalui YouTube. Tapi, kan kadang yang namanya pengembangan kompetensi itu kan kadang, memang selain menyerap ilmu juga harus dibuktikan dengan kehadiran Nah itu kan yang sulit mas, ketika mau buktikan kehadiran sementara kita sudah di hari jauh-jauh hari malah

diagendakan besok rebo saya mau pemeriksaan ke dinas mana, tiba-tiba harus ada Zoom. Kan jadi, kita butuh itu, tapi juga pemeriksaannya harus jalan. Nah itu yang kadang membagi waktunya yang agak sulit. Kalau kendala bagi saya justru waktunya itu bertubi-tubi

Rz Berarti itu bisa diatasi dengan kreatifitas auditor sendiri?

Rno betul, ya kita pandai-pandai lah misalnya terpaksa nggak bisa yuk, *nanti* ngikut Youtube kan bisa diputar ulang. Belajarnya kan tidak harus di pagi itu. Cuma kan diakuinya karena sertifikat atau kehadiran itu kan diakuinya pada saat pelaksanaan yang live itu. Nah kalau itu ilmu masuk tapi kehadiran nggak diakui, padahal itu sebuah kebutuhan dua-duanya. Nah itu kan bisa saja antara saya dengan mas Reza atau dengan yang lain mengendorkan semangat. Aku itu butuh pemahaman, pengembangan kompetensi. Tapi karena aku gak diakui males ah belajar ngapain di luar waktu jam kerja. Kan seperti itu, kadang itu kan kita gak bisa memungkiri hal-hal itu dan kita gak bisa mengendalikan, sementara saat ini 28 auditor kan kami itu udah 28 auditor kan saya dengan yang satunya yang setingkat saya ada 9 Nah, Nah mungkin yang 8 kan pemahamannya gak sama dengan saya. Mungkin beliau-beliau, yang penting kompetensi saya terpenuhi. Artinya, ah yang penting ilmu saya serap. Perkara kehadiran, ah gak masalah. Tapi bagi saya, dua-duanya. Karena apa? Misalnya karena saya butuh naik pangkat. Mungkin dia gak penting karena dia habis naik pangkat. Nggak bisa disamaratakan kalau seperti itu.

Rz Kalau dalam mengikuti penggunaan digital bagaimana? Apakah terkendala mungkin sangat lambat? atau

Rno Oh iya, kalau Bandwith Jelas, kadang kan naik turun yang namanya untuk seluruh Sleman. Kalau untuk... Apa lebih spesifiknya?

Rz Spesifiknya lebih ke... Bisa cepat memahami...

Rno Oh, itu tergantung usia ya. Kayak saya udah kepala 5. Kepala 5, kan kadang kalau begitu sekali nggak bisa langsung jadi kan butuh panduan. Mungkin Saya karena saya merasa saya pribadi kadang ketinggalan ya saya tulis. Oh misalnya saya buka aplikasi yang MJP KPK tahapan nya apa ya saya tulis biar saya *nanti* gak langkah satu ini kedua ini biar saya gak lupa. Mungkin bagi yang muda-muda, yang masih fresh graduate, yang anggota tim, atau yang ketua tim masih muda-muda, nggak masalah. Begitu dia terima tadi sini ini, memori nya lebih masih, masih ini, rasa lupa nya, apa, kuota lupa nya masih jauh. Kalau yang udah kepala lima kayak saya, ya saya tulis daripada itu. Toh itu untuk kebutuhan saya dan tidak merugikan orang lain yang seperti itu.

Rz Baik-baik, Lanjut ini terkait strategi mengatasi kekurangan dan kendala yang ada. Mungkin pertama kali strategi mengatasi kekurangan atau kendala yang terdapat dalam pengumuman kompetensi. Yang pertama, apa langkah konkret yang sudah dilakukan untuk mengatasi kendala dan kekurangan seperti ada mungkin anggaran yang terbatas dalam pengembangan kompetensi?

Rno Kalau itu, kalau anggaran saya nggak bisa komen ya, karena itu bukan ranah kami. Kalau saya bicaranya selaku pribadi saya, pribadi saya ya saya berusaha aja semampu saya, dalam arti kemampuan saya ya seperti itu. Saya mungkin bagaimana saya berusaha kalau memang saya nggak tahu ya saya harus tanya. Kalau, ya saya berusaha semaksimal aja mas. Tapi ya tidak, tidak dengan anu ya dengan kapasitas saya, dalam arti, nggak bisa dong saya itu disamakan dengan yang ketua tim yang masih muda-muda itu dimana dong nya tinggi dimana saya

kan harus belajar bertahap tapi berusaha apapun itu yang baru saya berusaha untuk belajar seperti itu sekali lagi karena auditor itu dianggap mempunyai pengetahuan di segala lini disiplin ilmu. Seperti itu. Tidak sebatas background nya, misalnya saya akuntansi, saya tahu akuntansi, tidak.

Rz Harus tahu yang lain, termasuk dinas kesehatan.

Rno Iya, betul. Iya, betul. Kalau Dinas Kesehatan bicara tentang standar pelayanan minimal, tentang standar pelayanan minimal nya Kementerian kesehatan gimana? Kita harus baca standar-standar itu pada saat kita melakukan pemeriksaan yang berkorelasi dengan atau berkaitan itu, ya mau tidak mau kita harus tahu kan itulah salah satu pengembangan kompetensi, tidak hanya melalui media formal, maksudnya formal kita duduk bersama, baik internasional, tapi juga kreatifitas kita bisa melihat sambil duduk bahkan mungkin sambil nunggu bis, nunggu grab, atau nunggu kereta atau pesawat Youtube itu mbah Google banyak sekali, apa sih SPM nya?

Rz Anytime ya?

Rno Anytime, ya. Tapi ya itu, dengan semampu yang kita... Ini nggak bicara, anu ya. Saya Saya nggak bicara. Maksudnya dalam arti idealis nya seperti itu. Tapi enggak, memang seperti itu harusnya. Harusnya dalam arti itu yang saya jalani. Kalau misalnya pas nunggu boarding pesawat atau kereta, saya lagi gak mood, saya gak buka. Apa itu misalnya belajarlh apalah, saya gak buka. Saya lihat anu aja informasi-informasi youtube mungkin youtube yang hiburan gitu tidak selamanya seperti itu bukan terus kaku sekali enggak

Rz iya iya, butuh hiburannya ya bu ya

Rno oh iya, kalau *nanti* stress kita iya iya bayangin aja, dianggap tau semuanya tiba-tiba di tanyain tentang HPS, tentang orang-orang akuntansi tiba-tiba di tanyain tentang proses lelang. Tiba-tiba ditanyain tentang Standar Pelayanan Kesehatan. Tiba-tiba di tanyain bagaimana sih mengukur kualitas jalan, mengukur kualitas jalan, volume kan, ya kalau kita nggak bakalan bisa sama hasilnya dengan yang mereka 5 tahun belajar di teknik. Tapi ya paling enggak kita tahulah istilah-istilah umumnya. Sehingga ketika ditanya oleh dinas atau mereka yang butuh pendampingan, kita bisa kasih solusi. Kan seperti itu

Rz Lalu kalau, ini dulu, Tadi volume pekerjaan disini lumayan banyak, Bu ya? Nah itu, apa menghambat proses ketika pegawai inspektorat ini mau menambah ilmu yang volume kemudian jadi membuat waktunya jadi kurang, apa menghambat?

Rno Mas, kalau menghambat itu di semua lini, iya saya jawab iya, karena apa, yang namanya surat tugas bertubi-tubi semua, apalagi ada SOP, semua laporan harus selesai dalam satu bulan setelah pemeriksaan di lapangan dengan tim yang berbeda, itu jelas akan terhambat tapi bagaimana pinter-pinternya si auditor itu sendiri untuk membagi waktu bahkan kayak saya itu, saya rasa gak cuma saya ya temen-temen itu sampai rumah memang jam kerja kita sampai jam setengah 4 tapi di rumah, kadang saya sampai jam 12 malam itu masih ngoreksi LHP-nya punya ketua tim saya harus ngisi, bahkan yang berkaitan dengan ekin saya ngisinya di rumah kenapa, gak sempat di sini, tapi juga melihat sikon di rumah artinya gak mengorbankan, *nanti* suami kita butuh ini, oh sebentar saya lagi kerja enggak *nanti* kita bisa dimarahi para suami kita, dimarahi suami atau dimarahi anak Anaknya butuh bimbingan. Oh sebentar ibu lagi ngoreksi. Nggak bisa seperti itu.

Rz Harus ada kesempatan, baru.

- Rno Iya betul. Harus pinter-pinter alokasi waktu. Memanfaatkan peluang yang ada
- Rz wilayah waktu udah di rumah udah beda prioritas ya bu ya
- Rno iya skala prioritas, hidup kan harus ada skala prioritas gak harus semuanya sama *nanti* malah pusing sendiri kalau skala prioritasnya sama.
- Rz Terus dari inspektorat sendiri bu, bagaimana caranya mengatasi kendala seperti itu? Antara waktu belajar dengan kerjaan tugas-tugas sendiri. Udah ada apa upaya yang telah dilakukan oleh inspektorat ini?
- Rno Loh, itu kalau ranah nya yang menjawab, *nanti* ranah nya sekretariat, bukan kami. Kan memang sudah tahu, karena gini, kami itu ada PKPT, PKPT itu program kerja pemeriksaan tangan. Program kegiatan pemeriksaan tangan PKPT. Nah itu, disitu ada yang sifatnya memang di prioritaskan, ada yang mandatory. Kalau yang mandatory itu mau tidak mau suka tidak suka harus dijalani dan harus dikerjakan, artinya dijalani, dikerjakan dan dibuat, mesti ada output nya nah sekarang saya rasa ketika yang mapping nya berusaha tim diusahakan tidak berubah Contohnya tim tidak berubah sehingga koordinasi nya lebih mudah. Tapi kadang kan gini mas, kekuatan tim satu dengan yang lain itu kan berbeda. Mungkin penilainya dari pemberi tugas, tim ini dianggap sudah kuat. Tim satunya belum kuat. Tapi yang kuat ini belum tentu Koordinasi nya baik. Ketika dia koordinasi nya nggak baik, yang namanya pemeriksaan kan tugas tim. Tim itu bisa 4 atau 3 orang atau bahkan 5 orang dengan inspektur ya, kan susunannya, dan penanggung jawab, wakil penanggung jawab, pengendali teknis, ketua, anggota. Ketika satu tim itu udah dianggap kuat, belum tentu dia segera menyelesaikan tugas. Karena apa? Satu, mungkin koordinasi nya ada yang memang yang dianggap mudah, ternyata enggak, di luar prediksi. Terus yang kedua, ketika kecukupan data yang kita peroleh dari entitas, dari OPD maupun dari auditee itu tidak lancar, itu kan berpengaruh. Kalau dari inspektorat sudah berusaha, tapi gimana, oh ini misalnya ketua timnya kuat, didukung oleh anggota tim yang agak, mungkin kan semua kan ada grade, tapi penentuan grade itu bukan kami di auditor. Mungkin kemampuan dari seorang pengendali teknis kayak saya dengan 8 orang yang lain itu kan jelas berbeda. Kayak gitu gak bisa kita
- Rz Kalau dari Ibu sendiri apa ada yang dilibatkan untuk menguruskan program kerja?
- Rno Kalau program rencana itu awal-awal memang kami sempat dimintai masukan tidak hanya saya, tapi beberapa teman juga dimintai masukan tapi kadang yang namanya PKPT itu di pertengahan jalan kan berubah karena amanat dari pusat atau dari amanat pimpinan Gak bisa selamanya Ya namanya, misalnya mas Reza mau pergi ke Jakarta naik kereta Tiba-tiba wah kok capek ya, tak naik pesawat aja Nah seperti itu, perubahan itu kan selalu ada Tapi Mas Reza kan dalam hal ini ke Jakarta sendiri. Kalau saya dan teman-teman auditor kan kerjanya tim. Nah itu begitu, mengubah itu kan akan sangat berpengaruh di semuanya. nggih
- Rz Berarti kalau untuk urusan ini, kreativitas dari inspektorat sendiri memberikan gak bu ruang kreatif bagi para pegawainya?
- Rz Kalau menurut Ibu, jika Pemda meningkatkan penghargaan kepada PNS, PNS di sini Bu ya?, itu apa yang membantu ke semangat meningkatkan kompetensinya?
- Rno Bisa, sebenarnya tidak, kalau semangat yang jelas, kalau semangat iya, tapi kompetensi meningkatkan penghargaan atau meningkatkan anggaran. Sesuatu yang berbeda ya.



## Penghargaan

- Rno Kalau penghargaan itu jelas ketika seseorang dikasih penghargaan itu semangatnya akan memancing semangatnya semakin tergali, semakin tinggi ya. Dia bekerja kan sesuai ini. Sekarang logika aja, Udah kerja keras tidak ada penghargaan. Etosnya kan turun. Nah, tapi udah kerja keras hasilnya bagus, ada penghargaan. Oh, luar biasa kan hasilnya. Tapi kalau kita bicara anggaran, anggaran belum tentu berkorelasi langsung dengan anu mas. Kalau kita bicara secara makro, tapi kalau kita bicara secara mikro dalam arti anggaran berpengaruh pada peningkatan kompetensi, saya jawab iya, karena apa? Apalagi yang berkaitan dengan eksternal, yang penyelenggaranya eksternal. Tapi kalau penyelenggaranya internal memang anggaran juga ketika rasionalisasi juga akan terpengaruh kan? Harusnya PKS-nya yang di internal itu setahun bisa 12 kali, karena rasionalisasi anggaran bisa aja tinggal 5 kali. Nah ini kan pengembangan kompetensinya jadi terhambat juga kan. Kalau rasionalisasi ini apa seringnya terjadi dikurangin ya bu?
- Rno Ya karena pandemi covid itu kan kita semua berkurang. Iya, Covid kan baru dicabut bulan Juni kemarin kan. Status Covid yang kita kembalikan normal itu Juni atau Mei ya?
- Rno 2022 ya?
- Rno 2023.
- Rno 2023?
- Rno Baru kemarin.
- Rno Saya di UII kami masuknya Mei 2022.
- Rno Ya itu anak saya praktek jahit tubuh itu pake boneka
- Rno Baik bu, kalau dari harapan ibu sendiri bu sebagai fungsional terkait pengembangan kompetensi *antifraud* apa saja bu?
- Rno Kalau saya khususnya
- Rno Dan harapan Ibu pada teman-teman Ibu?
- Rno Oh saya terus terang, pengen semua teman-teman auditor itu diklatkan audit investigasi, audit penghitungan keuangan negara, audit yang mengarah pada kecurangan sehingga bisa membedakan auditnya itu khusus investigasi atau yang biasa. Jadi pengetahuan mereka itu tidak konfius. Ketika ada aduan tidak serta-merta diterjunkan, bahkan tidak semua auditor saya harapannya, semua harapan saya, kalau harapan saya semua nih, dari jajaran inspektur sampai penunjang-pendukung artinya kesekretariatan yang berkaitan langsung dengan pemeriksaan investigasi maupun *fraud*, maupun PKKN semua mendapat pengetahuan itu karena apa? Kita tuh semakin tidak menutup mata di kabupaten, kota yang lain sudah banyak yang terjadi. Naudzubillah mindzalik jangan sampai terjadi di Sleman ya. Ya maksudnya itu pengetahuan itu sangat dibutuhkan karena memang ada MOU dengan APH sehingga ketika menerima penugasan itu apakah layak dinaikkan untuk dilakukan pemeriksaan investigasi atau pemeriksaan penghitungan ke anggaran. Jadi kita bisa men-stop sih, mana sih yang harus dinaikkan, mana yang tidak mana sih yang harus dilakukan mana yang tidak, mana sih yang harus diterima mana yang tidak saya sih harapannya semua itu semuanya justru yang terkait paling enggak auditor semua ya dikursuskan Kalau memang anggaranya terbatas yang berkaitan dengan *fraud* Sering-sering lah menerima melalui PKS itu tentang pengetahuan, menerima pengetahuan tentang itu. Sehingga tidak saling *nantinya*, ketika kita kan, yang

namanya auditor, ketika melakukan pemeriksaan tidak bisa membatasi pertanyaan dari yang diperiksa. Misalnya nih Mas Reza, auditor bidang pemerintahan, tiba-tiba ditanya waktu ke desa, Mas, apa sih audit investigasi? Lah kalau nggak tahu kan ya, masa Mas Reza, oh itu ada di bidang kami khusus investigasi. Kan gak lucu mas.

Rz Jawabannya gak sesuai.

Rno Iya jawabannya kan gak sesuai. Oh audit investigasi tuh ini nih jelaskan mungkin secara makronya. Tapi di kami ada bidangnya misalnya seperti itu. Terus misalnya ada permintaan audit investigasi terpenuhi enggak sih unurnya kalau audit investigasi itu kan kita juga sudah menerima dokumen dari yang meminta jangan sampai kita juga mencari layak enggak misalnya dari audit investigasi dinaikkan jadi PKKN nah seperti itu loh jangan sampai ketika kita disuruh menghitung PKKN itu penghitungan kerugian keuangan negara kita langsung menerima padahal kita nggak punya dokumen apapun padahal di dalam PKKN itu kita terima dokumen dari APH akan kami kaji seperti itu. Nah itu kan melibatkan semua lini khususnya sebelum surat tugas terbit. Kalau auditor kan pelaksana tugas, ada surat tugas terbit, jalankan. Tapi pintu utama paling tidak di tingkat penunjang dalam hal ini, kesekretariatan kan juga harus tahu kajian seperti itu. Jadi bisa mensortir buat kita.

Rz Ada yang terlewat yang mau saya bahas tentang digital forensic

Rno Waduh digital forensic aku gak

Rz Apa sudah ada penerapan atau upaya untuk mengembangkan potensi pegawai di sini dalam hal digital forensic?

Rno Kemarin ada satu mbak untuk lebih digital forensik, barusan ada yang diklat namanya mbak Tiwi, dan dia kemarin hasilnya luar biasa.

Rz Itu menurut ibu bagaimana? Terkait itu apa sangat dibutuhkan?

Rno Digital Forensik itu kan media-media yang kita gunakan, misalnya seperti ini mas Reza wawancara saya pakai rekaman gitu kan nah seperti itu kalau APIP itu sebenarnya ya memang perlu tapi tidak serta-merta seperti KPK atau BPK Tapi memang perlu tahu jangan sampai kita ketinggalan informasi.

Rz Kira-kira Kan udah ada bidang baru investigasi dan reformasi birokrasi itu?

Rno Kan belum ini mas, baru kami mulai justru mau sebagian baru diklat kan itu.

Rz Iya. Baik-baik. Bagi ibu mungkin cukup baik disini. Iya, Iya, alhamdulillah. Pada hari ini, alhamdulillah. Saya terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang ibu berikan. Dan waktu yang udah ibu berikan juga. Saya mohon maaf apabila ada salah tanya

Rno gak apa-apa mas, yang namanya belajar loh sama saya, saya juga masih belajar jangan dikira saya terus sekarang gak belajar enggak, saya juga belajar.

Lampiran 9 Wawancara Bapak Inspektur Hery (01 Agustus 2023)

Narasumber /Jabatan : Bapak Hery Dwi Kuryanto, S.H., M.Hum. / Inspektur  
Usia : 55-59 Tahun  
Lama Bekerja : 30 Tahun  
Waktu : Selasa, 01 Agustus 2023  
Lokasi : Inspektorat Kabupaten Sleman  
Durasi :  
Keterangan : “Rz” adalah Pewawancara/Peneliti  
Transkrip : “Hy” adalah Bapak Hery

Hy Judulnya apa skripsi ini,?

Rz Itu, Pak, mengelola sumber daya dan pengembangan SDM *anti-fraud*.

Hy Ya, iya.

Rz Mungkin langsung ke pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian saya, Pak. Dalam hal pengembangan kompetensi SDM di inspektorat ini, Pak, atau khususnya di bidang yang berkaitan dengan *anti-fraud*, itu kekurangan atau kendala apa, Pak, yang menurut Bapak dirasakan atau Bapak amati dalam pengembangan kompetensi, Pak?

Hy Kekurangannya? Ya. Dari sisi... Jadi gini, kita kan harus pengembangan itu dari sisi kompetensi pertama. Dari sisi kompetensi itu bisa kita lakukan peningkatan dari sisi pengetahuannya, kompetensinya Itu melalui diklat. Itu kan sesuatu yang bisa dipelajari. Tergantung kepada bagaimana kemampuan, terus kemauan dari SDM untuk mengembangkan diri. Kita ada dari diklat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga baik itu di BPKP maupun BPK. Kemudian yang terpenting lagi adalah justru bukan hanya pengembangan kompetensi, tapi lebih kepada kualitas diri. Itu yang terpenting. Jadi profesi... Di sini kan auditor, fungsional. Profesi auditor itu bukan hanya didukung oleh profesional kompetensi seorang auditor. Tapi harus dibarengi dengan integritas. Citra diri. Kemudian bagaimana kemudian integritasnya mereka itu benar-benar bisa ditegakkan. Antara nilai-nilai yang ada di dalam dirinya itu benar-benar bisa diterapkan dalam melaksanakan tugas. Jadi tidak ada gunanya kalau seorang yang memiliki kompetensi kemudian integritasnya rendah. Karena kalau integritasnya rendah artinya profesionalnya kompetensinya bisa tergadaikan. Itu semua pekerjaan kan yang kayak gitu. Auditor kalau di sini fungsinya fungsi pengawasan, auditor kalau sudah tergadaikan profesionalismenya, artinya kompetensinya berarti tidak akan bisa mengawal fungsi inspektorat selaku pengawas. Itu aja titiknya. Sehingga pengembangan integritas itu melalui apa? Ini yang terpenting adalah dari internal manajemennya. Dari inspektur, dari sekretaris, dari irban. Artinya kami, saya sebagai inspektur, perlu mendrive teman-teman struktural baik dari sekretaris sampai ke bawah. Itu melalui pembinaan. Baik itu di apel pagi setiap Senin atau pertemuan-

pertemuan rutin. Kita kuatkan integritas dia. Dan di tempat kita ada yang namanya, setiap apel kita membaca yang namanya pakta integritas. Ada delapan pakta atau berapa. Itu yang sebetulnya akan membangun kepribadian dari mereka untuk bisa menegakkan profesionalisme mereka. Terus kita juga, ada kita pelatihan, bukan, pemberian motivasi dari pihak luar. Motivasi kaitannya dengan profesional, bagaimana bekerja secara profesional, maupun dari aspek keagamaan. Itu yang paling terpenting. Udah jawabannya selesai.

Rz Penceramah juga ada diundang?

Hy Iya, kita-kita ngundang. Pembekalan keimanan seseorang itu, baik dari agama manapun, itu yang paling penting karena dia akan lebih, dia akan teguh terhadap integritasnya manakala itu disentuh. Seorang apapun pandainya kayak apa, kompetensinya kayak apa, karena kan kadang yang melanggar itu yang pintar-pintar. Bener gak?

Rz Bener pak.

Hy Itu jawabannya cuma dua.

Rz Kalau untuk ini pak, ada mungkin sebagian yang menganggap volume pekerjaannya banyak termasuk kendala dalam rangka dia mengembangkan kompetensi. Menurut bapak apa cara untuk mengatasi hal seperti itu?

Hy Ya, bagaimana kita manage waktu.

Rz Kita pribadi ya pak?

Hy Iya, bagaimana manage waktu. Kemudian bagaimana kita punya tanggung jawab. Ya kan? Tanggung jawab itu harus, artinya disiplin untuk memanfaatkan waktu. Jadi kita itu, sebelumnya kan bekerja itu tanpa diperintah. Disiplin tanpa diawasi. Jadi disiplin itu tanpa diawasi. Kalau sudah jalan, disiplin tanpa diawasi, bekerja tanpa diperintah, terus tanggung jawab itu tanpa diminta. Jadi tanggung jawab itu gak usah diminta, pekerjaan selesai sini. Gak usah tanggung jawabmu menyelesaikan pekerjaan ini, tanpa kita minta mereka menyerahkan pekerjaan. Itu yang kita harapkan. Iya.

Rz Lalu untuk ke depannya Pak, program-program pengembangan kompetensi, baik itu kompetensi ataupun meningkatkan kualitas diri, integritas, dan lainnya, itu harapan Bapak seperti apa? Langkah-langkah yang akan dilakukan ke depannya Pak?

Hy Tetap kami itu. Artinya, tadi apa, pengembangan diri, baik secara kompetensi, kaitannya dengan pekerjaan, maupun kaitannya dengan kinerja, kualitas, bagaimana dia berkualitas di dalam bekerjanya, integritasnya, saya kira itu, tetap dua hal itu. Namun kemudian kita harus melakukan evaluasi. Ya, pas gak kaitannya kalau kompetensi, yang kurang mana, gitu. Kompetensinya kan banyak.

Rz Iya, Pak.

Hy Di inspektorat kan banyak yang dibutuhkan, sesuai dengan bidang tugasnya. Oh, yang kurang mana, baru dilakukan diklat atau pun apa.

Rz Kalau yang khusus dengan *anti-fraud*, Pak, dan untuk mengikuti perkembangan zamannya, bagaimana harapan Bapak dalam hal kompetensi, dalam rangka *anti-fraud* tadi?

Hy Ya, itu. Kalau kami tetap, ke depan pun, dua hal ini, Mas. Dua hal ini yang dibangun. Kalau itu, seseorang memiliki, tadi, kompetensi, integritas, profesionalisme, kita tidak akan ada penyimpangan. Pasti itu. Iya, Pak. Ya udah, benar itu. Karena, apa ya, memang ada juga.

Rz Kalau untuk hal yang berkaitan dengan penggunaan digital, Pak, apa yang Bapak harapkan dari...

Hy Ya, sekarang, kemampuan penggunaan IT, ya.

- Rz Seperti digital forensik, mungkin.
- Hy Oh, yang digital forensik.
- Rz Iya, apa pendapat bapak dengan itu
- Hy Ya, itu kita harapkan. Untuk digital forensik, itu kemampuan itu harus juga dikembangkan ke kita. Karena, kita ada loh, Mas. Sudah disampaikan belum, ya. Tapi diklatnya sudah ataukah belum. Kita kan ada... Audit PBJ, ya. Di teknologi informasinya. Harusnya ada. Nah, ini kalau kita memiliki kemampuan di situ, harusnya ke sana. Tapi kelihatannya kami belum sampai ke sana. Kami upamanya... Kita kan ada... Harusnya kan ada audit teknologi informasi. Kaitannya dengan sistem yang digunakan. Tapi kemampuan kami kan terbatas. Di jaranglah yang memiliki kemampuan untuk itu.
- Rz Masih jarang, Pak. Kalau rencana Bapak mungkin ke depannya untuk meningkatkan kemampuan seperti mau program-program seperti apa pak
- Hy Ya, mungkin...Mungkin saya belum bisa Memberikan komentar banyak tentang itu. Tapi itu seiring dengan kemajuan teknologi, saya kira itu sangat diperlukan. Di dalam menyikapi perkembangan teknologi. Artinya perkembangan teknologi kan mesti plus-minus. Plusnya itu membawa... Perkembangan teknologi itu bisa memberikan sisi positif di dalam pengelolaan pemerintahan. Tapi satu sisinya, yang namanya teknologi, pasti akan membawa dampak negatif juga. Kita dulu, ya, sebelum yang namanya... Mas siapa?
- Rz Reza.
- Hy Mas Reza. Itu kan lebih memahami teknologi informasi kan lebih tahu panjenangan daripada saya. Sebelum semuanya terupdate, kemudian tersaji dalam... Apa?
- Rz Media.
- Hy Ya, media teknologi informasi, ya. Itu kan nggak ada pembobolan-pembobolan. Tapi kan sekarang justru itu terjadi. Namanya data kependudukan. Dulu kan sistemnya kan hanya disimpan saja. Datanya manual diketik. Tapi kan jarang. Mungkin yang ter... bisa dikonsumsi oleh publik melalui hacker ataupun apa. Yang itu yang harus juga dibarengi dengan kecepatan aparat pemerintah. Mungkin khususnya di inspektorat untuk bisa melakukan pemeriksaan, melakukan audit terkait dengan teknologi informasi, pemanfaatan teknologi informasi. Kemampuan kami belum sampai ke sana. Ya, jadi gini. Katakan kami meriksa di sistem pengadaan barang dan jasa. Itu kan semuanya sudah berbasis teknologi semua. Pengiriman datanya, kemudian pengumuman pemenang, terus bagaimana. Lah bagaimana kami bisa melakukan audit terkait dengan katakan SOP-nya sendiri menentukan pemenang kalau kami tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu.
- Rz Maaf, tadi menentukan pemenang?
- Hy Kalau upamanya lelang.
- Rz Lelang.
- Hy Lelang itu, kalau di sistem lelang sekarang kan semua sudah. Tidak ada tatap muka, kan? Orang dari Jaya Pura pun langsung masuk bisa melakukan penawaran. Ya. Kemudian sistem yang digunakan kayak apa itu kan pasti bisa katakan bisa direkayasa. Ya kan? Kami dari tim audit kan harus mengetahui itu. Dan itu minusnya teknologi yang bisa direkayasa. Kalau saya ngomong teknologi kurang memiliki kemampuan untuk itu, mungkin kan itu saja.
- Rz Kalau dari dukungan luar inspektorat, Pak, dalam hal pengumuman kompetensi *antifraud*, bagaimana, Pak?
- Hy Kita dukungan ada. Artinya dari lembaga-lembaga BPK, BPKP, KPK itu kan selalu

mendukung kami. KPK itu selalu melakukan pengawasan kepada kami, terutama kaitannya dengan pencegahan. Pasti. Kami dipantau itu. Kita punya program yang namanya MGB.

Rz MGB ya?

Hy Ya, buka *nanti* MGB KPK. Itu ada delapan area terkait dengan sumber daya manusianya. Manajemen SDM, manajemen aset, perencanaan anggaran, perizinan, pengadaan barang dan jasa, pemerintahan desa, APIP. Itu kami dipantau. Kemajuannya sampai berapa. Dan sleman alhamdulillah nilai kita terbaik di DIY. Alhamdulillah. Kita nilainya bagus.

Rz Saya juga warga Kabupaten Sleman. Saya tinggal sama orang tua di sini.

Hy Itu mas, kalau kami diawasin. KPK itu sekarang gini, kontrol terus. Setiap kegiatan kita diawasi, kita laporan.

Rz Oh jadi laporan lagi?

Hy Iya ada.

Rz Ke sekda?.

Hy Enggak, jadi laporan gini kita melakukan apa itu ada yang tadi 8 area itu. Itu laporannya ke sana.

Rz Ke KPK?

Hy Iya. Terus kaitannya kalau itu, kita kan dilakukan yang namanya, Bukan nilai, tapi kita itu dilakukan kontrol, pengawasan oleh lembaga-lembaga pusat. Selain kita pun, LSM juga mengawasi kita. Untuk laporan keuangan, tau nggak? Laporan keuangan itu kan dinilai. Mas harus tahu, mas Reza. Laporan keuangan itu dilakukan penilaian, dilakukan pemeriksaan, dilakukan audit. Jadi setiap, jadi 3, apa? 3 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Anu Desember ya, katakan tahun anggaran. Pemerintah kabupaten, pemerintah daerah, bukan kabupaten kok. Provinsi maupun kabupaten kota itu harus melaporkan. Laporan keuangan daerah. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya. Dilaporkan ke BPK, kemudian diaudit. Dinilai itu. Jadi kita nggak bisa mau macem-macem. Kemudian dinilai, oh ini WTP, wajar tanpa persyaratan, tanpa pengecualian. Sampai 4 item itu. Sampai yang terakhir disclaimer, tidak bisa dinilai itu. Itu kita, dan Sleman 12 kalau nggak 11 kali. Iya, dan kita laporan keuangan pemerintah daerah LKPD itu tercepat. Harusnya 3 bulan Maret ya, 31. Kita 5 Januari sudah lapor. Tercepat. Itu mas, kontrol BPK, BPKP setiap saat meriksa. Kita, sifatnya pendampingan kalau BPKP. Evaluasi, itu sampai ke pemerintah desa. Terus belum KPK, KPK menilai kita.

Rz KPK secara online aja?.

Hy mereka datang ke sini. Mereka datang ke sini, kemarin 2 hari di sini.

Rz 2 hari?

Hy Iya.

Rz Ini pertanyaan terakhir Pak. Apakah dari inspektorat ini memberikan ruang kreatifitas atau kebebasan pada pegawai untuk mengembangkan kompetensi berkaitan dengan *anti-fraud* Pak?

Hy Kita hanu, kita memberikan kebebasan. Dan kita punya program pelatihan tertentu, Mas. Harusnya teman-teman ngasih ya, teman-teman ada itu. Sebetulnya harusnya sudah diberi jawaban oleh teman-teman. Itu kan ada program yang secara rutin kita lakukan. Terus teman-teman juga ada pelatihan yang internal sendiri. Pelatihan kantor sendiri. Jadi kita ada hal yang sifat...Program peningkatan kompetensi itu berdasarkan kebutuhan kita. Ataupun atas usulan teman-teman. Tapi usulan teman-teman juga harus yang itu mendukung program. Tidak bisa... Mereka usul kalau itu tidak

memberikan kontribusi ataupun mendukung program kegiatan kita. Tidak mungkin. Apa?

Rz Iya Pak, betul-betul.

Hy Ya, jadi tujuannya kalau untuk inspektorat, Pasti pelatihan apapun itu, pasti mendukung itu. Jadi kecurangan semua itu kalau yang namanya APIP, Pasti dalam rangka untuk menghindari kecurangan. Tidak ada pelatihan yang di sini tanpa...Aktifitas yang dilakukan oleh inspektorat itu semua menuju ke sana.

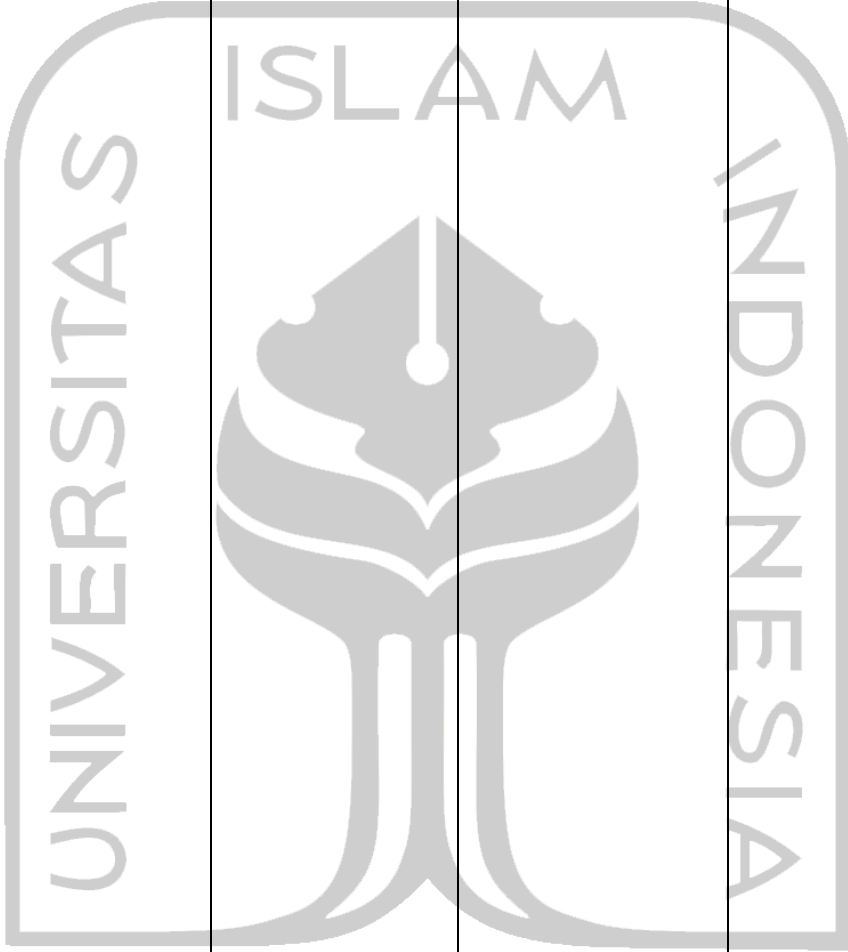
Rz Betul. Itu saja Pak, yang bisa saya wawancarai dari Bapak. Saya terima kasih atas waktu yang sudah...



Lampiran 10 Framework Matrices Rumusan Masalah 1: Mekanisme *Antifraud*

Narasumber	a. Pencegahan	1. Sosialisasi <i>anti</i> Korupsi dan Gratifikasi	10. Pembinaan lini manajemen pemerintahan	2. Penyuluhan pencegahan Gratifikasi dan Saber Pungli	3. Membuka konsultasi	4. Membagi selebaran dan surat edaran <i>anti</i> gratifikasi	5. Pendampingan pelaksanaan Tupoksi PD
1. Heri Setyawati, S.E., M.Acc.		Ya mengeluarkan surat edaran tentang <i>anti</i> gratifikasi, kemudian kita juga ada sosialisasi <i>anti</i> korupsi ke berbagai hampir ke semua skpd, kemudian pendampingan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepada SKPD, artinya biar <i>nanti</i> untuk mencegah itu kan, pendampingannya kita laksanakan dulu jangan sampai <i>nanti</i> maksudnya pendampingan biar tugas pokok dan fungsinya SKPD itu berjalan baik, kemudian kalau semuanya baik kan berarti menghindarkan dari <i>fraud</i> , kemudian kita juga, apa istilahnya itu Mba Pipit		Ini ada surat MOU ya tiga antara pemerintah kabupaten sleman, dalam hal ini inspektorat bekerja sama dengan kejaksaan dan kepolisian dalam rangka pencegahan dan penanganan <i>fraud</i> , salah satunya adalah dengan mengundang dari kepolisian atau kejaksaan untuk memberikan materi mengenai pencegahan <i>anti</i> korupsi kepada masyarakat bisa, kemudian personal pegawai disini juga bisa, kemudian <i>nanti</i> misalkan ada yang dari hasil investigatifnya inspektorat <i>nanti</i> bisa dilimpahkan ke APH.	Konsultasi Bisa lewat konsultasi itu kami artikan luas, artinya ketika kami mendapatkan surat undangan dari SKPD untuk membahas suatu permasalahan disana dalam bentuk rapat koordinasi, itu juga kami artikan dalam konsultasi. Artinya kan mereka punya kesulitan dan sebagainya mungkin ragu untuk melangkah seperti ini kemudian mengundang kami inspektorat. Kemudian dalam rapat koordinasi itu kan kami juga memberikan saran-saran yang akan ditempuh	mengeluarkan surat edaran tentang <i>anti</i> gratifikasi, kemudian kita juga ada sosialisasi <i>anti</i> korupsi ke berbagai hampir ke semua skpd, kemudian pendampingan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepada SKPD, artinya biar <i>nanti</i> untuk mencegah itu kan, pendampingannya kita laksanakan dulu jangan sampai <i>nanti</i> maksudnya pendampingan biar tugas pokok dan fungsinya SKPD itu berjalan baik, kemudian kalau semuanya baik kan berarti menghindarkan dari <i>fraud</i> , kemudian kita	mengeluarkan surat edaran tentang <i>anti</i> gratifikasi, kemudian kita juga ada sosialisasi <i>anti</i> korupsi ke berbagai hampir ke semua skpd, kemudian pendampingan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepada SKPD, artinya biar <i>nanti</i> untuk mencegah itu kan, pendampingannya kita laksanakan dulu jangan sampai <i>nanti</i> maksudnya pendampingan biar tugas pokok dan fungsinya SKPD itu berjalan baik, kemudian kalau semuanya baik kan berarti menghindarkan dari <i>fraud</i> , kemudian kita



			oleh SKPD gitu.	juga, apa istilahnya itu Mba Pipit	juga, apa istilahnya itu Mba Pipit
--	--	---	-----------------	------------------------------------	------------------------------------

الجمعة الإسلامية الاندونيسية

2. Hery Dwi Kuryanto, S.H., M.Hum.

Hy Kekurangannya? Ya. Dari sisi... Jadi gini, kita kan harus pengembangan itu dari sisi kompetensi pertama. Dari sisi kompetensi itu bisa kita lakukan peningkatan dari sisi pengetahuannya, kompetensinya Itu melalui diklat. Itu kan sesuatu yang bisa dipelajari. Tergantung kepada bagaimana kemampuan, terus kemauan dari SDM untuk mengembangkan diri. Kita ada dari diklat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga baik itu di BPKP maupun BPK. Kemudian yang terpenting lagi adalah justru bukan hanya pengembangan kompetensi, tapi lebih kepada kualitas diri. Itu yang terpenting. Jadi profesi... Di sini kan auditor, fungsional. Profesi auditor itu bukan

Hy Kekurangannya? Ya. Dari sisi... Jadi gini, kita kan harus pengembangan itu dari sisi kompetensi pertama. Dari sisi kompetensi itu bisa kita lakukan peningkatan dari sisi pengetahuannya, kompetensinya Itu melalui diklat. Itu kan sesuatu yang bisa dipelajari. Tergantung kepada bagaimana kemampuan, terus kemauan dari SDM untuk mengembangkan diri. Kita ada dari diklat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga baik itu di BPKP maupun BPK. Kemudian yang terpenting lagi adalah justru bukan hanya pengembangan kompetensi, tapi lebih kepada kualitas diri. Itu yang terpenting. Jadi profesi... Di sini kan auditor, fungsional. Profesi auditor itu bukan

	<p>hanya didukung oleh profesional kompetensi seorang auditor. Tapi harus dibarengi dengan integritas. Citra diri. Kemudian bagaimana kemudian integritasnya mereka itu benar-benar bisa ditegakkan. Antara nilai-nilai yang ada di dalam dirinya itu benar-benar bisa diterapkan dalam melaksanakan tugas. Jadi tidak ada gunanya kalau seorang yang memiliki kompetensi kemudian integritasnya rendah. Karena kalau integritasnya rendah artinya profesionalnya kompetensinya bisa tergadaikan. Itu semua pekerjaan yang kayak gitu. Auditor kalau di sini fungsinya fungsi pengawasan, auditor kalau sudah tergadaikan profesionalismenya,</p>	<p>hanya didukung oleh profesional kompetensi seorang auditor. Tapi harus dibarengi dengan integritas. Citra diri. Kemudian bagaimana kemudian integritasnya mereka itu benar-benar bisa ditegakkan. Antara nilai-nilai yang ada di dalam dirinya itu benar-benar bisa diterapkan dalam melaksanakan tugas. Jadi tidak ada gunanya kalau seorang yang memiliki kompetensi kemudian integritasnya rendah. Karena kalau integritasnya rendah artinya profesionalnya kompetensinya bisa tergadaikan. Itu semua pekerjaan yang kayak gitu. Auditor kalau di sini fungsinya fungsi pengawasan, auditor kalau sudah tergadaikan profesionalismenya,</p>			
--	---	---	--	--	--

artinya kompetensinya berarti tidak akan bisa mengawal fungsi inspektorat selaku pengawas. Itu aja titiknya. Sehingga pengembangan integritas itu melalui apa? Ini yang terpenting adalah dari internal manajemennya. Dari inspektur, dari sekretaris, dari irban. Artinya kami, saya sebagai inspektur, perlu mendrive teman-teman struktural baik dari sekretaris sampai ke bawah. Itu melalui pembinaan. Baik itu di apel pagi setiap Senin atau pertemuan-pertemuan rutin. Kita kuatkan integritas dia. Dan di tempat kita ada yang namanya, setiap apel kita membaca yang namanya pakta integritas. Ada delapan pakta atau berapa. Itu yang sebetulnya akan

artinya kompetensinya berarti tidak akan bisa mengawal fungsi inspektorat selaku pengawas. Itu aja titiknya. Sehingga pengembangan integritas itu melalui apa? Ini yang terpenting adalah dari internal manajemennya. Dari inspektur, dari sekretaris, dari irban. Artinya kami, saya sebagai inspektur, perlu mendrive teman-teman struktural baik dari sekretaris sampai ke bawah. Itu melalui pembinaan. Baik itu di apel pagi setiap Senin atau pertemuan-pertemuan rutin. Kita kuatkan integritas dia. Dan di tempat kita ada yang namanya, setiap apel kita membaca yang namanya pakta integritas. Ada delapan pakta atau berapa. Itu yang sebetulnya akan

membangun kepribadian dari mereka untuk bisa menegakkan profesionalisme mereka. Terus kita juga, ada kita pelatihan, bukan, pemberian motivasi dari pihak luar. Motivasi kaitannya dengan profesional, bagaimana bekerja secara profesional, maupun dari aspek keagamaan. Itu yang paling terpenting. Udah jawabannya selesai.

membangun kepribadian dari mereka untuk bisa menegakkan profesionalisme mereka. Terus kita juga, ada kita pelatihan, bukan, pemberian motivasi dari pihak luar. Motivasi kaitannya dengan profesional, bagaimana bekerja secara profesional, maupun dari aspek keagamaan. Itu yang paling terpenting. Udah jawabannya selesai.

الجمعة الإسلامية الاندونيسية

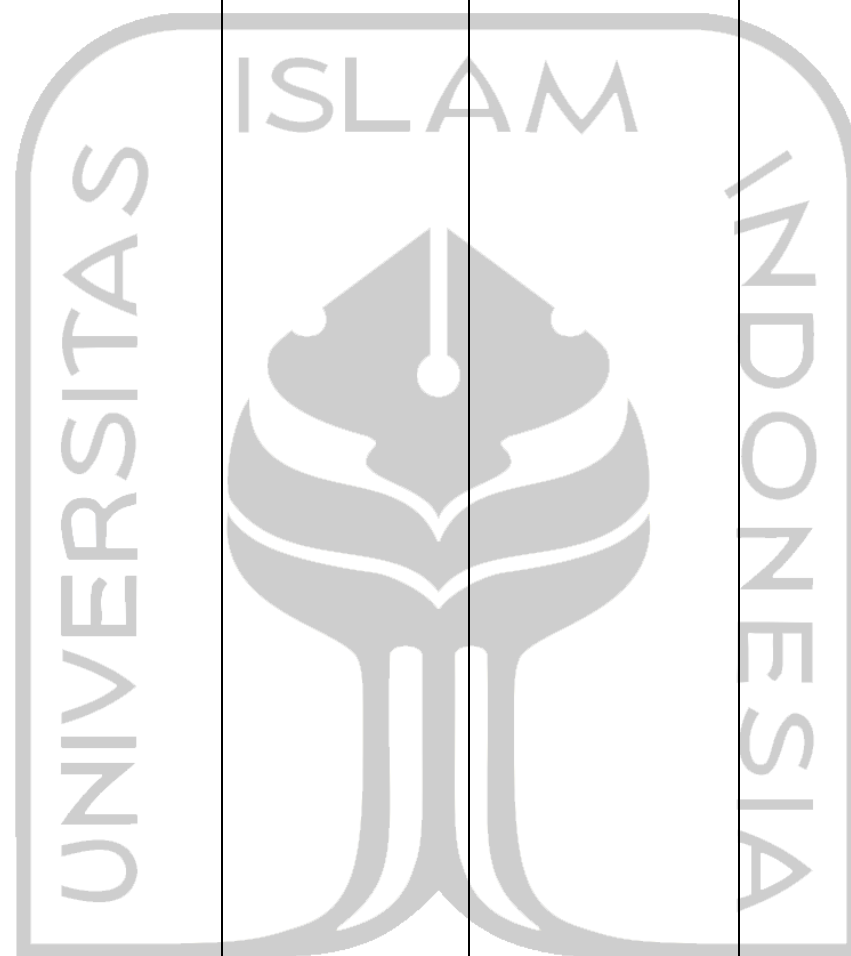
3. Ika  
Sulistyo Devi



Hm em,  
pemeriksaan,  
pendampingan,  
konsultasi, kami  
juga membuka  
konsultasi  
misalnya  
perangkat daerah  
ataupun auditee  
ya, istilahnya ya  
auditee yang kami  
periksa itu ada  
permasalahan  
mereka bisa  
langsung ke sini  
konsultasi dengan  
membawa berkas  
tentunya. Soalnya  
kalau nggak  
membawa berkas  
hanya by phone  
gitu kan kadang  
nggak jelas  
permasalahannya  
itu apa. Tapi kalau  
kita lihat berkas-  
berkasnya kan oh  
ini *nanti* solusinya  
seperti ini begitu

Hm em,  
pemeriksaan,  
pendampingan,  
konsultasi, kami  
juga membuka  
konsultasi  
misalnya  
perangkat daerah  
ataupun auditee  
ya, istilahnya ya  
auditee yang kami  
periksa itu ada  
permasalahan  
mereka bisa  
langsung ke sini  
konsultasi dengan  
membawa berkas  
tentunya. Soalnya  
kalau nggak  
membawa berkas  
hanya by phone  
gitu kan kadang  
nggak jelas  
permasalahannya  
itu apa. Tapi kalau  
kita lihat berkas-  
berkasnya kan oh  
ini *nanti* solusinya  
seperti ini begitu

Rz Lalu kalau  
untuk ini bu,  
pendampingan  
pelaksanaan  
tupoksi perangkat-  
perangkat daerah  
apa itu berdampak  
untuk mencegah  
*fraud* tadi bu?  
I Oh iya,



الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

berdampak.  
Karena kan mereka pada saat pendampingan itu kan kita, kayak kemarin ya MPP, pembangunan gedung MPP, ini kan kita kerjasama dengan BPKP juga, inspektorat itu juga banyak mas, karena pemeriksaan, pendampingan itu tidak dilakukan pada saat akhir kan, jadi ini pekerjaan jalan kita dampingi jadi misalnya ada *nanti* yang mau melenceng dari perencanaan kan bisa kita benarkan ini harusnya salah, ini harusnya begitu

<p>4. Ir. Sri Puji Lestari</p>	<p>Gambarannya itu harus melakukan pencegahan terkait dengan korupsi, <i>nanti</i> banyak disosialisasi di</p> <p>Harus, sosialisasinya itu tidak hanya kepada unit-unit kerja, tapi juga kepada masyarakat, kepada pengusaha, kepada DPRD</p> <p>Jadi kalau kemarin karena baru-baru Jadi kita mencoba membuat, Kemudian kita share itu semua ke unit-unit kerja Contohnya seperti ini menyesuaikan dengan kegiatannya Itu kadang opd juga belum ngeh gitu loh laporannya tidak ada <i>fraud</i> tidak ada <i>fraud</i> tambah akan yang namanya penilaian resiko itu penilaian yang terjadi atau yang mungkin terjadi kan gitu Jadi kalau dalam pikirannya nggak pernah ada jadi seakan-akan yang sudah terjadi</p>	<p>Hm m, itu khusus yang bidang investigasinya, yang bidang reformasi itu kan juga saling terkait, reformasi itu kan pembenahan di semua lini manajemen pemerintahan supaya bisa tercapai good governance gitu. Itu, jadi ada bidangnya itu ada kegiatan lagi yang menyokong itu, yang reformasi itu kan harus perbaikan di manajemen nya, terus perbaikan di manajemen perubahan, ada di perbaikan di pembentukan regulasi, ada di SDM nya, pengelolaan SDM, pengelolaan pengawasan nya, pengelolaan pelayanan publik nya, itu di reformasi birokrasi itu kan juga terkait dengan investigasi, gitu,</p>	<p>Jadi kalau kemarin karena baru-baru Jadi kita mencoba membuat, Kemudian kita share itu semua ke unit-unit kerja Contohnya seperti ini menyesuaikan dengan kegiatannya Itu kadang opd juga belum ngeh gitu loh laporannya tidak ada <i>fraud</i> tidak ada <i>fraud</i> tambah akan yang namanya penilaian resiko itu penilaian yang terjadi atau yang mungkin terjadi kan gitu Jadi kalau dalam pikirannya nggak pernah ada jadi seakan-akan yang sudah terjadi kan gitu, mungkin kalau penilaian resiko seperti itu ya itu jadi langkah pertama ya itu kalau terkait dengan <i>fraud</i>. Penilaian resiko <i>fraud</i> Terjadi, Tapi saya itu sendiri tidak bisa membedakan ya antara <i>fraud</i> dengan agenda <i>anti</i> korupsi lainnya Oh</p>	<p>Dan yang baru itu ada diklatnya, setelah masuk sini ada diklat khusus pengawasan, kita diklat kan, khusus pengawasan dari dasar</p> <p>Iya, kalau yang untuk di belakang ini harus PNS semua, tidak bisa yang PHL gitu enggak bisa. Iya, karena untuk melakukan kegiatan pengawasan harus mereka memiliki sertifikat, sertifikasi khusus pengawasan ya dan itu syaratnya harus PNS iya. Jadi kalau PHL itu gak bisa, jadi ada teman-teman phl tidak di belakang tapi di kita.</p> <p>Pj : Oh iya, kan itu ya, saya itu sadar saya itu udah generasi tua ya untuk media sosial tidak begitu paham ya, tapi teman-teman saya</p>	<p>Kan di inspektorat sebagai PG unit pengendalian gratifikasi Nya kabupaten ,Salah satu kegiatannya itu Terus yang kedua kita membagi selebaran brosur pencegahan gratifikasi kepada sub-sub unit dan juga kita menerima nah ini setiap hari raya kita mengeluarkan surat edaran yang ditandatangani oleh Bupati kepada seluruh perangkat daerah sampai desa dan kepada ini konsorsium Kelompoknya pengusaha kelompok-kelompok pengusaha koperasi Kelompok Kadit segala macam gitu kelompok pengusaha dan itu kita sampaikan pencegahan gratifikasi maksudnya tidak usah memberi ke</p>	<p>Kode etik ada, kemudian yang apa setelah surat tugas kita bikin yang mba lasmi yang setiap tim harus tanda tangan, independensi, dalam melakukan proses harus independensi. Jadinya kita yang selaku menugaskan kita harus tau apa namanya, jangan sampai kita menugaskan di tempat yang independen gitu. Kan mungkin ada yang kakaknya kerja disini, akhirnya gak disitu. Selagi saya inget, selagi kita inget tidak akan kita tugaskan. Ada itu, kita udah buat daftarnya</p> <p>Pj : Dan yang baru itu ada diklatnya, setelah masuk sini ada diklat khusus pengawasan, kita diklat kan, khusus pengawasan dari</p>
--------------------------------	---	---	--	---	--	--



	<p>kan gitu, mungkin kalau penilaian resiko seperti itu ya itu jadi langkah pertama ya itu kalau terkait dengan <i>fraud</i>. Penilaian resiko <i>fraud</i> Terjadi, Tapi saya itu sendiri tidak bisa membedakan ya antara <i>fraud</i> dengan agenda <i>anti</i> korupsi lainnya Oh ya kalau untuk pencegahan Kita yaitu melakukan sosialisasi-sosialisasi pencegahan pungli Kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan Khusus pungli. Tapi kalau pencegahan gratifikasi Maka hanya inspektorat yang melakukan Kita melakukan kepada seluruh opd Seluruh unit kerja, Dan kemarin kita khususnya kepada Sekolah. Sekolah SD SMP itu kita lakukan penyuluhan pencegahan gratifikasi iya</p>	<p>mungkin kalau saat ini belum banyaklah, belum banyak.</p>	<p>ya kalau untuk pencegahan Kita yaitu melakukan sosialisasi-sosialisasi pencegahan pungli Kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan Khusus pungli. Tapi kalau pencegahan gratifikasi Maka hanya inspektorat yang melakukan Kita melakukan kepada seluruh opd Seluruh unit kerja, Dan kemarin kita khususnya kepada Sekolah. Sekolah SD SMP itu kita lakukan penyuluhan pencegahan gratifikasi iya</p> <p>Iya kita kirim ke KPK <i>nanti</i> dari KPK mendapatkan surat atensi itu benar kita sampaikan kepada yang bersangkutan lagi itu, Itu untuk gratifikasi kalau untuk saber pungli kita kerjasama kepolisian dan kejaksaan</p> <p>Itu satuan bersih pungutan liar, Kalau</p>	<p>kan juga banyak yang muda-muda, yang separtanya anak-anak itu ya mereka itu yang saya tugaskan itu, jadi kalau ada informasi seperti itu ya informasikan, kan kita punya anggaran kan gitu. Yang sering itu UGM, kemudian UII, belum pernah kek nya kita seminar disana toh, di semarang malah pernah sekali, tapi soalnya kan terbatas terkait dengan pengawasan</p>	<p>pegawai pemerintahan. ini besok mau kita mau tekankan lagi. Salah satunya itu kemudian dari surat itu <i>nanti</i> kalau ada pelaporan penerimaan gratifikasi maka wajib melaporkan melaporkan kemarin bisa langsung ke KPK bisa juga langsung melalui UPG UPG kita <i>nanti</i> kita yang melaporkan ke KPK dan dari pengalaman ada garam yang Kok itu kayak gratifikasi Dan harus kita kirim ke peminta kita kirim ke KPK,</p> <p>Oke, nih, kalau terkait dengan untuk pencegahan <i>fraud</i> sebetulnya kita itu sudah ada (apa namanya) mengirimkan SDM ya, mengirimkan SDM untuk mengikuti pelatihan atau</p>	<p>dasar</p> <p>Oke, nih, kalau terkait dengan untuk pencegahan <i>fraud</i> sebetulnya kita itu sudah ada (apa namanya) mengirimkan SDM ya, mengirimkan SDM untuk mengikuti pelatihan atau diklat terkait dengan penyuluh <i>anti</i> korupsi. Nggih, sebelum jadi penyuluh ada pelatihan dulu ya, itu kita sudah mengirimkan ada kalau nggak salah ada 9 orang atau 7 orang untuk mengikuti diklat tersebut, setelah lulus diklat tersebut, kemudian yang bersangkutan harapannya mengikuti sertifikasi penyuluh <i>anti</i> korupsi, tetapi dari tujuh orang itu baru satu yang mengikuti penyuluhan <i>anti</i> korupsi, tadinya</p>
--	---	--	--	--	--	--

	<p>Integritas nya itu kan audit, bukan auditor nya aja, tapi semua pegawai ya. Itu kan menandatangani pakta integritas, ada poin satu sampai tujuh kalau ndak salah, nah itu setiap hari senin dibacakan perwakilan, urut dari yang</p> <p>Kode etik ada, kemudian yang apa setelah surat tugas kita bikin yang mba lasmi yang setiap tim harus tanda tangan, independensi, dalam melakukan proses harus independensi. Jadinya kita yang selaku menugaskan kita harus tau apa namanya, jangan sampai kita menugaskan di tempat yang independen gitu. Kan mungkin ada yang kakaknya kerja disini, akhirnya gak disitu. Selagi saya inget, selagi kita</p>	<p>kita penyuluhan pungli nya hanya di opd opd kita, tapi kalau ke masyarakat-masyarakat itu tugasnya Kepolisian karena kepolisian itu kan punya Babinsa</p> <p>Dia itu udah Kukuh menyatakan penyuluhan terkait pungli di kelompok-kelompok masyarakat itu.</p> <p>Iya, kalau untuk dinas-dinas kita perwakilan setiap dinas kita ambil satu orang, kita lakukan penyuluhan, kemarin waktu di, kemudian kita juga melakukan penyuluhan di unit-unit pelayanan publik UPT UPT, UPT pasar</p> <p>Itu kepala-kepala upt nya kita kumpulkan kita lakukan penyuluhan juga. Terus yang kepala-kepala sekolah dan guru-</p>		<p>diklat terkait dengan penyuluh <i>anti</i> korupsi. Nggih, sebelum jadi penyuluh ada pelatihan dulu ya, itu kita sudah mengirimkan ada kalau nggak salah ada 9 orang atau 7 orang untuk mengikuti diklat tersebut, setelah lulus diklat tersebut, kemudian yang bersangkutan harapannya mengikuti sertifikasi penyuluh <i>anti</i> korupsi, tetapi dari tujuh orang itu baru satu yang mengikuti penyuluhan <i>anti</i> korupsi, tadinya dua yang mengikuti tapi yang lulus baru satu, jadi kita baru mempunyai penyuluh <i>anti</i> korupsi yang telah bersertifikat oleh KPK itu satu orang, tetapi meskipun demikian, ketujuh orang yang pernah kita diklat kan</p>	<p>dua yang mengikuti tapi yang lulus baru satu, jadi kita baru mempunyai penyuluh <i>anti</i> korupsi yang telah bersertifikat oleh KPK itu satu orang, tetapi meskipun demikian, ketujuh orang yang pernah kita diklat kan pencegah <i>anti</i> korupsi ini juga bisa dimanfaatkan dalam rangka sosialisasi ke OPD-OPD. Kemudian kalau dibidang investigasi itu kan kegiatannya tidak hanya investigasi saja tapi juga reformasi birokrasi, itu memang personil nya baru delapan orang. Meskipun demikian bisa dibantu dengan bidang yang lain karena ketujuh orang itu tidak seluruhnya itu menyebar di bidang lain yang sudah mendapatkan pelatihan terkait</p>
--	--	---	--	---	---

	<p>ingat tidak akan kita tugaskan. Ada itu, kita udah buat daftarnya</p> <p>Oke, njih, kalau terkait dengan untuk pencegahan <i>fraud</i> sebetulnya kita itu sudah ada (apa namanya) mengirimkan SDM ya, mengirimkan SDM untuk mengikuti pelatihan atau diklat terkait dengan penyuluh <i>anti</i> korupsi. Nggih, sebelum jadi penyuluh ada pelatihan dulu ya, itu kita sudah mengirimkan ada kalau nggak salah ada 9 orang atau 7 orang untuk mengikuti diklat tersebut, setelah lulus diklat tersebut, kemudian yang bersangkutan harapannya mengikuti sertifikasi penyuluh <i>anti</i> korupsi, tetapi dari tujuh orang itu baru satu yang mengikuti penyuluhan <i>anti</i> korupsi, tadinya dua yang mengikuti</p>	<p>guru, kepala-kepala sekolah kemarin bukan guru-guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah, SD dan SMP meskipun belum semua. Kan mestinya butuh nya kan se Sleman, jadi kemarin baru dua Angkatan baru bisa.</p> <p>Rz : Tadi terkait penyuluhan mungkin terkait materinya itu bagaimana penyampaiannya terus materinya itu apakah darimana saja apa mungkin digabung atau kombinasi antara budaya, agama atau Undang-Undang itu bagaimana bu menyampaikannya?</p> <p>Kalau materi gratifikasi banyak dari....</p> <p>H : KPK</p> <p>KPK, kita buka web nya KPK, materi banyak banget ya, kita ambil dari situ, disesuaikan. Kalau</p>		<p>pencegah <i>anti</i> korupsi ini juga bisa dimanfaatkan dalam rangka sosialisasi ke OPD-OPD. Kemudian kalau dibidang investigasi itu kan kegiatannya tidak hanya investigasi saja tapi juga reformasi birokrasi, itu memang personil nya baru delapan orang. Meskipun demikian bisa dibantu dengan bidang yang lain karena ketujuh orang itu tidak seluruhnya itu menyebar di bidang lain yang sudah mendapatkan pelatihan terkait dengan pencegahan korupsi. Kemudian untuk ke depannya terkait dengan (apa namanya) pendidikan <i>anti</i> korupsi ini tidak hanya di inspektorat, kami juga mengeluarkan mulai tahun kemarin mengeluarkan surat kami tujukan kepada seluruh OPD untuk mengirimkan personil nya guna mengikuti pelatihan atau melalui e-learning nya KPK, tapi memang belum efektif hanya beberapa OPD yang mengirimkan personil nya untuk mengikuti pelatihan tersebut. Nah ini, metode seperti ini besok tahun ini juga akan kita kirimkan lagi kepada seluruh OPD untuk mengikuti</p>	<p>dengan pencegahan korupsi. Kemudian untuk ke depannya terkait dengan (apa namanya) pendidikan <i>anti</i> korupsi ini tidak hanya di inspektorat, kami juga mengeluarkan mulai tahun kemarin mengeluarkan surat kami tujukan kepada seluruh OPD untuk mengirimkan personil nya guna mengikuti pelatihan atau melalui e-learning nya KPK, tapi memang belum efektif hanya beberapa OPD yang mengirimkan personil nya untuk mengikuti pelatihan tersebut. Nah ini, metode seperti ini besok tahun ini juga akan kita kirimkan lagi kepada seluruh OPD untuk mengikuti</p>
--	--	---	--	---	--

	<p>tapi yang lulus baru satu, jadi kita baru mempunyai penyuluh <i>anti</i> korupsi yang telah bersertifikat oleh KPK itu satu orang, tetapi meskipun demikian, ketujuh orang yang pernah kita diklat kan pencegah <i>anti</i> korupsi ini juga bisa dimanfaatkan dalam rangka sosialisasi ke OPD-OPD. Kemudian kalau dibidang investigasi itu kan kegiatannya tidak hanya investigasi saja tapi juga reformasi birokrasi, itu memang personil nya baru delapan orang. Meskipun demikian bisa dibantu dengan bidang yang lain karena ketujuh orang itu tidak seluruhnya itu menyebar di bidang lain yang sudah mendapatkan pelatihan terkait dengan pencegahan korupsi. Kemudian untuk ke depannya terkait dengan (apa</p>	<p>pada saat kita nyuluh sekolah, <i>nanti</i> materi-materi yang terkait dengan sekolah. Pada saat puskesmas kita ngambil yang puskesmas. Makanya saya juga jadi tau sponsorship segala macam itu obat supplier apa supplier obat itu termasuk juga apa aralng gratifikasi. Itu ngambil materi dari situ. Tergantung <i>nanti</i> audiencenya yang mau diberi ya gitu.</p> <p>Integritas nya itu kan audit, bukan auditor nya aja, tapi semua pegawai ya. Itu kan menandatangani pakta integritas, ada poin satu sampai tujuh kalau ndak salah, nah itu setiap hari senin dibacakan perwakilan, urut dari yang Kode etik ada, kemudian yang apa setelah surat tugas kita bikin yang mba</p>		<p>mulai tahun kemarin mengeluarkan surat kami tujukan kepada seluruh OPD untuk mengirimkan personil nya guna mengikuti pelatihan atau melalui e-learning nya KPK, tapi memang belum efektif hanya beberapa OPD yang mengirimkan personil nya untuk mengikuti pelatihan tersebut. Nah ini, metode seperti ini besok tahun ini juga akan kita kirimkan lagi kepada seluruh OPD untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut melalui e-learning dari KPK gitu termasuk juga inspektorat. Rencananya seluruh auditor disini harus mengikuti e-learning tersebut dengan materi berbeda-beda</p>	<p>pelatihan-pelatihan tersebut melalui e-learning dari KPK gitu termasuk juga inspektorat. Rencananya seluruh auditor disini harus mengikuti e-learning tersebut dengan materi berbeda-beda disesuaikan dengan keinginan mereka gitu. Untuk peningkatan SDM nya begitu, kalau jumlahnya tidak bisa. Jumlahnya ya memang seperti ini, gak bisa menambah dengan seenaknya, gak bisa, hanya peningkatan kualitas e-learning nya macam-macam tapi melalui link nya KPK, kalau materinya <i>nanti</i> kita pilih macam-macam terkait dengan pengendalian korupsi,</p>
--	--	--	--	---	---

	<p>namanya) pendidikan <i>anti</i> korupsi ini tidak hanya di inspektorat, kami juga mengeluarkan mulai tahun kemarin mengeluarkan surat kami tujukan kepada seluruh OPD untuk mengirimkan personil nya guna mengikuti pelatihan atau melalui e-learning nya KPK, tapi memang belum efektif hanya beberapa OPD yang mengirimkan personil nya untuk mengikuti pelatihan tersebut. Nah ini, metode seperti ini besok tahun ini juga akan kita kirimkan lagi kepada seluruh OPD untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut melalui e-learning dari KPK gitu termasuk juga inspektorat. Rencananya seluruh auditor disini harus mengikuti e-learning tersebut dengan materi</p>	<p>lasmi yang setiap tim harus tanda tangan, independensi, dalam melakukan proses harus independensi. Jadinya kita yang selaku menugaskan kita harus tau apa namanya, jangan sampai kita menugaskan di tempat yang independen gitu. Kan mungkin ada yang kakaknya kerja disini, akhirnya gak disitu. Selagi saya inget, selagi kita inget tidak akan kita tugaskan. Ada itu, kita udah buat daftarnya</p> <p>Oke, njih, kalau terkait dengan untuk pencegahan <i>fraud</i> sebetulnya kita itu sudah ada (apa namanya) mengirimkan SDM ya, mengirimkan SDM untuk mengikuti pelatihan atau diklat terkait dengan penyuluh <i>anti</i> korupsi. Nggih, sebelum jadi penyuluh ada</p>		<p>disesuaikan dengan keinginan mereka gitu. Untuk peningkatan SDM nya begitu, kalau jumlahnya tidak bisa. Jumlahnya ya memang seperti ini, gak bisa menambah dengan seenaknya, gak bisa, hanya peningkatan kualitas</p> <p>e-learning nya macam-macam tapi melalui link nya KPK, kalau materinya <i>nanti</i> kita pilih macam-macam terkait dengan pengendalian korupsi, pencegahan dan segala macam</p>	<p>pencegahan dan segala macam</p> <p>Iya, kalau yang untuk di belakang ini harus PNS semua, tidak bisa yang PHL gitu enggak bisa. Iya, karena untuk melakukan kegiatan pengawasan harus mereka memiliki sertifikat, sertifikasi khusus pengawasan ya dan itu syaratnya harus PNS iya. Jadi kalau PHL itu gak bisa, jadi ada teman-teman phl tidak di belakang tapi di kita.</p> <p>Oh iya, kan itu ya, saya itu sadar saya itu udah generasi tua ya untuk media sosial tidak begitu paham ya, tapi teman-teman saya kan juga banyak yang muda-muda, yang sepantaran nya anak-anak itu ya mereka itu yang saya tugaskan itu, jadi kalau ada</p>
--	---	--	--	--	---

	<p>berbeda-beda disesuaikan dengan keinginan mereka gitu. Untuk peningkatan SDM nya begitu, kalau jumlahnya tidak bisa. Jumlahnya ya memang seperti ini, gak bisa menambah dengan seenaknya, gak bisa, hanya peningkatan kualitas</p> <p>e-learning nya macem-macam tapi melalui link nya KPK, kalau materinya <i>nanti</i> kita pilih macam-macam terkait dengan pengendalian korupsi, pencegahan dan segala macam</p> <p>Pakai ini (apa) pertemuan, dan sekarang sudah beberapa unit kerja sih yang menyurati kita untuk memberikan materi. Jadi tidak kita yang berinisiatif tapi mereka juga sudah mengundang, dari</p>	<p>pelatihan dulu ya, itu kita sudah mengirimkan ada kalau nggak salah ada 9 orang atau 7 orang untuk mengikuti diklat tersebut, setelah lulus diklat tersebut, kemudian yang bersangkutan harapannya mengikuti sertifikasi penyuluh <i>anti</i> korupsi, tetapi dari tujuh orang itu baru satu yang mengikuti penyuluhan <i>anti</i> korupsi, tadinya dua yang mengikuti tapi yang lulus baru satu, jadi kita baru mempunyai penyuluh <i>anti</i> korupsi yang telah bersertifikat oleh KPK itu satu orang, tetapi meskipun demikian, ketujuh orang yang pernah kita diklat kan pencegah <i>anti</i> korupsi ini juga bisa dimanfaatkan dalam rangka sosialisasi ke OPD-OPD. Kemudian kalau dibidang investigasi itu kan kegiatannya tidak</p>		<p>informasi seperti itu ya informasikan, kan kita punya anggaran kan gitu. Yang sering itu UGM, kemudian UII, belum pernah kek nya kita seminar disana toh, di semarang malah pernah sekali, tapi soalnya kan terbatas terkait dengan pengawasan</p>
--	---	---	--	---

dinas kesehatan kemarin, seluruh puskesmas dikumpulkan, mereka meminta kita, kemudian dari dinas badan kepegawaian juga meminta kita, dari sekolah dinas pendidikan kemarin ada di SMP negeri Sleman itu juga meminta kita

hanya investigasi saja tapi juga reformasi birokrasi, itu memang personil nya baru delapan orang. Meskipun demikian bisa dibantu dengan bidang yang lain karena ketujuh orang itu tidak seluruhnya itu menyebar di bidang lain yang sudah mendapatkan pelatihan terkait dengan pencegahan korupsi. Kemudian untuk ke depannya terkait dengan (apa namanya) pendidikan *anti* korupsi ini tidak hanya di inspektorat, kami juga mengeluarkan mulai tahun kemarin mengeluarkan surat kami tujukan kepada seluruh OPD untuk mengirimkan personil nya guna mengikuti pelatihan atau melalui e-learning nya KPK, tapi memang belum efektif hanya beberapa OPD yang

mengirimkan personil nya untuk mengikuti pelatihan tersebut. Nah ini, metode seperti ini besok tahun ini juga akan kita kirimkan lagi kepada seluruh OPD untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut melalui e-learning dari KPK gitu termasuk juga inspektorat. Rencananya seluruh auditor disini harus mengikuti e-learning tersebut dengan materi berbeda-beda disesuaikan dengan keinginan mereka gitu. Untuk peningkatan SDM nya begitu, kalau jumlahnya tidak bisa. Jumlahnya ya memang seperti ini, gak bisa menambah dengan seenaknya, gak bisa, hanya peningkatan kualitas e-learning nya macem-macam tapi melalui link nya KPK, kalau materinya nanti

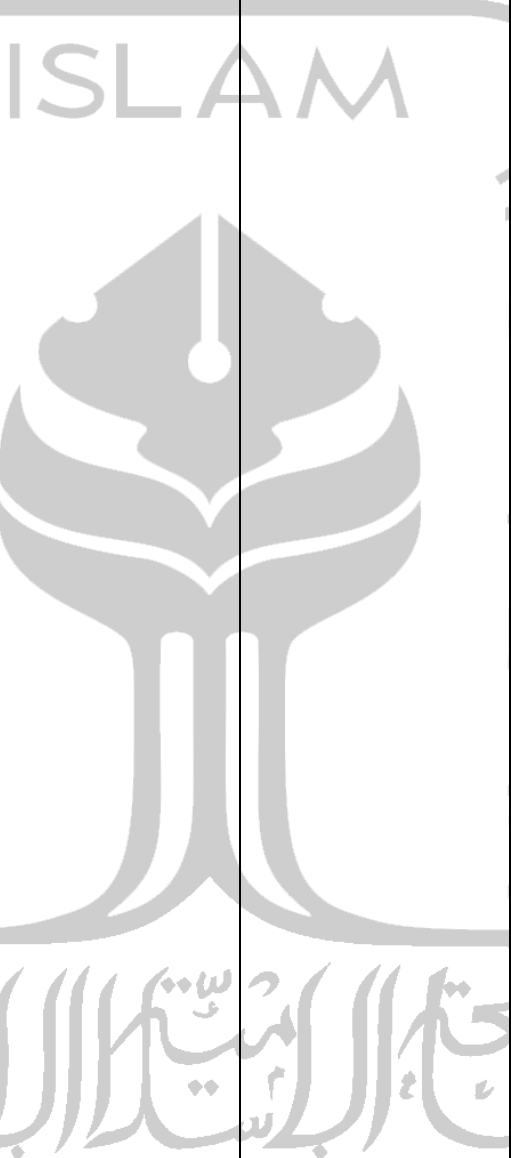


kita pilih macam-macam terkait dengan pengendalian korupsi, pencegahan dan segala macam

DPRD, itu juga sudah masuk rencana kita. Kemudian *nanti* pada saat melakukan sosialisasi tersebut, itu bisa memanfaatkan teman-teman me riko kalau yang DPRD karena *nanti* teman-teman yang sudah bersertifikat itu, kemudian *nanti* ditambah kita kerja sama dengan kejaksaan. Kemudian kalau ke desa, *nanti* kita kan kita juga ada tim ya, tim terkait SABER PUNGLI antar kejaksaan dan kepolisian ini *nanti* kita ajak juga. *Nanti* kalau ke desa kita ajak juga kejaksaan. Kemudian *nanti* ke pengusaha mungkin *nanti* kita sendiri tidak mengajak

kejaksaan gitu.  
Kemudian sekolah-  
sekolah *nanti* full  
dari teman-teman  
semua yang  
mengisi materi. Jadi  
memanfaatkan  
mereka kan gitu,  
tidak hanya satu  
orang penyuluh *anti*  
korupsi, tapi  
teman-teman yang  
sudah  
mendapatkan  
materi tersebutlah

الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

<p>5. Ngatiyah, S.H.</p>	<p>Itu kemarin yang udah, yang udah ya, yang udah itu kayak ini kalau <i>fraud</i> ini kemarin ada yang penyalahgunaan dana yang sampai kejaksaan juga ya, kan itu tahun 2020 atau 2021 ya itu, itu sampai di vonis di kejaksaan juga. Terus ada yang biasanya sih yang masuk ke APH APH itu ya <i>fraud</i> nya yang terjadi disini ada juga yang kasus-kasus di DPU itu juga, kalau itu untuk penindakannya ya, kalau untuk pencegahannya sih kita macam-macam ya, ada sosialisasi-sosialisasi juga, ada UPG, ada apa itu.</p> <p>Gratifikasi selama ini sudah ada sarana tersendiri, kalau ada gratifikasi akan dilaporkan kayak gitu sudah ada sih, tapi belum semuanya ini juga sih, belum semuanya melapor, mungkin ya. Terus</p>		<p>Bisa juga sih. Mereka kan misalnya ya mau pengadaan barang jasa atau mau pengadaan tanah kas desa kan mereka juga konsultasi dulu ke kami nggih seperti apa <i>nanti</i> biar gak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya seperti itu.</p> <p>Yang kayak itu kemarin sih udah di vonis APH terus akhirnya kan lurahnya ini di penjara terus non aktif, udah di berhentikan ya kemarin sama PMK itu terus selanjutnya kita sih pendampingan ya ke kalurahan itu terus mereka juga lebih hati-hati sih setelah ada kasus seperti itu, apapun mereka konsultasi ke kita biar gak terjadi lagi seperti itu, disamping</p>	<p>He em, setiap mau hari raya kita kan ada edaran tu tidak menerima gratifikasi tidak menerima gratifikasi apa-apa itu ada sih, terus di kantor-kantor di depan itu ada banner ya, kami melayani tidak menerima gratifikasi seperti yang di inspektorat <i>nanti</i> mungkin bisa di foto ya</p> <p>Kayaknya udah agak lama deh, mungkin dulu cuma tempelan sekarang dibuat kayak banner-banner gitu biar lebih kelihatan kan, kalau dulu sih bentuknya aja yang lain ya, kayak di kelurahan itu sudah kayak tidak menerima pungutan kalau untuk pelayanan apapun itu sudah dipasang itu, di kecamatan di kelurahan seperti itu. Itu salah satu pencegahan biar</p>	<p>Rz: Kalau untuk ini bu mendampingi perangkat desa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya termasuk bisa mencegah <i>fraud</i> gak bu pendampingan itu?</p> <p>Bisa juga sih. Mereka kan misalnya ya mau pengadaan barang jasa atau mau pengadaan tanah kas desa kan mereka juga konsultasi dulu ke kami nggih seperti apa <i>nanti</i> biar gak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya seperti itu.</p> <p>Yang kayak itu kemarin sih udah di vonis APH terus akhirnya kan lurahnya ini di penjara terus non aktif, udah di berhentikan ya kemarin sama PMK itu terus</p>
------------------------------	---	---	---	--	---

	<p>kalau gratifikasi kan ada gratifikasi yang diperbolehkan ada yang enggak, ya yang itu yang dilaporkan. Kemarin banyak yang dilaporkan sih terutama kalau hari raya itu, tapi kesini-kesini akhirnya sekarang hampir sudah gak ada sih gratifikasi karna kita udah kesadaran ya kita udah sering sosialisasi kayak gitu jadi kita sudah jarang ada gratifikasi sekarang, makanya gak ada yang lapor karna memang gak ada nggih kayak dalam pbj, dalam apa itu gak seperti itu sih</p> <p>Kalau pencegahan di kita sering, kan sekarang ada mcb kpk juga ya, mcb kpk itu kan disitu kan banyak banget program-programnya dari KPK baik untuk pencegahannya, terutama untuk pencegahan ya, itu kan ada disitu ada</p>		<p>kelurahan kelurahan yang lain itu juga karna udah ada kasus seperti itu mereka lebih hati-hati. Cuman kalau untuk permasalahan yang tanah kas desa ini kan kami gak anu ya, tanah kas desa kan punya nya provinsi jadi yang inspektorat provinsi sih yang kemarin penghitungan kerugiannya tapi lokasinya memang banyak di sleman ya yang kasus kemarin itu Rz Kalau untuk konsultasi tadi itu bu, itu ternasuk bisa mencegah <i>fraud</i> bu?</p> <p>Bisa, karena mereka gini ya mau seperti ini langkahnya seperti apa yang bener, kayak gitu kan diharapkan mereka juga jadi tau prosesedurnya seperti apa, usaha</p>	<p>masyarakat tau kalau memang kami memberikan layanan sudah gratis gitu loh gak ada gratifikasi gak ada apa seperti itu. Terutama di pelayanan-pelayanan umum seperti yang mpp itu dpmptsp itu yang perizinan sama yang catatan sipil itu di pasang di depan semua kayak gitu untuk pencegahannya.</p>	<p>selanjutnya kita sih pendampingan ya ke kelurahan itu terus mereka juga lebih hati-hati sih setelah ada kasus seperti itu, apapun mereka konsultasi ke kita biar gak terjadi lagi seperti itu, disamping kelurahan kelurahan yang lain itu juga karna udah ada kasus seperti itu mereka lebih hati-hati. Cuman kalau untuk permasalahan yang tanah kas desa ini kan kami gak anu ya, tanah kas desa kan punya nya provinsi jadi yang inspektorat provinsi sih yang kemarin penghitungan kerugiannya tapi lokasinya memang banyak di sleman ya yang kasus kemarin itu</p>
--	---	--	---	---	---

UPG ada apa macam-macam lah, terus ada sosialisasi terus *nanti* itu kita sosialisasi ke masing-masing OPD *nanti* OPD juga di masing-masing itu sosialisasi ke masing-masing pegawai juga untuk gratifikasi, untuk macam-macam lah. Terus ada untuk pembuatan, untuk pengendalian risiko di masing-masing instansi itu ada juga

G Hm em itu termasuk pencegahan juga ya, jadi macam macam gitu, terus kita juga di inspektorat sering juga diminta untuk menjadi narasumbernya, ini beberapa di tempatnya bu puji itu kan sosialisasi sampai ke kelurahan juga, *nanti* diharapkan semuanya juga sudah mengetahui sih seperti apa yang dimaksud gratifikasi, korupsi

yang harus dilakukan bagaimana jadi itu kan gak, diharapkan sih gak membuka peluang untuk melakukan *fraud* seperti itu nggeh disamping pemeriksaan pemeriksaan kami yang sudah ada itu

gini-gini mereka bisa *antisipasi* seperti itu

G Kemarin diklatnya banyak yang mengikuti yang sampai mendapat sertifikasi penyuluhnya itu baru, karna mungkin ini ya kesibukannya yang lain jadi mereka juga ini sih kalau jadi penyuluh itu kan harus pakai angka kredit ini juga kan mereka juga jadi belum ke sana sih, tapi yang diklat juga ada sih diklat penyuluh korupsi itu, sementara yang sudah sertifikasi itu baru bu tintin terus sekarang sering penyuluhan kemana-mana juga sih seperti itu

G OPD he eh, OPD ke masing-masing pegawai seperti itu, jadi kita ngasih masukan ke mereka untuk sosialisasi biar mereka tau juga, jadi nanti



kalau kita anu itu kan, kalau tupoksi itu kan disini ya terus mereka juga disamping itu mereka sudah pengetahuan tentang *fraud* tentang apa itu sudah tau semua gitu loh, diharapkan *nanti* satu pemma ini lah sudah menguasai semua gitu, kemarin sudah awal-awal tahun ini kayaknya sudah banyak sih OPD yang minta narasumber kesini untuk itu, untuk gratifikasi, untuk korupsi macem-macam itu disamping kita yang ke kemarin itu ke tempatnya mba puji itu ke kelurahan-kelurahan untuk sosialisasi juga

الجمعة الاستاذة الاندو

6 : Pipit Tyas  
Ratna  
Puspita,  
S.H., MPA.

P : Tiga pilar  
penegak

P : Kalau yang ini  
memang MOU itu  
sih, MOU dengan  
kejaksaan dan  
kepolisian,

P : Kalau yang  
secara tidak  
langsung sih  
biasanya di sela-  
sela pengawasan  
kan mereka juga  
kebetulan ada  
beberapa opd  
atau beberapa  
H : Konsultasi  
P : Yang  
konsultasi, selama  
kita memeriksa  
keuangan itu  
mereka mungkin  
ada kesulitan atau  
ada permasalahan  
yang dihadapi  
mereka itu  
sekalian konsultasi  
lewat pengawasan  
yang sedang kami  
kerjakan gitu. Jadi  
tidak mesti  
terjadwal atau  
terprogram, tapi  
melalui  
pengawasan yang  
kami lakukan  
biasanya mereka  
juga ketika ada  
masalah langsung  
konsultasi ke  
auditor yang  
memeriksa tim  
yang memeriksa

P : Maksudnya  
malah lebih efektif

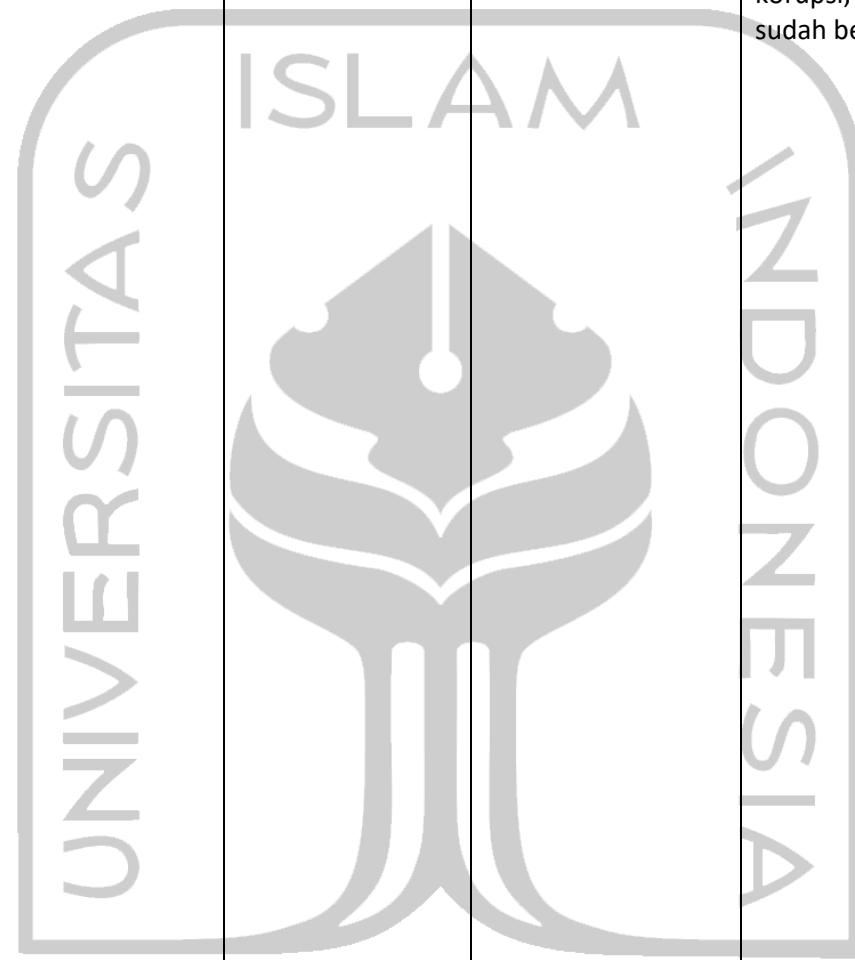




ketika, kalau sosialisasi mungkin terjadwal tergantung permintaan atau tergantung jadwal kami bisa apa enggakya, tapi kalau yang konsultasi itu kan sesuai kebutuhan mereka dan temanya kan sesuai sama yang mereka butuhkan, ada jawabannya kadang-kadang, malah lebih efektif yang konsultasi itu atau yang melalui pengawasan ketika kita melakukan pemeriksaan

P : Sudah ada ilmunya jadi sudah mengetahui jadi semua auditor itu ketika melakukan fungsi pengawasan juga sekaligus konsultasi ketika mereka membutuhkan sesuatu atau membutuhkan solusi dari kami, tapi kalau untuk

sosialisasi disini  
sudah ada satu  
penyuluh *anti*  
korupsi, mas itu  
sudah bersertifikat



الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

7 : Retno  
Isni Satiti

Rno pencegahan jelas, kami jelas itu ada salah satunya inspektorat melakukan sosialisasi, BIMTEK, terus menjadi narasumber di dalam kegiatan OPD yang berkaitan dengan pencegahan atau *anti* korupsi.

Rno He eh, jadi kan terus kami kan juga ada, sebenarnya kalau inspektorat lebih pada fungsi mengawal membina ya, artinya tidak terus seperti OPD, kayak dinas kesehatan, misalnya saya contoh kan dinas kesehatan, dengan bidangnya kesehatan, mereka kan, ayo kita hidup sehat, caranya apa, nyebar di jalanan kuesioner, apa menyebarkan seolah-olah segan kami enggak kalau kami kan ada mekanisme ketika rapat pimpinan dalam hal ini kepala daerah

Rno Oh, enggak, enggak seperti itu mas. Jadi auditor, seorang auditor. Ketika dia mau menjadi fungsional auditor, di awal sudah dibentuk dengan diklat. Yang diikuti diklat sertifikasi ya. Lulus peran misalnya auditor terampil, auditor muda, auditor terampil itu anggota tim, auditor ahli muda itu ketua tim, auditor madya itu pengendali teknis. Nah Ketika sebelum dibentuk itu, kami itu sudah dilalui seleksi saat itu.

Kalau Inspektor Sleman kan di situ, di depan kan sudah ada membangun itu apa? Itu loh mas, slogan yang apa Slogan yang di depan itu.

Kalau gratifikasi kan sebenarnya, Sleman ya, Sleman saya cerita Sleman dulu, pada saat menjelang hari raya kemarin Kami ada SE dari bupati, tidak boleh menerima gratifikasi kan seperti itu. Kalau terjadi, OPD itu kan wajib melaporkan pada inspektorat. Kenyataannya sampai saat ini, saya kurang tahu karena kami itu kan auditor. Kalau auditor itu kan bukan pada rangkaian kegiatan kesekretariatan dalam arti kayak Kasubag perencanaan evaluasi kan itu ranah nya dia kan

Rno Mekanisme penjiagaan kan di masing-masing OPD sudah ada komitmen, ada pakta integritas, itu salah satu untuk membangun OPD itu untuk care terhadap terjadinya *fraud*. Jadi bagaimana jangan sampai OPD itu di dalamnya ada *fraud*, kami berusaha seperti itu Dan kami itu pembinaannya bisa melalui pengawasan, pengawasannya inspektorat itu kan melalui pemeriksaan, lalu review, monitoring, evaluasi, monitoring dan evaluasi maupun pendampingan seperti itu

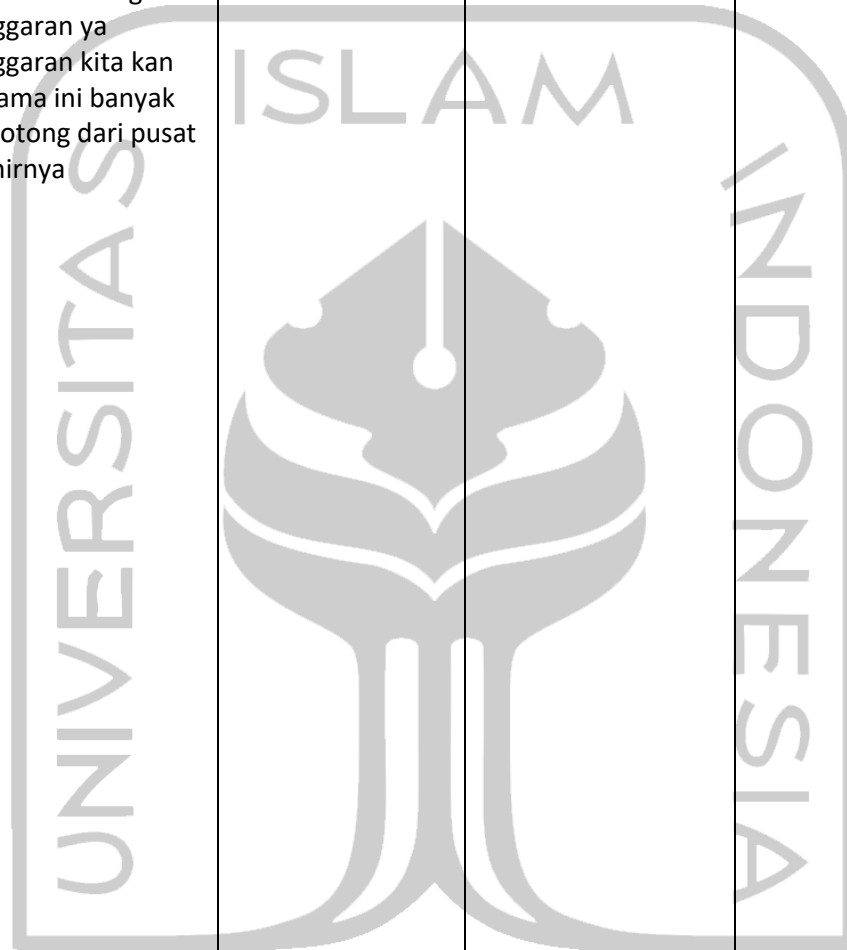
Rno Oh, enggak, enggak seperti itu mas. Jadi auditor, seorang auditor. Ketika dia mau

itu kan ada namanya pantry ya di pantry atau coffee morning atau apa ya istilahnya itu rutin nah di rutin itu KDH kan menginfokan atau ya istilahnya membangun biar OPD itu sadar untuk care terhadap TPK, tindak pidana korupsi Nah mereka kan di forum itu, kepala daerah, disitu ada inspektur hadir, kemudian yang datang kan kepala dinas nah kepala dinas akan menyampaikan atau menginformasikan kepada masing-masing stafnya di dinas-dinas tersebut yang bersangkutan, Jadi tidak secara langsung terus inspektorat apa, mencetak selebaran terus dikasih kan. Enggak, cuma memang ada kami melakukan sosialisasi khususnya di tahun 2023 ini memang

gitu, Kalau auditor, saya ini kan auditor, saya auditor madya Ada surat tugas saya jalani gitu

menjadi fungsional auditor, di awal sudah dibentuk dengan diklat. Yang diikuti diklat sertifikasi ya. Lulus peran misalnya auditor terampil, auditor muda, auditor terampil itu anggota tim, auditor ahli muda itu ketua tim, auditor madya itu pengendali teknis. Nah Ketika sebelum dibentuk itu, kami itu sudah dilalui seleksi saat itu.

kami kalau  
sosialisasi itu  
artinya kan  
berkaitan dengan  
anggaran ya  
anggaran kita kan  
selama ini banyak  
dipotong dari pusat  
akhirnya



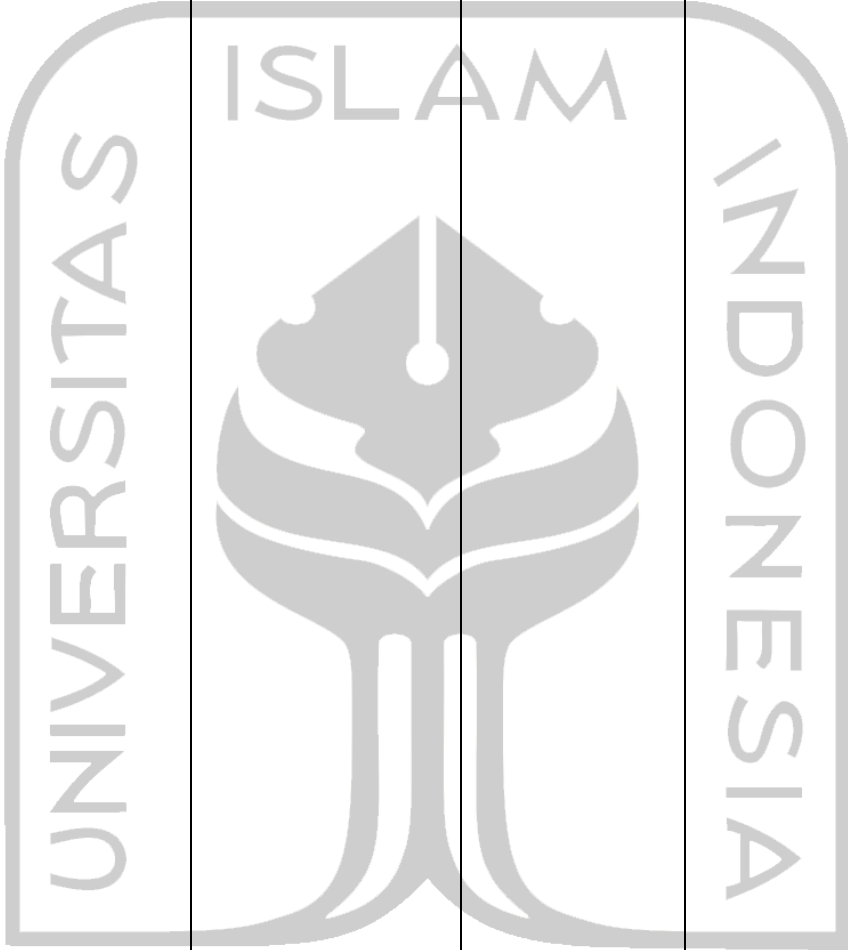
الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

Narasumber	I : 6. Monitoring stranas pemberantasan korupsi	J : 7. Analisis penilaian risiko <i>Fraud</i>	K : 8. Pengawasan kegiatan OPD	L : 9. Meminta perwakilan setiap OPD ikut E-Learning KPK	M : b. Pendeteksian	N : 1. Pemeriksaan Reguler	O : 2. Pemeriksaan Khusus
1 : Heri Setyawati, S.E., M.Acc.						<p>H : Kalau dulu dan sekarang sebenarnya kan sama ya artinya karna ketugasannya kan hampir sama, Cuma sekarang ada pembedangan yang lebih khusus lagi untuk yang bidang investigasi yang baru itu, tapi untuk yang identifikasi kecurangan potensi kecurangan itu biasanya kami mulai dengan pemeriksaan reguler. Dari pemeriksaan reguler ketika kami kok ada indikasi untuk korupsi lah untuk kami selesaikan di reguler gak cukup waktunya, gak cukup sumber dayanya dan sebagainya kemudian setelah LHP kami yang reguler terbit itu baru kami lanjutkan untuk pemeriksaan yang khusus, dan sekarang masuk ke bidang investigasi. Pemeriksaan investigasi <i>nantinya</i>, seperti itu</p> <p>H : Kalau</p>	<p>H : Kalau dulu dan sekarang sebenarnya kan sama ya artinya karna ketugasannya kan hampir sama, Cuma sekarang ada pembedangan yang lebih khusus lagi untuk yang bidang investigasi yang baru itu, tapi untuk yang identifikasi kecurangan potensi kecurangan itu biasanya kami mulai dengan pemeriksaan reguler. Dari pemeriksaan reguler ketika kami kok ada indikasi untuk korupsi lah untuk kami selesaikan di reguler gak cukup waktunya, gak cukup sumber dayanya dan sebagainya kemudian setelah LHP kami yang reguler terbit itu baru kami lanjutkan untuk pemeriksaan yang khusus, dan sekarang masuk ke bidang investigasi. Pemeriksaan</p>



mengidentifikasi kebutuhan kompetensi SDM, artinya ini bukan dari awal ya, artinya kan kita itu pokoknya pegawai inspektorat, yang diberdayakan ya juga itu, artinya kita tidak mencari-mencari awal untuk SDM yang memang mau didudukkan di investigasi itu enggak, ini dari awal memang adanya ini, kemudian ditata ulang dengan adanya bidang baru kek gitu bidang investigasi, diambil dari dari auditor yang lama, cuma sekarang bidangnya disini dengan pertimbangan tertentu kek gitu, artinya diratakanlah, misalnya dari masing-masing bidang itu ada yang jurusan akuntansi, ada yang hukum, ada yang teknik seperti itu, pertimbangannya hanya itu, kalau masalah peningkatan SDMnya ya memang kita upayakan untuk mengirim ke berbagai diklat yang menurut kami itu berguna untuk bekerja di bidang masing-masing seperti itu, misalnya tadi

investigasi *nantinya*, seperti itu  
H : Kalau mengidentifikasi kebutuhan kompetensi SDM, artinya ini bukan dari awal ya, artinya kan kita itu pokoknya pegawai inspektorat, yang diberdayakan ya juga itu, artinya kita tidak mencari-mencari awal untuk SDM yang memang mau didudukkan di investigasi itu enggak, ini dari awal memang adanya ini, kemudian ditata ulang dengan adanya bidang baru kek gitu bidang investigasi, diambil dari dari auditor yang lama, cuma sekarang bidangnya disini dengan pertimbangan tertentu kek gitu, artinya diratakanlah, misalnya dari masing-masing bidang itu ada yang jurusan akuntansi, ada yang hukum, ada yang teknik seperti itu, pertimbangannya hanya itu, kalau masalah peningkatan SDMnya ya memang

			<p>ada bidang investigasi baru, kemarin Mba Pipit dan Mba Retno itu di ikutkan untuk diklat masalah perhitungan keuangan negara, kemudian saya dan juga teman saya kemarin ikut audit investigatif, ada teman lagi yang ikut untuk forensik digital seperti itu</p>	<p>kita upayakan untuk mengirim ke berbagai diklat yang menurut kami itu berguna untuk bekerja di bidang masing-masing seperti itu, misalnya tadi ada bidang investigasi baru, kemarin Mba Pipit dan Mba Retno itu di ikutkan untuk diklat masalah perhitungan keuangan negara, kemudian saya dan juga teman saya kemarin ikut audit investigatif, ada teman lagi yang ikut untuk forensik digital seperti itu</p>
--	--	---	---	--

الجامعة الإسلامية الاندونيسية



2 : Hery Dwi  
Kuryanto,  
S.H.,  
M.Hum.

Hy Kekurangannya?  
Ya. Dari sisi... Jadi  
gini, kita kan harus  
pengembangan itu  
dari sisi kompetensi  
pertama. Dari sisi  
kompetensi itu bisa  
kita lakukan  
peningkatan dari  
sisi  
pengetahuannya,  
kompetensinya itu  
melalui diklat. Itu  
kan sesuatu yang  
bisa dipelajari.  
Tergantung kepada  
bagaimana  
kemampuan, terus  
kemauan dari SDM  
untuk  
mengembangkan  
diri. Kita ada dari  
diklat yang  
dilakukan oleh  
lembaga-lembaga  
baik itu di BPKP  
maupun BPK.  
Kemudian yang  
terpenting lagi  
adalah justru bukan  
hanya  
pengembangan  
kompetensi, tapi  
lebih kepada  
kualitas diri. Itu  
yang terpenting.  
Jadi profesi... Di sini  
kan auditor,  
fungsional. Profesi

auditor itu bukan hanya didukung oleh profesional kompetensi seorang auditor. Tapi harus dibarengi dengan integritas. Citra diri. Kemudian bagaimana kemudian integritasnya mereka itu benar-benar bisa ditegakkan. Antara nilai-nilai yang ada di dalam dirinya itu benar-benar bisa diterapkan dalam melaksanakan tugas. Jadi tidak ada gunanya kalau seorang yang memiliki kompetensi kemudian integritasnya rendah. Karena kalau integritasnya rendah artinya profesionalnya kompetensinya bisa tergadaikan. Itu semua pekerjaan yang kayak gitu. Auditor kalau di sini fungsinya fungsi pengawasan, auditor kalau sudah tergadaikan

profesionalismenya, artinya kompetensinya berarti tidak akan bisa mengawal fungsi inspektorat selaku pengawas. Itu aja titiknya. Seinggalah pengembangan integritas itu melalui apa? Ini yang terpenting adalah dari internal manajemennya. Dari inspektur, dari sekretaris, dari irban. Artinya kami, saya sebagai inspektur, perlu mendrive teman-teman struktural baik dari sekretaris sampai ke bawah. Itu melalui pembinaan. Baik itu di apel pagi setiap Senin atau pertemuan-pertemuan rutin. Kita kuatkan integritas dia. Dan di tempat kita ada yang namanya, setiap apel kita membaca yang namanya pakta integritas. Ada delapan pakta atau berapa. Itu yang

sebetulnya akan membangun kepribadian dari mereka untuk bisa menegakkan profesionalisme mereka. Terus kita juga, ada kita pelatihan, bukan, pemberian motivasi dari pihak luar. Motivasi kaitannya dengan profesional, bagaimana bekerja secara profesional, maupun dari aspek keagamaan. Itu yang paling terpenting. Udah jawabannya selesai.

الجمعة الإسلامية الاندونيسية

3 : Ika Sulistyio Devi

I dulu sebelum ada teman-teman ini kan auditor itu dulu belum ada teman-teman dari PU, dari teknik gitu. Kita pernah minta bantuan ke PU untuk memeriksa bangunan, Karena dulu nggak ada tenaga teknik sama sekali. Tetapi sekarang karena sudah ada tenaga tekniknya, kita lebih banyak sendiri. Tapi kadang kalau misalnya butuh sekali, kita minta bantuan. Kayak kemarin pemeriksaan desa atau apa ya, itu yang di mana melati itu kayaknya minta bantuan ke PU.

I Pencegahannya untuk *anti-fraud* misalnya adanya SOP dalam pelaksanaan kegiatan, entah itu *nanti* terutama yang di kami ya, di kami itu tentang SOP pendistribusian LHP, laporan hasil pemeriksaan, kemudian tentang pemuakhiran tindak lanjut gitu, kalau yang di keuangan juga ada, bagaimana SOP untuk penyusunan dokumen pelaksana anggaran, Kemudian untuk SOP pengelolaan barang juga ada. Salah satunya itu. Kemudian ada lagi yang kita juga *anti-fraud*, *fraud* kan anu ya kecurangan ya. Itu juga misalnya pelatihan. Jadi kan peningkatan kompetensi itu kan diharapkan *nantifraudnya* kalau hilang sama sekali sih mungkin bertahap ya, tapi

I Salah satunya kami melakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya kan harus mencocokkan antara rencana dengan realisasinya. Misalnya dari rencana dan realisasi itu ada perbedaan, ya kita konfirmasi, ya konfirmasi. Kemudian mereka menjawab apa, kita cocokkan dengan bukti-buktinya. Kalau buktinya tidak sesuai, ya kami misalnya itu kekurangan bukti pertanggungjawaban. Ini hanya kekurangan atau memang pekerjaan ini gak dilaksanakan? Kalau memang hanya kekurangan bukti pertanggungjawaban tapi pekerjaan ini dilaksanakan kami tunggu bukti pertanggungjawabannya agar segera diselesaikan. Tetapi kalau ini adalah tidak dilaksanakan, tetapi ada misalnya ada kwitansinya, misalnya pembelian kursi. Ini memang kursinya enggak dibelikan, tetapi di situ ada kwitansi

I Salah satunya kami melakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya kan harus mencocokkan antara rencana dengan realisasinya. Misalnya dari rencana dan realisasi itu ada perbedaan, ya kita konfirmasi, ya konfirmasi. Kemudian mereka menjawab apa, kita cocokkan dengan bukti-buktinya. Kalau buktinya tidak sesuai, ya kami misalnya itu kekurangan bukti pertanggungjawaban. Ini hanya kekurangan atau memang pekerjaan ini gak dilaksanakan? Kalau memang hanya kekurangan bukti pertanggungjawaban tapi pekerjaan ini dilaksanakan kami tunggu bukti pertanggungjawabannya agar segera diselesaikan. Tetapi kalau ini adalah tidak dilaksanakan, tetapi ada misalnya ada kwitansinya, misalnya pembelian kursi. Ini memang kursinya

peningkatan kompetensi itu kan juga diharapkannya berkurang lah *fraudnya* itu. Kemudian juga ada untuk pakta integritas, kami setiap ASN di inspektorat terutama itu harus menandatangani pakta integritas.

pembelian kursi yang mereka harus mengembalikan uangnya. Kalau di kalurahan ya ke kalurahan, kalau di organisasi perangkat daerah ya di OPD tersebut.

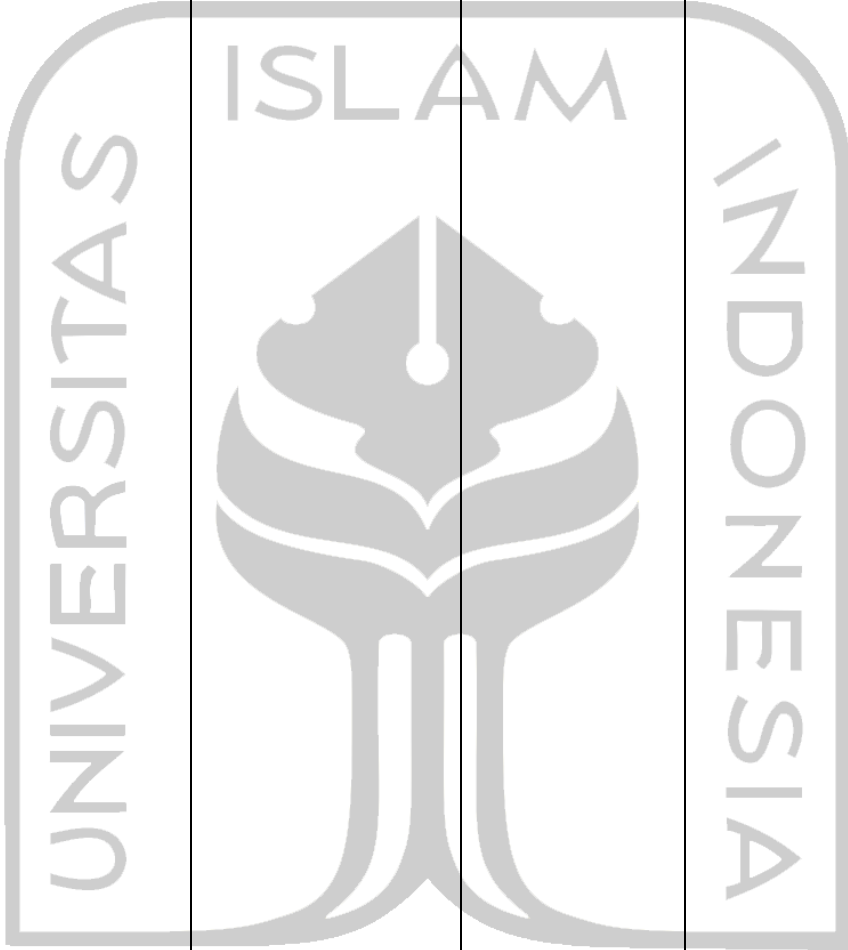
I Hm em, pemeriksaan, pendampingan, konsultasi, kami juga membuka konsultasi misalnya perangkat daerah ataupun auditee ya, istilahnya ya auditee yang kami periksa itu ada permasalahan mereka bisa langsung ke sini konsultasi dengan membawa berkas tentunya. Soalnya kalau nggak membawa berkas hanya by phone gitu kan kadang nggak jelas permasalahannya itu apa. Tapi kalau kita lihat berkas-berkasnya kan oh ini *nanti* solusinya seperti ini begitu

I dulu sebelum ada teman-teman ini kan auditor itu dulu belum ada teman-teman dari PU, dari teknik gitu. Kita pernah minta bantuan ke PU untuk memeriksa bangunan, Karena dulu

enggak dibelikan, tetapi di situ ada kwitansi pembelian kursi yang mereka harus mengembalikan uangnya. Kalau di kalurahan ya ke kalurahan, kalau di organisasi perangkat daerah ya di OPD tersebut.

I dulu sebelum ada teman-teman ini kan auditor itu dulu belum ada teman-teman dari PU, dari teknik gitu. Kita pernah minta bantuan ke PU untuk memeriksa bangunan, Karena dulu nggak ada tenaga teknik sama sekali. Tetapi sekarang karena sudah ada tenaga tekniknya, kita lebih banyak sendiri. Tapi kadang kalau misalnya butuh sekali, kita minta bantuan. Kayak kemarin pemeriksaan desa atau apa ya, itu yang di mana melati itu kayaknya minta bantuan ke PU.

I Digital forensik kemarin ada di diklatnya, Yang ikut

			<p>nggak ada tenaga teknik sama sekali. Tetapi sekarang karena sudah ada tenaga tekniknya, kita lebih banyak sendiri. Tapi kadang kalau misalnya butuh sekali, kita minta bantuan. Kayak kemarin pemeriksaan desa atau apa ya, itu yang di mana melati itu kayaknya minta bantuan ke PU.</p> <p>I Digital forensik kemarin ada di diklatnya, Yang ikut baru satu orang apa ya?</p>	<p>baru satu orang apa ya?</p>
--	--	---	--	--------------------------------

الجامعة الإسلامية  
الاستدراكية  
الاندونيسية

<p>4 : Ir. Sri Puji Lestari</p>	<p>Pj : Iya dari KPK, jadi sekarang di setiap inspektorat itu harus ada bidang khusus yang menangani investigative, karna kan sekarang banyak kegiatan dari KPK yang diturunkan ke daerah, banyak sekali. Kemarin itu karena belum ada bidang sendiri maka ditangani oleh kantor. Jenengan bisa bayangkan sekretariat harunya menangani masalah interen kantor, tapi juga menangani masalah-masalah dari luar, jadi kegiatannya belum ditampung</p>	<p>Bu Puji (Pj) : Ya, sebetulnya sekarang itu semenjak Maret, bulan maret ya, itu organisasi inspektorat ada perubahan. Sekarang sudah ada bidang yang menangani terkait dengan bidang investigasi dan reformasi birokrasi sekarang, kalau dulu memang belum ada, jadi terkait itu masih campur ya di sekretariat. Sekretariat, kalau sekarang sudah ada sebetulnya gitu tapi kan dan terkait dengan itu bidang investigasi dan reformasi birokrasi itu, tugasnya itu yang pertama, melakukan pencegahan terhadap tindakan e yang terkait dengan korupsi, dari pencegahan kemudian tindak pemeriksaannya atau penanganannya gitu. Kalau dulu masih ditangani oleh sekretariat, jadi di</p>	<p>Pj : Integritas nya itu kan audit, bukan auditor nya aja, tapi semua pegawai ya. Itu kan menandatangani pakta integritas, ada poin satu sampai tujuh kalau ndak salah, nah itu setiap hari senin dibacakan perwakilan, urut dari yang</p> <p>Pj : Kode etik ada, kemudian yang apa setelah surat tugas kita bikin yang mba lasmi yang setiap tim harus tanda tangan, independensi, dalam melakukan proses harus independensi. Jadinya kita yang selaku menugaskan kita harus tau apa namanya, jangan sampai kita menugaskan di tempat yang independen gitu. Kan mungkin ada yang kakaknya kerja disini, akhirnya gak disitu. Selagi saya</p>	<p>Pj : Oke, njih, kalau terkait dengan untuk pencegahan <i>fraud</i> sebetulnya kita itu sudah ada (apa namanya) mengirimkan SDM ya, mengirimkan SDM untuk mengikuti pelatihan atau diklat terkait dengan penyuluh <i>anti</i> korupsi. Nggih, sebelum jadi penyuluh ada pelatihan dulu ya, itu kita sudah mengirimkan ada kalau nggak salah ada 9 orang atau 7 orang untuk mengikuti diklat tersebut, setelah lulus diklat tersebut, kemudian yang bersangkutan harapannya mengikuti sertifikasi penyuluh <i>anti</i> korupsi, tetapi</p>		<p>Bu Puji (Pj) : Ya, sebetulnya sekarang itu semenjak Maret, bulan maret ya, itu organisasi inspektorat ada perubahan. Sekarang sudah ada bidang yang menangani terkait dengan bidang investigasi dan reformasi birokrasi sekarang, kalau dulu memang belum ada, jadi terkait itu masih campur ya di sekretariat. Sekretariat, kalau sekarang sudah ada sebetulnya gitu tapi kan dan terkait dengan itu bidang investigasi dan reformasi birokrasi itu, tugasnya itu yang pertama, melakukan pencegahan terhadap tindakan e yang terkait dengan korupsi, dari pencegahan kemudian tindak pemeriksaannya atau penanganannya gitu. Kalau dulu masih ditangani oleh sekretariat, jadi di sekretariat masih e kalau dulu kan bidang-bidangnya belum ad aitu masih di sekretariat kita menangani terkait dengan <i>fraud</i> segala macem. Kalau di</p>	<p>Pj : Kalau pengembangan kompetensi kan kalau di kita itu tidak hanya terkait dengan <i>fraud</i> aja, tidak terkait kecurangan aja gitu. Tapi ya semuanya. Seperti pada saat, ya seperti itu ada kaitannya sih kalau kita melakukan review apa, anggaran itu kita juga salah satunya kan mengurangi apa, apa toh jeneng e, ee kesalahan ya, kesalahan penganggaran. Kalau itu juga pakai pakai ini pake aplikasinya e sana keuangan <i>nanti</i> kita dikasih password kita bisa melakukan dari situ. Kemudian untuk melakukan apa namanya kegiatan pemeriksaan probity audit terkait untuk pencegahan korupsi, itu ya selain apa namanya materi biasa juga ada uji lab nya. Tapi kita kerja sama, kerja sama dengan UII, dengan labnya, Fakultas Teknik.</p>
---------------------------------	---	--	---	---	--	---	--




<p>oleh bidang semuanya masuk ke sekretariat. Jadi sekretariat kita menangani. Di KPK itu ada kegiatan monitoring percepatan pemberantasan korupsi atau mjb, kalau mungkin jenengan kenal, mjb KPK, kemudian ada lagi inspektorat yang harus melakukan monitoring, kemudian juga adalagi monitoring penerapan stranas pemberantasan korupsi KPK, adalagi. Kemudian ada lagi kpk juga ngobli dia ee dia.</p> <p>Pj : Oke, njih, kalau terkait dengan untuk pencegahan <i>fraud</i> sebetulnya kita</p>	<p>secretariat masih e kalau dulu kan bidang-bidangnya belum ad aitu masih di sekretariat kita menangani terkait dengan <i>fraud</i> segala macem. Kalau di inspektorat, itu kan di inspektorat itukan inspektorat itu selaku e apa ya? Unit sekretariat unit ee pengendali gratifikasi atau UPG kemudian ekhm inspektorat itu juga sebagai kalau dulu sebagai pembina atau pendamping OPD dalam melakukan analisa <i>fraud</i> di setiap kegiatan OPD</p> <p>Pj : Kita yang melakukan, apa namanya, pembinaan atau penembilan kepada mereka untuk melakukan analisa resiko <i>fraud</i> dalam pelaksanaan kegiatan</p> <p>Pj : Salah satu dari SPIP itu, SPIP yang tahun sekarang itu kan mengalami</p>	<p>inget, selagi kita inget tidak akan kita tugaskan. Ada itu, kita udah buat daftarnya</p> <p>Pj : Dan yang baru itu ada diklatnya, setelah masuk sini ada diklat khusus pengawasan, kita diklat kan, khusus pengawasan dari dasar</p> <p>Pj : Iya, kalau yang untuk di belakang ini harus PNS semua, tidak bisa yang PHL gitu enggak bisa. Iya, karena untuk melakukan kegiatan pengawasan harus mereka memiliki sertifikat, sertifikasi khusus pengawasan ya dan itu syaratnya harus PNS iya. Jadi kalau PHL itu gak bisa, jadi ada teman-teman phl tidak di belakang tapi di kita.</p> <p>Pj : Oh iya, kan itu ya, saya itu sadar</p>	<p>dari tujuh orang itu baru satu yang mengikuti penyuluhan <i>anti</i> korupsi, tadinya dua yang mengikuti tapi yang lulus baru satu, jadi kita baru mempunyai penyuluh <i>anti</i> korupsi yang telah bersertifikat oleh KPK itu satu orang, tetapi meskipun demikian, ketujuh orang yang pernah kita diklat kan pencegah <i>anti</i> korupsi ini juga bisa dimanfaatkan dalam rangka sosialisasi ke OPD-OPD. Kemudian kalau dibidang investigasi itu kan kegiatannya tidak hanya investigasi saja tapi juga reformasi birokrasi, itu memang personil nya</p>	<p>inspektorat, itu kan di inspektorat itukan inspektorat itu selaku e apa ya? Unit sekretariat unit ee pengendali gratifikasi atau UPG kemudian ekhm inspektorat itu juga sebagai kalau dulu sebagai pembina atau pendamping OPD dalam melakukan analisa <i>fraud</i> di setiap kegiatan OPD</p> <p>Pj : Dan yang baru itu ada diklatnya, setelah masuk sini ada diklat khusus pengawasan, kita diklat kan, khusus pengawasan dari dasar</p> <p>Pj : Oke, njih, kalau terkait dengan untuk pencegahan <i>fraud</i> sebetulnya kita itu sudah ada (apa namanya) mengirimkan SDM ya, mengirimkan SDM untuk mengikuti pelatihan atau diklat terkait dengan penyuluh <i>anti</i> korupsi. Nggih, sebelum jadi penyuluh ada pelatihan dulu ya, itu kita sudah mengirimkan ada kalau nggak salah ada 9 orang atau 7 orang untuk mengikuti diklat</p>	<p>Pj : Dan yang baru itu ada diklatnya, setelah masuk sini ada diklat khusus pengawasan, kita diklat kan, khusus pengawasan dari dasar</p> <p>Pj : Itu juga sedang dalam pelatihan. Kemarin kita udah ngirim pelatihan penghitungan kerugian kan gitu. Besok ngirim audit investigasi, besok ngirim apalagi</p> <p>Pj : Iya, kalau yang untuk di belakang ini harus PNS semua, tidak bisa yang PHL gitu enggak bisa. Iya, karena untuk melakukan kegiatan pengawasan harus mereka memiliki sertifikat, sertifikasi khusus pengawasan ya dan itu syaratnya harus PNS iya. Jadi kalau PHL itu gak bisa, jadi ada teman-teman phl tidak di belakang tapi di kita.</p>
---	--	---	---	---	---

<p>itu sudah ada (apa namanya) mengirimkan SDM ya, mengirimkan SDM untuk mengikuti pelatihan atau diklat terkait dengan penyuluh <i>anti</i> korupsi. Nggih, sebelum jadi penyuluh ada pelatihan dulu ya, itu kita sudah mengirimkan ada kalau nggak salah ada 9 orang atau 7 orang untuk mengikuti diklat tersebut, setelah lulus diklat tersebut, kemudian yang bersangkutan harapannya mengikuti sertifikasi penyuluh <i>anti</i> korupsi, tetapi dari tujuh orang itu baru satu yang mengikuti penyuluhan <i>anti</i> korupsi,</p>	<p>pengembangan, apa namanya, materinya itu bertambah, tidak hanya SPIP melulu, tapi dalam SPIP itu sekarang ada, unit apa sub-sub penilaian SPIP terkait dengan IUPK itu indeks IUPK Korupsi hm em. Amanat dari SPIP itu yaitu, SPIP itu kan ada terkait juga apa namanya IUPK indeks indeks pengendalian korupsi juga Maka langkah pertama Yang dilakukan itu adalah melakukan analisis penilaian kejadian <i>fraud</i> di setiap kegiatan yang dilakukan, jadi memang baru tahun kemarin kita lakukan karena kalau tahun-tahun dulu itu SPIP Tidak sampai ke <i>fraud</i> jadi Hanya analisis risiko, risiko-risiko yang apa Menghambat atau menggagalkan capaian tujuan kegiatan Tapi SPIP itu kan mengalami perkembangan baru kemarin Itu ada tambahan sekarang</p>	<p>saya itu udah generasi tua ya untuk media sosial tidak begitu paham ya, tapi teman-teman saya kan juga banyak yang muda-muda, yang sepantaran nya anak-anak itu ya mereka itu yang saya tugaskan itu, jadi kalau ada informasi seperti itu ya informasikan, kan kita punya anggaran kan gitu. Yang sering itu UGM, kemudian UII, belum pernah kek nya kita seminar disana toh, di semarang malah pernah sekali, tapi soalnya kan terbatas terkait dengan pengawasan</p>	<p>baru delapan orang. Meskipun demikian bisa dibantu dengan bidang yang lain karena ketujuh orang itu tidak seluruhnya itu menyebar di bidang lain yang sudah mendapatkan pelatihan terkait dengan pencegahan korupsi. Kemudian untuk ke depannya terkait dengan (apa namanya) pendidikan <i>anti</i> korupsi ini tidak hanya di inspektorat, kami juga mengeluarkan mulai tahun kemarin mengeluarkan surat kami tujukan kepada seluruh OPD untuk mengirimkan personil nya guna mengikuti pelatihan atau melalui e-</p>	<p>tersebut, setelah lulus diklat tersebut, kemudian yang bersangkutan harapannya mengikuti sertifikasi penyuluh <i>anti</i> korupsi, tetapi dari tujuh orang itu baru satu yang mengikuti penyuluhan <i>anti</i> korupsi, tadinya dua yang mengikuti tapi yang lulus baru satu, jadi kita baru mempunyai penyuluh <i>anti</i> korupsi yang telah bersertifikat oleh KPK itu satu orang, tetapi meskipun demikian, ketujuh orang yang pernah kita diklat kan pencegah <i>anti</i> korupsi ini juga bisa dimanfaatkan dalam rangka sosialisasi ke OPD-OPD. Kemudian kalau dibidang investigasi itu kan kegiatannya tidak hanya investigasi saja tapi juga reformasi birokrasi, itu memang personil nya baru delapan orang. Meskipun demikian bisa dibantu dengan bidang yang lain karena ketujuh orang itu tidak seluruhnya itu menyebar di bidang lain yang sudah mendapatkan pelatihan terkait dengan</p>	<p>Pj : Oh iya, kan itu ya, saya itu sadar saya itu udah generasi tua ya untuk media sosial tidak begitu paham ya, tapi teman-teman saya kan juga banyak yang muda-muda, yang sepantaran nya anak-anak itu ya mereka itu yang saya tugaskan itu, jadi kalau ada informasi seperti itu ya informasikan, kan kita punya anggaran kan gitu. Yang sering itu UGM, kemudian UII, belum pernah kek nya kita seminar disana toh, di semarang malah pernah sekali, tapi soalnya kan terbatas terkait dengan pengawasan</p>
--	--	--	--	--	--

	<p>tadinya dua yang mengikuti tapi yang lulus baru satu, jadi kita baru mempunyai penyuluh <i>anti</i> korupsi yang telah bersertifikat oleh KPK itu satu orang, tetapi meskipun demikian, ketujuh orang yang pernah kita diklat kan pencegah <i>anti</i> korupsi ini juga bisa dimanfaatkan dalam rangka sosialisasi ke OPD-OPD. Kemudian kalau dibidang investigasi itu kan kegiatannya tidak hanya investigasi saja tapi juga reformasi birokrasi, itu memang personil nya baru delapan orang. Meskipun</p>	<p>Tambahan iupk itu</p> <p>Pj : Iupk itu apa ya singkatannya ya. Indeks Iupk Penanganan pencegahan korupsi intinya Coba <i>nanti</i> dicari Dek Iupk, Iupk itu salah satu materi SPIP Baru kemarin kalau dulu belum ada gitu Iupk, Terus karena itu maka Langkah pertama yaitu kita melakukan analisis <i>Fraud</i></p> <p>Pj : Harusnya Iya tetap berlanjut, Saya harus membantu opd Meyakinkan opd membuat</p> <p>Pj : Jadi kalau kemarin karena baru-baru Jadi kita mencoba membuat, Kemudian kita share itu semua ke unit-unit kerja Contohnya seperti ini menyesuaikan dengan kegiatannya Itu kadang opd juga belum ngeh gitu loh laporannya tidak ada <i>fraud</i> tidak ada <i>fraud</i> tambah akan yang namanya penilaian</p>		<p>learning nya KPK, tapi memang belum efektif hanya beberapa OPD yang mengirimkan personil nya untuk mengikuti pelatihan tersebut. Nah ini, metode seperti ini besok tahun ini juga akan kita kirimkan lagi kepada seluruh OPD untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut melalui e-learning dari KPK gitu termasuk juga inspektorat. Rencananya seluruh auditor disini harus mengikuti e-learning tersebut dengan materi berbeda-beda disesuaikan dengan keinginan mereka gitu. Untuk</p>	<p>pencegahan korupsi. Kemudian untuk ke depannya terkait dengan (apa namanya) pendidikan <i>anti</i> korupsi ini tidak hanya di inspektorat, kami juga mengeluarkan mulai tahun kemarin mengeluarkan surat kami tujukan kepada seluruh OPD untuk mengirimkan personil nya guna mengikuti pelatihan atau melalui e-learning nya KPK, tapi memang belum efektif hanya beberapa OPD yang mengirimkan personil nya untuk mengikuti pelatihan tersebut. Nah ini, metode seperti ini besok tahun ini juga akan kita kirimkan lagi kepada seluruh OPD untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut melalui e-learning dari KPK gitu termasuk juga inspektorat. Rencananya seluruh auditor disini harus mengikuti e-learning tersebut dengan materi berbeda-beda disesuaikan dengan keinginan mereka gitu. Untuk peningkatan SDM nya begitu, kalau jumlahnya</p>	
--	--	---	--	---	---	--

	<p>demikian bisa dibantu dengan bidang yang lain karena ketujuh orang itu tidak seluruhnya itu menyebar di bidang lain yang sudah mendapatkan pelatihan terkait dengan pencegahan korupsi. Kemudian untuk ke depannya terkait dengan (apa namanya) pendidikan <i>anti</i> korupsi ini tidak hanya di inspektorat, kami juga mengeluarkan mulai tahun kemarin mengeluarkan surat kami tujuan kepada seluruh OPD untuk mengirimkan personil nya guna mengikuti pelatihan atau melalui e-learning nya KPK, tapi</p>	<p>resiko itu penilaian yang terjadi atau yang mungkin terjadi kan gitu Jadi kalau dalam pikirannya nggak pernah ada jadi seakan-akan yang sudah terjadi kan gitu, mungkin kalau penilaian resiko seperti itu ya itu jadi langkah pertama ya itu kalau terkait dengan <i>fraud</i>. Penilaian risiko <i>fraud</i> Terjadi, Tapi saya itu sendiri tidak bisa membedakan ya antara <i>fraud</i> dengan agenda <i>anti</i> korupsi lainnya Oh ya kalau untuk pencegahan Kita yaitu melakukan sosialisasi-sosialisasi pencegahan pungli Kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan Khusus pungli. Tapi kalau pencegahan gratifikasi Maka hanya inspektorat yang melakukan Kita melakukan kepada seluruh opd Seluruh unit kerja, Dan kemarin kita khususkan kepada Sekolah. Sekolah SD SMP itu kita lakukan</p>		<p>peningkatan SDM nya begitu, kalau jumlahnya tidak bisa. Jumlahnya ya memang seperti ini, gak bisa menambah dengan seenaknya, gak bisa, hanya peningkatan kualitas</p> <p>Pj : Iya, kan itu pendaftaran e-learning KPK kan melalui inspektorat ya, jadi dari OPD mengirimkan nama ke kita, kita daftarkan ke KPK, kemudian dari KPK <i>nanti</i> mendapatkan notifikasi untuk pelatihan ini maka pelatihan ini <i>nanti</i> akan dibuka tanggal berapa tanggal berapa. Nah pada saat tanggalnya tersebut kita sampaikan kepada yang</p>		<p>tidak bisa. Jumlahnya ya memang seperti ini, gak bisa menambah dengan seenaknya, gak bisa, hanya peningkatan kualitas</p> <p>Pj : e-learning nya macem-macem tapi melalui link nya KPK, kalau materinya <i>nanti</i> kita pilih macam-macam terkait dengan pengendalian korupsi, pencegahan dan segala macam</p>	
--	--	---	--	---	--	---	--

	<p>memang belum efektif hanya beberapa OPD yang mengirimkan personil nya untuk mengikuti pelatihan tersebut. Nah ini, metode seperti ini besok tahun ini juga akan kita kirimkan lagi kepada seluruh OPD untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut melalui e-learning dari KPK gitu termasuk juga inspektorat. Rencananya seluruh auditor disini harus mengikuti e-learning tersebut dengan materi berbeda-beda disesuaikan dengan keinginan mereka gitu. Untuk peningkatan</p>	<p>penyuluhan pencegahan gratifikasi iya</p> <p>Pj : Integritas nya itu kan audit, bukan auditor nya aja, tapi semua pegawai ya. Itu kan menandatangani pakta integritas, ada poin satu sampai tujuh kalau ndak salah, nah itu setiap hari senin dibacakan perwakilan, urut dari yang</p> <p>Pj : Oke, njih, kalau terkait dengan untuk pencegahan <i>fraud</i> sebetulnya kita itu sudah ada (apa namanya) mengirimkan SDM ya, mengirimkan SDM untuk mengikuti pelatihan atau diklat terkait dengan penyuluh <i>anti</i> korupsi. Nggih, sebelum jadi penyuluh ada pelatihan dulu ya, itu kita sudah mengirimkan ada kalau nggak salah ada 9 orang atau 7 orang untuk</p>		<p>bersangkutan, mungkin yang bersangkutan lupa ya, nah kita juga tidak mengecek yang bersangkutan tanggal segini harusnya mengikuti e-learning gitu lo, nah itu satu menjadi catatan juga, terus yang kedua kita belum memberi peringatan pada OPD-OPD yang belum mengirimkan personil nya gitu, itu tidak efektifnya. Jadi sekedar (apa) karena tidak wajib kan gitu maka tidak mengirimkan gak apa-apa kan gitu, tapi kalau besok ya kita monitoring siapa opd yang belum mengirimkan, nah itu kita minta untuk segera mengirimkan personil.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

	<p>SDM nya begitu, kalau jumlahnya tidak bisa. Jumlahnya ya memang seperti ini, gak bisa menambah dengan seenaknya, gak bisa, hanya peningkatan kualitas</p> <p>Pj : e-learning nya macem-macam tapi melalui link nya KPK, kalau materinya nanti kita pilih macam-macam terkait dengan pengendalian korupsi, pencegahan dan segala macam</p> <p>Pj : Kalau pencegahan korupsinya monitoringnya disini</p>	<p>mengikuti diklat tersebut, setelah lulus diklat tersebut, kemudian yang bersangkutan harapannya mengikuti sertifikasi penyuluh <i>anti</i> korupsi, tetapi dari tujuh orang itu baru satu yang mengikuti penyuluhan <i>anti</i> korupsi, tadinya dua yang mengikuti tapi yang lulus baru satu, jadi kita baru mempunyai penyuluh <i>anti</i> korupsi yang telah bersertifikat oleh KPK itu satu orang, tetapi meskipun demikian, ketujuh orang yang pernah kita diklat kan pencegah <i>anti</i> korupsi ini juga bisa dimanfaatkan dalam rangka sosialisasi ke OPD-OPD. Kemudian kalau dibidang investigasi itu kan kegiatannya tidak hanya investigasi saja tapi juga reformasi birokrasi, itu memang personil nya baru delapan orang. Meskipun demikian bisa</p>					
--	---	---	---	--	--	--	--

dibantu dengan bidang yang lain karena ketujuh orang itu tidak seluruhnya itu menyebar di bidang lain yang sudah mendapatkan pelatihan terkait dengan pencegahan korupsi. Kemudian untuk ke depannya terkait dengan (apa namanya) pendidikan *anti*-korupsi ini tidak hanya di inspektorat, kami juga mengeluarkan mulai tahun kemarin mengeluarkan surat kami tujukan kepada seluruh OPD untuk mengirimkan personil nya guna mengikuti pelatihan atau melalui e-learning nya KPK, tapi memang belum efektif hanya beberapa OPD yang mengirimkan personil nya untuk mengikuti pelatihan tersebut. Nah ini, metode seperti ini besok tahun ini juga akan kita kirimkan lagi kepada seluruh OPD untuk



mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut melalui e-learning dari KPK gitu termasuk juga inspektorat. Rencananya seluruh auditor disini harus mengikuti e-learning tersebut dengan materi berbeda-beda disesuaikan dengan keinginan mereka gitu. Untuk peningkatan SDM nya begitu, kalau jumlahnya tidak bisa. Jumlahnya ya memang seperti ini, gak bisa menambah dengan seenaknya, gak bisa, hanya peningkatan kualitas

Pj : e-learning nya macem-macem tapi melalui link nya KPK, kalau materinya nanti kita pilih macam-macam terkait dengan pengendalian korupsi, pencegahan dan segala macam

Pj : Kalau sekarang itu berdasarkan SPIP inspektorat meminta





opd melakukan analisis risiko *fraud* di setiap kegiatan opd dan kemudian kita yang koreksi, kalau dulu belum ada, ini baru tahun lalu, tahun 2022. Dulu inspektorat hanya melakukan analisis risiko kegiatan, sedangkan yang analisis risiko *fraud* itu langsung dari BPKP



الجامعة الإسلامية  
الاستد بالاندو

5 :  
Ngatiyah,  
S.H.

G Kalau pencegahan di kita sering, kan sekarang ada mcb kpk juga ya, mcb kpk itu kan disitu kan banyak banget program-programnya dari KPK baik untuk pencegahannya, terutama untuk pencegahan ya, itu kan ada disitu ada UPG ada apa — macem-macem lah, terus ada sosialisasi terus *nanti* itu kita sosialisasi ke masing-masing OPD *nanti* OPD juga di masing-masing itu sosialisasi ke masing-masing pegawai juga untuk gratifikasi, untuk macem-macem lah. Terus ada untuk pembuatan, untuk pengendalian risiko di masing-masing instansi itu ada juga

G Biasanya di keuangannya sih, di pengelolaan keuangan, kalau aset aset kayak gitu enggak sih, soalnya aset juga kita pantau terus, kalau misalnya ada kehilangan aset itu kita telusuri, kan kalau inspektorat kan tugasnya memang sampai disitu juga ya, kalau ada aset yang hilang kita telusuri ada unsur kelalaian gak? Seperti apa kayak gitu? Trus kita juga punya aplikasi SIM aset itu untuk menginventarisasi semua aset, jadi sudah *diantisipasi* sih kalau aset-asetnya sendiri

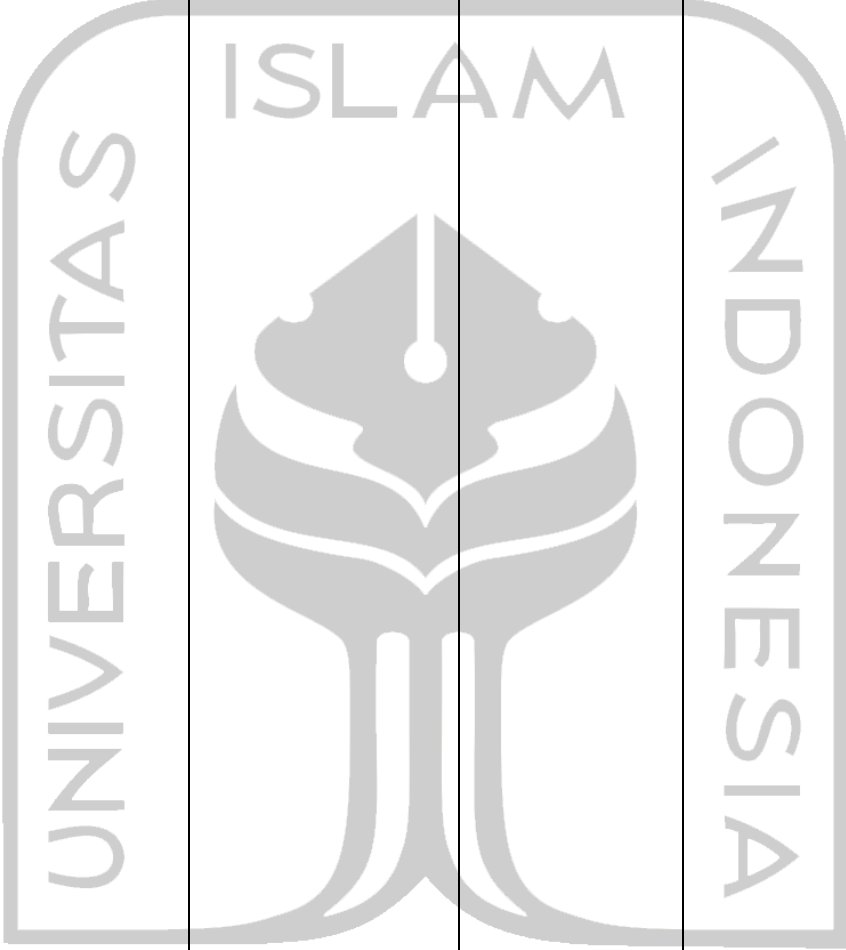
G Kalau pencegahan di kita sering, kan sekarang ada mcb kpk juga ya, mcb kpk itu kan disitu kan banyak banget program-programnya dari KPK baik untuk pencegahannya, terutama untuk pencegahan ya, itu kan ada disitu ada UPG ada apa macem-macem lah, terus ada sosialisasi terus *nanti* itu kita sosialisasi ke masing-masing OPD *nanti* OPD juga di masing-masing itu sosialisasi ke masing-masing pegawai juga untuk gratifikasi, untuk macem-macem lah. Terus ada untuk pembuatan, untuk pengendalian risiko di masing-

G Kalau deteksi *fraud* itu kita kan ada pemeriksaan seperti itu, *nanti* kan kita lihat bukti, misalkan pengadaan ini bukti pertanggungjawabannya seperti ini, kan kita ya, terus *nanti* kita konfirmasi ke pihak ketiga kalau sudah benar apa belum kayak gitu *nanti* ada temuan-temuan yang harus ditindak lanjuti dan di evaluasi seperti itu, deteksinya dari situ sih kalau kita, di OPD juga kita periksa, *nanti* ada penyimpangan-penyimpangan kan kelihatan dari hasil pemeriksaan kami seperti itu ya

G Diklat-diklat ya, kemarin belum lama juga saya sama bu heri itu diklat audit investigasi terus ada diklat PPKN kayak gitu terus *nanti* sosialisasi-sosialisasi itu disamping kita memberi kita dapat juga dari KPK ya, terus dari yang MCB itu juga mcb dari KPK itu kan banyak sekali indikator-indikatornya harus

G Biasanya di keuangannya sih, di pengelolaan keuangan, kalau aset aset kayak gitu enggak sih, soalnya aset juga kita pantau terus, kalau misalnya ada kehilangan aset itu kita telusuri, kan kalau inspektorat kan tugasnya memang sampai disitu juga ya, kalau ada aset yang hilang kita telusuri ada unsur kelalaian gak? Seperti apa kayak gitu? Trus kita juga punya aplikasi SIM aset itu untuk menginventarisasi semua aset, jadi sudah *diantisipasi* sih kalau aset-asetnya sendiri

G Diklat-diklat ya, kemarin belum lama juga saya sama bu heri itu diklat audit investigasi terus ada diklat PPKN kayak gitu terus *nanti* sosialisasi-sosialisasi itu disamping kita memberi kita dapat juga dari KPK ya, terus dari yang MCB itu juga mcb dari KPK itu kan banyak sekali

			<p>masing instansi itu ada juga</p>		<p>dipenuhi pemda ya itu kan diharapkan dapat mencegah <i>fraud</i> itu juga karna disitu banyak sekali laporan-laporan yang seperti apa sudah dilakukan oleh pemda terkait dengan pencegahannya, penindakannya, maupun itu.</p>	<p>indikator-indikatornya harus dipenuhi pemda ya itu kan diharapkan dapat mencegah <i>fraud</i> itu juga karna disitu banyak sekali laporan-laporan yang seperti apa sudah dilakukan oleh pemda terkait dengan pencegahannya, penindakannya, maupun itu.</p>
--	--	--	-------------------------------------	---	--	---

الجامعة الإسلامية الاندونيسية

6 : Pipit  
Tyas Ratna  
Puspita,  
S.H., MPA.

P : Kalau yang tadi kan kaitannya dengan pemeriksaan yang dikhususkan ketika sudah ada, jadi dari pemeriksaan reguler terus kemudian diketahui ada kecurangan terus dilanjutkan dengan khusus pemeriksaan kasus dengan lebih diperdalam di penyimpangannya ya. Tapi kalau yang untuk pemeriksaan-pemeriksaan reguler itu biasanya kami identifikasinya kami sebelum melakukan pemeriksaan itu ada identifikasi risiko, disitukan termasuk mengidentifikasi program-program krusial yang dikerjakan oleh OPD sebelum kami masuk biasanya kan kami identifikasi risikonya dulu, kayak misalnya pemeriksaan desa, pengawasan desa. Itu kita mengidentifikasi risikonya itu dari ketepatan pelaporan terus

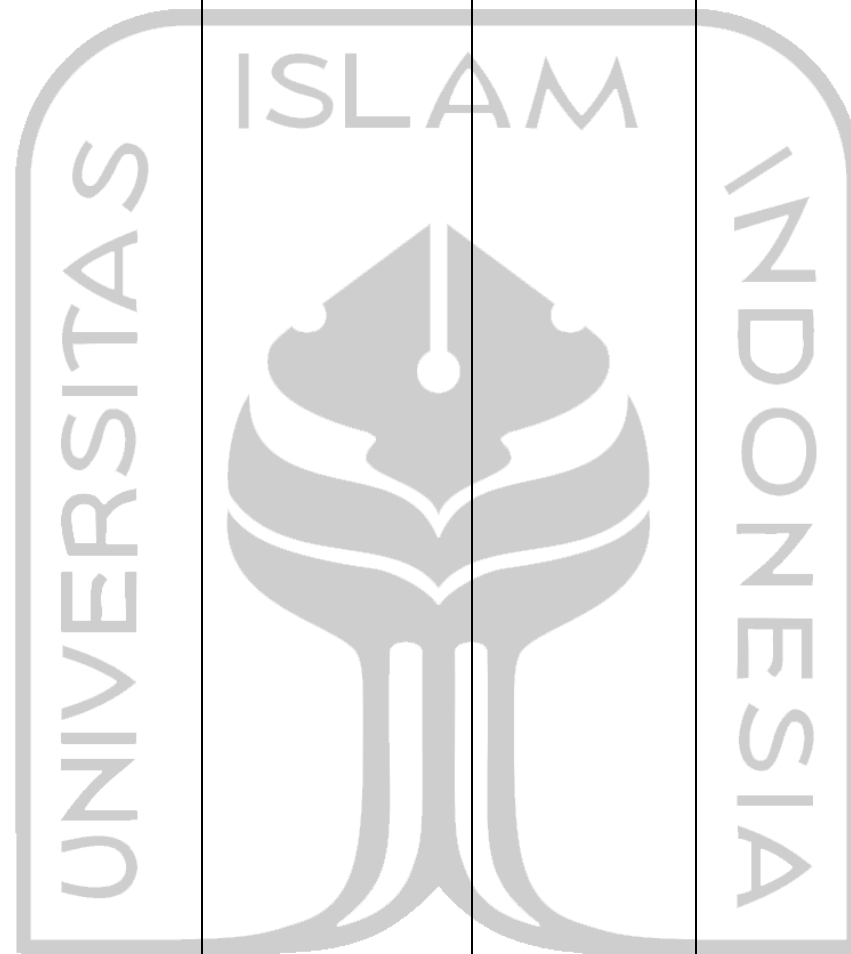
P : Dulukan kami punya jenis pengawasan dulu itu tiga dari yang sudah dijalankan itu. Pengawasan reguler khusus, dengan tujuan tertentu dan yang ketiga itu kasus. Untuk yang *fraud* dan penyimpangan yang kaitannya dengan laporan atau indisiplin dan lain-lain itu masuknya ke yang kasus, gitu, SOPnya sudah ada ya bu?

P : Atau mungkin gini ya ketika kami masuk melakukan pengawasan biasanya kami menemukan temuan-temuan yang jadi permasalahan di objek yang kami periksa tertuang di laporan, bisa jadi temuan tersebut masih dibawa sampai kita selesai periksa masih ada, nah itu mungkin dari evaluasi dan pelaporan selalu

P : Kalau yang tadi kan kaitannya dengan pemeriksaan yang dikhususkan ketika sudah ada, jadi dari pemeriksaan reguler terus kemudian diketahui ada kecurangan terus dilanjutkan dengan khusus pemeriksaan kasus dengan lebih diperdalam di penyimpangannya ya. Tapi kalau yang untuk pemeriksaan-pemeriksaan reguler itu biasanya kami identifikasinya kami sebelum melakukan pemeriksaan itu ada identifikasi risiko, disitukan termasuk mengidentifikasi program-program krusial yang dikerjakan oleh OPD sebelum kami masuk biasanya kan kami identifikasi risikonya dulu, kayak misalnya pemeriksaan desa, pengawasan desa. Itu kita mengidentifikasi risikonya itu dari ketepatan pelaporan terus pertanggungjawaban terus banyak tidaknya temuan itu termasuk

P : Kalau yang tadi kan kaitannya dengan pemeriksaan yang dikhususkan ketika sudah ada, jadi dari pemeriksaan reguler terus kemudian diketahui ada kecurangan terus dilanjutkan dengan khusus pemeriksaan kasus dengan lebih diperdalam di penyimpangannya ya. Tapi kalau yang untuk pemeriksaan-pemeriksaan reguler itu biasanya kami identifikasinya kami sebelum melakukan pemeriksaan itu ada identifikasi risiko, disitukan termasuk mengidentifikasi program-program krusial yang dikerjakan oleh OPD sebelum kami masuk biasanya kan kami identifikasi risikonya dulu, kayak misalnya pemeriksaan desa, pengawasan desa. Itu kita mengidentifikasi risikonya itu dari ketepatan pelaporan terus pertanggungjawaban terus banyak tidaknya

	<p>pertanggungjawaban terus banyak tidaknya temuan itu termasuk salah satu yang dipertimbangkan kita untuk memilih objek yang akan kami periksa, nah disitu termasuk cara mengidentifikasi disitu apakah kemungkinan terjadi ketidaktertiban belum tentu penyimpangan, maksudnya itu identifikasi awal di desa itu tertib apa enggak dari situ.</p>	<p>monitoring tindak lanjutnya itu seperti apa, apakah itu bisa termasuk untuk dianggap sebagai monitoring untuk mekanisme <i>antifraud</i> ini mungkin mendekati kali ya, jadi kalau untuk organisasinya, mekanismenya yang benar-bener tertuang dan terstruktur memang belum ada, tapi sambil antara dengan mekanisme tindak lanjut monitoring dan evaluasi tindak lanjut temuan pemeriksaan itu mungkin bisa dianggap sebagai monitoringnya ini</p>			<p>salah satu yang dipertimbangkan kita untuk memilih objek yang akan kami periksa, nah disitu termasuk cara mengidentifikasi disitu apakah kemungkinan terjadi ketidaktertiban belum tentu penyimpangan, maksudnya itu identifikasi awal di desa itu tertib apa enggak dari situ.</p> <p>P : Oh digital forensik untuk investigatif, jadi kalau yang kaitannya dengan SDM, itu peningkatan kompetensinya, tahun ini itu sudah tiga kali pengiriman diklat yang kaitannya sama investigatif, perhitungan keuangan negara, dan forensik untuk audit investigatif. Kalau untuk teknologi,</p>	<p>temuan itu termasuk salah satu yang dipertimbangkan kita untuk memilih objek yang akan kami periksa, nah disitu termasuk cara mengidentifikasi disitu apakah kemungkinan terjadi ketidaktertiban belum tentu penyimpangan, maksudnya itu identifikasi awal di desa itu tertib apa enggak dari situ.</p> <p>P : Atau mungkin gini ya ketika kami masuk melakukan pengawasan biasanya kami menemukan temuan-temuan yang jadi permasalahan di objek yang kami periksa tertuang di laporan, bisa jadi temuan tersebut masih dibawa sampai kita selesai periksa masih ada, nah itu mungkin dari evaluasi dan pelaporan selalu monitoring tindak lanjutnya itu seperti apa, apakah itu bisa termasuk untuk dianggap sebagai monitoring untuk mekanisme <i>antifraud</i></p>
--	---	--	--	--	---	--



ini mungkin mendekati kali ya, jadi kalau untuk organisasinya, mekanismenya yang benar-bener tertuang dan terstruktur memang belum ada, tapi sambil antara dengan mekanisme tindak lanjut monitoring dan evaluasi tindak lanjut temuan pemeriksaan itu mungkin bisa dianggap sebagai monitoringnya ini

P : Oh digital forensik untuk investigatif, jadi kalau yang kaitannya dengan SDM, itu peningkatan kompetensinya, tahun ini itu sudah tiga kali pengiriman diklat yang kaitannya sama investigatif, perhitungan keuangan negara, dan forensik untuk audit investigatif. Kalau untuk teknologi,

7 : Retno  
Isni Satiti

Rno iya pemerintah, Pusat kan kita dalam rangka Banyak sekali rasionalisasi kegiatan kan Nah itu, kegiatan itu kan berdampak pada anggaran Nah itu kan, terus Otomatis, kalau yang namanya sosialisasi kan kita butuh anggaran, ketika anggaran dipotong, ya memang yang ideal kami melakukan sosialisasi, tapi sosialisasi kan tidak perlu harus face to face, harus mencetak slogan yang banyak, enggak. Apalagi dengan dunia sekarang, teknologi itu kan masing-masing punya WhatsApp itu

Rno Mekanisme penjagaan kan di masing-masing OPD sudah ada komitmen, ada pakta integritas, itu salah satu untuk membangun OPD itu untuk care terhadap terjadinya *fraud*. Jadi bagaimana jangan sampai OPD itu di dalamnya ada *fraud*, kami berusaha seperti itu Dan kami itu pembinaannya bisa melalui pengawasan, pengawasan nya inspektorat itu kan melalui pemeriksaan, lalu review, monitoring, evaluasi, monitoring dan evaluasi maupun pendampingan seperti itu

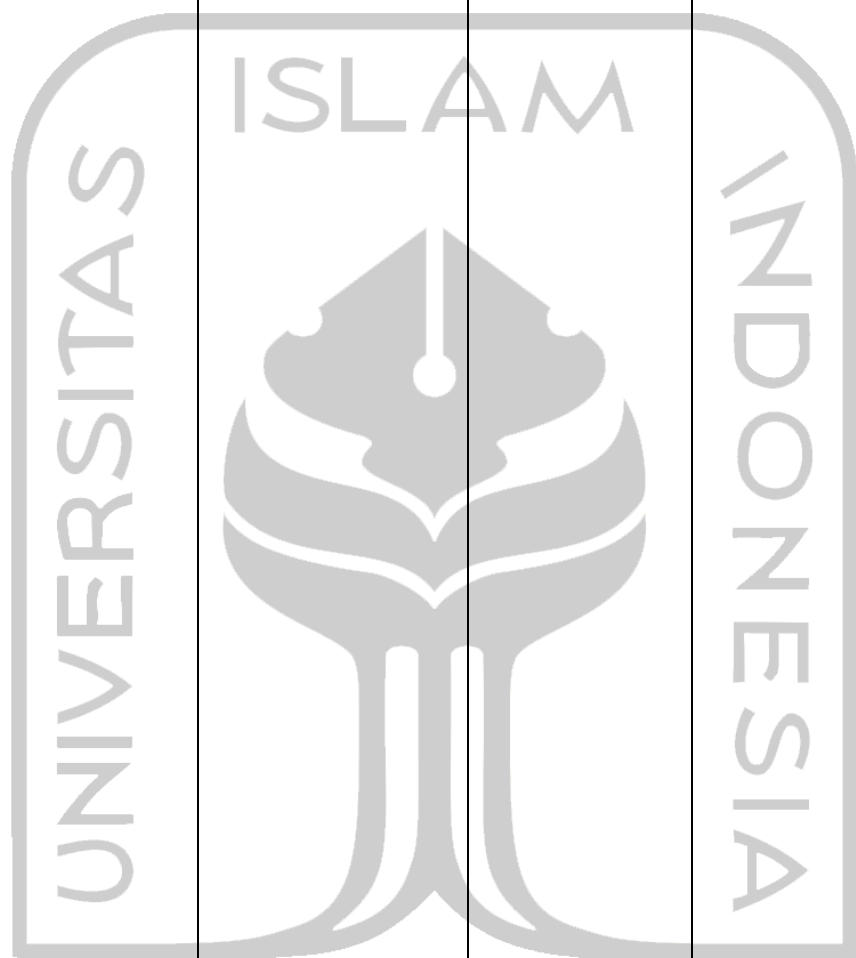
Rno Ya kami terus terang kalau kita baru sebatas *fraud* indikasi lho bukan investigasi kan kalau ada investigasi kan ada permintaan mekanisme nya ada permintaan mengenai pengembangan dari pemeriksaan reguler bisa juga atas permintaan APH

Rno Oh, enggak, enggak seperti itu mas. Jadi auditor, seorang auditor. Ketika dia mau menjadi fungsional auditor, di awal sudah dibentuk dengan diklat. Yang diikuti diklat sertifikasi ya. Lulus peran misalnya auditor terampil, auditor muda, auditor terampil itu anggota tim, auditor ahli muda itu ketua tim, auditor madya itu pengendali teknis. Nah Ketika sebelum dibentuk itu, kami itu sudah dilalui seleksi saat itu.

Rno Kemarin ada satu mbak untuk lebih digital forensik, barusan ada yang diklat namanya mbak Tiwi, dan dia

Rno Kemarin ada satu mbak untuk lebih digital forensik, barusan ada yang diklat namanya mbak Tiwi, dan dia kemarin hasilnya luar biasa.

kan sangat bermanfaat ya. Ada perkumpulan kepala dinas, perkumpulan sekretaris, perkumpulan auditor, perkumpulan Kasubag keuangan gitu misalnya seperti itu. Di mana memang disitu bisa disisipkan, ya kami masuk untuk mengajak, ayo kita bangun zona integritas. Maksudnya seperti itu.



kemarin hasilnya luar biasa.

الجامعة الإسلامية  
الاستد بالاندو



Narasumber	P : c. Investigasi	Q : 1. Membetuk bidang investigasi pada Maret 2023	R : 2. Permintaan pemeriksaan kasus dari APH	S : 3. Pemeriksaan Investigasi	T : 4. Pemeriksaan setelah menerima laporan	U : 5. Tindak lanjut hasil investigasi ke APH
1 : Heri Setyawati, S.E., M.Acc.		<p>H : Ini untuk nomer a, ini kebetulan di awal tahun ya untuk perbubnya sih katanya di bulan desember 2022 itu sudah disahkan perbub yang terbaru untuk inspektorat kabupaten sleman dan disitu ada irban, bidang baru yaitu bidang investigasi dan reformasi birokrasi, walaupun kalau posisinya itu tetap sama, Cuma <i>ganti</i> istilah bidang ya mba ya</p> <p>H : Awal maret 2023</p> <p>H : Sudah, kalau bidang investigasi sendiri termasuk</p>	<p>H : Permintaan APH</p>	<p>Rz : Dan kayak ibu bilang sudah pernah ada sebelumnya walaupun belum ada terbentuk kayak struktur organisasi khusus kayak investigasi ini, kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh inspektorat kabupaten sleman ini untuk mencegah dan mendeteksi <i>fraud</i> itu apa saja bu?</p> <p>H : Kalau dulu masih berinduknya pada penanganan kasus</p> <p>H : Kalau dulu dan sekarang sebenarnya kan sama ya artinya karna ketugasannya kan hampir sama, Cuma sekarang ada pembidangan yang lebih khusus lagi untuk yang bidang investigasi yang baru itu, tapi untuk yang identifikasi kecurangan potensi kecurangan itu biasanya kami mulai dengan pemeriksaan</p>	<p>H : Kalau ini, ini berawal dari, yang pernah ya, yang dua-duanya pernah sih. Artinya pengembangan temuan dari hasil pemeriksaan inspektorat sendiri kemudian ada laporan dari SKPD yang lain, maksudnya dari dinas teknis yang lain, kemudian oleh inspektorat ditindak lanjuti dengan, kalau dulu-dulu sih namanya bukan investigasi ya, masih pemeriksaan kasus seperti itu dan selama ini yang kami laksanakan istilahnya dengan pengenaan tuntutan <i>ganti</i></p>	<p>H : Ini ada surat MOU ya tiga antara pemerintah kabupaten sleman, dalam hal ini inspektorat bekerja sama dengan kejaksaan dan kepolisian dalam rangka pencegahan dan penanganan <i>fraud</i>, salah satunya adalah dengan mengundang dari kepolisian atau kejaksaan untuk memberikan materi mengenai pencegahan <i>anti</i> korupsi kepada masyarakat bisa, kemudian personal pegawai disini juga bisa,</p>

	<p>irbannya ada 8 orang</p> <p>H : Kalau mengidentifikasi kebutuhan kompetensi SDM, artinya ini bukan dari awal ya, artinya kan kita itu pokoknya pegawai inspektorat, yang diberdayakan ya juga itu, artinya kita tidak mencari-mencari awal untuk SDM yang memang mau didudukkan di investigasi itu enggak, ini dari awal memang adanya ini, kemudian ditata ulang dengan adanya bidang baru kek gitu bidang investigasi, diambil dari dari auditor yang lama, cuma sekarang bidangnya disini dengan pertimbangan tertentu kek gitu, artinya diratakanlah,</p>		<p>reguler. Dari pemeriksaan reguler ketika kami kok ada indikasi untuk korupsi lah untuk kami selesaikan di reguler gak cukup waktunya, gak cukup sumber dayanya dan sebagainya kemudian setelah LHP kami yang reguler terbit itu baru kami lanjutkan untuk pemeriksaan yang khusus, dan sekarang masuk ke bidang investigasi. Pemeriksaan investigasi <i>nantinya</i>, seperti itu</p> <p>H : Kalau ini, ini berawal dari, yang pernah ya, yang dua-duanya pernah sih. Artinya pengembangan temuan dari hasil pemeriksaan inspektorat sendiri kemudian ada laporan dari SKPD yang lain, maksudnya dari dinas teknis yang lain, kemudian oleh inspektorat ditindak lanjuti dengan, kalau dulu-dulu sih namanya bukan investigasi ya, masih pemeriksaan kasus seperti itu dan selama ini yang kami laksanakan istilahnya dengan pengenaan</p>	<p>rugi, artinya kalau ada ketekoran kas maksudnya kerugian yang berkaitan dengan keuangan daerah itu untuk segera disetorkan kembali ke kas daerah, kek gitu, tapi belum pernah kami melimpahkan ke APH.</p>	<p>kemudian <i>nanti</i> misalkan ada yang dari hasil investigatifnya inspektorat <i>nanti</i> bisa dilimpahkan ke APH.</p>
--	--	--	---	---	---

	<p>misalnya dari masing-masing bidang itu ada yang jurusan akuntansi, ada yang hukum, ada yang teknik seperti itu, pertimbangannya hanya itu, kalau masalah peningkatan SDMnya ya memang kita upayakan untuk mengirim ke berbagai diklat yang menurut kami itu berguna untuk bekerja di bidang masing-masing seperti itu, misalnya tadi ada bidang investigasi baru, kemarin Mba Pipit dan Mba Retno itu di ikutkan untuk diklat masalah perhitungan keuangan negara, kemudian saya dan juga teman saya kemarin ikut audit investigatif, ada teman lagi yang ikut untuk forensik digital</p>	<p>tuntutan <i>ganti rugi</i>, artinya kalau ada ketekoran kas maksudnya kerugian yang berkaitan dengan keuangan daerah itu untuk segera disetorkan kembali ke kas daerah, kek gitu, tapi belum pernah kami melimpahkan ke APH.</p> <p>H : Kalau mengidentifikasi kebutuhan kompetensi SDM, artinya ini bukan dari awal ya, artinya kan kita itu pokoknya pegawai inspektorat, yang diberdayakan ya juga itu, artinya kita tidak mencari-mencari awal untuk SDM yang memang mau didudukkan di investigasi itu enggak, ini dari awal memang adanya ini, kemudian ditata ulang dengan adanya bidang baru kek gitu bidang investigasi, diambil dari dari auditor yang lama, cuma sekarang bidangnya disini dengan pertimbangan tertentu kek gitu, artinya diratakanlah, misalnya dari masing-masing bidang itu ada yang</p>	
--	--	--	--

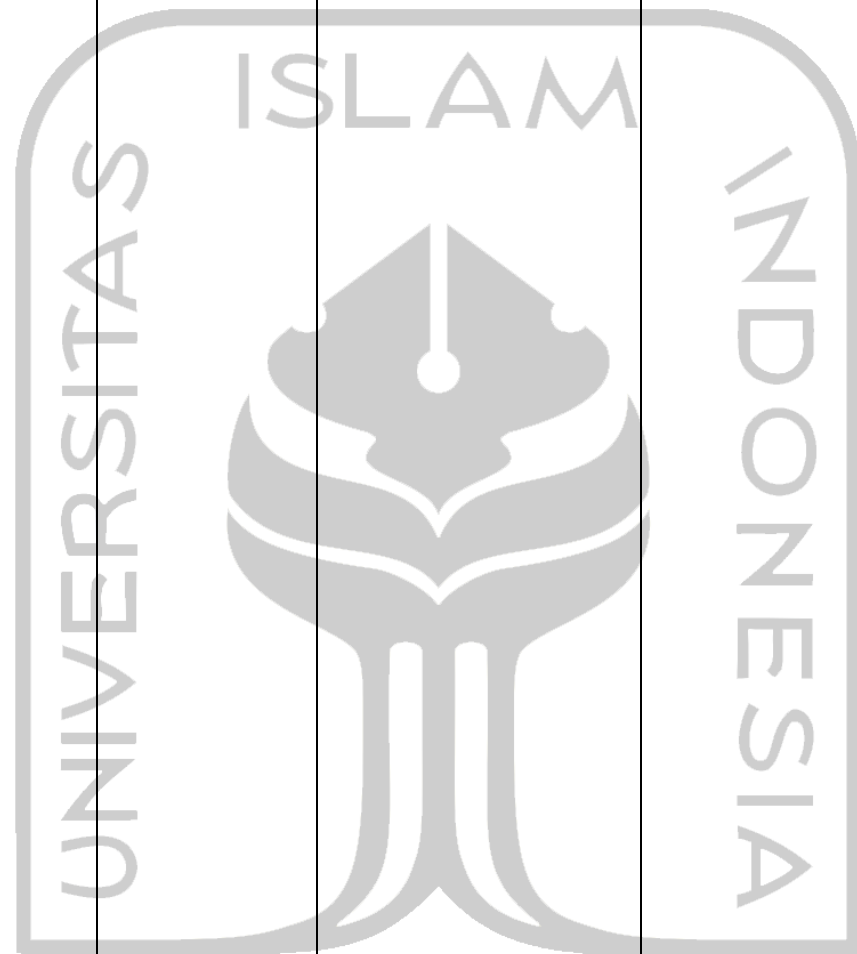
seperti itu

jurusan akuntansi, ada yang hukum, ada yang teknik seperti itu, pertimbangannya hanya itu, kalau masalah peningkatan SDMnya ya memang kita upayakan untuk mengirim ke berbagai diklat yang menurut kami itu berguna untuk bekerja di bidang masing-masing seperti itu, misalnya tadi ada bidang investigasi baru, kemarin Mba Pipit dan Mba Retno itu di ikutkan untuk diklat masalah perhitungan keuangan negara, kemudian saya dan juga teman saya kemarin ikut audit investigatif, ada teman lagi yang ikut untuk forensik digital seperti itu

H : Ini mendekati ngadain insert investigatif di doble sebentar lagi

الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

2 : Hery Dwi  
Kuryanto,  
S.H.,  
M.Hum.



الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

3 : Ika  
Sulistyo  
Devi

I Digital forensik kemarin ada di diklatnya, Yang ikut baru satu orang apa ya?

I Kalau perlu investigasi, investigasi itu kadang dari pengembangan pemeriksaan ya. Kalau yang sudah dilakukan di sini misalnya dari pemeriksaan reguler atau pemeriksaan kinerja itu ditemui bahwa disitu ada ketekoran kas misalnya gitu, kekurangan kas pada saat opname ternyata tidak langsung bisa selesai pada saat pemeriksaan kinerja nah ini kita lanjutkan ke investigasi tapi disini audit investigasi itu baru sebatas seperti itu padahal kan aturannya enggak ya, aturannya malah lebih audit

I Kalau perlu investigasi, investigasi itu kadang dari pengembangan pemeriksaan ya. Kalau yang sudah dilakukan di sini misalnya dari pemeriksaan reguler atau pemeriksaan kinerja itu ditemui bahwa disitu ada ketekoran kas misalnya gitu, kekurangan kas pada saat opname ternyata tidak langsung bisa selesai pada saat pemeriksaan kinerja nah ini kita lanjutkan ke investigasi tapi disini audit investigasi itu baru sebatas seperti itu padahal kan aturannya enggak ya, aturannya malah lebih audit investigasi itu bisa juga dari permintaan dari APH. di kami masih sebatas itu.

I Kebetulan kalau monitoring temuan-pemeriksaan kan di subbag saya ya. Itu kami buat ada sistem, sistem pengawasan dan tindak lanjut namanya. Jadi *nanti* temuan-temuan itu kami input di dalam sistem itu, kemudian setiap 3 bulan, jadi ada

I dulu sebelum ada teman-teman ini kan auditor itu dulu belum ada teman-teman dari PU, dari teknik gitu. Kita pernah minta bantuan ke PU untuk memeriksa bangunan, Karena dulu nggak ada tenaga teknik sama sekali. Tetapi sekarang karena sudah ada tenaga tekniknya, kita lebih banyak sendiri. Tapi kadang kalau misalnya butuh sekali, kita minta bantuan. Kayak kemarin pemeriksaan desa atau apa ya, itu yang di mana melati itu kayaknya minta bantuan ke PU.

I Ada yang memberikan hanya dugaan

		<p>investigasi itu bisa juga dari permintaan dari APH. di kami masih sebatas itu.</p> <p>I dulu sebelum ada teman-teman ini kan auditor itu dulu belum ada teman-teman dari PU, dari teknik gitu. Kita pernah minta bantuan ke PU untuk memeriksa bangunan, Karena dulu nggak ada tenaga teknik sama sekali. Tetapi sekarang karena sudah ada tenaga tekniknya, kita lebih banyak sendiri. Tapi kadang kalau misalnya butuh sekali, kita minta bantuan. Kayak kemarin pemeriksaan desa atau apa ya, itu yang di mana melati itu kayaknya minta</p>	<p>2 metode melakukan tindak lanjut oleh OPD, oleh Auditee. Itu yang pertama melewati sistem itu, mereka bisa upload bukti misalnya tindak lanjutnya temuannya itu tentang SPC kurang lengkap tadi. Mereka bisa upload bukti tindak lanjutnya ke sistem tersebut kemudian diverifikasi oleh tim auditor sedangkan yang kedua adalah secara manual kita disini ada program yang sudah periodik ya mas tentang pemantauan tindak lanjut itu kami jadwalkan 3 bulan sekali jadi mana OPD yang masih memiliki tunggaan, temuan, setelahnya belum selesai menindaklanjuti itu kita panggil di sini. <i>Nanti</i> yang eksekusi, memverifikasi tindak lanjutnya tetap tim, tim auditor, tim pemeriksaannya kemarin.</p> <p>I Surat pertanggungjawaban. Jadi nota, kwitansi, begitu. Bukti, bukti pertanggungjawaban.</p>	<p>Kalau hanya Dugaan itu kadang kita kesulitan, kita harus lebih menggali lagi, ini bisa ditingkatkan atau enggak, misalnya ditingkatkan ke pemeriksaan kasus atau enggak. Itu kita hubungi dengan, itu kita auditee misalnya OPD, PU misalnya. PU mengadakan ini ada yang tidak masuk kerja, tidak masuk kerja kan jelas <i>nanti</i> di presensi, berarti kan bisa kita langsung proses, <i>nanti</i> kita konfirmasi ke atasan langsungnya, kemudian ada juga yang tentang pengaduan masyarakat itu kita gali dulu, Kita ini di desa mana, kalurahan mana, kita cari informasi ke kecamatan, ke</p>	
--	--	--	--	---	--

		<p>bantuan ke PU.</p> <p>I Digital forensik kemarin ada di diklatnya, Yang ikut baru satu orang apa ya?</p>	<p>SPJ itu surat pertanggungjawaban.</p> <p>I dulu sebelum ada teman-teman ini kan auditor itu dulu belum ada teman-teman dari PU, dari teknik gitu. Kita pernah minta bantuan ke PU untuk memeriksa bangunan, Karena dulu nggak ada tenaga teknik sama sekali. Tetapi sekarang karena sudah ada tenaga tekniknya, kita lebih banyak sendiri. Tapi kadang kalau misalnya butuh sekali, kita minta bantuan. Kayak kemarin pemeriksaan desa atau apa ya, itu yang di mana melati itu kayaknya minta bantuan ke PU.</p> <p>I Digital forensik kemarin ada di diklatnya, Yang ikut baru satu orang apa ya?</p>	<p>Kapanewon. Di sana apakah benar ada seperti ini, seperti ini. Kalau misalnya itu sebenarnya hanya ringan dan bisa dilakukan oleh Kapanewon. Kita minta bantuan Kapanewon untuk menyelesaikan. Nanti mereka melaporkan ke kita progres penyelesaiannya. Tapi kalau memang ini berat dan berkaitan dengan korupsi, itu kita turun sendiri.</p>	
--	--	---	--	---	--

الجامعة الإسلامية  
الاستاذ الدكتور



4 : Ir. Sri Puji Lestari

Bu Puji (Pj) : Ya, sebetulnya sekarang itu semenjak Maret, bulan maret ya, itu organisasi inspektorat ada perubahan. Sekarang sudah ada bidang yang menangani terkait dengan bidang investigasi dan reformasi birokrasi sekarang, kalau dulu memang belum ada, jadi terkait itu masih campur ya di sekretariat. Sekretariat, kalau sekarang sudah ada sebetulnya gitu tapi kan dan terkait dengan itu bidang investigasi dan reformasi birokrasi itu, tugasnya itu yang pertama, melakukan pencegahan terhadap tindakan e yang terkait dengan korupsi, dari

Bu Puji (Pj) : Ya, sebetulnya sekarang itu semenjak Maret, bulan maret ya, itu organisasi inspektorat ada perubahan. Sekarang sudah ada bidang yang menangani terkait dengan bidang investigasi dan reformasi birokrasi sekarang, kalau dulu memang belum ada, jadi terkait itu masih campur ya di sekretariat. Sekretariat, kalau sekarang sudah ada sebetulnya gitu tapi kan dan terkait dengan itu bidang investigasi dan reformasi birokrasi itu, tugasnya itu yang pertama, melakukan pencegahan terhadap tindakan e yang terkait dengan korupsi, dari pencegahan kemudian tindak pemeriksaannya atau penanganannya gitu. Kalau dulu masih ditangani oleh sekretariat, jadi di sekretariat masih e kalau dulu kan bidang-bidangnya belum ad aitu masih di sekretariat kita menangani terkait dengan *fraud* segala macem. Kalau di

Pj : Kan di inspektorat sebagai PG unit pengendalian gratifikasi Nya kabupaten ,Salah satu kegiatannya itu Terus yang kedua kita membagi selebaran brosur pencegahan gratifikasi kepada sub-sub unit dan juga kita menerima nah ini setiap hari raya kita mengeluarkan surat edaran yang ditandatangani oleh Bupati kepada seluruh perangkat daerah sampai desa dan kepada ini konsorsium Kelompoknya pengusaha kelompok-kelompok pengusaha koperasi Kelompok Kadit segala macam gitu kelompok pengusaha dan itu kita

Pj : Oke, njih, kalau terkait dengan untuk pencegahan *fraud* sebetulnya kita itu sudah ada (apa namanya) mengirimkan SDM ya, mengirimkan SDM untuk mengikuti pelatihan atau diklat terkait dengan penyuluh *anti* korupsi. Nggih, sebelum jadi penyuluh ada pelatihan dulu ya, itu kita sudah mengirimkan ada kalau nggak salah ada 9 orang atau 7 orang untuk mengikuti diklat tersebut, setelah lulus diklat tersebut, kemudian yang bersangkutan harapannya mengikuti sertifikasi penyuluh *anti* korupsi, tetapi

	<p>pengecehan kemudian tindak pemeriksaannya atau penangananannya gitu. Kalau dulu masih ditangani oleh sekretariat, jadi di sekretariat masih e kalau dulu kan bidang-bidangnya belum ad aitu masih di sekretariat kita menangani terkait dengan <i>fraud</i> segala macem. Kalau di inspektorat, itu kan di inspektorat itukan inspektorat itu selaku e apa ya? Unit sekretariat unit ee pengendali gratifikasi atau UPG kemudian ekhm inspektorat itu juga sebagai kalau dulu sebagai pembina atau pendamping OPD dalam melakukan analisa <i>fraud</i> di setiap kegiatan OPD</p>		<p>inspektorat, itu kan di inspektorat itukan inspektorat itu selaku e apa ya? Unit sekretariat unit ee pengendali gratifikasi atau UPG kemudian ekhm inspektorat itu juga sebagai kalau dulu sebagai pembina atau pendamping OPD dalam melakukan analisa <i>fraud</i> di setiap kegiatan OPD</p> <p>Pj : Kalau pengembangan kompetensi kan kalau di kita itu tidak hanya terkait dengan <i>fraud</i> aja, tidak terkait kecurangan aja gitu. Tapi ya semuanya. Seperti pada saat, ya seperti itu ada kaitannya sih kalau kita melakukan review apa, anggaran itu kita juga salah satunya kan mengurangi apa, apa toh jeneng e, ee kesalahan ya, kesalahan penganggaran. Kalau itu juga pakai pakai ini pake aplikasinya e sana keuangan <i>nanti</i> kita dikasih password kita bisa melakukan dari situ. Kemudian itu kemudian untuk melakukan apa namanya kegiatan</p>	<p>sampaikan pencegahan gratifikasi maksudnya tidak usah memberi ke pegawai pemerintahan. ini besok mau kita mau tekankan lagi. Salah satunya itu kemudian dari surat itu <i>nanti</i> kalau ada pelaporan penerimaan gratifikasi maka wajib melaporkan kemarin bisa langsung ke KPK bisa juga langsung melalui UPG UPG kita <i>nanti</i> kita yang melaporkan ke KPK dan dari pengalaman ada garam yang Kok itu kayak gratifikasi Dan harus kita kirim ke peminta kita kirim ke KPK,</p> <p>Pj : Kalau pengembangan kompetensi kan kalau di kita itu</p>	<p>dari tujuh orang itu baru satu yang mengikuti penyuluhan <i>anti</i> korupsi, tadinya dua yang mengikuti tapi yang lulus baru satu, jadi kita baru mempunyai penyuluh <i>anti</i> korupsi yang telah bersertifikat oleh KPK itu satu orang, tetapi meskipun demikian, ketujuh orang yang pernah kita diklat kan pencegah <i>anti</i> korupsi ini juga bisa dimanfaatkan dalam rangka sosialisasi ke OPD-OPD. Kemudian kalau dibidang investigasi itu kan kegiatannya tidak hanya investigasi saja tapi juga reformasi birokrasi, itu memang personil nya</p>
--	--	--	---	---	---

	<p>Rz : Oh iya, ini yang bidang investigative dan reformasi birokrasi ini terbentuknya baru maret 2023 ini bu? Pj : Iya</p> <p>Rz : Itu bagaimana asal usulnya bisa terbentuk itu bu? Karna ada, karna alasan apa bu? Pj : Alasannya itu kan perintah dari KPK</p> <p>Pj : Kemudian adalagi dari KPK itu juga terkait disetiap kabupaten harus membentuk, harus membentuk unit yang menangani pengelolaan gratifikasi, itu juga ada di inspektorat. Itu, itu semuanya diri mjb Kpk itu agar apa tindakan-tindakan korupsi terutama pencegahannya itu bisa efektif</p>	<p>pemeriksaan probity audit terkait untuk pencegahan korupsi, itu ya selain apa namanya materi biasa juga ada uji lab nya. Tapi kita kerja sama, kerja sama dengan UII, dengan labnya, Fakultas Teknik.</p> <p>Pj : Dan yang baru itu ada diklatnya, setelah masuk sini ada diklat khusus pengawasan, kita diklat kan, khusus pengawasan dari dasar</p> <p>Pj : Itu juga sedang dalam pelatihan. Kemarin kita udah ngirim pelatihan penghitungan kerugian kan gitu. Besok ngirim audit investigasi, besok ngirim apalagi</p> <p>Pj : Oke, njih, kalau terkait dengan untuk pencegahan <i>fraud</i> sebetulnya kita itu sudah ada (apa namanya) mengirimkan SDM ya, mengirimkan SDM untuk mengikuti pelatihan atau diklat terkait dengan penyuluh <i>anti</i> korupsi. Nggih,</p>	<p>tidak hanya terkait dengan <i>fraud</i> aja, tidak terkait kecurangan aja gitu. Tapi ya semuanya. Seperti pada saat, ya seperti itu ada kaitannya sih kalau kita melakukan review apa, anggaran itu kita juga salah satunya kan mengurangi apa, apa toh jeneng e, ee kesalahan ya, kesalahan penganggaran. Kalau itu juga pakai pakai ini pake aplikasinya e sana keuangan <i>nanti</i> kita dikasih password kita bisa melakukan dari situ. Kemudian itu kemudian untuk melakukan apa namanya kegiatan pemeriksaan probity audit terkait untuk pencegahan korupsi, itu ya selain apa</p>	<p>baru delapan orang. Meskipun demikian bisa dibantu dengan bidang yang lain karena ketujuh orang itu tidak seluruhnya itu menyebar di bidang lain yang sudah mendapatkan pelatihan terkait dengan pencegahan korupsi. Kemudian untuk ke depannya terkait dengan (apa namanya) pendidikan <i>anti</i> korupsi ini tidak hanya di inspektorat, kami juga mengeluarkan mulai tahun kemarin mengeluarkan surat kami tujukan kepada seluruh OPD untuk mengirimkan personil nya guna mengikuti pelatihan atau melalui e-learning nya</p>
--	---	---	--	--

	<p>bahkan di setiap APIP atau setiap inspektorat harus ada bidang khusus investigative, kita semuanya.</p> <p>Pj : Dan yang baru itu ada diklatnya, setelah masuk sini ada diklat khusus pengawasan, kita diklat kan, khusus pengawasan dari dasar</p> <p>Pj : SDM khusus yang <i>antifraud</i> sementara belum ada. Tapi besok cikal bakal nya harusnya dari bidang investigasi. Kalau sementara ini memang belum ada</p> <p>Pj : Itu juga sedang dalam pelatihan. Kemarin kita udah ngirim pelatihan penghitungan kerugian kan</p>		<p>sebelum jadi penyuluh ada pelatihan dulu ya, itu kita sudah mengirimkan ada kalau nggak salah ada 9 orang atau 7 orang untuk mengikuti diklat tersebut, setelah lulus diklat tersebut, kemudian yang bersangkutan harapannya mengikuti sertifikasi penyuluh <i>anti korupsi</i>, tetapi dari tujuh orang itu baru satu yang mengikuti penyuluhan <i>anti korupsi</i>, tadinya dua yang mengikuti tapi yang lulus baru satu, jadi kita baru mempunyai penyuluh <i>anti korupsi</i> yang telah bersertifikat oleh KPK itu satu orang, tetapi meskipun demikian, ketujuh orang yang pernah kita diklat kan pencegah <i>anti korupsi</i> ini juga bisa dimanfaatkan dalam rangka sosialisasi ke OPD-OPD. Kemudian kalau dibidang investigasi itu kan kegiatannya tidak hanya investigasi saja tapi juga reformasi birokrasi, itu memang personil nya baru delapan orang. Meskipun demikian bisa dibantu dengan bidang</p>	<p>namanya materi biasa juga ada uji lab nya. Tapi kita kerja sama, kerja sama dengan UII, dengan labnya, Fakultas Teknik.</p> <p>Pj : Oke, njih, kalau terkait dengan untuk pencegahan <i>fraud</i> sebetulnya kita itu sudah ada (apa namanya) mengirimkan SDM ya, mengirimkan SDM untuk mengikuti pelatihan atau diklat terkait dengan penyuluh <i>anti korupsi</i>. Nggih, sebelum jadi penyuluh ada pelatihan dulu ya, itu kita sudah mengirimkan ada kalau nggak salah ada 9 orang atau 7 orang untuk mengikuti diklat tersebut, setelah lulus diklat tersebut,</p>	<p>KPK, tapi memang belum efektif hanya beberapa OPD yang mengirimkan personil nya untuk mengikuti pelatihan tersebut. Nah ini, metode seperti ini besok tahun ini juga akan kita kirimkan lagi kepada seluruh OPD untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut melalui e-learning dari KPK gitu termasuk juga inspektorat. Rencananya seluruh auditor disini harus mengikuti e-learning tersebut dengan materi berbeda-beda disesuaikan dengan keinginan mereka gitu. Untuk peningkatan SDM nya begitu,</p>
--	--	--	--	---	--

		<p>gitu. Besok ngirim audit investigasi, besok ngirim apalagi</p>		<p>yang lain karena ketujuh orang itu tidak seluruhnya itu menyebar di bidang lain yang sudah mendapatkan pelatihan terkait dengan pencegahan korupsi. Kemudian untuk ke depannya terkait dengan (apa namanya) pendidikan <i>anti</i> korupsi ini tidak hanya di inspektorat, kami juga mengeluarkan mulai tahun kemarin mengeluarkan surat kami tujukan kepada seluruh OPD untuk mengirimkan personil nya guna mengikuti pelatihan atau melalui e-learning nya KPK, tapi memang belum efektif hanya beberapa OPD yang mengirimkan personil nya untuk mengikuti pelatihan tersebut. Nah ini, metode seperti ini besok tahun ini juga akan kita kirimkan lagi kepada seluruh OPD untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut melalui e-learning dari KPK gitu termasuk juga inspektorat. Rencananya seluruh auditor disini harus mengikuti e-</p>	<p>kemudian yang bersangkutan harapannya mengikuti sertifikasi penyuluh <i>anti</i> korupsi, tetapi dari tujuh orang itu baru satu yang mengikuti penyuluhan <i>anti</i> korupsi, tadinya dua yang mengikuti tapi yang lulus baru satu, jadi kita baru mempunyai penyuluh <i>anti</i> korupsi yang telah bersertifikat oleh KPK itu satu orang, tetapi meskipun demikian, ketujuh orang yang pernah kita diklat kan pencegah <i>anti</i> korupsi ini juga bisa dimanfaatkan dalam rangka sosialisasi ke OPD-OPD. Kemudian kalau dibidang investigasi itu kan kegiatannya tidak hanya</p>	<p>kalau jumlahnya tidak bisa. Jumlahnya ya memang seperti ini, gak bisa menambah dengan seenaknya, gak bisa, hanya peningkatan kualitas</p> <p>Pj : e-learning nya macem-macam tapi melalui link nya KPK, kalau materinya <i>nanti</i> kita pilih macam-macam terkait dengan pengendalian korupsi, pencegahan dan segala macam</p>
--	--	---	--	---	--	---

				<p>learning tersebut dengan materi berbeda-beda disesuaikan dengan keinginan mereka gitu. Untuk peningkatan SDM nya begitu, kalau jumlahnya tidak bisa. Jumlahnya ya memang seperti ini, gak bisa menambah dengan seenaknya, gak bisa, hanya peningkatan kualitas</p> <p>Pj : e-learning nya macem-macam tapi melalui link nya KPK, kalau materinya <i>nanti</i> kita pilih macam-macam terkait dengan pengendalian korupsi, pencegahan dan segala macam</p>	<p>investigasi saja tapi juga reformasi birokrasi, itu memang personil nya baru delapan orang. Meskipun demikian bisa dibantu dengan bidang yang lain karena ketujuh orang itu tidak seluruhnya itu menyebar di bidang lain yang sudah mendapatkan pelatihan terkait dengan pencegahan korupsi. Kemudian untuk ke depannya terkait dengan (apa namanya) pendidikan <i>anti</i> korupsi ini tidak hanya di inspektorat, kami juga mengeluarkan mulai tahun kemarin mengeluarkan surat kami tujukan kepada seluruh OPD untuk mengirimkan</p>
--	--	--	--	--	--



personil nya guna mengikuti pelatihan atau melalui e-learning nya KPK, tapi memang belum efektif hanya beberapa OPD yang mengirimkan personil nya untuk mengikuti pelatihan tersebut. Nah ini, metode seperti ini besok tahun ini juga akan kita kirimkan lagi kepada seluruh OPD untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut melalui e-learning dari KPK gitu termasuk juga inspektorat. Rencananya seluruh auditor disini harus mengikuti e-learning tersebut dengan materi berbeda-beda disesuaikan dengan keinginan mereka gitu.

Untuk peningkatan SDM nya begitu, kalau jumlahnya tidak bisa. Jumlahnya ya memang seperti ini, gak bisa menambah dengan seenaknya, gak bisa, hanya peningkatan kualitas

Pj : e-learning nya macem-macam tapi melalui link nya KPK, kalau materinya nanti kita pilih macem-macam terkait dengan pengendalian korupsi, pencegahan dan segala macam

الجمعة الإسلامية الإلكترونية



5 :  
Ngatiyah,  
S.H.

G Diklat-diklat ya, kemarin belum lama juga saya sama bu heri itu diklat audit investigasi terus ada diklat PPKN kayak gitu terus *nanti* sosialisasi-sosialisasi itu disamping kita memberi kita dapat juga dari KPK ya, terus dari yang MCB itu juga mcb dari KPK itu kan banyak sekali indikator-indikatornya harus dipenuhi pemda ya itu kan diharapkan dapat mencegah *fraud* itu juga karna disitu banyak sekali laporan-laporan yang seperti apa sudah dilakukan oleh pemda terkait dengan pencegahannya, penindakannya, maupun itu.

G Kalau investigasi itu gini kami itu kan, kalau saya sendiri pernah menangani yang sampai di putusan tipikor ya, pengadilan tipikor ya, itu dulu kan jadi itu permasalahan ada BPKP masuk untuk keluruhannya terus ada temuan dari BPKP setelah itu sampai ke APH, terus APH meminta kami untuk penghitungan kerugian negara nya. Terus akhirnya dipakai APH ke pengadilan, seperti itu sih, APH jadi APH kan sering meminta laporan hasil pemeriksaan kami ya, diminta, terus *nanti* dialami, kalau ada

G Kalau deteksi *fraud* itu kita kan ada pemeriksaan seperti itu, *nanti* kan kita lihat bukti, misalkan pengadaan ini bukti pertanggungjawabannya seperti ini, kan kita ya, terus *nanti* kita konfirmasi ke pihak ketiga kalau sudah benar apa belum kayak gitu *nanti* ada temuan-temuan yang harus ditindak lanjuti dan di evaluasi seperti itu, deteksinya dari situ sih kalau kita, di OPD juga kita periksa, *nanti* ada penyimpangan-penyimpangan kan kelihatan dari hasil pemeriksaan kami seperti itu ya

G Kalau investigasi itu gini kami itu kan, kalau saya sendiri pernah menangani yang sampai di putusan tipikor ya, pengadilan tipikor ya, itu dulu kan jadi itu permasalahan ada BPKP masuk untuk keluruhannya terus ada temuan dari BPKP setelah itu sampai ke APH, terus APH meminta kami untuk

G Itu kemarin yang udah, yang udah ya, yang udah itu kayak ini kalau *fraud* ini kemarin ada yang penyalahgunaan dana yang sampai kejaksaan juga ya, kan itu tahun 2020 atau 2021 ya itu, itu sampai di vonis di kejaksaan juga. Terus ada yang biasanya sih yang masuk ke APH APH itu ya *fraud* nya yang terjadi disini ada juga yang kasus-kasus di DPU itu juga, kalau itu untuk penindakannya ya, kalau untuk pencegahannya sih kita macam-macam ya, ada sosialisasi-sosialisasi juga, ada UPG, ada apa itu.

G Yang kayak itu kemarin sih

		<p>penyimpangan disitu baru koordinasi dengan kami lagi untuk menghitung kerugian negaranya, kalau karena mereka juga gak berhak ya menghitung kerugian ya, harus dari auditor atau bpkp, bpk maupun inspektorat.</p> <p>Rz Iya, iya berarti kalau yang investigasi tadi itu lebih ke ini ya bu ya kayak dari APH itu minta memeriksa G Hm em</p> <p>G Kejaksaan bisa, kebanyakan malah kejaksaan. Kejaksaan kan misalnya ada aduan masyarakat ya, pengaduan masyarakat</p>	<p>penghitungan kerugian negara nya. Terus akhirnya dipakai APH ke pengadilan, seperti itu sih, APH jadi APH kan sering meminta laporan hasil pemeriksaan kami ya, diminta, terus <i>nanti</i> didalami, kalau ada penyimpangan disitu baru koordinasi dengan kami lagi untuk menghitung kerugian negaranya, kalau karena mereka juga gak berhak ya menghitung kerugian ya, harus dari auditor atau bpkp, bpk maupun inspektorat.</p> <p>G Diklat-diklat ya, kemarin belum lama juga saya sama bu heri itu diklat audit investigasi terus ada diklat PPKN kayak gitu terus <i>nanti</i> sosialisasi-sosialisasi itu disamping kita memberi kita dapat juga dari KPK ya, terus dari yang MCB itu juga mcb dari KPK itu kan banyak sekali indikator-indikatornya harus dipenuhi pemda ya itu kan diharapkan dapat mencegah <i>fraud</i> itu juga karna disitu banyak sekali laporan-laporan</p>	<p>udah di vonis APH terus akhirnya kan lurah nya ini di penjara terus non aktif, udah di berhentikan ya kemarin sama PMK itu terus selanjutnya kita sih pendampingan ya ke kalurahan itu terus mereka juga lebih hati-hati sih setelah ada kasus seperti itu, apapun mereka konsultasi ke kita biar gak terjadi lagi seperti itu, disamping kelurahan kelurahan yang lain itu juga karna udah ada kasus seperti itu mereka lebih hati-hati. Cuman kalau untuk permasalahan yang tanah kas desa ini kan kami gak anu ya, tanah kas desa kan punya</p>
--	--	---	---	---

		<p>terus mereka itu nanya ke kami lah ini kondisinya seperti apa akhirnya kami periksa terus hasilnya seperti ini lah <i>nanti</i> itu dari kejaksaan kan penyelidikan dulu ya bisa dilanjut penyidikan atau enggak itu <i>nanti</i> kejaksaannya sih</p>	<p>yang seperti apa sudah dilakukan oleh pemda terkait dengan pencegahannya, penindakannya, maupun itu.</p>	<p>nya provinsi jadi yang inspektorat provinsi sih yang kemarin penghitungan kerugiannya tapi lokasinya memang banyak di sleman ya yang kasus kemarin itu</p>
--	--	---	---	---

الجمعة الإسلامية بالاندونيسيا

6 : Pipit  
Tyas Ratna  
Puspita,  
S.H., MPA.

P : Oh digital forensik untuk investigatif, jadi kalau yang kaitannya dengan SDM, itu peningkatan kompetensinya, tahun ini itu sudah tiga kali pengiriman diklat yang kaitannya sama investigatif, perhitungan keuangan negara, dan forensik untuk audit investigatif. Kalau untuk teknologi,

P : Kalau selama ini belum eksplisit sebagai investigasi gitu, pernah ada selain pengembangan dari pemeriksaan sendiri laporan OPD, juga pernah ada permintaan dari APH memang, permintaan untuk kami inspektorat melakukan pemeriksaan kasus yang mereka tangani, nah waktu itu juga pernah investigatif, pernah di PKKN, Cuma waktu itu PKKN nya tidak jadi, jadi kalau yang ini memang kalau proses investigasi tergantung ya mas, tergantung kalau misalnya

P : Jadi beberapa beberapa data dan lain-lainnya itu mungkin masih belum mendekati sempurna, tapi baru dimulai. Tapi kalau sebenarnya untuk pelaksanaan pemeriksaan dan lain-lain yang kaitannya dengan investigasi dan lain-lain mungkin sebetulnya sudah melakukan, cuman dikhususkan bidang investigasi kan baru mulai

P : Dulukan kami punya jenis pengawasan dulu itu tiga dari yang sudah dijalankan itu. Pengawasan reguler khusus, dengan tujuan tertentu dan yang ketiga itu kasus. Untuk yang *fraud* dan penyimpangan yang kaitannya dengan laporan atau indisiplin dan lain-lain itu masuknya ke yang kasus, gitu, SOPnya sudah ada ya bu?

P : Oh digital forensik untuk investigatif, jadi kalau yang kaitannya

P : Kalau tindakan hukum, koreksi aja ya mas, kalau tindakan hukum tidak di ranah kami, jadi ketika permintaan dari APH, mereka meminta kami menghitung, menghitung ya udah, kami menghitung hitungan kami seperti ini dengan kompetensi dan keahlian kami selaku auditor cara-cara yang kami lakukan dengan standar kita serahkan hasil hitungan kami untuk proses hukum selanjutnya tetap kembali ke APH, kalau kami tidak ke ranah hukum.  
Rz : Tetap kembali ke APH kayak kepolisian  
P : Nggih, kalau kami kan ke disiplin pegawai

		<p>permintaan APH ya berarti kita tergantung permintaan APH, suplai data ke kita apa, mereka maunya kita meriksa apa, ini sudah terfokus. Kalau yang investigasi yang dari laporan OPD juga kebanyakan sudah mengerucut ya bu ya,</p> <p>P : Untuk beberapa hal ketika kita ingin membahas sesuatu yang fokus gitu kayak kemarin pernah kita, karna kemarin kita di mintai APH untuk menghitung kerugian, itu diminta untuk kerja sama dengan BPKP, mendatangkan mereka untuk melakukan pelatihan kantor sendiri</p>	<p>dengan SDM, itu peningkatan kompetensinya, tahun ini itu sudah tiga kali pengiriman diklat yang kaitannya sama investigatif, perhitungan keuangan negara, dan forensik untuk audit investigatif. Kalau untuk teknologi,</p> <p>P : Kalau selama ini belum eksplisit sebagai investigasi gitu, pernah ada selain pengembangan dari pemeriksaan sendiri laporan OPD, juga pernah ada permintaan dari APH memang, permintaan untuk kami inspektorat melakukan pemeriksaan kasus yang mereka tangani, nah waktu itu juga pernah investigatif, pernah di PKKN, Cuma waktu itu PKKN nya tidak jadi, jadi kalau yang ini memang kalau proses investigasi tergantung ya mas, tergantung kalau misalnya permintaan APH ya berarti kita tergantung permintaan APH, suplai data ke kita apa, mereka maunya kita meriksa apa, ini</p>	<p>gitu, kalau penegakan hukumnya bukan di kami</p>
--	--	--	--	---

		<p>intens untuk membahas tentang PKKN dengan bahasan kasus yang sedang kami kerjakan, jadi kalau untuk ini memang ke pelatihan kantor sendiri dan diklat-diklat sesuai dengan pengembangan kompetensinya.</p>	<p>sudah terfokus. Kalau yang investigasi yang dari laporan OPD juga kebanyakan sudah mengerucut ya bu ya,</p> <p>P : Jadi tinggal kami, tinggal materinya yang anu kita periksa secara dengan teknik audit yang biasanya kita untuk entah membuktikan atau entah untuk mengungkap apa yang di mau dari OPD yang melaporkan, satu lagi tadi apa bu?</p> <p>Pengembangan laporan, kalau yang untuk permintaan APH tergantung permintaannya APH nya</p>	
--	--	---	---	--

الجمعة الإسلامية الاندونيسية

7 : Retno Isni Satiti	<p>Rno Oh, enggak, enggak seperti itu mas. Jadi auditor, seorang auditor. Ketika dia mau menjadi fungsional auditor, di awal sudah dibentuk dengan diklat. Yang diikuti diklat sertifikasi ya. Lulus peran misalnya auditor terampil, auditor muda, auditor terampil itu anggota tim, auditor ahli muda itu ketua tim, auditor madya itu pengendali teknis. Nah Ketika sebelum dibentuk itu, kami itu sudah dilalui seleksi saat itu.</p>	<p>Rno Oh saya terus terang, pengen semua teman-teman auditor itu diklatkan audit investigasi, audit penghitungan keuangan negara, audit yang mengarah pada kecurangan sehingga bisa membedakan auditnya itu khusus investigasi atau yang biasa. Jadi pengetahuan mereka itu tidak konfius. Ketika ada aduan tidak serta-merta diterjunkan, bahkan tidak semua auditor saya</p>	<p>Rno Penyalahgunaan aset kan semua memakai berita acara, bentuknya yang bagaimana dulu penyalahgunaan aset? Kalau kan kita berusaha, misalnya saya dikasih, saya memakai inventaris kantor, misalnya laptop, ya saya rawat, saya jaga, bagaimana itu? Nggak Nggak saya larikan atau saya jual, nggak. Kalaupun itu terjadi, nanti inspektorat pasti akan melakukan pemeriksaan khusus kalau di kami itu pemeriksaan khusus, kalau yang lain itu bilangnya investigasi Padahal investigasi itu kan ada, kenapa harus ada audit investigasi? Itu kan ada unsur-unsur yang harus dipenuhi ya, 5W, 1H</p>		
	<p>Rno Kemarin ada satu mbak untuk lebih digital forensik, barusan ada yang diklat namanya mbak Tiwi, dan dia kemarin hasilnya</p>	<p>harapannya, semua harapan saya, kalau harapan saya semua nih, dari jajaran inspektur sampai penunjang-</p>	<p>Rno Temuan ada, kami itu ada pemutakhiran tindak lanjut itu saya tidak hafal ya karena itu ranah nya di Kasubag evaluasi, evalev itu, ketika kita melakukan pemeriksaan nah yang namanya kan audit</p>		

		<p>luar biasa.</p>	<p>pendukung artinya kesekretariatan yang berkaitan langsung dengan pemeriksaan investigasi maupun <i>fraud</i>, maupun PKKN semua mendapat pengetahuan itu karena apa? Kita tuh semakin tidak menutup mata di kabupaten, kota yang lain sudah banyak yang terjadi. Naudzubillah mindzalik jangan sampai terjadi di Sleman ya. Ya maksudnya itu pengetahuan itu sangat dibutuhkan karena memang ada MOU dengan APH sehingga ketika menerima penugasan itu apakah layak dinaikkan untuk dilakukan</p>	<p>pemeriksaan itu juga akan berhasil ketika kita ada catatan pemeriksaan atau teman pemeriksaan dan kita merekomendasikan, rekomendasi ini bisa ditindaklanjuti oleh auditee, auditee itu obyek yang diperiksa, itu bisa ditindaklanjuti, itu namanya audit nya berhasil. Ketika dalam waktu 60 hari mereka belum menyelesaikan, mereka kan harus 60 hari menyelesaikan 2 bulan, menyelesaikan tindak lanjut. Entah itu tindak lanjutnya yang akibat dari kerugian daerah, atau karena pelanggaran suatu disiplin, atau karena sesuatu hal yang kami sarankan, kami rekomendasikan, itu mereka harus menyelesaikan dalam waktu 60 hari. Nah ketentuannya memang sih kalau 60 hari nggak selesai kan bisa dilimpahkan ke APH. Tapi kan tidak serta merta seperti itu, inspektorat kan punya fungsi pembinaan. Ya kan nggak bisa dong kami begitu 60 hari ga</p>		
--	--	--------------------	--	---	--	--

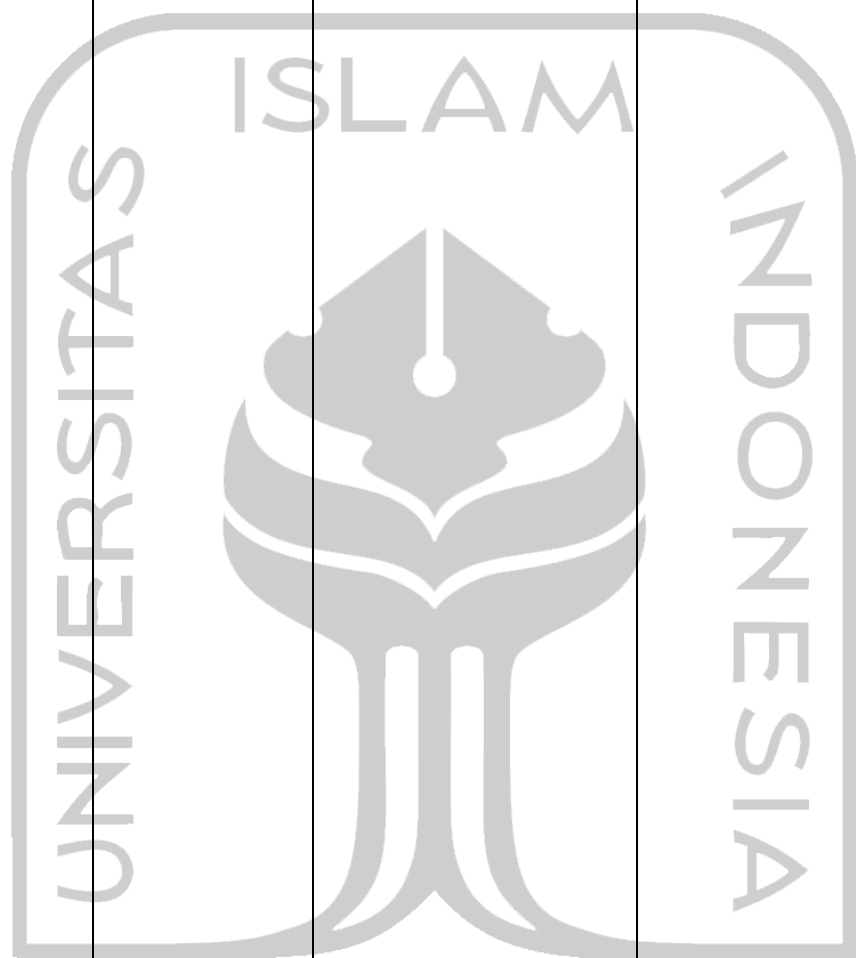


		<p>pemeriksaan investigasi atau pemeriksaan pemeriksaan penghitungan ke anggaran. Jadi kita bisa men-stop sih, mana sih yang harus dinaikkan, mana yang tidak mana sih yang harus dilakukan mana yang tidak, mana sih yang harus diterima mana yang tidak saya sih harapannya semua itu semuanya justru yang terkait paling enggak auditor semua ya dikursuskan Kalau memang anggaranya terbatas yang berkaitan dengan <i>fraud</i> Sering-sering lah menerima melalui PKS itu tentang pengetahuan, menerima pengetahuan tentang itu.</p>	<p>selesai kami serahkan ke APH. <i>Nanti</i> ya anu semua noh. Kan belum tentu bisa saja terjadi kerugian daerah karena lalai, bukan karena kesengajaan</p> <p>Rno Kemarin ada satu mbak untuk lebih digital forensik, barusan ada yang diklat namanya mbak Tiwi, dan dia kemarin hasilnya luar biasa.</p>		
--	--	---	---	--	--

Sehingga tidak saling *nantinya*, ketika kita kan, yang namanya auditor, ketika melakukan pemeriksaan tidak bisa membatasi pertanyaan dari yang diperiksa. Misalnya nih Mas Reza, auditor bidang pemerintahan, tiba-tiba ditanya waktu ke desa, Mas, apa sih audit investigasi? Lah kalau nggak tahu kan ya, masa Mas Reza, oh itu ada di bidang kami khusus investigasi. Kan gak lucu mas.

Rno Kemarin ada satu mbak untuk lebih digital forensik, barusan ada yang diklat namanya mbak Tiwi, dan dia kemarin hasilnya luar

biasa.



الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

Narasumber	B : a. Diklat	C : 1. Diklat PKKN	D : 2. Diklat Pengawasan	E : 3. Diklat Audit Investigatif	F : 4. Diklat <i>Anti</i> Korupsi	G : 5. Diklat Pemeriksaan Tertentu	H : 6. Diklat Digital Forensik
1 : Heri Setyawati , S.E., M.Acc.	<p>P : Kalau SDMnya berarti kan peningkatan kompetensi kami selaku auditor yang melakukan pengawasan kan biasanya sekarang juga ada kewajiban untuk apa pemenuhan jam diklat dan lain-lain, jadi diklat rutin itu pasti sih. Terus baru tahun ini sudah berapa yang bu yang kaitannya dengan investigasi ini? Dua</p> <p>H : Keuangan negara saat aku investigatif, baru dua yang langsung menjurus ke gitu, oh mba yeni satu yang infrastruktur, tapi kan ada selingan forensik digital.</p> <p>H : Kalau</p>	<p>H : Kalau mengidentifikasi kebutuhan kompetensi SDM, artinya ini bukan dari awal ya, artinya kan kita itu pokoknya pegawai inspektorat, yang diberdayakan ya juga itu, artinya kita tidak mencari-mencari awal untuk SDM yang memang mau didudukkan di investigasi itu enggak, ini dari awal memang adanya ini, kemudian ditata ulang dengan adanya bidang baru ke gitu bidang investigasi, diambil dari dari auditor yang lama, cuma sekarang bidangnya disini dengan pertimbangan tertentu ke gitu, artinya diratakanlah, misalnya dari masing-masing bidang itu ada yang jurusan akuntansi, ada yang hukum, ada yang teknik</p>	<p>H : Kalau mengidentifikasi kebutuhan kompetensi SDM, artinya ini bukan dari awal ya, artinya kan kita itu pokoknya pegawai inspektorat, yang diberdayakan ya juga itu, artinya kita tidak mencari-mencari awal untuk SDM yang memang mau didudukkan di investigasi itu enggak, ini dari awal memang adanya ini, kemudian ditata ulang dengan adanya bidang baru ke gitu bidang investigasi, diambil dari dari auditor yang lama, cuma sekarang bidangnya disini dengan pertimbangan tertentu ke gitu, artinya diratakanlah, misalnya dari masing-masing bidang itu ada yang jurusan akuntansi, ada yang hukum, ada yang teknik</p>	<p>H : Keuangan negara saat aku investigatif, baru dua yang langsung menjurus ke gitu, oh mba yeni satu yang infrastruktur, tapi kan ada selingan forensik digital.</p> <p>H : Kalau mengidentifikasi kebutuhan kompetensi SDM, artinya ini bukan dari awal ya, artinya kan kita itu pokoknya pegawai inspektorat, yang diberdayakan ya juga itu, artinya kita tidak mencari-mencari awal untuk SDM yang memang mau didudukkan di investigasi itu enggak, ini dari awal memang adanya ini, kemudian ditata ulang dengan</p>	<p>H : Ya mengeluarkan surat edaran tentang <i>anti</i> gratifikasi, kemudian kita juga ada sosialisasi <i>anti</i> korupsi ke berbagai hampir ke semua skpd, kemudian pendampingan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepada SKPD, artinya biar <i>nanti</i> untuk mencegah itu kan, pendampingannya a kia laksanakan dulu jangan sampai <i>nanti</i> maksudnya pendampingan biar tugas pokok dan fungsinya SKPD itu berjalan baik, kemudian kalau semuanya baik kan berarti menghindarkan dari <i>fraud</i>, kemudian kita</p>	<p>H : Kalau ini, ini berawal dari, yang pernah ya, yang dua-duanya pernah sih. Artinya pengembangan temuan dari hasil pemeriksaan inspektorat sendiri kemudian ada laporan dari SKPD yang lain, maksudnya dari dinas teknis yang lain, kemudian oleh inspektorat ditindak lanjuti dengan, kalau dulu-dulu sih namanya bukan investigasi ya, masih pemeriksaan kasus seperti itu dan selama ini yang kami laksanakan istilahnya dengan pengenaan tuntutan <i>ganti</i> rugi, artinya kalau ada ketekoran kas maksudnya kerugian yang berkaitan dengan keuangan daerah itu untuk segera disetorkan kembali ke kas daerah, ke gitu, tapi belum</p>	<p>H : Kalau mengidentifikasi kebutuhan kompetensi SDM, artinya ini bukan dari awal ya, artinya kan kita itu pokoknya pegawai inspektorat, yang diberdayakan ya juga itu, artinya kita tidak mencari-mencari awal untuk SDM yang memang mau didudukkan di investigasi itu enggak, ini dari awal memang adanya ini, kemudian ditata ulang dengan adanya bidang baru ke gitu bidang investigasi, diambil dari dari auditor yang lama, cuma sekarang bidangnya disini dengan pertimbangan tertentu ke gitu, artinya diratakanlah, misalnya dari masing-masing bidang itu ada yang jurusan akuntansi, ada yang hukum,</p>

<p>mengidentifikasi kebutuhan kompetensi SDM, artinya ini bukan dari awal ya, artinya kan kita itu pokoknya pegawai inspektorat, yang diberdayakan ya juga itu, artinya kita tidak mencari-mencari awal untuk SDM yang memang mau didudukkan di investigasi itu enggak, ini dari awal memang adanya ini, kemudian ditata ulang dengan adanya bidang baru kek gitu bidang investigasi, diambil dari dari auditor yang lama, cuma sekarang bidangnya disini dengan pertimbangan tertentu kek gitu, artinya diratakanlah, misalnya dari masing-masing bidang itu ada yang jurusan akuntansi, ada yang hukum, ada yang teknik</p>	<p>seperti itu, pertimbangannya hanya itu, kalau masalah peningkatan SDMnya ya memang kita upayakan untuk mengirim ke berbagai diklat yang menurut kami itu berguna untuk bekerja di bidang masing-masing seperti itu, misalnya tadi ada bidang investigasi baru, kemarin Mba Pipit dan Mba Retno itu di ikutkan untuk diklat masalah perhitungan keuangan negara, kemudian saya dan juga teman saya kemarin ikut audit investigatif, ada teman lagi yang ikut untuk forensik digital seperti itu</p> <p>P : Kalau saya, kalau jenis pelatihannya ya mas, kita milih sesuai sama kebutuhan kami inspektorat, jadi kebanyakan itu pelatihan yang disediakan oleh bpkp atau oleh bpk kan kaitannya dengan audit kan, dan untuk kalau</p>	<p>seperti itu, pertimbangannya hanya itu, kalau masalah peningkatan SDMnya ya memang kita upayakan untuk mengirim ke berbagai diklat yang menurut kami itu berguna untuk bekerja di bidang masing-masing seperti itu, misalnya tadi ada bidang investigasi baru, kemarin Mba Pipit dan Mba Retno itu di ikutkan untuk diklat masalah perhitungan keuangan negara, kemudian saya dan juga teman saya kemarin ikut audit investigatif, ada teman lagi yang ikut untuk forensik digital seperti itu</p> <p>P : Kalau saya, kalau jenis pelatihannya ya mas, kita milih sesuai sama kebutuhan kami inspektorat, jadi kebanyakan itu pelatihan yang disediakan oleh bpkp atau oleh bpk kan kaitannya dengan audit kan, dan untuk kalau</p>	<p>adanya bidang baru kek gitu bidang investigasi, diambil dari dari auditor yang lama, cuma sekarang bidangnya disini dengan pertimbangan tertentu kek gitu, artinya diratakanlah, misalnya dari masing-masing bidang itu ada yang jurusan akuntansi, ada yang hukum, ada yang teknik seperti itu, pertimbangannya hanya itu, kalau masalah peningkatan SDMnya ya memang kita upayakan untuk mengirim ke berbagai diklat yang menurut kami itu berguna untuk bekerja di bidang masing-masing seperti itu, misalnya tadi ada bidang investigasi baru, kemarin Mba Pipit dan Mba Retno itu di ikutkan untuk diklat masalah</p>	<p>juga, apa istilahnya itu Mba Pipit</p> <p>H : Kalau mengidentifikasi kebutuhan kompetensi SDM, artinya ini bukan dari awal ya, artinya kan kita itu pokoknya pegawai inspektorat, yang diberdayakan ya juga itu, artinya kita tidak mencari-mencari awal untuk SDM yang memang mau didudukkan di investigasi itu enggak, ini dari awal memang adanya ini, kemudian ditata ulang dengan adanya bidang baru kek gitu bidang investigasi, diambil dari dari auditor yang lama, cuma sekarang bidangnya disini dengan pertimbangan tertentu kek gitu, artinya diratakanlah, misalnya dari masing-masing</p>	<p>pernah kami melimpahkan ke APH.</p> <p>H : Kalau mengidentifikasi kebutuhan kompetensi SDM, artinya ini bukan dari awal ya, artinya kan kita itu pokoknya pegawai inspektorat, yang diberdayakan ya juga itu, artinya kita tidak mencari-mencari awal untuk SDM yang memang mau didudukkan di investigasi itu enggak, ini dari awal memang adanya ini, kemudian ditata ulang dengan adanya bidang baru kek gitu bidang investigasi, diambil dari dari auditor yang lama, cuma sekarang bidangnya disini dengan pertimbangan tertentu kek gitu, artinya diratakanlah, misalnya dari masing-masing bidang itu ada yang jurusan akuntansi, ada yang hukum, ada yang teknik seperti itu, pertimbangannya</p>	<p>ada yang teknik seperti itu, pertimbangannya hanya itu, kalau masalah peningkatan SDMnya ya memang kita upayakan untuk mengirim ke berbagai diklat yang menurut kami itu berguna untuk bekerja di bidang masing-masing seperti itu, misalnya tadi ada bidang investigasi baru, kemarin Mba Pipit dan Mba Retno itu di ikutkan untuk diklat masalah perhitungan keuangan negara, kemudian saya dan juga teman saya kemarin ikut audit investigatif, ada teman lagi yang ikut untuk forensik digital seperti itu</p> <p>P : Kalau saya, kalau jenis pelatihannya ya mas, kita milih sesuai sama kebutuhan kami inspektorat, jadi kebanyakan itu pelatihan yang disediakan oleh bpkp atau oleh bpk kan kaitannya dengan audit kan,</p>
---	--	--	---	--	---	--

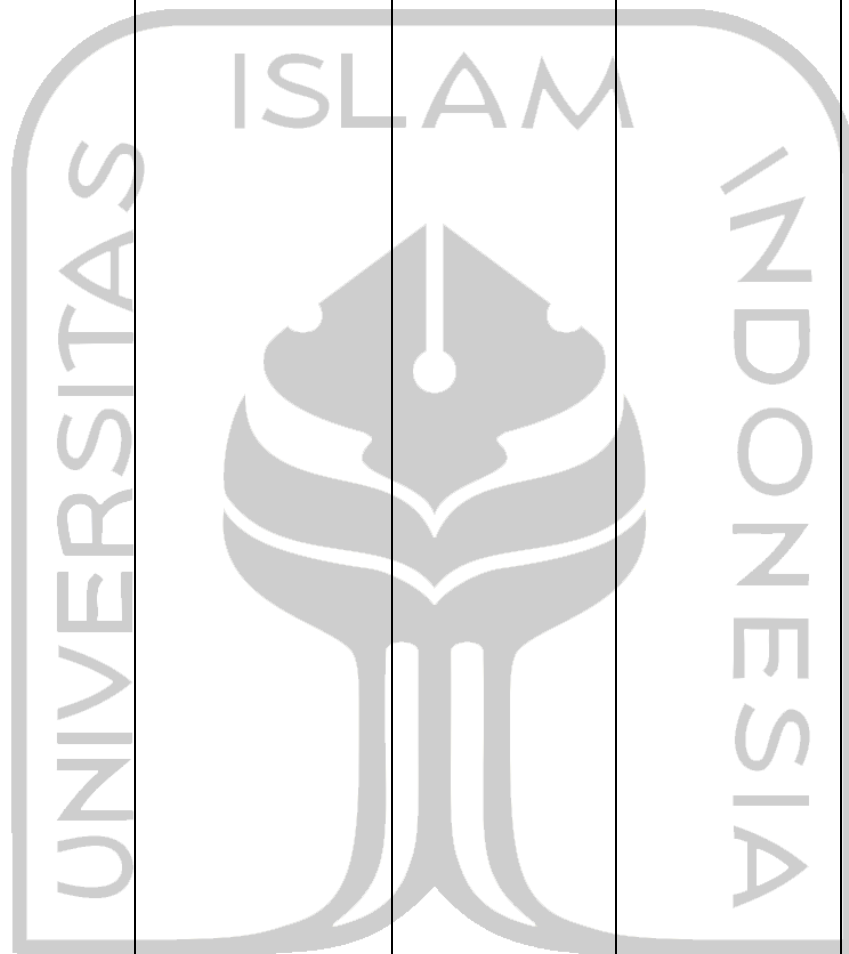
<p>seperti itu, pertimbangannya hanya itu, kalau masalah peningkatan SDMnya ya memang kita upayakan untuk mengirim ke berbagai diklat yang menurut kami itu berguna untuk bekerja di bidang masing-masing seperti itu, misalnya tadi ada bidang investigasi baru, kemarin Mba Pipit dan Mba Retno itu di ikutkan untuk diklat masalah perhitungan keuangan negara, kemudian saya dan juga teman saya kemarin ikut audit investigatif, ada teman lagi yang ikut untuk forensik digital seperti itu</p> <p>H : Diklat pengawasnya bpkp sama balai diklatnya bpk, programnya langsung pengawasan, dan mereka</p>	<p>mereka yang mengadakan kan biasanya tetap bareng-bareng entah bareng pemda lain entah dengan institusi lain yang setipe bedanya inspektorat jenderal itu, jadi bukan terus saya nyari sendiri terus saya keluar, jadi tetap terorganisir lewat kantor, kantor koordinasi dengan apa lembaga diklatnya, kemudian juga koordinasi dengan apa badan kepegawaian kaitannya dengan dukungan anggaran, jadi analisis kebutuhan masing-masing auditor, jadi saya butuh diklat apa dan lain-lain bukan saya yang menentukan tapi tetap bagian kepegawaian dan sekretaris yang menentukan, dan itu bisanya pertimbangannya dari posisi kami dibidang sih tergantung bidangnya apa.</p> <p>P : Sebenarnya mereka yang</p>	<p>mereka yang mengadakan kan biasanya tetap bareng-bareng entah bareng pemda lain entah dengan institusi lain yang setipe bedanya inspektorat jenderal itu, jadi bukan terus saya nyari sendiri terus saya keluar, jadi tetap terorganisir lewat kantor, kantor koordinasi dengan apa lembaga diklatnya, kemudian juga koordinasi dengan apa badan kepegawaian kaitannya dengan dukungan anggaran, jadi analisis kebutuhan masing-masing auditor, jadi saya butuh diklat apa dan lain-lain bukan saya yang menentukan tapi tetap bagian kepegawaian dan sekretaris yang menentukan, dan itu bisanya pertimbangannya dari posisi kami dibidang sih tergantung bidangnya apa.</p> <p>P : Sebenarnya mereka yang</p>	<p>perhitungan keuangan negara, kemudian saya dan juga teman saya kemarin ikut audit investigatif, ada teman lagi yang ikut untuk forensik digital seperti itu</p> <p>P : Kalau saya, kalau jenis pelatihannya ya mas, kita milih sesuai sama kebutuhan kami inspektorat, jadi kebanyakan itu pelatihan yang disediakan oleh bpkp atau oleh bpk kan kaitannya dengan audit kan, dan untuk kalau mereka yang mengadakan kan biasanya tetap bareng-bareng entah bareng pemda lain entah dengan institusi lain yang setipe bedanya inspektorat jenderal itu, jadi bukan terus saya nyari sendiri terus saya keluar, jadi tetap terorganisir lewat kantor, kantor koordinasi</p>	<p>bidang itu ada yang jurusan akuntansi, ada yang hukum, ada yang teknik seperti itu, pertimbangannya hanya itu, kalau masalah peningkatan SDMnya ya memang kita upayakan untuk mengirim ke berbagai diklat yang menurut kami itu berguna untuk bekerja di bidang masing-masing seperti itu, misalnya tadi ada bidang investigasi baru, kemarin Mba Pipit dan Mba Retno itu di ikutkan untuk diklat masalah perhitungan keuangan negara, kemudian saya dan juga teman saya kemarin ikut audit investigatif, ada teman lagi yang ikut untuk forensik digital seperti itu</p> <p>P : Kalau saya, kalau jenis pelatihannya ya mas, kita milih</p>	<p>hanya itu, kalau masalah peningkatan SDMnya ya memang kita upayakan untuk mengirim ke berbagai diklat yang menurut kami itu berguna untuk bekerja di bidang masing-masing seperti itu, misalnya tadi ada bidang investigasi baru, kemarin Mba Pipit dan Mba Retno itu di ikutkan untuk diklat masalah perhitungan keuangan negara, kemudian saya dan juga teman saya kemarin ikut audit investigatif, ada teman lagi yang ikut untuk forensik digital seperti itu</p> <p>P : Kalau saya, kalau jenis pelatihannya ya mas, kita milih sesuai sama kebutuhan kami inspektorat, jadi kebanyakan itu pelatihan yang disediakan oleh bpkp atau oleh bpk kan kaitannya dengan audit kan, dan untuk kalau mereka yang mengadakan kan</p>	<p>dan untuk kalau mereka yang mengadakan kan biasanya tetap bareng-bareng entah bareng pemda lain entah dengan institusi lain yang setipe bedanya inspektorat jenderal itu, jadi bukan terus saya nyari sendiri terus saya keluar, jadi tetap terorganisir lewat kantor, kantor koordinasi dengan apa lembaga diklatnya, kemudian juga koordinasi dengan apa badan kepegawaian kaitannya dengan dukungan anggaran, jadi analisis kebutuhan masing-masing auditor, jadi saya butuh diklat apa dan lain-lain bukan saya yang menentukan tapi tetap bagian kepegawaian dan sekretaris yang menentukan, dan itu bisanya pertimbangannya dari posisi kami dibidang sih tergantung bidangnya apa.</p> <p>P : Sebenarnya</p>
---	--	--	--	---	--	--

	pembina juga ya	<p>menyediakan terus biasanya karna yang disediakan itu memang yang kita butuhkan jadi otomatis aja, jadi bukan kita yang, kita pengen diklat ini bukan, jadi memang biasanya mereka menyediakan itu sesuai sama yang kami butuhkan jadi sudah ngikut settingan mereka, soalnya mereka kan juga programnya dari mungkin dari pusat maunya seperti ini, auditor inspektorat seperti ini, auditor bpk seperti ini terus dibuatkan diklat seperti itu</p>	<p>menyediakan terus biasanya karna yang disediakan itu memang yang kita butuhkan jadi otomatis aja, jadi bukan kita yang, kita pengen diklat ini bukan, jadi memang biasanya mereka menyediakan itu sesuai sama yang kami butuhkan jadi sudah ngikut settingan mereka, soalnya mereka kan juga programnya dari mungkin dari pusat maunya seperti ini, auditor inspektorat seperti ini, auditor bpk seperti ini terus dibuatkan diklat seperti itu</p> <p>H : Diklat pengawasnya bpkp sama balai diklatnya bpk, programnya langsung pengawasan, dan mereka pembina juga ya</p>	<p>dengan apa lembaga diklatnya, kemudian juga koordinasi dengan apa badan kepegawaian kaitannya dengan dukungan anggaran, jadi analisis kebutuhan masing-masing auditor, jadi saya butuh diklat apa dan lain-lain bukan saya yang menentukan tapi tetap bagian kepegawaian dan sekretaris yang menentukan, dan itu bisanya pertimbangannya dari posisi kami dibidang sih tergantung bidangnya apa.</p> <p>P : Sebenarnya mereka yang menyediakan terus biasanya karna yang disediakan itu memang yang kita butuhkan jadi otomatis aja, jadi bukan kita yang, kita pengen diklat ini bukan, jadi memang</p>	<p>sesuai sama kebutuhan kami inspektorat, jadi kebanyakan itu pelatihan yang disediakan oleh bpkp atau oleh bpk kan kaitannya dengan audit kan, dan untuk kalau mereka yang mengadakan kan biasanya tetap bareng-bareng pemda lain entah dengan institusi lain yang setipe bedanya inspektorat jenderal itu, jadi bukan terus saya nyari sendiri terus saya keluar, jadi tetap terorganisir lewat kantor, kantor koordinasi dengan apa lembaga diklatnya, kemudian juga koordinasi dengan apa badan kepegawaian kaitannya dengan dukungan anggaran, jadi analisis kebutuhan masing-masing auditor, jadi saya butuh diklat apa dan lain-lain bukan saya yang menentukan tapi tetap bagian kepegawaian dan sekretaris yang menentukan, dan itu bisanya pertimbangannya dari posisi kami dibidang sih tergantung bidangnya apa.</p> <p>P : Sebenarnya mereka yang menyediakan terus biasanya karna yang</p>	<p>biasanya tetap bareng-bareng pemda lain entah dengan institusi lain yang setipe bedanya inspektorat jenderal itu, jadi bukan terus saya nyari sendiri terus saya keluar, jadi tetap terorganisir lewat kantor, kantor koordinasi dengan apa lembaga diklatnya, kemudian juga koordinasi dengan apa badan kepegawaian kaitannya dengan dukungan anggaran, jadi analisis kebutuhan masing-masing auditor, jadi saya butuh diklat apa dan lain-lain bukan saya yang menentukan tapi tetap bagian kepegawaian dan sekretaris yang menentukan, dan itu bisanya pertimbangannya dari posisi kami dibidang sih tergantung bidangnya apa.</p> <p>P : Sebenarnya mereka yang menyediakan terus biasanya karna yang</p>	<p>mereka yang menyediakan terus biasanya karna yang disediakan itu memang yang kita butuhkan jadi otomatis aja, jadi bukan kita yang, kita pengen diklat ini bukan, jadi memang biasanya mereka menyediakan itu sesuai sama yang kami butuhkan jadi sudah ngikut settingan mereka, soalnya mereka kan juga programnya dari mungkin dari pusat maunya seperti ini, auditor inspektorat seperti ini, auditor bpk seperti ini terus dibuatkan diklat seperti itu</p>
--	-----------------	--	--	---	---	--	--

			<p>biasanya mereka menyediakan itu sesuai sama yang kami butuhkan jadi sudah ngikut settingan mereka, soalnya mereka kan juga programnya dari mungkin dari pusat maunya seperti ini, auditor inspektorat seperti ini, auditor bpk seperti ini terus dibuatkan diklat seperti itu</p>	<p>butuh diklat apa dan lain-lain bukan saya yang menentukan tapi tetap bagian kepegawaian dan sekretaris yang menentukan, dan itu bisanya pertimbangannya dari posisi kami dibidang sih tergantung bidangnya apa.</p> <p>P : Sebenarnya mereka yang menyediakan terus biasanya karna yang disediakan itu memang yang kita butuhkan jadi otomatis aja, jadi bukan kita yang, kita pengen diklat ini bukan, jadi memang biasanya mereka menyediakan itu sesuai sama yang kami butuhkan jadi sudah ngikut settingan mereka, soalnya mereka kan juga programnya dari mungkin dari pusat maunya seperti ini, auditor inspektorat seperti ini, auditor bpk seperti ini terus dibuatkan diklat seperti itu</p>	<p>disediakan itu memang yang kita butuhkan jadi otomatis aja, jadi bukan kita yang, kita pengen diklat ini bukan, jadi memang biasanya mereka menyediakan itu sesuai sama yang kami butuhkan jadi sudah ngikut settingan mereka, soalnya mereka kan juga programnya dari mungkin dari pusat maunya seperti ini, auditor inspektorat seperti ini, auditor bpk seperti ini terus dibuatkan diklat seperti itu</p>
--	--	--	--	--	--



auditor bpk  
seperti ini terus  
dibuatkan diklat  
seperti itu



الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

<p>2 : Hery Dwi Kuryanto, S.H., M.Hum.</p>	<p>Hy Kekurangannya? Ya. Dari sisi... Jadi gini, kita kan harus pengembangan itu dari sisi kompetensi pertama. Dari sisi kompetensi itu bisa kita lakukan peningkatan dari sisi pengetahuannya , kompetensinya Itu melalui diklat. Itu kan sesuatu yang bisa dipelajari. Tergantung kepada bagaimana kemampuan, terus kemauan dari SDM untuk mengembangkan diri. Kita ada dari diklat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga baik itu di BPKP maupun BPK. Kemudian yang terpenting lagi adalah justru bukan hanya pengembangan kompetensi, tapi lebih kepada kualitas diri. Itu yang terpenting. Jadi profesi... Di</p>	<p>Hy Ya, jadi tujuannya kalau untuk inspektorat, Pasti pelatihan apapun itu, pasti mendukung itu. Jadi kecurangan semua itu kalau yang namanya APIP, Pasti dalam rangka untuk menghindari kecurangan. Tidak ada pelatihan yang di sini tanpa...Aktifitas yang dilakukan oleh inspektorat itu semua menuju ke sana.</p>	<p>Hy Ya, jadi tujuannya kalau untuk inspektorat, Pasti pelatihan apapun itu, pasti mendukung itu. Jadi kecurangan semua itu kalau yang namanya APIP, Pasti dalam rangka untuk menghindari kecurangan. Tidak ada pelatihan yang di sini tanpa...Aktifitas yang dilakukan oleh inspektorat itu semua menuju ke sana.</p>	<p>Hy Ya, jadi tujuannya kalau untuk inspektorat, Pasti pelatihan apapun itu, pasti mendukung itu. Jadi kecurangan semua itu kalau yang namanya APIP, Pasti dalam rangka untuk menghindari kecurangan. Tidak ada pelatihan yang di sini tanpa...Aktifitas yang dilakukan oleh inspektorat itu semua menuju ke sana.</p>	<p>Hy Ya, jadi tujuannya kalau untuk inspektorat, Pasti pelatihan apapun itu, pasti mendukung itu. Jadi kecurangan semua itu kalau yang namanya APIP, Pasti dalam rangka untuk menghindari kecurangan. Tidak ada pelatihan yang di sini tanpa...Aktifitas yang dilakukan oleh inspektorat itu semua menuju ke sana.</p>	<p>Hy Ya, jadi tujuannya kalau untuk inspektorat, Pasti pelatihan apapun itu, pasti mendukung itu. Jadi kecurangan semua itu kalau yang namanya APIP, Pasti dalam rangka untuk menghindari kecurangan. Tidak ada pelatihan yang di sini tanpa...Aktifitas yang dilakukan oleh inspektorat itu semua menuju ke sana.</p>	<p>Hy Ya, jadi tujuannya kalau untuk inspektorat, Pasti pelatihan apapun itu, pasti mendukung itu. Jadi kecurangan semua itu kalau yang namanya APIP, Pasti dalam rangka untuk menghindari kecurangan. Tidak ada pelatihan yang di sini tanpa...Aktifitas yang dilakukan oleh inspektorat itu semua menuju ke sana.</p>
--	--	---	---	---	---	---	---

sini kan auditor, fungsional. Profesi auditor itu bukan hanya didukung oleh profesional kompetensi seorang auditor. Tapi harus dibarengi dengan integritas. Citra diri. Kemudian bagaimana kemudian integritasnya mereka itu benar-benar bisa ditegakkan. Antara nilai-nilai yang ada di dalam dirinya itu benar-benar bisa diterapkan dalam melaksanakan tugas. Jadi tidak ada gunanya kalau seorang yang memiliki kompetensi kemudian integritasnya rendah. Karena kalau integritasnya rendah artinya profesionalnya kompetensinya bisa tergadaikan. Itu semua pekerjaan kan yang kayak gitu. Auditor kalau di



sini fungsinya fungsi pengawasan, auditor kalau sudah tergadai profesionalismenya, artinya kompetensinya berarti tidak akan bisa mengawal fungsi inspektorat selaku pengawas. Itu aja titiknya. Sehingga pengembangan integritas itu melalui apa? Ini yang terpenting adalah dari internal manajemennya. Dari inspektur, dari sekretaris, dari irban. Artinya kami, saya sebagai inspektur, perlu mendrive teman-teman struktural baik dari sekretaris sampai ke bawah. Itu melalui pembinaan. Baik itu di apel pagi setiap Senin atau pertemuan-pertemuan rutin. Kita kuatkan integritas dia.



Dan di tempat kita ada yang namanya, setiap apel kita membaca yang namanya pakta integritas. Ada delapan pakta atau berapa. Itu yang sebetulnya akan membangun kepribadian dari mereka untuk bisa menegakkan profesionalisme mereka. Terus kita juga, ada kita pelatihan, bukan, pemberian motivasi dari pihak luar. Motivasi kaitannya dengan profesional, bagaimana bekerja secara profesional, maupun dari aspek keagamaan. Itu yang paling terpenting. Udah jawabannya selesai.

Hy Ya, itu kita harapkan. Untuk digital forensik, itu kemampuan



itu harus juga dikembangkan ke kita. Karena, kita ada loh, Mas. Sudah disampaikan belum, ya. Tapi diklatnya sudah atukah belum. Kita kan ada... Audit PBJ, ya. Di teknologi informasinya. Harusnya ada. Nah, ini kalau kita memiliki kemampuan di situ, harusnya ke sana. Tapi kelihatannya kami belum sampai ke sana. Kami upamanya... Kita kan ada... Harusnya kan ada audit teknologi informasi. Kaitannya dengan sistem yang digunakan. Tapi kemampuan kami kan terbatas. Di jaranglah yang memiliki kemampuan untuk itu.



3 : Ika Sulistyio Devi

I Harapannya sih membantu tapi kadang pemahaman masing-masing peserta diklat kan juga beda-beda ya mas ada yang bisa langsung itu dipahami dan diterapkan ada juga yang masih bingung gitu harus ada diklat selanjutnya gitu

I Itu, jadi si A, si B, si C itu dia harus memenuhi apa gitu dia sebagai pegawai, misalnya auditor. Auditor di bidang investigasi itu harusnya lebih banyak dia melakukan audit keinvestigasian. Berarti *nanti* yang didiklatkan lebih banyak investigasi yang di bidang investigasi. Kemudian *nanti* kalau yang di auditor di pemerintahan itu banyak melakukan pemeriksaan di

I Pencegahannya untuk *anti-fraud* misalnya adanya SOP dalam pelaksanaan kegiatan, entah itu *nanti* terutama yang di kami ya, di kami itu tentang SOP pendistribusian LHP, laporan hasil pemeriksaan, kemudian tentang pemutakhiran tindak lanjut gitu, kalau yang di keuangan juga ada, bagaimana SOP untuk penyusunan dokumen pelaksana anggaran, Kemudian untuk SOP pengelolaan barang juga ada. Salah satunya itu. Kemudian ada lagi yang kita juga *anti-fraud*, *fraud* kan anu ya kecurangan ya. Itu juga misalnya pelatihan. Jadi kan peningkatan kompetensi itu kan diharapkan *nanti* *fraudnya* kalau hilang sama sekali sih mungkin bertahap ya, tapi peningkatan kompetensi itu kan juga diharapkannya berkurang lah *fraudnya* itu.

I Itu, jadi si A, si B, si C itu dia harus memenuhi apa gitu dia sebagai pegawai, misalnya auditor. Auditor di bidang investigasi itu harusnya lebih banyak dia melakukan audit keinvestigasian. Berarti *nanti* yang didiklatkan lebih banyak investigasi yang di bidang investigasi. Kemudian *nanti* kalau yang di auditor di pemerintahan itu banyak melakukan pemeriksaan di kalurahan, mereka diklat di tentang pengelolaan keuangan kalurahan. Jadi tergantung, tergantung apa ya, kebutuhan mereka. RZ Kebutuhan mereka. Baik baik. Nah lalu ini untuk cara mengatasi kendala-kendala tadi seperti gimana bu cara

I Digital forensik kemarin ada di diklatnya, Yang ikut baru satu orang apa ya?

	<p>kalurahan, mereka diklat di tentang pengelolaan keuangan kalurahan. Jadi tergantung, tergantung apa ya, kebutuhan mereka.</p> <p>I Digital forensik kemarin ada di diklatnya, Yang ikut baru satu orang apa ya?</p>		<p>Kemudian juga ada untuk pakta integritas, kami setiap ASN di inspektorat terutama itu harus menandatangani pakta integritas.</p>	<p>mengatasi kendala untuk pengembangan kompetensi mereka ketika tadi volume pekerjaan yang banyak cara dari inspektoran mengatasi?.</p>			
--	--	--	---	--	--	--	--


الجمهورية الإسلامية اندونيسية



<p>4 : Ir. Sri Puji Lestari</p>	<p>Pj : Kalau pembekalan yaitu kita ngirim diklat, kita ngirim diklat, materi-materi yang dibutuhkan kita, kita kirim ke diklat ke BPK</p> <p>Pj : Dan yang baru itu ada diklatnya, setelah masuk sini ada diklat khusus pengawasan, kita diklat kan, khusus pengawasan dari dasar</p> <p>Pj : Itu juga sedang dalam pelatihan. Kemarin kita udah ngirim pelatihan penghitungan kerugian kan gitu. Besok ngirim audit investigasi, besok ngirim apalagi</p> <p>Pj : Oke, njih, kalau terkait dengan untuk pencegahan <i>fraud</i> sebetulnya kita itu sudah ada apa</p>	<p>Bu Puji (Pj) : Ya, sebetulnya sekarang itu semenjak Maret, bulan maret ya, itu organisasi inspektorat ada perubahan. Sekarang sudah ada bidang yang menangani terkait dengan bidang investigasi dan reformasi birokrasi sekarang, kalau dulu memang belum ada, jadi terkait itu masih campur ya di sekretariat. Sekretariat, kalau sekarang sudah ada sebetulnya gitu tapi kan dan terkait dengan itu bidang investigasi dan reformasi birokrasi itu, tugasnya itu yang pertama, melakukan pencegahan terhadap tindakan e yang terkait dengan korupsi, dari pencegahan kemudian tindak pemeriksaannya atau penanganannya gitu. Kalau dulu masih ditangani oleh sekretariat, jadi di sekretariat masih e kalau dulu kan bidang-bidangnya belum ad aitu masih</p>	<p>Pj : Dan yang baru itu ada diklatnya, setelah masuk sini ada diklat khusus pengawasan, kita diklat kan, khusus pengawasan dari dasar</p>	<p>Bu Puji (Pj) : Ya, sebetulnya sekarang itu semenjak Maret, bulan maret ya, itu organisasi inspektorat ada perubahan. Sekarang sudah ada bidang yang menangani terkait dengan bidang investigasi dan reformasi birokrasi sekarang, kalau dulu memang belum ada, jadi terkait itu masih campur ya di sekretariat. Sekretariat, kalau sekarang sudah ada sebetulnya gitu tapi kan dan terkait dengan itu bidang investigasi dan reformasi birokrasi itu, tugasnya itu yang pertama, melakukan pencegahan terhadap tindakan e yang terkait dengan korupsi, dari pencegahan kemudian tindak pemeriksaannya atau penanganannya gitu. Kalau dulu</p>	<p>Pj : Iya dari KPK, jadi sekarang di setiap inspektorat itu harus ada bidang khusus yang menangani investigative, karna kan sekarang banyak kegiatan kegiatan dari KPK yang diturunkan ke daerah, banyak sekali. Kemarin itu karena belum ada bidang sendiri maka ditangani oleh kantor. Jenengan bisa bayangkan sekretariat harunya menangani masalah interen kantor, tapi juga menangani masalah-masalah dari luar, jadi kegiatannya belum ditampung oleh bidang semuanya masuk ke sekretariat. Jadi sekretariat kita menangani. Di KPK itu ada kegiatan monitoring percepatan pemberantasan korupsi atau mjb, kalau mungkin</p>		<p>Bu Puji (Pj) : Ya, sebetulnya sekarang itu semenjak Maret, bulan maret ya, itu organisasi inspektorat ada perubahan. Sekarang sudah ada bidang yang menangani terkait dengan bidang investigasi dan reformasi birokrasi sekarang, kalau dulu memang belum ada, jadi terkait itu masih campur ya di sekretariat. Sekretariat, kalau sekarang sudah ada sebetulnya gitu tapi kan dan terkait dengan itu bidang investigasi dan reformasi birokrasi itu, tugasnya itu yang pertama, melakukan pencegahan terhadap tindakan e yang terkait dengan korupsi, dari pencegahan kemudian tindak pemeriksaannya atau penanganannya gitu. Kalau dulu masih ditangani oleh sekretariat, jadi di sekretariat masih e kalau dulu kan bidang-bidangnya</p>
---------------------------------	---	--	---	--	--	--	--

<p>namanya) mengirimkan SDM ya, mengirimkan SDM untuk mengikuti pelatihan atau diklat terkait dengan penyuluh <i>anti</i> korupsi. Nggih, sebelum jadi penyuluh ada pelatihan dulu ya, itu kita sudah mengirimkan ada kalau nggak salah ada 9 orang atau 7 orang untuk mengikuti diklat tersebut, setelah lulus diklat tersebut, kemudian yang bersangkutan harapannya mengikuti sertifikasi penyuluh <i>anti</i> korupsi, tetapi dari tujuh orang itu baru satu yang mengikuti penyuluhan <i>anti</i> korupsi, tadinya dua yang mengikuti tapi yang lulus baru satu, jadi kita baru mempunyai penyuluh <i>anti</i> korupsi yang telah</p>	<p>di sekretariat kita menangani terkait dengan <i>fraud</i> segala macem. Kalau di inspektorat, itu kan di inspektorat itu kan inspektorat itu selaku e apa ya? Unit sekretariat unit ee pengendali gratifikasi atau UPG kemudian ekhm inspektorat itu juga sebagai kalau dulu sebagai pembina atau pendamping OPD dalam melakukan analisa <i>fraud</i> di setiap kegiatan OPD</p>	<p>masih ditangani oleh sekretariat, jadi di sekretariat masih e kalau dulu kan bidang-bidangnya belum ad aitu masih di sekretariat kita menangani terkait dengan <i>fraud</i> segala macem. Kalau di inspektorat, itu kan di inspektorat itu kan inspektorat itu selaku e apa ya? Unit sekretariat unit ee pengendali gratifikasi atau UPG kemudian ekhm inspektorat itu juga sebagai kalau dulu sebagai pembina atau pendamping OPD dalam melakukan analisa <i>fraud</i> di setiap kegiatan OPD</p>	<p>jenengan kenal, mjb KPK, kemudian ada lagi inspektorat yang harus melakukan monitoring, kemudian juga adalagi monitoring penerapan stranas pemberantasan korupsi KPK, adalagi. Kemudian ada lagi kpk juga ngobli dia ee dia.</p> <p>Pj : Gambarannya itu harus melakukan pencegahan terkait dengan korupsi, <i>nanti</i> banyak disosialisasi di</p> <p>Pj : Jadi kalau kemarin karena baru-baru Jadi kita mencoba membuat, Kemudian kita share itu semua ke unit-unit kerja Contohnya seperti ini menyesuaikan dengan kegiatannya itu kadang opd juga</p>	<p>belum ad aitu masih di sekretariat kita menangani terkait dengan <i>fraud</i> segala macem. Kalau di inspektorat, itu kan di inspektorat itu kan di inspektorat itu selaku e apa ya? Unit sekretariat unit ee pengendali gratifikasi atau UPG kemudian ekhm inspektorat itu juga sebagai kalau dulu sebagai pembina atau pendamping OPD dalam melakukan analisa <i>fraud</i> di setiap kegiatan OPD</p>
--	---	---	---	--

<p>bersertifikat oleh KPK itu satu orang, tetapi meskipun demikian, ketujuh orang yang pernah kita diklat kan pencegah <i>anti</i> korupsi ini juga bisa dimanfaatkan dalam rangka sosialisasi ke OPD-OPD. Kemudian kalau dibidang investigasi itu kan kegiatannya tidak hanya investigasi saja tapi juga reformasi birokrasi, itu memang personil nya baru delapan orang. Meskipun demikian bisa dibantu dengan bidang yang lain karena ketujuh orang itu tidak seluruhnya itu menyebar di bidang lain yang sudah mendapatkan pelatihan terkait dengan pencegahan korupsi. Kemudian untuk ke depannya</p>		<p>besok ngirim apalagi</p>	<p>belum ngeh gitu loh laporannya tidak ada <i>fraud</i> tidak ada <i>fraud</i> tambah akan yang namanya penilaian resiko itu penilaian yang terjadi atau yang mungkin terjadi kan gitu Jadi kalau dalam pikirannya nggak pernah ada jadi seakan-akan yang sudah terjadi kan gitu, mungkin kalau penilaian resiko seperti itu ya itu jadi langkah pertama ya itu kalau terkait dengan <i>fraud</i>. Penilaian risiko <i>fraud</i> Terjadi, Tapi saya itu sendiri tidak bisa membedakan ya antara <i>fraud</i> dengan agenda <i>anti</i> korupsi lainnya Oh ya kalau untuk pencegahan Kita yaitu melakukan sosialisasi-sosialisasi pencegahan pungli Kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan Khusus pungli. Tapi kalau</p>		
--	--	-----------------------------	---	--	--

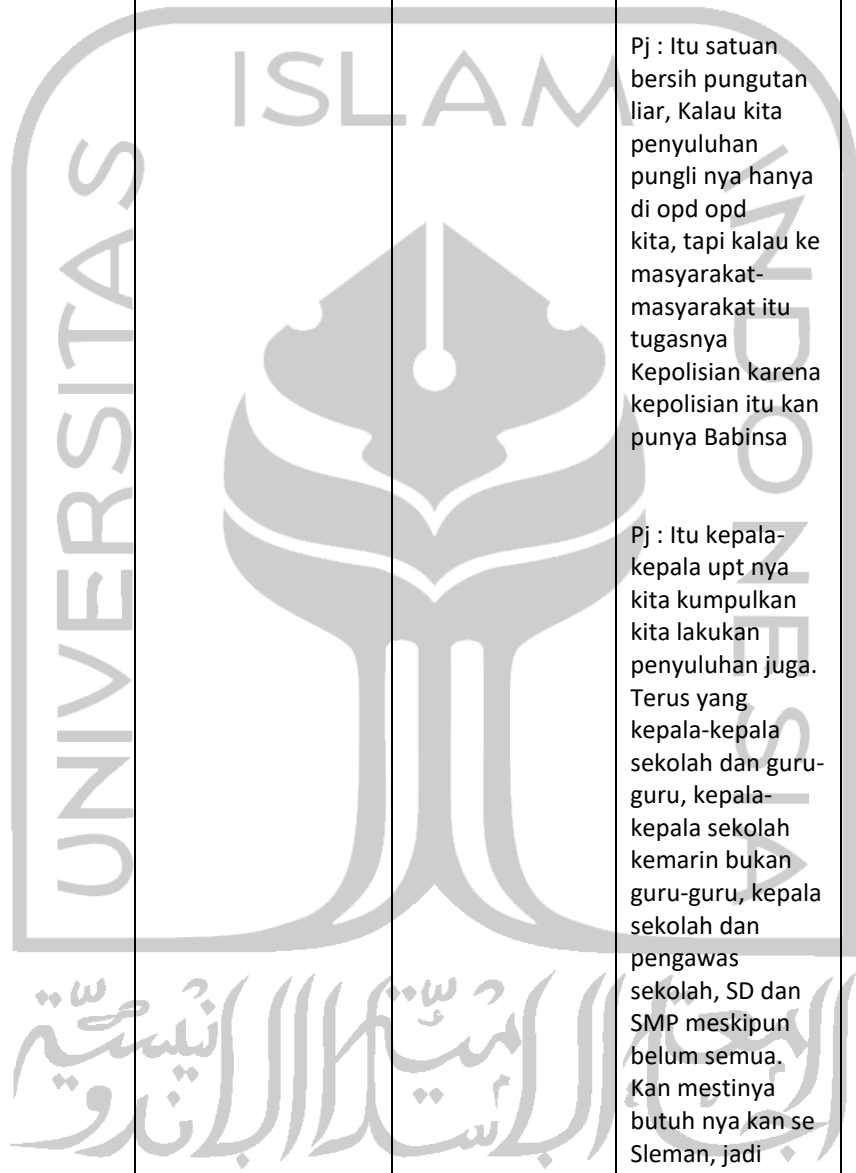
<p>terkait dengan (apa namanya) pendidikan <i>anti</i> korupsi ini tidak hanya di inspektorat, kami juga mengeluarkan mulai tahun kemarin mengeluarkan surat kami tujukan kepada seluruh OPD untuk mengirimkan personil nya guna mengikuti pelatihan atau melalui e-learning nya KPK, tapi memang belum efektif hanya beberapa OPD yang mengirimkan personil nya untuk mengikuti pelatihan tersebut. Nah ini, metode seperti ini besok tahun ini juga akan kita kirimkan lagi kepada seluruh OPD untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut melalui e-learning dari KPK gitu</p>		<p>pengecahan gratifikasi Maka hanya inspektorat yang melakukan Kita melakukan kepada seluruh opd Seluruh unit kerja, Dan kemarin kita khususkan kepada Sekolah. Sekolah SD SMP itu kita lakukan penyuluhan pencegahan gratifikasi iya</p> <p>Pj : Kan di inspektorat sebagai PG unit pengendalian gratifikasi Nya kabupaten ,Salah satu kegiatannya itu Terus yang kedua kita membagi selebaran brosur pencegahan gratifikasi kepada sub-sub unit dan juga kita menerima nah ini setiap hari raya kita mengeluarkan surat edaran yang ditandatangani oleh Bupati kepada seluruh perangkat daerah sampai desa dan</p>	
--	---	---	--

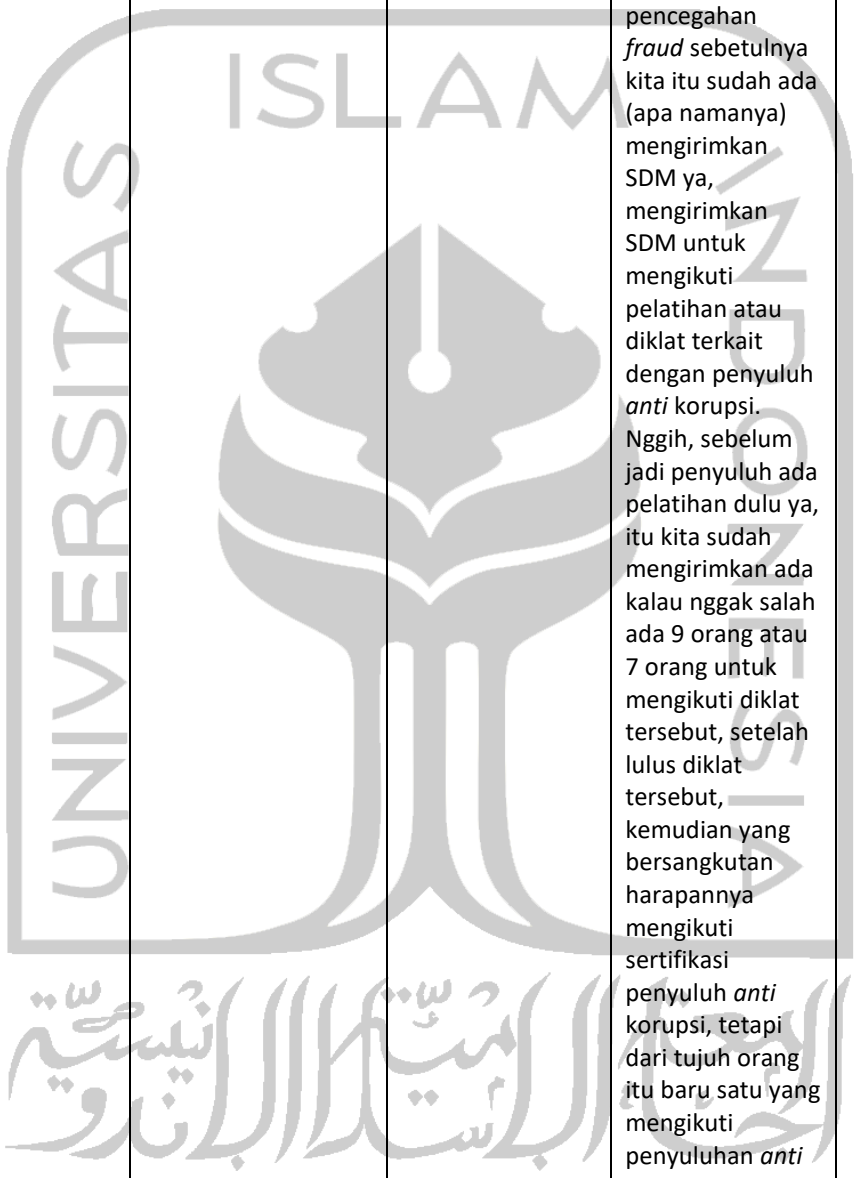
termasuk juga inspektorat. Rencananya seluruh auditor disini harus mengikuti e-learning tersebut dengan materi berbeda-beda disesuaikan dengan keinginan mereka gitu. Untuk peningkatan SDM nya begitu, kalau jumlahnya tidak bisa. Jumlahnya ya memang seperti ini, gak bisa menambah dengan seenaknya, gak bisa, hanya peningkatan kualitas

Pj : Sebetulnya kalau fokusnya sih fokus mengikuti diklat ya, tapi kalau untuk mengikuti diklat hanya sedikit sekali kesempatan yang diberikan oleh KPK. KPK itu kebanyakan e-learning melalui online jarang sekali yang melalui diklat.

kepada ini konsorsium Kelompoknya pengusaha kelompok-kelompok pengusaha koperasi Kelompok Kadit segala macam gitu kelompok pengusaha dan itu kita sampaikan pencegahan gratifikasi maksudnya tidak usah memberi ke pegawai pemerintahan. ini besok mau kita mau tekankan lagi. Salah satunya itu kemudian dari surat itu *nanti* kalau ada pelaporan penerimaan gratifikasi maka wajib melaporkan melaporkan kemarin bisa langsung ke KPK bisa juga langsung melalui UPG UPG kita *nanti* kita yang melaporkan ke KPK dan dari pengalaman ada garam yang Kok itu kayak gratifikasi Dan

	<p>Diklat itu tahun kemarin itu hanya ada satu kesempatan, jadi memang dibuka melalui online. Itu iya</p> <p>Pj : Sertifikasi nya kalau sertifikasi harus mengikuti diklat pembentukan, kalau auditor pembentukan auditor, kalau OPD pembentukan OPD. Itu syarat mendasar. Supaya mengikuti diklat tersebut ya harus bekerja di inspektorat, berarti harus mengikuti itu, lulus, baru <i>nanti</i> bisa mendapatkan sertifikat baru <i>nanti</i> diangkat menjadi auditor, setelah diangkat menjadi auditor ya <i>nanti</i> ada bukti-bukti pekerjaan, dan bukti-bukti pekerjaan itu salah satu syaratnya adalah pengembangan</p>				<p>harus kita kirim ke peminta kita kirim ke KPK,</p> <p>Pj : Itu satuan bersih pungutan liar, Kalau kita penyuluhan pungli nya hanya di opd opd kita, tapi kalau ke masyarakat-masyarakat itu tugasnya Kepolisian karena kepolisian itu kan punya Babinsa</p> <p>Pj : Itu kepala-kepala upt nya kita kumpulkan kita lakukan penyuluhan juga. Terus yang kepala-kepala sekolah dan guru-guru, kepala-kepala sekolah kemarin bukan guru-guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah, SD dan SMP meskipun belum semua. Kan mestinya butuh nya kan se Sleman, jadi kemarin baru dua Angkatan baru bisa.</p>		
--	---	--	--	--	--	--	--



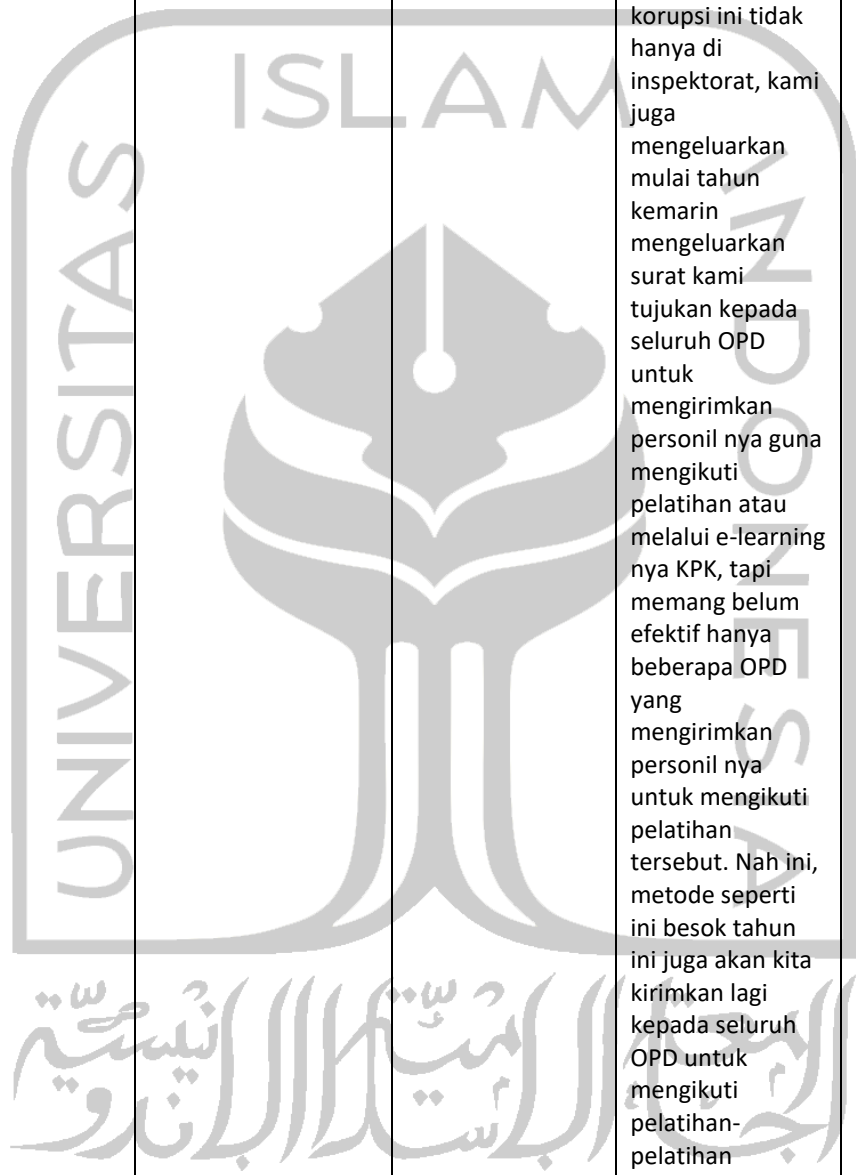
<p>profesi. Pengembangan profesionalitas itu seperti diklat diklat segala macam itu kan masuk pengembangan profesionalitas dan itu mereka itu harus. Makanya kalau yang kreatif dia mengikuti seminar, diklat-diklat online itu, pelatihan-pelatihan online itu cepat dia mendapatkan kredit pengembangan profesional</p> <p>Ibu Puji (Pj) : Kami mengirim diklat sebagian karena terbatas anggarannya, dan yang tidak mengikuti diklat kami perintahkan mengikuti e-learning. Jadi program pengembangan kompetensi ini ada yang berbayar ada yang gratis</p> <p>Pj : Kalau digital forensik belum</p>		<p>Pj : Oke, njih, kalau terkait dengan untuk pencegahan <i>fraud</i> sebetulnya kita itu sudah ada (apa namanya) mengirimkan SDM ya, mengirimkan SDM untuk mengikuti pelatihan atau diklat terkait dengan penyuluh <i>anti</i> korupsi. Nggih, sebelum jadi penyuluh ada pelatihan dulu ya, itu kita sudah mengirimkan ada kalau nggak salah ada 9 orang atau 7 orang untuk mengikuti diklat tersebut, setelah lulus diklat tersebut, kemudian yang bersangkutan harapannya mengikuti sertifikasi penyuluh <i>anti</i> korupsi, tetapi dari tujuh orang itu baru satu yang mengikuti penyuluhan <i>anti</i> korupsi, tadinya dua yang mengikuti tapi yang lulus baru</p>		
--	---	---	--	--

ada, tapi kita sudah mengikutkan itu kemarin satu orang mengikuti diklat digital forensik



satu, jadi kita baru mempunyai penyuluh *anti* korupsi yang telah bersertifikat oleh KPK itu satu orang, tetapi meskipun demikian, ketujuh orang yang pernah kita diklatkan pencegah *anti* korupsi ini juga bisa dimanfaatkan dalam rangka sosialisasi ke OPD-OPD. Kemudian kalau dibidang investigasi itu kan kegiatannya tidak hanya investigasi saja tapi juga reformasi birokrasi, itu memang personilnya baru delapan orang. Meskipun demikian bisa dibantu dengan bidang yang lain karena ketujuh orang itu tidak seluruhnya itu menyebar di bidang lain yang sudah mendapatkan pelatihan terkait dengan pencegahan korupsi. Kemudian untuk





ke depannya terkait dengan (apa namanya) pendidikan *anti* korupsi ini tidak hanya di inspektorat, kami juga mengeluarkan mulai tahun kemarin mengeluarkan surat kami tujukan kepada seluruh OPD untuk mengirimkan personil nya guna mengikuti pelatihan atau melalui e-learning nya KPK, tapi memang belum efektif hanya beberapa OPD yang mengirimkan personil nya untuk mengikuti pelatihan tersebut. Nah ini, metode seperti ini besok tahun ini juga akan kita kirimkan lagi kepada seluruh OPD untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut melalui e-learning dari KPK gitu termasuk juga

inspektorat.  
Rencananya  
seluruh auditor  
disini harus  
mengikuti e-  
learning tersebut  
dengan materi  
berbeda-beda  
d disesuaikan  
dengan keinginan  
mereka gitu.  
Untuk  
peningkatan SDM  
nya begitu, kalau  
jumlahnya tidak  
bisa. Jumlahnya  
ya memang  
seperti ini, gak  
bisa menambah  
dengan  
seenaknya, gak  
bisa, hanya  
peningkatan  
kualitas

الجمعة الإسلامية الاندونيسية

<p>5 : Ngatiah, S.H.</p>	<p>G Diklat-diklat ya, kemarin belum lama juga saya sama bu heri itu diklat audit investigasi terus ada diklat PPKN kayak gitu terus <i>nanti</i> sosialisasi-sosialisasi itu disamping kita memberi kita dapat juga dari KPK ya, terus dari yang MCB itu juga mcb dari KPK itu kan banyak sekali indikator-indikatornya harus dipenuhi pemda ya itu kan diharapkan dapat mencegah <i>fraud</i> itu juga karna disitu banyak sekali laporan-laporan yang seperti apa sudah dilakukan oleh pemda terkait dengan pencegahannya, penindakannya, maupun itu.</p> <p>Rz Lalu untuk sertifikasi ini bu penyuluh <i>anti</i> korupsi G Sini kayaknya baru ada satu</p>	<p>G Diklat-diklat ya, kemarin belum lama juga saya sama bu heri itu diklat audit investigasi terus ada diklat PPKN kayak gitu terus <i>nanti</i> sosialisasi-sosialisasi itu disamping kita memberi kita dapat juga dari KPK ya, terus dari yang MCB itu juga mcb dari KPK itu kan banyak sekali indikator-indikatornya harus dipenuhi pemda ya itu kan diharapkan dapat mencegah <i>fraud</i> itu juga karna disitu banyak sekali laporan-laporan yang seperti apa sudah dilakukan oleh pemda terkait dengan pencegahannya, penindakannya, maupun itu.</p> <p>Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya</p>	<p>G Biasanya di keuangannya sih, di pengelolaan keuangan, kalau aset aset kayak gitu enggak sih, soalnya aset juga kita pantau terus, kalau misalnya ada kehilangan aset itu kita telusuri, kan kalau inspektorat kan tugasnya memang sampai disitu juga ya, kalau ada aset yang hilang kita telusuri ada unsur kelalaian gak? Seperti apa kayak gitu? Trus kita juga punya aplikasi SIM aset itu untuk menginventarisasi semua aset, jadi sudah <i>diantisipasi</i> sih kalau aset-asetnya sendiri</p> <p>Rz Kalau untuk ini bu mendampingi perangkat desa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya termasuk bisa mencegah <i>fraud</i> gak bu pendampingan itu? G Bisa juga sih. Mereka kan misalnya ya mau pengadaan barang jasa atau mau</p>	<p>Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya mas ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p> <p>G Maksudnya yang diluar <i>fraud</i> tapi bisa menunjang <i>fraud</i> gak? Gitu ya?, kalau aku sih bisa juga sih, kan misalnya pengembangan kompetensi kita</p>	<p>G Kemarin diklatnya banyak yang mengikuti yang sampai mendapat sertifikasi penyuluhnya itu baru, karna mungkin ini ya kesibukannya yang lain jadi mereka juga ini sih kalau jadi penyuluh itu kan harus pakai angka kredit ini juga kan mereka juga jadi belum ke sana sih, tapi yang diklat juga ada sih korupsi itu, sementara yang sudah sertifikasi itu baru bu tintin terus sekarang sering penyuluhan kemana-mana juga sih seperti itu</p> <p>Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu</p>	<p>G Kalau deteksi <i>fraud</i> itu kita kan ada pemeriksaan seperti itu, <i>nanti</i> kan kita lihat bukti, misalkan pengadaan ini bukti pertanggungjawabannya seperti ini, kan kita ya, terus <i>nanti</i> kita konfirmasi ke pihak ketiga kalau sudah bener apa belum kayak gitu <i>nanti</i> ada temuan-temuan yang harus ditindak lanjuti dan di evaluasi seperti itu, deteksinya dari situ sih kalau kita, di OPD juga kita periksa, <i>nanti</i> ada penyimpangan-penyimpangan kan kelihatan dari hasil pemeriksaan kami seperti itu ya</p> <p>Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya</p>	<p>Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya mas ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p> <p>G Maksudnya yang diluar <i>fraud</i> tapi bisa menunjang <i>fraud</i> gak? Gitu ya?, kalau aku sih bisa juga sih, kan misalnya pengembangan kompetensi kita mendapat sosialisasi tentang kesehatan lah kayak gitu ya, tentang</p>
----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

<p>apa ya, bu tintin itu Rz Kalau pegawai lainnya apa ada mengikuti? G Kemarin diklatnya banyak yang mengikuti yang sampai mendapat sertifikasi penyuluhnya itu baru, karna mungkin ini ya kesibukannya yang lain jadi mereka juga ini sih kalau jadi penyuluh itu kan harus pakai angka kredit ini juga kan mereka juga jadi belum ke sana sih, tapi yang diklat juga ada sih diklat penyuluh korupsi itu, sementara yang sudah sertifikasi itu baru bu tintin terus sekarang sering penyuluhan kemana-mana juga sih seperti itu</p> <p>G Maksudnya yang diluar <i>fraud</i> tapi bisa menunjang <i>fraud</i> gak? Gitu</p>	<p>G Itu sih saling berhubungan ya mas ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p> <p>G Maksudnya yang diluar <i>fraud</i> tapi bisa menunjang <i>fraud</i> gak? Gitu ya?, kalau aku sih bisa juga sih, kan misalnya pengembangan kompetensi kita mendapat sosialisasi tentang kesehatan lah kayak gitu ya, tentang kesehatan, tentang TIK, tentang apa padahal kita kan meriksanya itu kita nyari <i>fraud</i>nya di masing-masing opd dibanyak opd yang memang kayak misalnya kita ke rumah sakit kita butuh juga ilmu kesehatan kan jadi menunjang juga ya mas ya misalnya kita sosialisasi atau</p>	<p>pengadaan tanah kas desa kan mereka juga konsultasi dulu ke kami nggih seperti apa <i>nanti</i> biar gak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya seperti itu.</p> <p>Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya mas ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p> <p>G Maksudnya yang</p>	<p>mendapat sosialisasi tentang kesehatan lah kayak gitu ya, tentang kesehatan, tentang TIK, tentang apa padahal kita kan meriksanya itu kita nyari <i>fraud</i>nya di masing-masing opd dibanyak opd yang memang kayak misalnya kita ke rumah sakit kita butuh juga ilmu kesehatan kan jadi menunjang juga ya mas ya misalnya kita sosialisasi atau dapat sosialisasi kesehatan tentang ini, ini, ini terus kita ke rumah sakit gitu meriksa itu kan <i>nanti</i> bisa dipakai lah gitu, terus misalnya tentang teknologi informasi kita ke kominfo disitu ada aplikasi-aplikasi apa yang kita gak tau, karna kita tadi sudah workshop apa diklat ini kan bisa menunjang</p>	<p>gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya mas ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p> <p>G Maksudnya yang diluar <i>fraud</i> tapi bisa menunjang <i>fraud</i> gak? Gitu ya?, kalau aku sih bisa juga sih, kan misalnya pengembangan kompetensi kita mendapat sosialisasi tentang kesehatan lah kayak gitu ya, tentang kesehatan, tentang TIK, tentang apa padahal kita kan meriksanya itu</p>	<p>mas ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p> <p>G Maksudnya yang diluar <i>fraud</i> tapi bisa menunjang <i>fraud</i> gak? Gitu ya?, kalau aku sih bisa juga sih, kan misalnya pengembangan kompetensi kita mendapat sosialisasi tentang kesehatan lah kayak gitu ya, tentang kesehatan, tentang TIK, tentang apa padahal kita kan meriksanya itu kita nyari <i>fraud</i>nya di masing-masing opd dibanyak opd yang memang kayak misalnya kita ke rumah sakit kita butuh juga ilmu kesehatan kan jadi menunjang juga ya mas ya misalnya kita sosialisasi atau</p>	<p>kesehatan, tentang TIK, tentang apa padahal kita kan meriksanya itu kita nyari <i>fraud</i>nya di masing-masing opd dibanyak opd yang memang kayak misalnya kita ke rumah sakit kita butuh juga ilmu kesehatan kan jadi menunjang juga ya mas ya misalnya kita sosialisasi atau dapat sosialisasi kesehatan tentang ini, ini, ini terus kita ke rumah sakit gitu meriksa itu kan <i>nanti</i> bisa dipakai lah gitu, terus misalnya tentang teknologi informasi kita ke kominfo disitu ada aplikasi-aplikasi apa yang kita gak tau, karna kita tadi sudah workshop apa diklat ini kan bisa menunjang kesitu soalnya saking luasnya cakupan kita ya, jadi semuanya bisa masuk, kan kalau auditor kan mau dituntut tau segala hal karena kita memang obrik nya, objek pemeriksaannya kan banyak,</p>
--	---	--	---	--	---	---

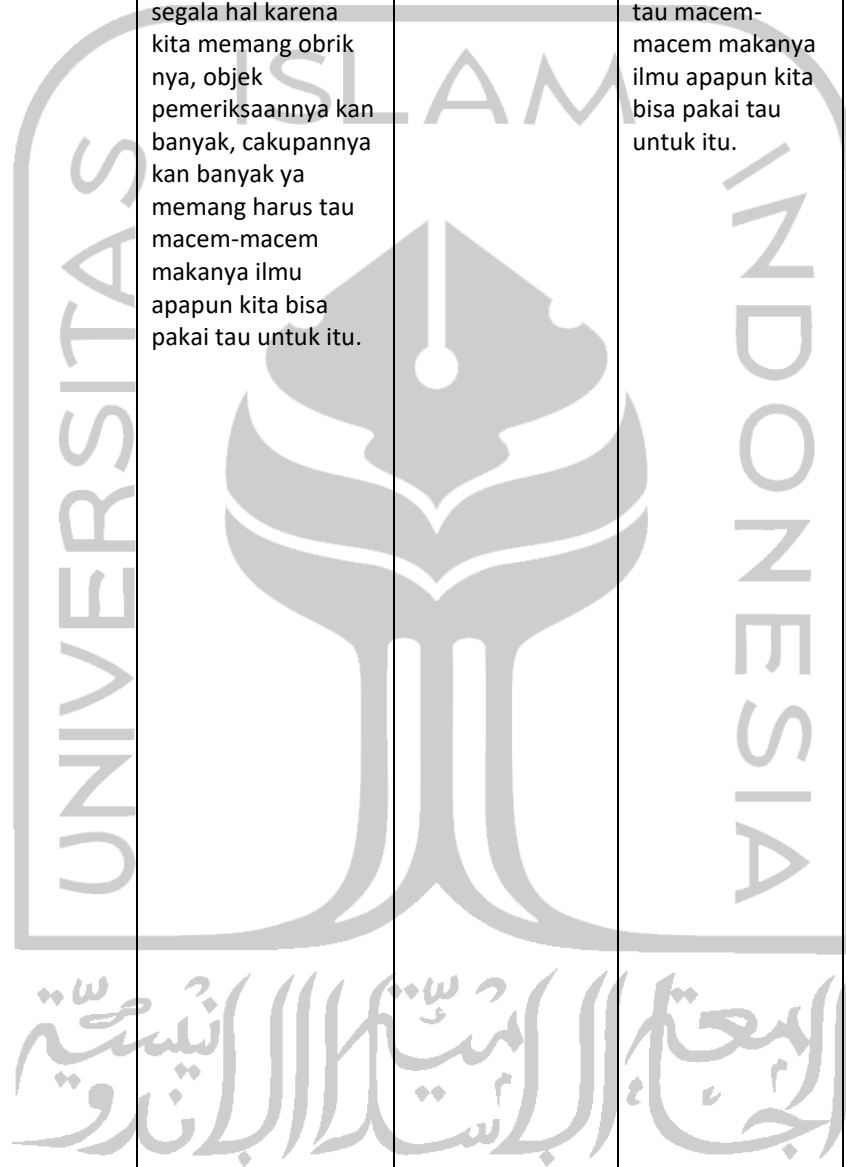
<p>ya?, kalau aku sih bisa juga sih, kan misalnya pengembangan kompetensi kita mendapat sosialisasi tentang kesehatan lah kayak gitu ya, tentang kesehatan, tentang TIK, tentang apa padahal kita kan meriksanya itu kita nyari <i>fraud</i>nya di masing-masing opd dibanyak opd yang memang kayak misalnya kita ke rumah sakit kita butuh juga ilmu kesehatan kan jadi menunjang juga ya mas ya misalnya kita sosialisasi atau dapat sosialisasi kesehatan tentang ini,ini,ini terus kita ke rumah sakit gitu meriksa itu kan <i>nanti</i> bisa dipakai lah gitu, terus misalnya tentang teknologi informasi kita ke kominfo disitu ada aplikasi-aplikasi apa yang kita gak tau, karna kita tadi sudah workshop apa diklat ini kan bisa menunjang kesitu soalnya saking luasnya cakupan kita ya, jadi semuanya bisa masuk, kan kalau auditor kan mau dituntut tau segala hal karena kita memang obrik nya, objek pemeriksaannya kan banyak, cakupannya kan banyak ya memang harus tau macam-macam makanya ilmu apapun kita bisa pakai tau untuk itu.</p>	<p>dapat sosialisasi kesehatan tentang ini,ini,ini terus kita ke rumah sakit gitu meriksa itu kan <i>nanti</i> bisa dipakai lah gitu, terus misalnya tentang teknologi informasi kita ke kominfo disitu ada aplikasi-aplikasi apa yang kita gak tau, karna kita tadi sudah workshop apa diklat ini kan bisa menunjang kesitu soalnya saking luasnya cakupan kita ya, jadi semuanya bisa masuk, kan kalau auditor kan mau dituntut tau segala hal karena kita memang obrik nya, objek pemeriksaannya kan banyak, cakupannya kan banyak ya memang harus tau macam-macam makanya ilmu apapun kita bisa pakai tau untuk itu.</p>	<p>diluar <i>fraud</i> tapi bisa menunjang <i>fraud</i> gak? Gitu ya?, kalau aku sih bisa juga sih, kan misalnya pengembangan kompetensi kita mendapat sosialisasi tentang kesehatan lah kayak gitu ya, tentang kesehatan, tentang TIK, tentang apa padahal kita kan meriksanya itu kita nyari <i>fraud</i>nya di masing-masing opd dibanyak opd yang memang kayak misalnya kita ke rumah sakit kita butuh juga ilmu kesehatan kan jadi menunjang juga ya mas ya misalnya kita sosialisasi atau dapat sosialisasi kesehatan tentang ini,ini,ini terus kita ke rumah sakit gitu meriksa itu kan <i>nanti</i> bisa dipakai lah gitu, terus misalnya tentang teknologi informasi kita ke kominfo disitu ada aplikasi-aplikasi apa yang kita gak tau, karna kita tadi sudah workshop apa diklat ini kan bisa menunjang kesitu soalnya saking luasnya cakupan kita</p>	<p>kesitu soalnya saking luasnya cakupan kita ya, jadi semuanya bisa masuk, kan kalau auditor kan mau dituntut tau segala hal karena kita memang obrik nya, objek pemeriksaannya kan banyak, cakupannya kan banyak ya memang harus tau macam-macam makanya ilmu apapun kita bisa pakai tau untuk itu.</p>	<p>kita nyari <i>fraud</i>nya di masing-masing opd dibanyak opd yang memang kayak misalnya kita ke rumah sakit kita butuh juga ilmu kesehatan kan jadi menunjang juga ya mas ya misalnya kita sosialisasi atau dapat sosialisasi kesehatan tentang ini,ini,ini terus kita ke rumah sakit gitu meriksa itu kan <i>nanti</i> bisa dipakai lah gitu, terus misalnya tentang teknologi informasi kita ke kominfo disitu ada aplikasi-aplikasi apa yang kita gak tau, karna kita tadi sudah workshop apa diklat ini kan bisa menunjang kesitu soalnya saking luasnya cakupan kita ya, jadi semuanya bisa masuk, kan kalau auditor kan mau dituntut tau segala hal karena kita memang obrik nya, objek pemeriksaannya</p>	<p>dapat sosialisasi kesehatan tentang ini,ini,ini terus kita ke rumah sakit gitu meriksa itu kan <i>nanti</i> bisa dipakai lah gitu, terus misalnya tentang teknologi informasi kita ke kominfo disitu ada aplikasi-aplikasi apa yang kita gak tau, karna kita tadi sudah workshop apa diklat ini kan bisa menunjang kesitu soalnya saking luasnya cakupan kita ya, jadi semuanya bisa masuk, kan kalau auditor kan mau dituntut tau segala hal karena kita memang obrik nya, objek pemeriksaannya kan banyak, cakupannya kan banyak ya memang harus tau macam-macam makanya ilmu apapun kita bisa pakai tau untuk itu.</p>	<p>cakupannya kan banyak ya memang harus tau macam-macam makanya ilmu apapun kita bisa pakai tau untuk itu.</p>
--	--	---	---	---	--	---

aplikasi apa yang kita gak tau, karna kita tadi sudah workshop apa diklat ini kan bisa menunjang kesitu soalnya saking luasnya cakupan kita ya, jadi semuanya bisa masuk, kan kalau auditor kan mau dituntut tau segala hal karena kita memang obriknnya, objek pemeriksaannya kan banyak, cakupannya kan banyak ya memang harus tau macam-macam makanya ilmu apapun kita bisa pakai tau untuk itu.

G Kalau kesempatan sih ini sih semuanya pengen, Cuma karena keterbatasan anggaran jadi gak bisa semua, kayak kemarin yang diklat investigasi cuman dua orang yang dikirim, karena memang

ya, jadi semuanya bisa masuk, kan kalau auditor kan mau dituntut tau segala hal karena kita memang obriknnya, objek pemeriksaannya kan banyak, cakupannya kan banyak ya memang harus tau macam-macam makanya ilmu apapun kita bisa pakai tau untuk itu.

kan banyak, cakupannya kan banyak ya memang harus tau macam-macam makanya ilmu apapun kita bisa pakai tau untuk itu.

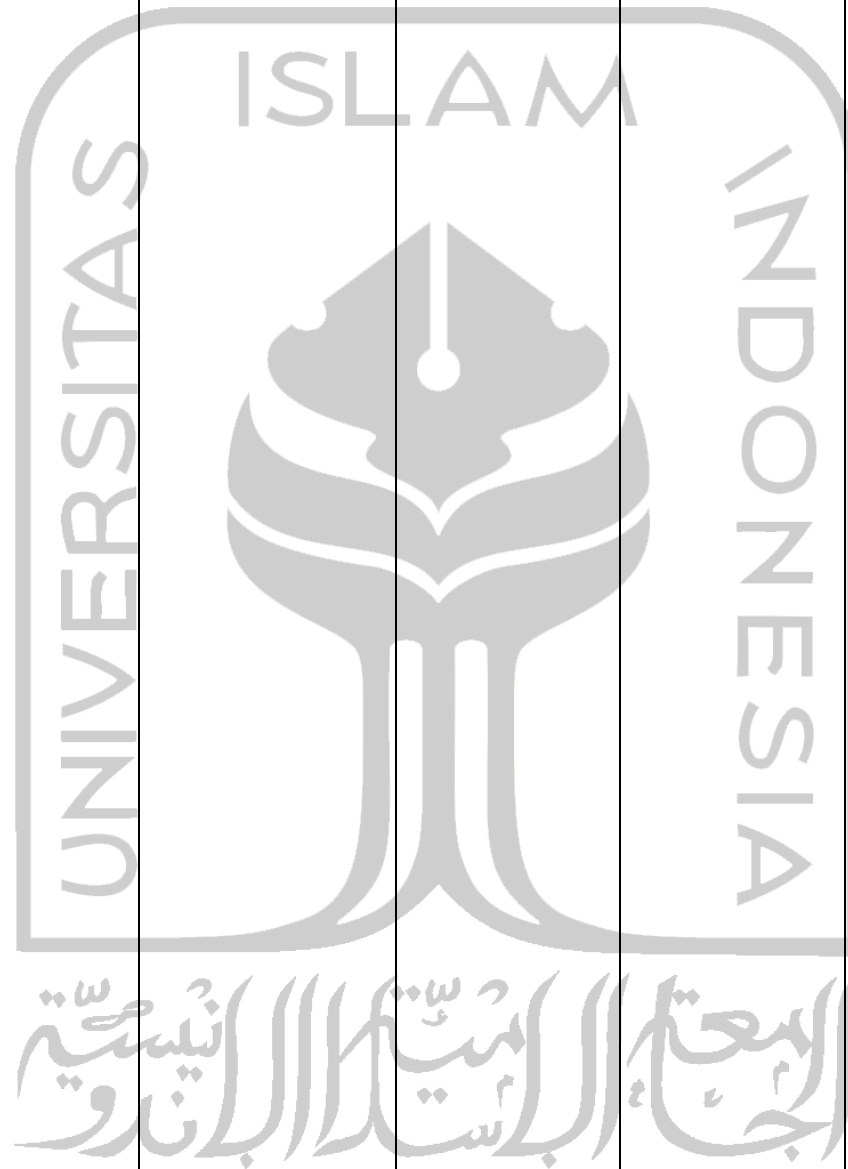


biayanya lumayan juga ya sekali diklat kadang sampai lima juta berapa kayak gitu kan, jadi memang yang dikirim gak bisa semuanya, jadi harapannya memang yang dikirim *nanti* bisa inilah kita kan ada pelatihan kantor sendiri, mungkin disampaikan disitu lah, kalau gak materinya disampaikan ke temen-temen biar semuanya tau juga kayak gitu, selama ini kita seperti itu sih kalau memang gak bisa ikut diklat semua, yang diklat itu yang anu temen-temennya lah itu. Kalau diklat kan disini ada diklat sertifikasi, diklat fungsional sendiri sama diklat teknis ya, kalau yang sertifikasi sih karna tuntunan peran jadi memang harus diklat sih seperti



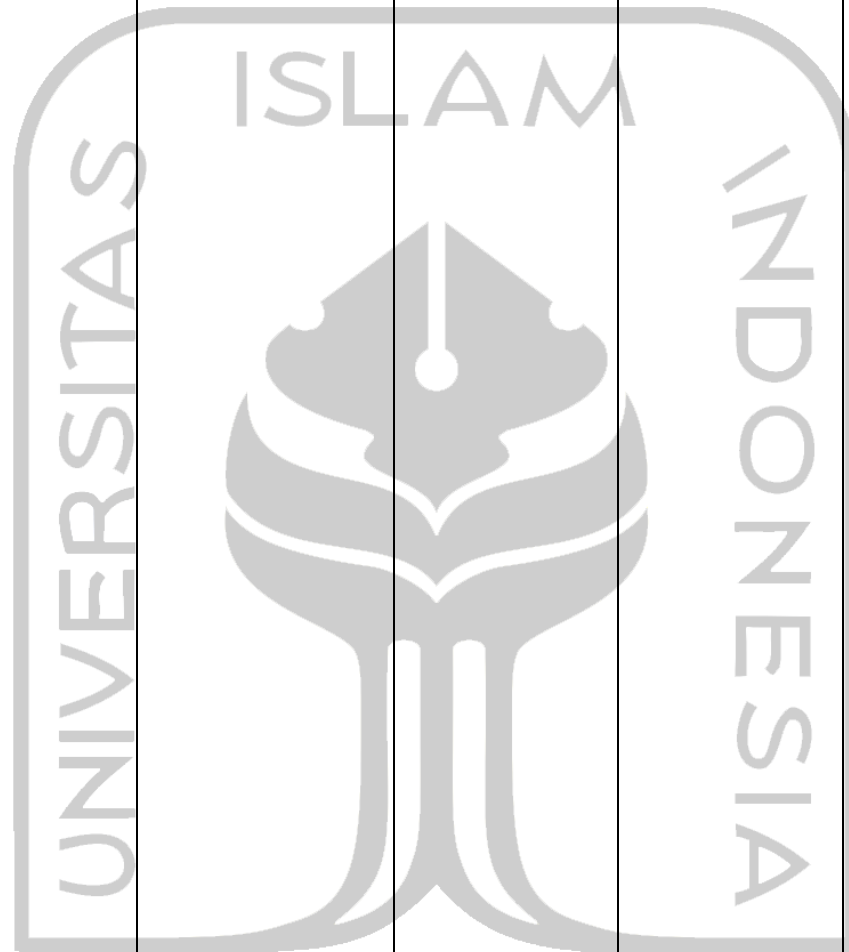
itu jadi misalnya kayak auditor itu ada bentuk tim ada ketua tim, ada pengendali teknis ya itu masing-masing kalau naik peran gitu harus diklat memang, harus lulus, harus diklat dan harus lulus seperti itu

G Untuk orang luar gitu ya? Kita sering juga sih kalau misalnya kita pengen maksudnya gini kita pengen materi sesuatu maksudnya kayak gitu ya materi tentang apa yang belum kita ketahui kita sering juga sih disamping kita cari narasumber dari luar tentang materi apa yang kita minta itu, kita kerja sama lah sama luar itu, kita pengennya diklat ini loh kayak gitu kalau kita kalau ada anggaran dikita, kalau enggak ya kita ikuti aja diklat yang kita adakan di luar





atau workshop-  
workshop apa  
berkaitan  
tentang gitu



الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

<p>6 : Pipit Tyas Ratna Puspita, S.H., MPA.</p>	<p>P : Oh digital forensik untuk investigatif, jadi kalau yang kaitannya dengan SDM, itu peningkatan kompetensinya, tahun ini itu sudah tiga kali pengiriman diklat yang kaitannya sama investigatif, perhitungan keuangan negara, dan forensik untuk audit investigatif. Kalau untuk teknologi,</p> <p>P : Sama sih, kalau investigasi itu kan anu ya lebih ke maksudnya tujuannya pemeriksaan, sebetulnya kalau tekniknya mengaudit dan lain-lain itu sama, cuma kalau investigasi mungkin secara prosedural sama secara tujuannya untuk pemeriksaan itu berbeda, jadi memang ada</p>	<p>P : Kalau yang tadi kaitannya dengan pemeriksaan yang dikhususkan ketika sudah ada, jadi dari pemeriksaan reguler terus kemudian diketahui ada kecurangan terus dilanjutkan dengan khusus pemeriksaan kasus dengan lebih diperdalam di penyimpangannya ya. Tapi kalau yang untuk pemeriksaan-pemeriksaan reguler itu biasanya kami identifikasinya kami sebelum melakukan pemeriksaan itu ada identifikasi risiko, disitukan termasuk mengidentifikasi program-program krusial yang dikerjakan oleh OPD sebelum kami masuk biasanya kan kami identifikasi risikonya dulu, kayak misalnya pemeriksaan desa, pengawasan desa. Itu kita mengidentifikasi risikonya itu dari ketepatan pelaporan terus pertanggungjawaban terus banyak tidaknya temuan itu termasuk salah satu</p>	<p>P : Kalau yang tadi kan kaitannya dengan pemeriksaan yang dikhususkan ketika sudah ada, jadi dari pemeriksaan reguler terus kemudian diketahui ada kecurangan terus dilanjutkan dengan khusus pemeriksaan kasus dengan lebih diperdalam di penyimpangannya ya. Tapi kalau yang untuk pemeriksaan-pemeriksaan reguler itu biasanya kami identifikasinya kami sebelum melakukan pemeriksaan itu ada identifikasi risiko, disitukan termasuk mengidentifikasi program-program krusial yang dikerjakan oleh OPD sebelum kami masuk biasanya kan kami identifikasi risikonya dulu, kayak misalnya pemeriksaan</p>	<p>P : Kalau selama ini belum eksplisit sebagai investigasi gitu, pernah ada selain pengembangan dari pemeriksaan sendiri laporan OPD, juga pernah ada permintaan dari APH memang, permintaan untuk kami inspektorat melakukan pemeriksaan kasus yang mereka tangani, nah waktu itu juga pernah investigatif, pernah di PKKN, Cuma waktu itu PKKN nya tidak jadi, jadi kalau yang ini memang kalau proses investigasi tergantung ya mas, tergantung kalau misalnya permintaan APH ya berarti kita tergantung permintaan APH, suplai data ke kita apa, mereka maunya kita meriksa apa, ini sudah terfokus. Kalau yang investigasi yang dari laporan OPD juga kebanyakan sudah mengerucut ya bu</p>	<p>P : Kalau yang tadi kan kaitannya dengan pemeriksaan yang dikhususkan ketika sudah ada, jadi dari pemeriksaan reguler terus kemudian diketahui ada kecurangan terus dilanjutkan dengan khusus pemeriksaan kasus dengan lebih diperdalam di penyimpangannya ya. Tapi kalau yang untuk pemeriksaan-pemeriksaan reguler itu biasanya kami identifikasinya kami sebelum melakukan pemeriksaan itu ada identifikasi risiko, disitukan termasuk mengidentifikasi program-program krusial yang dikerjakan oleh OPD sebelum kami masuk biasanya kan kami identifikasi risikonya dulu, kayak misalnya pemeriksaan desa, pengawasan desa. Itu kita mengidentifikasi risikonya itu dari ketepatan pelaporan terus pertanggungjawaban</p>
---	---	---	---	---	--

<p>diklatnya sendiri sih, investigasi, terus penghitungan keuangan negara yang berkaitan dengan ini ya yang <i>fraud</i> ini, itu ada, terus kemarin ada juga digital forensik untuk investigasi jadi emang temanya sudah disesuaikan sama, dan mereka biasanya di kami biasanya ngikut alurnya bpkp sebagai pembina sama kpk biasanya yang menentukan jadi kebanyakan kita tidak merancang sendiri pengembangan kompetensi ini kecuali yang pelatihan tadi, kalau pelatihan tadi kan sesuai kebutuhan kita sedang menanggapi kasus apa biasanya sekali konsultasi sekalian dibuat workshopnya</p> <p>P : Biasanya kami koordinasinya</p>	<p>yang dipertimbangkan kita untuk memilih objek yang akan kami periksa, nah disitu termasuk cara mengidentifikasi disitu apakah kemungkinan terjadi ketidaktertiban belum tentu penyimpangan, maksudnya itu identifikasi awal di desa itu tertib apa enggak dari situ.</p> <p>P : Oh digital forensik untuk investigatif, jadi kalau yang kaitannya dengan SDM, itu peningkatan kompetensinya, tahun ini itu sudah tiga kali pengiriman diklat yang kaitannya sama investigatif, perhitungan keuangan negara, dan forensik untuk audit investigatif. Kalau untuk teknologi,</p>		<p>desa, pengawasan desa. Itu kita mengidentifikasi risikonya itu dari ketepatan pelaporan terus pertanggungjawaban terus banyak tidaknya temuan itu termasuk salah satu yang dipertimbangkan kita untuk memilih objek yang akan kami periksa, nah disitu termasuk cara mengidentifikasi disitu apakah kemungkinan terjadi ketidaktertiban belum tentu penyimpangan, maksudnya itu identifikasi awal di desa itu tertib apa enggak dari situ.</p> <p>P : Oh digital forensik untuk investigatif, jadi kalau yang kaitannya dengan SDM, itu peningkatan kompetensinya, tahun ini itu sudah tiga kali pengiriman diklat</p>	<p>ya,</p>		<p>n terus banyak tidaknya temuan itu termasuk salah satu yang dipertimbangkan kita untuk memilih objek yang akan kami periksa, nah disitu termasuk cara mengidentifikasi disitu apakah kemungkinan terjadi ketidaktertiban belum tentu penyimpangan, maksudnya itu identifikasi awal di desa itu tertib apa enggak dari situ.</p>
---	--	--	---	------------	--	--

	<p>anu ya bu sama balai diklat pengawasnya bpkp sama balai diklatnya bpk itu kalau mereka programnya ya langsung pengawasan, jadi kami seringnya ngikut diklat yang digratisin</p> <p>Rz : Kalau untuk program intinya yang untuk pengembangan kompetensi SDM tu berarti diklat tadi yang paling inti ya kalau yang lainnya</p> <p>P : Iya</p>			<p>yang kaitannya sama investigatif, perhitungan keuangan negara, dan forensik untuk audit investigatif. Kalau untuk teknologi,</p> <p>P : Kalau selama ini belum eksplisit sebagai investigasi gitu, pernah ada selain pengembangan dari pemeriksaan sendiri laporan OPD, juga pernah ada permintaan dari APH memang, permintaan untuk kami inspektorat melakukan pemeriksaan kasus yang mereka tangani, nah waktu itu juga pernah investigatif, pernah di PKN, Cuma waktu itu PKN nya tidak jadi, jadi kalau yang ini memang kalau proses investigasi tergantung ya mas, tergantung kalau misalnya permintaan APH ya berarti kita tergantung</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

permintaan APH, suplai data ke kita apa, mereka maunya kita meriksa apa, ini sudah terfokus. Kalau yang investigasi yang dari laporan OPD juga kebanyakan sudah mengerucut ya bu ya,

P : Sama sih, kalau investigasi itu kan anu ya lebih ke maksudnya tujuannya pemeriksaan, sebetulnya kalau tekniknya mengaudit dan lain-lain itu sama, cuma kalau investigasi mungkin secara prosedural sama secara tujuannya untuk pemeriksaan itu berbeda, jadi memang ada diklatnya sendiri sih, insvestigasi, terus penghitungan keuangan negara yang berkaitan dengan ini ya yang *fraud* ini, itu ada, terus

kemarin ada juga digital forensik untuk investigasi jadi emang temanya sudah disesuaikan sama , dan mereka biasanya di kami biasanya ngikut alurnya bpkp sebagai pembina sama kpk biasanya yng menentukan jadi kebanyakan kita tidak merancang sendiri pengembangan kompetensi ini kecuali yang pelatihan tadi, kalau pelatihan tadi kan sesuai kebutuhan kita sedang menangani kasus apa biasanya sekali konsultasi sekalian dibuat workshopnya

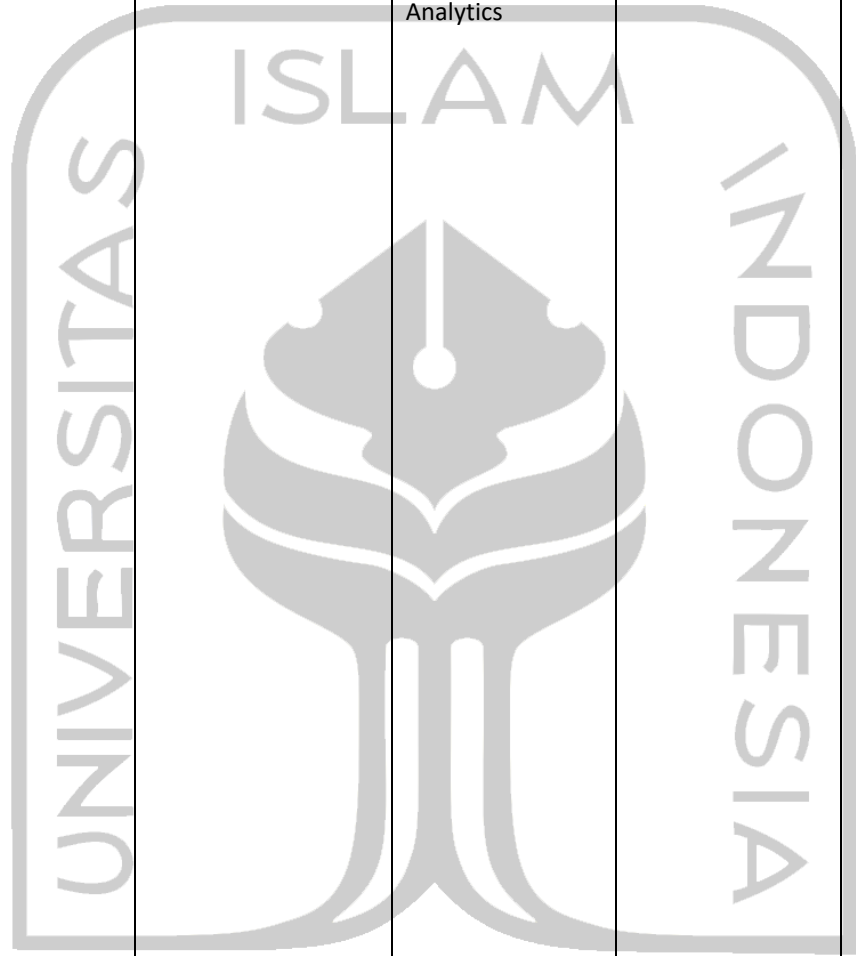
الجمعة الإسلامية الإلكترونية

<p>7 : Retno Isni Satiti</p>	<p>Rno Oh ya, saya begitu bulan Maret dapat SK Surat Perintah Melaksanakan Tugas di bidang itu memang saya dikirim dengan anggaran BKPP Anggarannya BKPP, tapi by name-nya kebetulan saya sama Mbak Pipit, mungkin Mbak Pipit pernah ketemu, kami di diklat kan PKKN, Penghitungan kerugian keuangan negara. Keuangan negara itu kan di dalamnya keuangan daerah ya, kalau kita bicara keuangan negara itu ya keuangan seluruh bukan yang cuma di APBN, enggak, maksudnya di APBD, BUMD kita seperti itu</p> <p>Rno Oh, enggak, enggak seperti itu mas. Jadi auditor, seorang auditor. Ketika</p>	<p>Rno Oh ya, saya begitu bulan Maret dapat SK Surat Perintah Melaksanakan Tugas di bidang itu memang saya dikirim dengan anggaran BKPP, tapi by name-nya kebetulan saya sama Mbak Pipit, mungkin Mbak Pipit pernah ketemu, kami di diklat kan PKKN, Penghitungan kerugian keuangan negara. Keuangan negara itu kan di dalamnya keuangan daerah ya, kalau kita bicara keuangan negara itu ya keuangan seluruh bukan yang cuma di APBN, enggak, maksudnya di APBD, BUMD kita seperti itu</p> <p>Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku saya auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak mengembangkan diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas membantu untuk</p>	<p>Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku saya auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak</p>	<p>Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku saya auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak</p>	<p>Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku saya auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak</p>	<p>Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku saya auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak</p>	<p>Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku saya auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak mengembangkan diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas</p>
------------------------------	---	--	---	---	---	---	---

<p>dia mau menjadi fungsional auditor, di awal sudah dibentuk dengan diklat. Yang diikuti diklat sertifikasi ya. Lulus peran misalnya auditor terampil, auditor muda, auditor terampil itu anggota tim, auditor ahli muda itu ketua tim, auditor madya itu pengendali teknis. Nah Ketika sebelum dibentuk itu, kami itu sudah dilalui seleksi saat itu.</p> <p>Rno Kemarin ada satu mbak untuk lebih digital forensik, barusan ada yang diklat namanya mbak Tiwi, dan dia kemarin hasilnya luar biasa.</p>	<p>struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku saya auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak mengembangkan diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas membantu untuk pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p>	<p>pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p>	<p>mengembangkan diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas membantu untuk pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p>	<p>mengembangkan diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas membantu untuk pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p>	<p>membantu untuk pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p>	<p>membantu untuk pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p> <p>Rno Kemarin ada satu mbak untuk lebih digital forensik, barusan ada yang diklat namanya mbak Tiwi, dan dia kemarin hasilnya luar biasa.</p>
--	---	---	--	--	--	---



Narasumber	I : 7. Diklat Pembentukan Auditor	J : b. Workshop	K : 1. Workshop Evaluasi Penilaian SKPD	L : 2. Workshop Pemanfaatan Digital Forensics dan Data Analytics	M : 3. Workshop Teknik Penilaian Risiko Level Kegiatan	N : 4. Workshop PKN	O : c. E-Learning
------------	-----------------------------------	-----------------	---	--	--	---------------------	-------------------



الجامعة الإسلامية الاندونيسية

<p>1 : Heri Setyawati , S.E., M.Acc.</p>	<p>H : Kalau mengidentifikasi kebutuhan kompetensi SDM, artinya ini bukan dari awal ya, artinya kan kita itu pokoknya pegawai inspektorat, yang diberdayakan ya juga itu, artinya kita tidak mencari-mencari awal untuk SDM yang memang mau didudukkan di investigasi itu enggak, ini dari awal memang adanya ini, kemudian ditata ulang dengan adanya bidang baru kek gitu bidang investigasi, diambil dari dari auditor yang lama, cuma sekarang bidangnya disini dengan pertimbangan tertentu kek gitu, artinya diratakanlah, misalnya dari masing-masing bidang itu ada yang jurusan akuntansi, ada</p>	<p>P : Kalau saya, kalau jenis pelatihannya ya mas, kita milih sesuai sama kebutuhan kami inspektorat, jadi kebanyakan itu pelatihan yang disediakan oleh bpkp atau oleh bpk kan kaitannya dengan audit kan, dan untuk kalau mereka yang mengadakan kan biasanya tetap bareng-bareng entah bareng pemda lain entah dengan institusi lain yang setipe bedanya inspektorat jenderal itu, jadi bukan terus saya nyari sendiri terus saya keluar, jadi tetap terorganisir lewat kantor, kantor koordinasi dengan apa lembaga diklatnya, kemudian juga koordinasi dengan apa badan kepegawaian kaitannya dengan dukungan anggaran, jadi analisis kebutuhan masing-masing auditor, jadi saya butuh diklat apa dan lain-lain bukan saya yang menentukan tapi</p>	<p>H : Kalau ini, ini berawal dari, yang pernah ya, yang dua-duanya pernah sih. Artinya pengembangan temuan dari hasil pemeriksaan inspektorat sendiri kemudian ada laporan dari SKPD yang lain, maksudnya dari dinas teknis yang lain, kemudian oleh inspektorat ditindak lanjuti dengan, kalau dulu-dulu sih namanya bukan investigasi ya, masih pemeriksaan kasus seperti itu dan selama ini yang kami laksanakan istilahnya dengan pengenaan tuntutan <i>ganti</i> rugi, artinya kalau ada ketekoran kas maksudnya kerugian yang berkaitan dengan keuangan daerah itu untuk segera disetorkan kembali ke kas daerah, kek gitu, tapi belum pernah kami</p>	<p>P : Kalau saya, kalau jenis pelatihannya ya mas, kita milih sesuai sama kebutuhan kami inspektorat, jadi kebanyakan itu pelatihan yang disediakan oleh bpkp atau oleh bpk kan kaitannya dengan audit kan, dan untuk kalau mereka yang mengadakan kan biasanya tetap bareng-bareng entah bareng pemda lain entah dengan institusi lain yang setipe bedanya inspektorat jenderal itu, jadi bukan terus saya nyari sendiri terus saya keluar, jadi tetap terorganisir lewat kantor, kantor koordinasi dengan apa lembaga diklatnya, kemudian juga koordinasi dengan apa badan kepegawaian kaitannya dengan dukungan</p>	<p>P : Kalau saya, kalau jenis pelatihannya ya mas, kita milih sesuai sama kebutuhan kami inspektorat, jadi kebanyakan itu pelatihan yang disediakan oleh bpkp atau oleh bpk kan kaitannya dengan audit kan, dan untuk kalau mereka yang mengadakan kan biasanya tetap bareng-bareng pemda lain entah dengan institusi lain yang setipe bedanya inspektorat jenderal itu, jadi bukan terus saya nyari sendiri terus saya keluar, jadi tetap terorganisir lewat kantor, kantor koordinasi dengan apa badan kepegawaian kaitannya dengan dukungan</p>	<p>P : Kalau saya, kalau jenis pelatihannya ya mas, kita milih sesuai sama kebutuhan kami inspektorat, jadi kebanyakan itu pelatihan yang disediakan oleh bpkp atau oleh bpk kan kaitannya dengan audit kan, dan untuk kalau mereka yang mengadakan kan biasanya tetap bareng-bareng pemda lain entah dengan institusi lain yang setipe bedanya inspektorat jenderal itu, jadi bukan terus saya nyari sendiri terus saya keluar, jadi tetap terorganisir lewat kantor, kantor koordinasi dengan apa badan kepegawaian kaitannya dengan dukungan</p>	
--	---	---	---	---	---	---	--

<p>yang hukum, ada yang teknik seperti itu, pertimbangannya hanya itu, kalau masalah peningkatan SDMnya ya memang kita upayakan untuk mengirim ke berbagai diklat yang menurut kami itu berguna untuk bekerja di bidang masing-masing seperti itu, misalnya tadi ada bidang investigasi baru, kemarin Mba Pipit dan Mba Retno itu di ikutkan untuk diklat masalah perhitungan keuangan negara, kemudian saya dan juga teman saya kemarin ikut audit investigatif, ada teman lagi yang ikut untuk forensik digital seperti itu</p> <p>P : Kalau saya, kalau jenis pelatihannya ya mas, kita milih sesuai sama</p>	<p>tetap bagian kepegawaian dan sekretaris yang menentukan, dan itu bisanya pertimbangannya dari posisi kami dibidang sih tergantung bidangnya apa.</p>	<p>melimpahkan ke APH.</p> <p>P : Kalau saya, kalau jenis pelatihannya ya mas, kita milih sesuai sama kebutuhan kami inspektorat, jadi kebanyakan itu pelatihan yang disediakan oleh bpkp atau oleh bpk kan kaitannya dengan audit kan, dan untuk kalau mereka yang mengadakan kan biasanya tetap bareng-bareng entah bareng pemda lain entah dengan institusi lain yang setipe bedanya inspektorat jenderal itu, jadi bukan terus saya nyari sendiri terus saya keluar, jadi tetap terorganisir lewat kantor, kantor koordinasi dengan apa lembaga diklatnya, kemudian juga koordinasi dengan apa badan kepegawaian</p>	<p>anggaran, jadi analisis kebutuhan masing-masing auditor, jadi saya butuh diklat apa dan lain-lain bukan saya yang menentukan tapi tetap bagian kepegawaian dan sekretaris yang menentukan, dan itu bisanya pertimbangannya dari posisi kami dibidang sih tergantung bidangnya apa.</p>	<p>tetap bagian kepegawaian dan sekretaris yang menentukan, dan itu bisanya pertimbangannya dari posisi kami dibidang sih tergantung bidangnya apa.</p>	
--	---	--	---	---	--

<p>kebutuhan kami inspektorat, jadi kebanyakan itu pelatihan yang disediakan oleh bpkp atau oleh bpk kan kaitannya dengan audit kan, dan untuk kalau mereka yang mengadakan kan biasanya tetap bareng-bareng entah bareng pemda lain entah dengan institusi lain yang setipe bedanya inspektorat jenderal itu, jadi bukan terus saya nyari sendiri terus saya keluar, jadi tetap terorganisir lewat kantor, kantor koordinasi dengan apa lembaga diklatnya, kemudian juga koordinasi dengan apa badan kepegawaian kaitannya dengan dukungan anggaran, jadi analisis</p>			<p>kaitannya dengan dukungan anggaran, jadi analisis kebutuhan masing-masing auditor, jadi saya butuh diklat apa dan lain-lain bukan saya yang menentukan tapi tetap bagian kepegawaian dan sekretaris yang menentukan, dan itu bisanya pertimbangannya dari posisi kami dibidang sih tergantung bidangnya apa.</p>			
---	--	--	---	--	--	--

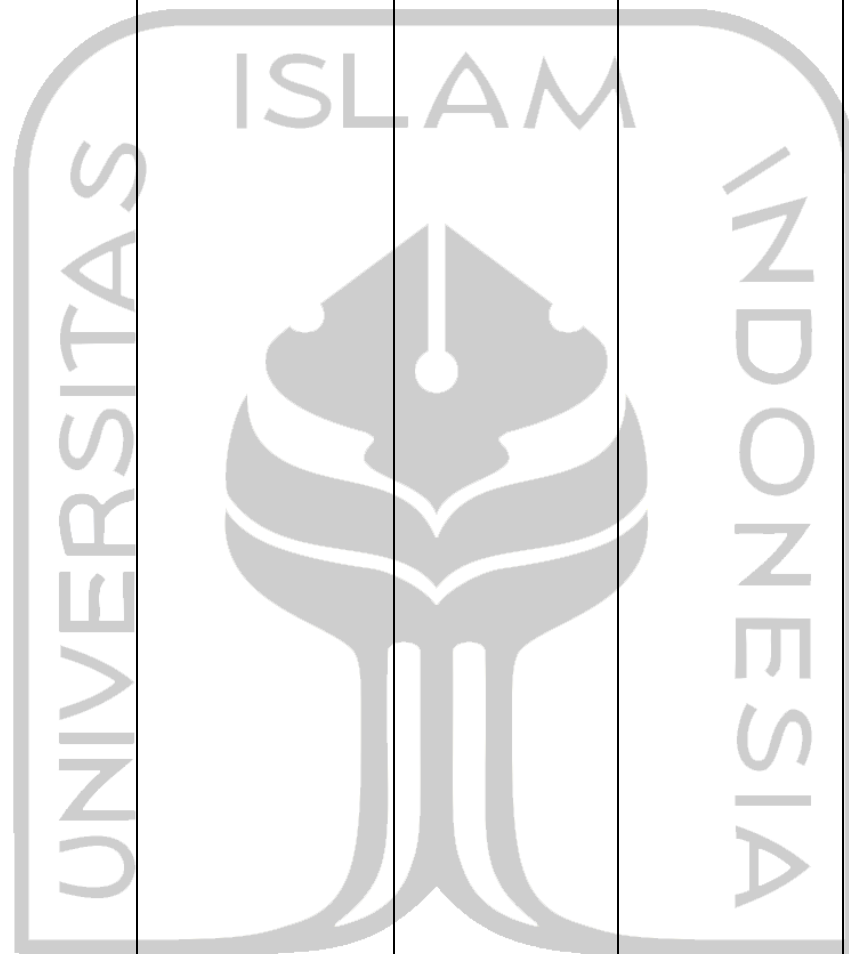


kebutuhan masing-masing auditor, jadi saya butuh diklat apa dan lain-lain bukan saya yang menentukan tapi tetap bagian kepegawaian dan sekretaris yang menentukan, dan itu biasanya pertimbangannya dari posisi kami dibidang sih tergantung bidangnya apa.

P : Sebenarnya mereka yang menyediakan terus biasanya karna yang disediakan itu memang yang kita butuhkan jadi otomatis aja, jadi bukan kita yang, kita pengen diklat ini bukan, jadi memang biasanya mereka menyediakan itu sesuai sama yang kami butuhkan jadi sudah ngikut settingan mereka, soalnya mereka kan juga programnya dari



mungkin dari pusat maunya seperti ini, auditor inspektorat seperti ini, auditor bpk seperti ini terus dibuatkan diklat seperti itu



الجامعة الإسلامية  
الاستد بالاندو

<p>2 : Hery Dwi Kuryanto, S.H., M.Hum.</p>	<p>Hy Ya, jadi tujuannya kalau untuk inspektorat, Pasti pelatihan apapun itu, pasti mendukung itu. Jadi kecurangan semua itu kalau yang namanya APIP, Pasti dalam rangka untuk menghindari kecurangan. Tidak ada pelatihan yang di sini tanpa...Aktifitas yang dilakukan oleh inspektorat itu semua menuju ke sana.</p>	<p>Hy Ya, itu kita harapkan. Untuk digital forensik, itu kemampuan itu harus juga dikembangkan ke kita. Karena, kita ada loh, Mas. Sudah disampaikan belum, ya. Tapi diklatnya sudah atukah belum. Kita kan ada... Audit PBJ, ya. Di teknologi informasinya. Harusnya ada. Nah, ini kalau kita memiliki kemampuan di situ, harusnya ke sana. Tapi kelihatannya kami belum sampai ke sana. Kami upamanya... Kita kan ada... Harusnya kan ada audit teknologi informasi. Kaitannya dengan sistem yang digunakan. Tapi kemampuan kami kan terbatas. Di jaranglah yang memiliki kemampuan untuk itu.</p>	<p>Hy Ya, jadi tujuannya kalau untuk inspektorat, Pasti pelatihan apapun itu, pasti mendukung itu. Jadi kecurangan semua itu kalau yang namanya APIP, Pasti dalam rangka untuk menghindari kecurangan. Tidak ada pelatihan yang di sini tanpa...Aktifitas yang dilakukan oleh inspektorat itu semua menuju ke sana.</p>	<p>Hy Ya, jadi tujuannya kalau untuk inspektorat, Pasti pelatihan apapun itu, pasti mendukung itu. Jadi kecurangan semua itu kalau yang namanya APIP, Pasti dalam rangka untuk menghindari kecurangan. Tidak ada pelatihan yang di sini tanpa...Aktifitas yang dilakukan oleh inspektorat itu semua menuju ke sana.</p>	<p>Hy Ya, jadi tujuannya kalau untuk inspektorat, Pasti pelatihan apapun itu, pasti mendukung itu. Jadi kecurangan semua itu kalau yang namanya APIP, Pasti dalam rangka untuk menghindari kecurangan. Tidak ada pelatihan yang di sini tanpa...Aktifitas yang dilakukan oleh inspektorat itu semua menuju ke sana.</p>	<p>Hy Ya, jadi tujuannya kalau untuk inspektorat, Pasti pelatihan apapun itu, pasti mendukung itu. Jadi kecurangan semua itu kalau yang namanya APIP, Pasti dalam rangka untuk menghindari kecurangan. Tidak ada pelatihan yang di sini tanpa...Aktifitas yang dilakukan oleh inspektorat itu semua menuju ke sana.</p>	
--	---	--	---	---	---	---	--

3 : Ika  
Sulistyo  
Devi

I Workshop, saya  
agak anu. Tapi kita  
biasanya lebih  
banyaknya ke  
pelatihan kantor  
sendiri itu. Kalau  
workshop itu  
dianggarkan atau  
enggak ya? Tapi  
lebih banyak ke  
pelatihan kantor  
sendiri. Kayaknya  
satu tahun itu dua  
belas kali pa ya  
pelatihan kantor.  
Jadi pelatihan kantor  
sendiri itu juga  
kayak workshop itu.

I Kalau sekarang  
modelnya anu ya  
zoom, e-learning  
gitu, kalau yang *anti*  
korupsi itu e-  
learning dengan  
KPK.

I Iya. Jadi e-learning  
kalau yang KPK itu  
kita menjadwalkan  
sendiri. Kecuali yang  
gratifikasi. Yang  
gratifikasi itu harus  
mengikuti jadwal  
dari sana. Tapi kalau  
yang pendidikan  
dasar *anti* korupsi  
atau kegiatan diklat  
yang lain itu kita  
sendiri. Jadi dikasih  
waktu 3 hari  
misalnya gitu, kita  
terserah mau milih  
sewaktu-waktu,  
bisanya kapan gitu.

الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية



<p>4 : Ir. Sri Puji Lestari</p>	<p>Pj : Sertifikasi nya kalau sertifikasi harus mengikuti diklat pembentukan, kalau auditor pembentukan auditor, kalau OPD pembentukan OPD. Itu syarat mendasar. Supaya mengikuti diklat tersebut ya harus bekerja di inspektorat, berarti harus mengikuti itu, lulus, baru <i>nanti</i> bisa mendapatkan sertifikat baru <i>nanti</i> diangkat menjadi auditor, setelah diangkat menjadi auditor ya <i>nanti</i> ada bukti-bukti pekerjaan, dan bukti-bukti pekerjaan itu salah satu syaratnya adalah pengembangan profesi. Pengembangan profesionalitas itu seperti diklat segala macam itu kan masuk pengembangan</p>	<p>Pj : Di Jogja kan ada perwakilan, iya ada ke BPKP, ngirim, atau mengikutkan workshop, ya kita ada jadwalnya setahun itu dua kali untuk mengirim peserta workshop secara fisik lo,</p> <p>Pj : Iya tidak mengeluarkan uang, kita juga menganggarkan seminar workshop ada kita kirimkan mereka paling endak setahun dua kali</p> <p>Pj : Workshop, seminar iya kita selalu menganggarkan dua kali, mengirimkan peserta</p>	<p>Pj : Hm m, itu khusus yang bidang investigasi nya, yang bidang reformasi itu kan juga saling terkait, reformasi itu kan membenahan di semua lini manajemen pemerintahan supaya bisa tercapai good governance gitu. Itu, jadi ada bidangnya itu ada kegiatan lagi yang menyokong itu, yang reformasi itu kan harus perbaikan di manajemen nya, terus perbaikan di manajemen perubahan, ada di perbaikan di pembentukan regulasi, ada di SDM nya, pengelolaan SDM, pengelolaan pengawasannya, pengelolaan pelayanan publik nya, itu di reformasi birokrasi itu kan juga terkait dengan investigasi, gitu, mungkin kalau saat ini belum banyak, belum banyak.</p> <p>Pj : Salah satu dari SPIP itu, SPIP yang tahun sekarang itu kan mengalami</p>	<p>Bu Puji (Pj) : Ya, sebetulnya sekarang itu semenjak Maret, bulan maret ya, itu organisasi inspektorat ada perubahan. Sekarang sudah ada bidang yang menangani terkait dengan bidang investigasi dan reformasi birokrasi sekarang, kalau dulu memang belum ada, jadi terkait itu masih campur ya di sekretariat. Sekretariat, kalau sekarang sudah ada sebetulnya gitu tapi kan dan terkait dengan itu bidang investigasi dan reformasi birokrasi itu, tugasnya itu yang pertama, melakukan pencegahan terhadap tindakan e yang terkait dengan korupsi, dari pencegahan kemudian tindak pemeriksaannya atau penanganannya gitu. Kalau dulu</p>	<p>Pj : Salah satu dari SPIP itu, SPIP yang tahun sekarang itu kan mengalami pengembangan, apa namanya, materinya itu bertambah, tidak hanya SPIP melulu, tapi dalam SPIP itu sekarang ada, unit apa sub-sub penilaian SPIP terkait dengan IUPK itu indeks IUPK Korupsi hm em. Amanat dari SPIP itu yaitu, SPIP itu kan ada terkait juga apa namanya IUPK indeks indeks pengendalian korupsi juga Maka langkah pertama Yang dilakukan itu adalah melakukan analisis penilaian kejadian <i>fraud</i> di setiap kegiatan yang dilakukan, jadi memang baru tahun kemarin kita lakukan karena kalau tahun-tahun dulu itu SPIP Tidak sampai ke <i>fraud</i> jadi</p>	<p>Bu Puji (Pj) : Ya, sebetulnya sekarang itu semenjak Maret, bulan maret ya, itu organisasi inspektorat ada perubahan. Sekarang sudah ada bidang yang menangani terkait dengan bidang investigasi dan reformasi birokrasi sekarang, kalau dulu memang belum ada, jadi terkait itu masih campur ya di sekretariat. Sekretariat, kalau sekarang sudah ada sebetulnya gitu tapi kan dan terkait dengan itu bidang investigasi dan reformasi birokrasi itu, tugasnya itu yang pertama, melakukan pencegahan terhadap tindakan e yang terkait dengan korupsi, dari pencegahan kemudian tindak pemeriksaannya atau penanganannya gitu. Kalau dulu masih ditangani oleh sekretariat, jadi di sekretariat masih e kalau dulu kan bidang-bidangnya</p>	<p>Pj : Oke, njih, kalau terkait dengan untuk pencegahan <i>fraud</i> sebetulnya kita itu sudah ada (apa namanya) mengirimkan SDM ya, mengirimkan SDM untuk mengikuti pelatihan atau diklat terkait dengan penyuluh <i>anti</i> korupsi. Nggih, sebelum jadi penyuluh ada pelatihan dulu ya, itu kita sudah mengirimkan ada kalau nggak salah ada 9 orang atau 7 orang untuk mengikuti diklat tersebut, setelah lulus diklat tersebut, kemudian yang bersangkutan harapannya mengikuti sertifikasi penyuluh <i>anti</i> korupsi, tetapi dari tujuh orang itu baru satu yang mengikuti penyuluhan <i>anti</i> korupsi, tadinya dua yang mengikuti tapi yang lulus baru satu, jadi kita baru mempunyai penyuluh <i>anti</i> korupsi yang telah bersertifikat oleh KPK itu satu orang, tetapi meskipun</p>
---------------------------------	--	---	--	--	---	--	---

	<p>profesionalitas dan itu mereka itu harus. Makanya kalau yang kreatif dia mengikuti seminar, diklat-diklat online itu, pelatihan-pelatihan online itu cepat dia mendapatkan kredit pengembangan profesional</p>		<p>pengembangan, apa namanya, materinya itu bertambah, tidak hanya SPIP melulu, tapi dalam SPIP itu sekarang ada, unit apa sub-sub penilaian SPIP terkait dengan IUPK itu indeks IUPK Korupsi hm em. Amanat dari SPIP itu yaitu, SPIP itu kan ada terkait juga apa namanya IUPK indeks indeks pengendalian korupsi juga Maka langkah pertama Yang dilakukan itu adalah melakukan analisis penilaian kejadian <i>fraud</i> di setiap kegiatan yang dilakukan, jadi memang baru tahun kemarin kita lakukan karena kalau tahun-tahun dulu itu SPIP Tidak sampai ke <i>fraud</i> jadi Hanya analisis risiko, risiko-risiko yang apa Menghambat atau menggagalkan capaian tujuan kegiatan Tapi SPIP itu kan mengalami perkembangan baru kemarin Itu ada tambahan sekarang Tambahan iupk itu</p>	<p>masih ditangani oleh secretariat, jadi di secretariat masih e kalau dulu kan bidang-bidangnya belum ad aitu masih di secretariat kita menangani terkait dengan <i>fraud</i> segala macem. Kalau di inspektorat, itu kan di inspektorat itukan inspektorat itu selaku e apa ya? Unit secretariat unit ee pengendali gratifikasi atau UPG kemudian ekhm inspektorat itu juga sebagai kalau dulu sebagai pembina atau pendamping OPD dalam melakukan analisa <i>fraud</i> di setiap kegiatan OPD</p>	<p>Hanya analisis risiko, risiko-risiko yang apa Menghambat atau menggagalkan capaian tujuan kegiatan Tapi SPIP itu kan mengalami perkembangan baru kemarin Itu ada tambahan sekarang Tambahan iupk itu</p>	<p>belum ad aitu masih di secretariat kita menangani terkait dengan <i>fraud</i> segala macem. Kalau di inspektorat, itu kan di inspektorat itukan inspektorat itu selaku e apa ya? Unit secretariat unit ee pengendali gratifikasi atau UPG kemudian ekhm inspektorat itu juga sebagai kalau dulu sebagai pembina atau pendamping OPD dalam melakukan analisa <i>fraud</i> di setiap kegiatan OPD</p>	<p>demikian, ketujuh orang yang pernah kita diklat kan pencegah <i>anti</i> korupsi ini juga bisa dimanfaatkan dalam rangka sosialisasi ke OPD-OPD. Kemudian kalau dibidang investigasi itu kan kegiatannya tidak hanya investigasi saja tapi juga reformasi birokrasi, itu memang personil nya baru delapan orang. Meskipun demikian bisa dibantu dengan bidang yang lain karena ketujuh orang itu tidak seluruhnya itu menyebar di bidang lain yang sudah mendapatkan pelatihan terkait dengan pencegahan korupsi. Kemudian untuk ke depannya terkait dengan (apa namanya) pendidikan <i>anti</i> korupsi ini tidak hanya di inspektorat, kami juga mengeluarkan mulai tahun kemarin mengeluarkan surat kami tujukan kepada seluruh OPD untuk mengirimkan</p>
--	---	--	--	--	---	--	---



personil nya guna mengikuti pelatihan atau melalui e-learning nya KPK, tapi memang belum efektif hanya beberapa OPD yang mengirimkan personil nya untuk mengikuti pelatihan tersebut. Nah ini, metode seperti ini besok tahun ini juga akan kita kirimkan lagi kepada seluruh OPD untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut melalui e-learning dari KPK gitu termasuk juga inspektorat. Rencananya seluruh auditor disini harus mengikuti e-learning tersebut dengan materi berbeda-beda disesuaikan dengan keinginan mereka gitu. Untuk peningkatan SDM nya begitu, kalau jumlahnya tidak bisa. Jumlahnya ya memang seperti ini, gak bisa menambah dengan seenaknya, gak bisa, hanya peningkatan kualitas

Pj : e-learning nya macem-macam tapi



melalui link nya  
KPK, kalau  
materinya *nanti* kita  
pilih macam-macam  
terkait dengan  
pengendalian  
korupsi,  
pencegahan dan  
segala macam

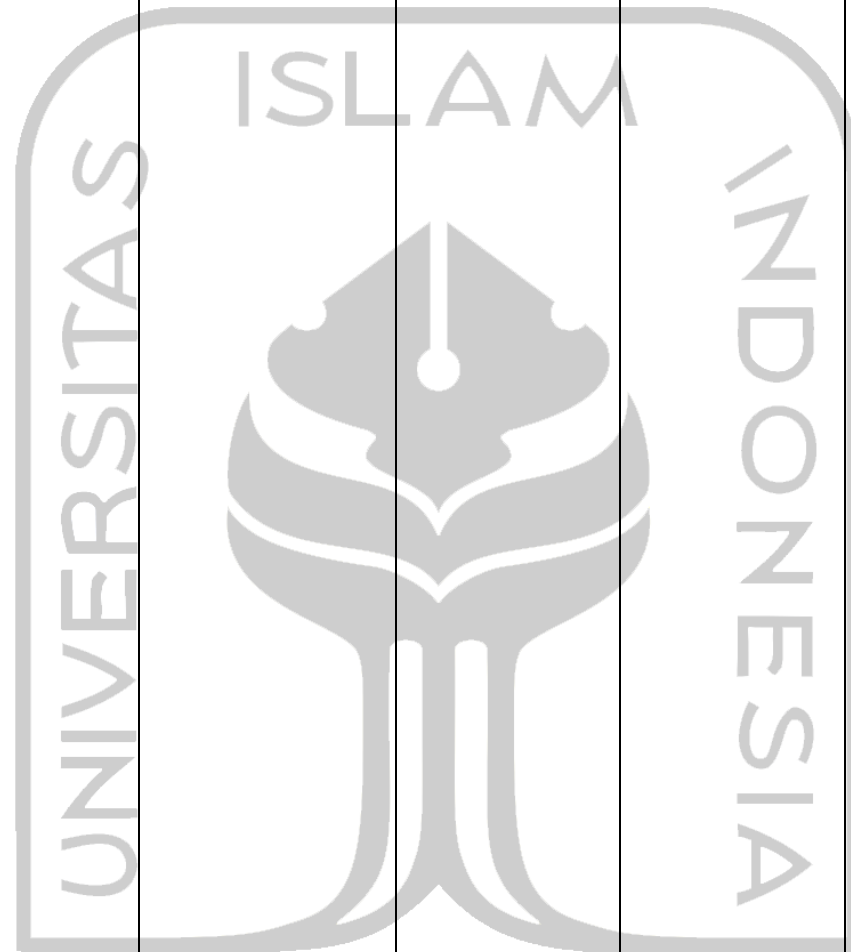
Pj : Mungkin ya,  
kalau ini cuman  
kalau KPK ya, saya  
sendiri gak ngerti  
kenapa kok tatap  
mukanya sedikit ya.  
KPK itu tatap  
mukanya sangat  
sedikit sekali. Jadi  
syarat untuk  
mengikuti diklat nya  
KPK itu ada satu e-  
learning dengan  
materi khusus yang  
itu harus lulus,  
setelah lulus baru  
bisa mengikuti  
diklat nya KPK.  
Setelah diklat nya  
KPK ini lulus baru  
bisa *nanti* mengikuti  
sertifikasi *anti*  
korupsi, jadi ada  
beberapa tingkatan.  
Tapi ada e-learning  
khusus yang bisa  
mengikuti diklat  
tersebut kan gitu,  
ada. Kan e-learning  
nya KPK itu macem-  
macamnya.  
Macam-macam tapi  
ada satu materi



husus yang bisa untuk dasar untuk mengikuti diklat nya KPK

Pj : Teman-teman kalau kemarin karena e-learning nya ini kan kemarin baru sekali teman-teman mengikuti jadi kami harapkan mengambilnya adalah dasar-dasar dari pengendalian korupsi iya, setelah dasar-dasar *nanti* ada lagi macam-macamnya. Banyak sekali disitu materi yang *nanti* kalau untuk teman-teman auditor disini memang kita pilihkan-kita yang memilihkan materi, jadi yang kalau yang dasarnya kemarin sudah mengikuti maka untuk tahun kita akan beri untuk materi yang lainnya gitu. Jadi kita punya daftar gitu jangan sampai satu orang *nanti* mengikuti e-learning dengan materi yang sama

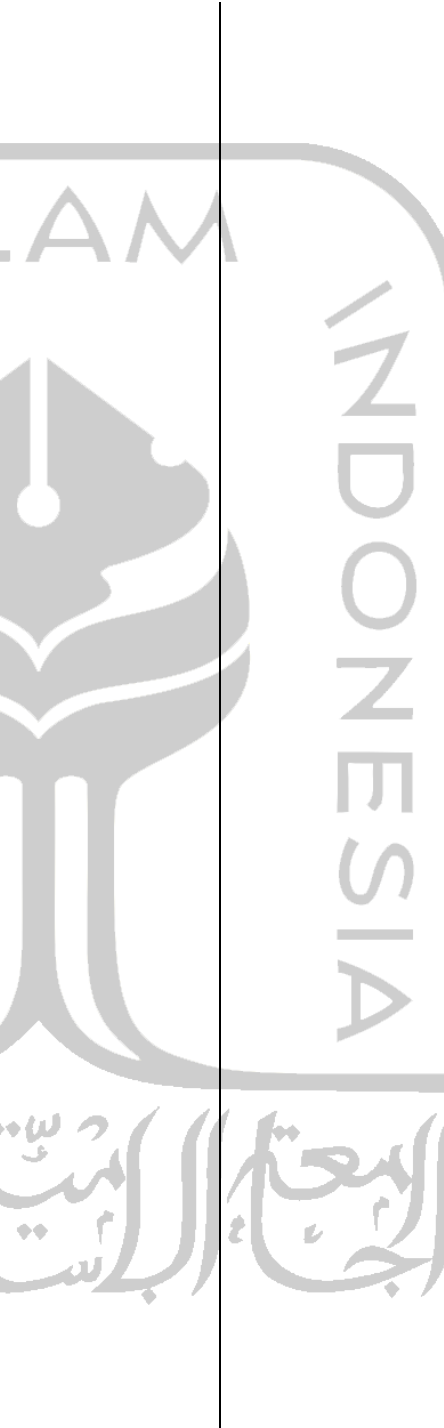
Pj : Kalau sekarang semua pelatihan pakai e-learning, habis e-learning



baru bisa mengikuti diklat nya yang offline ya, sekarang gak ada yang gak pakai e-learning, semuanya pakai. Jadi persyaratan offline itu harus ada e-learning dulu

الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

<p>5 : Ngatiyah, S.H.</p>	<p>Rz Kalau untuk ini bu mendampingi perangkat desa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya termasuk bisa mencegah <i>fraud</i> gak bu pendampingan itu? G Bisa juga sih. Mereka kan misalnya ya mau pengadaan barang jasa atau mau pengadaan tanah kas desa kan mereka juga konsultasi dulu ke kami nggih seperti apa <i>nanti</i> biar gak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya seperti itu.</p> <p>Rz Kalau untuk konsultasi tadi itu bu, itu ternasuk bisa mencegah <i>fraud</i> bu? G Bisa, karena mereka gini ya mau seperti ini langkahnya seperti apa yang bener, kayak gitu</p>	<p>G Workshop sih kita ada juga sih program dari kita beberapa tahun yang lalu misalnya workshop keuangan di UGM kayak gitu, jadi <i>nanti</i> kita kerja sama dengan sana kita yang kesana gitu ya, terus ada juga kita mengikuti workshop-workshop yang diadakan oleh pihak ketiga lah kayak gitu, kemarin kayak belum lama workshopnya bpkp kayak gitu terus disamping itu ya kayak diklat teknis tadi bpkp ada juga, bpkp itu juga.</p> <p>Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya mas ya, jadi ya kita kalau kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p>	<p>Rz Kalau untuk ini bu mendampingi perangkat desa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya termasuk bisa mencegah <i>fraud</i> gak bu pendampingan itu? G Bisa juga sih. Mereka kan misalnya ya mau pengadaan barang jasa atau mau pengadaan tanah kas desa kan mereka juga konsultasi dulu ke kami nggih seperti apa <i>nanti</i> biar gak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya seperti itu.</p> <p>Rz Kalau untuk konsultasi tadi itu bu, itu ternasuk bisa mencegah <i>fraud</i> bu? G Bisa, karena mereka gini ya mau seperti ini langkahnya seperti apa yang bener, kayak gitu kan diharapkan mereka juga jadi tau prosesedurnya seperti apa, usaha yang harus dilakukan</p>	<p>Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya mas ya, jadi ya kita kalau kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p>	<p>Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya mas ya, jadi ya kita kalau kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh</p>	<p>G Workshop sih kita ada juga sih program dari kita beberapa tahun yang lalu misalnya workshop keuangan di UGM kayak gitu, jadi <i>nanti</i> kita kerja sama dengan sana kita yang kesana gitu ya, terus ada juga kita mengikuti workshop-workshop yang diadakan oleh pihak ketiga lah kayak gitu, kemarin kayak belum lama workshopnya bpkp kayak gitu terus disamping itu ya kayak diklat teknis tadi bpkp ada juga, bpkp itu juga.</p> <p>Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya mas ya, jadi ya kita kalau kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh</p>	<p>Rz Kayak e-learning? G He eh, e-learning juga sih, terus kita ikut zoom-zoom apapun, kan banyak sekali itu kita zoom-zoom kayak gitu ya, itu kan salah satu pengembangan komperensi SDM. KPK itu rutin juga sih mengadakan Zoom macem-macem kayak gitu tema nya macem-macem ya</p> <p>Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya mas ya, jadi ya kita kalau kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh</p>
-----------------------------------	---	--	---	--	---	---	---

<p>kan diharapkan mereka juga jadi tau prosesedurnya seperti apa, usaha yang harus dilakukan bagaimana jadi itu kan gak, diharapkan sih gak membuka peluang untuk melakukan <i>fraud</i> seperti itu nggeh disamping pemeriksaan pemeriksaan kami yang sudah ada itu</p> <p>Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya mas ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya,</p>	<p><i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p> <p>G Untuk orang luar gitu ya? Kita sering juga sih kalau misalnya kita pengen maksudnya gini kita pengen materi sesuatu maksudnya kayak gitu ya materi tentang apa yang belum kita ketahui kita sering juga sih disamping kita cari narasumber dari luar tentang materi apa yang kita minta itu, kita kerja sama lah sama luar itu, kita pengennya diklat ini loh kayak gitu kalau kita kalau ada anggaran dikita, kalau enggak ya kita ikuti aja diklat yang kita adakan di luar atau workshop-workshop apa berkaitan tentang gitu</p>	<p>bagaimana jadi itu kan gak, diharapkan sih gak membuka peluang untuk melakukan <i>fraud</i> seperti itu nggeh disamping pemeriksaan pemeriksaan kami yang sudah ada itu</p> <p>Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya mas ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p>		<p><i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p>	<p>ini sepertinya ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p> <p>G Surat tugas he eh, tapi kalau misalnya yang zoom-zoom biasa, misalnya sosialisasi apa itu tetap semuanya bisa ikut sih, pokoknya yang kaitannya biaya kan tetap terbatas</p>
--	--	---	--	---	---



misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada *fraud* lah disini kayak gitu.

G Maksudnya yang diluar *fraud* tapi bisa menunjang *fraud* gak? Gitu ya?, kalau aku sih bisa juga sih, kan misalnya pengembangan kompetensi kita mendapat sosialisasi tentang kesehatan lah kayak gitu ya, tentang kesehatan, tentang TIK, tentang apa padahal kita kan meriksanya itu kita nyari *fraud*nya di masing-masing opd dibanyak opd yang memang kayak misalnya kita ke rumah sakit kita butuh juga ilmu kesehatan kan jadi menunjang



juga ya mas ya misalnya kita sosialisasi atau dapat sosialisasi kesehatan tentang ini, ini, ini terus kita ke rumah sakit gitu meriksa itu kan *nanti* bisa dipakai lah gitu, terus misalnya tentang teknologi informasi kita ke kominfo disitu ada aplikasi- aplikasi apa yang kita gak tau, karna kita tadi sudah workshop apa diklat ini kan bisa menunjang kesitu soalnya saking luasnya cakupan kita ya, jadi semuanya bisa masuk, kan kalau auditor kan mau dituntut tau segala hal karena kita memang obriknya, objek pemeriksaannya kan banyak, cakupannya kan banyak ya memang harus tau macam- macam makanya ilmu apapun kita bisa pakai tau



untuk itu.



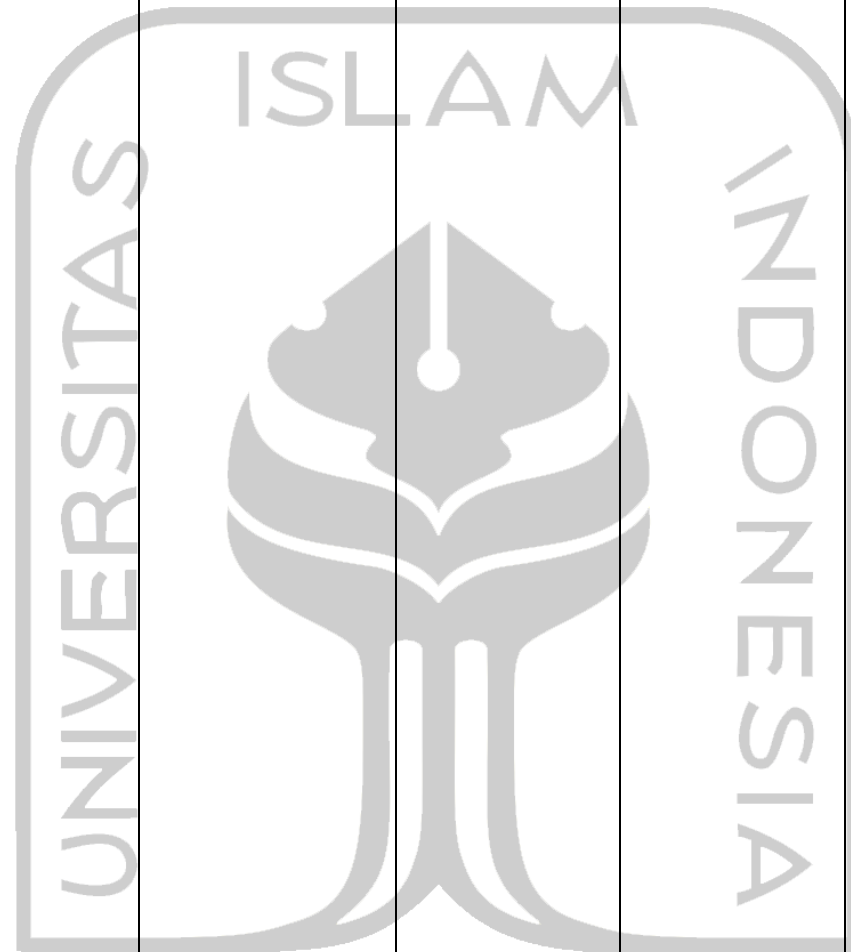
الجامعة الإسلامية  
الاستد بالاندو

6 : Pipit  
Tyas  
Ratna  
Puspita,  
S.H.,  
MPA.

P : Pelatihan kantor sendiri itu biasanya kami dengan BPKP karna instansi pembina kami kan BPKP dan workshop dan lain-lain itu kalau kami disini mungkin istilahnya pelatihan kantor sendiri ya workshop pelatihan kantor sendiri ya setipe dengan itu sih, tapi kalau seminar kami tidak mengadakan sendiri, biasanya kami sesuai ada entah bahas mengenai apa itu temanya termasuk kebutuhan kami biasanya kami auditornya dikirim seminar gitu

P : e-learning itu kan sebenarnya diklat juga, cuma bentuknya jarak jauh, kalau diklat yang konvensional namanya kita datang kita pelatihan tatap muka, kalau e-learning itu kan separuh belajar mandiri habis itu ada yang lewat apa dengan tetap zoom ya, itu kan tatap muka juga tapi cuman daring kan, kalau e-learning itukan kayak cuman caranya, caranya pembelajaran. Jadi kita sekarang enggak harus konvensional yang harus datang bertatap muka, tapi e-learning itu kan salah satu cara menjembatani ketika dari segi waktu sama segi jarak karna biasanya kan kalau nasional itu gak mungkin kan, terus diadakan di satu KPKnya, bisanya ya dari KPK terus KPKnya datang ke setiap daerah, kalau e-learning itu sebenarnya sama-

sama diklat, cuman  
caranya belajar.

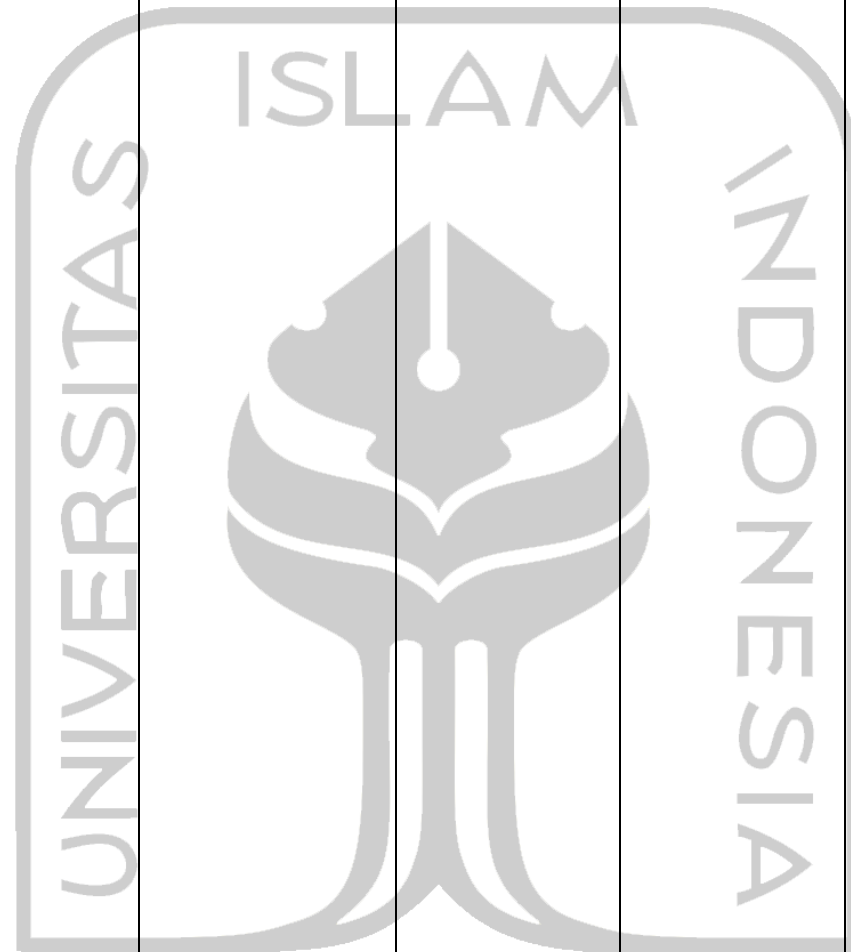


الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

<p>7 : Retno Isni Satiti</p>	<p>Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak mengembangkan diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas membantu untuk</p>	<p>Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak mengembangkan diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas membantu untuk</p>	<p>Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak</p>	<p>Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak</p>	<p>Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak</p>	<p>Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak</p>	<p>Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak mengembangkan diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas</p>
------------------------------	---	---	--	--	--	--	--

<p>kalau kita nggak mengembangkannya diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas membantu untuk pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p> <p>Rno Oh, enggak, enggak seperti itu mas. Jadi auditor, seorang auditor. Ketika dia mau menjadi fungsional auditor, di awal sudah dibentuk dengan diklat. Yang diikuti diklat sertifikasi ya. Lulus peran misalnya auditor terampil, auditor muda, auditor terampil itu anggota tim, auditor ahli muda itu ketua tim, auditor madya itu pengendali teknis. Nah Ketika sebelum</p>	<p>pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p>	<p>pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p>	<p>mengembangkan diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas membantu untuk pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p>	<p>mengembangkan diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas membantu untuk pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p>	<p>membantu untuk pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p>	<p>membantu untuk pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p>
---	---	---	--	--	--	--

dibentuk itu,  
kami itu sudah  
dilalui seleksi  
saat itu.



الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية



Narasumber	P : 1. E-Learning Pelatihan Pembentukan Fungsional Auditor Ahli Pertama	Q : 2. E-Learning Anti Korupsi dan Gratifikasi KPK	R : 3. E-Learning Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Negara	S : d. PKS (Pelatihan Kantor Sendiri)	T : 1. PKS PKKN	U : 2. PKS Audit Forensik	V : 3. PKS Audit tertentu
------------	---	--	--	---------------------------------------	-----------------	---------------------------	---------------------------

الجمهورية الإسلامية الإندونيسية

1 : Heri Setyawati, S.E., M.Acc.

H : Ya mengeluarkan surat edaran tentang *anti* gratifikasi, kemudian kita juga ada sosialisasi *anti* korupsi ke berbagai hampir ke semua skpd, kemudian pendampingan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepada SKPD, artinya biar *nanti* untuk mencegah itu kan, pendampingannya kita laksanakan dulu jangan sampai *nanti* maksudnya pendampingan biar tugas pokok dan fungsinya SKPD itu berjalan baik, kemudian kalau semuanya baik kan berarti menghindarkan dari *fraud*, kemudian kita juga, apa istilahnya itu Mba Pipit

H : Kalau ini, ini berawal dari, yang pernah ya, yang dua-duanya pernah sih. Artinya pengembangan temuan dari hasil pemeriksaan inspektorat sendiri kemudian ada

P : Kalau saya, kalau jenis pelatihannya ya mas, kita milih sesuai sama kebutuhan kami inspektorat, jadi kebanyakan itu pelatihan yang disediakan oleh bpkp atau oleh bpk kan kaitannya dengan audit kan, dan untuk kalau mereka yang mengadakan kan biasanya tetap bareng-bareng entah bareng pemda lain entah dengan institusi lain yang setipe bedanya inspektorat jenderal itu, jadi bukan terus saya nyari sendiri terus saya keluar, jadi tetap terorganisir lewat kantor, kantor koordinasi dengan apa lembaga diklatnya, kemudian juga koordinasi dengan apa badan kepegawaian kaitannya dengan dukungan

H : Kalau ini, ini berawal dari, yang pernah ya, yang dua-duanya pernah sih. Artinya pengembangan temuan dari hasil pemeriksaan inspektorat sendiri kemudian ada laporan dari SKPD yang lain, maksudnya dari dinas teknis yang lain, kemudian oleh inspektorat ditindak lanjuti dengan, kalau dulu-dulu sih namanya bukan investigasi ya, masih pemeriksaan kasus seperti itu dan selama ini yang kami laksanakan istilahnya dengan *ganti* rugi, artinya kalau ada ketekoran kas maksudnya kerugian yang berkaitan dengan keuangan daerah itu untuk segera disetorkan kembali ke kas daerah, kek gitu, tapi belum pernah kami melimpahkan ke APH.

P : Kalau saya, kalau jenis pelatihannya

P : Kalau saya, kalau jenis pelatihannya ya mas, kita milih sesuai sama kebutuhan kami inspektorat, jadi kebanyakan itu pelatihan yang disediakan oleh bpkp atau oleh bpk kan kaitannya dengan audit kan, dan untuk kalau mereka yang mengadakan kan biasanya tetap bareng-bareng entah bareng pemda lain entah dengan institusi lain yang setipe bedanya inspektorat jenderal itu, jadi bukan terus saya nyari sendiri terus saya keluar, jadi tetap terorganisir lewat kantor, kantor koordinasi dengan apa lembaga diklatnya, kemudian juga koordinasi dengan apa badan kepegawaian kaitannya dengan dukungan anggaran, jadi analisis kebutuhan masing-masing auditor, jadi saya butuh diklat apa dan lain-lain bukan saya yang menentukan tapi

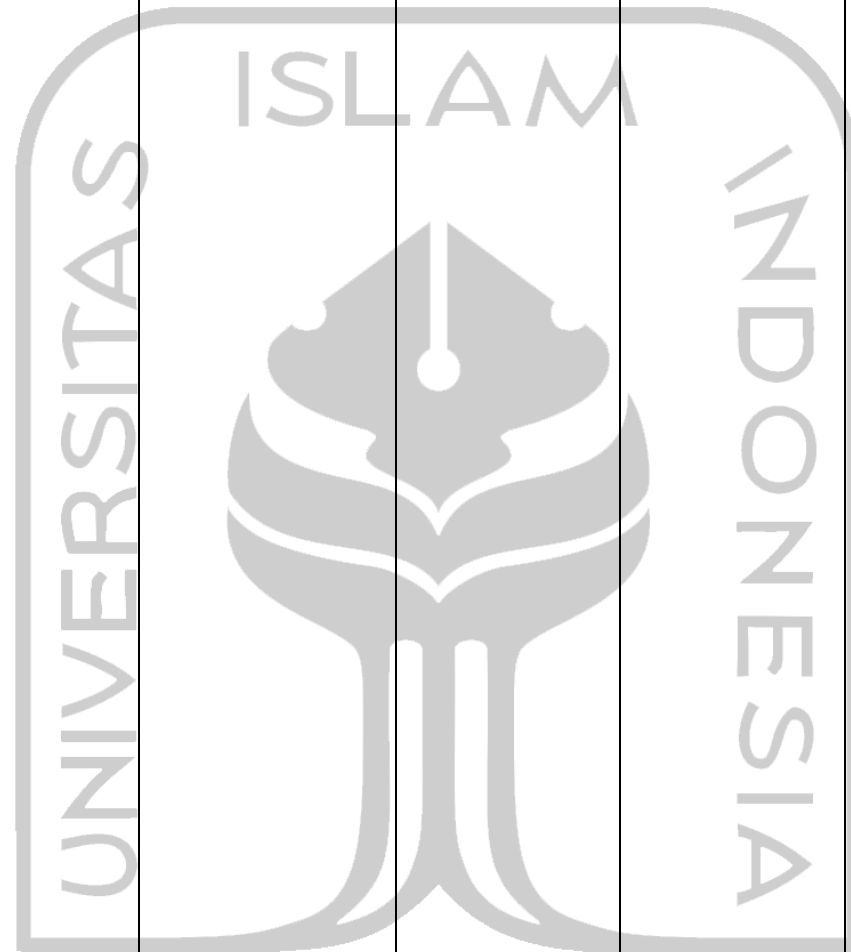
laporan dari SKPD yang lain, maksudnya dari dinas teknis yang lain, kemudian oleh inspektorat ditindak lanjuti dengan, kalau dulu-dulu sih namanya bukan investigasi ya, masih pemeriksaan kasus seperti itu dan selama ini yang kami laksanakan istilahnya dengan pengenaan tuntutan ganti rugi, artinya kalau ada ketekoran kas maksudnya kerugian yang berkaitan dengan keuangan daerah itu untuk segera disetorkan kembali ke kas daerah, kek gitu, tapi belum pernah kami melimpahkan ke APH.

anggaran, jadi analisis kebutuhan masing-masing auditor, jadi saya butuh diklat apa dan lain-lain bukan saya yang menentukan tapi tetap bagian kepegawaian dan sekretaris yang menentukan, dan itu bisanya pertimbangannya dari posisi kami dibidang sih tergantung bidangnya apa.

ya mas, kita pilih sesuai sama kebutuhan kami inspektorat, jadi kebanyakan itu pelatihan yang disediakan oleh bpkp atau oleh bpk kan kaitannya dengan audit kan, dan untuk kalau mereka yang mengadakan kan biasanya tetap bareng-bareng entah bareng pemda lain entah dengan institusi lain yang setipe bedanya inspektorat jenderal itu, jadi bukan terus saya nyari sendiri terus saya keluar, jadi tetap terorganisir lewat kantor, kantor koordinasi dengan apa lembaga diklatnya, kemudian juga koordinasi dengan apa badan kepegawaian kaitannya dengan dukungan anggaran, jadi analisis kebutuhan masing-masing auditor, jadi saya butuh diklat apa dan lain-lain bukan saya yang menentukan tapi tetap bagian kepegawaian dan sekretaris yang

tetap bagian kepegawaian dan sekretaris yang menentukan, dan itu bisanya pertimbangannya dari posisi kami dibidang sih tergantung bidangnya apa.

menentukan, dan itu bisanya pertimbangannya dari posisi kami dibidang sih tergantung bidangnya apa.



الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

<p>2 : Hery Dwi Kuryanto, S.H., M.Hum.</p>	<p>Hy Ya, jadi tujuannya kalau untuk inspektorat, Pasti pelatihan apapun itu, pasti mendukung itu. Jadi kecurangan semua itu kalau yang namanya APIP, Pasti dalam rangka untuk menghindari kecurangan. Tidak ada pelatihan yang di sini tanpa...Aktifitas yang dilakukan oleh inspektorat itu semua menuju ke sana.</p>	<p>Hy Ya, jadi tujuannya kalau untuk inspektorat, Pasti pelatihan apapun itu, pasti mendukung itu. Jadi kecurangan semua itu kalau yang namanya APIP, Pasti dalam rangka untuk menghindari kecurangan. Tidak ada pelatihan yang di sini tanpa...Aktifitas yang dilakukan oleh inspektorat itu semua menuju ke sana.</p>	<p>Hy Ya, jadi tujuannya kalau untuk inspektorat, Pasti pelatihan apapun itu, pasti mendukung itu. Jadi kecurangan semua itu kalau yang namanya APIP, Pasti dalam rangka untuk menghindari kecurangan. Tidak ada pelatihan yang di sini tanpa...Aktifitas yang dilakukan oleh inspektorat itu semua menuju ke sana.</p>	<p>Hy Ya, itu kita harapkan. Untuk digital forensik, itu kemampuan itu harus juga dikembangkan ke kita. Karena, kita ada loh, Mas. Sudah disampaikan belum, ya. Tapi diklatnya sudah atukah belum. Kita kan ada... Audit PBJ, ya. Di teknologi informasinya. Harusnya ada. Nah, ini kalau kita memiliki kemampuan di situ, harusnya ke sana. Tapi kelihatannya kami belum sampai ke sana. Kami upamanya... Kita kan ada... Harusnya kan ada audit teknologi informasi. Kaitannya dengan sistem yang digunakan. Tapi kemampuan kami kan terbatas. Di jaranglah yang memiliki kemampuan untuk itu.</p> <p>Hy Kita hanu, kita memberikan</p>	<p>Hy Ya, jadi tujuannya kalau untuk inspektorat, Pasti pelatihan apapun itu, pasti mendukung itu. Jadi kecurangan semua itu kalau yang namanya APIP, Pasti dalam rangka untuk menghindari kecurangan. Tidak ada pelatihan yang di sini tanpa...Aktifitas yang dilakukan oleh inspektorat itu semua menuju ke sana.</p>	<p>Hy Ya, jadi tujuannya kalau untuk inspektorat, Pasti pelatihan apapun itu, pasti mendukung itu. Jadi kecurangan semua itu kalau yang namanya APIP, Pasti dalam rangka untuk menghindari kecurangan. Tidak ada pelatihan yang di sini tanpa...Aktifitas yang dilakukan oleh inspektorat itu semua menuju ke sana.</p>	<p>Hy Ya, jadi tujuannya kalau untuk inspektorat, Pasti pelatihan apapun itu, pasti mendukung itu. Jadi kecurangan semua itu kalau yang namanya APIP, Pasti dalam rangka untuk menghindari kecurangan. Tidak ada pelatihan yang di sini tanpa...Aktifitas yang dilakukan oleh inspektorat itu semua menuju ke sana.</p>
--	---	---	---	---	---	---	---

kebebasan. Dan kita punya program pelatihan tertentu, Mas. Harusnya teman-teman ngasih ya, teman-teman ada itu. Sebetulnya harusnya sudah diberi jawaban oleh teman-teman. Itu kan ada program yang secara rutin kita lakukan. Terus teman-teman juga ada pelatihan yang internal sendiri. Pelatihan kantor sendiri. Jadi kita ada hal yang sifat...Program peningkatan kompetensi itu berdasarkan kebutuhan kita. Atapun atas usulan teman-teman. Tapi usulan teman-teman juga harus yang itu mendukung program. Tidak bisa... Mereka usul kalau itu tidak memberikan kontribusi ataupun mendukung

program kegiatan kita. Tidak mungkin. Apa?

Hy Ya, jadi tujuannya kalau untuk inspektorat, Pasti pelatihan apapun itu, pasti mendukung itu. Jadi kecurangan semua itu kalau yang namanya APIP, Pasti dalam rangka untuk menghindari kecurangan. Tidak ada pelatihan yang di sini tanpa...Aktifitas yang dilakukan oleh inspektorat itu semua menuju ke sana.

الجمعة الإسلامية الاندونيسية

3 : Ika  
Sulistyo  
Devi

I Kalau sekarang modelnya anu ya zoom, e-learning gitu, kalau yang *anti* korupsi itu e-learning dengan KPK.

I Iya. Jadi e-learning kalau yang KPK itu kita menjadwalkan sendiri. Kecuali yang gratifikasi. Yang gratifikasi itu harus mengikuti jadwal dari sana. Tapi kalau yang pendidikan dasar *anti* korupsi atau kegiatan diklat yang lain itu kita sendiri. Jadi dikasih waktu 3 hari misalnya gitu, kita terserah mau milih sewaktu-waktu, bisanya kapan gitu.

I *Anti-fraud*, Pelatihan kantor sendiri itu bisa dilaksanakan di sini dengan mengundang narasumber dari luar yang sudah kita lakukan biasanya mengundang dari BPKP karena kan pusat pembinaannya JFA, Jabatan Fungsional Auditornya kan ada di BPKP nah kita mengadopsi aturan dari sana, kita memanggil untuk pelatihan kantor sendiri di inspektorat yang kedua kita mengikuti pelatihan di luar, misalnya BPKP mengadakan pelatihan itu kami mengirimkan beberapa personel kesana, BPKP juga ada pelatihan gitu, kami mengirimkan kesana.

I Kalau pelatihan kantor sendiri jelas mereka ikut. Kalau e-learning



itu kan berdasarkan surat tugas tadi, penugasan.

Karena untuk auditor itu ada pengembangan kompetensi untuk yang di angka kredit itu. Jadi PKS, pelatihan kantor sendiri itu mereka harus ikut. Kalau enggak mereka enggak bisa terpenuhi *nanti* kredit poinnya. Mereka kan dinilai berdasarkan angka kredit. Harus mencapai pengembangan profesi berapa gitu

I Apa ya, pemahaman teman-teman itu tentang *antifraud*.

Kemudian banyak-banyak pelatihan mengikuti perkembangan teknologi.

Misalnya tadi digital forensik kita melakukan pemeriksaan pakai IT ya

I Ya mungkin pelatihan kantor sendiri itu tadi, yang paling mungkin kita lakukan itu adalah pelatihan kantor sendiri karena kan itu program kegiatan kita, kita bebas memilih tema apa dan *nanti* nyari narasumber dari BPKP, BPK, ataupun mana gitu. Kalau yang pengembangannya lewat kita mengirim diklat, itu kan tergantung mereka punya diklat, BPK atau BPKP itu punya diklat tersebut atau enggak. Paling mungkin ya pelatihan kantor sendiri.

الجمعة الإسلامية الاندونيسية

4 : Ir. Sri  
Puji  
Lestari

Pj : Iya dari KPK, jadi sekarang di setiap inspektorat itu harus ada bidang khusus yang menangani investigative, karna kan sekarang banyak kegiatan kegiatan dari KPK yang diturunkan ke daerah, banyak sekali. Kemarin itu karena belum ada bidang sendiri maka ditangani oleh kantor. Jenengan bisa bayangkan sekretariat harunya menangani masalah interen kantor, tapi juga menangani masalah-masalah dari luar, jadi kegiatannya belum ditampung oleh bidang semuanya masuk ke sekretariat. Jadi sekretariat kita menangani. Di KPK itu ada kegiatan monitoring percepatan pemberantasan korupsi atau mjb, kalau mungkin jenengan kenal, mjb KPK, kemudian ada lagi inspektorat yang harus melakukan monitoring, kemudian juga adalagi monitoring

Pj : Kalau pengembangan kompetensi pakai itu, kita mendatangkan narasumber dari BPKP, internal, dari BPKP ya toh, kemudian juga PKS, PKS itu pelatihan kantor sendiri dengan narasumber dari dalam  
Pj : Kemarin itu terkait dengan *fraud* dari BPKP udah, dari dalam itu yang ini yang penyuluh *anti* korupsi itu. Kita punya penyuluh *anti* korupsi satu, bersertifikat itu. Ada apa namanya dia melakukan sosialisasi juga ke teman-teman, teman-teman dalam maksudnya. Supaya *nanti* yang melakukan sosialisasi gak dia aja. Termasuk Bu Heri kemarin juga bertugas sosialisasi ke sekretariat daerah gitu. Jadi kalau cuman satu kan gak hmm.

Bu Puji (Pj) : Ya, sebetulnya sekarang itu semenjak Maret, bulan maret ya, itu organisasi inspektorat ada perubahan. Sekarang sudah ada bidang yang menangani terkait dengan bidang investigasi dan reformasi birokrasi sekarang, kalau dulu memang belum ada, jadi terkait itu masih campur ya di sekretariat. Sekretariat, kalau sekarang sudah ada sebetulnya gitu tapi kan dan terkait dengan itu bidang investigasi dan reformasi birokrasi itu, tugasnya itu yang pertama, melakukan pencegahan terhadap tindakan e yang terkait dengan korupsi, dari pencegahan kemudian tindak pemeriksaannya atau penanganannya gitu. Kalau dulu masih ditangani oleh sekretariat, jadi di sekretariat masih e kalau dulu kan bidang-bidangnya

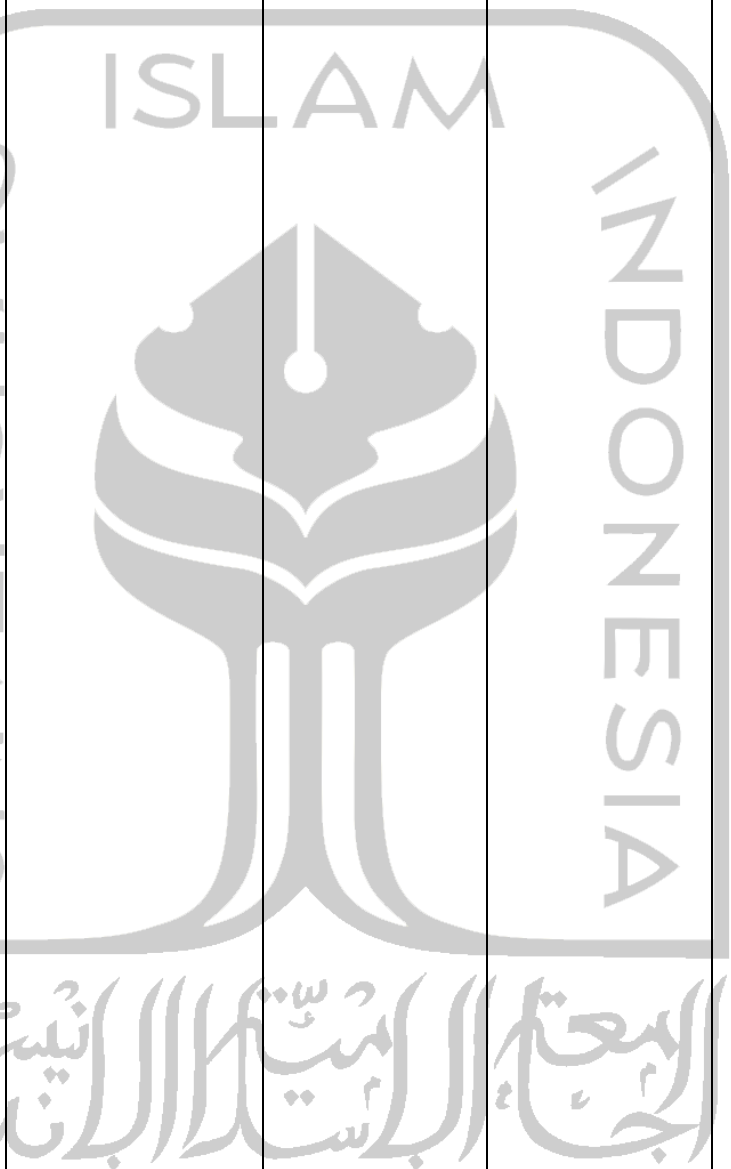
Bu Puji (Pj) : Ya, sebetulnya sekarang itu semenjak Maret, bulan maret ya, itu organisasi inspektorat ada perubahan. Sekarang sudah ada bidang yang menangani terkait dengan bidang investigasi dan reformasi birokrasi sekarang, kalau dulu memang belum ada, jadi terkait itu masih campur ya di sekretariat. Sekretariat, kalau sekarang sudah ada sebetulnya gitu tapi kan dan terkait dengan itu bidang investigasi dan reformasi birokrasi itu, tugasnya itu yang pertama, melakukan pencegahan terhadap tindakan e yang terkait dengan korupsi, dari pencegahan kemudian tindak pemeriksaannya atau penanganannya gitu. Kalau dulu masih ditangani oleh sekretariat, jadi di sekretariat masih e kalau dulu kan bidang-bidangnya

		<p>penerapan stranas pemberantasan korupsi KPK, adalagi. Kemudian ada lagi kpk juga ngobli dia ee dia.</p> <p>Pj : Gambarannya itu harus melakukan pencegahan terkait dengan korupsi, <i>nanti</i> banyak disosialisasi di</p> <p>Pj : Jadi kalau kemarin karena baru-baru Jadi kita mencoba membuat, Kemudian kita share itu semua ke unit-unit kerja Contohnya seperti ini menyesuaikan dengan kegiatannya Itu kadang opd juga belum ngeh gitu loh laporannya tidak ada <i>fraud</i> tidak ada <i>fraud</i> tambah akan yang namanya penilaian resiko itu penilaian yang terjadi atau yang mungkin terjadi kan gitu Jadi kalau dalam pikirannya nggak pernah ada jadi seakan-akan yang sudah terjadi kan gitu, mungkin kalau penilaian resiko seperti itu ya itu jadi</p>	<p>Pj : Ada, kalau yang diwajibkan sudah saya tunjuk personil nya, wajib gitu. Trus pelatihan kantor sendiri rutin setiap bulan.</p> <p>Pj : Sebetulnya kalau Pemda kita itu selama ini kalau untuk pengembangan kompetensi kan terkait dengan kesempatan, kalau kesempatan banyak, kesempatan banyak, kita pengembangan kompetensi bisa melalui diklat-diklat yang dilaksanakan oleh BPKP atau BPK, BPKP dan BPK ada dua ya, ada dua instansi itu sama-sama pembina nya auditor juga. Untuk mengirimkan tersebut, sementara ini juga sudah kita (apa namanya) kita rencanakan daftar-daftar materi yang</p>	<p>masih ditangani oleh secretariat, jadi di secretariat masih e kalau dulu kan bidang-bidangnya belum ad aitu masih di secretariat kita menanganikan terkait dengan <i>fraud</i> segala macam. Kalau di inspektorat, itu kan di inspektorat itukan inspektorat itu selaku e apa ya? Unit secretariat unit ee pengendali gratifikasi atau UPG kemudian ekhm inspektorat itu juga sebagai pendamping OPD dalam melakukan analisa <i>fraud</i> di setiap kegiatan OPD</p>	<p>belum ad aitu masih di secretariat kita menanganikan terkait dengan <i>fraud</i> segala macam. Kalau di inspektorat, itu kan di inspektorat itukan inspektorat itu selaku e apa ya? Unit secretariat unit ee pengendali gratifikasi atau UPG kemudian ekhm inspektorat itu juga sebagai pembina atau pendamping OPD dalam melakukan analisa <i>fraud</i> di setiap kegiatan OPD</p> <p>Pj : Kemarin itu terkait dengan <i>fraud</i> dari BPKP udah, dari dalam itu yang ini yang penyuluh <i>anti</i> korupsi itu. Kita punya penyuluh <i>anti</i> korupsi satu, bersertifikat itu. Ada apa namanya dia melakukan sosialisasi juga ke teman-teman, teman-teman dalam maksudnya. Supaya <i>nanti</i> yang melakukan sosialisasi gak dia aja. Termasuk Bu Heri kemarin juga bertugas sosialisasi</p>		
--	--	---	--	---	---	--	--

	<p>langkah pertama ya itu kalau terkait dengan <i>fraud</i>. Penilaian risiko <i>fraud</i> Terjadi, Tapi saya itu sendiri tidak bisa membedakan ya antara <i>fraud</i> dengan agenda <i>anti</i> korupsi lainnya Oh ya kalau untuk pencegahan Kita yaitu melakukan sosialisasi-sosialisasi pencegahan pungli Kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan Khusus pungli. Tapi kalau pencegahan gratifikasi Maka hanya inspektorat yang melakukan Kita melakukan kepada seluruh opd Seluruh unit kerja, Dan kemarin kita khususkan kepada Sekolah. Sekolah SD SMP itu kita lakukan penyuluhan pencegahan gratifikasi iya</p> <p>Pj : Kan di inspektorat sebagai PG unit pengendalian gratifikasi Nya kabupaten ,Salah satu kegiatannya itu Terus yang kedua kita membagi selebaran brosur</p>		<p>lembaga butuhkan, bukan person-person, tapi lembaga, lembaga itu butuh materi apa sih untuk meningkatkan kinerja lembaga. Nah ini kemudian kita pilihkan person-person yang memang secara keilmuan atau secara keahliannya itu masuk ke materi tersebut, nah itu kita usulkan, surat sudah kita layang kan baik itu kepada BPK untuk materi A,B,C,D kepada BPKP terkait materi A,B,C,D. kemudian terkait dengan anggarannya sebenarnya sudah terpenuhi sih Pemda. Kemudian itu terkait itu, kemudian yang lainnya untuk peningkatan kompetensi lainnya kita sendiri yang mengadakan pelatihan dengan mengundang narasumber dari</p>	<p>ke sekretariat daerah gitu. Jadi kalau cuman satu kan gak hmm.</p>	
--	---	--	--	---	--

pencegahan gratifikasi kepada sub-sub unit dan juga kita menerima nah ini setiap hari raya kita mengeluarkan surat edaran yang ditandatangani oleh Bupati kepada seluruh perangkat daerah sampai desa dan kepada ini konsorsium Kelompoknya pengusaha kelompok-kelompok pengusaha koperasi Kelompok Kadit segala macam gitu kelompok pengusaha dan itu kita sampaikan pencegahan gratifikasi maksudnya tidak usah memberi ke pegawai pemerintahan. ini besok mau kita mau tekankan lagi. Salah satunya itu kemudian dari surat itu *nanti* kalau ada pelaporan penerimaan gratifikasi maka wajib melaporkan kemarin bisa langsung ke KPK bisa juga langsung melalui UPG UPG kita *nanti* kita yang melaporkan ke KPK

luar iya.

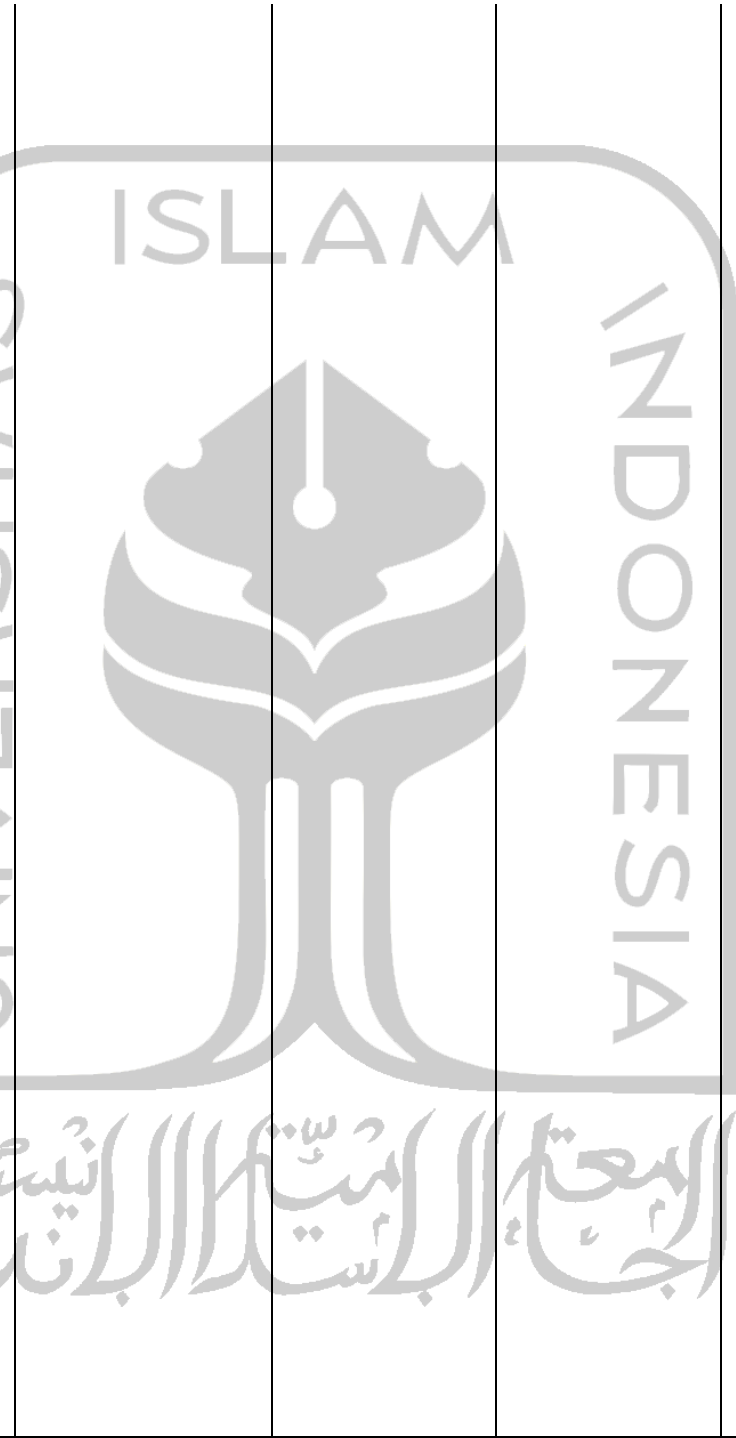


dan dari pengalaman ada garam yang Kok itu kayak gratifikasi Dan harus kita kirim ke peminta kita kirim ke KPK,

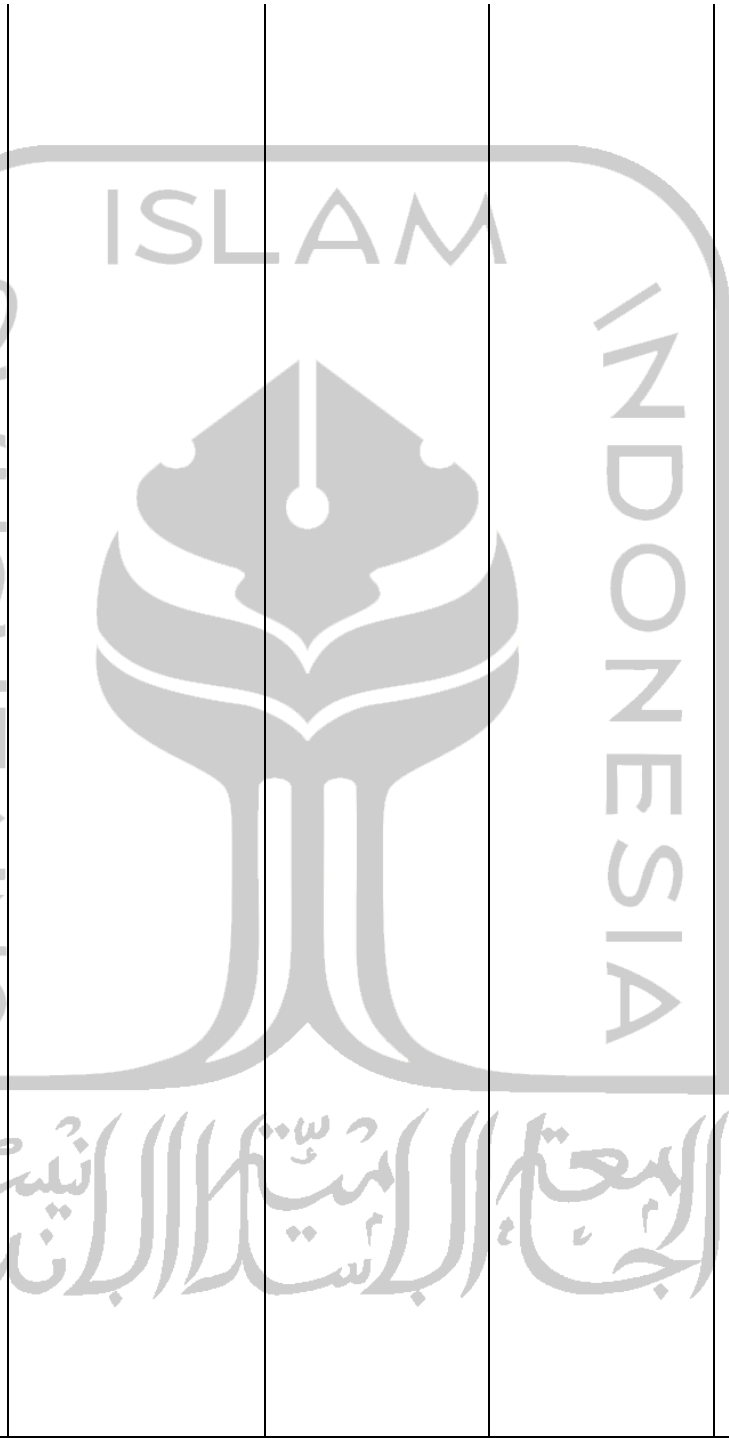
Pj : Itu satuan bersih pungutan liar, Kalau kita penyuluhan pungli nya hanya di opd opd kita, tapi kalau ke masyarakat-masyarakat itu tugasnya Kepolisian karena kepolisian itu kan punya Babinsa

Pj : Itu kepala-kepala upt nya kita kumpulkan kita lakukan penyuluhan juga. Terus yang kepala-kepala sekolah dan guru-guru, kepala-kepala sekolah kemarin bukan guru-guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah, SD dan SMP meskipun belum semua. Kan mestinya butuh nya kan se Sleman, jadi kemarin baru dua Angkatan baru bisa.

Pj : Oke, njih, kalau

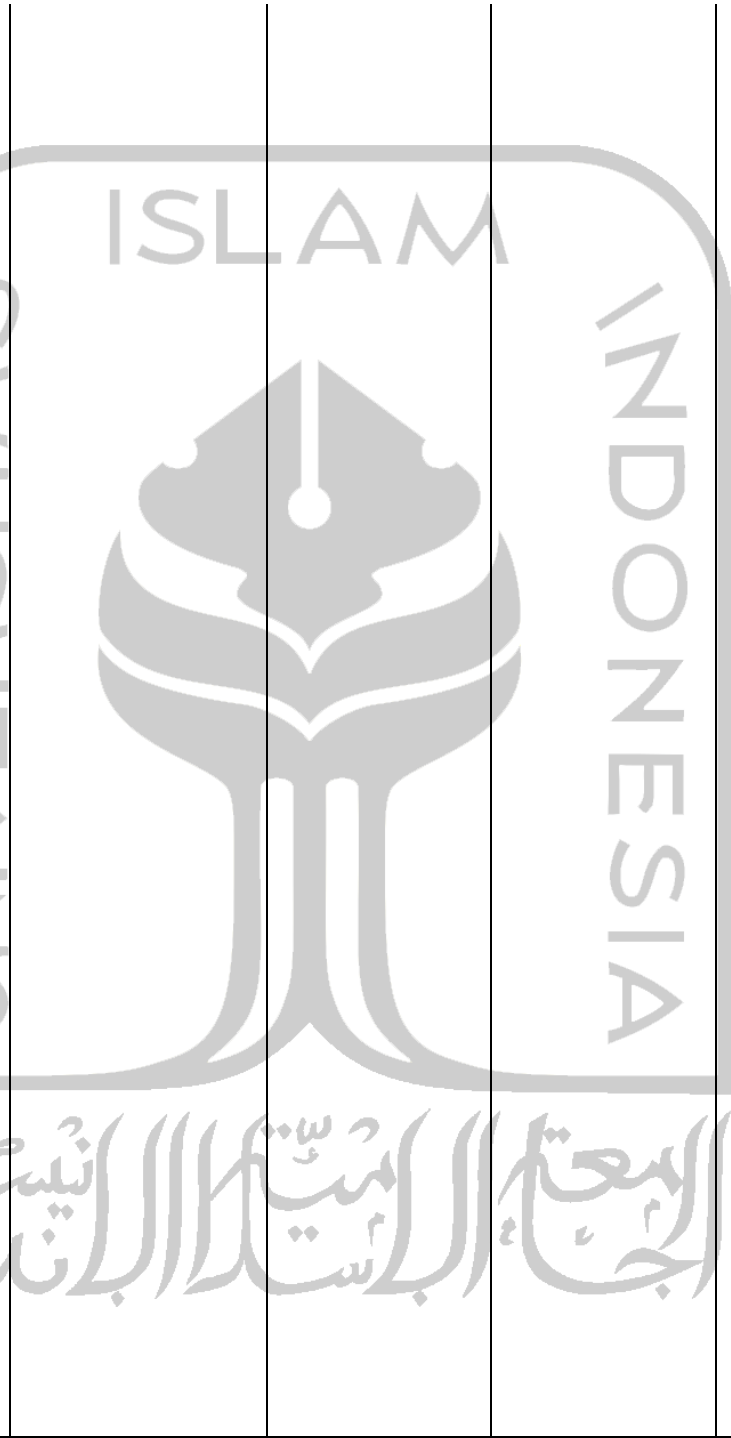


terkait dengan untuk pencegahan *fraud* sebetulnya kita itu sudah ada (apa namanya) mengirimkan SDM ya, mengirimkan SDM untuk mengikuti pelatihan atau diklat terkait dengan penyuluh *anti* korupsi. Nggih, sebelum jadi penyuluh ada pelatihan dulu ya, itu kita sudah mengirimkan ada kalau nggak salah ada 9 orang atau 7 orang untuk mengikuti diklat tersebut, setelah lulus diklat tersebut, kemudian yang bersangkutan harapannya mengikuti sertifikasi penyuluh *anti* korupsi, tetapi dari tujuh orang itu baru satu yang mengikuti penyuluhan *anti* korupsi, tadinya dua yang mengikuti tapi yang lulus baru satu, jadi kita baru mempunyai penyuluh *anti* korupsi yang telah bersertifikat oleh KPK itu satu orang, tetapi meskipun demikian, ketujuh orang yang pernah



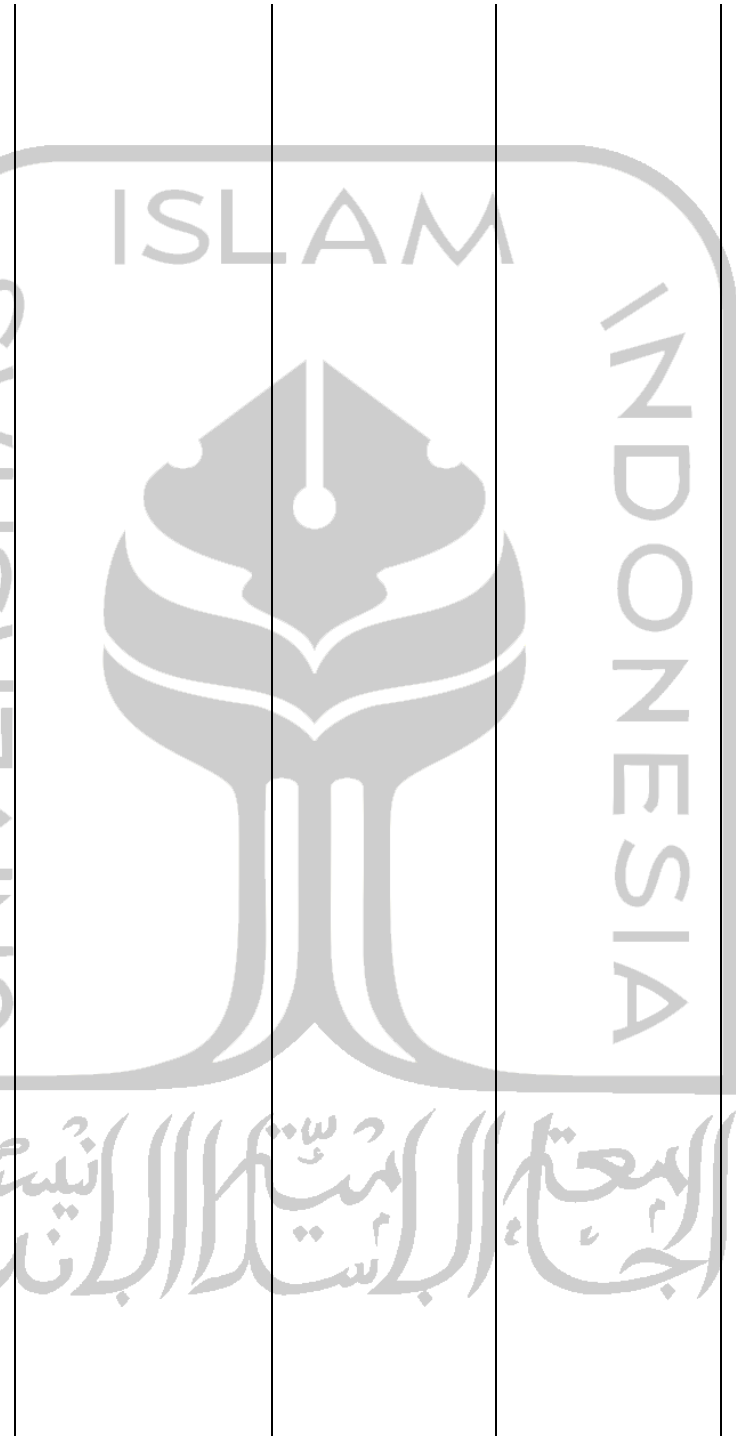


kita diklat kan pencegah *anti* korupsi ini juga bisa dimanfaatkan dalam rangka sosialisasi ke OPD-OPD. Kemudian kalau dibidang investigasi itu kan kegiatannya tidak hanya investigasi saja tapi juga reformasi birokrasi, itu memang personil nya baru delapan orang. Meskipun demikian bisa dibantu dengan bidang yang lain karena ketujuh orang itu tidak seluruhnya itu menyebar di bidang lain yang sudah mendapatkan pelatihan terkait dengan pencegahan korupsi. Kemudian untuk ke depannya terkait dengan (apa namanya) pendidikan *anti* korupsi ini tidak hanya di inspektorat, kami juga mengeluarkan mulai tahun kemarin mengeluarkan surat kami tujukan kepada seluruh OPD untuk mengirimkan personil nya guna mengikuti pelatihan atau melalui e-learning nya KPK,



tapi memang belum efektif hanya beberapa OPD yang mengirimkan personil nya untuk mengikuti pelatihan tersebut. Nah ini, metode seperti ini besok tahun ini juga akan kita kirimkan lagi kepada seluruh OPD untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut melalui e-learning dari KPK gitu termasuk juga inspektorat. Rencananya seluruh auditor disini harus mengikuti e-learning tersebut dengan materi berbeda-beda disesuaikan dengan keinginan mereka gitu. Untuk peningkatan SDM nya begitu, kalau jumlahnya tidak bisa. Jumlahnya ya memang seperti ini, gak bisa menambah dengan seenaknya, gak bisa, hanya peningkatan kualitas

Pj : Iya, kan itu pendaftaran e-learning KPK kan melalui inspektorat ya, jadi dari OPD mengirimkan nama ke kita, kita

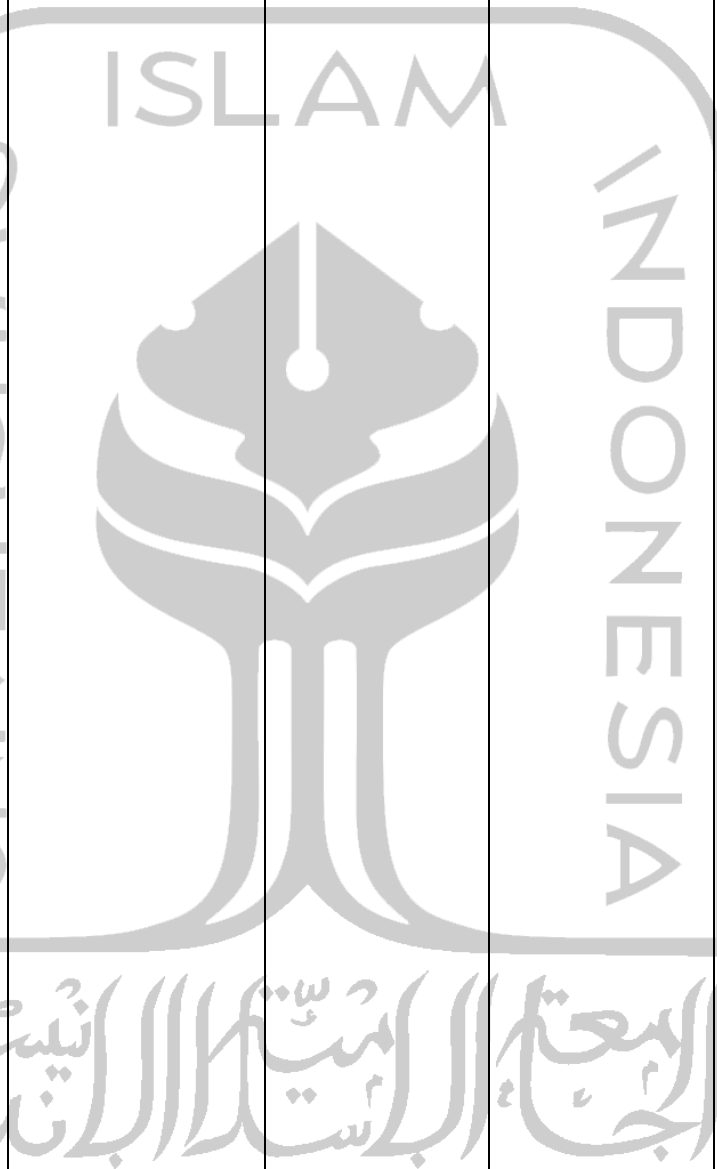


daftarkan ke KPK, kemudian dari KPK *nanti* mendapatkan notifikasi untuk pelatihan ini maka pelatihan ini *nanti* akan dibuka tanggal berapa tanggal berapa. Nah pada saat tanggalnya tersebut kita sampaikan kepada yang bersangkutan, mungkin yang bersangkutan lupa ya, nah kita juga tidak mengecek yang bersangkutan tanggal segini harusnya mengikuti e-learning gitu lo, nah itu satu menjadi catatan juga, terus yang kedua kita belum memberi peringatan pada OPD-OPD yang belum mengirimkan personil nya gitu, itu tidak efektifnya. Jadi sekedar (apa) karena tidak wajib kan gitu maka tidak mengirimkan gak apa-apa kan gitu, tapi kalau besok ya kita monitoring siapa opd yang belum mengirimkan, nah itu kita minta untuk segera mengirimkan personil.



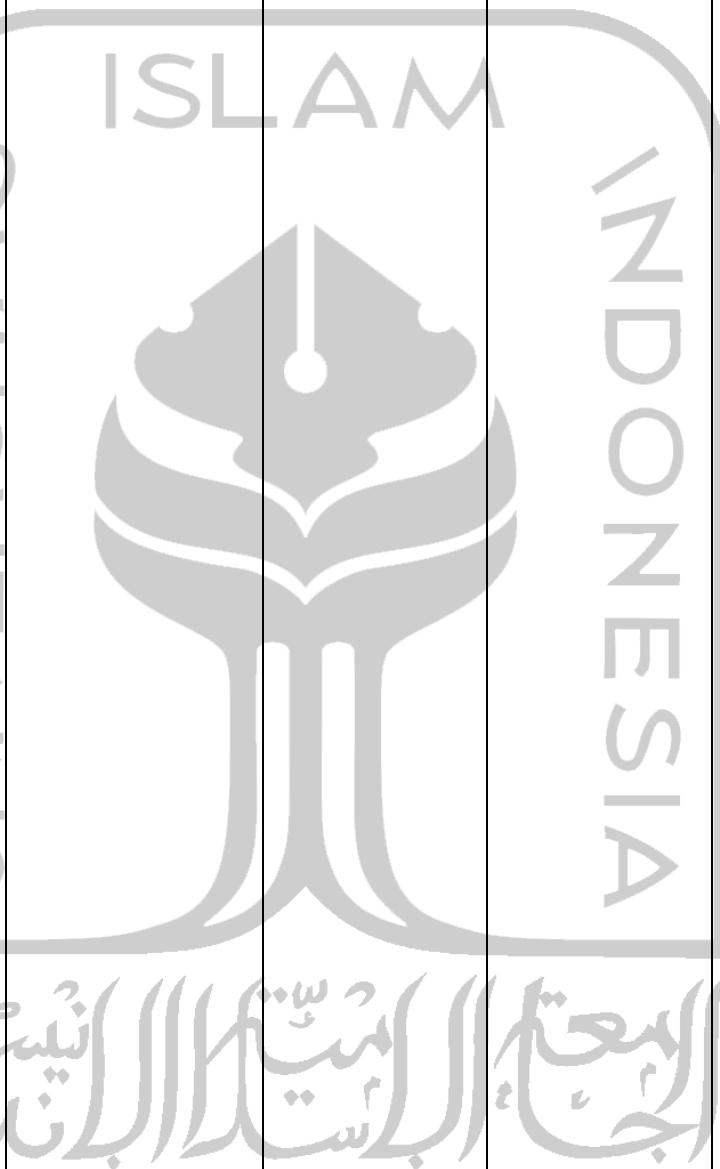
Pj : e-learning nya macam-macam tapi melalui link nya KPK, kalau materinya *nanti* kita pilih macam-macam terkait dengan pengendalian korupsi, pencegahan dan segala macam

Pj : Mungkin ya, kalau ini cuman kalau KPK ya, saya sendiri gak ngerti kenapa kok tatap mukanya sedikit ya. KPK itu tatap mukanya sangat sedikit sekali. Jadi syarat untuk mengikuti diklat nya KPK itu ada satu e-learning dengan materi khusus yang itu harus lulus, setelah lulus baru bisa mengikuti diklat nya KPK. Setelah diklat nya KPK ini lulus baru bisa *nanti* mengikuti sertifikasi *anti* korupsi, jadi ada beberapa tingkatan. Tapi ada e-learning khusus yang bisa mengikuti diklat tersebut kan gitu, ada. Kan e-learning nya KPK itu macam-macam macamnya. Macam-macam tapi



ada satu materi khusus yang bisa untuk dasar untuk mengikuti diklat nya KPK

Pj : Teman-teman kalau kemarin karena e-learning nya ini kan kemarin baru sekali teman-teman mengikuti jadi kami harapkan mengambilnya adalah dasar-dasar dari pengendalian korupsi iya, setelah dasar-dasar *nanti* ada lagi macam-macamnya. Banyak sekali disitu materi yang *nanti* kalau untuk teman-teman auditor disini memang kita pilihkan-kita yang memilihkan materi, jadi yang kalau yang dasarnya kemarin sudah mengikuti maka untuk tahun kita akan beri untuk materi yang lainnya gitu. Jadi kita punya daftar gitu jangan sampai satu orang *nanti* mengikuti e-learning dengan materi yang sama

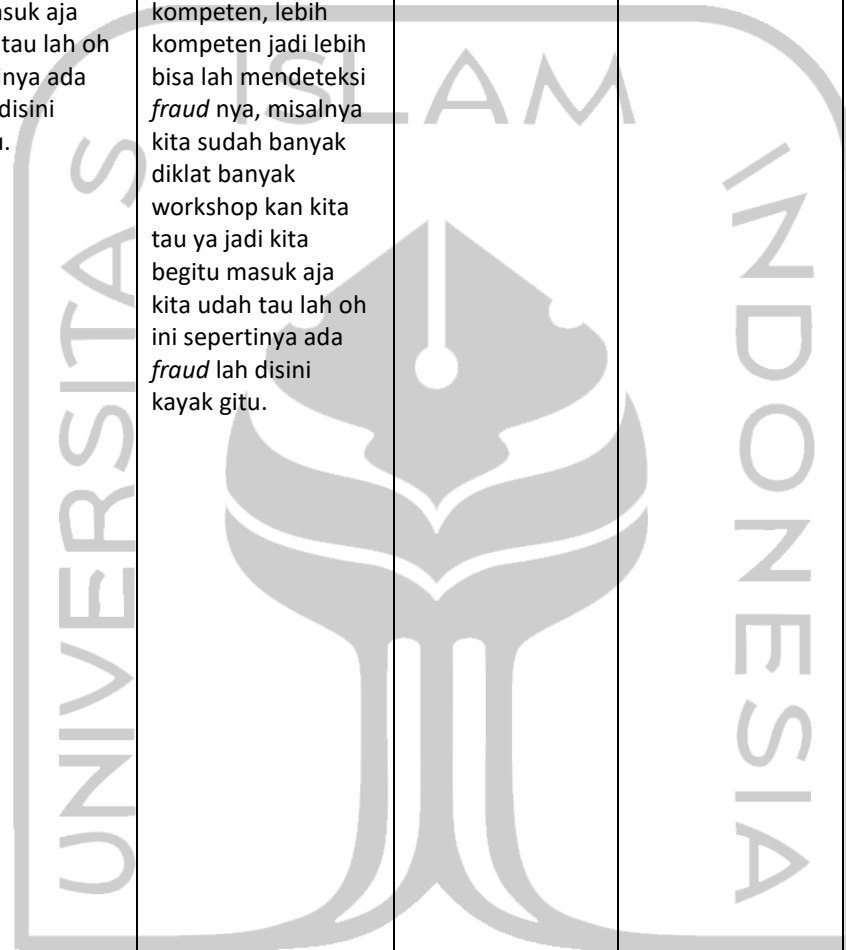


<p>5 : Ngatiah, S.H.</p>	<p>G Bisa juga sih. Mereka kan misalnya ya mau pengadaan barang jasa atau mau pengadaan tanah kas desa kan mereka juga konsultasi dulu ke kami nggih seperti apa <i>nanti</i> biar gak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya seperti itu.</p> <p>Rz Kalau untuk konsultasi tadi itu bu, itu ternasuk bisa mencegah <i>fraud</i> bu? G Bisa, karena mereka gini ya mau seperti ini langkahnya seperti apa yang bener, kayak gitu kan diharapkan mereka juga jadi tau prosesedurnya seperti apa, usaha yang harus dilakukan bagaimana jadi itu kan gak, diharapkan sih gak membuka peluang untuk</p>	<p>G Itu kemarin yang udah, yang udah itu kayak ini kalau <i>fraud</i> ini kemarin ada yang penyalahgunaan dana yang sampai kejaksaan juga ya, kan itu tahun 2020 atau 2021 ya itu, itu sampai di vonis di kejaksaan juga. Trus ada yang biasanya sih yang masuk ke APH APH itu ya <i>fraud</i> nya yang terjadi disini ada juga yang kasus-kasus di DPU itu juga, kalau itu untuk penindakannya ya, kalau untuk pencegahannya sih kita macam-macam ya, ada sosialisasi-sosialisasi juga, ada UPG, ada apa itu.</p> <p>G Gratifikasi selama ini sudah ada sarana tersendiri, kalau ada gratifikasi akan dilaporkan kayak gitu sudah ada sih, tapi belum semuanya ini juga sih, belum semuanya melapor, mungkin ya. Terus kalau gratifikasi kan ada gratifikasi yang diperbolehkan ada</p>	<p>G Bisa juga sih. Mereka kan misalnya ya mau pengadaan barang jasa atau mau pengadaan tanah kas desa kan mereka juga konsultasi dulu ke kami nggih seperti apa <i>nanti</i> biar gak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya seperti itu.</p> <p>G Kalau deteksi <i>fraud</i> itu kita kan ada pemeriksaan seperti itu, <i>nanti</i> kan kita lihat bukti, misalkan pengadaan ini bukti pertanggungjawabannya seperti ini, kan kita ya, terus <i>nanti</i> kita konfirmasi ke pihak ketiga kalau sudah bener apa belum kayak gitu <i>nanti</i> ada temuan-temuan yang harus ditindak lanjuti dan di evaluasi seperti itu, deteksinya dari situ sih kalau kita, di OPD juga kita periksa, <i>nanti</i> ada penyimpangan-penyimpangan kan kelihatan dari hasil</p>	<p>G Selain itu pelatihan kantor sendiri ada juga di kami ya, jadi misalnya kami itu mau meningkatkan kompetensi dengan PKS misalnya kami mau ada pemeriksaan, pemeriksaan tentang apa gitu kita mengundang narasumber tentang itu, misalnya tentang ppj kayak gitu, ngundang narasumbernya dari Ull juga kemarin, terus <i>nanti</i> tentang apa lagi gitu, jadi PKS terus diklat itu, kita banyaknya kesitu sih ya</p> <p>Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya</p>	<p>G Selain itu pelatihan kantor sendiri ada juga di kami ya, jadi misalnya kami itu mau meningkatkan kompetensi dengan PKS misalnya kami mau ada pemeriksaan, pemeriksaan tentang apa gitu kita mengundang narasumber tentang itu, misalnya tentang ppj kayak gitu, ngundang narasumbernya dari Ull juga kemarin, terus <i>nanti</i> tentang apa lagi gitu, jadi PKS terus diklat itu, kita banyaknya kesitu sih ya</p> <p>Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya</p>	<p>Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya mas ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p>	<p>G Kalau deteksi <i>fraud</i> itu kita kan ada pemeriksaan seperti itu, <i>nanti</i> kan kita lihat bukti, misalkan pengadaan ini bukti pertanggungjawabannya seperti ini, kan kita ya, terus <i>nanti</i> kita konfirmasi ke pihak ketiga kalau sudah bener apa belum kayak gitu <i>nanti</i> ada temuan-temuan yang harus ditindak lanjuti dan di evaluasi seperti itu, deteksinya dari situ sih kalau kita, di OPD juga kita periksa, <i>nanti</i> ada penyimpangan-penyimpangan kan kelihatan dari hasil pemeriksaan kami seperti itu ya</p> <p>Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya</p>
----------------------------------	---	---	---	---	---	--	---

<p>melakukan <i>fraud</i> seperti itu nggeh disamping pemeriksaan pemeriksaan kami yang sudah ada itu</p> <p>Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya mas ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p>	<p>yang enggak, ya yang itu yang dilaporkan. Kemarin banyak yang dilaporkan sih terutama kalau hari raya itu, tapi kesini-kesini akhirnya sekarang hampir sudah gak ada sih gratifikasi karna kita udah kesadaran ya kita udah sering sosialisasi kayak gitu jadi kita sudah jarang ada gratifikasi sekarang, makanya gak ada yang lapor karna memang gak ada nggih kayak dalam pbj, dalam apa itu gak seperti itu sih</p> <p>Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya mas ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya</p>	<p>pemeriksaan kami seperti itu ya</p> <p>Rz Kalau untuk konsultasi tadi itu bu, itu ternasuk bisa mencegah <i>fraud</i> bu? G Bisa, karena mereka gini ya mau seperti ini langkahnya seperti apa yang bener, kayak gitu kan diharapkan mereka juga jadi tau prosesedurnya seperti apa, usaha yang harus dilakukan bagaimana jadi itu kan gak, diharapkan sih gak membuka peluang untuk melakukan <i>fraud</i> seperti itu nggeh disamping pemeriksaan pemeriksaan kami yang sudah ada itu</p> <p>Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya</p>	<p>mas ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p>	<p>mas ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p>	<p>mas ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p>	<p>mas ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p>
--	---	---	--	--	--	--

kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada *fraud* lah disini kayak gitu.

G Itu sih saling berhubungan ya mas ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi *fraud* nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada *fraud* lah disini kayak gitu.



الجمعة الإسلامية بالاندونيسيا



6 : Pipit  
Tyas  
Ratna  
Puspita,  
S.H.,  
MPA.


P : Untuk beberapa hal ketika kita ingin membahas sesuatu yang fokus gitu kayak kemarin pernah kita, karna kemarin kita di mintai APH untuk menghitung kerugian, itu diminta untuk kerja sama dengan BPKP, mendatangkan mereka untuk melakukan pelatihan kantor sendiri intens untuk membahas tentang PKKN dengan bahasan kasus yang sedang kami kerjakan, jadi kalau untuk ini memang ke pelatihan kantor sendiri dan diklat-diklat sesuai dengan pengembangan kompetensinya.

P : Pelatihan kantor sendiri itu biasanya kami dengan BPKP karna instansi pembina kami kan BPKP dan workshop dan

P : Kalau yang tadi kan kaitannya dengan pemeriksaan yang dikhususkan ketika sudah ada, jadi dari pemeriksaan reguler terus kemudian diketahui ada kecurangan terus dilanjutkan dengan khusus pemeriksaan kasus dengan lebih diperdalam di penyimpangannya ya. Tapi kalau yang untuk pemeriksaan-reguler itu biasanya kami identifikasinya kami sebelum melakukan pemeriksaan itu ada identifikasi risiko, disitukan termasuk mengidentifikasi program-program krusial yang dikerjakan oleh OPD sebelum kami masuk biasanya kan kami identifikasi risikonya dulu, kayak misalnya pemeriksaan

P : Kalau yang tadi kan kaitannya dengan pemeriksaan yang dikhususkan ketika sudah ada, jadi dari pemeriksaan reguler terus kemudian diketahui ada kecurangan terus dilanjutkan dengan khusus pemeriksaan kasus dengan lebih diperdalam di penyimpangannya ya. Tapi kalau yang untuk pemeriksaan-reguler itu biasanya kami identifikasinya kami sebelum melakukan pemeriksaan itu ada identifikasi risiko, disitukan termasuk mengidentifikasi program-program krusial yang dikerjakan oleh OPD sebelum kami masuk biasanya kan kami identifikasi risikonya dulu, kayak misalnya pemeriksaan

				<p>lain-lain itu kalau kami disini mungkin istilahnya pelatihan kantor sendiri ya workshop pelatihan kantor sendiri ya setipe dengan itu sih, tapi kalau seminar kami tidak mengadakan sendiri, biasanya kami sesuai ada entah bahas mengenai apa itu temanya termasuk kebutuhan kami biasanya kami auditornya dikirim seminar gitu</p>	<p>desa, pengawasan desa. Itu kita mengidentifikasi risikonya itu dari ketepatan pelaporan terus pertanggungjawa ban terus banyak tidaknya temuan itu termasuk salah satu yang dipertimbangkan kita untuk memilih objek yang akan kami periksa, nah disitu termasuk cara mengidentifikasi disitu apakah kemungkinan terjadi ketidaktertiban belum tentu penyimpangan, maksudnya itu identifikasi awal di desa itu tertib apa enggak dari situ.</p> <p>P : Untuk beberapa hal ketika kita ingin membahas sesuatu yang fokus gitu kayak kemarin pernah kita, karna kemarin kita di mintai APH untuk menghitung</p>	<p>n terus banyak tidaknya temuan itu termasuk salah satu yang dipertimbangkan kita untuk memilih objek yang akan kami periksa, nah disitu termasuk cara mengidentifikasi disitu apakah kemungkinan terjadi ketidaktertiban belum tentu penyimpangan, maksudnya itu identifikasi awal di desa itu tertib apa enggak dari situ.</p> <p>P : Kalau selama ini belum eksplisit sebagai investigasi gitu, pernah ada selain pengembangan dari pemeriksaan sendiri laporan OPD, juga pernah ada permintaan dari APH memang, permintaan untuk kami inspektorat melakukan pemeriksaan kasus yang mereka tangani, nah waktu itu juga pernah investigatif, pernah di PKN, Cuma waktu itu PKN nya tidak jadi, jadi kalau</p>	
--	--	--	--	---	--	---	--

				<p>kerugian, itu diminta untuk kerja sama dengan BPKP, mendatangkan mereka untuk melakukan pelatihan kantor sendiri intens untuk membahas tentang PKKN dengan bahasan kasus yang sedang kami kerjakan, jadi kalau untuk ini memang ke pelatihan kantor sendiri dan diklat-diklat sesuai dengan pengembangan kompetensinya.</p>	<p>yang ini memang kalau proses investigasi tergantung ya mas, tergantung kalau misalnya permintaan APH ya berarti kita tergantung permintaan APH, suplai data ke kita apa, mereka maunya kita meriksa apa, ini sudah terfokus. Kalau yang investigasi yang dari laporan OPD juga kebanyakan sudah mengerucut ya bu ya,</p>	
--	--	--	---	--	---	--

الجمعة الإسلامية الاندونيسية

<p>7 : Retno Isni Satiti</p>	<p>Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak mengembangkan diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas membantu untuk</p>	<p>Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak mengembangkan diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas membantu untuk</p>	<p>Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak mengembangkan diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas membantu untuk</p>	<p>Rno Oh, kita sering ikutin seminar, Zoom, webinar, itu yang berkaitan dengan <i>anti</i> korupsi, mengikuti Bimtek itu, terus pelatihan di kantor sendiri dengan mengundang narasumber dari BPKP atau dari internal. Kebetulan kan inspektorat Sleman ini punya satu penyuluh <i>anti</i> korupsi. Nah di awal-awal belai menjadi narasumber kami dalam media PKS pelatihan di kantor sendiri. Rno Dari internal Ya, kadang kalau nggak melulu dari dalam, kadang dari luar Memang misalnya BPKP tersedia narasumber untuk yang kami butuhkan berkaitan dengan itu ya kami kesana Tapi kalau memang sih, kalau semacam PKS itu memang</p>	<p>Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak</p>	<p>Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau</p>	<p>Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak mengembangkan diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas</p>
------------------------------	---	---	---	--	--	---	--

	<p>kalau kita nggak mengembangkannya diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas membantu untuk pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p>	<p>pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p>	<p>pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p>	<p>dari internal bukan kita tergantung BKPP pada kepegawaian tadi, bukan Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku saya auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i></p>	<p>mengembangkan diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas membantu untuk pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p>	<p>membantu untuk pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p>	<p>membantu untuk pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p>
--	--	---	---	--	--	--	--

pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak mengembangkan diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas membantu untuk pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi *fraud* maupun yang bukan. Sangat-sangat.

Rno Oh saya terus terang, pengen semua teman-teman auditor itu diklatkan audit investigasi, audit penghitungan keuangan negara, audit yang mengarah pada kecurangan sehingga bisa membedakan auditnya itu khusus investigasi atau yang biasa. Jadi pengetahuan mereka itu tidak konfus. Ketika ada aduan tidak

serta-merta diterjunkan, bahkan tidak semua auditor saya harapannya, semua harapan saya, kalau harapan saya semua nih, dari jajaran inspektur sampai penunjang-pendukung artinya kesekretariatan yang berkaitan langsung dengan pemeriksaan investigasi maupun *fraud*, maupun PKN semua mendapat pengetahuan itu karena apa? Kita tuh semakin tidak menutup mata di kabupaten, kota yang lain sudah banyak yang terjadi. Naudzubillah mindzalik jangan sampai terjadi di Sleman ya. Ya maksudnya itu pengetahuan itu sangat dibutuhkan karena memang ada MOU dengan APH sehingga ketika menerima penugasan itu apakah layak

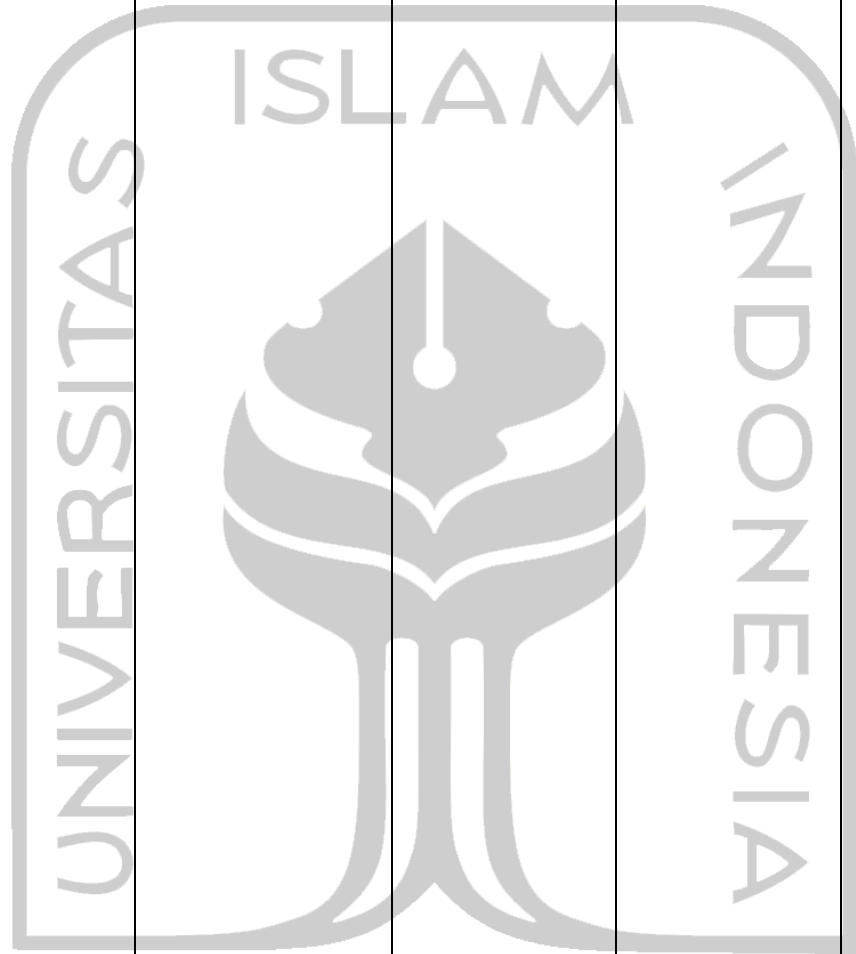
dinaikkan untuk dilakukan pemeriksaan investigasi atau pemeriksaan penghitungan ke anggaran. Jadi kita bisa men-stop sih, mana sih yang harus dinaikkan, mana yang tidak mana sih yang harus dilakukan mana yang tidak, mana sih yang harus diterima mana yang tidak saya sih harapannya semua itu semuanya justru yang terkait paling enggak auditor semua ya dikursuskan Kalau memang anggarannya terbatas yang berkaitan dengan *fraud* Sering-sering lah menerima melalui PKS itu tentang pengetahuan, menerima pengetahuan tentang itu. Sehingga tidak saling *nantinya*, ketika kita kan, yang namanya auditor, ketika melakukan



pemeriksaan  
tidak bisa  
membatasi  
pertanyaan dari  
yang diperiksa.  
Misalnya nih Mas  
Reza, auditor  
bidang  
pemerintahan,  
tiba-tiba ditanya  
waktu ke desa,  
Mas, apa sih  
audit investigasi?  
Lah kalau nggak  
tahu kan ya, masa  
Mas Reza, oh itu  
ada di bidang  
kami khusus  
investigasi. Kan  
gak lucu mas.

الجمعة الإسلامية الاندونيسية

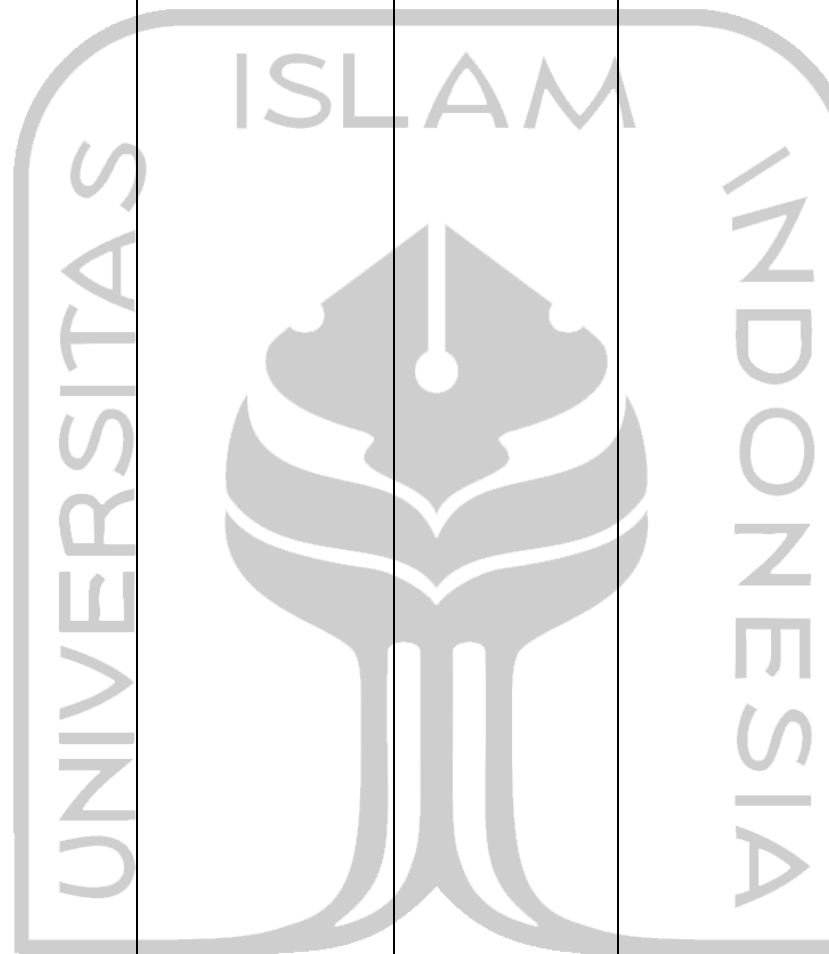
Narasumber	W : 4. PKS Kapabilitas APIP	X : 5. PKS Reviu tertentu	Y : 6. PKS Audit Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	Z : e. Seminar atau Webinar	AA : 1. Tentang Stranas PK Potensi <i>Fraud</i>	AB : 2. Tentang <i>Anti</i> Korupsi	AC : 3. Tentang Pengawasan
------------	-----------------------------	---------------------------	---	-----------------------------	---	-------------------------------------	----------------------------



الجامعة الإسلامية الاندونيسية

<p>1 : Heri Setyawati , S.E., M.Acc.</p>	<p>P : Kalau saya, kalau jenis pelatihannya ya mas, kita milih sesuai sama kebutuhan kami inspektorat, jadi kebanyakan itu pelatihan yang disediakan oleh bpkp atau oleh bpk kan kaitannya dengan audit kan, dan untuk kalau mereka yang mengadakan kan biasanya tetap bareng-bareng entah bareng pemda lain entah dengan institusi lain yang setipe bedanya inspektorat jenderal itu, jadi bukan terus saya nyari sendiri terus saya keluar, jadi tetap terorganisir lewat kantor, kantor koordinasi dengan apa lembaga diklatnya, kemudian juga koordinasi dengan apa badan kepegawaian kaitannya dengan dukungan anggaran, jadi analisis kebutuhan masing-masing auditor, jadi saya butuh diklat apa dan lain-lain bukan saya yang menentukan tapi</p>	<p>P : Kalau saya, kalau jenis pelatihannya ya mas, kita milih sesuai sama kebutuhan kami inspektorat, jadi kebanyakan itu pelatihan yang disediakan oleh bpkp atau oleh bpk kan kaitannya dengan audit kan, dan untuk kalau mereka yang mengadakan kan biasanya tetap bareng-bareng entah bareng pemda lain entah dengan institusi lain yang setipe bedanya inspektorat jenderal itu, jadi bukan terus saya nyari sendiri terus saya keluar, jadi tetap terorganisir lewat kantor, kantor koordinasi dengan apa lembaga diklatnya, kemudian juga koordinasi dengan apa badan kepegawaian kaitannya dengan dukungan anggaran, jadi analisis kebutuhan masing-masing auditor, jadi saya butuh diklat apa dan lain-lain bukan saya yang menentukan tapi</p>	<p>P : Kalau saya, kalau jenis pelatihannya ya mas, kita milih sesuai sama kebutuhan kami inspektorat, jadi kebanyakan itu pelatihan yang disediakan oleh bpkp atau oleh bpk kan kaitannya dengan audit kan, dan untuk kalau mereka yang mengadakan kan biasanya tetap bareng-bareng entah bareng pemda lain entah dengan institusi lain yang setipe bedanya inspektorat jenderal itu, jadi bukan terus saya nyari sendiri terus saya keluar, jadi tetap terorganisir lewat kantor, kantor koordinasi dengan apa lembaga diklatnya, kemudian juga koordinasi dengan apa badan kepegawaian kaitannya dengan dukungan anggaran, jadi analisis kebutuhan masing-masing auditor, jadi saya butuh diklat apa dan lain-lain bukan saya yang menentukan tapi</p>	<p>H : Ya mengeluarkan surat edaran tentang <i>anti</i> gratifikasi, kemudian kita juga ada sosialisasi <i>anti</i> korupsi ke berbagai hampir ke semua skpd, kemudian pendampingan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepada SKPD, artinya biar <i>nanti</i> untuk mencegah itu kan, pendampingannya a kia laksanakan dulu jangan sampai <i>nanti</i> maksudnya pendampingan biar tugas pokok dan fungsinya SKPD itu berjalan baik, kemudian kalau semuanya baik kan berarti menghindarkan dari <i>fraud</i>, kemudian kita juga, apa istilahnya itu Mba Pipit</p> <p>P : Pelatihan kantor sendiri itu</p>	<p>H : Ya mengeluarkan surat edaran tentang <i>anti</i> gratifikasi, kemudian kita juga ada sosialisasi <i>anti</i> korupsi ke berbagai hampir ke semua skpd, kemudian pendampingan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepada SKPD, artinya biar <i>nanti</i> untuk mencegah itu kan, pendampingannya kia laksanakan dulu jangan sampai <i>nanti</i> maksudnya pendampingan biar tugas pokok dan fungsinya SKPD itu berjalan baik, kemudian kalau semuanya baik kan berarti menghindarkan dari <i>fraud</i>, kemudian kita juga, apa istilahnya itu Mba Pipit</p> <p>H : Kalau ini, ini berawal dari, yang pernah ya, yang dua-duanya pernah sih. Artinya pengembangan temuan dari hasil pemeriksaan inspektorat sendiri</p>	<p>P : Pelatihan kantor sendiri itu biasanya kami dengan BPKP karna instansi pembina kami kan BPKP dan workshop dan lain-lain itu kalau kami disini mungkin istilahnya pelatihan kantor sendiri ya workshop pelatihan kantor sendiri ya setipe dengan itu sih, tapi kalau seminar kami tidak mengadakan sendiri, biasanya kami sesuai ada entah bahas mengenai apa itu temanya termasuk kebutuhan kami biasanya kami auditornya dikirim seminar gitu</p>
--	---	---	---	---	--	--

	<p>kepegawaian kaitannya dengan dukungan anggaran, jadi analisis kebutuhan masing-masing auditor, jadi saya butuh diklat apa dan lain-lain bukan saya yang menentukan tapi tetap bagian kepegawaian dan sekretaris yang menentukan, dan itu biasanya pertimbangannya dari posisi kami dibidang sih tergantung bidangnya apa.</p>	<p>tetap bagian kepegawaian dan sekretaris yang menentukan, dan itu biasanya pertimbangannya dari posisi kami dibidang sih tergantung bidangnya apa.</p>	<p>tetap bagian kepegawaian dan sekretaris yang menentukan, dan itu biasanya pertimbangannya dari posisi kami dibidang sih tergantung bidangnya apa.</p>		<p>biasanya kami dengan BPKP karna instansi pembina kami kan BPKP dan workshop dan lain-lain itu kalau kami disini mungkin istilahnya pelatihan kantor sendiri ya workshop pelatihan kantor sendiri ya setipe dengan itu sih, tapi kalau seminar kami tidak mengadakan sendiri, biasanya kami sesuai ada entah bahas mengenai apa itu temanya termasuk kebutuhan kami biasanya kami auditornya dikirim seminar gitu</p>	<p>kemudian ada laporan dari SKPD yang lain, maksudnya dari dinas teknis yang lain, kemudian oleh inspektorat ditindak lanjuti dengan, kalau dulu-dulu sih namanya bukan investigasi ya, masih pemeriksaan kasus seperti itu dan selama ini yang kami laksanakan istilahnya dengan pengenaan tuntutan ganti rugi, artinya kalau ada ketekoran kas maksudnya kerugian yang berkaitan dengan keuangan daerah itu untuk segera disetorkan kembali ke kas daerah, kek gitu, tapi belum pernah kami melimpahkan ke APH.</p> <p>P : Pelatihan kantor sendiri itu biasanya kami dengan BPKP karna instansi pembina kami kan BPKP dan workshop dan lain-lain itu kalau kami disini mungkin istilahnya pelatihan kantor sendiri ya workshop pelatihan kantor</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--



sendiri ya setipe dengan itu sih, tapi kalau seminar kami tidak mengadakan sendiri, biasanya kami sesuai ada entah bahas mengenai apa itu temanya termasuk kebutuhan kami biasanya kami auditornya dikirim seminar gitu

الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

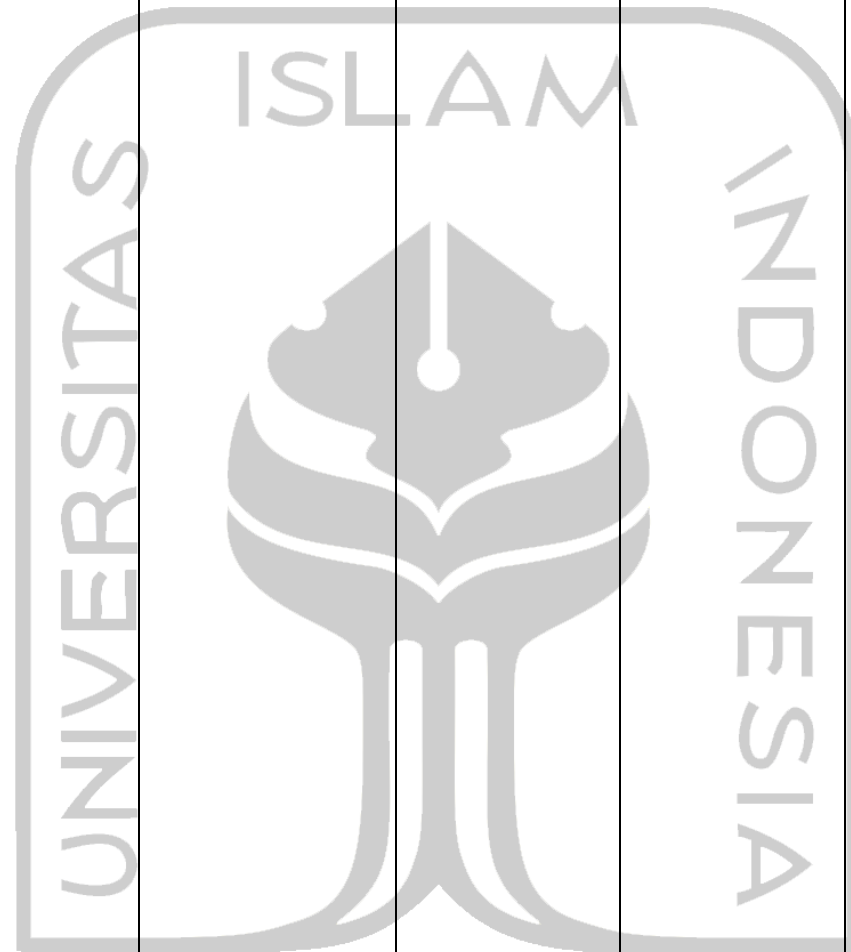
<p>2 : Hery Dwi Kuryanto, S.H., M.Hum.</p>	<p>Hy Ya, jadi tujuannya kalau untuk inspektorat, Pasti pelatihan apapun itu, pasti mendukung itu. Jadi kecurangan semua itu kalau yang namanya APIP, Pasti dalam rangka untuk menghindari kecurangan. Tidak ada pelatihan yang di sini tanpa...Aktifitas yang dilakukan oleh inspektorat itu semua menuju ke sana.</p>	<p>Hy Ya, jadi tujuannya kalau untuk inspektorat, Pasti pelatihan apapun itu, pasti mendukung itu. Jadi kecurangan semua itu kalau yang namanya APIP, Pasti dalam rangka untuk menghindari kecurangan. Tidak ada pelatihan yang di sini tanpa...Aktifitas yang dilakukan oleh inspektorat itu semua menuju ke sana.</p>	<p>Hy Ya, jadi tujuannya kalau untuk inspektorat, Pasti pelatihan apapun itu, pasti mendukung itu. Jadi kecurangan semua itu kalau yang namanya APIP, Pasti dalam rangka untuk menghindari kecurangan. Tidak ada pelatihan yang di sini tanpa...Aktifitas yang dilakukan oleh inspektorat itu semua menuju ke sana.</p>	<p>Hy Ya, jadi tujuannya kalau untuk inspektorat, Pasti pelatihan apapun itu, pasti mendukung itu. Jadi kecurangan semua itu kalau yang namanya APIP, Pasti dalam rangka untuk menghindari kecurangan. Tidak ada pelatihan yang di sini tanpa...Aktifitas yang dilakukan oleh inspektorat itu semua menuju ke sana.</p>	<p>Hy Ya, jadi tujuannya kalau untuk inspektorat, Pasti pelatihan apapun itu, pasti mendukung itu. Jadi kecurangan semua itu kalau yang namanya APIP, Pasti dalam rangka untuk menghindari kecurangan. Tidak ada pelatihan yang di sini tanpa...Aktifitas yang dilakukan oleh inspektorat itu semua menuju ke sana.</p>	<p>Hy Ya, jadi tujuannya kalau untuk inspektorat, Pasti pelatihan apapun itu, pasti mendukung itu. Jadi kecurangan semua itu kalau yang namanya APIP, Pasti dalam rangka untuk menghindari kecurangan. Tidak ada pelatihan yang di sini tanpa...Aktifitas yang dilakukan oleh inspektorat itu semua menuju ke sana.</p>
--	---	---	---	---	---	---

الجمعة الاستاذة الاندو

3 : Ika  
Sulistyo  
Devi



I Pencegahannya untuk *anti-fraud* misalnya adanya SOP dalam pelaksanaan kegiatan, entah itu *nanti* terutama yang di kami ya, di kami itu tentang SOP pendistribusian LHP, laporan hasil pemeriksaan, kemudian tentang pemutakhiran tindak lanjut gitu, kalau yang di keuangan juga ada, bagaimana SOP untuk penyusunan dokumen pelaksana anggaran, Kemudian untuk SOP pengelolaan barang juga ada. Salah satunya itu. Kemudian ada lagi yang kita juga *anti-fraud*, *fraud* kan anu ya kecurangan ya. Itu juga misalnya pelatihan. Jadi kan peningkatan kompetensi itu kan diharapkan *nantifraudnya* kalau hilang sama sekali sih mungkin bertahap ya, tapi peningkatan kompetensi itu kan juga diharapkan berkurang lah *fraudnya* itu.



Kemudian juga ada untuk pakta integritas, kami setiap ASN di inspektorat terutama itu harus menandatangani pakta integritas.

الجامعة الإسلامية  
الاستد بالاندو



4 : Ir. Sri  
Puji  
Lestari

Pj : Salah satu dari SPIP itu, SPIP yang tahun sekarang itu kan mengalami pengembangan, apa namanya, materinya itu bertambah, tidak hanya SPIP melulu, tapi dalam SPIP itu sekarang ada, unit apa sub-sub penilaian SPIP terkait dengan IUPK itu indeks IUPK Korupsi hm em. Amanat dari SPIP itu yaitu, SPIP itu kan ada terkait juga apa namanya IUPK indeks indeks pengendalian korupsi juga Maka langkah pertama Yang dilakukan itu adalah melakukan analisis penilaian kejadian *fraud* di setiap kegiatan yang dilakukan, jadi memang baru tahun kemarin kita lakukan karena kalau tahun-tahun dulu itu SPIP Tidak sampai ke *fraud* jadi Hanya analisis risiko, risiko-risiko yang apa Menghambat atau menggagalkan capaian tujuan kegiatan Tapi SPIP itu kan mengalami perkembangan baru

Pj : Kalau di undang- undang- undang-nya ASN itu kan memang ada aturan setiap pegawai itu setiap pegawai itu harus mendapatkan pelatihan atau pengembangan kompetensi itu sekurang- kurangnya 20 JPL, harus 20 JPL, kalau untuk kita semuanya pake, ada beberapa sih gak semuanya pegawai kita kirim ke luar tapi ada juga kita mengadakan sendiri untuk seluruhnya termasuk sekretariat, karena untuk memenuhi minimal 20 JPL itu. Terus yang ketiga juga teman-teman pada saat ada sosialisasi dari luar ,OPD itu juga pengembangan kompetensi juga, itu juga sesuai dengan bidangnya masing-masing sih itu. Kemudian

Pj : Iya dari KPK, jadi sekarang di setiap inspektorat itu harus ada bidang khusus yang menangani investigative, karna kan sekarang banyak kegiatan kegiatan dari KPK yang diturunkan ke daerah, banyak sekali. Kemarin itu karena belum ada bidang sendiri maka ditangani oleh kantor. Jenengan bisa bayangkan sekretariat harunya menangani masalah interen kantor, tapi juga menangani masalah-masalah dari luar, jadi kegiatannya belum ditampung oleh bidang semuanya masuk ke sekretariat. Jadi sekretariat kita menangani. Di KPK itu ada kegiatan monitoring percepatan pemberantasan korupsi atau mjb, kalau mungkin

Pj : Iya dari KPK, jadi sekarang di setiap inspektorat itu harus ada bidang khusus yang menangani investigative, karna kan sekarang banyak kegiatan kegiatan dari KPK yang diturunkan ke daerah, banyak sekali. Kemarin itu karena belum ada bidang sendiri maka ditangani oleh kantor. Jenengan bisa bayangkan sekretariat harunya menangani masalah interen kantor, tapi juga menangani masalah-masalah dari luar, jadi kegiatannya belum ditampung oleh bidang semuanya masuk ke sekretariat. Jadi sekretariat kita menangani. Di KPK itu ada kegiatan monitoring percepatan pemberantasan korupsi atau mjb, kalau mungkin jenengan kenal, mjb KPK, kemudian ada lagi inspektorat yang harus melakukan monitoring,

Pj : Terkait materi pengawasan tapi seputar DIY sih

Pj : Oh iya, kan itu ya, saya itu sadar saya itu udah generasi tua ya untuk media sosial tidak begitu paham ya, tapi teman-teman saya kan juga banyak yang muda-muda, yang sepentaran nya anak-anak itu ya mereka itu yang saya tugaskan itu, jadi kalau ada informasi seperti itu ya informasikan, kan kita punya anggaran kan gitu. Yang sering itu UGM, kemudian UII, belum pernah kek nya kita seminar disana toh, di semarang malah pernah sekali, tapi soalnya kan terbatas terkait dengan pengawasan

		<p>kemarin Itu ada tambahan sekarang Tambahan iupk itu</p>	<p>ya kita menggalakkan itu webinar yang dari online-online itu</p> <p>Pj : Iya tidak mengeluarkan uang, kita juga menganggarkan seminar workshop ada kita kirimkan mereka paling endak setahun dua kali</p> <p>Pj : Terkait materi pengawasan tapi seputar DIY sih</p> <p>Pj : Tidak menginap, biasanya itu universitas yang mengadakan. Workshop, seminar itu kita anggarkan mereka</p> <p>Rz : Menarik sih bu kalau saya dengar ternyata dari inspektorat sendiri yang base nya itu di bawah pemerintahan negeri ternyata juga mengizinkan mengikuti seminar yang dari pihak swasta dan yang lain.</p>	<p>jenengan kenal, mjb KPK, kemudian ada lagi inspektorat yang harus melakukan monitoring, kemudian juga adalagi monitoring penerapan stranas pemberantasan korupsi KPK, adalagi. Kemudian ada lagi kpk juga ngobli dia ee dia.</p> <p>Pj : Gambarnya itu harus melakukan pencegahan terkait dengan korupsi, <i>nanti</i> banyak disosialisasi di</p> <p>Pj : Jadi kalau kemarin karena baru-baru Jadi kita mencoba membuat, Kemudian kita share itu semua ke unit-unit kerja Contohnya seperti ini menyesuaikan dengan kegiatannya Itu kadang opd juga</p>	<p>kemudian juga adalagi monitoring penerapan stranas pemberantasan korupsi KPK, adalagi. Kemudian ada lagi kpk juga ngobli dia ee dia.</p> <p>Pj : Gambarnya itu harus melakukan pencegahan terkait dengan korupsi, <i>nanti</i> banyak disosialisasi di</p> <p>Pj : Jadi kalau kemarin karena baru-baru Jadi kita mencoba membuat, Kemudian kita share itu semua ke unit-unit kerja Contohnya seperti ini menyesuaikan dengan kegiatannya Itu kadang opd juga belum ngeh gitu loh laporannya tidak ada <i>fraud</i> tidak ada <i>fraud</i> tambah akan yang namanya penilaian resiko itu penilaian yang terjadi atau yang mungkin terjadi kan gitu Jadi kalau dalam pikirannya nggak pernah ada jadi seakan-akan yang sudah terjadi kan gitu, mungkin</p>
--	--	--	---	---	---

			<p>Pj : Oh iya</p> <p>Pj : Oh iya, kan itu ya, saya itu sadar saya itu udah generasi tua ya untuk media sosial tidak begitu paham ya, tapi teman-teman saya kan juga banyak yang muda-muda, yang seantaranya anak-anak itu ya mereka itu yang saya tugaskan itu, jadi kalau ada informasi seperti itu ya informasikan, kan kita punya anggaran kan gitu. Yang sering itu UGM, kemudian UII, belum pernah ke nya kita seminar disana toh, di semarang malah pernah sekali, tapi soalnya kan terbatas terkait dengan pengawasan</p> <p>Pj : Workshop, seminar iya kita selalu menganggarkan dua kali, mengirimkan</p>	<p>belum ngeh gitu loh laporannya tidak ada <i>fraud</i> tidak ada <i>fraud</i> tambah akan yang namanya penilaian resiko itu penilaian yang terjadi atau yang mungkin terjadi kan gitu Jadi kalau dalam pikirannya nggak pernah ada jadi seakan-akan yang sudah terjadi kan gitu, mungkin kalau penilaian resiko seperti itu ya itu jadi langkah pertama ya itu kalau terkait dengan <i>fraud</i>. Penilaian resiko <i>fraud</i> Terjadi, Tapi saya itu sendiri tidak bisa membedakan ya antara <i>fraud</i> dengan agenda <i>anti</i> korupsi lainnya Oh ya kalau untuk pencegahan Kita yaitu melakukan sosialisasi-sosialisasi pencegahan pungli Kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan Khusus pungli. Tapi kalau pencegahan gratifikasi Maka hanya inspektorat yang melakukan Kita melakukan kepada seluruh opd Seluruh unit kerja, Dan kemarin kita khususkan kepada Sekolah. Sekolah SD SMP itu kita lakukan penyuluhan pencegahan gratifikasi iya</p> <p>Pj : Kan di inspektorat sebagai PG unit pengendalian gratifikasi Nya kabupaten ,Salah</p>	<p>kalau penilaian resiko seperti itu ya itu jadi langkah pertama ya itu kalau terkait dengan <i>fraud</i>. Penilaian resiko <i>fraud</i> Terjadi, Tapi saya itu sendiri tidak bisa membedakan ya antara <i>fraud</i> dengan agenda <i>anti</i> korupsi lainnya Oh ya kalau untuk pencegahan Kita yaitu melakukan sosialisasi-sosialisasi pencegahan pungli Kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan Khusus pungli. Tapi kalau</p>
--	--	--	---	--	---

			peserta	<p>           pencegahan gratifikasi Maka hanya inspektorat yang melakukan Kita melakukan kepada seluruh opd Seluruh unit kerja, Dan kemarin kita khususkan kepada Sekolah. Sekolah SD SMP itu kita lakukan penyuluhan pencegahan gratifikasi iya         </p> <p>           Pj : Kan di inspektorat sebagai PG unit pengendalian gratifikasi Nya kabupaten ,Salah satu kegiatannya itu Terus yang kedua kita membagi selebaran brosur pencegahan gratifikasi kepada sub-sub unit dan juga kita menerima nah ini setiap hari raya kita mengeluarkan surat edaran yang ditandatangani oleh Bupati kepada seluruh perangkat daerah sampai desa dan         </p>	<p>           satu kegiatannya itu Terus yang kedua kita membagi selebaran brosur pencegahan gratifikasi kepada sub-sub unit dan juga kita menerima nah ini setiap hari raya kita mengeluarkan surat edaran yang ditandatangani oleh Bupati kepada seluruh perangkat daerah sampai desa dan kepada ini konsorsium Kelompoknya pengusaha kelompok-kelompok pengusaha koperasi Kelompok Kadit segala macam gitu kelompok pengusaha dan itu kita sampaikan pencegahan gratifikasi maksudnya tidak usah memberi ke pegawai pemerintahan. ini besok mau kita mau tekankan lagi. Salah satunya itu kemudian dari surat itu nanti kalau ada pelaporan penerimaan gratifikasi maka wajib melaporkan melaporkan kemarin bisa         </p>
--	--	--	---------	---	--



kepada ini konsorsium Kelompoknya pengusaha kelompok-kelompok pengusaha koperasi Kelompok Kadit segala macam gitu kelompok pengusaha dan itu kita sampaikan pencegahan gratifikasi maksudnya tidak usah memberi ke pegawai pemerintahan. ini besok mau kita mau tekankan lagi. Salah satunya itu kemudian dari surat itu *nanti* kalau ada pelaporan penerimaan gratifikasi maka wajib melaporkan melaporkan kemarin bisa langsung ke KPK bisa juga langsung melalui UPG UPG kita *nanti* kita yang melaporkan ke KPK dan dari pengalaman ada garam yang Kok itu kayak gratifikasi Dan

langsung ke KPK bisa juga langsung melalui UPG UPG kita *nanti* kita yang melaporkan ke KPK dan dari pengalaman ada garam yang Kok itu kayak gratifikasi Dan harus kita kirim ke peminta kita kirim ke KPK,

Pj : Itu kepala-kepala upt nya kita kumpulkan kita lakukan penyuluhan juga. Terus yang kepala-kepala sekolah dan guru-guru, kepala-kepala sekolah kemarin bukan guru-guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah, SD dan SMP meskipun belum semua. Kan mestinya butuh nya kan se Sleman, jadi kemarin baru dua Angkatan baru bisa.

harus kita kirim ke peminta kita kirim ke KPK,

Pj : Itu satuan bersih pungutan liar, Kalau kita penyuluhan pungli nya hanya di opd opd kita, tapi kalau ke masyarakat-masyarakat itu tugasnya Kepolisian karena kepolisian itu kan punya Babinsa

Pj : Itu kepala-kepala upt nya kita kumpulkan kita lakukan penyuluhan juga. Terus yang kepala-kepala sekolah dan guru-guru, kepala-kepala sekolah kemarin bukan guru-guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah, SD dan SMP meskipun belum semua. Kan mestinya butuh nya kan se Sleman, jadi kemarin baru dua Angkatan baru bisa.

<p>5 : Ngatiyah, S.H.</p>	<p>Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya mas ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p>	<p>G Kalau deteksi <i>fraud</i> itu kita kan ada pemeriksaan seperti itu, <i>nanti</i> kan kita lihat bukti, misalkan pengadaan ini bukti pertanggungjawabannya seperti ini, kan kita ya, terus <i>nanti</i> kita konfirmasi ke pihak ketiga kalau sudah bener apa belum kayak gitu <i>nanti</i> ada temuan-temuan yang harus ditindak lanjuti dan di evaluasi seperti itu, deteksinya dari situ sih kalau kita, di OPD juga kita periksa, <i>nanti</i> ada penyimpangan-penyimpangan kan kelihatan dari hasil pemeriksaan kami seperti itu ya</p> <p>Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya mas</p>	<p>G Kalau deteksi <i>fraud</i> itu kita kan ada pemeriksaan seperti itu, <i>nanti</i> kan kita lihat bukti, misalkan pengadaan ini bukti pertanggungjawabannya seperti ini, kan kita ya, terus <i>nanti</i> kita konfirmasi ke pihak ketiga kalau sudah bener apa belum kayak gitu <i>nanti</i> ada temuan-temuan yang harus ditindak lanjuti dan di evaluasi seperti itu, deteksinya dari situ sih kalau kita, di OPD juga kita periksa, <i>nanti</i> ada penyimpangan-penyimpangan kan kelihatan dari hasil pemeriksaan kami seperti itu ya</p> <p>Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya mas</p>	<p>G Hm em, untuk umum ada juga, untuk APIP ada juga, terus kita seminar-seminar itu ikut juga, webinar, seminar kayak gitu. Kita memang dianggarkan ya, di kantor juga seminar-seminar kemana, kalau enggak ya webinar-webinar, kalau sekarang ya seringnya webinar-webinar. Kalau dulu ya harus seminar datang masih kalau sekarang enggak</p> <p>Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya mas ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi</p>	<p>G Itu kemarin yang udah, yang udah ya, yang udah itu kayak ini kalau <i>fraud</i> ini kemarin ada yang penyalahgunaan dana yang sampai kejaksaan juga ya, kan itu tahun 2020 atau 2021 ya itu, itu sampai di vonis di kejaksaan juga. Trus ada yang biasanya sih yang masuk ke APH APH itu ya <i>fraud</i> nya yang terjadi disini ada juga yang kasus-kasus di DPU itu juga, kalau itu untuk penindakannya ya, kalau untuk pencegahannya sih kita macam-macam ya, ada sosialisasi-sosialisasi juga, ada UPG, ada apa itu.</p> <p>G Gratifikasi selama ini sudah ada sarana tersendiri, kalau ada gratifikasi akan dilaporkan kayak gitu sudah ada sih, tapi belum semuanya</p>	<p>Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya mas ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p>	<p>G Biasanya di keuangannya sih, di pengelolaan keuangan, kalau aset aset kayak gitu enggak sih, soalnya aset juga kita pantau terus, kalau misalnya ada kehilangan aset itu kita telusuri, kan kalau inspektorat kan tugasnya memang sampai disitu juga ya, kalau ada aset yang hilang kita telusuri ada unsur kelalaian gak? Seperti apa kayak gitu? Trus kita juga punya aplikasi SIM aset itu untuk menginventarisasi semua aset, jadi sudah <i>diantisipasi</i> sih kalau aset-asetnya sendiri</p> <p>Rz Kalau untuk ini bu mendampingi perangkat desa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya termasuk bisa mencegah <i>fraud</i> gak bu pendampingan itu? G Bisa juga sih. Mereka kan misalnya ya mau pengadaan barang jasa atau mau</p>
-----------------------------------	--	---	---	--	--	--	---

	<p>ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p>	<p>ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p>	<p>lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p>	<p>ini juga sih, belum semuanya melapor, mungkin ya. Terus kalau gratifikasi kan ada gratifikasi yang diperbolehkan ada yang enggak, ya yang itu yang dilaporkan. Kemarin banyak yang dilaporkan sih terutama kalau hari raya itu, tapi kesini-kesini akhirnya sekarang hampir sudah gak ada sih gratifikasi karna kita udah kesadaran ya kita udah sering sosialisasi kayak gitu jadi kita sudah jarang ada gratifikasi sekarang, makanya gak ada yang lapor karna memang gak ada nggih kayak dalam pbj, dalam apa itu gak seperti itu sih</p> <p>Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan</p>	<p>pengadaan tanah kas desa kan mereka juga konsultasi dulu ke kami nggih seperti apa <i>nanti</i> biar gak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya seperti itu.</p> <p>Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya mas ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p>
--	--	--	---	--	--



kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G itu sih saling berhubungan ya mas ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi *fraud* nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada *fraud* lah disini kayak gitu.

الجمعة الإسلامية بالاندونيسيا

6 : Pipit  
Tyas  
Ratna  
Puspita,  
S.H.,  
MPA.

P : Pelatihan  
kantor sendiri itu  
biasanya kami  
dengan BPKP  
karna instansi  
pembina kami  
kan BPKP dan  
workshop dan  
lain-lain itu kalau  
kami disini  
mungkin  
istilahnya  
pelatihan kantor  
sendiri ya  
workshop  
pelatihan kantor  
sendiri ya setipe  
dengan itu sih,  
tapi kalau  
seminar kami  
tidak  
mengadakan  
sendiri, biasanya  
kami sesuai ada  
entah bahas  
mengenai apa itu  
temanya  
termasuk  
kebutuhan kami  
biasanya kami  
auditornya  
dikirim seminar  
gitu

الجمعة الإسلامية بالاندونيسيا

<p>7 : Retno Isni Satiti</p>	<p>Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak mengembangkan diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas membantu untuk</p>	<p>Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak mengembangkan diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas membantu untuk</p>	<p>Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak mengembangkan diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas membantu untuk</p>	<p>Rno Oh, kita sering ikutin seminar, Zoom, webinar, itu yang berkaitan dengan <i>anti</i> korupsi, mengikuti Bimtek itu, terus pelatihan di kantor sendiri dengan mengundang narasumber dari BPKP atau dari internal. Kebetulan kan inspektorat Sleman ini punya satu penyuluh <i>anti</i> korupsi. Nah di awal-awal belai menjadi narasumber kami dalam media PKS pelatihan di kantor sendiri. Rn Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam</p>	<p>Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak</p>	<p>Rno Oh, kita sering ikutin seminar, Zoom, webinar, itu yang berkaitan dengan <i>anti</i> korupsi, mengikuti Bimtek itu, terus pelatihan di kantor sendiri dengan mengundang narasumber dari BPKP atau dari internal. Kebetulan kan inspektorat Sleman ini punya satu penyuluh <i>anti</i> korupsi. Nah di awal-awal belai menjadi narasumber kami dalam media PKS pelatihan di kantor sendiri. Rn Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi?</p>	<p>Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak mengembangkan diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas</p>
------------------------------	---	---	---	--	--	--	--

	<p>kalau kita nggak mengembangkannya diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas membantu untuk pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p>	<p>pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p>	<p>pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p>	<p>program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku saya auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak mengembangkan diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas membantu untuk pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p>	<p>mengembangkan diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas membantu untuk pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p>	<p>Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku saya auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak mengembangkan diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas membantu untuk pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p>	<p>membantu untuk pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p>
--	--	---	---	---	--	--	--

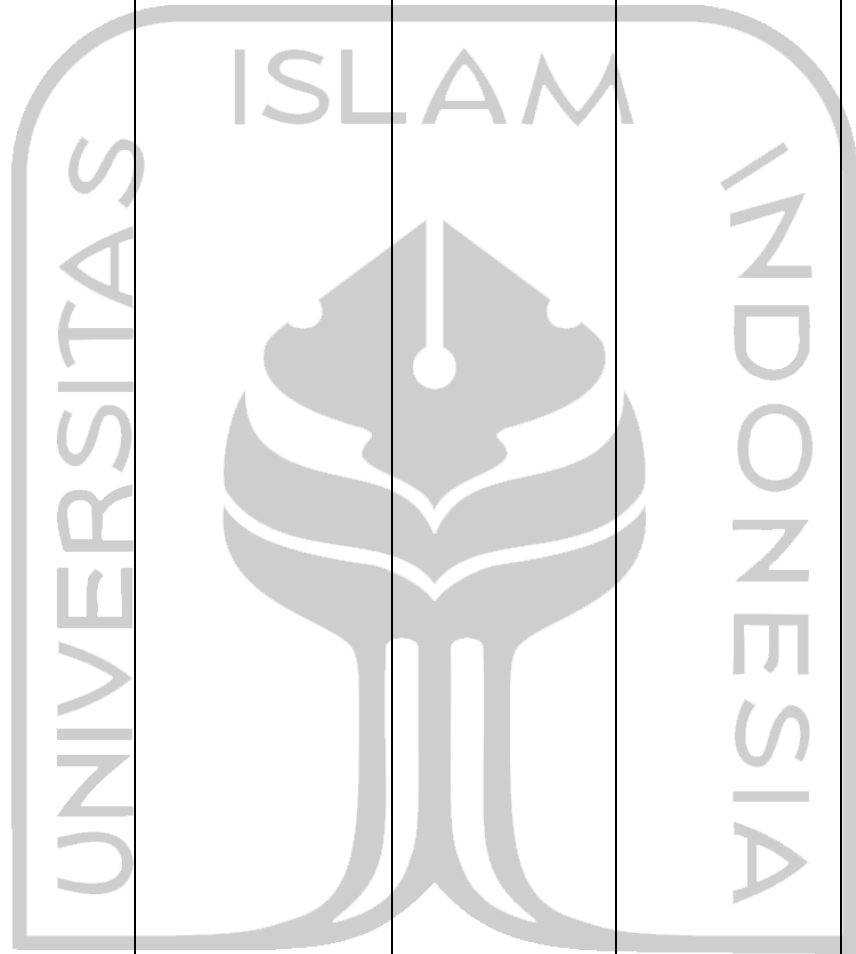
Rno Sebenarnya itu kalau sebenarnya walaupun ya, toh seseorang menjadi jabatan fungsional itu entah itu anggota tim, ketua tim, entah itu pengendali teknis, tidak semua harus, menurut saya ya, ini saya pribadi, tidak semuanya harus tergantung anggaran di sana. Yang namanya belajar bisa melalui mengikuti live streaming dari entah itu youtube, entah itu kita ngikuti adanya seminar, webinar, kan gitu. Kan sekarang banyak yang gratis dilaksanakan oleh kementerian. Cuma kini mas kendala nya itu justru waktu, alokasi waktu. Karena biasanya kayak gitu di webinar, seminar, terus yang Zoom itu pagi hari. Sementara pagi hari itu kami biasanya kan,

kalaupun yang kemarin-kemarin sebelum bidang itu kan di lapangan ya, seringnya di lapangan. Nah itu padahal kalau setiap hari kan kapan selesainya penugasan? Salah satu tinggal, kan seperti itu. Misalnya ini saya meriksa desa. Kebetulan kan ada Zoom tentang *anti* korupsi. Ada sosialisasi atau bimtek *anti* korupsi yang di situ bebas biaya, free bebas. Mengikuti, kalau kuota nya habis, kita bisa mengikuti melalui YouTube. Tapi, kan kadang yang namanya pengembangan kompetensi itu kan kadang, memang selain menyerap ilmu juga harus dibuktikan dengan kehadiran. Nah itu kan yang sulit mas, ketika mau buktikan kehadiran sementara kita

sudah di hari  
jauh-jauh hari  
malah  
diagendakan  
besok rebo saya  
mau pemeriksaan  
ke dinas mana,  
tiba-tiba harus  
ada Zoom. Kan  
jadi, kita butuh  
itu, tapi juga  
pemeriksaannya  
harus jalan. Nah  
itu yang kadang  
membagi  
waktunya yang  
agak sulit. Kalau  
kendala bagi saya  
justru waktunya  
itu bertubi-tubi

الجمعة الإسلامية الاندونيسية

Narasumber	AD : f. Pendampingan ahli	AE : 1. Pendampingan Uji Lab	AF : 2. Pendampingan Pemeriksaan	AG : h. Sertifikasi	AH : 1. Sertifikasi Penyuluh <i>Anti Korupsi</i>	AI : 2. Sertifikasi Khusus Pengawasan	AJ : j. Bimtek
------------	---------------------------	------------------------------	----------------------------------	---------------------	--	---------------------------------------	----------------



الجامعة الإسلامية الاندونيسية



<p>1 : Heri Setyawati , S.E., M.Acc.</p>	<p>H : kalau masih umum ya pernah sama ugm pernah sama Ull anu ya untuk menjadi narasumber pas mau pemeriksaan fisik gedung dan jalan, tapi kalau khusus <i>fraud</i> belum.</p>	<p>H : kalau masih umum ya pernah sama ugm pernah sama Ull anu ya untuk menjadi narasumber pas mau pemeriksaan fisik gedung dan jalan, tapi kalau khusus <i>fraud</i> belum.</p>	<p>H : Kalau ini, ini berawal dari, yang pernah ya, yang dua-duanya pernah sih. Artinya pengembangan temuan dari hasil pemeriksaan inspektorat sendiri kemudian ada laporan dari SKPD yang lain, maksudnya dari dinas teknis yang lain, kemudian oleh inspektorat ditindak lanjuti dengan, kalau dulu-dulu sih namanya bukan investigasi ya, masih pemeriksaan kasus seperti itu dan selama ini yang kami laksanakan istilahnya dengan pengenaan tuntutan ganti rugi, artinya kalau ada ketekoran kas maksudnya kerugian yang berkaitan dengan keuangan daerah itu untuk segera disetorkan kembali ke kas daerah, kek gitu, tapi belum pernah kami melimpahkan ke APH.</p>	<p>H : Ya mengeluarkan surat edaran tentang <i>anti</i> gratifikasi, kemudian kita juga ada sosialisasi <i>anti</i> korupsi ke berbagai hampir ke semua skpd, kemudian pendampingan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepada SKPD, artinya biar <i>nanti</i> untuk mencegah itu kan, pendampingannya a kia laksanakan dulu jangan sampai <i>nanti</i> maksudnya pendampingan biar tugas pokok dan fungsinya SKPD itu berjalan baik, kemudian kalau semuanya baik kan berarti menghindarkan dari <i>fraud</i>, kemudian kita juga, apa istilahnya itu Mba Pipit</p>		
--	--	--	--	---	--	--

2 : Hery  
Dwi  
Kuryanto,  
S.H.,  
M.Hum.

Hy Ya, jadi tujuannya kalau untuk inspektorat, Pasti pelatihan apapun itu, pasti mendukung itu. Jadi kecurangan semua itu kalau yang namanya APIP, Pasti dalam rangka untuk menghindari kecurangan. Tidak ada pelatihan yang di sini tanpa...Aktifitas yang dilakukan oleh inspektorat itu semua menuju ke sana.

Hy Ya, jadi tujuannya kalau untuk inspektorat, Pasti pelatihan apapun itu, pasti mendukung itu. Jadi kecurangan semua itu kalau yang namanya APIP, Pasti dalam rangka untuk menghindari kecurangan. Tidak ada pelatihan yang di sini tanpa...Aktifitas yang dilakukan oleh inspektorat itu semua menuju ke sana.

Hy Ya, jadi tujuannya kalau untuk inspektorat, Pasti pelatihan apapun itu, pasti mendukung itu. Jadi kecurangan semua itu kalau yang namanya APIP, Pasti dalam rangka untuk menghindari kecurangan. Tidak ada pelatihan yang di sini tanpa...Aktifitas yang dilakukan oleh inspektorat itu semua menuju ke sana.

Hy Ya, jadi tujuannya kalau untuk inspektorat, Pasti pelatihan apapun itu, pasti mendukung itu. Jadi kecurangan semua itu kalau yang namanya APIP, Pasti dalam rangka untuk menghindari kecurangan. Tidak ada pelatihan yang di sini tanpa...Aktifitas yang dilakukan oleh inspektorat itu semua menuju ke sana.

الجمعة الاستاذة الاندو

3 : Ika Sulistyio Devi

I dulu sebelum ada teman-teman ini kan auditor itu dulu belum ada teman-teman dari PU, dari teknik gitu. Kita pernah minta bantuan ke PU untuk memeriksa bangunan, Karena dulu nggak ada tenaga teknik sama sekali. Tetapi sekarang karena sudah ada tenaga tekniknya, kita lebih banyak sendiri. Tapi kadang kalau misalnya butuh sekali, kita minta bantuan. Kayak kemarin pemeriksaan desa atau apa ya, itu yang di mana melati itu kayaknya minta bantuan ke PU.

I Belajar. Jadi mereka gimana caranya. Tapi kan kalau yang teman-teman PU kayaknya sudah dasarnya sudah punya ya mas

I dulu sebelum ada teman-teman ini kan auditor itu dulu belum ada teman-teman dari PU, dari teknik gitu. Kita pernah minta bantuan ke PU untuk memeriksa bangunan, Karena dulu nggak ada tenaga teknik sama sekali. Tetapi sekarang karena sudah ada tenaga tekniknya, kita lebih banyak sendiri. Tapi kadang kalau misalnya butuh sekali, kita minta bantuan. Kayak kemarin pemeriksaan desa atau apa ya, itu yang di mana melati itu kayaknya minta bantuan ke PU.

I Belajar. Jadi mereka gimana caranya. Tapi kan kalau yang teman-teman PU kayaknya sudah dasarnya sudah punya ya mas kayak dulu pemeriksaan, pada saat saya menjadi auditor, pemeriksaan jalan nah itu kami belajarnya sama BPK

I Pencegahannya untuk *anti-fraud* misalnya adanya SOP dalam pelaksanaan kegiatan, entah itu *nanti* terutama yang di kami ya, di kami itu tentang SOP pendistribusian LHP, laporan hasil pemeriksaan, kemudian tentang pemutakhiran tindak lanjut gitu, kalau yang di keuangan juga ada, bagaimana SOP untuk penyusunan dokumen pelaksana anggaran, Kemudian untuk SOP pengelolaan barang juga ada. Salah satunya itu. Kemudian ada lagi yang kita juga *anti-fraud*, *fraud* kan anu ya kecurangan ya. Itu juga misalnya pelatihan. Jadi kan peningkatan kompetensi itu kan diharapkan *nantifraudnya* kalau hilang sama sekali sih mungkin bertahap ya, tapi peningkatan kompetensi itu kan juga diharapkannya berkurang lah *fraudnya* itu.

kayak dulu pemeriksaan, pada saat saya menjadi auditor, pemeriksaan jalan nah itu kami belajarnya sama BPK kami mendampingi BPK pemeriksaan ukur jalan itu, kualitas jalan itu, terus kami menerapkannya sendiri.

kami mendampingi BPK pemeriksaan ukur jalan itu, kualitas jalan itu, terus kami menerapkannya sendiri.

Kemudian juga ada untuk pakta integritas, kami setiap ASN di inspektorat terutama itu harus menandatangani pakta integritas.

الجمعة الإسلامية الاندونيسية

<p>4 : Ir. Sri Puji Lestari</p>	<p>Pj : Kalau pengembangan kompetensi kan kalau di kita itu tidak hanya terkait dengan <i>fraud</i> aja, tidak terkait kecurangan aja gitu. Tapi ya semuanya. Seperti pada saat, ya seperti itu ada kaitannya sih kalau kita melakukan review apa, anggaran itu kita juga salah satunya kan mengurangi apa, apa toh jeneng e, ee kesalahan ya, kesalahan penganggaran. Kalau itu juga pakai ini pake aplikasinya e sana keuangan <i>nanti</i> kita dikasih password kita bisa melakukan dari situ. Kemudian itu kemudian untuk melakukan apa namanya kegiatan pemeriksaan probity audit terkait untuk pencegahan korupsi, itu ya</p>	<p>Pj : Kalau pengembangan kompetensi kan kalau di kita itu tidak hanya terkait dengan <i>fraud</i> aja, tidak terkait kecurangan aja gitu. Tapi ya semuanya. Seperti pada saat, ya seperti itu ada kaitannya sih kalau kita melakukan review apa, anggaran itu kita juga salah satunya kan mengurangi apa, apa toh jeneng e, ee kesalahan ya, kesalahan penganggaran. Kalau itu juga pakai ini pake aplikasinya e sana keuangan <i>nanti</i> kita dikasih password kita bisa melakukan dari situ. Kemudian itu kemudian untuk melakukan apa namanya kegiatan pemeriksaan probity audit terkait untuk pencegahan korupsi, itu ya selain apa namanya materi biasa juga ada uji lab nya. Tapi kita kerja sama, kerja sama dengan UII, dengan labnya, Fakultas Teknik.</p>	<p>Pj : Oke, njih, kalau terkait dengan untuk pencegahan <i>fraud</i> sebetulnya kita itu sudah ada (apa namanya) mengirimkan SDM ya, mengirimkan SDM untuk mengikuti pelatihan atau diklat terkait dengan penyuluh <i>anti</i> korupsi. Nggih, sebelum jadi penyuluh ada pelatihan dulu ya, itu kita sudah mengirimkan ada kalau nggak salah ada 9 orang atau 7 orang untuk mengikuti diklat tersebut, setelah lulus diklat tersebut, kemudian yang bersangkutan harapannya mengikuti sertifikasi penyuluh <i>anti</i> korupsi, tetapi dari tujuh orang itu baru satu yang mengikuti penyuluhan <i>anti</i> korupsi, tadinya dua yang mengikuti tapi yang lulus baru</p>	<p>Pj : Gambarnya itu harus melakukan pencegahan terkait dengan korupsi, <i>nanti</i> banyak disosialisasi di</p> <p>Pj : Jadi kalau kemarin karena baru-baru Jadi kita mencoba membuat, Kemudian kita share itu semua ke unit-unit kerja Contohnya seperti ini menyesuaikan dengan kegiatannya Itu kadang opd juga belum ngeh gitu loh laporannya tidak ada <i>fraud</i> tidak ada <i>fraud</i> tambah akan yang namanya penilaian resiko itu penilaian yang mungkin terjadi kan gitu Jadi kalau dalam pikirannya nggak pernah ada jadi seakan-akan yang sudah terjadi kan gitu, mungkin kalau penilaian resiko seperti itu</p>	<p>Pj : Iya, kalau yang untuk di belakang ini harus PNS semua, tidak bisa yang PHL gitu enggak bisa. Iya, karena untuk melakukan kegiatan pengawasan harus mereka memiliki sertifikat, sertifikasi khusus pengawasan ya dan itu syaratnya harus PNS iya. Jadi kalau PHL itu gak bisa, jadi ada teman-teman phl tidak di belakang tapi di kita.</p> <p>Pj : Sertifikasi nya kalau sertifikasi harus mengikuti diklat pembentukan, kalau auditor pembentukan auditor, kalau OPD pembentukan OPD. Itu syarat mendasar. Supaya mengikuti diklat tersebut ya harus bekerja di inspektorat, berarti harus mengikuti itu, lulus, baru <i>nanti</i> bisa mendapatkan sertifikat baru <i>nanti</i> diangkat menjadi auditor, setelah diangkat menjadi auditor ya <i>nanti</i> ada</p>
---------------------------------	--	---	---	--	--

	<p>selain apa namanya materi biasa juga ada uji lab nya. Tapi kita kerja sama, kerja sama dengan UII, dengan labnya, Fakultas Teknik.</p> <p>Pj : Narasumber nya bisa dari luar, bisa dari dalem, untuk meningkatkan SDM gitu</p>			<p>satu, jadi kita baru mempunyai penyuluh <i>anti</i> korupsi yang telah bersertifikat oleh KPK itu satu orang, tetapi meskipun demikian, ketujuh orang yang pernah kita diklatkan pencegah <i>anti</i> korupsi ini juga bisa dimanfaatkan dalam rangka sosialisasi ke OPD-OPD. Kemudian kalau dibidang investigasi itu kan kegiatannya tidak hanya investigasi saja tapi juga reformasi birokrasi, itu memang personil nya baru delapan orang. Meskipun demikian bisa dibantu dengan bidang yang lain karena ketujuh orang itu tidak seluruhnya itu menyebar di bidang lain yang sudah mendapatkan pelatihan terkait dengan pencegahan korupsi. Kemudian untuk</p>	<p>ya itu jadi langkah pertama ya itu kalau terkait dengan <i>fraud</i>. Penilaian risiko <i>fraud</i> Terjadi, Tapi saya itu sendiri tidak bisa membedakan ya antara <i>fraud</i> dengan agenda <i>anti</i> korupsi lainnya Oh ya kalau untuk pencegahan Kita yaitu melakukan sosialisasi-sosialisasi pencegahan pungli Kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan Khusus pungli. Tapi kalau pencegahan gratifikasi Maka hanya inspektorat yang melakukan Kita melakukan kepada seluruh opd Seluruh unit kerja, Dan kemarin kita khususkan kepada Sekolah. Sekolah SD SMP itu kita lakukan penyuluhan pencegahan gratifikasi iya</p>	<p>bukti-bukti pekerjaan, dan bukti-bukti pekerjaan itu salah satu syaratnya adalah pengembangan profesi. Pengembangan profesionalitas itu seperti diklat diklat segala macam itu kan masuk pengembangan profesionalitas dan itu mereka itu harus. Makanya kalau yang kreatif dia mengikuti seminar, diklat-diklat online itu, pelatihan-pelatihan online itu cepat dia mendapatkan kredit pengembangan profesional</p>	
--	---	--	--	--	--	---	--

			<p>ke depannya terkait dengan (apa namanya) pendidikan <i>anti</i> korupsi ini tidak hanya di inspektorat, kami juga mengeluarkan mulai tahun kemarin mengeluarkan surat kami tujukan kepada seluruh OPD untuk mengirimkan personil nya guna mengikuti pelatihan atau melalui e-learning nya KPK, tapi memang belum efektif hanya beberapa OPD yang mengirimkan personil nya untuk mengikuti pelatihan tersebut. Nah ini, metode seperti ini besok tahun ini juga akan kita kirimkan lagi kepada seluruh OPD untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut melalui e-learning dari KPK gitu termasuk juga</p>	<p>Pj : Itu kepala-kepala upt nya kita kumpulkan kita lakukan penyuluhan juga. Terus yang kepala-kepala sekolah dan guru-guru, kepala-kepala sekolah kemarin bukan guru-guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah, SD dan SMP meskipun belum semua. Kan mestinya butuh nya kan se Sleman, jadi kemarin baru dua Angkatan baru bisa.</p> <p>Pj : Oke, njih, kalau terkait dengan untuk pencegahan <i>fraud</i> sebetulnya kita itu sudah ada (apa namanya) mengirimkan SDM ya, mengirimkan SDM untuk mengikuti pelatihan atau diklat terkait dengan penyuluh <i>anti</i> korupsi. Nggih, sebelum jadi penyuluh ada pelatihan dulu ya,</p>	
--	--	--	--	--	--

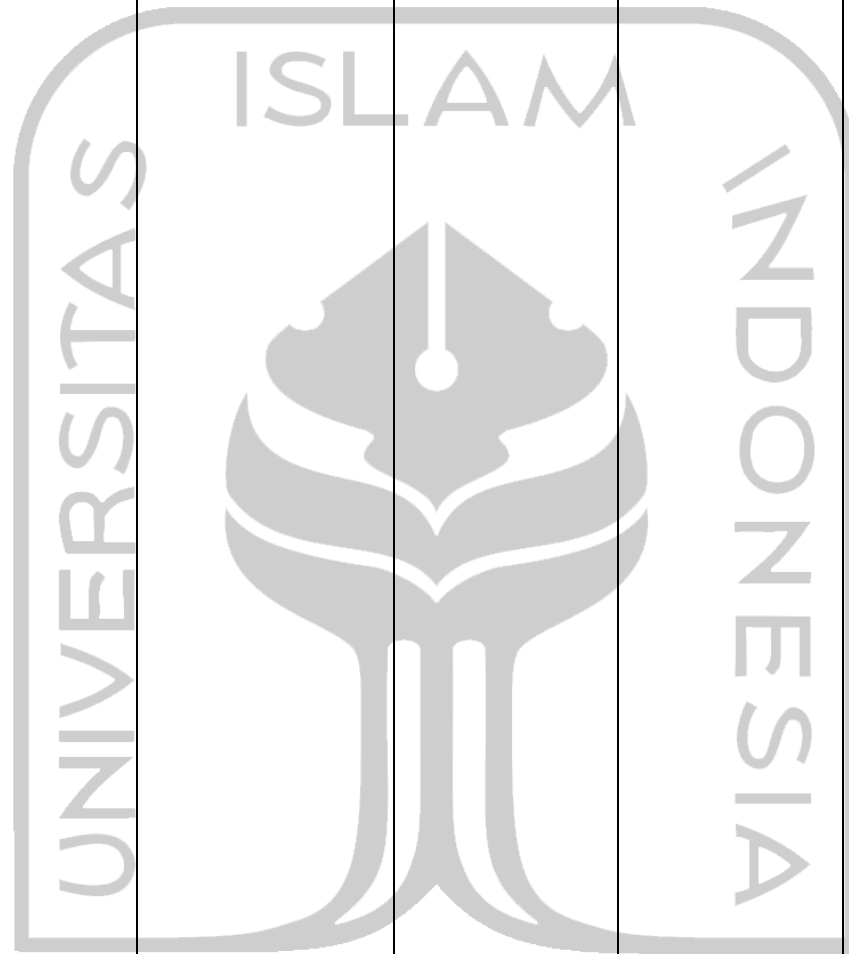
			<p>inspektorat. Rencananya seluruh auditor disini harus mengikuti e-learning tersebut dengan materi berbeda-beda disesuaikan dengan keinginan mereka gitu. Untuk peningkatan SDM nya begitu, kalau jumlahnya tidak bisa. Jumlahnya ya memang seperti ini, gak bisa menambah dengan seenaknya, gak bisa, hanya peningkatan kualitas</p> <p>Pj : Iya, kalau yang untuk di belakang ini harus PNS semua, tidak bisa yang PHL gitu enggak bisa. Iya, karena untuk melakukan kegiatan pengawasan harus mereka memiliki sertifikat, sertifikasi khusus pengawasan ya dan itu syaratnya harus PNS iya. Jadi kalau PHL itu gak bisa, jadi ada</p>	<p>itu kita sudah mengirimkan ada kalau nggak salah ada 9 orang atau 7 orang untuk mengikuti diklat tersebut, setelah lulus diklat tersebut, kemudian yang bersangkutan harapannya mengikuti sertifikasi penyuluh <i>anti</i> korupsi, tetapi dari tujuh orang itu baru satu yang mengikuti penyuluhan <i>anti</i> korupsi, tadinya dua yang mengikuti tapi yang lulus baru satu, jadi kita baru mempunyai penyuluh <i>anti</i> korupsi yang telah bersertifikat oleh KPK itu satu orang, tetapi meskipun demikian, ketujuh orang yang pernah kita diklatkan pencegah <i>anti</i> korupsi ini juga bisa dimanfaatkan dalam rangka sosialisasi ke OPD-OPD. Kemudian kalau dibidang</p>	
--	--	--	---	---	--



			<p>teman-teman phl tidak di belakang tapi di kita.</p> <p>Pj : Sertifikasi nya kalau sertifikasi harus mengikuti diklat pembentukan, kalau auditor pembentukan auditor, kalau OPD pembentukan OPD. Itu syarat mendasar. Supaya mengikuti diklat tersebut ya harus bekerja di inspektorat, berarti harus mengikuti itu, lulus, baru <i>nanti</i> bisa mendapatkan sertifikat baru <i>nanti</i> diangkat menjadi auditor, setelah diangkat menjadi auditor ya <i>nanti</i> ada bukti-bukti pekerjaan, dan bukti-bukti pekerjaan itu salah satu syaratnya adalah pengembangan profesi. Pengembangan profesionalitas itu seperti diklat diklat segala macam itu kan</p>	<p>investigasi itu kan kegiatannya tidak hanya investigasi saja tapi juga reformasi birokrasi, itu memang personil nya baru delapan orang. Meskipun demikian bisa dibantu dengan bidang yang lain karena ketujuh orang itu tidak seluruhnya itu menyebar di bidang lain yang sudah mendapatkan pelatihan terkait dengan pencegahan korupsi. Kemudian untuk ke depannya terkait dengan (apa namanya) pendidikan <i>anti</i> korupsi ini tidak hanya di inspektorat, kami juga mengeluarkan mulai tahun kemarin mengeluarkan surat kami tujukan kepada seluruh OPD untuk mengirimkan personil nya guna mengikuti pelatihan atau</p>	
--	--	--	---	---	--

				<p>masuk pengembangan profesionalitas dan itu mereka itu harus. Makanya kalau yang kreatif dia mengikuti seminar, diklat-diklat online itu, pelatihan-pelatihan online itu cepat dia mendapatkan kredit pengembangan profesional</p>	<p>melalui e-learning nya KPK, tapi memang belum efektif hanya beberapa OPD yang mengirimkan personil nya untuk mengikuti pelatihan tersebut. Nah ini, metode seperti ini besok tahun ini juga akan kita kirimkan lagi kepada seluruh OPD untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut melalui e-learning dari KPK gitu termasuk juga inspektorat. Rencananya seluruh auditor disini harus mengikuti e-learning tersebut dengan materi berbeda-beda disesuaikan dengan keinginan mereka gitu. Untuk peningkatan SDM nya begitu, kalau jumlahnya tidak bisa. Jumlahnya ya memang seperti ini, gak bisa menambah dengan</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

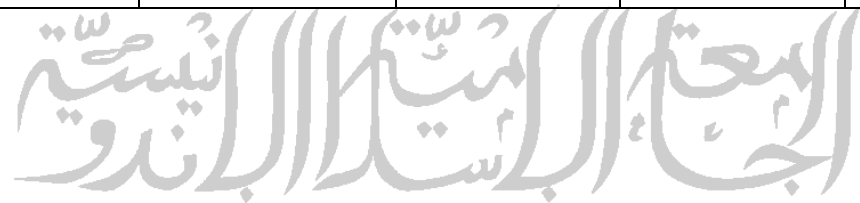
seenaknya, gak  
bisa, hanya  
peningkatan  
kualitas



الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

<p>5 : Ngatiah, S.H.</p>	<p>G Pendampingan ahli ada Rz Itu juga bisa meningkatkan kompetensi? G Jadi kan kalau pendampingan ahli itu yang misalnya untuk pemeriksaan gedung kan walaupun kami punya Sarjana Teknik tapi kan ya karna kami SDM nya gak banyak, padahal kami meriksanya beberapa tim itu pakai ahli di luar juga. Terus kayak uji lab itu juga pakai UII juga kan kita kerja sama dengan UII uji lab nya, terus disamping itu kita sama BPKP juga minta BPKP untuk pendampingan yang memang benar-bener membutuhkan ahli disamping yang uii itu Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya mas</p>	<p>G Jadi kan kalau pendampingan ahli itu yang misalnya untuk pemeriksaan gedung kan walaupun kami punya Sarjana Teknik tapi kan ya karna kami SDM nya gak banyak, padahal kami meriksanya beberapa tim itu pakai ahli di luar juga. Terus kayak uji lab itu juga pakai UII juga kan kita kerja sama dengan UII uji lab nya, terus disamping itu kita sama BPKP juga minta BPKP untuk pendampingan yang memang benar-bener membutuhkan ahli disamping yang uii itu Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya mas</p>	<p>Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya mas ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p>	<p>Rz Lalu untuk sertifikasi ini bu penyuluh <i>anti</i> korupsi G Sini kayaknya baru ada satu apa ya, bu tintin itu Rz Kalau pegawai lainnya apa ada mengikuti? G Kemarin diklatnya banyak yang mengikuti yang sampai mendapat sertifikasi penyuluhnya itu baru, karna mungkin ini ya kesibukannya yang lain jadi mereka juga ini sih kalau jadi penyuluh itu kan harus pakai angka kredit ini juga kan mereka juga jadi belum ke sana sih, tapi yang diklat juga ada sih diklat penyuluh korupsi itu, sementara yang sudah sertifikasi itu baru bu tintin terus sekarang sering penyuluhan kemana-mana juga sih seperti itu Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu</p>	<p>G Kemarin diklatnya banyak yang mengikuti yang sampai mendapat sertifikasi penyuluhnya itu baru, karna mungkin ini ya kesibukannya yang lain jadi mereka juga ini sih kalau jadi penyuluh itu kan harus pakai angka kredit ini juga kan mereka juga jadi belum ke sana sih, tapi yang diklat juga ada sih diklat penyuluh korupsi itu, sementara yang sudah sertifikasi itu baru bu tintin terus sekarang sering penyuluhan kemana-mana juga sih seperti itu Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu</p>	<p>G Biasanya di keuangannya sih, di pengelolaan keuangan, kalau aset aset kayak gitu enggak sih, soalnya aset juga kita pantau terus, kalau misalnya ada kehilangan aset itu kita telusuri, kan kalau inspektorat kan tugasnya memang sampai disitu juga ya, kalau ada aset yang hilang kita telusuri ada unsur kelalaian gak? Seperti apa kayak gitu? Trus kita juga punya aplikasi SIM aset itu untuk menginventarisasi semua aset, jadi sudah <i>diantisipasi</i> sih kalau aset-asetnya sendiri G Bisa juga sih. Mereka kan misalnya ya mau pengadaan barang jasa atau mau pengadaan tanah kas desa kan mereka juga konsultasi dulu ke kami nggih seperti apa <i>nanti</i> biar gak terjadi penyimpangan-penyimpangan</p>	<p>Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya mas ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p>
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

	<p>bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya mas ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p>	<p>ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p>	<p>kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya mas ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p>	<p>gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya mas ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p>	<p>dalam pelaksanaannya seperti itu.</p> <p>Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya mas ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p>	
--	--	--	--	---	---	--



<p>6 : Pipit Tyas Ratna Puspita, S.H., MPA.</p>	<p>P : Kalau lingkup besar belum ya bu, kalau dulu infrastruktur dan bangunan</p> <p>P : Tapi mungkin <i>fraudnya fraud</i> secara general penyimpangan yang gak melulu mendekati kearah korupsi dan lain-lain tapi mungkin penyimpangan-penyimpangan yang kaitannya dengan pemeriksaan rutin yang kami kerjakan itu beberapa kali memang memanggil, mengundang narasumber dari uii kaitannya dengan pekerjaan fisik, dulu beton dengan itu, terus untuk tenaga ahli itu untuk uji ekstraksi, uji labolatorium untuk aspal dan lain-lain, tapi kalau <i>fraud</i> yang. Kalau disini kan saya menangkapnya <i>fraud</i> yang</p>	<p>P : Kalau lingkup besar belum ya bu, kalau dulu infrastruktur dan bangunan</p>	<p>P : Kalau yang tadi kan kaitannya dengan pemeriksaan yang dikhususkan ketika sudah ada, jadi dari pemeriksaan reguler terus kemudian diketahui ada kecurangan terus dilanjutkan dengan khusus pemeriksaan kasus dengan lebih diperdalam di penyimpangannya ya. Tapi kalau yang untuk pemeriksaan-pemeriksaan reguler itu biasanya kami identifikasinya kami sebelum melakukan pemeriksaan itu ada identifikasi risiko, disitukan termasuk mengidentifikasi program-program krusial yang dikerjakan oleh OPD sebelum kami masuk biasanya kan kami identifikasi risikonya dulu, kayak misalnya pemeriksaan desa, pengawasan desa. Itu kita mengidentifikasi risikonya itu dari ketepatan pelaporan terus pertanggungjawaban terus banyak tidaknya temuan itu termasuk salah satu</p>				
---	--	---	---	--	--	--	--

	<p>cenderung kearah korupsi</p>		<p>yang dipertimbangkan kita untuk memilih objek yang akan kami periksa, nah disitu termasuk cara mengidentifikasi disitu apakah kemungkinan terjadi ketidaktertiban belum tentu penyimpangan, maksudnya itu identifikasi awal di desa itu tertib apa enggak dari situ.</p> <p>P : Kalau selama ini belum eksplisit sebagai investigasi gitu, pernah ada selain pengembangan dari pemeriksaan sendiri laporan OPD, juga pernah ada permintaan dari APH memang, permintaan untuk kami inspektorat melakukan pemeriksaan kasus yang mereka tangani, nah waktu itu juga pernah investigatif, pernah di PKN, Cuma waktu itu PKN nya tidak jadi, jadi kalau yang ini memang kalau proses investigasi tergantung ya mas,</p>				
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

tergantung kalau  
misalnya  
permintaan APH ya  
berarti kita  
tergantung  
permintaan APH,  
suplai data ke kita  
apa, mereka maunya  
kitaeriksa apa, ini  
sudah terfokus.  
Kalau yang  
investigasi yang dari  
laporan OPD juga  
kebanyakan sudah  
mengerucut ya bu  
ya,

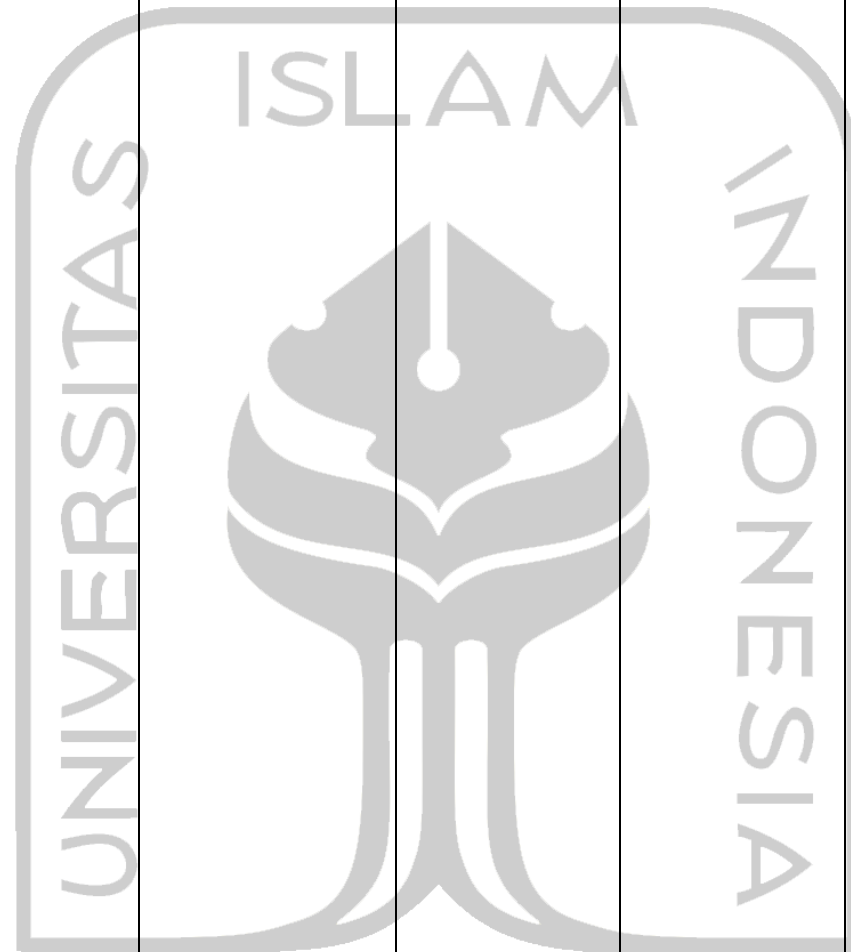
الجمهورية الإسلامية الإندونيسية



<p>7 : Retno Isni Satiti</p>	<p>Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak mengembangkan diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas membantu untuk</p>	<p>Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak mengembangkan diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas membantu untuk</p>	<p>Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak</p>	<p>Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak</p>	<p>Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak</p>	<p>Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak</p>	<p>Rno pencegahan jelas, kami jelas itu ada salah satunya inspektorat melakukan sosialisasi, BIMTEK, terus menjadi narasumber di dalam kegiatan OPD yang berkaitan dengan pencegahan atau <i>anti</i> korupsi.</p> <p>Rno Oh, kita sering ikutin seminar, Zoom, webinar, itu yang berkaitan dengan <i>anti</i> korupsi, mengikuti Bimtek itu, terus pelatihan di kantor sendiri dengan mengundang narasumber dari BPKP atau dari internal. Kebetulan kan inspektorat Sleman ini punya satu penyuluh <i>anti</i> korupsi. Nah di awal-awal belai menjadi narasumber kami dalam media PKS pelatihan di kantor sendiri.</p> <p>Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang</p>
------------------------------	---	---	--	--	--	--	---

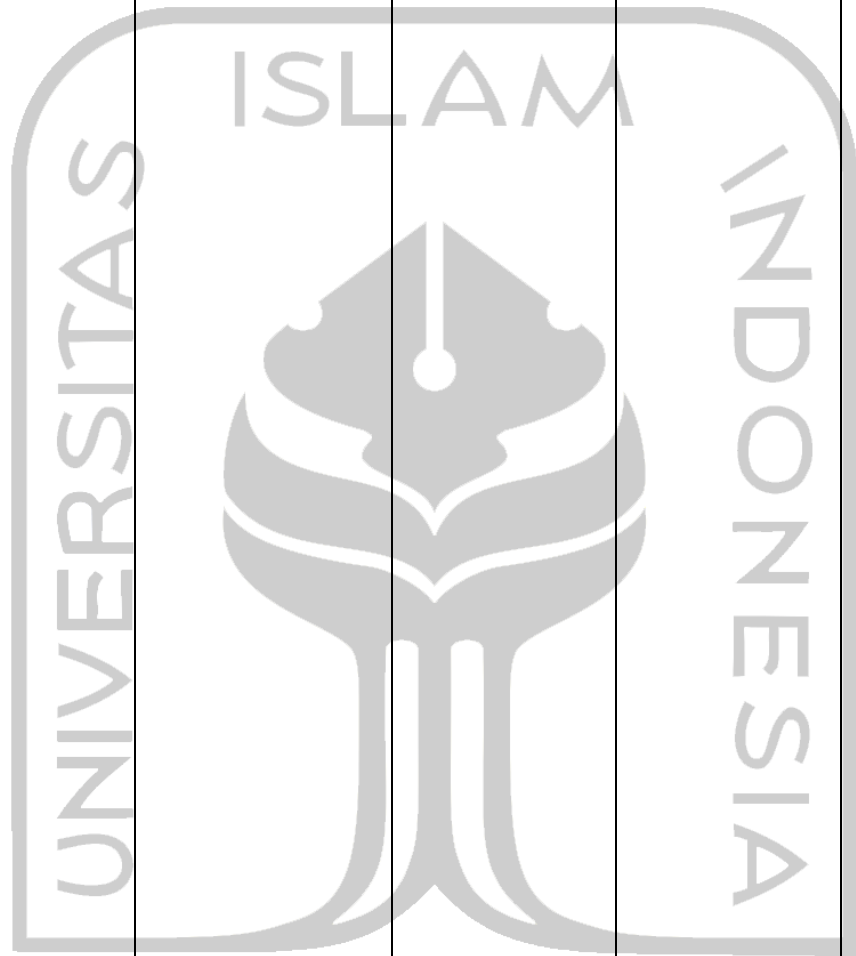
	<p>kalau kita nggak mengembangkannya diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas membantu untuk pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p>	<p>pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p>	<p>pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p>	<p>mengembangkan diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas membantu untuk pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p>	<p>mengembangkan diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas membantu untuk pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p>	<p>membantu untuk pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p>	<p>ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku saya auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak mengembangkan diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas membantu untuk pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i></p>
--	--	---	---	--	--	--	---

maupun yang  
bukan. Sangat-  
sangat.



الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

<p>Narasumber</p>	<p>AK : 1. Bimtek Pengendalian Gratifikasi melalui Aplikasi Online</p>	<p>AL : 2. Bimtek Penghitungan Angka Kredit Pengangkatan Pertama</p>	<p>AM : 3. Bimtek Kesehatan Kerja Bagi Organisasi</p>	<p>AN : 4. Bimtek Pengelolaan BMD</p>	<p>AO : k. Peningkatan Integritas</p>	<p>AP : 1. Pembelajaran Alam Outbond</p>	<p>AQ : 2. Setiap Senin bergantian membaca Pakta Integritas</p>
-------------------	--	--	---	---------------------------------------	---------------------------------------	--	---



الجامعة الإسلامية في إندونيسيا

1 : Heri Setyawati, S.E., M.Acc.

H : Ya mengeluarkan surat edaran tentang *anti* gratifikasi, kemudian kita juga ada sosialisasi *anti* korupsi ke berbagai hampir ke semua skpd, kemudian pendampingan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepada SKPD, artinya biar *nanti* untuk mencegah itu kan, pendampingannya ya kita laksanakan dulu jangan sampai *nanti* maksudnya pendampingan biar tugas pokok dan fungsinya SKPD itu berjalan baik, kemudian kalau semuanya baik kan berarti menghindarkan dari *fraud*, kemudian kita juga, apa istilahnya itu Mba Pipit

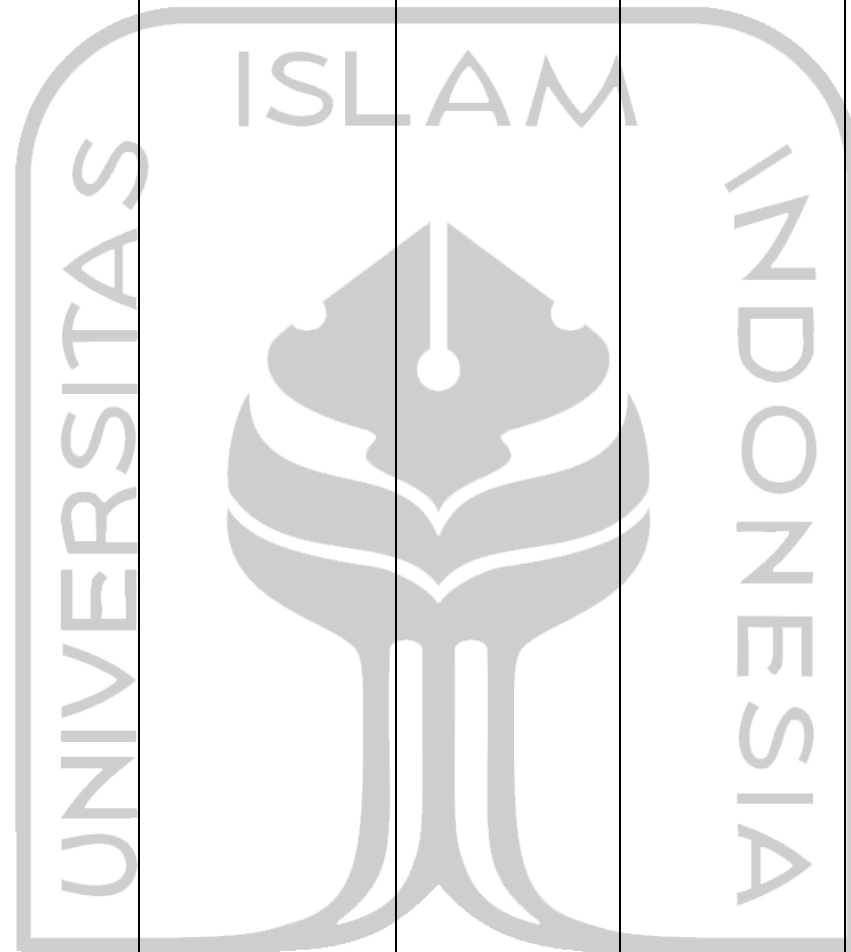
H : Kalau ini, ini berawal dari,



yang pernah ya, yang dua-duanya pernah sih. Artinya pengembangan temuan dari hasil pemeriksaan inspektorat sendiri kemudian ada laporan dari SKPD yang lain, maksudnya dari dinas teknis yang lain, kemudian oleh inspektorat ditindak lanjuti dengan, kalau dulu-dulu sih namanya bukan investigasi ya, masih pemeriksaan kasus seperti itu dan selama ini yang kami laksanakan istilahnya dengan pengenaan tuntutan *ganti rugi*, artinya kalau ada ketekoran kas maksudnya kerugian yang berkaitan dengan keuangan daerah itu untuk segera disetorkan kembali ke kas



daerah, kek gitu,  
tapi belum  
pernah kami  
melimpahkan ke  
APH.

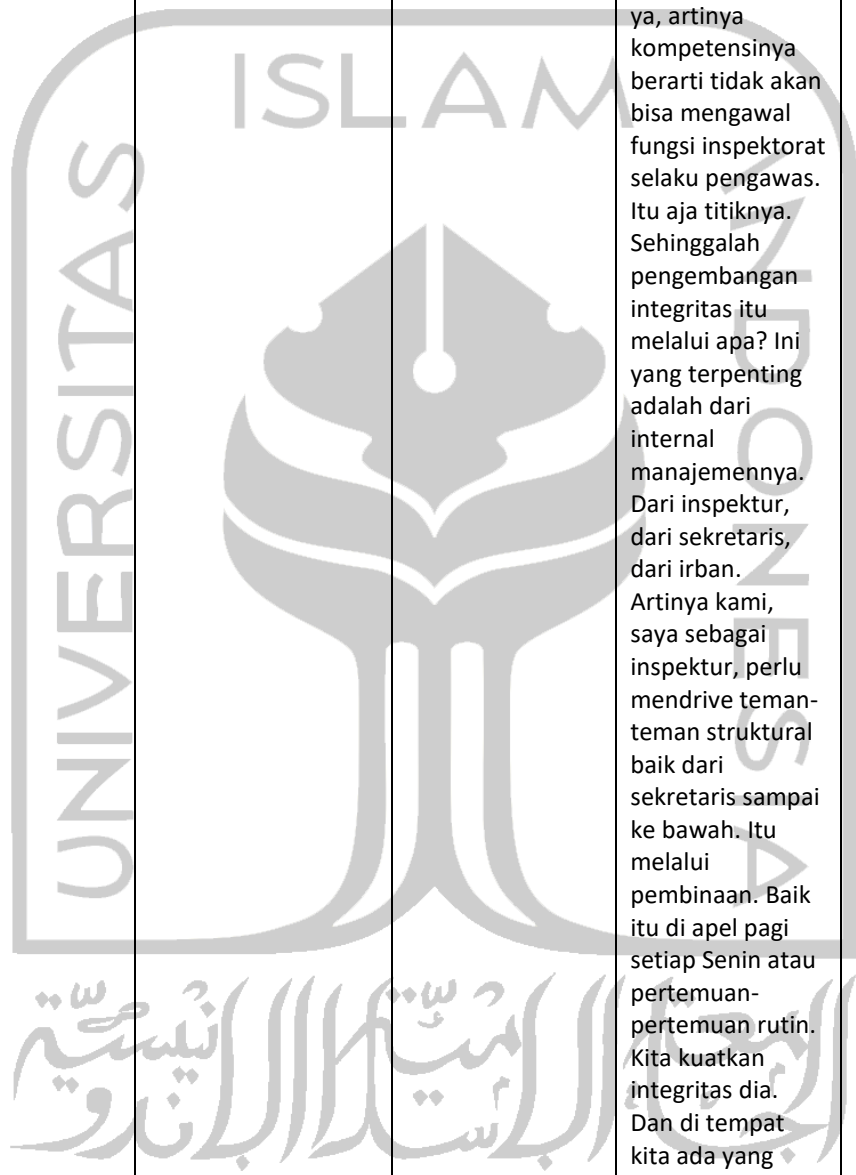


الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

<p>2 : Hery Dwi Kuryanto, S.H., M.Hum.</p>	<p>Hy Ya, jadi tujuannya kalau untuk inspektorat, Pasti pelatihan apapun itu, pasti mendukung itu. Jadi kecurangan semua itu kalau yang namanya APIP, Pasti dalam rangka untuk menghindari kecurangan. Tidak ada pelatihan yang di sini tanpa...Aktifitas yang dilakukan oleh inspektorat itu semua menuju ke sana.</p>	<p>Hy Ya, jadi tujuannya kalau untuk inspektorat, Pasti pelatihan apapun itu, pasti mendukung itu. Jadi kecurangan semua itu kalau yang namanya APIP, Pasti dalam rangka untuk menghindari kecurangan. Tidak ada pelatihan yang di sini tanpa...Aktifitas yang dilakukan oleh inspektorat itu semua menuju ke sana.</p>	<p>Hy Ya, jadi tujuannya kalau untuk inspektorat, Pasti pelatihan apapun itu, pasti mendukung itu. Jadi kecurangan semua itu kalau yang namanya APIP, Pasti dalam rangka untuk menghindari kecurangan. Tidak ada pelatihan yang di sini tanpa...Aktifitas yang dilakukan oleh inspektorat itu semua menuju ke sana.</p>	<p>Hy Ya, jadi tujuannya kalau untuk inspektorat, Pasti pelatihan apapun itu, pasti mendukung itu. Jadi kecurangan semua itu kalau yang namanya APIP, Pasti dalam rangka untuk menghindari kecurangan. Tidak ada pelatihan yang di sini tanpa...Aktifitas yang dilakukan oleh inspektorat itu semua menuju ke sana.</p>	<p>Hy Kekurangannya? Ya. Dari sisi... Jadi gini, kita kan harus pengembangan itu dari sisi kompetensi pertama. Dari sisi kompetensi itu bisa kita lakukan peningkatan dari sisi pengetahuannya, kompetensinya Itu melalui diklat. Itu kan sesuatu yang bisa dipelajari. Tergantung kepada bagaimana kemampuan, terus kemauan dari SDM untuk mengembangkan diri. Kita ada dari diklat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga baik itu di BPKP maupun BPK. Kemudian yang terpenting lagi adalah justru bukan hanya pengembangan kompetensi, tapi lebih kepada kualitas diri. Itu yang terpenting. Jadi profesi... Di sini kan auditor,</p>	<p>Hy Ya, jadi tujuannya kalau untuk inspektorat, Pasti pelatihan apapun itu, pasti mendukung itu. Jadi kecurangan semua itu kalau yang namanya APIP, Pasti dalam rangka untuk menghindari kecurangan. Tidak ada pelatihan yang di sini tanpa...Aktifitas yang dilakukan oleh inspektorat itu semua menuju ke sana.</p>	<p>Hy Kekurangannya? Ya. Dari sisi... Jadi gini, kita kan harus pengembangan itu dari sisi kompetensi pertama. Dari sisi kompetensi itu bisa kita lakukan peningkatan dari sisi pengetahuannya, kompetensinya Itu melalui diklat. Itu kan sesuatu yang bisa dipelajari. Tergantung kepada bagaimana kemampuan, terus kemauan dari SDM untuk mengembangkan diri. Kita ada dari diklat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga baik itu di BPKP maupun BPK. Kemudian yang terpenting lagi adalah justru bukan hanya pengembangan kompetensi, tapi lebih kepada kualitas diri. Itu yang terpenting. Jadi profesi... Di sini kan auditor, fungsional. Profesi auditor itu bukan hanya didukung oleh profesional kompetensi seorang auditor. Tapi harus</p>
--	---	---	---	---	---	---	--



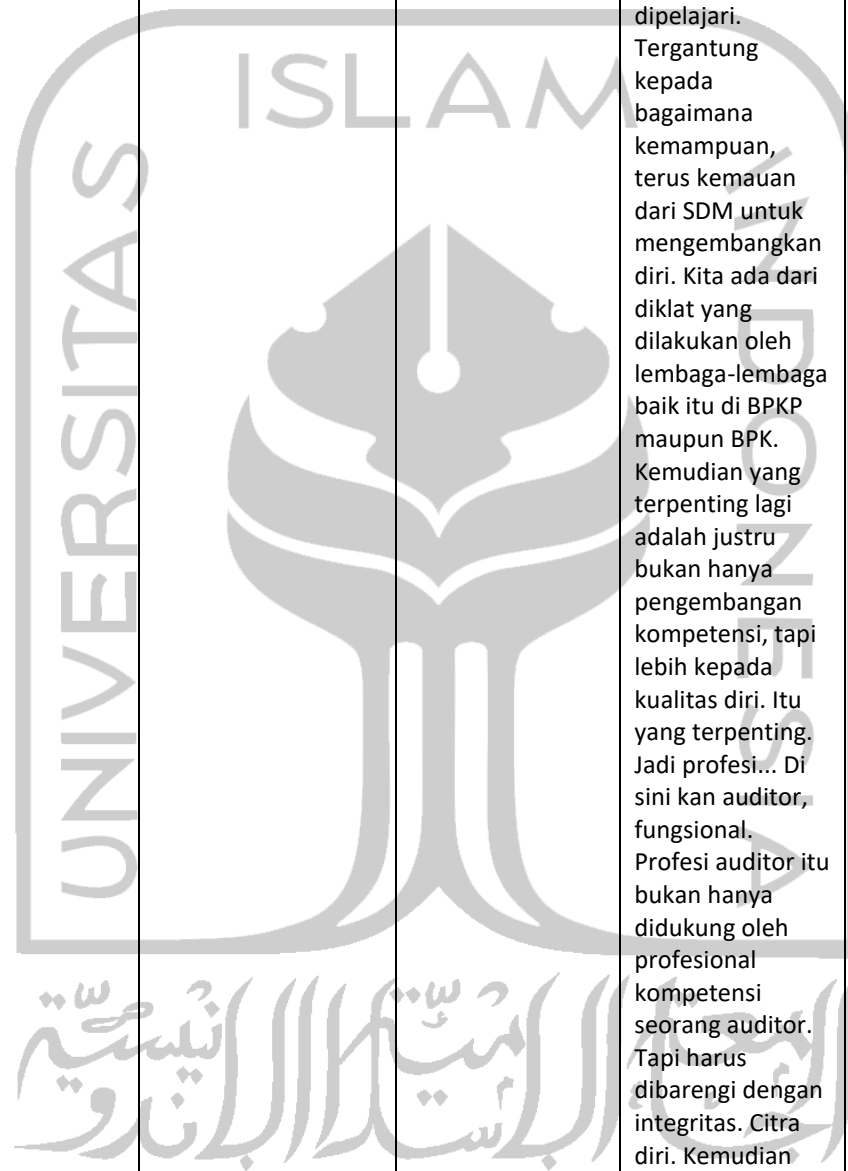
				<p>fungsional. Profesi auditor itu bukan hanya didukung oleh profesional kompetensi seorang auditor. Tapi harus dibarengi dengan integritas. Citra diri. Kemudian bagaimana kemudian integritasnya mereka itu benar-benar bisa ditegakkan. Antara nilai-nilai yang ada di dalam dirinya itu benar-benar bisa diterapkan dalam melaksanakan tugas. Jadi tidak ada gunanya kalau seorang yang memiliki kompetensi kemudian integritasnya rendah. Karena kalau integritasnya rendah artinya profesionalnya kompetensinya bisa tergadaikan. Itu semua pekerjaan kan yang kayak gitu. Auditor kalau di sini fungsinya fungsi pengawasan,</p>		<p>dibarengi dengan integritas. Citra diri. Kemudian bagaimana kemudian integritasnya mereka itu benar-benar bisa ditegakkan. Antara nilai-nilai yang ada di dalam dirinya itu benar-benar bisa diterapkan dalam melaksanakan tugas. Jadi tidak ada gunanya kalau seorang yang memiliki kompetensi kemudian integritasnya rendah. Karena kalau integritasnya rendah artinya profesionalnya kompetensinya bisa tergadaikan. Itu semua pekerjaan kan yang kayak gitu. Auditor kalau di sini fungsinya fungsi pengawasan, auditor kalau sudah tergadaikan profesionalismenya, artinya kompetensinya berarti tidak akan bisa mengawal fungsi inspektorat selaku pengawas. Itu aja titiknya. Sehingga pengembangan</p>
--	--	--	--	---	--	---



auditor kalau sudah terdapatkan profesionalismenya, artinya kompetensinya berarti tidak akan bisa mengawal fungsi inspektorat selaku pengawas. Itu aja titiknya. Sehingga pengembangan integritas itu melalui apa? Ini yang terpenting adalah dari internal manajemennya. Dari inspektur, dari sekretaris, dari irban. Artinya kami, saya sebagai inspektur, perlu mendrive teman-teman struktural baik dari sekretaris sampai ke bawah. Itu melalui pembinaan. Baik itu di apel pagi setiap Senin atau pertemuan-pertemuan rutin. Kita kuatkan integritas dia. Dan di tempat kita ada yang namanya, setiap apel kita membaca yang namanya pakta

integritas itu melalui apa? Ini yang terpenting adalah dari internal manajemennya. Dari inspektur, dari sekretaris, dari irban. Artinya kami, saya sebagai inspektur, perlu mendrive teman-teman struktural baik dari sekretaris sampai ke bawah. Itu melalui pembinaan. Baik itu di apel pagi setiap Senin atau pertemuan-pertemuan rutin. Kita kuatkan integritas dia. Dan di tempat kita ada yang namanya, setiap apel kita membaca yang namanya pakta integritas. Ada delapan pakta atau berapa. Itu yang sebetulnya akan membangun kepribadian dari mereka untuk bisa menegakkan profesionalisme mereka. Terus kita juga, ada kita pelatihan, bukan, pemberian motivasi dari pihak luar. Motivasi kaitannya dengan profesional, bagaimana bekerja

				<p>integritas. Ada delapan pakta atau berapa. Itu yang sebetulnya akan membangun kepribadian dari mereka untuk bisa menegakkan profesionalisme mereka. Terus kita juga, ada kita pelatihan, bukan, pemberian motivasi dari pihak luar. Motivasi kaitannya dengan profesional, bagaimana bekerja secara profesional, maupun dari aspek keagamaan. Itu yang paling terpenting. Udah jawabannya selesai.</p> <p>Hy Kekurangannya? Ya. Dari sisi... Jadi gini, kita kan harus pengembangan itu dari sisi kompetensi pertama. Dari sisi kompetensi itu bisa kita lakukan peningkatan dari sisi pengetahuannya,</p>		<p>secara profesional, maupun dari aspek keagamaan. Itu yang paling terpenting. Udah jawabannya selesai.</p> <p>Hy Ya, jadi tujuannya kalau untuk inspektorat, Pasti pelatihan apapun itu, pasti mendukung itu. Jadi kecurangan semua itu kalau yang namanya APIP, Pasti dalam rangka untuk menghindari kecurangan. Tidak ada pelatihan yang di sini tanpa...Aktifitas yang dilakukan oleh inspektorat itu semua menuju ke sana.</p>
--	--	--	--	---	--	--



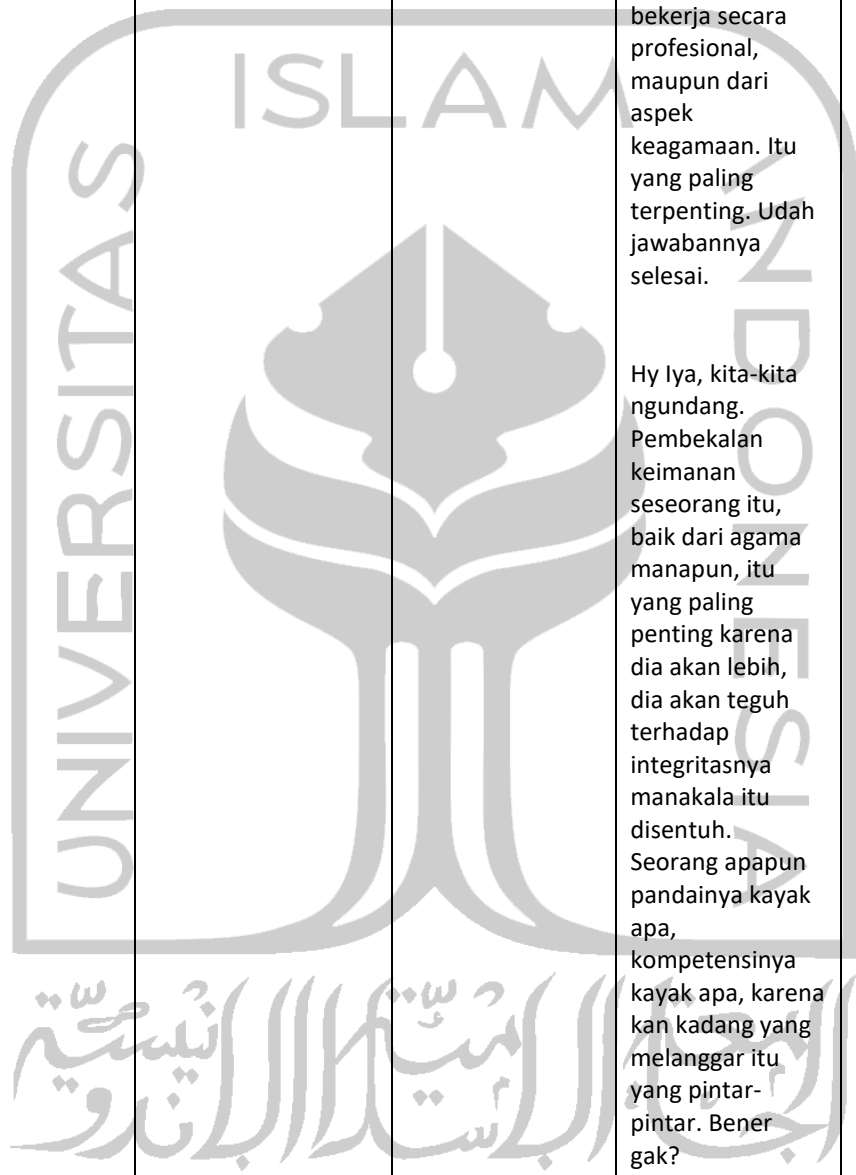
kompetensinya  
Itu melalui diklat.  
Itu kan sesuatu  
yang bisa  
dipelajari.  
Tergantung  
kepada  
bagaimana  
kemampuan,  
terus kemauan  
dari SDM untuk  
mengembangkan  
diri. Kita ada dari  
diklat yang  
dilakukan oleh  
lembaga-lembaga  
baik itu di BPKP  
maupun BPK.  
Kemudian yang  
terpenting lagi  
adalah justru  
bukan hanya  
pengembangan  
kompetensi, tapi  
lebih kepada  
kualitas diri. Itu  
yang terpenting.  
Jadi profesi... Di  
sini kan auditor,  
fungsional.  
Profesi auditor itu  
bukan hanya  
didukung oleh  
profesional  
kompetensi  
seorang auditor.  
Tapi harus  
dibarengi dengan  
integritas. Citra  
diri. Kemudian  
bagaimana  
kemudian  
integritasnya  
mereka itu benar-



benar bisa ditegakkan. Antara nilai-nilai yang ada di dalam dirinya itu benar-benar bisa diterapkan dalam melaksanakan tugas. Jadi tidak ada gunanya kalau seorang yang memiliki kompetensi kemudian integritasnya rendah. Karena kalau integritasnya rendah artinya profesionalnya kompetensinya bisa tergadaikan. Itu semua pekerjaan kan yang kayak gitu. Auditor kalau di sini fungsinya fungsi pengawasan, auditor kalau sudah tergadaikan profesionalismenya, artinya kompetensinya berarti tidak akan bisa mengawal fungsi inspektorat selaku pengawas. Itu aja titiknya. Sehingga pengembangan integritas itu melalui apa? Ini



yang terpenting adalah dari internal manajemennya. Dari inspektur, dari sekretaris, dari irban. Artinya kami, saya sebagai inspektur, perlu mendrive teman-teman struktural baik dari sekretaris sampai ke bawah. Itu melalui pembinaan. Baik itu di apel pagi setiap Senin atau pertemuan-pertemuan rutin. Kita kuatkan integritas dia. Dan di tempat kita ada yang namanya, setiap apel kita membaca yang namanya pakta integritas. Ada delapan pakta atau berapa. Itu yang sebetulnya akan membangun kepribadian dari mereka untuk bisa menegakkan profesionalisme mereka. Terus kita juga, ada kita pelatihan, bukan, pemberian motivasi dari pihak luar.



Motivasi kaitannya dengan profesional, bagaimana bekerja secara profesional, maupun dari aspek keagamaan. Itu yang paling terpenting. Udah jawabannya selesai.

Hy Iya, kita-kita ngundang. Pembekalan keimanan seseorang itu, baik dari agama manapun, itu yang paling penting karena dia akan lebih, dia akan teguh terhadap integritasnya manakala itu disentuh. Seorang apapun pandainya kayak apa, kompetensinya kayak apa, karena kan kadang yang melanggar itu yang pintar-pintar. Bener gak?

Hy Tetap kami itu. Artinya, tadi apa,

pengembangan diri, baik secara kompetensi, kaitannya dengan pekerjaan, maupun kaitannya dengan kinerja, kualitas, bagaimana dia berkualitas di dalam bekerjanya, integritasnya, saya kira itu, tetap dua hal itu. Namun kemudian kita harus melakukan evaluasi. Ya, pas gak kaitannya kalau kompetensi, yang kurang mana, gitu. Kompetensinya kan banyak.

الجمعة الإسلامية بالاندونيسيا



3 : Ika  
Sulistyo  
Devi

I Pencegahannya untuk *anti-fraud* misalnya adanya SOP dalam pelaksanaan kegiatan, entah itu *nanti* terutama yang di kami ya, di kami itu tentang SOP pendistribusian LHP, laporan hasil pemeriksaan, kemudian tentang pemutakhiran tindak lanjut gitu, kalau yang di keuangan juga ada, bagaimana SOP untuk penyusunan dokumen pelaksana anggaran, Kemudian untuk SOP pengelolaan barang juga ada. Salah satunya itu. Kemudian ada lagi yang kita juga *anti-fraud, fraud* kan anu ya kecurangan ya. Itu juga misalnya pelatihan. Jadi kan peningkatan kompetensi itu kan diharapkan *nantifraudnya* kalau hilang sama sekali sih mungkin bertahap ya, tapi peningkatan kompetensi itu kan juga diharapkannya berkurang lah *fraudnya* itu.

I Pencegahannya untuk *anti-fraud* misalnya adanya SOP dalam pelaksanaan kegiatan, entah itu *nanti* terutama yang di kami ya, di kami itu tentang SOP pendistribusian LHP, laporan hasil pemeriksaan, kemudian tentang pemutakhiran tindak lanjut gitu, kalau yang di keuangan juga ada, bagaimana SOP untuk penyusunan dokumen pelaksana anggaran, Kemudian untuk SOP pengelolaan barang juga ada. Salah satunya itu. Kemudian ada lagi yang kita juga *anti-fraud, fraud* kan anu ya kecurangan ya. Itu juga misalnya pelatihan. Jadi kan peningkatan kompetensi itu kan diharapkan *nantifraudnya* kalau hilang sama sekali sih mungkin

I Pencegahannya untuk *anti-fraud* misalnya adanya SOP dalam pelaksanaan kegiatan, entah itu *nanti* terutama yang di kami ya, di kami itu tentang SOP pendistribusian LHP, laporan hasil pemeriksaan, kemudian tentang pemutakhiran tindak lanjut gitu, kalau yang di keuangan juga ada, bagaimana SOP untuk penyusunan dokumen pelaksana anggaran, Kemudian untuk SOP pengelolaan barang juga ada. Salah satunya itu. Kemudian ada lagi yang kita juga *anti-fraud, fraud* kan anu ya kecurangan ya. Itu juga misalnya pelatihan. Jadi kan peningkatan kompetensi itu kan diharapkan *nantifraudnya* kalau hilang sama sekali sih mungkin bertahap ya, tapi peningkatan kompetensi itu kan juga diharapkannya berkurang lah *fraudnya* itu.

Kemudian juga ada untuk pakta integritas, kami setiap ASN di inspektorat terutama itu harus menandatangani pakta integritas.

bertahap ya, tapi peningkatan kompetensi itu kan juga diharapkan berkurang lah *fraudnya* itu. Kemudian juga ada untuk pakta integritas, kami setiap ASN di inspektorat terutama itu harus menandatangani pakta integritas.

I Ya termasuk di dalamnya independensi, kemudian *anti* korupsi, begitu

Kemudian juga ada untuk pakta integritas, kami setiap ASN di inspektorat terutama itu harus menandatangani pakta integritas.

الجمعة الإسلامية بالاندونيسيا

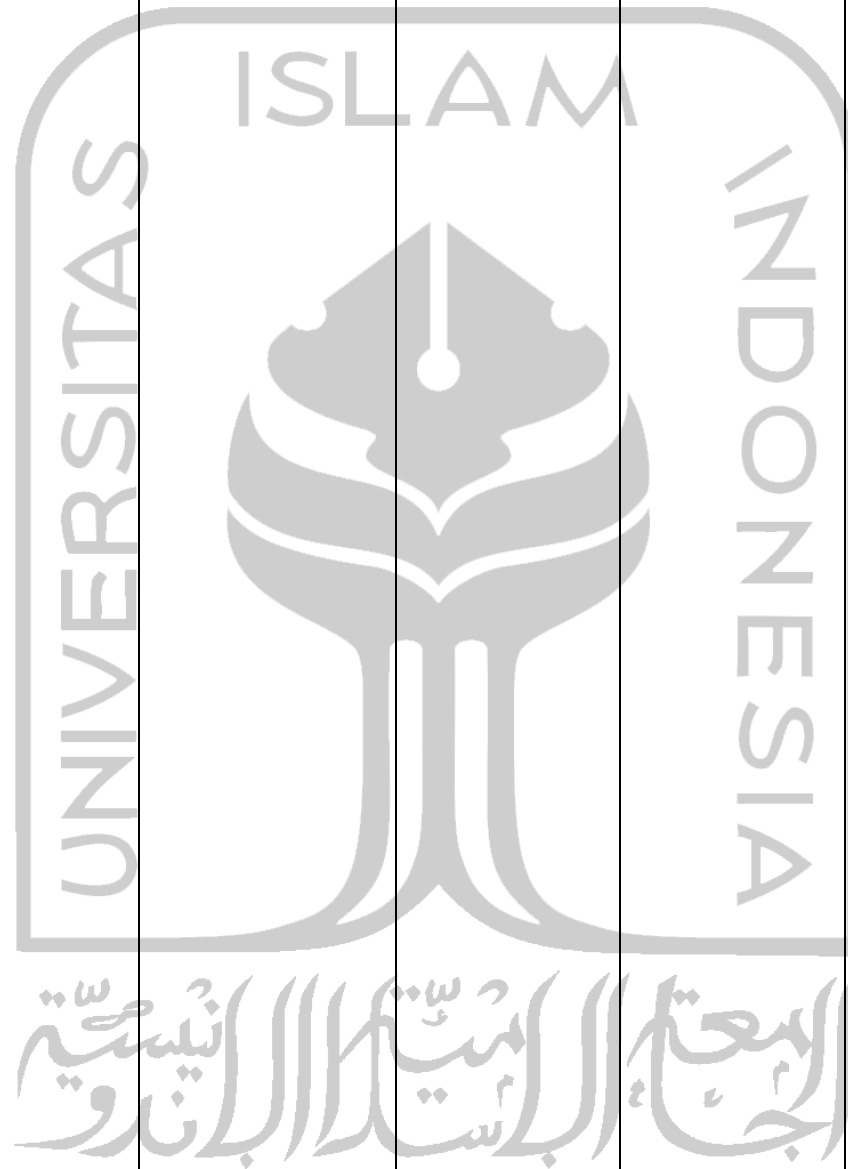
<p>4 : Ir. Sri Puji Lestari</p>	<p>Pj : Jadi kalau kemarin karena baru-baru Jadi kita mencoba membuat, Kemudian kita share itu semua ke unit-unit kerja Contohnya seperti ini menyesuaikan dengan kegiatannya Itu kadang opd juga belum ngeh gitu loh laporannya tidak ada <i>fraud</i> tidak ada <i>fraud</i> tambah akan yang namanya penilaian resiko itu penilaian yang terjadi atau yang mungkin terjadi kan gitu Jadi kalau dalam pikirannya nggak pernah ada jadi seakan-akan yang sudah terjadi kan gitu, mungkin kalau penilaian resiko seperti itu ya itu jadi langkah pertama ya itu kalau terkait dengan <i>fraud</i>. Penilaian resiko <i>fraud</i> Terjadi, Tapi saya itu sendiri tidak bisa membedakan ya</p>	<p>Pj : Hm m, itu khusus yang bidang investigasi nya, yang bidang reformasi itu kan juga saling terkait, reformasi itu kan pembenahan di semua lini manajemen pemerintahan supaya bisa tercapai good governance gitu. Itu, jadi ada bidangnya itu ada kegiatan lagi yang menyokong itu, yang reformasi itu kan harus perbaikan di manajemen nya, terus perbaikan di manajemen perubahan, ada di perbaikan di pembentukan regulasi, ada di SDM nya, pengelolaan SDM, pengelolaan pengawasannya, pengelolaan pelayanan publik nya, itu di reformasi birokrasi itu kan juga terkait dengan investigasi, gitu, mungkin kalau saat ini belum banyaklah, belum banyak.</p>	<p>Pj : Integritas nya itu kan audit, bukan auditor nya aja, tapi semua pegawai ya. Itu kan menandatangani pakta integritas, ada poin satu sampai tujuh kalau ndak salah, nah itu setiap hari senin dibacakan perwakilan, urut dari yang</p> <p>Pj : Seminggu sekali, jadi untuk mengingatkan, nah besok, besok itu baru mau saya bikin ini apa namanya kayak gini <i>nanti</i> banner atau apa yang <i>nanti</i> ada apa namanya maklumat pelayanan kita apa integritas <i>nanti</i> harus ditandatangani oleh semuanya, ini baru mau kita buat</p> <p>Pj : Oh ya disitu ada, salah satu pakta integritas nya, kemudian di setiap surat tugas, surat tugas</p>	<p>Pj : Jadi kalau kemarin karena baru-baru Jadi kita mencoba membuat, Kemudian kita share itu semua ke unit-unit kerja Contohnya seperti ini menyesuaikan dengan kegiatannya Itu kadang opd juga belum ngeh gitu loh laporannya tidak ada <i>fraud</i> tidak ada <i>fraud</i> tambah akan yang namanya penilaian resiko itu penilaian yang terjadi atau yang mungkin terjadi kan gitu Jadi kalau dalam pikirannya nggak pernah ada jadi seakan-akan yang sudah terjadi kan gitu, mungkin kalau penilaian resiko seperti itu ya itu jadi langkah pertama ya itu kalau terkait dengan <i>fraud</i>. Penilaian risiko <i>fraud</i> Terjadi, Tapi saya itu sendiri tidak bisa membedakan ya antara <i>fraud</i> dengan agenda <i>anti</i> korupsi lainnya Oh ya kalau untuk pencegahan Kita yaitu melakukan sosialisasi-sosialisasi</p>
---------------------------------	--	--	---	--

<p>antara <i>fraud</i> dengan agenda <i>anti</i> korupsi lainnya Oh ya kalau untuk pencegahan Kita yaitu melakukan sosialisasi-sosialisasi pencegahan pungli Kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan Khusus pungli. Tapi kalau pencegahan gratifikasi Maka hanya inspektorat yang melakukan Kita melakukan kepada seluruh opd Seluruh unit kerja, Dan kemarin kita khususnya kepada Sekolah. Sekolah SD SMP itu kita lakukan penyuluhan pencegahan gratifikasi iya</p> <p>Pj : Kan di inspektorat sebagai PG unit pengendalian gratifikasi Nya kabupaten ,Salah satu kegiatannya itu Terus yang kedua kita</p>				<p>teman-teman melakukan kegiatan itu disitu ada maklumat inspektorat tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Kemudian juga ada surat independensi</p> <p>Pj : Piagam audit ada</p> <p>Pj : Kode etik ada, kemudian yang apa setelah surat tugas kita bikin yang mba lasmi yang setiap tim harus tanda tangan, independensi, dalam melakukan proses harus independensi. Jadinya kita yang selaku menugaskan kita harus tau apa namanya, jangan sampai kita menugaskan di tempat yang independen gitu. Kan mungkin ada yang kakaknya kerja disini, akhirnya gak disitu. Selagi saya inget, selagi kita inget tidak akan kita tugaskan.</p>		<p>pencegahan pungli Kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan Khusus pungli. Tapi kalau pencegahan gratifikasi Maka hanya inspektorat yang melakukan Kita melakukan kepada seluruh opd Seluruh unit kerja, Dan kemarin kita khususnya kepada Sekolah. Sekolah SD SMP itu kita lakukan penyuluhan pencegahan gratifikasi iya</p> <p>Pj : Integritas nya itu kan audit, bukan auditor nya aja, tapi semua pegawai ya. Itu kan menandatangani pakta integritas, ada poin satu sampai tujuh kalau ndak salah, nah itu setiap hari senin dibacakan perwakilan, urut dari yang</p> <p>Pj : Seminggu sekali, jadi untuk mengingatkan, nah besok, besok itu baru mau saya bikin ini apa namanya kayak gini <i>nanti</i> banner atau apa</p>
--	--	--	--	---	--	--

membagi selebaran brosur pencegahan gratifikasi kepada sub-sub unit dan juga kita menerima nah ini setiap hari raya kita mengeluarkan surat edaran yang ditandatangani oleh Bupati kepada seluruh perangkat daerah sampai desa dan kepada ini konsorsium Kelompoknya pengusaha kelompok-kelompok pengusaha koperasi Kelompok Kadit segala macam gitu kelompok pengusaha dan itu kita sampaikan pencegahan gratifikasi maksudnya tidak usah memberi ke pegawai pemerintahan. ini besok mau kita mau tekankan lagi. Salah satunya itu kemudian dari surat itu *nanti* kalau ada

Ada itu, kita udah buat daftarnya

yang *nanti* ada apa namanya maklumat pelayanan kita apa integritas *nanti* harus ditandatangani oleh semuanya, ini baru mau kita buat



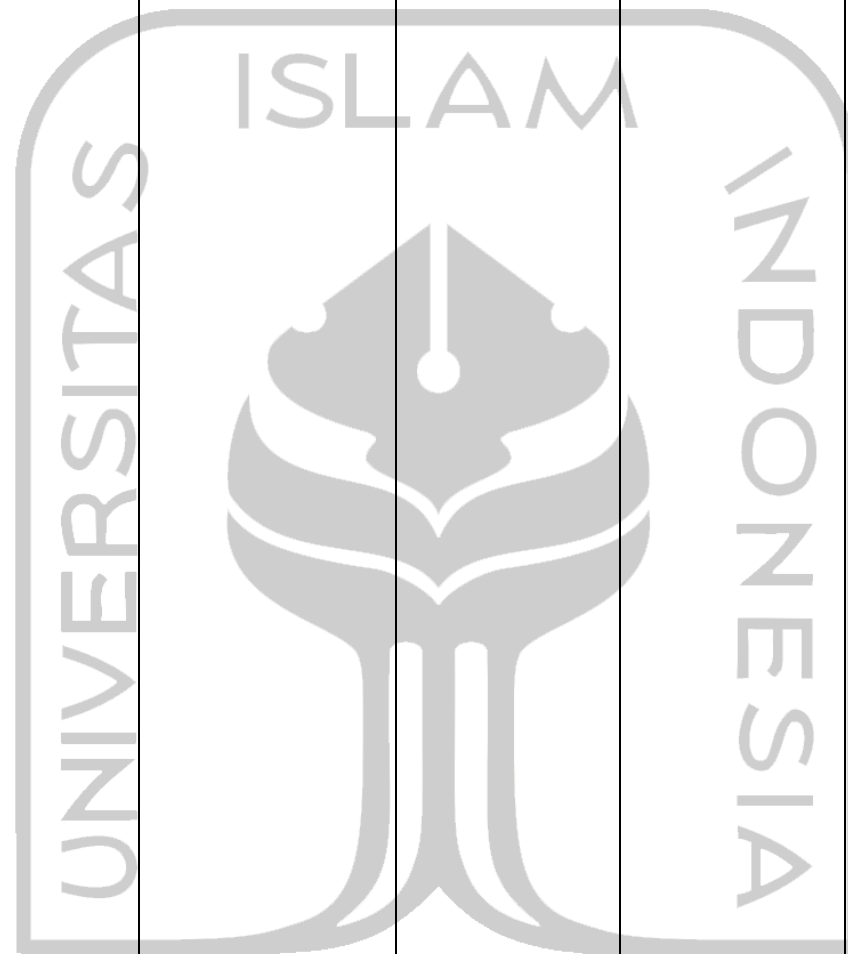
pelaporan penerimaan gratifikasi maka wajib melaporkan melaporkan kemarin bisa langsung ke KPK bisa juga langsung melalui UPG UPG kita nanti kita yang melaporkan ke KPK dan dari pengalaman ada garam yang Kok itu kayak gratifikasi Dan harus kita kirim ke peminta kita kirim ke KPK,

Pj : Itu satuan bersih pungutan liar, Kalau kita penyuluhan pungli nya hanya di opd opd kita, tapi kalau ke masyarakat-masyarakat itu tugasnya Kepolisian karena kepolisian itu kan punya Babinsa

Pj : Itu kepala-kepala upt nya kita kumpulkan kita lakukan



penyuluhan juga. Terus yang kepala-kepala sekolah dan guru-guru, kepala-kepala sekolah kemarin bukan guru-guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah, SD dan SMP meskipun belum semua. Kan mestinya butuh nya kan se Sleman, jadi kemarin baru dua Angkatan baru bisa.



الجامعة الإسلامية  
الاستد بالاندو

<p>5 : Ngatiyah, S.H.</p>	<p>G Itu kemarin yang udah, yang udah ya, yang udah itu kayak ini kalau <i>fraud</i> ini kemarin ada yang penyalahgunaan dana yang sampai kejaksaan juga ya, kan itu tahun 2020 atau 2021 ya itu, itu sampai di vonis di kejaksaan juga. Trus ada yang biasanya sih yang masuk ke APH APH itu ya <i>fraud</i> nya yang terjadi disini ada juga yang kasus-kasus di DPU itu juga, kalau itu untuk penindakannya ya, kalau untuk pencegahannya sih kita macam-macam ya, ada sosialisasi-sosialisasi juga, ada UPG, ada apa itu.</p> <p>G Gratifikasi selama ini sudah ada sarana tersendiri, kalau ada gratifikasi akan dilaporkan</p>	<p>Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya mas ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p>	<p>G Biasanya di keuangannya sih, di pengelolaan keuangan, kalau aset aset kayak gitu enggak sih, soalnya aset juga kita pantau terus, kalau misalnya ada kehilangan aset itu kita telusuri, kan kalau inspektorat kan tugasnya memang sampai disitu juga ya, kalau ada aset yang hilang kita telusuri ada unsur kelalaian gak? Seperti apa kayak gitu? Trus kita juga punya aplikasi SIM aset itu untuk menginventarisasi semua aset, jadi sudah diantisipasi sih kalau aset-asetnya sendiri</p> <p>Rz Kalau untuk ini bu mendampingi perangkat desa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya termasuk bisa mencegah <i>fraud</i> gak bu pendampingan itu? G Bisa juga sih. Mereka kan misalnya ya mau pengadaan barang jasa atau mau</p>	<p>G Bisa juga sih. Mereka kan misalnya ya mau pengadaan barang jasa atau mau pengadaan tanah kas desa kan mereka juga konsultasi dulu ke kami nggih seperti apa <i>nanti</i> biar gak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya seperti itu.</p> <p>Rz Kalau untuk konsultasi tadi itu bu, itu ternasuk bisa mencegah <i>fraud</i> bu? G Bisa, karena mereka gini ya mau seperti ini langkahnya seperti apa yang benar, kayak gitu kan diharapkan mereka juga jadi tau prosesedurnya seperti apa, usaha yang harus dilakukan bagaimana jadi itu kan gak, diharapkan sih gak membuka peluang untuk melakukan <i>fraud</i></p>	<p>Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya mas ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p>	<p>Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya mas ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p>	<p>Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya mas ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p>
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

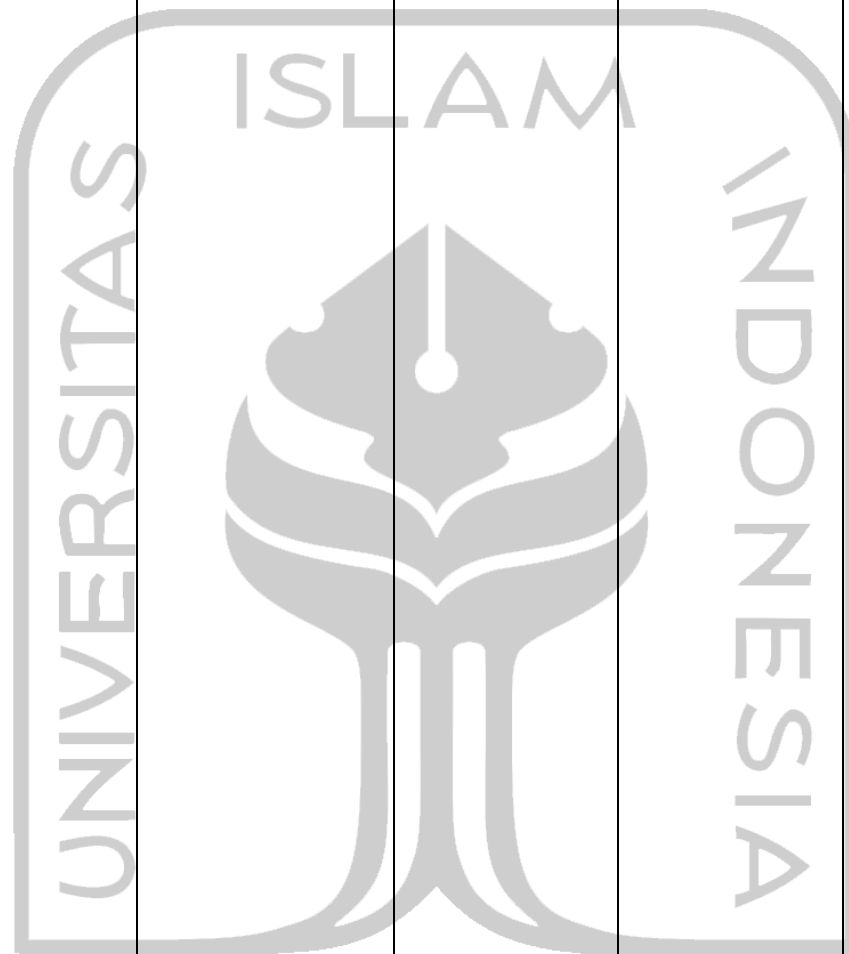


<p>kayak gitu sudah ada sih, tapi belum semuanya ini juga sih, belum semuanya melapor, mungkin ya. Terus kalau gratifikasi kan ada gratifikasi yang diperbolehkan ada yang enggak, ya yang itu yang dilaporkan. Kemarin banyak yang dilaporkan sih terutama kalau hari raya itu, tapi kesini-kesini akhirnya sekarang hampir sudah gak ada sih gratifikasi karna kita udah kesadaran ya kita udah sering sosialisasi kayak gitu jadi kita sudah jarang ada gratifikasi sekarang, makanya gak ada yang lapor karna memang gak ada nggih kayak dalam pbj, dalam apa itu gak seperti itu sih</p> <p>Rz Hm em, terus</p>	<p>pengadaan tanah kas desa kan mereka juga konsultasi dulu ke kami nggih seperti apa <i>nanti</i> biar gak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya seperti itu.</p> <p>Rz Kalau untuk konsultasi tadi itu bu, itu termasuk bisa mencegah <i>fraud</i> bu? G Bisa, karena mereka gini ya mau seperti ini langkahnya seperti apa yang bener, kayak gitu kan diharapkan mereka juga jadi tau prosesedurnya seperti apa, usaha yang harus dilakukan bagaimana jadi itu kan gak, diharapkan sih gak membuka peluang untuk melakukan <i>fraud</i> seperti itu nggeh disamping pemeriksaan pemeriksaan kami yang sudah ada itu</p> <p>Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-</p>	<p>seperti itu nggeh disamping pemeriksaan pemeriksaan kami yang sudah ada itu</p> <p>Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya mas ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini seperti ini ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p>			
--	--	--	--	--	--

<p>bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya mas ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p>		<p>program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya mas ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p>				
--	--	---	--	--	--	--



6 : Pipit  
Tyas  
Ratna  
Puspita,  
S.H.,  
MPA.



الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

<p>7 : Retno Isni Satiti</p>	<p>Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak mengembangkan diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas membantu untuk</p>	<p>Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak mengembangkan diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas membantu untuk</p>	<p>Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak membantu untuk</p>	<p>Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak</p>	<p>Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak</p>	<p>Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak</p>	<p>Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak mengembangkan diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas</p>
------------------------------	---	---	---	--	--	--	--

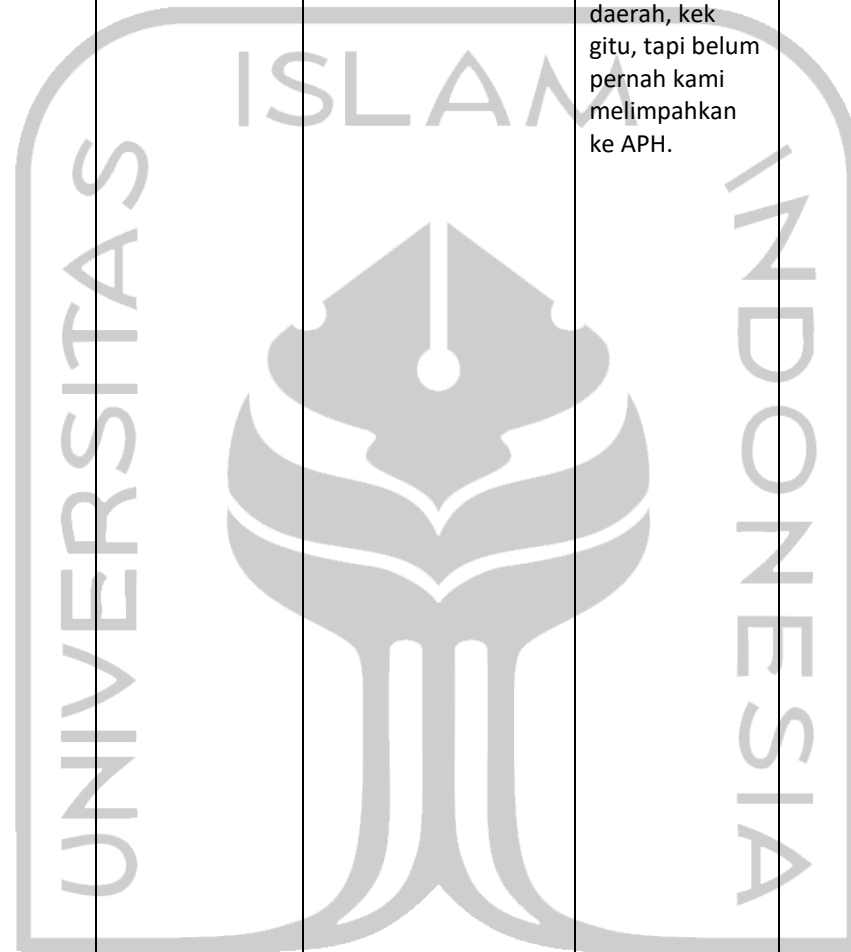
	<p>kalau kita nggak mengembangkannya diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas membantu untuk pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p>	<p>pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p>	<p>pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p>	<p>mengembangkan diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas membantu untuk pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p>	<p>mengembangkan diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas membantu untuk pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p>	<p>membantu untuk pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p>	<p>membantu untuk pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p>
Narasumber	AR : 3. Surat independensi setelah surat tugas	AS : 4. Mengundang Pihak Luar untuk motivasi keagamaan	AT : 1. Ikut sosialisasi	AU : 1. Sosialisasi Penilaian dan PAK Auditor	AV : 2. Sosialisasi Evaluasi SPBE	AW : 3. Sosialisasi Inventarisasi BMD	

1 : Heri Setyawati, S.E., M.Acc.



H : Kalau ini, ini berawal dari, yang pernah ya, yang dua-duanya pernah sih. Artinya pengembangan temuan dari hasil pemeriksaan inspektorat sendiri kemudian ada laporan dari SKPD yang lain, maksudnya dari dinas teknis yang lain, kemudian oleh inspektorat ditindak lanjuti dengan, kalau dulu-dulu sih namanya bukan investigasi ya, masih pemeriksaan kasus seperti itu dan selama ini yang kami laksanakan istilahnya dengan pengenaan tuntutan ganti rugi, artinya kalau ada ketekoran kas maksudnya kerugian yang berkaitan dengan keuangan

daerah itu  
untuk segera  
disetorkan  
kembali ke kas  
daerah, kek  
gitu, tapi belum  
pernah kami  
melimpahkan  
ke APH.

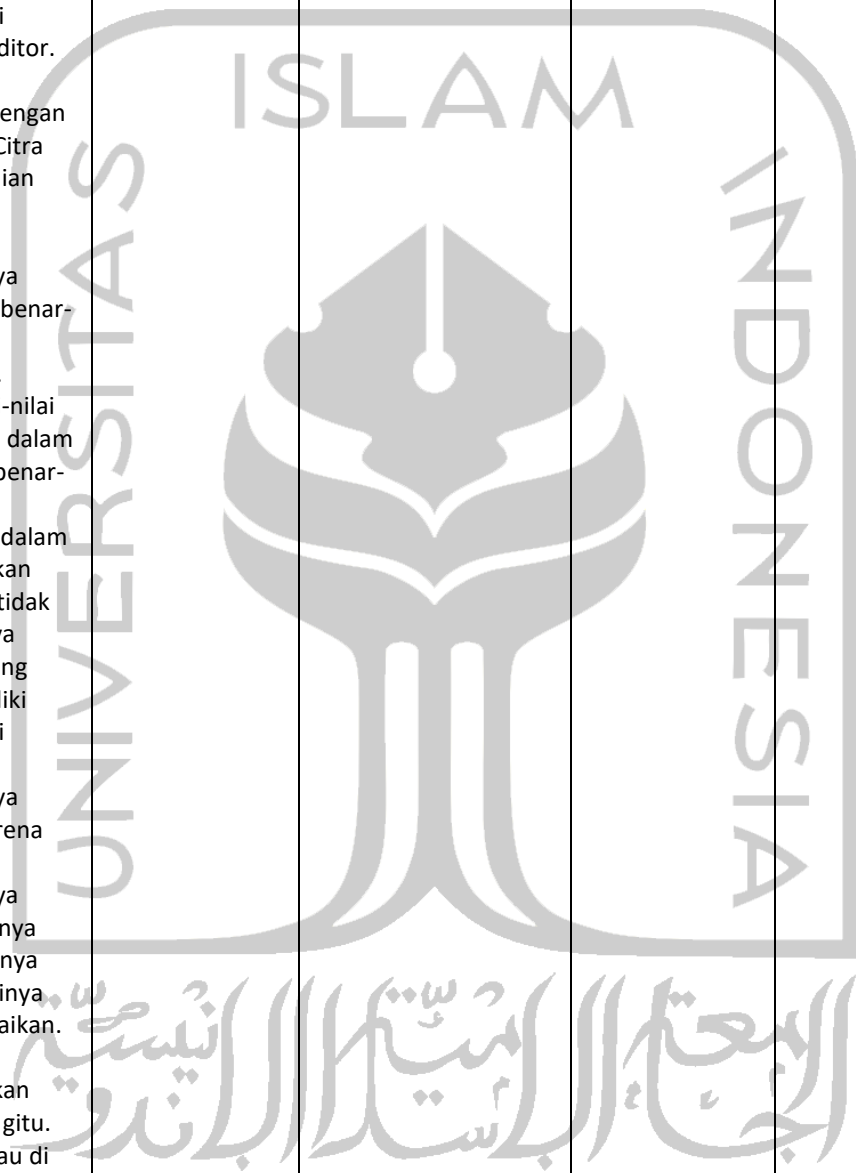


الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

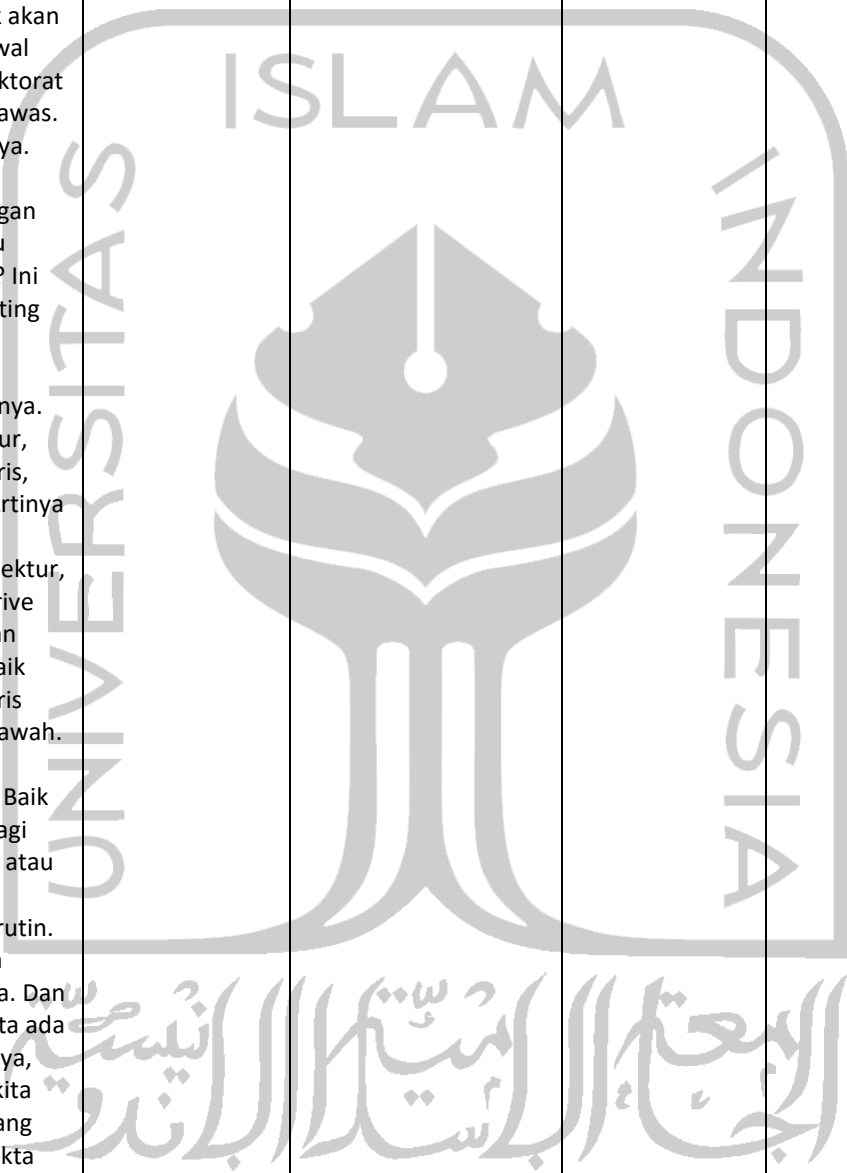
<p>2 : Hery Dwi Kuryanto, S.H., M.Hum.</p>	<p>Hy Ya, jadi tujuannya kalau untuk inspektorat, Pasti pelatihan apapun itu, pasti mendukung itu. Jadi kecurangan semua itu kalau yang namanya APIP, Pasti dalam rangka untuk menghindari kecurangan. Tidak ada pelatihan yang di sini tanpa...Aktifitas yang dilakukan oleh inspektorat itu semua menuju ke sana.</p>	<p>Hy Kekurangannya? Ya. Dari sisi... Jadi gini, kita kan harus pengembangan itu dari sisi kompetensi pertama. Dari sisi kompetensi itu bisa kita lakukan peningkatan dari sisi pengetahuannya, kompetensinya Itu melalui diklat. Itu kan sesuatu yang bisa dipelajari. Tergantung kepada bagaimana kemampuan, terus kemauan dari SDM untuk mengembangkan diri. Kita ada dari diklat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga baik itu di BPKP maupun BPK. Kemudian yang terpenting lagi adalah justru bukan hanya pengembangan kompetensi, tapi lebih kepada kualitas diri. Itu yang terpenting. Jadi profesi... Di sini kan auditor,</p>		<p>Hy Ya, jadi tujuannya kalau untuk inspektorat, Pasti pelatihan apapun itu, pasti mendukung itu. Jadi kecurangan semua itu kalau yang namanya APIP, Pasti dalam rangka untuk menghindari kecurangan. Tidak ada pelatihan yang di sini tanpa...Aktifitas yang dilakukan oleh inspektorat itu semua menuju ke sana.</p>	<p>Hy Ya, jadi tujuannya kalau untuk inspektorat, Pasti pelatihan apapun itu, pasti mendukung itu. Jadi kecurangan semua itu kalau yang namanya APIP, Pasti dalam rangka untuk menghindari kecurangan. Tidak ada pelatihan yang di sini tanpa...Aktifitas yang dilakukan oleh inspektorat itu semua menuju ke sana.</p>	<p>Hy Ya, jadi tujuannya kalau untuk inspektorat, Pasti pelatihan apapun itu, pasti mendukung itu. Jadi kecurangan semua itu kalau yang namanya APIP, Pasti dalam rangka untuk menghindari kecurangan. Tidak ada pelatihan yang di sini tanpa...Aktifitas yang dilakukan oleh inspektorat itu semua menuju ke sana.</p>
--	---	---	--	---	---	---



fungsional. Profesi auditor itu bukan hanya didukung oleh profesional kompetensi seorang auditor. Tapi harus dibarengi dengan integritas. Citra diri. Kemudian bagaimana kemudian integritasnya mereka itu benar-benar bisa ditegakkan. Antara nilai-nilai yang ada di dalam dirinya itu benar-benar bisa diterapkan dalam melaksanakan tugas. Jadi tidak ada gunanya kalau seorang yang memiliki kompetensi kemudian integritasnya rendah. Karena kalau integritasnya rendah artinya profesionalnya kompetensinya bisa tergadaikan. Itu semua pekerjaan kan yang kayak gitu. Auditor kalau di sini fungsinya fungsi pengawasan, auditor kalau

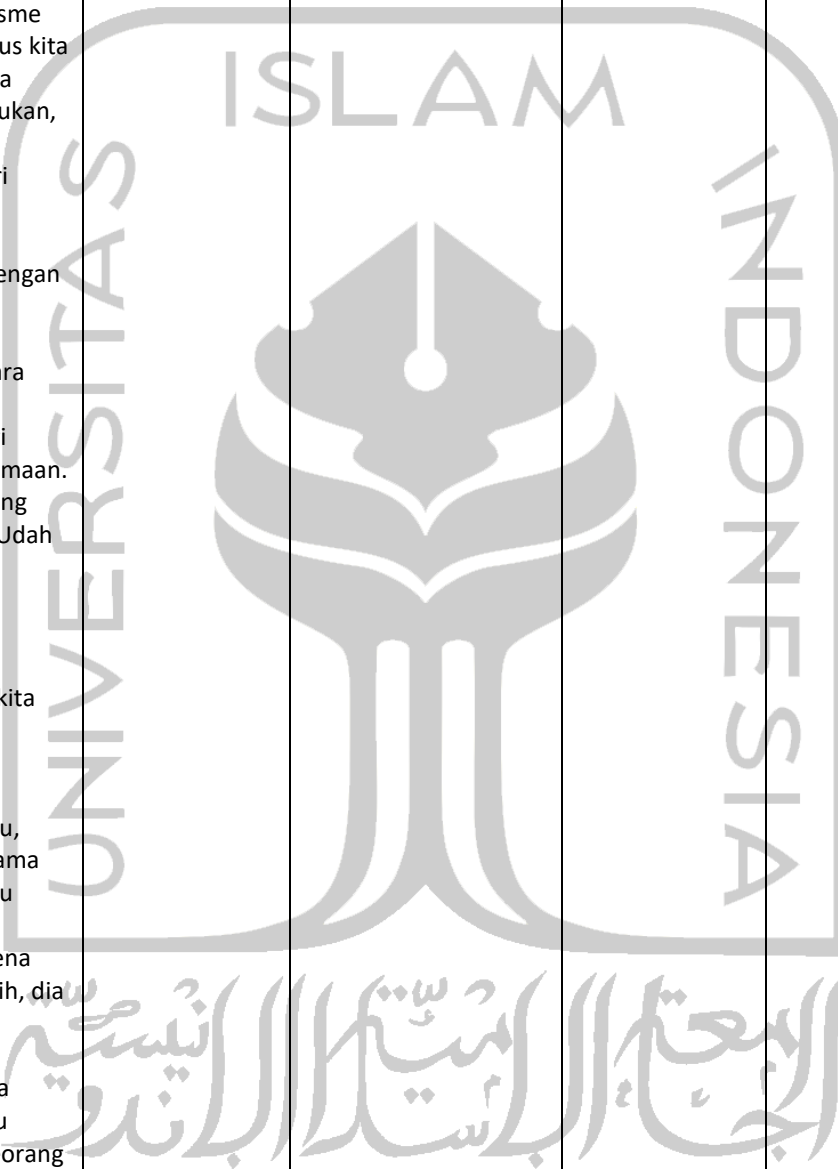


sudah terdapat profesionalismenya, artinya kompetensinya berarti tidak akan bisa mengawal fungsi inspektorat selaku pengawas. Itu aja titiknya. Sehingga pengembangan integritas itu melalui apa? Ini yang terpenting adalah dari internal manajemennya. Dari inspektur, dari sekretaris, dari irban. Artinya kami, saya sebagai inspektur, perlu mendrive teman-teman struktural baik dari sekretaris sampai ke bawah. Itu melalui pembinaan. Baik itu di apel pagi setiap Senin atau pertemuan-pertemuan rutin. Kita kuatkan integritas dia. Dan di tempat kita ada yang namanya, setiap apel kita membaca yang namanya pakta integritas. Ada delapan pakta atau berapa. Itu yang sebetulnya

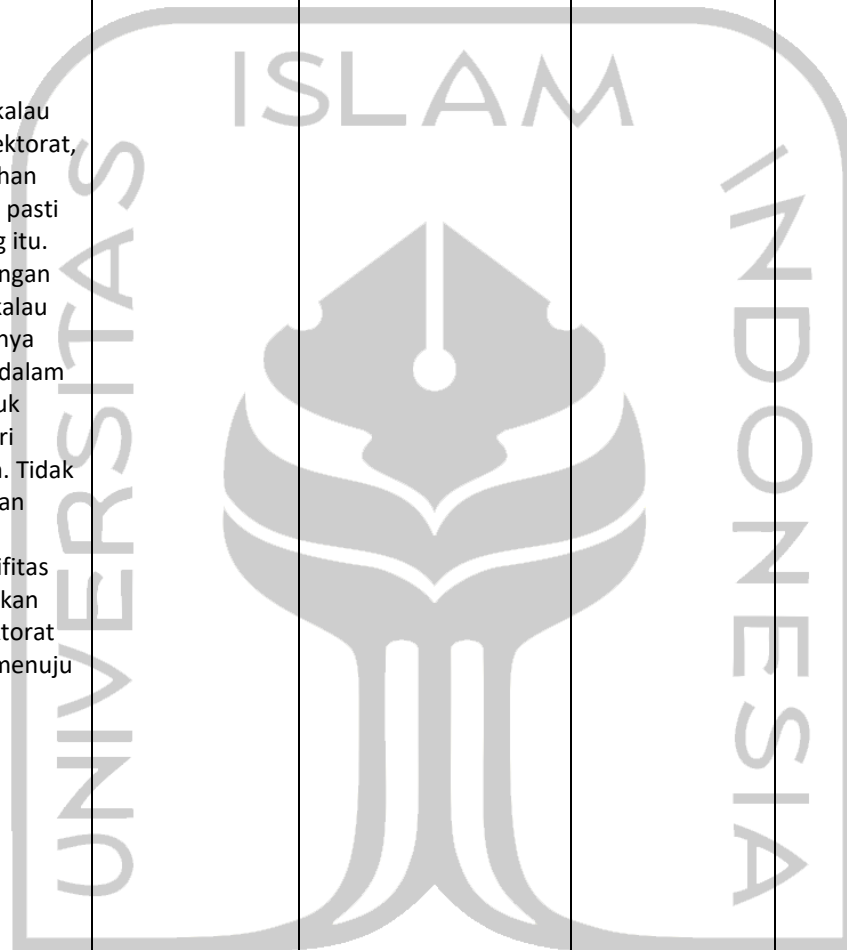


akan membangun kepribadian dari mereka untuk bisa menegakkan profesionalisme mereka. Terus kita juga, ada kita pelatihan, bukan, pemberian motivasi dari pihak luar. Motivasi kaitannya dengan profesional, bagaimana bekerja secara profesional, maupun dari aspek keagamaan. Itu yang paling terpenting. Udah jawabannya selesai.

Hy Iya, kita-kita ngundang. Pembekalan keimanan seseorang itu, baik dari agama manapun, itu yang paling penting karena dia akan lebih, dia akan teguh terhadap integritasnya manakala itu disentuh. Seorang apapun pandainya kayak apa, kompetensinya kayak apa, karena



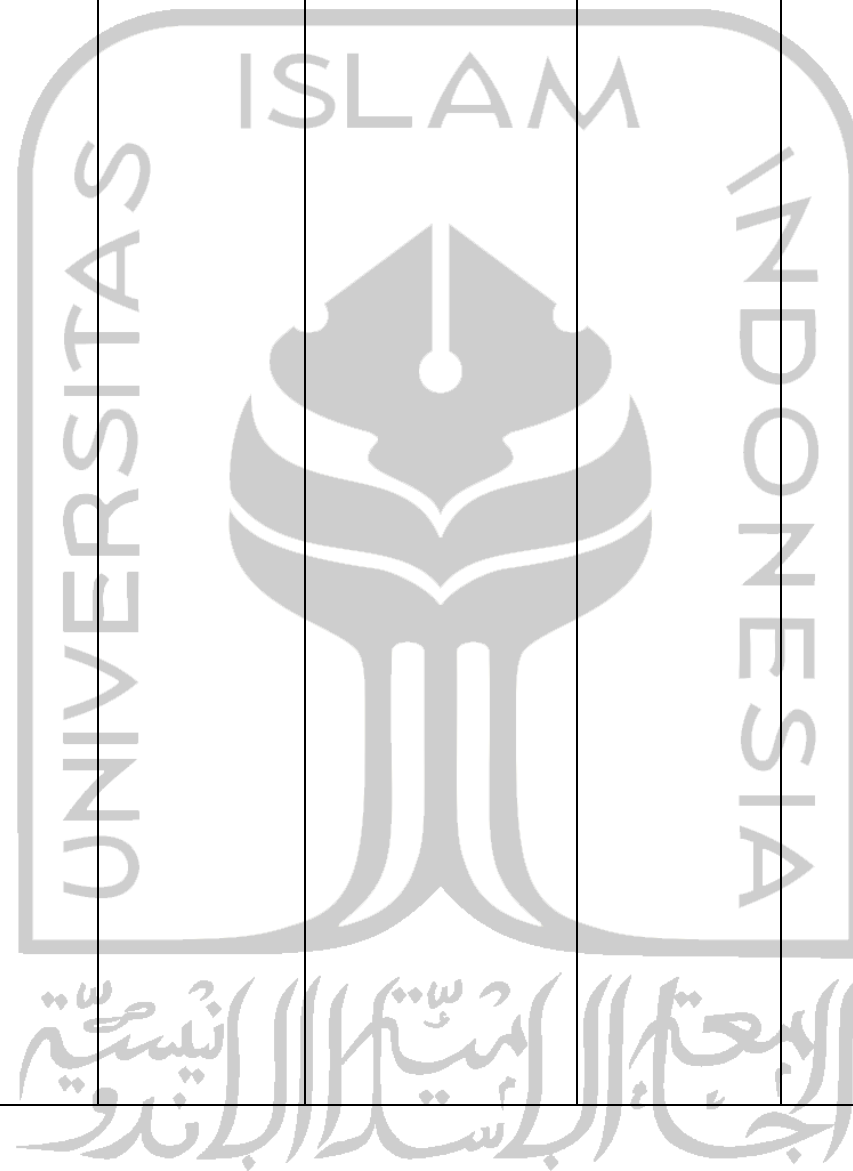
		<p>kan kadang yang melanggar itu yang pintar-pintar. Bener gak?</p> <p>Hy Ya, jadi tujuannya kalau untuk inspektorat, Pasti pelatihan apapun itu, pasti mendukung itu. Jadi kecurangan semua itu kalau yang namanya APIP, Pasti dalam rangka untuk menghindari kecurangan. Tidak ada pelatihan yang di sini tanpa...Aktifitas yang dilakukan oleh inspektorat itu semua menuju ke sana.</p>				
<p>3 : Ika Sulistyio Devi</p>	<p>I Ya termasuk di dalamnya independensi, kemudian <i>anti</i> korupsi, begitu</p>					



<p>4 : Ir. Sri Puji Lestari</p>	<p>Pj : Jadi kalau kemarin karena baru-baru Jadi kita mencoba membuat, Kemudian kita share itu semua ke unit-unit kerja Contohnya seperti ini menyesuaikan dengan kegiatannya Itu kadang opd juga belum ngeh gitu loh laporannya tidak ada <i>fraud</i> tidak ada <i>fraud</i> tambah akan yang namanya penilaian resiko itu penilaian yang terjadi atau yang mungkin terjadi kan gitu Jadi kalau dalam pikirannya nggak pernah ada jadi seakan-akan yang sudah terjadi kan gitu, mungkin kalau penilaian resiko seperti itu ya itu jadi langkah pertama ya itu kalau terkait dengan <i>fraud</i>. Penilaian risiko</p>	<p>Pj : Harus, sosialisasinya itu tidak hanya kepada unit-unit kerja, tapi juga kepada masyarakat, kepada pengusaha, sampai DPRD</p> <p>Pj : Jadi kalau kemarin karena baru-baru Jadi kita mencoba membuat, Kemudian kita share itu semua ke unit-unit kerja Contohnya seperti ini menyesuaikan dengan kegiatannya Itu kadang opd juga belum ngeh gitu loh laporannya tidak ada <i>fraud</i> tidak ada <i>fraud</i> tambah akan yang namanya penilaian resiko itu penilaian yang terjadi atau yang mungkin terjadi kan gitu Jadi kalau dalam pikirannya nggak pernah ada jadi seakan-akan yang sudah terjadi kan gitu, mungkin kalau penilaian resiko seperti itu</p>			<p>Pj : Hm m, itu khusus yang bidang investigasinya, yang bidang reformasi itu kan juga saling terkait, reformasi itu kan pembenahan di semua lini manajemen pemerintahan supaya bisa tercapai good governance gitu. Itu, jadi ada bidangnya itu ada kegiatan lagi yang menyokong itu, yang reformasi itu kan harus perbaikan di manajemen nya, terus perbaikan di manajemen perubahan, ada di perbaikan di pembentukan regulasi, ada di SDM nya, pengelolaan SDM, pengelolaan pengawasannya, pengelolaan pelayanan publik nya, itu di reformasi</p>	
---------------------------------	---	---	--	--	--	--

	<p><i>fraud</i> Terjadi, Tapi saya itu sendiri tidak bisa membedakan ya antara <i>fraud</i> dengan agenda <i>anti</i> korupsi lainnya Oh ya kalau untuk pencegahan Kita yaitu melakukan sosialisasi-sosialisasi pencegahan pungli Kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan Khusus pungli. Tapi kalau pencegahan gratifikasi Maka hanya inspektorat yang melakukan Kita melakukan kepada seluruh opd Seluruh unit kerja, Dan kemarin kita khususkan kepada Sekolah. Sekolah SD SMP itu kita lakukan penyuluhan pencegahan gratifikasi iya</p>	<p>ya itu jadi langkah pertama ya itu kalau terkait dengan <i>fraud</i>. Penilaian risiko <i>fraud</i> Terjadi, Tapi saya itu sendiri tidak bisa membedakan ya antara <i>fraud</i> dengan agenda <i>anti</i> korupsi lainnya Oh ya kalau untuk pencegahan Kita yaitu melakukan sosialisasi-sosialisasi pencegahan pungli Kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan Khusus pungli. Tapi kalau pencegahan gratifikasi Maka hanya inspektorat yang melakukan Kita melakukan kepada seluruh opd Seluruh unit kerja, Dan kemarin kita khususkan kepada Sekolah. Sekolah SD SMP itu kita lakukan penyuluhan pencegahan gratifikasi iya</p>			<p>birokrasi itu kan juga terkait dengan investigasi, gitu, mungkin kalau saat ini belum banyaklah, belum banyak.</p>	
--	---	--	--	--	---	--

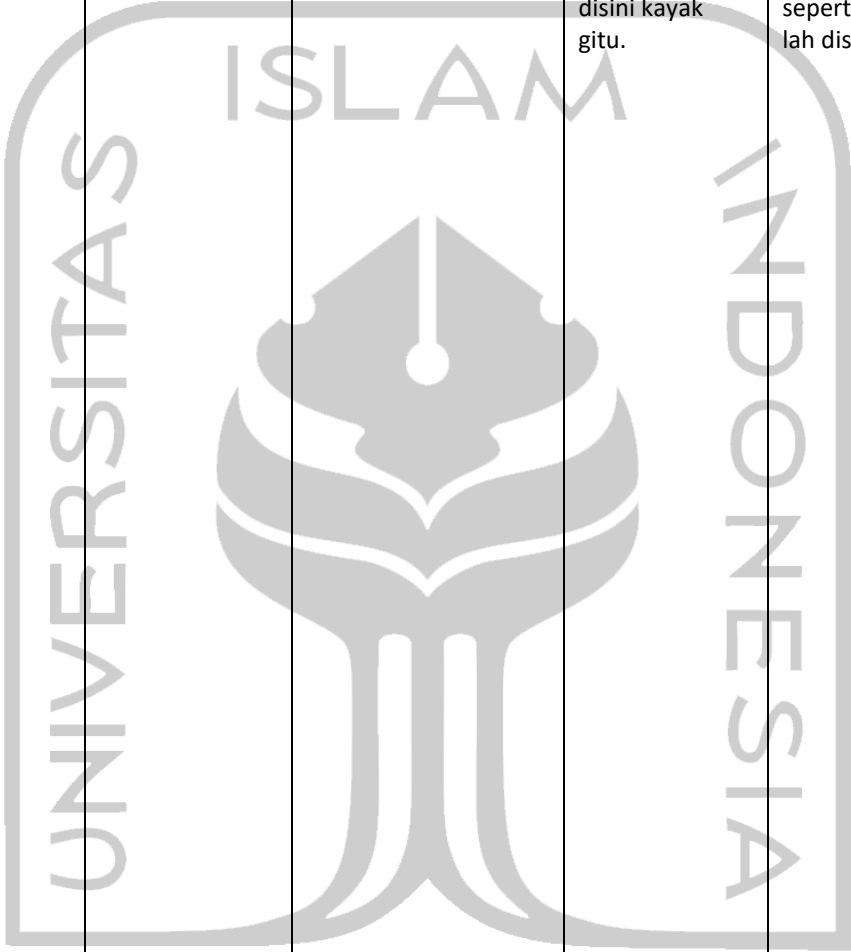

Pj : Kode etik ada, kemudian yang apa setelah surat tugas kita bikin yang mba lasmi yang setiap tim harus tanda tangan, independensi, dalam melakukan proses harus independensi. Jadinya kita yang selaku menugaskan kita harus tau apa namanya, jangan sampai kita menugaskan di tempat yang independen gitu. Kan mungkin ada yang kakaknya kerja disini, akhirnya gak disitu. Selagi saya inget, selagi kita inget tidak akan kita tugaskan. Ada itu, kita udah buat daftarnya



<p>5 : Ngatiah, S.H.</p>	<p>G Gratifikasi selama ini sudah ada sarana tersendiri, kalau ada gratifikasi akan dilaporkan kayak gitu sudah ada sih, tapi belum semuanya ini juga sih, belum semuanya melapor, mungkin ya. Terus kalau gratifikasi kan ada gratifikasi yang diperbolehkan ada yang enggak, ya yang itu yang dilaporkan. Kemarin banyak yang dilaporkan sih terutama kalau hari raya itu, tapi kesini-kesini akhirnya sekarang hampir sudah gak ada sih gratifikasi karna kita udah kesadaran ya kita udah sering sosialisasi kayak gitu jadi kita sudah</p>	<p>Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya mas ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p>	<p>Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya mas ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p>	<p>G Kalau deteksi <i>fraud</i> itu kita kan ada pemeriksaan seperti itu, <i>nanti</i> kan kita lihat bukti, misalkan pengadaan ini bukti pertanggungjawabannya seperti ini, kan kita ya, terus <i>nanti</i> kita konfirmasi ke pihak ketiga kalau sudah benar apa belum kayak gitu <i>nanti</i> ada temuan-temuan yang harus ditindak lanjuti dan di evaluasi seperti itu, deteksinya dari situ sih kalau kita, di OPD juga kita periksa, <i>nanti</i> ada penyimpangan-penyimpangan kan kelihatan dari hasil pemeriksaan kami seperti itu ya</p> <p>Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya mas ya, jadi ya kita kalau</p>	<p>G Bisa juga sih. Mereka kan misalnya ya mau pengadaan barang jasa atau mau pengadaan tanah kas desa kan mereka juga konsultasi dulu ke kami nggih seperti apa <i>nanti</i> biar gak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya seperti itu.</p> <p>Rz Kalau untuk konsultasi tadi itu bu, itu ternasuk bisa mencegah <i>fraud</i> bu? G Bisa, karena mereka gini ya mau seperti ini langkahnya seperti apa yang benar, kayak gitu kan diharapkan mereka juga jadi tau prosesedurnya seperti apa, usaha yang harus dilakukan bagaimana jadi itu kan gak,</p>	<p>G Bisa juga sih. Mereka kan misalnya ya mau pengadaan barang jasa atau mau pengadaan tanah kas desa kan mereka juga konsultasi dulu ke kami nggih seperti apa <i>nanti</i> biar gak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya seperti itu.</p> <p>G Kalau deteksi <i>fraud</i> itu kita kan ada pemeriksaan seperti itu, <i>nanti</i> kan kita lihat bukti, misalkan pengadaan ini bukti pertanggungjawabannya seperti ini, kan kita ya, terus <i>nanti</i> kita konfirmasi ke pihak ketiga kalau sudah benar apa belum kayak gitu <i>nanti</i> ada temuan-temuan yang harus ditindak lanjuti dan di evaluasi seperti itu, deteksinya dari situ sih kalau kita, di OPD juga kita periksa, <i>nanti</i> ada penyimpangan-penyimpangan kan kelihatan dari hasil pemeriksaan kami seperti itu ya</p> <p>Rz Kalau untuk</p>
----------------------------------	---	--	--	--	--	---



<p>jarang ada gratifikasi sekarang, makanya gak ada yang lapor karna memang gak ada nggih kayak dalam pbj, dalam apa itu gak seperti itu sih</p> <p>Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya mas ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p>	<p>jarang ada gratifikasi sekarang, makanya gak ada yang lapor karna memang gak ada nggih kayak dalam pbj, dalam apa itu gak seperti itu sih</p> <p>Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya mas ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p>	<p>misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p>	<p>diharapkan sih gak membuka peluang untuk melakukan <i>fraud</i> seperti itu nggeh disamping pemeriksaan pemeriksaan kami yang sudah ada itu</p> <p>Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya mas ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak workshop kan kita tau ya jadi kita begitu</p>	<p>konsultasi tadi itu bu, itu ternasuk bisa mencegah <i>fraud</i> bu? G Bisa, karena mereka gini ya mau seperti ini langkahnya seperti apa yang bener, kayak gitu kan diharapkan mereka juga jadi tau prosesedurnya seperti apa, usaha yang harus dilakukan bagaimana jadi itu kan gak, diharapkan sih gak membuka peluang untuk melakukan <i>fraud</i> seperti itu nggeh disamping pemeriksaan pemeriksaan kami yang sudah ada itu</p> <p>Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya mas ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak</p>	<p>konsultasi tadi itu bu, itu ternasuk bisa mencegah <i>fraud</i> bu? G Bisa, karena mereka gini ya mau seperti ini langkahnya seperti apa yang bener, kayak gitu kan diharapkan mereka juga jadi tau prosesedurnya seperti apa, usaha yang harus dilakukan bagaimana jadi itu kan gak, diharapkan sih gak membuka peluang untuk melakukan <i>fraud</i> seperti itu nggeh disamping pemeriksaan pemeriksaan kami yang sudah ada itu</p> <p>Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya mas ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak</p>	<p>konsultasi tadi itu bu, itu ternasuk bisa mencegah <i>fraud</i> bu? G Bisa, karena mereka gini ya mau seperti ini langkahnya seperti apa yang bener, kayak gitu kan diharapkan mereka juga jadi tau prosesedurnya seperti apa, usaha yang harus dilakukan bagaimana jadi itu kan gak, diharapkan sih gak membuka peluang untuk melakukan <i>fraud</i> seperti itu nggeh disamping pemeriksaan pemeriksaan kami yang sudah ada itu</p> <p>Rz Hm em, terus bu bagaimana bu kesesuaian program-program pengembangan kompetensi tadi dengan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan investigasi tadi bu gimana kesesuaiannya G Itu sih saling berhubungan ya mas ya, jadi ya kita kalau misalnya kita kompeten, lebih kompeten jadi lebih bisa lah mendeteksi <i>fraud</i> nya, misalnya kita sudah banyak diklat banyak</p>
---	---	---	---	---	---	---

	<p>masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p>		<p>masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p>	<p>workshop kan kita tau ya jadi kita begitu masuk aja kita udah tau lah oh ini sepertinya ada <i>fraud</i> lah disini kayak gitu.</p>
<p>6 : Pipit Tyas Ratna Puspita, S.H., MPA.</p>				

7 : Retno Isni Satiti	Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku saya auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangk an diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak	Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku saya auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database	Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku saya auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database	Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku saya auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak mengembangkan diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas membantu untuk pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali	Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku saya auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database	Rz Itu program-program atau secara semua program pengembangan kompetensi yang ada dilakukan di inspektorat ini, itu membantu meningkatkan kualitasnya pegawai menurut Ibu? Baik struktural atau fungsional dalam rangka program-program kerja yang berkaitan dengan <i>antifraud</i> tadi? Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku saya auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak mengembangkan diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas membantu untuk pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali
--------------------------	---	--	--	---	--	---

	<p>melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak mengembangkan diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas membantu untuk pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p>	<p>mengembangkan diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas membantu untuk pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p>	<p>terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak mengembangkan diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas membantu untuk pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p>	<p>dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p>	<p>database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak mengembangkan diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas membantu untuk pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p>	<p>dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p>
--	---	--	--	---	---	---

الجمعة الاستاذة الاندو

Lampiran 12 Framework Matrices Rumusan Masalah 3: Kekurangan dan Kendala

Narasumber	B : a. Kekurangan	C : 1. Sedikit yang bisa berpartisipasi	D : 2. Mis informasi	E : 3. Kurang waktu belajar hal baru	F : 4. Kesulitan mengikuti perkembangan teknologi	H : b. Kendala	I : 1. Kuota peserta yang dibatasi
1 : Heri Setyawati, S.E., M.Acc.		<p>H : Kalau jumlahnya ya memaksimalkan, mengoptimalkan yang ada, gak bisa untuk terus-terus minta nambah-nambah gitu gak bisa.</p> <p>H : Kuotanya tergantung dari kemenpan juga, dari bkpp, kita gak bisa milih,</p> <p>Rz : Itu macam-macam ya materinya di e-learning tadi itu ya, itu bagaimana partisipasi dari auditor sendiri atau pegawai inspektorat untuk mengikuti e-learning tadi, apakah tinggi</p> <p>H : Belum banyak, tapi ada beberapa yang sudah, termasuk saya juga belum</p>			<p>H : Kalau tantangannya kan sekarang era digital itu yang lebih banyak apa kita juga tidak bisa tutup mata dengan perkembangan jaman, sekarang era digital yang sementara ini kan banyak yang kita laksanakan itu masih yang sistemnya manual, sehingga perlu pengetahuan tentang yang ini forensik audit, terus sekarang yang pakai digital-digital itu kan kita masih lemah audit tentang itu.</p>		<p>H : Kalau jumlahnya ya memaksimalkan, mengoptimalkan yang ada, gak bisa untuk terus-terus minta nambah-nambah gitu gak bisa.</p> <p>H : Kuotanya tergantung dari kemenpan juga, dari bkpp, kita gak bisa milih,</p>

2 : Hery Dwi Kuryanto, S.H., M.Hum.							
3 : Ika Sulistyio Devi		<p>I Kendalanya karena banyak ketugasan di kami, Jadi kalau misalnya harus satu auditor itu misalnya 2 bulan sekali harus mengikuti diklat gitu, waktunya ya nggak ada.</p> <p>I Iya, mungkin lebih ditekankan dan lebih diperbanyak lagi kegiatan untuk pengembangan kompetensi yang <i>anti-fraud</i> sehingga pemahaman teman-teman khususnya teman-teman auditor itu kan untuk mendeteksi <i>fraud</i> itu kan bisa lebih tajam lagi kalau untuk teman-teman struktural ya jadi tau, jangan sampai melakukan <i>fraud</i>, apa sih yang dimaksud dengan <i>fraud</i>, kemudian kegiatan-</p>		<p>I Selama ini kayaknya enggak. Kayaknya dari jadwal itu mereka ditunjuk siapa, siapa gitu. Karena waktunya enggak sempat mereka untuk nyari-nyari diklat, untuk melakukan pemeriksaan aja kurang waktunya.</p> <p>I Kendalanya karena banyak ketugasan di kami, Jadi kalau misalnya harus satu auditor itu misalnya 2 bulan sekali harus mengikuti diklat gitu, waktunya ya nggak ada.</p> <p>I Selama ini tidak ada, karena itu tadi, waktunya itu sudah tidak cukup.</p>	<p>I Kendalanya karena banyak ketugasan di kami, Jadi kalau misalnya harus satu auditor itu misalnya 2 bulan sekali harus mengikuti diklat gitu, waktunya ya nggak ada.</p> <p>I Ada. Terutama mungkin yang usianya juga sudah di atas 50 gitu kan, kadang pemahamannya kan untuk IT-nya kan kurang ya. Itu ya pelatihan kantor sendiri tentang IT dengan kominfo, kemudian <i>nanti</i> teman-teman auditor yang masih fresh, masih muda-muda itu diberdayakan. Misalnya yang pengendali teknisnya sudah usianya sudah 50 ke atas itu <i>nanti</i> kan tetap dia hanya <i>managerial nanti</i></p>		

		<p>kegiatan apa yang menjurus ke <i>fraud</i>. Kan biasanya kalau yang diklatkan kan lebih banyak yang auditor ya, pengembangan kompetensinya, sedangkan yang struktural ataupun teman-teman saya di sekretariat itu jarang untuk diklat-diklat itu.</p>			<p>yang teknisnya kan yang anggota yang masih muda-muda</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

الجمعة الإسلامية الاندونيسية

<p>4 : Ir. Sri Puji Lestari</p>		<p>Pj : Itu setiap ada berita saya share di grup untuk mengikuti kan gitu. Tapi ada juga yang mengikuti ada juga yang enggak, kan gitu, kan orang macam-macam ya.</p> <p>Pj : Oke, njih, kalau terkait dengan untuk pencegahan <i>fraud</i> sebetulnya kita itu sudah ada (apa namanya) mengirimkan SDM ya, mengirimkan SDM untuk mengikuti pelatihan atau diklat terkait dengan penyuluh <i>anti</i> korupsi. Nggih, sebelum jadi penyuluh ada pelatihan dulu ya, itu kita sudah mengirimkan ada kalau nggak salah ada 9 orang atau 7 orang untuk mengikuti diklat tersebut, setelah lulus diklat tersebut, kemudian yang</p>	<p>Pj : Iya, kan itu pendaftaran e-learning KPK kan melalui inspektorat ya, jadi dari OPD mengirimkan nama ke kita, kita daftarkan ke KPK, kemudian dari KPK <i>nanti</i> mendapatkan notifikasi untuk pelatihan ini maka pelatihan ini <i>nanti</i> akan dibuka tanggal berapa tanggal berapa. Nah pada saat tanggalnya tersebut kita sampaikan kepada yang bersangkutan, mungkin yang bersangkutan lupa ya, nah kita juga tidak mengecek yang bersangkutan tanggal segini harusnya mengikuti e-learning gitu lo, nah itu satu menjadi catatan juga, terus yang kedua kita belum memberi peringatan pada OPD-OPD yang belum</p>		<p>Pj : Penyebabnya apa ya, kalau bilang apa ya, bahasa kasarnya apa ya malas atau apa ya, jadi belum tergugah untuk apa ya meningkatkan dengan kemauan sendiri gitu loh. Jadi kadang-kadang harus kita paksa. Emang pertama ya memang harus dipaksa mengikuti ini, mengikuti ini, yang kedua mungkin kalau udah, tadi ada beberapa sih, dia tidak usah disuruh, dia mengikuti, ada, "bu saya sudah mengikuti ini, ini, ini, ini, terkait dengan pengawasan, ini buktinya" nah baru saya berikan surat keterangan kalau dia sudah mengikuti gitu. Nah itu sebagai dasar untuk mendapatkan angka kredit, ada juga yang seperti itu, luar biasa, iya tapi orang</p>		<p>Pj : Oke, njih, kalau terkait dengan untuk pencegahan <i>fraud</i> sebetulnya kita itu sudah ada (apa namanya) mengirimkan SDM ya, mengirimkan SDM untuk mengikuti pelatihan atau diklat terkait dengan penyuluh <i>anti</i> korupsi. Nggih, sebelum jadi penyuluh ada pelatihan dulu ya, itu kita sudah mengirimkan ada kalau nggak salah ada 9 orang atau 7 orang untuk mengikuti diklat tersebut, setelah lulus diklat tersebut, kemudian yang bersangkutan harapannya mengikuti sertifikasi penyuluh <i>anti</i> korupsi, tetapi dari tujuh orang itu baru satu yang mengikuti penyuluhan <i>anti</i> korupsi, tadinya dua yang mengikuti tapi</p>
---------------------------------	--	--	--	--	---	--	---



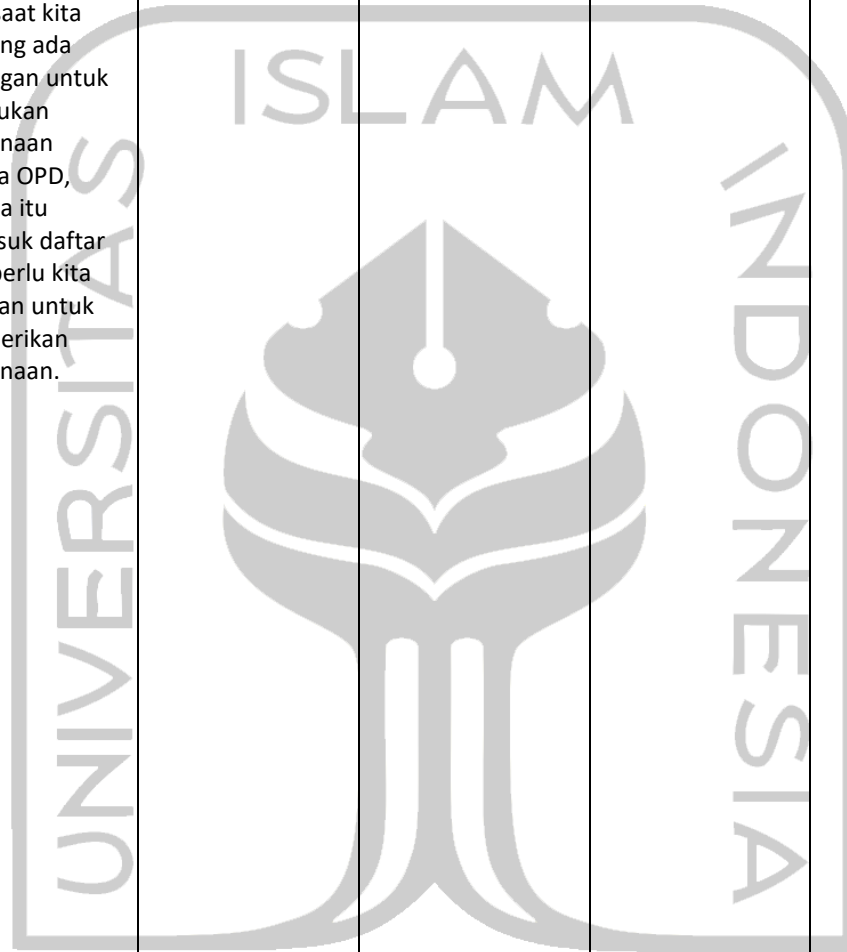
		<p>bersangkutan harapannya mengikuti sertifikasi penyuluh <i>anti</i> korupsi, tetapi dari tujuh orang itu baru satu yang mengikuti penyuluhan <i>anti</i> korupsi, tadinya dua yang mengikuti tapi yang lulus baru satu, jadi kita baru mempunyai penyuluh <i>anti</i> korupsi yang telah bersertifikat oleh KPK itu satu orang, tetapi meskipun demikian, ketujuh orang yang pernah kita diklat kan pencegah <i>anti</i> korupsi ini juga bisa dimanfaatkan dalam rangka sosialisasi ke OPD-OPD. Kemudian kalau dibidang investigasi itu kan kegiatannya tidak hanya investigasi saja tapi juga reformasi birokrasi, itu memang personil</p>	<p>mengirimkan personil nya gitu, itu tidak efektifnya. Jadi sekedar (apa) karena tidak wajib kan gitu maka tidak mengirimkan gak apa-apa kan gitu, tapi kalau besok ya kita monitoring siapa opd yang belum mengirimkan, nah itu kita minta untuk segera mengirimkan personil.</p> <p>Pj : Kalau saya (kalau apa namanya) sementara ini kami baru fokus ya personil yang mengikuti. Karna personil yang mengikuti belum seperti yang kita harapkan kan gitu. Masih sedikit kan gitu. Kalau dampaknya setelah dia mengikuti kemudian dia bagaimana nah itu belum. Belum kami evaluasi. Hanya saja teman-teman yang sudah mengikuti itu</p>	<p>seperti itu satu diantara 10 ternyata</p> <p>Pj : Penyebabnya apa ya, aku itu jarang buka anu ya, buka informasi di web, tapi sebetulnya kekurangan saya itu sudah saya lemparkan ke teman-teman yang muda-muda. Kalau muda-muda kan kalau ada informasi segera informasikan. Kalau ada seminar, tapi khusus seminar terkait yang berhubungan dengan pengawasan, baru bisa mengirimkan peserta</p>	<p>yang lulus baru satu, jadi kita baru mempunyai penyuluh <i>anti</i> korupsi yang telah bersertifikat oleh KPK itu satu orang, tetapi meskipun demikian, ketujuh orang yang pernah kita diklat kan pencegah <i>anti</i> korupsi ini juga bisa dimanfaatkan dalam rangka sosialisasi ke OPD-OPD. Kemudian kalau dibidang investigasi itu kan kegiatannya tidak hanya investigasi saja tapi juga reformasi birokrasi, itu memang personil nya baru delapan orang. Meskipun demikian bisa dibantu dengan bidang yang lain karena ketujuh orang itu tidak seluruhnya itu menyebar di bidang lain yang sudah mendapatkan pelatihan terkait</p>
--	--	--	--	---	---

		<p>nya baru delapan orang. Meskipun demikian bisa dibantu dengan bidang yang lain karena ketujuh orang itu tidak seluruhnya itu menyebar di bidang lain yang sudah mendapatkan pelatihan terkait dengan pencegahan korupsi. Kemudian untuk ke depannya terkait dengan (apa namanya) pendidikan <i>anti</i> korupsi ini tidak hanya di inspektorat, kami juga mengeluarkan mulai tahun kemarin mengeluarkan surat kami tujukan kepada seluruh OPD untuk mengirimkan personil nya guna mengikuti pelatihan atau melalui e-learning nya KPK, tapi memang belum efektif hanya beberapa OPD yang mengirimkan</p>	<p>pada saat kita memang ada undangan untuk melakukan pembinaan kepada OPD, mereka itu termasuk daftar yang perlu kita kirimkan untuk memberikan pembinaan.</p> <p>Pj : Kalau kendala nya apa ya, kendala nya kadang-kadang kita sudah menganggarkan workshop, seminar, mengirim, ternyata kita tidak bisa mendapatkan informasi itu, maksudnya saya. Jadi informasi ada seminar kita kirimkan pengawasan saya gak diberitahukan</p> <p>Pj : Padahal juga saya sebarkan ke teman-teman kalau ada informasi seperti ini tolong diberitahu, supaya saya juga bisa mengirim</p>			<p>dengan pencegahan korupsi. Kemudian untuk ke depannya terkait dengan (apa namanya) pendidikan <i>anti</i> korupsi ini tidak hanya di inspektorat, kami juga mengeluarkan mulai tahun kemarin mengeluarkan surat kami tujukan kepada seluruh OPD untuk mengirimkan personil nya guna mengikuti pelatihan atau melalui e-learning nya KPK, tapi memang belum efektif hanya beberapa OPD yang mengirimkan personil nya untuk mengikuti pelatihan tersebut. Nah ini, metode seperti ini besok tahun ini juga akan kita kirimkan lagi kepada seluruh OPD untuk mengikuti pelatihan</p>
--	--	---	--	--	--	--

		<p>personil nya untuk mengikuti pelatihan tersebut. Nah ini, metode seperti ini besok tahun ini juga akan kita kirimkan lagi kepada seluruh OPD untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut melalui e-learning dari KPK gitu termasuk juga inspektorat. Rencananya seluruh auditor disini harus mengikuti e-learning tersebut dengan materi berbeda-beda disesuaikan dengan keinginan mereka gitu. Untuk peningkatan SDM nya begitu, kalau jumlahnya tidak bisa. Jumlahnya ya memang seperti ini, gak bisa menambah dengan seenaknya, gak bisa, hanya peningkatan kualitas</p> <p>Pj : Sebetulnya</p>	<p>peserta. Kendala nya itu saya kurang dapat informasi yang dari luar.</p> <p>Pj : Penyebabnya apa ya, aku itu jarang buka anu ya, buka informasi di web, tapi sebetulnya kekurangan saya itu sudah saya lemparkan ke teman-teman yang muda-muda. Kalau muda-muda kan kalau ada informasi segera informasikan. Kalau ada seminar, tapi khusus seminar terkait yang berhubungan dengan pengawasan, baru bisa mengirimkan peserta</p> <p>Pj : Sebenarnya ada yang saya belum tau bagaimana metode untuk evaluasi yang e-learning lain, tapi kalau yang e-learning KPK itu memang sudah</p>				<p>tersebut melalui e-learning dari KPK gitu termasuk juga inspektorat. Rencananya seluruh auditor disini harus mengikuti e-learning tersebut dengan materi berbeda-beda disesuaikan dengan keinginan mereka gitu. Untuk peningkatan SDM nya begitu, kalau jumlahnya tidak bisa. Jumlahnya ya memang seperti ini, gak bisa menambah dengan seenaknya, gak bisa, hanya peningkatan kualitas</p>
--	--	--	---	--	--	--	--

		<p>kalau fokusnya sih fokus mengikuti diklat ya, tapi kalau untuk mengikuti diklat hanya sedikit sekali kesempatan yang diberikan oleh KPK. KPK itu kebanyakan e-learning melalui online jarang sekali yang melalui diklat. Diklat itu tahun kemarin itu hanya ada satu kesempatan, jadi memang dibuka melalui online. Itu iya</p> <p>Pj : Kalau saya (kalau apa namanya) sementara ini kami baru fokus ya personil yang mengikuti. Karna personil yang mengikuti belum seperti yang kita harapkan kan gitu. Masih sedikit kan gitu. Kalau dampaknya setelah dia mengikuti kemudian dia bagaimana nah itu belum. Belum kami evaluasi.</p>	<p>dibuat runtut, jadi untuk bisa mengikuti e-learning tingkat selanjutnya, harus selesai e-learning yang ini dulu, dan itu ada post test, jadi untuk yang KPK saya yakin. Kalau yang e-learning lain bahkan bisa gak maksimal diikuti, karena ada yang sambil mengerjakan sesuatu ketika e-learning sedang berlangsung. Tapi kadang saya ya menunjuk mereka menjadi pengisi materi sosialisasi, jadi mungkin disitu saya evaluasi keikutsertaan mereka dalam e-learning pengembangan kompetensi</p>				
--	--	---	--	--	--	--	--

Hanya saja teman-teman yang sudah mengikuti itu pada saat kita memang ada undangan untuk melakukan pembinaan kepada OPD, mereka itu termasuk daftar yang perlu kita kirimkan untuk memberikan pembinaan.



الجامعة الإسلامية  
الاستد بالاندو

<p>5 : Ngatiah, S.H.</p>		<p>G Kalau kesempatan sih ini sih semuanya pengen, Cuma karena keterbatasan anggaran jadi gak bisa semua, kayak kemarin yang diklat investigasi cuman dua orang yang dikirim, karena memang biayanya lumayan juga ya sekali diklat kadang sampai lima juta berapa kayak gitu kan, jadi memang yang dikirim gak bisa semuanya, jadi harapannya memang yang dikirim nanti bisa inilah kita kan ada pelatihan kantor sendiri, mungkin disampaikan disitu lah, kalau gak materinya disampaikan ke temen-temen biar semuanya tau juga kayak gitu, selama ini kita seperti itu sih kalau memang gak bisa ikut diklat semua, yang diklat itu</p>		<p>G Kendalanya ya satu itu tadi anggaran ya kedua itu kalau, terutama sih anggaran, kalau yang lain sebenarnya ya mungkin karena ini juga sih banyak karna kami banyak pekerjaan yang mandatory yang dari pusat itu banyak sekali disamping kami punya program pemeriksaan sendiri jadi karna waktu itu jadi kita membagi waktunya juga susah, pinginnya kita berkembang tapi karena surat tugas banyak kadang kita gak ada waktu juga ya untuk seperti itu, untuk mengikuti. Jadi ya itu tadi anggaran sama kita waktunya aja enggak karena kita kan SDMnya juga kurang ya jadi kan kadang pemeriksaannya banyak kita yang sedikit jadi kita memang itu waktunya kurang, kadang gimana ya.</p>			<p>G Kendalanya ya satu itu tadi anggaran ya kedua itu kalau, terutama sih anggaran, kalau yang lain sebenarnya ya mungkin karena ini juga sih banyak karna kami banyak pekerjaan yang mandatory yang dari pusat itu banyak sekali disamping kami punya program pemeriksaan sendiri jadi karna waktu itu jadi kita membagi waktunya juga susah, pinginnya kita berkembang tapi karena surat tugas banyak kadang kita gak ada waktu juga ya untuk seperti itu, untuk mengikuti. Jadi ya itu tadi anggaran sama kita waktunya aja enggak karena kita kan SDMnya juga kurang ya jadi kan kadang pemeriksaannya banyak kita yang sedikit jadi kita memang itu</p>
------------------------------	--	---	--	--	--	--	---

		<p>yang anu temen-temennya lah itu. Kalau diklat kan disini ada diklat sertifikasi, diklat fungsional sendiri sama diklat teknis ya, kalau yang sertifikasi sih karna tuntunan peran jadi memang harus diklat sih seperti itu jadi misalnya kayak auditor itu ada bentuk tim ada ketua tim, ada pengendali teknis ya itu masing-masing kalau naik peran gitu harus diklat memang, harus lulus, harus diklat dan harus lulus seperti itu</p> <p>G Kalau e-learning itu kan anu ya mas ya, biasanya tetap, e-learning itu kan dilaksanakan sebelum diklat, tapi memang pesertanya itu dibatasi juga gak semuanya bisa ikut e-learning, kecuali e-learning yang memang gak ada pembatasan peserta, itu baru,</p>		<p>Misalnya kemarin kita satu tim itu Cuma tiga orang aja dapat berapa OPD kayak gitu jadi tadi keterbatasan waktu sama anggaran itu yang kendalanya, padahal kita udah juga lembur-lembur juga sih kalau di rumah kayak gitu, tapi karna banyak pekerjaan. Kalau di Inspektorat kabupaten kan seperti itu mas, jadi kan memang ada tugas-tugas mandatory yang banyak sekali dari KPK lah dari Kementrian Dalam Negeri dari Menpan mana mana kayak gitu disamping kita punya program sendiri yang harus dilaksanakan kalau di BPK sama BPKP kan enggak ya karena mereka gak ada mandatory ya, jadi beda ya APIP nya sini sama APIP nya BPKP lah seperti itu kita, hampir disetiap inspektorat sih</p>		<p>waktunya kurang, kadang gimana ya. Misalnya kemarin kita satu tim itu Cuma tiga orang aja dapat berapa OPD kayak gitu jadi tadi keterbatasan waktu sama anggaran itu yang kendalanya, padahal kita udah juga lembur-lembur juga sih kalau di rumah kayak gitu, tapi karna banyak pekerjaan. Kalau di Inspektorat kabupaten kan seperti itu mas, jadi kan memang ada tugas-tugas mandatory yang banyak sekali dari KPK lah dari Kementrian Dalam Negeri dari Menpan mana mana kayak gitu disamping kita punya program sendiri yang harus dilaksanakan kalau di BPK sama BPKP kan enggak ya karena mereka gak ada mandatory ya,</p>
--	--	---	--	---	--	--

		<p>baru semuanya bisa, kalau enggak kayak gitu, tetap personil yang ditunjuk aja yang bisa ikut</p>		<p>kendalanya sama seperti itu SDM nya sedikit pekerjaannya banyak nggih, padahal kalau kayak di kami itu misalnya ada pegawai harian lepas gitu aja kan gak bisa masuk ke auditor ya karena memang banyak hal-hal yang gak bisa diketahui banyak orang. Jadi memang kalau di OPD lain kan banyak tu PHL PHL jadi pekerjaannya dibantu kayak gitu, sekarang kan ini ya penerimaan pegawai juga sedikit juga ya, terus jadi kan terbatas padahal objek pemeriksaannya sama yang dulu itu lebih banyak, pekerjaannya lebih banyak dengan SDM yang sedikit gitu kan jadi kita kadang gak mampu</p> <p>G Hm em kemampuan SDMnya, ya itu kita itu bingung bagi waktunya bingung gitu ya</p>		<p>jadi beda ya APIP nya sini sama APIP nya BPKP lah seperti itu kita, hampir disetiap inspektorat sih kendalanya sama seperti itu SDM nya sedikit pekerjaannya banyak nggih, padahal kalau kayak di kami itu misalnya ada pegawai harian lepas gitu aja kan gak bisa masuk ke auditor ya karena memang banyak hal-hal yang gak bisa diketahui banyak orang. Jadi memang kalau di OPD lain kan banyak tu PHL PHL jadi pekerjaannya dibantu kayak gitu, sekarang kan ini ya penerimaan pegawai juga sedikit juga ya, terus jadi kan terbatas padahal objek pemeriksaannya sama yang dulu itu lebih banyak, pekerjaannya lebih banyak dengan SDM</p>
--	--	---	--	--	--	--



			<p>disamping kita dituntut pekerjaannya juga selesai tepat waktu, hasilnya maksimal kita juga pengembangan kompetensinya juga harus ini juga kayak gitu kan, kadang kita ya itu tadi karna banyaknya pekerjaan kadang kita gak bisa jalan dua-duanya, mengalahkan salah satu ya</p> <p>G Kalau ini sih mas, kalau kita kan surat tugas dari sini ya dari bu puji ini ya sekretaris yang buat surat tugas dalam beberapa hari kayak gitu, tapi nani kita gak bisa terpatok jangka waktu disurat tugasnya ya karna kita memang lihat kondisi objek pemeriksaannya juga, kadang kita sampai lewat waktu dari situ, tapi memang modelnya sih sesuai surat tugas, <i>nanti</i> laporan cukup selesai, tapi</p>		<p>yang sedikit gitu kan jadi kita kadang gak mampu</p> <p>G Kalau e-learning itu kan anu ya mas ya, biasanya tetap, e-learning itu kan dilaksanakan sebelum diklat, tapi memang pesertanya itu dibatasi juga gak semuanya bisa ikut e-learning, kecuali e-learning yang memang gak ada pembatasan peserta, itu baru, baru semuanya bisa, kalau enggak kayak gitu, tetap personil yang ditunjuk aja yang bisa ikut</p>
--	--	--	---	--	--

				<p>karena banyak hal banyak kendala seperti itu nggih, kadang kami telat juga sih buat laporan seperti itu. Kalau dari ketua tim sih alokasi waktunya sama dengan yang di surat tugas itu. Kalau disini kan waktu pemeriksaan Cuma 10 hari, padahal 10 hari itu kan kita belum dapat jatah apa-apa, terutama kalau di kelurahan ya</p>		
--	--	--	--	--	--	--

الجمعة الإسلامية الاندونيسية

6 : Pipit Tyas  
Ratna  
Puspita, S.H.,  
MPA.

P : Kalau saya gak bisa bicara secara general ya, saya bicaranya berarti. Inikan misalnya dibaca berarti tantangannya kantor mengelola saya, karna saya termasuk SDM, sdm yang dimaksud disini kan. Ya mungkin kalau saya yang jawab saya mungkin subjektif. Kalau saya pribadi saya merasa memang karna volume pekerjaan yang sangat banyak, jadi sering kali itu, ini pribadi ya jadi tidak bisa dipukul rata dengan yang lain. Saya kurang fokus, karna sebenarnya untuk pemeriksaan yang membutuhkan konsentrasi tersendiri kayak investigasi atau pkkn itu tu memang apa ya memang dibutuhkan konsentrasi dan kefokusan. Cuma kan kalau disini kan kami tidak bisa terus kalau

P : Digital forensik audit untuk audit investigasi, itu mungkin maksudnya, kalau secara umum kami mengikuti perkembangan teknologi itu juga sangat apa ya tertatih tatih, karna apa ya, sdm kami kan banyak yang muda tapi banyak juga yang sudah senior, jadi saya aja usia segini tapi untuk mengikuti perkembangan jaman yang terlalu cepat itu saya juga kadang-kadang gak bisa basenya gak bisa secepat mengikuti anak-anak muda sih. Dan disini lebih banyak yang senior daripada yang muda.

				<p>dapat surat tugas ini, ini aja yang dikerjain, kan gak bisa karna memang satu kekurangan orang dua memang volume pekerjaan entah mandatori entah yang program kerja sendiri sangat banyak, jadi mungkin tantangan utamanya ya itu sih karna volume pekerjaannya yang banyak, jadi mungkin kalau saya pribadi itu saya gak fokus, dan ketika sesuatu yang dikerjakan tidak dengan fokus kan saya juga tidak maksimal seperti yang diharapkan.</p> <p>P : Kalau ini berarti kelemahan dan kekurangan kami sebagai auditor, mungkin ini kalau pribadi bisa lagi-lagi jawabnya secara subjektif menilai diri sendiri ya, kalau ini ya satu yang itu tadi bu heri bilang, karna perkembangannya</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>cepat, kadang-kadang apa kami selaku auditor juga harus mengikuti tapi apa secara waktu entah secara tenaga itu kami kurang, jadinya mungkin apa istilahnya kalau istilahnya tertatih-tatih mengikutinya ketika perkembangannya terlalu cepat, tapi kami dituntut dengan, kan kami tidak fokus ya jadi misalnya kami ngerjain ini ngerjain itu aja itu enggak. Jadi ya kami ngerjain ini, ya apa <i>nanti</i> kpk <i>nanti</i> minta kita juga mengerjakan <i>nanti</i> irbad minta apa kita juga mengerjakan, jadi mungkin kendalanya itu disitu terus, jadi ketika ada penugasan karna penugasan volumenya sangat banyak jadi mungkin jadi kurang fokus, karna satu waktu dan dua kapasitas saya pribadi</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>selaku auditor itu kan untuk mempelajari banyak hal dalam waktu yang bersamaan itu bisa, mungkin tidak maksimal, Cuma separuh-separuh dulu, yaitu tertatih-tatih sih ketika mengikuti tuntutan, mandatori, dan mengikuti perkembangan. Aturan kan berubah cepat banget nggih, jadi kadang-kadang kami baru mau diterapkan baru mau belajar, baru mau menguasai, itu seperti itu juga jadi kendala, saya pribadi merasakannya seperti itu selaku SDM yang dimaksud disini.</p>		
--	--	--	--	--	--	--

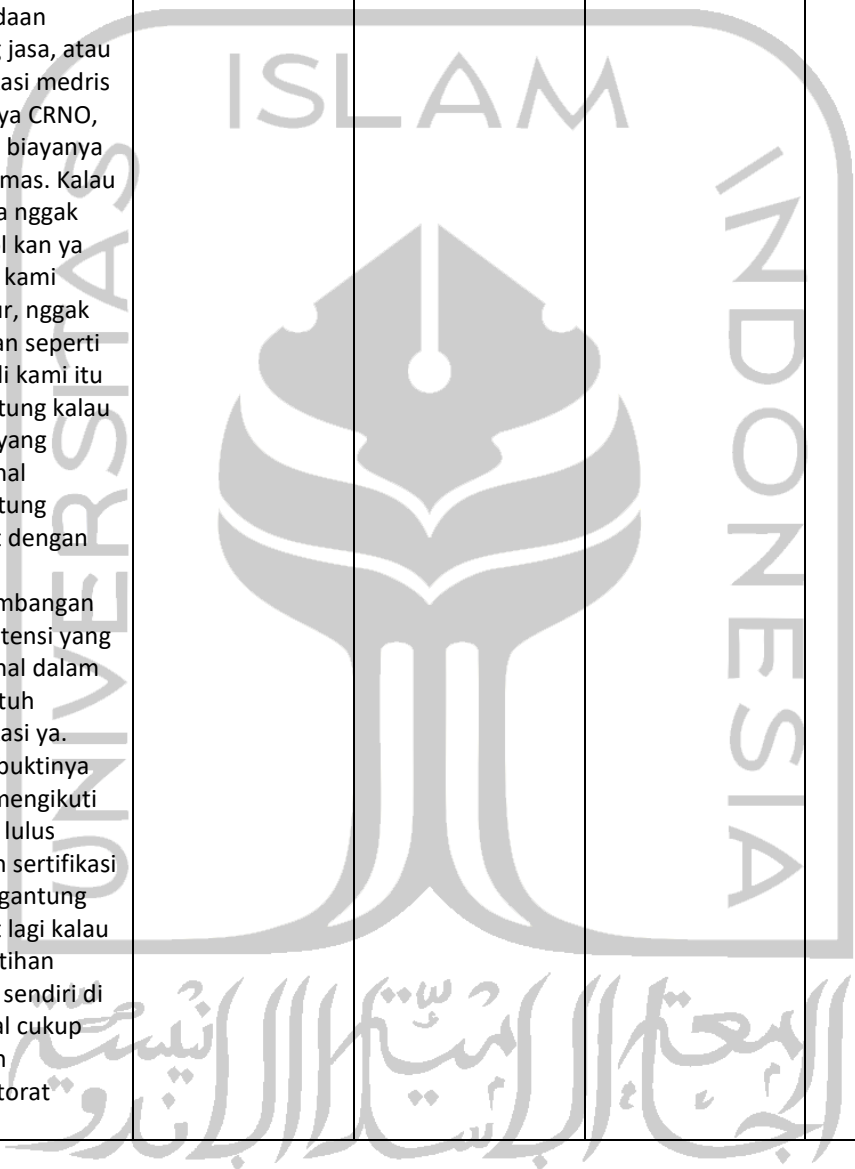
الجمعة الإسلامية الاندونيسية

<p>7 : Retno Isni Satiti</p>		<p>Rno Jadi, karena keterbatasan. Jadi, karena pengembangan kompetensi itu kan anggaran tidak melekat di inspektorat, ya. Tidak semua melekat di inspektorat, khususnya untuk yang kalau PKS, pelatihan di kantor sendiri yang dilaksanakan internal memang ada di kami anggarannya tapi ketika itu kami harus misalnya menjadi seorang penyuluh itu kan harus diklat di KPK kalau kami mau katakanlah mau seseorang jadi BPK itu kan juga harus diklatnya di luar bukan di internal kita, inspektorat penyelenggara nya, mesti pihak luar. Nah sekarang kalau badan kepegawaian nya daerah itu, itu kan mengurus 48 SKPD, mengurus 46</p>		<p>Rno Mas, kalau menghambat itu di semua lini, iya saya jawab iya, karena apa, yang namanya surat tugas bertubi-tubi semua, apalagi ada SOP, semua laporan harus selesai dalam satu bulan setelah pemeriksaan di lapangan dengan tim yang berbeda, itu jelas akan terhambat tapi bagaimana pinter-pinternya si auditor itu sendiri untuk membagi waktu bahkan kayak saya itu, saya rasa gak cuma saya ya temen-temen itu sampai rumah memang jam kerja kita sampai jam setengah 4 tapi di rumah, kadang saya sampai jam 12 malam itu masih ngoreksi LHP-nya punya ketua tim saya harus ngisi, bahkan yang berkaitan dengan ekin saya ngisinya di rumah kenapa, gak sempat di sini, tapi juga melihat</p>			
------------------------------	--	--	--	---	--	--	--

		<p>dinas kalau sekarang dulu 48, sekarang 46, karena ada regulasi di RSUD yang menggabung di dinas kesehatan kami Sleman, punya 2 RSUD, dulu merupakan yang berdiri sendiri, sekarang di bawahnya Dinas Kesehatan menjadi 46. Setiap OPD butuh pengembangan khusus masing-masing dinas teknisnya, dan itu anggarannya diambil dari BKPP. Kalau saya bicara BKPP, tolong diartikan itu Badan Kepegawaian Daerah ya. BKPP. Nah, ketergantungan ini mereka kan harus membagi anggaran yang di sana untuk seluruh dinas yang ada di Kabupaten Sleman termasuk inspektorat. Kalau kami harusnya</p>		<p>sikon di rumah artinya gak mengorbankan, <i>nanti</i> suami kita butuh ini, oh sebentar saya lagi kerja enggak <i>nanti</i> kita bisa dimarahi para suami kita, dimarahi suami atau dimarahi anak Anaknya butuh bimbingan. Oh sebentar ibu lagi ngoreksi. Nggak bisa seperti itu.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--



		<p>mengikuti sertifikasi, katakanlah sertifikasi pengadaan barang jasa, atau sertifikasi medris misalnya CRNO, itu kan biayanya mahal mas. Kalau mereka nggak mengol kan ya sudah, kami mundur, nggak jadi. Kan seperti itu. Jadi kami itu tergantung kalau untuk yang eksternal tergantung banget dengan BKPP. Pengembangan kompetensi yang eksternal dalam arti butuh sertifikasi ya. Harus buktinya <i>nanti</i> mengikuti ini kita lulus dengan sertifikasi itu bergantung banget lagi kalau di pelatihan kantor sendiri di internal cukup dengan inspektorat</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--



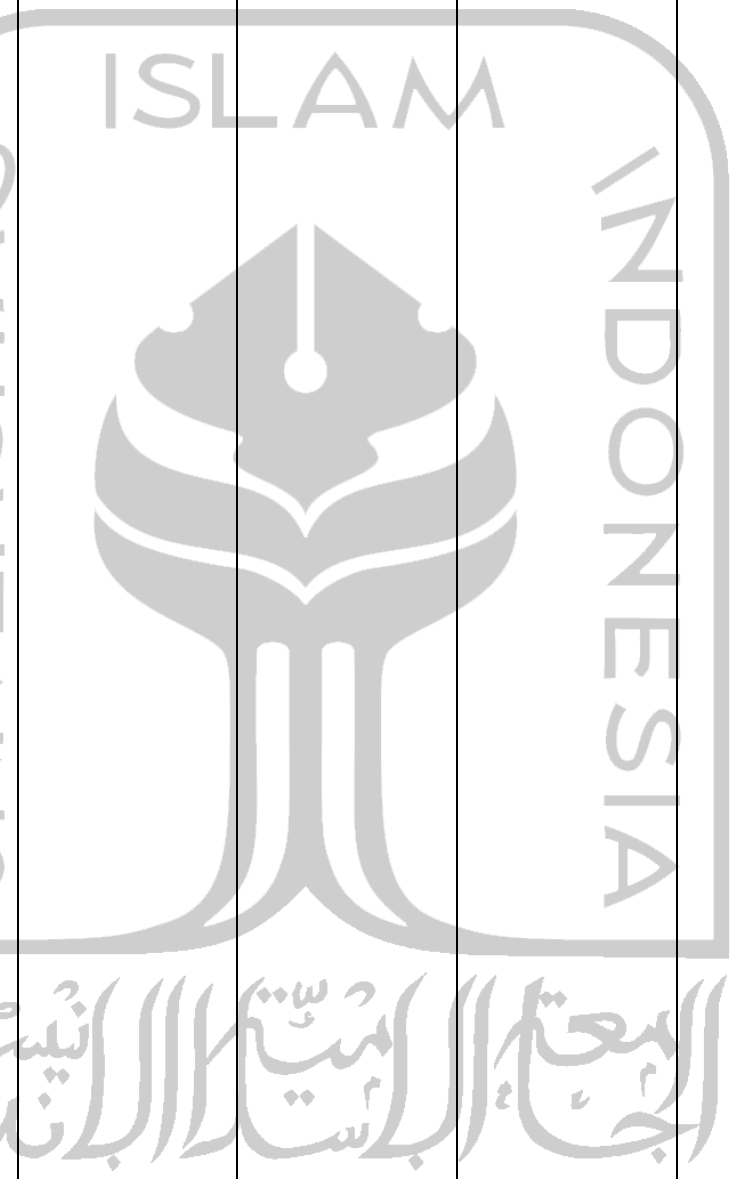
Narasumber	M : 4. Volume pekerjaan yang banyak	N : 3. Belum maksimal menggunakan media	O : 6. Kompetensi digital forensik masih kurang	P : 2. Anggaran diklat tidak dipegang sendiri	Q : 5. Waktu penyelesaian tugas yang singkat dengan pekerjaan yang banyak
1 : Heri Setyawati, S.E., M.Acc.			<p>H : Kalau tantangannya kan sekarang era digital itu yang lebih banyak apa kita juga tidak bisa tutup mata dengan perkembangan jaman, sekarang era digital yang sementara ini kan banyak yang kita laksanakan itu masih yang sistemnya manual, sehingga perlu pengetahuan tentang yang ini forensik audit, terus sekarang yang pakai digital-digital itu kan kita masih lemah audit tentang itu.</p> <p>H : Yang tadi masalah forensik audit mas.</p>		
2 : Hery Dwi Kuryanto, S.H., M.Hum.					

<p>3 : Ika Sulistyio Devi</p>	<p>I Apa ya? Karena saya tuh sekarang lebih banyak di sekretariat ya, jadi gak begitu begitu paham dengan yang di auditor kalau saya melihatnya itu karena penumpukan surat tugas jadi teman-teman itu gak bisa benar-bener fokus di satu penugasan gitu misalnya penugasan di OPD ini misalnya gitu <i>nanti</i> di pertengahan penugasan ini mereka dapat tugas mandatory dari pusat. Harus melakukan review apa, review apa, jadi kan gak fokus untuk satu penugasan.</p> <p>I Kendalanya karena banyak ketugasan di kami, Jadi kalau misalnya harus satu auditor itu misalnya 2 bulan sekali harus mengikuti diklat gitu, waktunya ya nggak ada.</p>	<p>I Ada. Terutama mungkin yang usianya juga sudah di atas 50 gitu kan, kadang pemahamannya kan untuk IT-nya kan kurang ya. Itu ya pelatihan kantor sendiri tentang IT dengan kominfo, kemudian <i>nanti</i> teman-teman auditor yang masih fresh, masih muda-muda itu diberdayakan. Misalnya yang pengendali teknisnya sudah usianya sudah 50 ke atas itu <i>nanti</i> kan tetap dia hanya managerial <i>nanti</i> yang teknisnya kan yang anggota yang masih muda-muda</p>	<p>I Oh iya, support dari anggaran sudah kita anggarkan untuk PKS maupun Diklat di luar ya tapi sayangnya kalau Diklat di luar itu kan anggaran inspektorat itu jadi satu di badan kepegawaian untuk diklat itu, bukan di inspektorat sendiri. Jadi <i>nanti</i> diklat di sana misalkan katakanlah 100 juta, itu untuk ASN, Kabupaten Sleman keseluruhan. Jadi modelnya cepet-cepetan gitu loh mas, yang mengajukan anggaran siapa gitu. Kalau dari luar itu sebenarnya banyak sih, diklat yang bisa kita ikuti hanya waktunya aja kita yang kadang nggak bisa karena berbenturan sama surat tugas. Surat tugas kan</p>	<p>I Selama ini kayaknya enggak. Kayaknya dari jadwal itu mereka ditunjuk siapa, siapa gitu. Karena waktunya nggak sempat mereka untuk nyari-nyari diklat, untuk melakukan pemeriksaan aja kurang waktunya.</p> <p>I Kendalanya karena banyak ketugasan di kami, Jadi kalau misalnya harus satu auditor itu misalnya 2 bulan sekali harus mengikuti diklat gitu, waktunya ya nggak ada.</p> <p>I Keinginan mereka besar Ya, Anu ya, Mereka kan meningkatkan kompetensi untuk pekerjaan mereka juga. Mereka harus bisa mengaudit ini, mengaudit itu. Kan Harus pengembangan terus sesuai dengan</p>
-------------------------------	--	--	--	--

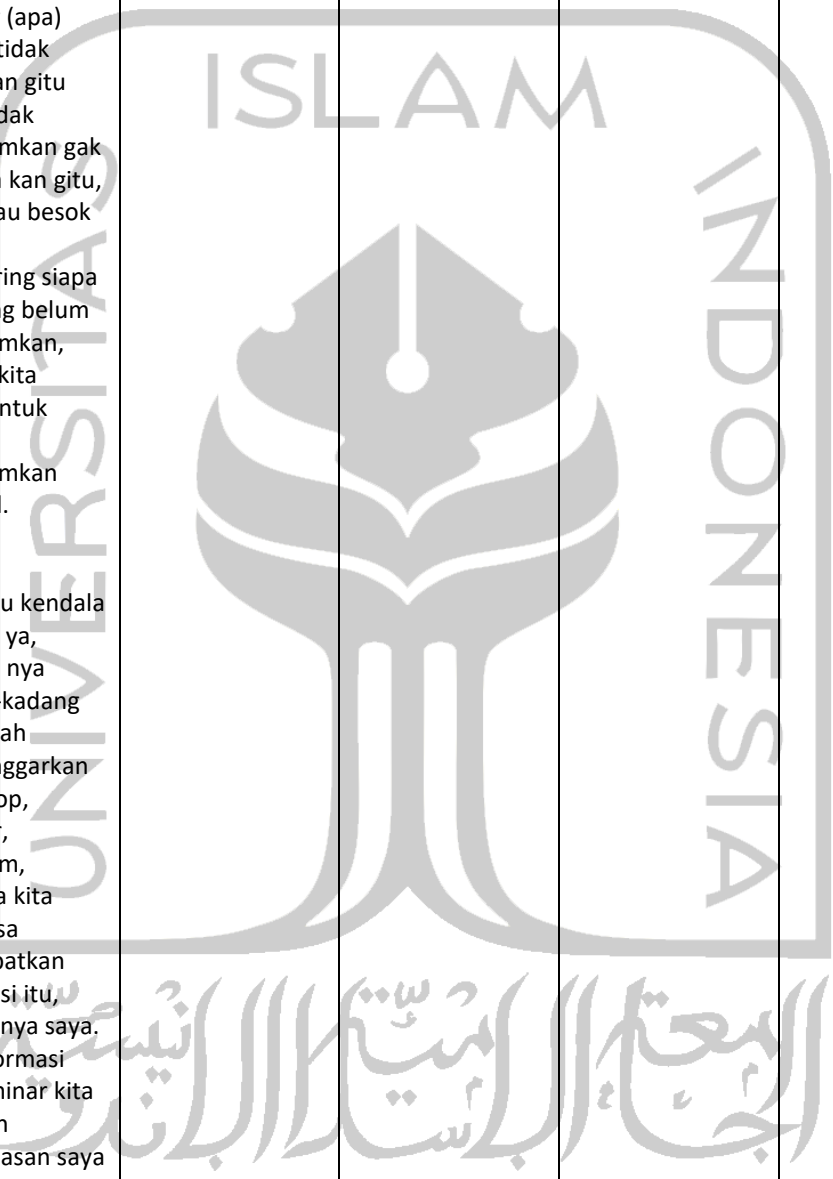
	<p>I Sebenarnya itu program kegiatan kita itu sudah mandatory semua. Jadi dari pusat. Iya, hampir semua itu adalah mandatori dari pusat, jadi nggak bisa dikurangi. Kita juga harus mereview kegiatan dari pusat, harus kita review <i>nanti</i> agar dana itu bisa cair. Sedangkan kami kan juga harus mengawal program kerjanya Bupati. Jadi ya... Ya dilema.</p>			<p>penugasan disini juga banyak.</p>	<p>perkembangan zaman. Misalnya Misalnya teknologi, mereka juga harus ikut audit TI, IT gitu. Tapi ya itu tadi terkendala waktu. Kalau mereka berangkat diklat lama, <i>nanti</i> ketugasan di kantor pasti tertunda. Kalau nggak ikut diklat, <i>nanti</i> kompetensi mereka juga nggak akan ter-upgrade.</p>
--	---	--	--	--------------------------------------	--

الجمعة الإسلامية الاندونيسية

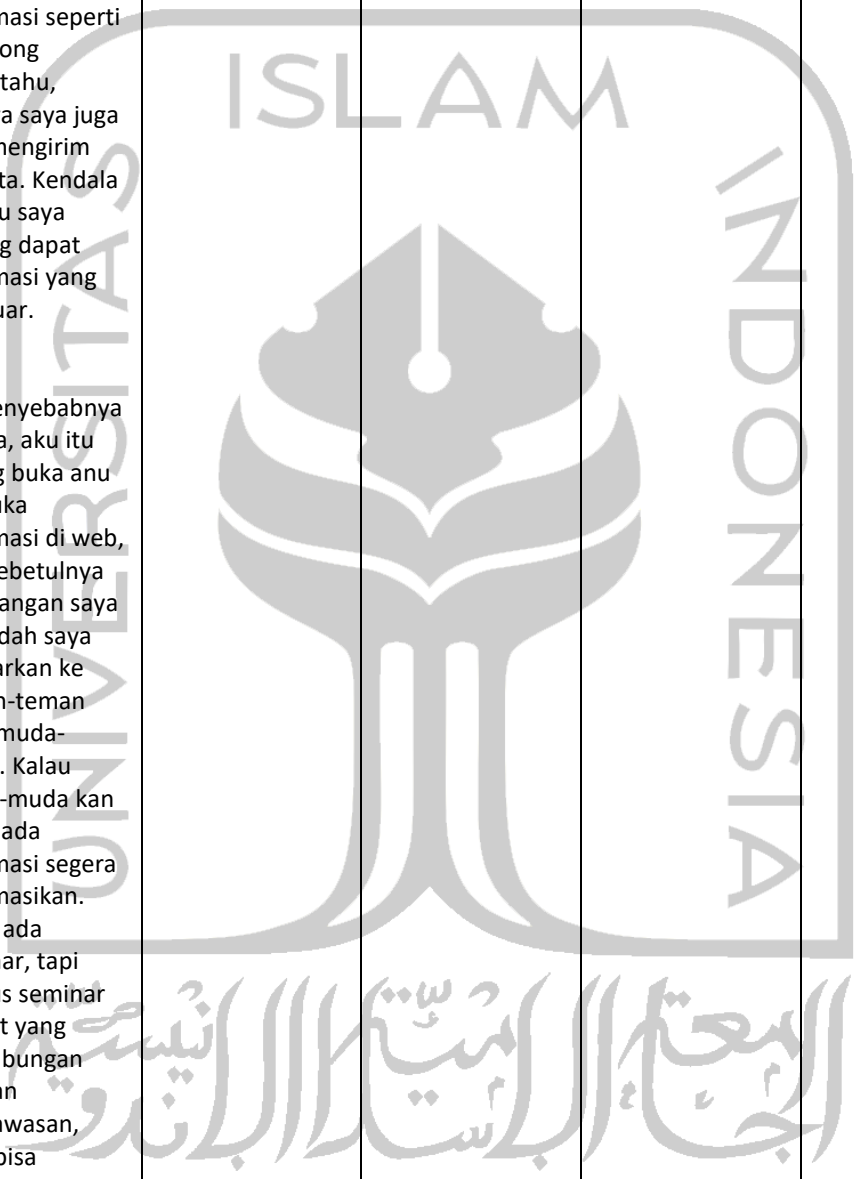
<p>4 : Ir. Sri Puji Lestari</p>		<p>Pj : Iya, kan itu pendaftaran e-learning KPK kan melalui inspektorat ya, jadi dari OPD mengirimkan nama ke kita, kita daftarkan ke KPK, kemudian dari KPK nanti mendapatkan notifikasi untuk pelatihan ini maka pelatihan ini nanti akan dibuka tanggal berapa tanggal berapa. Nah pada saat tanggalnya tersebut kita sampaikan kepada yang bersangkutan, mungkin yang bersangkutan lupa ya, nah kita juga tidak mengecek yang bersangkutan tanggal segini harusnya mengikuti e-learning gitu lo, nah itu satu menjadi catatan juga, terus yang kedua kita belum memberi peringatan pada OPD-OPD yang belum</p>			
---------------------------------	--	--	--	--	--



		<p>mengirimkan personil nya gitu, itu tidak efektifnya. Jadi sekedar (apa) karena tidak wajib kan gitu maka tidak mengirimkan gak apa-apa kan gitu, tapi kalau besok ya kita monitoring siapa opd yang belum mengirimkan, nah itu kita minta untuk segera mengirimkan personil.</p> <p>Pj : Kalau kendala nya apa ya, kendala nya kadang-kadang kita sudah menganggarkan workshop, seminar, mengirim, ternyata kita tidak bisa mendapatkan informasi itu, maksudnya saya. Jadi informasi ada seminar kita kirimkan pengawasan saya gak diberitahukan</p>			
--	--	--	--	--	--



	<p>Pj : Padahal juga saya sebarkan ke teman-teman kalau ada informasi seperti ini tolong diberitahu, supaya saya juga bisa mengirim peserta. Kendalanya itu saya kurang dapat informasi yang dari luar.</p> <p>Pj : Penyebabnya apa ya, aku itu jarang buka anu ya, buka informasi di web, tapi sebetulnya kekurangan saya itu sudah saya lemparkan ke teman-teman yang muda-muda. Kalau muda-muda kan kalau ada informasi segera informasikan. Kalau ada seminar, tapi khusus seminar terkait yang berhubungan dengan pengawasan, baru bisa mengirimkan peserta</p>			
--	--	--	--	--



<p>5 : Ngatiah, S.H.</p>	<p>G Kendalanya ya satu itu tadi anggaran ya kedua itu kalau, terutama sih anggaran, kalau yang lain sebenarnya ya mungkin karena ini juga sih banyak karna kami banyak pekerjaan yang mandatory yang dari pusat itu banyak sekali disamping kami punya program pemeriksaan sendiri jadi karna waktu itu jadi kita membagi waktunya juga susah, pinginnya kita berkembang tapi karena surat tugas banyak kadang kita gak ada waktu juga ya untuk seperti itu, untuk mengikuti. Jadi ya itu tadi anggaran sama kita waktunya aja enggih karena kita kan SDMnya juga kurang ya jadi kan kadang pemeriksaannya banyak kita yang sedikit jadi kita memang itu waktunya kurang, kadang gimana ya.</p>		<p>Rz Untuk pelatihan itu sendiri belum banyak bu atau baru mau berjalan? G Kalau disini sih belum ada yang ikut sih karna memang belum lama ya itu</p>	<p>G Kalau itu sih kalau misalkan diklat itu memang keterbatasan ini juga sih anggaran, karna anggarannya itu kan masih dipegang bkpp ya kepegawaian pemda ya, gak di inspektorat sendiri, jadi disana itu kan hanya ada anggaran untuk struktural sama fungsional ya, fungsional itu auditor masuk ke anggaran diklatnya fungsional ya, ke anggaran fungsional, padahal anggaran fungsional di pemda itu kan banyak ya. Karena keterbatasan anggaran ya kami datang diklatnya jadi cuman sedikit itu. Sebenarnya sih kalau pada diklat itu seneng juga sih karena kok jadi lebih pintar lah ya cuman</p>	<p>G Kalau aku sih ya itu tadi ya, kalau kayak kayak kami di auditor itu kan memang kayaknya seperti garda terdepan dalam pencegahan <i>fraud</i>, dalam penindakan dalam apa itu loh, jadi memang harus banyak diini sih SDMnya itu banyak ditingkatkan, jadi misalnya dengan diklat dengan apa itu tadi makanya kayak sebenarnya sih sudah ada ya kayak mcb KPK itu yang menyarankan kalau inspektorat itu anggarannya itu paling enggak 0,5 dari APBD,, tapi karna standar harga disini itu kecil kita gak bisa buat kegiatan yang bisa menyerap anggaran seperti itu, terus anggaran itu juga terbatas hanya untuk poin-poin yang di boleh</p>
------------------------------	--	--	---	---	--



	<p>Misalnya kemarin kita satu tim itu Cuma tiga orang aja dapat berapa OPD kayak gitu jadi tadi keterbatasan waktu sama anggaran itu yang kendalanya, padahal kita udah juga lembur-lembur juga sih kalau di rumah kayak gitu, tapi karna banyak pekerjaan. Kalau di Inspektorat kabupaten kan seperti itu mas, jadi kan memang ada tugas-tugas mandatory yang banyak sekali dari KPK lah dari Kementrian Dalam Negeri dari Menpan mana mana kayak gitu disamping kita punya program sendiri yang harus dilaksanakan kalau di BPK sama BPKP kan enggak ya karena mereka gak ada mandatory ya, jadi beda ya APIP nya sini sama APIP nya BPKP lah seperti itu kita, hampir disetiap inspektorat sih</p>			<p>karena keterbatasan itu jadi ya. Kan fungsionalnya ada pustakawan ada pertanian ada apa itu kan jadi satu semua anggarannya jadi gak bisa kami terus minta banyak kayak gitu karena dibagi-bagi sama yang lain ya, kalau enak sih anggaran diklat seperti itu di kami sendiri, kantor kami sendiri kayak gitu enak, jadi lebih ini sih orangnya jadi lebih kayak di gunung kidul lah satu itu auditor itu dijatah minimal satu kali diklat kayak gitu, kami gak bisa sih, karna memang keterbatasan anggaran itu, semuanya masih menjadi satu disana, jadi kita gak bisa memploting anggarannya besar misalnya khusus inspektorat kayak gitu. Tapi</p>	<p>APBD ya di jumlah APBD nya kalau diluar itu kan gak boleh padahal kita memang sebenarnya banyak sekali ini sih butuh anggaran yang salah satunya untuk pengembangan kompetensi itu, jadi kekurangannya ya menambah-nambah anggaran itu tadi ya, penambahan sarprasnya juga, kayak sekarang itu sarprasnya memang kurang sekali sih tak akui maksudnya kalau kayak kita lebih ini kan lebih enak gitu loh jadi kita dalam melangkah itu kan enak sarprasnya terpenuhi apa disini kayak mobil aja kan ya kurang gitu loh operasional gitu kan, jadi kalau bisa itu sih</p> <p>G Hm em kemampuan</p>
--	---	--	--	---	--

	<p>kendalanya sama seperti itu SDM nya sedikit pekerjaannya banyak nggih, padahal kalau kayak di kami itu misalnya ada pegawai harian lepas gitu aja kan gak bisa masuk ke auditor ya karena memang banyak hal-hal yang gak bisa diketahui banyak orang. Jadi memang kalau di OPD lain kan banyak tu PHL PHL jadi pekerjaannya dibantu kayak gitu, sekarang kan ini ya penerimaan pegawai juga sedikit juga ya, terus jadi kan terbatas padahal objek pemeriksaannya sama yang dulu itu lebih banyak, pekerjaannya lebih banyak dengan SDM yang sedikit gitu kan jadi kita kadang gak mampu</p> <p>G Kalau aku sih ya itu tadi ya, kalau kayak kayak kami di auditor itu kan memang kayaknya seperti garda</p>			<p>kalau kayak yang webinar yang gratis-gratis kita selalu ikut, kan seneng toh pengetahuan kita tambah gak pakai anggaran gitu kan, maka kan antusiasnya disitu</p> <p>G Kendalanya ya satu itu tadi anggaran ya kedua itu kalau, terutama sih anggaran, kalau yang lain sebenarnya ya mungkin karena ini juga sih banyak karna kami banyak pekerjaan yang mandatory yang dari pusat itu banyak sekali disamping kami punya program pemeriksaan sendiri jadi karna waktu itu jadi kita membagi waktunya juga susah, pinginnya kita berkembang tapi karena surat tugas banyak kadang kita gak ada waktu juga ya untuk seperti itu, untuk mengikuti. Jadi</p>	<p>SDMnya, ya itu kita itu bingung bagi waktunya bingung gitu ya disamping kita dituntut pekerjaannya juga selesai tepat waktu, hasilnya maksimal kita juga pengembangan kompetensinya juga harus ini juga kayak gitu kan, kadang kita ya itu tadi karna banyaknya pekerjaan kadang kita gak bisa jalan dua-duanya, mengalahkan salah satu ya</p> <p>G Kalau ini sih mas, kalau kita kan surat tugas dari sini ya dari bu puji ini ya sekretaris yang buat surat tugas dalam beberapa hari kayak gitu, tapi nani kita gak bisa terpatok jangka waktu disurat tugasnya ya karna kita memang lihat kondisi objek pemeriksaannya juga, kadang kita</p>
--	--	--	--	--	---

	<p>terdepan dalam pencegahan <i>fraud</i>, dalam penindakan dalam apa itu loh, jadi memang harus banyak diini sih SDMnya itu banyak ditingkatkan, jadi misalnya dengan diklat dengan apa itu tadi makanya kayak sebenarnya sih sudah ada ya kayak mcb KPK itu yang menyarankan kalau inspektorat itu anggarannya itu paling enggak 0,5 dari APBD,, tapi karna standar harga disini itu kecil kita gak bisa buat kegiatan yang bisa menyerap anggaran seperti itu, terus anggaran itu juga terbatas hanya untuk poin-poin yang di boleh APBD ya di jumlah APBD nya kalau diluar itu kan gak boleh padahal kita memang sebenarnya banyak sekali ini sih butuh anggaran yang salah satunya</p>			<p>ya itu tadi anggaran sama kita waktunya aja enggak karena kita kan SDMnya juga kurang ya jadi kan kadang pemeriksaannya banyak kita yang sedikit jadi kita memang itu waktunya kurang, kadang gimana ya. Misalnya kemarin kita satu tim itu Cuma tiga orang aja dapat berapa OPD kayak gitu jadi tadi keterbatasan waktu sama anggaran itu yang kendalanya, padahal kita udah juga lembur-lembur juga sih kalau di rumah kayak gitu, tapi karna banyak pekerjaan. Kalau di Inspektorat kabupaten kan seperti itu mas, jadi kan memang ada tugas-tugas mandatory yang banyak sekali dari KPK lah dari Kementrian Dalam Negeri dari Menpan mana mana</p>	<p>sampai lewat waktu dari situ, tapi memang modelnya sih sesuai surat tugas, <i>nanti</i> laporan cukup selesai, tapi karena banyak hal banyak kendala seperti itu nggih, kadang kami telat juga sih buat laporan seperti itu. Kalau dari ketua tim sih alokasi waktunya sama dengan yang di surat tugas itu. Kalau disini kan waktu pemeriksaan Cuma 10 hari, padahal 10 hari itu kan kita belum dapat jatah apa-apa, terutama kalau di kelurahan ya</p> <p>G Itu kalau di bpk itu, bpkp itu 3 bulan satu bulan untuk satu objek pemeriksaan, kalau di kita satu bulan itu kadang tiga surat tugas, tiga obrik, tiga hal yang beda, kita aja bagi fokusnya itu agak bingung, dan di daerah seperti</p>
--	---	--	--	---	--

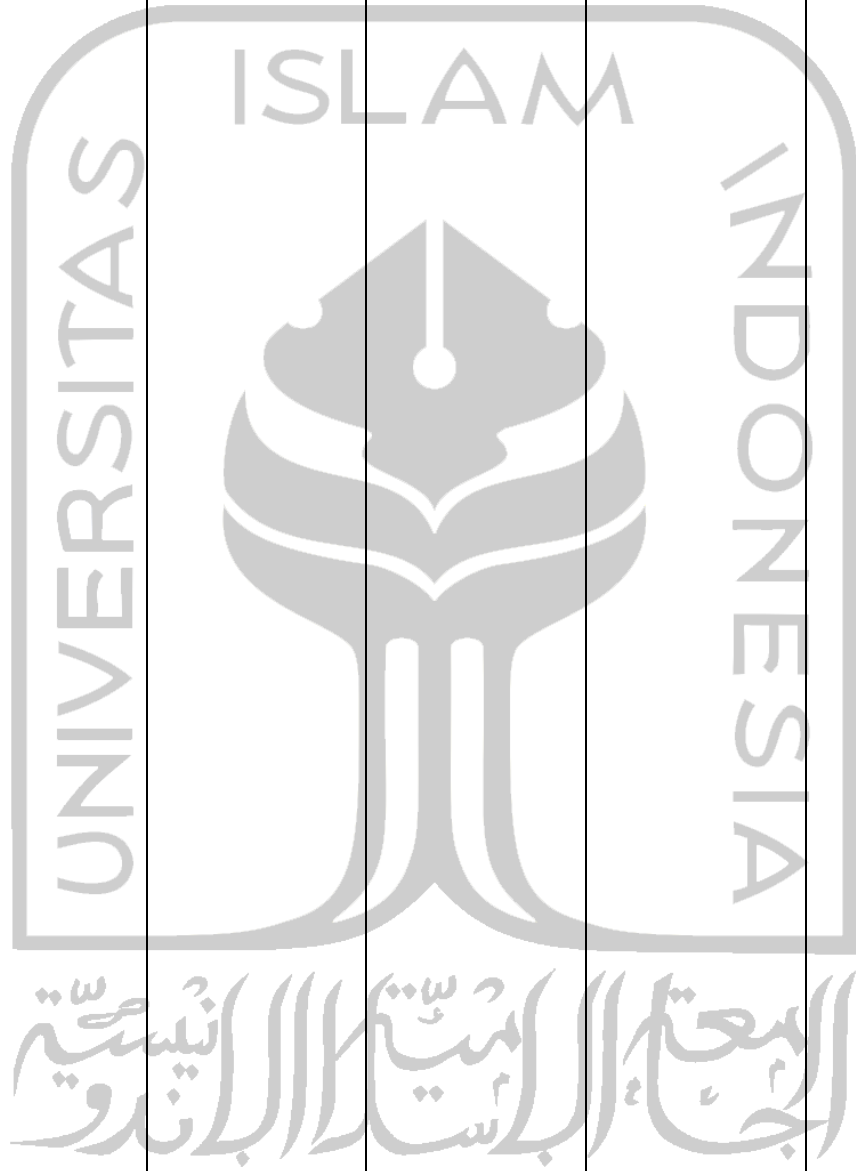
	<p>untuk pengembangan kompetensi itu, jadi kekurangannya ya menambah-nambah anggaran itu tadi ya, penambahan sarprasnya juga, kayak sekarang itu sarprasnya memang kurang sekali sih tak akui maksudnya kalau kayak kita lebih enak lebih enak gitu loh jadi kita dalam melangkah itu kan enak sarprasnya terpenuhi apa disini kayak mobil aja kan ya kurang gitu loh operasional gitu kan, jadi kalau bisa itu sih</p>			<p>kayak gitu disamping kita punya program sendiri yang harus dilaksanakan kalau di BPK sama BPKP kan enggak ya karena mereka gak ada mandatory ya, jadi beda ya APIP nya sini sama APIP nya BPKP lah seperti itu kita, hampir disetiap inspektorat sih kendalanya sama seperti itu SDM nya sedikit pekerjaannya banyak nggih, padahal kalau kayak di kami itu misalnya ada pegawai harian lepas gitu aja kan gak bisa masuk ke auditor ya karena memang banyak hal-hal yang gak bisa diketahui banyak orang. Jadi memang kalau di OPD lain kan banyak tu PHL PHL jadi pekerjaannya dibantu kayak gitu, sekarang kan ini ya penerimaan</p>	<p>itu sih, di inspektorat manapun kendalanya seperti itu sama, misalnya ya dari kita kelurahan, dari kita udah pindah ke puskesmas itu beda banget ya, dua hal yang beda banget ya</p>
--	---	--	--	--	---

				<p>pegawai juga sedikit juga ya, terus jadi kan terbatas padahal objek pemeriksaannya sama yang dulu itu lebih banyak, pekerjaannya lebih banyak dengan SDM yang sedikit gitu kan jadi kita kadang gak mampu</p> <p>G Kalau kesempatan sih ini sih semuanya pengen, Cuma karena keterbatasan anggaran jadi gak bisa semua, kayak kemarin yang diklat investigasi cuman dua orang yang dikirim, karena memang biayanya lumayan juga ya sekali diklat kadang sampai lima juta berapa kayak gitu kan, jadi memang yang dikirim gak bisa semuanya, jadi harapannya memang yang dikirim <i>nanti</i> bisa inilah kita kan ada pelatihan</p>	
--	--	--	--	--	--


				<p>kantor sendiri, mungkin disampaikan disitu lah, kalau gak materinya disampaikan ke temen-temen biar semuanya tau juga kayak gitu, selama ini kita seperti itu sih kalau memang gak bisa ikut diklat semua, yang diklat itu yang anu temen-temennya lah itu. Kalau diklat kan disini ada diklat sertifikasi, diklat fungsional sendiri sama diklat teknis ya, kalau yang sertifikasi sih karna tuntunan peran jadi memang harus diklat sih seperti itu jadi misalnya kayak auditor itu ada bentuk tim ada ketua tim, ada pengendali teknis ya itu masing-masing kalau naik peran gitu harus diklat memang, harus lulus, harus diklat dan harus lulus seperti itu</p>	
--	--	--	--	--	--

<p>6 : Pipit Tyas Ratna Puspita, S.H., MPA.</p>	<p>P : Kalau saya gak bisa bicara secara general ya, saya bicaranya berarti. Inikan misalnya dibaca berarti tantangannya kantor mengelola saya, karna saya termasuk SDM, sdm yang dimaksud disini kan. Ya mungkin kalau saya yang jawab saya mungkin subjektif. Kalau saya pribadi saya merasa memang karna volume pekerjaan yang sangat banyak, jadi sering kali itu, ini pribadi ya jadi tidak bisa dipukul rata dengan yang lain. Saya kurang fokus, karna sebenarnya untuk pemeriksaan yang membutuhkan konsentrasi tersendiri kayak investigasi atau pkkn itu tu memang apa ya memang dibutuhkan konsentrasi dan kefokusan. Cuma kan kalau disini kan kami tidak bisa terus kalau</p>	<p>P : Digital forensik audit untuk audit investigasi, itu mungkin maksudnya, kalau secara umum kami mengikuti perkembangan teknologi itu juga sangat apa ya tertatih tatih, karna apa ya, sdm kami kan banyak yang muda tapi banyak juga yang sudah senior, jadi saya aja usia segini tapi untuk mengikuti perkembangan jaman yang terlalu cepat itu saya juga kadang-kadang gak bisa basenya gak bisa secepat mengikuti anak-anak muda sih. Dan disini lebih banyak yang senior daripada yang muda.</p>	<p>P : Digital forensik audit untuk audit investigasi, itu mungkin maksudnya, kalau secara umum kami mengikuti perkembangan teknologi itu juga sangat apa ya tertatih tatih, karna apa ya, sdm kami kan banyak yang muda tapi banyak juga yang sudah senior, jadi saya aja usia segini tapi untuk mengikuti perkembangan jaman yang terlalu cepat itu saya juga kadang-kadang gak bisa basenya gak bisa secepat mengikuti anak-anak muda sih. Dan disini lebih banyak yang senior daripada yang muda.</p>		
---	--	---	---	--	--

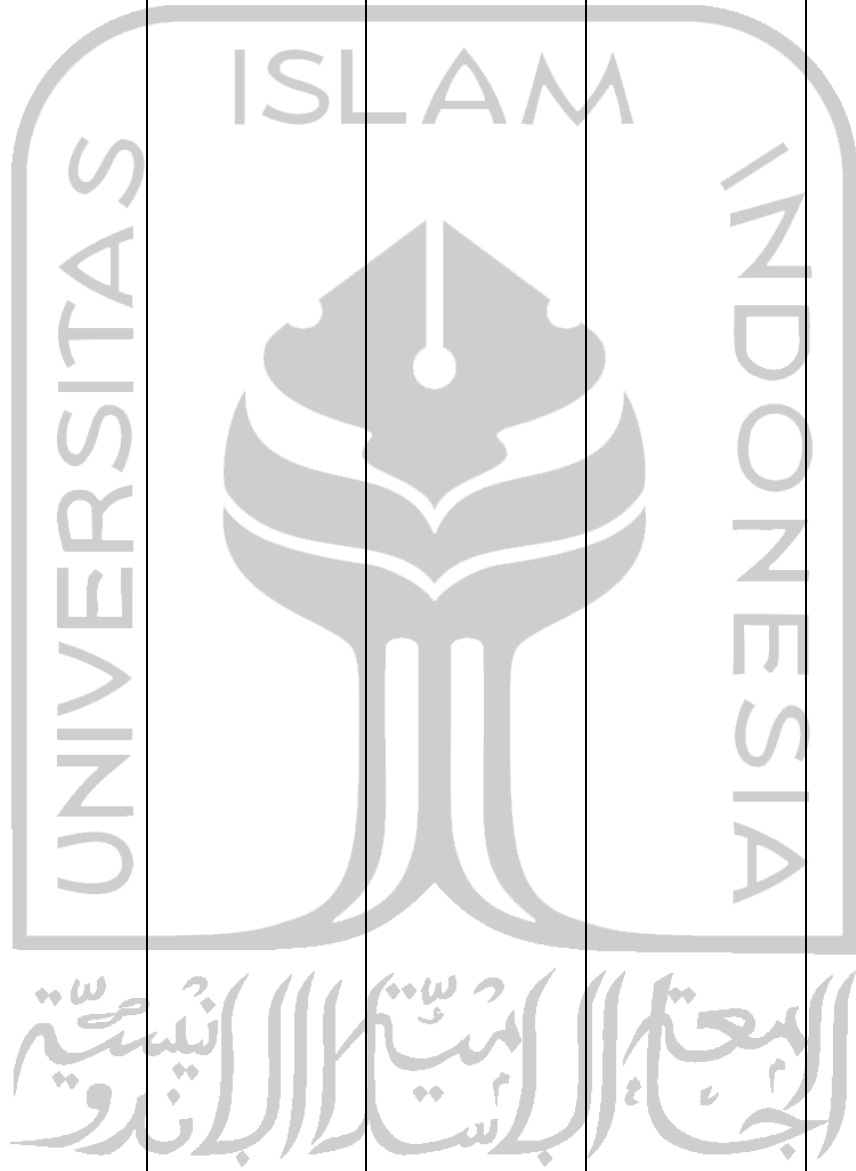
	<p>dapat surat tugas ini, ini aja yang dikerjain, kan gak bisa karna memang satu kekurangan orang dua memang volume pekerjaan entah mandatori entah yang program kerja sendiri sangat banyak, jadi mungkin tantangan utamanya ya itu sih karna volume pekerjaannya yang banyak, jadi mungkin kalau saya pribadi itu saya gak fokus, dan ketika sesuatu yang dikerjakan tidak dengan fokus kan saya juga tidak maksimal seperti yang diharapkan.</p> <p>P : Kalau ini berarti kelemahan dan kekurangan kami sebagai auditor, mungkin ini kalau pribadi bisa lagi-lagi jawabnya secara subjektif menilai diri sendiri ya, kalau ini ya satu yang itu tadi bu heri bilang, karna perkembangannya</p>				
--	---	--	--	--	--



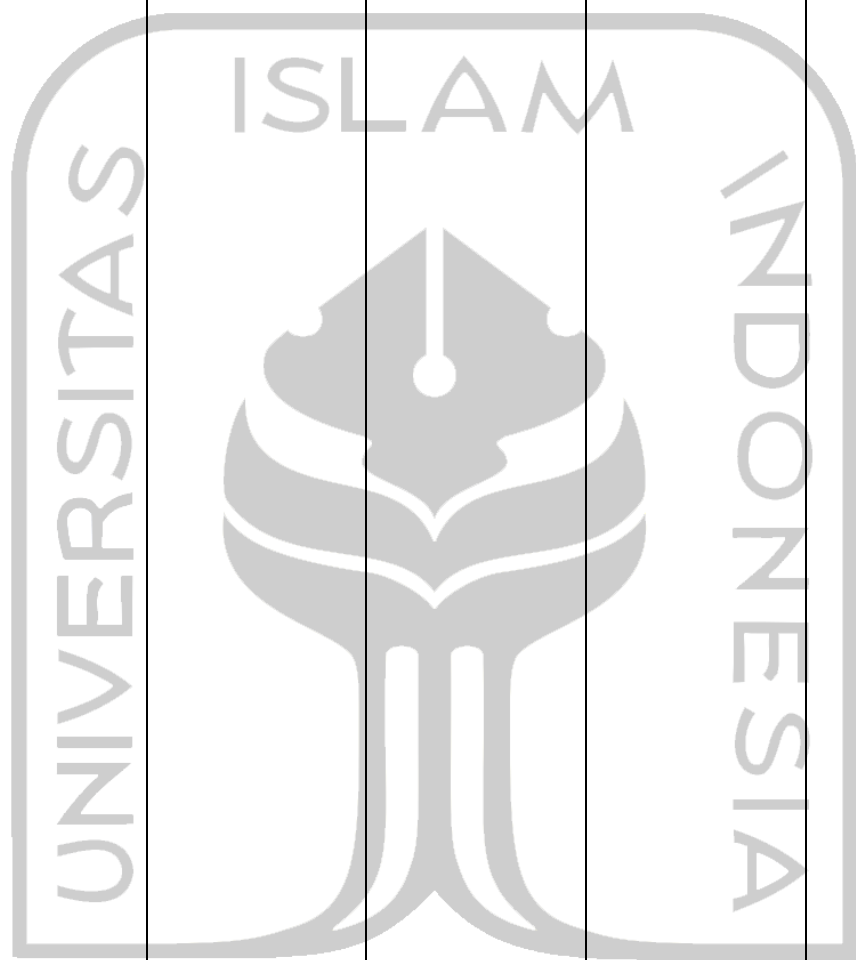


	<p>cepat, kadang-kadang apa kami selaku auditor juga harus mengikuti tapi apa secara waktu entah secara tenaga itu kami kurang, jadinya mungkin apa istilahnya kalau istilahnya tertatih-tatih mengikutinya ketika perkembangannya terlalu cepat, tapi kami dituntut dengan, kan kami tidak fokus ya jadi misalnya kami ngerjain ini ngerjain itu aja itu enggak. Jadi ya kami ngerjain ini, ya apa <i>nanti</i> kpk <i>nanti</i> minta kita juga mengerjakan <i>nanti</i> irbad minta apa kita juga mengerjakan, jadi mungkin kendalanya itu disitu terus, jadi ketika ada penugasan karna penugasan volumenya sangat banyak jadi mungkin jadi kurang fokus, karna satu waktu dan dua kapasitas saya pribadi</p>			
--	---	---	--	--

	<p>selaku auditor itu kan untuk mempelajari banyak hal dalam waktu yang bersamaan itu bisa, mungkin tidak maksimal, Cuma separuh-separuh dulu, yaitu tertatih-tatih sih ketika mengikuti tuntutan, mandatori, dan mengikuti perkembangan. Aturan kan berubah cepat banget nggih, jadi kadang-kadang kami baru mau diterapkan baru mau belajar, baru mau menguasai, itu seperti itu juga jadi kendala, saya pribadi merasakannya seperti itu selaku SDM yang dimaksud disini.</p> <p>P : Jadi mungkin lebih terorganisir disitu karena fokus bu heri mengatur kami saja dibidang itu dan penugasannya juga sesuai yang harus dikerjakan oleh bu heri dan</p>				
--	---	--	--	--	--



kami, jadi timeline dan waktunya pun lebih terjadwal. Tapi kalau untuk volume pekerjaan kami juga tidak bisa milih, karna itu kebanyakan juga penugasannya juga mandatori dari pusat, jadi mau tidak mau harus dikerjakan.



الجامعة الإسلامية  
الاستدرا الاندو

<p>7 : Retno Isni Satiti</p>	<p>Rno Mas, kalau menghambat itu di semua lini, iya saya jawab iya, karena apa, yang namanya surat tugas bertubi-tubi semua, apalagi ada SOP, semua laporan harus selesai dalam satu bulan setelah pemeriksaan di lapangan dengan tim yang berbeda, itu jelas akan terhambat tapi bagaimana pinter-pinternya si auditor itu sendiri untuk membagi waktu bahkan kayak saya itu, saya rasa gak cuma saya ya temen-temen itu sampai rumah memang jam kerja kita sampai jam setengah 4 tapi di rumah, kadang saya sampai jam 12 malam itu masih ngoreksi LHP-nya punya ketua tim saya harus ngisi, bahkan yang berkaitan dengan ekin saya ngisinya di rumah kenapa, gak sempat di sini, tapi juga melihat</p>			<p>Rno Jadi, karena keterbatasan. Jadi, karena pengembangan kompetensi itu kan anggaran tidak melekat di inspektorat, ya. Tidak semua melekat di inspektorat, khususnya untuk yang kalau PKS, pelatihan di kantor sendiri yang dilaksanakan internal memang ada di kami anggarannya tapi ketika itu kami harus misalnya menjadi seorang penyuluh itu kan harus diklat di KPK kalau kami mau katakanlah mau seseorang jadi BPK itu kan juga harus diklatnya di luar bukan di internal kita, inspektorat penyelenggara nya, mesti pihak luar. Nah sekarang kalau badan kepegawaian nya daerah itu, itu kan mengurus 48 SKPD, mengurus 46</p>	<p>Rno Mas, kalau menghambat itu di semua lini, iya saya jawab iya, karena apa, yang namanya surat tugas bertubi-tubi semua, apalagi ada SOP, semua laporan harus selesai dalam satu bulan setelah pemeriksaan di lapangan dengan tim yang berbeda, itu jelas akan terhambat tapi bagaimana pinter-pinternya si auditor itu sendiri untuk membagi waktu bahkan kayak saya itu, saya rasa gak cuma saya ya temen-temen itu sampai rumah memang jam kerja kita sampai jam setengah 4 tapi di rumah, kadang saya sampai jam 12 malam itu masih ngoreksi LHP-nya punya ketua tim saya harus ngisi, bahkan yang berkaitan dengan ekin saya ngisinya di</p>
------------------------------	---	--	--	--	---

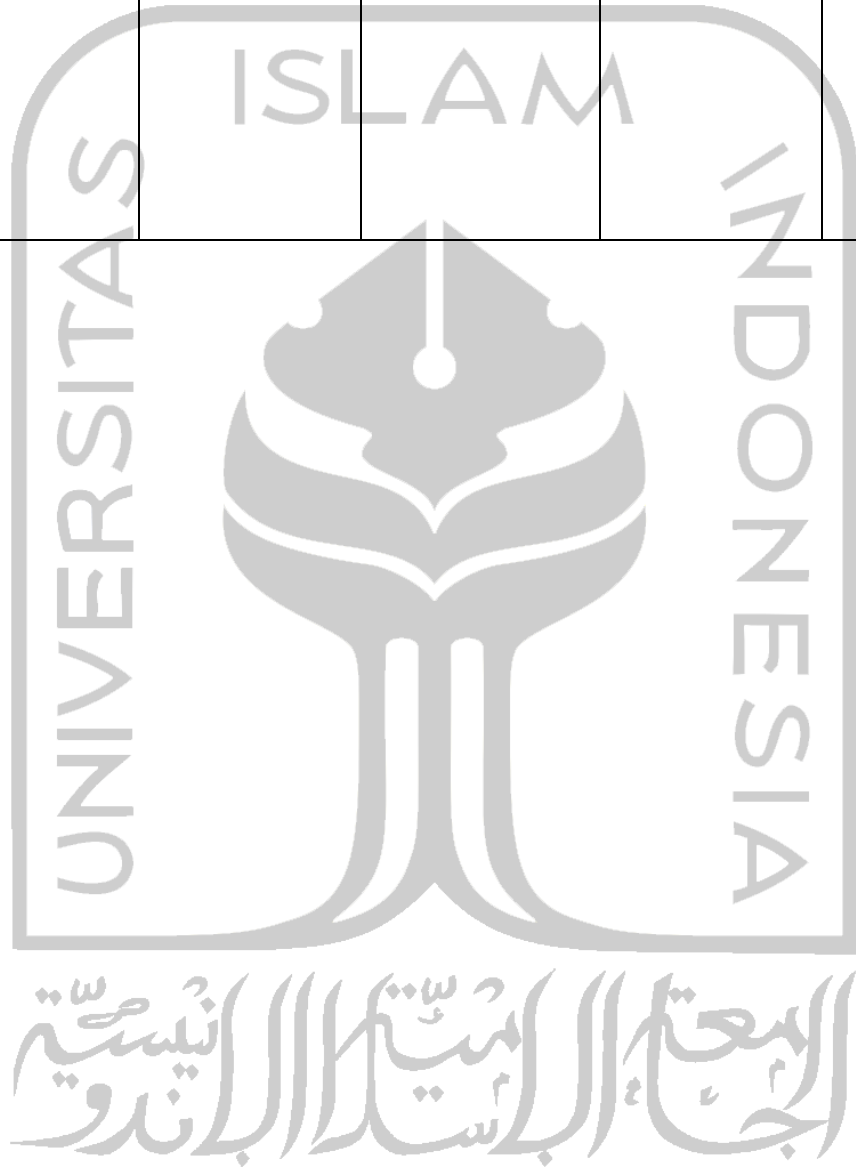
	<p>sikon di rumah artinya gak mengorbankan, <i>nanti</i> suami kita butuh ini, oh sebentar saya lagi kerja enggak <i>nanti</i> kita bisa dimarahi para suami kita, dimarahi suami atau dimarahi anak Anaknya butuh bimbingan. Oh sebentar ibu lagi ngoreksi. Nggak bisa seperti itu.</p>			<p>dinas kalau sekarang dulu 48, sekarang 46, karena ada regulasi di RSUD yang menggabung di dinas kesehatan kami Sleman, punya 2 RSUD, dulu merupakan yang berdiri sendiri, sekarang di bawahnya Dinas Kesehatan menjadi 46. Setiap OPD butuh pengembangan khusus masing-masing dinas teknisnya, dan itu anggarannya diambil dari BKPP. Kalau saya bicara BKPP, tolong diartikan itu Badan Kepegawaian Daerah ya. BKPP. Nah, ketergantungan ini mereka kan harus membagi anggaran yang di sana untuk seluruh dinas yang ada di Kabupaten Sleman termasuk inspektorat. Kalau kami harusnya</p>	<p>rumah kenapa, gak sempat di sini, tapi juga melihat sikon di rumah artinya gak mengorbankan, <i>nanti</i> suami kita butuh ini, oh sebentar saya lagi kerja enggak <i>nanti</i> kita bisa dimarahi para suami kita, dimarahi suami atau dimarahi anak Anaknya butuh bimbingan. Oh sebentar ibu lagi ngoreksi. Nggak bisa seperti itu.</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>mengikuti sertifikasi, katakanlah sertifikasi pengadaan barang jasa, atau sertifikasi medris misalnya CRNO, itu kan biayanya mahal mas. Kalau mereka nggak mengol kan ya sudah, kami mundur, nggak jadi. Kan seperti itu. Jadi kami itu tergantung kalau untuk yang eksternal tergantung banget dengan BKPP. Pengembangan kompetensi yang eksternal dalam arti butuh sertifikasi ya. Harus buktinya <i>nanti</i> mengikuti ini kita lulus dengan sertifikasi itu bergantung banget lagi kalau di pelatihan kantor sendiri di internal cukup dengan inspektorat</p>
--	--	--	--	---

Lampiran 13 Framework Matrices Rumusan Masalah 4 Cara Mengatasi Kendala

Narasumber	10. Mengirim pegawai ke diklat	4. Saling backup pekerjaan	2. Anggaran diklat dikelola sendiri	F : 6. Menggunakan audit berbasis teknologi	5. Mengurangi Obrik dengan membuat sampel	7. Alokasi waktu penugasan yang baik	1. Memberikan ruang untuk kreatif	9. Melibatkan pelaksanaan rapat kerja
<p>1 : Heri Setyawati, S.E., M.Acc.</p>	<p>Kalau tantangannya kan sekarang era digital itu yang lebih banyak apa kita juga tidak bisa tutup mata dengan perkembangan jaman, sekarang era digital yang sementara ini kan banyak yang kita laksanakan itu masih yang sistemnya manual, sehingga perlu pengetahuan tentang yang ini forensik audit, terus sekarang yang pakai digital-digital itu kan kita masih lemah audit tentang itu.</p> <p>Sesuai jawaban saya tadi aja mba, sama saja digital forensik</p>	<p>Kalau jumlahnya ya memaksimalkan, mengoptimalkan yang ada, gak bisa untuk terus-terus minta nambah-nambah gitu gak bisa.</p>	<p>Kalau tantangannya kan sekarang era digital itu yang lebih banyak apa kita juga tidak bisa tutup mata dengan perkembangan jaman, sekarang era digital yang sementara ini kan banyak yang kita laksanakan itu masih yang sistemnya manual, sehingga perlu pengetahuan tentang yang ini forensik audit, terus sekarang yang pakai digital-digital itu kan kita masih lemah audit tentang itu.</p>				<p>H : Kalau tantangannya kan sekarang era digital itu yang lebih banyak apa kita juga tidak bisa tutup mata dengan perkembangan jaman, sekarang era digital yang sementara ini kan banyak yang kita laksanakan itu masih yang sistemnya manual, sehingga perlu pengetahuan tentang yang ini forensik audit, terus sekarang yang pakai digital-digital itu kan kita masih lemah audit tentang itu.</p> <p>H : Kalau jumlahnya ya memaksimalkan, mengoptimalkan yang ada, gak bisa untuk terus-terus minta nambah-nambah</p>	

							gitu gak bisa.	
--	--	--	--	--	--	--	----------------	--





<p>2 : Hery Dwi Kuryanto, S.H., M.Hum.</p>				<p>Hy Ya, mungkin...Mungkin saya belum bisa Memberikan komentar banyak tentang itu. Tapi itu seiring dengan kemajuan teknologi, saya kira itu sangat diperlukan. Di dalam menyikapi perkembangan teknologi. Artinya perkembangan teknologi kan mesti plus-minus. Plusnya itu membawa... Perkembangan teknologi itu bisa memberikan sisi positif di dalam pengelolaan pemerintahan. Tapi satu sisinya, yang namanya teknologi, pasti akan membawa dampak negatif juga. Kita dulu, ya, sebelum yang namanya... Mas siapa?</p> <p>Hy Ya, media teknologi informasi, ya. Itu kan nggak ada pembobolan-pembobolan. Tapi kan sekarang justru itu terjadi.</p>			<p>Hy Kita hahu, kita memberikan kebebasan. Dan kita punya program pelatihan tertentu, Mas. Harusnya teman-teman ngasih ya, teman-teman ada itu. Sebetulnya harusnya sudah diberi jawaban oleh teman-teman. Itu kan ada program yang secara rutin kita lakukan. Terus teman-teman juga ada pelatihan yang internal sendiri. Pelatihan kantor sendiri. Jadi kita ada hal yang sifat...Program peningkatan kompetensi itu berdasarkan kebutuhan kita. Ataupun atas usulan teman-teman. Tapi usulan teman-teman juga harus yang itu mendukung program. Tidak bisa... Mereka usul kalau itu tidak memberikan</p>	
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>Namanya data kependudukan. Dulu kan sistemnya kan hanya disimpan saja. Datanya manual diketik. Tapi kan jarang. Mungkin yang ter... bisa dikonsumsi oleh publik melalui hacker ataupun apa. Yang itu yang harus juga dibarengi dengan kecepatan aparat pemerintah. Mungkin khususnya di inspektorat untuk bisa melakukan pemeriksaan, melakukan audit terkait dengan teknologi informasi, pemanfaatan teknologi informasi. Kemampuan kami belum sampai ke sana. Ya, jadi gini. Katakan kami meriksa di sistem pengadaan barang dan jasa. Itu kan semuanya sudah berbasis teknologi semua. Pengiriman datanya, kemudian pengumuman pemenang, terus bagaimana. Lah</p>		<p>kontribusi ataupun mendukung program kegiatan kita. Tidak mungkin. Apa?</p>	
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>bagaimana kami bisa melakukan audit terkait dengan katakan SOP-nya sendiri menentukan pemenang kalau kami tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

الجمعة الإسلامية الاندونيسية

<p>3 : Ika Sulistyio Devi</p>	<p>Enggak sih biasanya di kami itu sekretariat yang malah melihat. Misalnya di BPKP, jadwalnya apa sekarang? Itu siapa yang mau ikut didiklatkan gitu siapa yang mau diklat, kita komunikasi dengan Irban, inspektur pembantu kayak Bu Heri kemarin tuh inspektur pembantu dan BPK ada diklat kapan kita tawarkan ke mereka gitu.</p>	<p>Kendalanya karena banyak ketugasan di kami, Jadi kalau misalnya harus satu auditor itu misalnya 2 bulan sekali harus mengikuti diklat gitu, waktunya ya nggak ada.</p>		<p>I Kendalanya karena banyak ketugasan di kami, Jadi kalau misalnya harus satu auditor itu misalnya 2 bulan sekali harus mengikuti diklat gitu, waktunya ya nggak ada.</p>	<p>I Kendalanya karena banyak ketugasan di kami, Jadi kalau misalnya harus satu auditor itu misalnya 2 bulan sekali harus mengikuti diklat gitu, waktunya ya nggak ada.</p>	<p>I Kendalanya karena banyak ketugasan di kami, Jadi kalau misalnya harus satu auditor itu misalnya 2 bulan sekali harus mengikuti diklat gitu, waktunya ya nggak ada.</p>		<p>I Kendalanya karena banyak ketugasan di kami, Jadi kalau misalnya harus satu auditor itu misalnya 2 bulan sekali harus mengikuti diklat gitu, waktunya ya nggak ada.</p>
-------------------------------	---	---	--	---	---	---	--	---

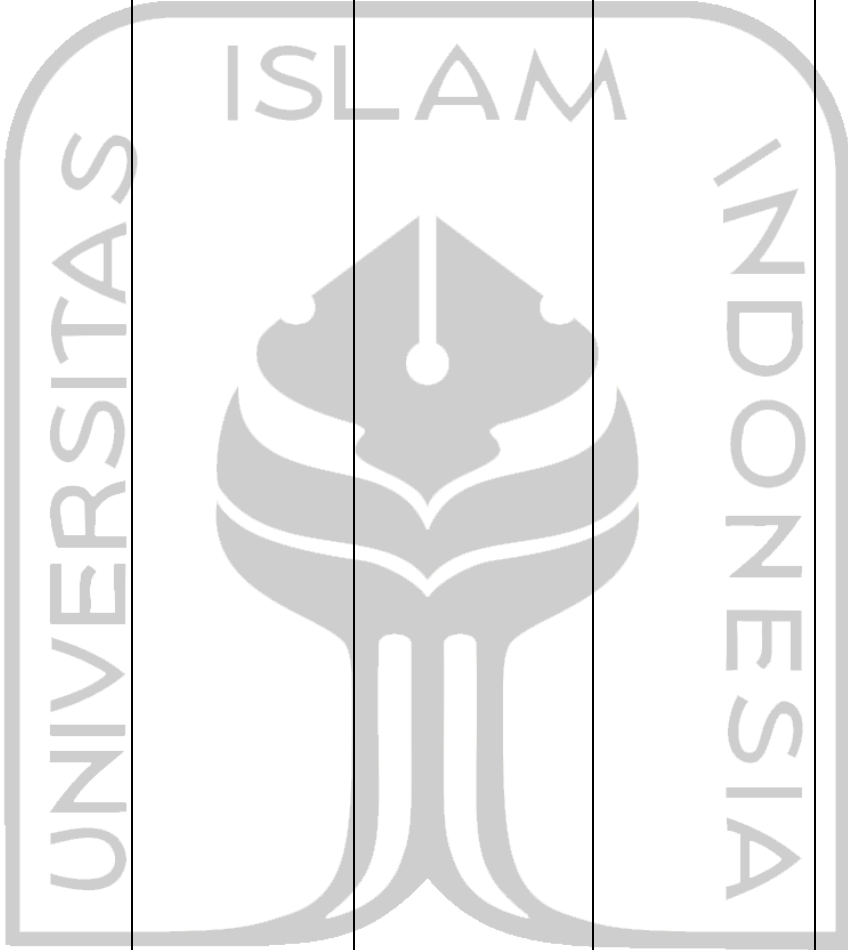
الجمهورية الإسلامية الإندونيسية

<p>4 : Ir. Sri Puji Lestari</p>	<p>Iya kalau di inspektorat kan kebanyakan pekerjaan harus dikerjakan dengan tim, ada tim. Ya diantara tim itu yang harusnya saling koordinasi bagaimana caranya supaya selesai kan gitu. Anggota, harusnya ketua meng backup anggota-anggota yang anu, terus nya si pengendali teknis harusnya juga harus mengawasi sebetulnya, mengawasi timnya itu ke bawah, iya pengendali teknis itu diatas ketua tim. Kan harusnya yang perlu dipantau dari anggota dulu, apakah langkah kerja yang udah ditetapkan itu sudah dilaksanakan belum oleh anggota? Kan gitu.kalau ada anggota yang lemah ketua timnya harus</p>	<p>Sebetulnya kalau fokusnya sih fokus mengikuti diklat ya, tapi kalau untuk mengikuti diklat hanya sedikit sekali kesempatan yang diberikan oleh KPK. KPK itu kebanyakan e-learning melalui online jarang sekali yang melalui diklat. Diklat itu tahun kemarin itu hanya ada satu kesempatan, jadi memang dibuka melalui online. Itu iya</p>	<p>Pj : Terkait penggunaan digital kami memang sudah ada itu satu untuk pengawasan.</p>	<p>Pj : Terkait volume pekerjaan, dulu kami memang memeriksa seluruh OPD, namun kami sekarang hanya melakukan pemeriksaan dengan sampel. Jadi yang paling memiliki risiko tinggi berdasarkan metode penilaian kami, itulah yang kami jadikan sampel. Contohnya di kabupaten Sleman ini ada 86 desa yang akan kami lakukan probity audit, namun kami hanya menjadikan 16 desa yang diperiksa sebagai sampel.</p>	<p>Pj : Satu, penugasan kalau bisa sedikit mungkin maksudnya tidak tumpang tindih ya, kedua juga penghargaan dari Pemda itu ke teman-teman auditor tunjangan nya juga kalau bisa meningkat kan seperti itu, itu harapannya itu. Kalau di kita kan memang ada, kalau di pusat itu kan ada tunjangan kinerja, kalau di kita kan gak ada, adanya tambahan penghasilan. Kan sekarang sudah tidak ada honor lagi. Tunjangan itu sudah tidak ada honor lagi.</p>	<p>Pj : Itu setiap ada berita saya share di grup untuk mengikuti kan gitu. Tapi ada juga yang mengikuti ada juga yang enggak, kan gitu, kan orang macem-macam ya.</p> <p>Pj : Sebetulnya kalau fokusnya sih fokus mengikuti diklat ya, tapi kalau untuk mengikuti diklat hanya sedikit sekali kesempatan yang diberikan oleh KPK. KPK itu kebanyakan e-learning melalui online jarang sekali yang melalui diklat. Diklat itu tahun kemarin itu hanya ada satu kesempatan, jadi memang dibuka melalui online. Itu iya</p> <p>Pj : Sertifikasi nya kalau sertifikasi harus mengikuti diklat pembentukan, kalau auditor</p>	<p>Pj : Pertama kalau untuk penugasan, pada saat kita menyusun program kerja, seluruh bidang kan kita libatkan yang menentukan programnya mereka, hanya kita melakukan (apa) garis besarnya aja, kalau pemeriksaan fokusnya harus ini, yang wajib dilaksanakan kegiatan ini, ini, ini. Kan ada kegiatan-kegiatan mandatory itu wajib dari pusat</p> <p>Pj : Mandatory dari pusat itu wajib. Kemudian pemilihan unit kerjanya silakan pilih, kan gitu yang menentukan. Terus sekop pemeriksaan, sasaran, ruang lingkup mereka yang menentukan supaya bisa ngukur, kan ruang lingkup</p>
---------------------------------	---	---	---	---	--	--	--


		<p>membackup kalau cara kerjanya kan seperti itu, harusnya seperti itu.</p> <p>Penyebabnya apa ya, aku itu jarang buka anu ya, buka informasi di web, tapi sebetulnya kekurangan saya itu sudah saya lemparkan ke teman-teman yang muda-muda. Kalau muda-muda kan kalau ada informasi segera informasikan. Kalau ada seminar, tapi khusus seminar terkait yang berhubungan dengan pengawasan, baru bisa mengirimkan peserta</p>					<p>pembentukan auditor, kalau OPD pembentukan OPD. Itu syarat mendasar. Supaya mengikuti diklat tersebut ya harus bekerja di inspektorat, berarti harus mengikuti itu, lulus, baru nanti bisa mendapatkan sertifikat baru nanti diangkat menjadi auditor, setelah diangkat menjadi auditor ya nanti ada bukti-bukti pekerjaan, dan bukti-bukti pekerjaan itu salah satu syaratnya adalah pengembangan profesi. Pengembangan profesionalitas itu seperti diklat diklat segala macam itu kan masuk pengembangan profesionalitas dan itu mereka itu harus. Makanya kalau yang kreatif dia mengikuti seminar, diklat-diklat online itu,</p>	<p>yang ditetapkan itu kan juga untuk membatasi itu. Terus yang kedua itu terkait dengan kerja ya jadi mereka kita libatkan dia yang menentukan, tujuannya melakukan pengawasan juga, pemeriksaan saya suruh buat sendiri tujuannya apa. Supaya dia bisa timnya maksudnya dibidang. Kalau dulu kan kita yang menentukan, sasarannya, obrihnya kan kita dari sekretariat menentukan dari seksi perencanaan. Kalau sekarang kita melibatkan mereka gitu. Jadi sekop nya kalau terlalu besar ya apa sekop nya gitu</p> <p>Pj : Iya, mereka yang tentukan, tujuannya mau diperiksa sampai sejauh mana mereka yang tentukan. Itu iya.</p>
--	--	---	--	--	--	--	---	--

							<p>pelatihan-pelatihan online itu cepat dia mendapatkan kredit pengembangan profesional</p> <p>Rz : Ooh, berarti selain dari program yang dibuat oleh inspektorat sendiri mereka juga di suruh untuk kreatif sendiri juga bu?</p> <p>Pj : Iya, saya kalau ada informasi dari BPKP 'ada ini, ada ini' saya sebarakan. Silahkan mengikuti ini, nanti kan buktinya, buktinya nanti kan ada sertifikatnya dia, kemudian dia membuat notulen, notulen pelaksanaan yaitu apa materinya. Baru kami buat surat tugas.</p> <p>Pj : Iya, setiap ada yang berkaitan dengan pengawasan pasti saya informasikan,</p>	<p>Terus kemudian kapan pekerjaan itu dilaksanakan waktunya juga mereka yang saya minta menjadwalkan, jadi bukan saya lagi, kalau dulu kan saya. Sekarang enggak sudah saya rubah. Jadi kalau ini mau kapan, mau kapan <i>nanti</i> pada saat bulan ini, tanggal ini maka saya mengeluarkan surat tugas sesuai dengan masukannya mereka. Jadi tidak ada lagi pertanyaan 'ngopo toh mba puji mengeluarkan pemeriksaan ini untuk apa?', justru saya yang bertanya gitu.</p> <p>Pj : Metode nya apa ya, istilahnya apa ya, penyusunan kinerja dengan melibatkan bidang ya, memang kalau sesuai dengan butir-butir pelaksanaan</p>
--	--	--	--	--	--	--	---	--



							<p>tapi ya itu,</p>	<p>auditor, auditor yang tingkatnya tinggi itu mereka harus sudah merencanakan kegiatan. Pengendali teknis harus dia sudah mampu membuat perencanaan sebetulnya itu. Nah itu memang saya kembalikan, memang itu tugas mu kan gitu.</p> <p>Pj : Iya itu saya yang membagi mandatory ABCD dibidang ini yang mandatory EF di bidang ini, dibidang ini saya yang bagi. Saya membaginya sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang, seperti review RKBD, itu <i>nanti</i> ada di bidang perekonomian dan pembangunan, karena bidang itu yang membawahi OPD Bappeda, karena RKBD itu yang melaksanakan adalah Bappeda itu. Tapi <i>nanti</i></p>
--	--	--	---	--	--	--	---------------------	--



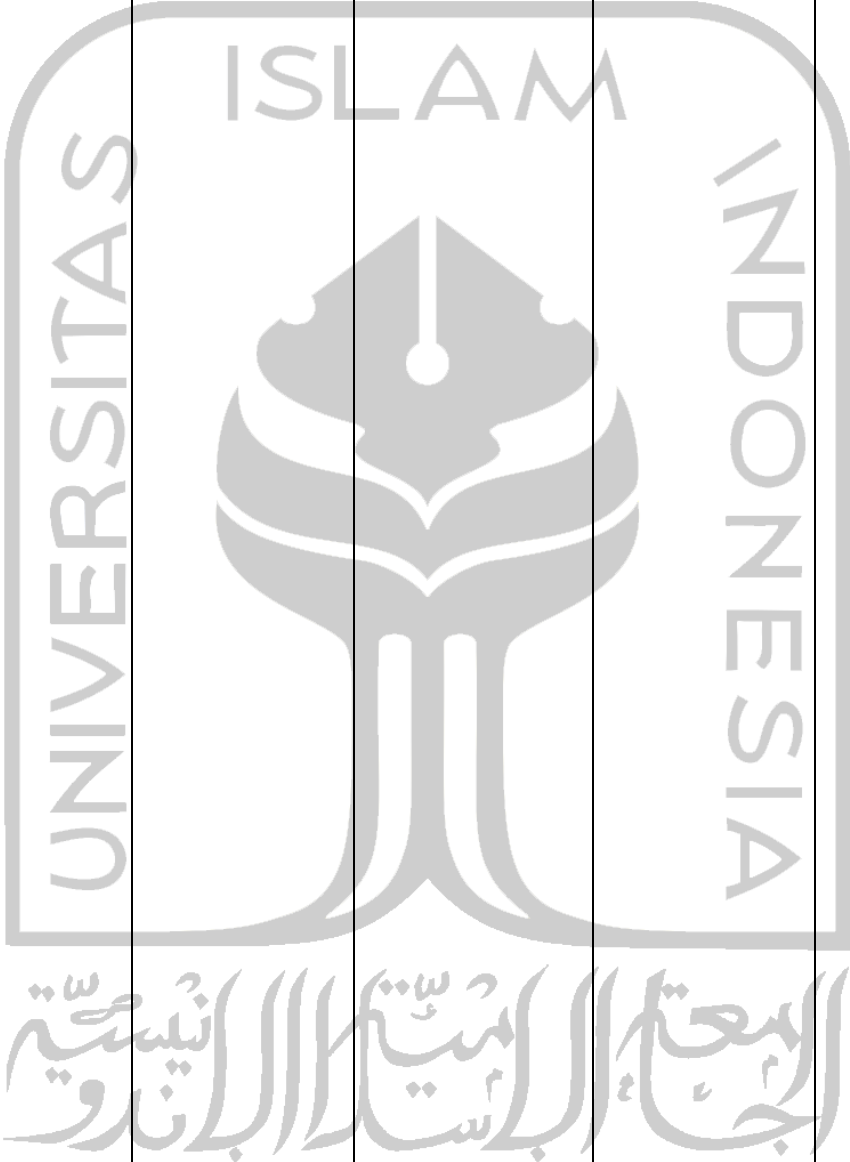
			<p>kalau review SHBJ, analisis tanda biaya karena itu yang menangani adalah badan keuangan, maka <i>nanti</i> ada dibidang pemerintahan, karena bidang pemerintahan itu yang menangani bidang keuangan, itu saya bagi. <i>Nanti</i> mandatory terkait dengan reformasi birokrasi, SPIP segala macam saya kasih dibidang investigasi dan RB. Itu kalau garis besarnya sudah saya bagi, hanya mereka <i>nanti</i> merencanakan secara teknisnya lagi. Ini kapan di lakukan, kemudian ruang lingkupnya apa, <i>nanti</i> dia mau ngambil berapa sampel itu mereka gitu. (Bahasanya apa sekarang gitu), intinya seperti itu. Jadi membuat perencanaan dengan</p>
--	--	---	--

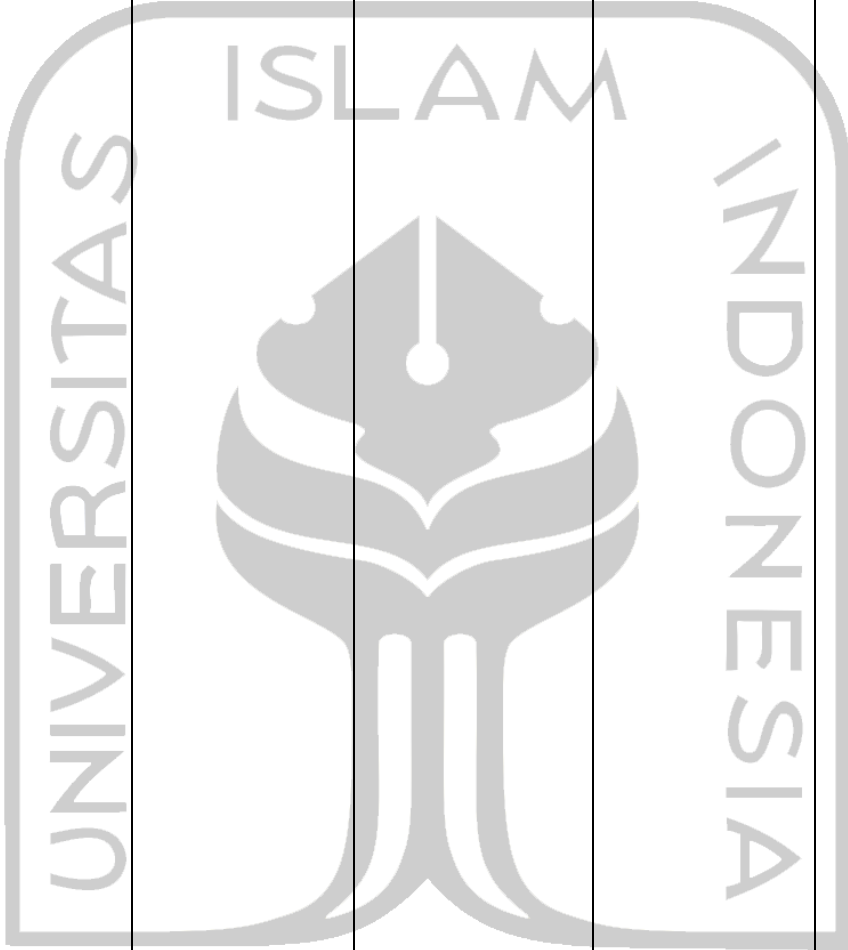


<p>5 : Ngatiyah, S.H.</p>	<p>Kalau aku sih ya itu tadi ya, kalau kayak kayak kami di auditor itu kan memang kayaknya seperti garda terdepan dalam pencegahan <i>fraud</i>, dalam penindakan dalam apa itu loh, jadi memang harus banyak diini sih SDMnya itu banyak ditingkatkan, jadi misalnya dengan diklat dengan apa itu tadi makanya kayak sebenarnya sih sudah ada ya kayak mcb KPK itu yang menyarankan kalau inspektorat itu anggarannya itu paling enggak 0,5 dari APBD,, tapi karna standar harga disini itu kecil kita gak bisa buat kegiatan yang bisa menyerap anggaran seperti itu, terus anggaran itu juga terbatas hanya untuk poin-poin yang di boleh APBD ya di jumlah APBD nya</p>	<p>Kalau ini sih mas, kalau kita kan surat tugas dari sini ya dari bu puji ini ya sekretaris yang buat surat tugas dalam beberapa hari kayak gitu, tapi nani kita gak bisa terpatok jangka waktu disurat tugasnya ya karna kita memang lihat kondisi objek pemeriksaannya juga, kadang kita sampai lewat waktu dari situ, tapi memang modelnya sih sesuai surat tugas, <i>nanti</i> laporan cukup selesai, tapi karena banyak hal banyak kendala seperti itu nggih, kadang kami telat juga sih buat laporan seperti itu. Kalau dari ketua tim sih alokasi waktunya sama dengan yang di surat tugas itu. Kalau disini kan waktu pemeriksaan Cuma 10 hari, padahal 10 hari itu kan kita belum dapat</p>	<p>Kalau itu sih kalau misalkan diklat itu memang keterbatasan ini juga sih anggaran, karna anggarannya itu kan masih dipegang bkpp ya kepegawaian pemda ya, gak di inspektorat sendiri, jadi disana itu kan hanya ada anggaran untuk struktural sama fungsional ya, fungsional itu auditor masuk ke anggaran diklatnya fungsional ya, ke anggaran fungsional, padahal anggaran fungsional di pemda itu kan banyak ya. Karena keterbatasan anggaran ya kami datang diklatnya jadi cuman sedikit itu. Sebenarnya sih kalau pada diklat itu seneng juga sih karena kok jadi lebih pintar lah ya cuman karena</p>	<p>G Ya itu tadi kita terus kebanyakan terus kita jadi lembur-lembur seperti itu terus kita juga pakai ini juga sih kalau bisa pakai aplikasi- aplikasi seperti itu lah kayak evaluasi LKJIP itu kemarin kita manual- manual maksudnya manual excel sih kita buat aplikasi biar kita lebih cepet lebih memudahkan seperti itu. Rz Kalau itu kaitannya sama pengembangan kompetensi berarti dengan adanya digital-digital tadi itu bu sama yang kurang SDM dengan adanya pindahan, itu apa dengan itu pekerjaan jadi lebih terorganisis itu atau apakah membuat ada waktu untuk yang tadi pengembangan kompetensi setelah itu, apa masih ada? G Sebenarnya gini</p>	<p>G Kalau ini sih mas, kalau kita kan surat tugas dari sini ya dari bu puji ini ya sekretaris yang buat surat tugas dalam beberapa hari kayak gitu, tapi nani kita gak bisa terpatok jangka waktu disurat tugasnya ya karna kita memang lihat kondisi objek pemeriksaannya juga, kadang kita sampai lewat waktu dari situ, tapi memang modelnya sih sesuai surat tugas, <i>nanti</i> laporan cukup selesai, tapi karena banyak hal banyak kendala seperti itu nggih, kadang kami telat juga sih buat laporan seperti itu. Kalau dari ketua tim sih alokasi waktunya sama dengan yang di surat tugas itu. Kalau disini kan waktu pemeriksaan Cuma 10 hari, padahal 10 hari itu kan kita</p>		<p>G Kalau itu sih kalau misalkan diklat itu memang keterbatasan ini juga sih anggaran, karna anggarannya itu kan masih dipegang bkpp ya kepegawaian pemda ya, gak di inspektorat sendiri, jadi disana itu kan hanya ada anggaran untuk struktural sama fungsional ya, fungsional itu auditor masuk ke anggaran diklatnya fungsional ya, ke anggaran fungsional, padahal anggaran fungsional di pemda itu kan banyak ya. Karena keterbatasan anggaran ya kami datang diklatnya jadi cuman sedikit itu. Sebenarnya sih kalau pada diklat itu seneng juga sih karena kok jadi lebih pintar lah ya cuman karena</p>	<p>Rz Kalau menurut ibu melibatkan auditor atau pelaksana program kerja itu merumuskan program kerja itu bisa mengatasi ini gak bu kendala yang banyaknya volume pekerjaan tadi bu? G Ya ngurangi dikit sih, kalau mengatasi sih belum ya soalnya memang harus ini sih butuh waktu, ada proses yang panjang seperti itu karena misalnya kami kekurangan SDM gitu ya kalau volume pekerjaan banyak gitu kekurangan SDM kan, sebenarnya di kami itu paling enggak ada minimal 40 atau 45 apa auditornya ya, kalau sekarang udah 30 ya auditornya kan enggak bisa langsung kami minta</p>
---------------------------	---	---	--	--	---	--	--	--

<p>kalau diluar itu kan gak boleh padahal kita memang sebenarnya banyak sekali ini sih butuh anggaran yang salah satunya untuk pengembangan kompetensi itu, jadi kekurangannya ya menambah-nambah anggaran itu tadi ya, penambahan sarprasnya juga, kayak sekarang itu sarprasnya memang kurang sekali sih tak akui maksudnya kalau kayak kita lebih ini kan lebih enak gitu loh jadi kita dalam melangkah itu kan enak sarprasnya terpenuhi apa disini kayak mobil aja kan ya kurang gitu loh operasional gitu kan, jadi kalau bisa itu sih</p> <p>Programnya apa ya kalau diluar, ya kayak itu tadi diklat, pelatihan-pelatihan kayak gitu sih</p>	<p>jatah apa-apa, terutama kalau di kelurahan ya</p>	<p>keterbatasan itu jadi ya. Kan fungsionalnya ada pustakawan ada pertanian ada apa itu kan jadi satu semua anggarannya jadi gak bisa kami terus minta banyak kayak gitu karena dibagi-bagi sama yang lain ya, kalau enak sih anggaran diklat seperti itu di kami sendiri, kantor kami sendiri kayak gitu enak, jadi lebih ini sih orangnya jadi lebih kayak di gunung kidul lah satu itu auditor itu dijatah minimal satu kali diklat kayak gitu, kami gak bisa sih, karna memang keterbatasan anggaran itu, semuanya masih menjadi satu disana, jadi kita gak bisa memploting anggarannya besar misalnya khusus inspektorat kayak gitu. Tapi kalau kayak yang</p>	<p>anu sudah mengurangi sih, karna volume pekerjaan kita juga banyak terus kita juga tambah SDM ini, kita masih bisa sih walaupun kadang kita zoom kayak gitu sambil fokus zoom tapi ngerjain yang lain kayak gitu sering juga sih kayak gitu, tapi sudah ini sih lumayan ada waktu lah gitu</p>	<p>belum dapat jatah apa-apa, terutama kalau di kelurahan ya</p>		<p>keterbatasan itu jadi ya. Kan fungsionalnya ada pustakawan ada pertanian ada apa itu kan jadi satu semua anggarannya jadi gak bisa kami terus minta banyak kayak gitu karena dibagi-bagi sama yang lain ya, kalau enak sih anggaran diklat seperti itu di kami sendiri, kantor kami sendiri kayak gitu enak, jadi lebih ini sih orangnya jadi lebih kayak di gunung kidul lah satu itu auditor itu dijatah minimal satu kali diklat kayak gitu, kami gak bisa sih, karna memang keterbatasan anggaran itu, semuanya masih menjadi satu disana, jadi kita gak bisa memploting anggarannya besar misalnya khusus inspektorat kayak gitu. Tapi kalau kayak yang webinar yang</p>	<p>kekurangannya segini langsung dipenuhi kan, jadi Cuma bertahap aja kita ya naiknya bertahap lah gitu</p> <p>G Kalau ini sih mas, kalau kita kan surat tugas dari sini ya dari bu puji ini ya sekretaris yang buat surat tugas dalam beberapa hari kayak gitu, tapi nani kita gak bisa terpatok jangka waktu disurat tugasnya ya karna kita memang lihat kondisi objek pemeriksaannya juga, kadang kita sampai lewat waktu dari situ, tapi memang modelnya sih sesuai surat tugas, nanti laporan cukup selesai, tapi karena banyak hal banyak kendala seperti itu nggih, kadang kami telat juga sih buat laporan seperti itu. Kalau dari ketua tim sih alokasi waktunya sama dengan</p>
--	--	---	--	--	--	--	---

	<p>Digital forensik oke juga sih, kemarin pas audit investigasi disinggung cuman dikit sih digital forensik itu, misalnya kita tau, dikirimin foto ya kita bisa melihat orang itu berada dimana dari foto itu kemarin itu, cuman sedikit sih, kalau itu katanya ada diklatnya sendiri sih, tapi bagus juga itu, sangat mendukunglah kalau digital forensik, jadi kita enggak ini sih, jadi tau itu fotonya diedit apa enggak kayak gitu ya kayak gitu kan digital forensik</p> <p>Itu boleh juga lah untuk mendukung kompetensi <i>fraud</i> itu usulan kayak gitu kalau semuanya auditor itu diklatkan digital forensik itu enak jadi kita tau lah oh ini ternyata</p>		<p>webinar yang gratis-gratis kita selalu ikut, kan seneng toh pengetahuan kita tambah gak pakai anggaran gitu kan, maka kan antusiasnya disitu</p>				<p>gratis-gratis kita selalu ikut, kan seneng toh pengetahuan kita tambah gak pakai anggaran gitu kan, maka kan antusiasnya disitu</p> <p>G Kalau kesempatan sih ini sih semuanya pengen, Cuma karena keterbatasan anggaran jadi gak bisa semua, kayak kemarin yang diklat investigasi cuman dua orang yang dikirim, karena memang biayanya lumayan juga ya sekali diklat kadang sampai lima juta berapa kayak gitu kan, jadi memang yang dikirim gak bisa semuanya, jadi harapannya memang yang dikirim <i>nanti</i> bisa inilah kita kan ada pelatihan kantor sendiri, mungkin disampaikan disitu lah, kalau gak materinya disampaikan ke</p>	<p>yang di surat tugas itu. Kalau disini kan waktu pemeriksaan Cuma 10 hari, padahal 10 hari itu kan kita belum dapat jatah apa-apa, terutama kalau di kelurahan ya</p>
--	---	--	---	--	--	--	---	---

	<p>filenya gak asli oh ini ternyata filenya di edit ini sudah di apalah kan kita tau, kan kadang memang kita ada indikasi kecurangan ya terus kita lihat bukti-buktinya kadang bukti-buktinya sudah di rubah ya, kalau ikut digital forensik tau itu ini sudah di rubah ini kayak gitu</p>						<p>temen-temen biar semuanya tau juga kayak gitu, selama ini kita seperti itu sih kalau memang gak bisa ikut diklat semua, yang diklat itu yang anu temen-temennya lah itu. Kalau diklat kan disini ada diklat sertifikasi, diklat fungsional sendiri sama diklat teknis ya, kalau yang sertifikasi sih karna tuntunan peran jadi memang harus diklat sih seperti itu jadi misalnya kayak auditor itu ada bentuk tim ada ketua tim, ada pengendali teknis ya itu masing-masing kalau naik peran gitu harus diklat memang, harus lulus, harus diklat dan harus lulus seperti itu</p> <p>G He eh sih, sangat mendukung sih disamping mereka juga menganggarkan di DPA itu kan juga ada itu</p>	
--	--	---	--	--	--	--	--	--

							<p>anggaran-anggaran untuk seminar, kalau seminar di kami sendiri ya, kalau diklat disana, terus anggaran-anggaran untuk studi banding kemana cuman karena ini lagi rasionalisasi jadi mungkin banyak yang di potong karna mau pemilu kada ya, pemilu kada itu jadi banyak anggaran yang di plotting untuk pemilu kada sendiri, jadikan banyak yang di potong-potong gitu anggarannya, termasuk anggaran studi banding anggaran apa itu, tapi kalau untuk kondisi normal sih sangat mendukung ya, terus kalau misalnya ada sosialisasi apa, ada workshop apa itu diumumkan juga siapa yang mau ikut kayak gini gini sih tetap ini</p>	
--	--	--	---	--	--	--	---	--

<p>6 : Pipit Tyas Ratna Puspita, S.H., MPA.</p>	<p>Sebenarnya mereka yang menyediakan terus biasanya karna yang disediakan itu memang yang kita butuhkan jadi otomatis aja, jadi bukan kita yang, kita pengen diklat ini bukan, jadi memang biasanya mereka menyediakan itu sesuai sama yang kami butuhkan jadi sudah ngikut settingan mereka, soalnya mereka kan juga programnya dari mungkin dari pusat maunya seperti ini, auditor inspektorat seperti ini, auditor bpk seperti ini terus dibuatkan diklat seperti itu</p> <p>Ini keknya sudah terjawab ketika kebutuhan kompetensi, jadi kalau kendala kompetensi pasti dengan diklat yang berkaitan,</p> <p>Kalau setiap</p>					<p>P : Kalau itu keknya kendala subjetiif ya, belum tentu saya mengalami seperti itu dan yang lain tidak sih, kalau itu kan. Kalau misalnya dari sekarang kan penugasan itu sudah dari bidang, jadi mungkin irban sendiri, bu heri selaku irban juga sudah mengalokasikan waktu biar apa menjadwalkan kegiatan yang sebisa mungkin tidak bertumpuk-tumpuk, kalau dulukan berpusat di sekretariat, jadi penugasan dan lain-lain itu yang ngeplot waktu dan ngeplot tim dari sekretariat, kalau sekarang kan hak prerogatifnya bidang</p> <p>P : Jadi mungkin lebih terorganisir disitu karena fokus bu heri mengatur kami saja dibidang itu dan</p>	<p>P : Ya kalau misalnya ada informasi tentang webinar, atau seminar, atau anu pasti dishare di grup sih, tapi itu istilahnya bukan perintah ya, jadi silakan kalau mau ikut, silakan ikut, kalau enggak ya enggak. Jadi kalau mau pada kesadaran ya ikut, tapi kalau dibidang kami sendiri kalau bu heri itu aktif sekali mensortir webinar-webinar sama yang memang kami butuhkan dibidang, jadi bu heri itu “ini ada webinar itu dari bpkp, tolong bidang investigasi ikut semua” kalau kami khusus dibidang ini bu heri yang aktif dan mau gak mau diperintah untuk ikut, jadi kami memang merasanya memang itu kita butuhkan, jadi kami ikut.</p>	
---	---	--	--	--	--	--	--	--



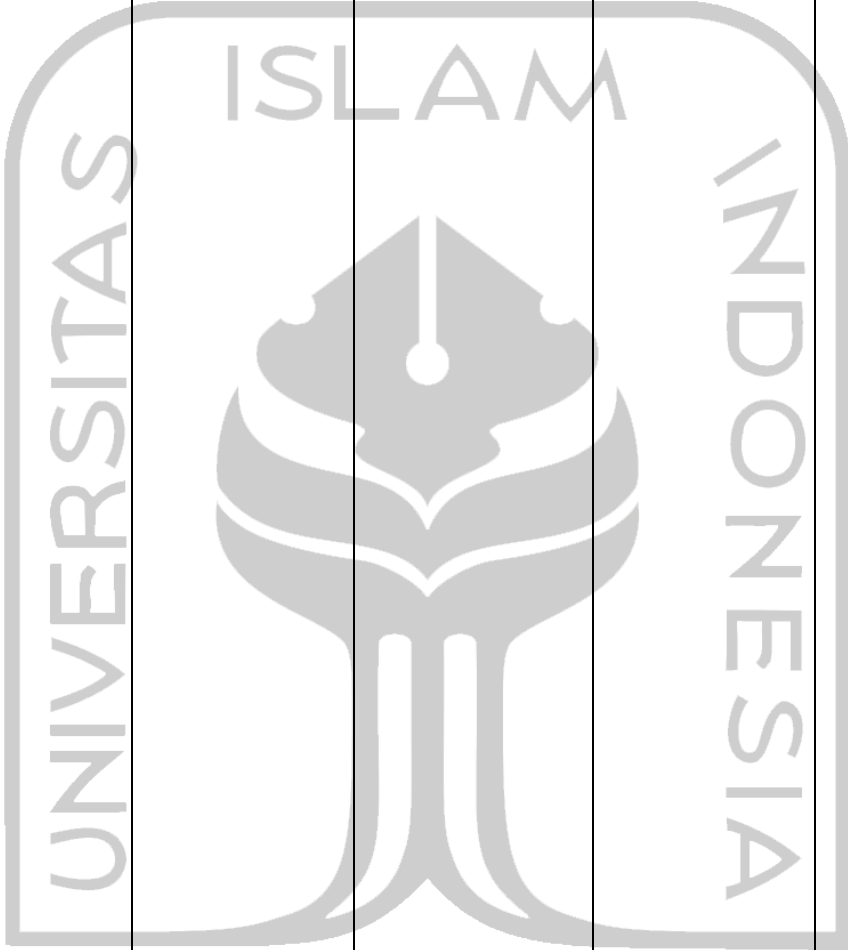
	<p>tahun, malah hampir setiap bulan mengirim diklat ya bu ya, hampir tiap bulan dijadwalkan, mungkin yang tau anunya sekretariat ya, sudah ada matriksnya, sudah ada jadwal diklatnya sudah ada plotnya siapa yang akan berangkat untuk diklat itu, biasanya siapa yang akan berangkat untuk diklat itu biasanya disesuaikan sama bidang, entah bidang entah background studinya kami entah kebutuhan pemeriksaan di tahun itu. Tergantung kebutuhan</p>					<p>penugasannya juga sesuai yang harus dikerjakan oleh bu heri dan kami, jadi timeline dan waktunya pun lebih terjadwal. Tapi kalau untuk volume pekerjaan kami juga tidak bisa milih, karna itu kebanyakan juga penugasannya juga mandatori dari pusat, jadi mau tidak mau harus dikerjakan.</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

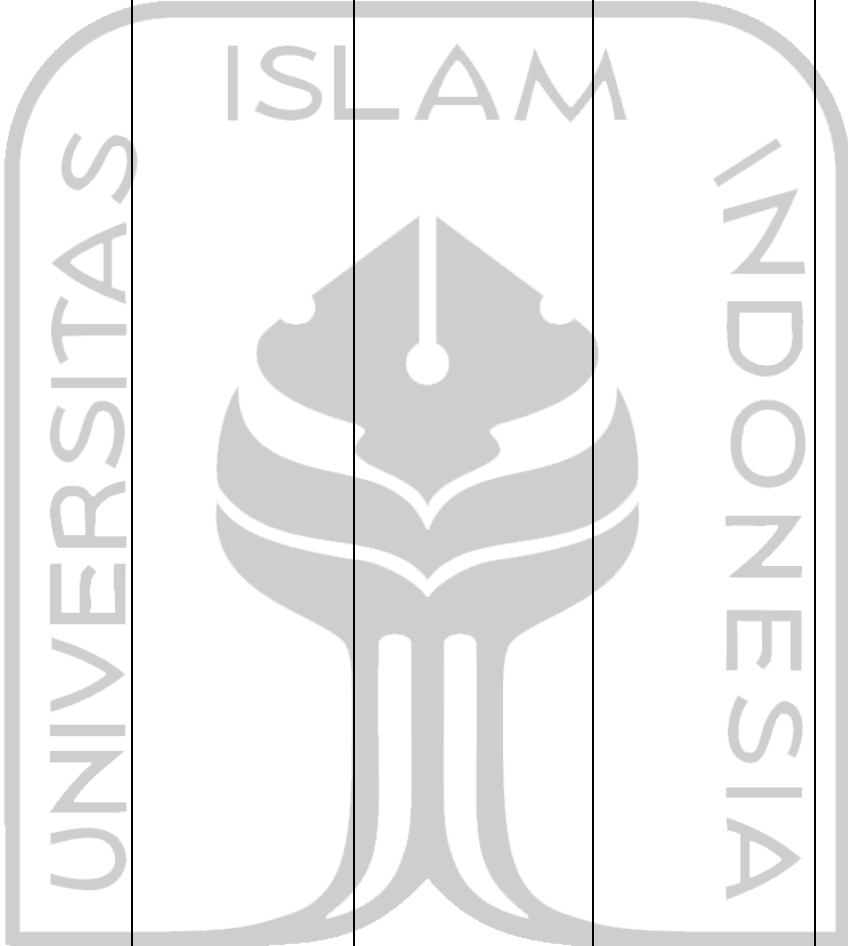
الجمعة الإسلامية الاندونيسية

<p>7 : Retno Isni Satiti</p>	<p>Oh saya terus terang, pengen semua teman-teman auditor itu diklatkan audit investigasi, audit penghitungan keuangan negara, audit yang mengarah pada kecurangan sehingga bisa membedakan auditnya itu khusus investigasi atau yang biasa. Jadi pengetahuan mereka itu tidak konfius. Ketika ada aduan tidak serta-merta diterjunkan, bahkan tidak semua auditor saya harapannya, semua harapan saya, kalau harapan saya semua nih, dari jajaran inspektur sampai penunjang-pendukung artinya kesekretariatan yang berkaitan langsung dengan pemeriksaan investigasi maupun <i>fraud</i>, maupun PKKN semua mendapat pengetahuan itu</p>	<p>Jadi, karena keterbatasan. Jadi, karena pengembangan kompetensi itu kan anggaran tidak melekat di inspektorat, ya. Tidak semua melekat di inspektorat, khususnya untuk yang kalau PKS, pelatihan di kantor sendiri yang dilaksanakan internal memang ada di kami anggarannya tapi ketika itu kami harus misalnya menjadi seorang penyuluh itu kan harus diklat di KPK kalau kami mau katakanlah mau seseorang jadi BPK itu kan juga harus diklatnya di luar bukan di internal kita, inspektorat penyelenggara nya, mesti pihak luar. Nah sekarang kalau badan kepegawaian nya daerah itu, itu kan mengurus 48 SKPD, mengurus 46 dinas kalau</p>	<p>Rno Jelas, kalau saya bicaranya selaku saya auditor jelas, karena apa? Sekarang ya tuntutan dunia kerja maupun OPD itu kan semakin pinter-pinter, teknologi semakin maju. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita ketinggalan, apalagi <i>nanti</i> pemeriksaan itu semua melalui database terkoneksi dengan aplikasi nah kalau kita nggak mengembangkan diri, terus tidak selalu mengasah pengetahuan ya akan ketinggalan satu jelas, jelas membantu untuk pengembangan kompetensi itu jelas membantu sekali dalam baik pemeriksaan yang berindikasi <i>fraud</i> maupun yang bukan. Sangat-sangat.</p>	<p>Rno Jadi, karena keterbatasan. Jadi, karena pengembangan kompetensi itu kan anggaran tidak melekat di inspektorat, ya. Tidak semua melekat di inspektorat, khususnya untuk yang kalau PKS, pelatihan di kantor sendiri yang dilaksanakan internal memang ada di kami anggarannya tapi ketika itu kami harus misalnya menjadi seorang penyuluh itu kan harus diklat di KPK kalau kami mau katakanlah mau seseorang jadi BPK itu kan juga harus diklatnya di luar bukan di internal kita, inspektorat penyelenggara nya, mesti pihak luar. Nah sekarang kalau badan kepegawaian nya daerah itu, itu kan mengurus 48 SKPD, mengurus 46 dinas kalau</p>	<p>Rno Kalau program rencana itu awal-awal memang kami sempat dimintai masukan tidak hanya saya, tapi beberapa teman juga dimintai masukan tapi kadang yang namanya PKPT itu di pertengahan jalan kan berubah karena amanat dari pusat atau dari amanat pimpinan Gak bisa selamanya Ya namanya, misalnya mas Reza mau pergi ke Jakarta naik kereta Tiba-tiba wah kok capek ya, tak naik pesawat aja Nah seperti itu, perubahan itu kan selalu ada Tapi Mas Reza kan dalam hal ini ke Jakarta sendiri. Kalau saya dan teman-teman auditor kan kerjanya tim. Nah itu begitu, mengubah itu kan akan sangat berpengaruh di</p>
------------------------------	--	--	--	--	--

	<p>karena apa? Kita tuh semakin tidak menutup mata di kabupaten, kota yang lain sudah banyak yang terjadi. Naudzubillah mindzalik jangan sampai terjadi di Sleman ya. Ya maksudnya itu pengetahuan itu sangat dibutuhkan karena memang ada MOU dengan APH sehingga ketika menerima penugasan itu apakah layak dinaikkan untuk dilakukan pemeriksaan investigasi atau pemeriksaan penghitungan ke anggaran. Jadi kita bisa men-stop sih, mana sih yang harus dinaikkan, mana yang tidak mana sih yang harus dilakukan mana yang tidak, mana sih yang harus diterima mana yang tidak saya sih harapannya semua itu semuanya justru yang terkait</p>		<p>sekarang dulu 48, sekarang 46, karena ada regulasi di RSUD yang menggabung di dinas kesehatan kami Sleman, punya 2 RSUD, dulu merupakan yang berdiri sendiri, sekarang di bawahnya Dinas Kesehatan menjadi 46. Setiap OPD butuh pengembangan khusus masing-masing dinas teknisnya, dan itu anggarannya diambil dari BKPP. Kalau saya bicara BKPP, tolong diartikan itu Badan Kepegawaian Daerah ya. BKPP. Nah, ketergantungan ini mereka kan harus membagi anggaran yang di sana untuk seluruh dinas yang ada di Kabupaten Sleman termasuk inspektorat. Kalau kami harusnya mengikuti sertifikasi,</p>				<p>sekarang dulu 48, sekarang 46, karena ada regulasi di RSUD yang menggabung di dinas kesehatan kami Sleman, punya 2 RSUD, dulu merupakan yang berdiri sendiri, sekarang di bawahnya Dinas Kesehatan menjadi 46. Setiap OPD butuh pengembangan khusus masing-masing dinas teknisnya, dan itu anggarannya diambil dari BKPP. Kalau saya bicara BKPP, tolong diartikan itu Badan Kepegawaian Daerah ya. BKPP. Nah, ketergantungan ini mereka kan harus membagi anggaran yang di sana untuk seluruh dinas yang ada di Kabupaten Sleman termasuk inspektorat. Kalau kami harusnya mengikuti sertifikasi, katakanlah</p>	<p>semuanya. nggih</p>
--	---	--	---	--	--	--	--	------------------------

	<p>paling enggak auditor semua ya dikursuskan Kalau memang anggaranya terbatas yang berkaitan dengan <i>fraud</i> Sering-sering lah menerima melalui PKS itu tentang pengetahuan, menerima pengetahuan tentang itu. Sehingga tidak saling <i>nantinya</i>, ketika kita kan, yang namanya auditor, ketika melakukan pemeriksaan tidak bisa membatasi pertanyaan dari yang diperiksa. Misalnya nih Mas Reza, auditor bidang pemerintahan, tiba-tiba ditanya waktu ke desa, Mas, apa sih audit investigasi? Lah kalau enggak tahu kan ya, masa Mas Reza, oh itu ada di bidang kami khusus investigasi. Kan gak lucu mas.</p>		<p>katakanlah sertifikasi pengadaan barang jasa, atau sertifikasi medris misalnya CRNO, itu kan biayanya mahal mas. Kalau mereka enggak mengol kan ya sudah, kami mundur, enggak jadi. Kan seperti itu. Jadi kami itu tergantung kalau untuk yang eksternal tergantung banget dengan BKPP. Pengembangan kompetensi yang eksternal dalam arti butuh sertifikasi ya. Harus buktinya <i>nanti</i> mengikuti ini kita lulus dengan sertifikasi itu bergantung banget lagi kalau di pelatihan kantor sendiri di internal cukup dengan inspektorat</p>				<p>sertifikasi pengadaan barang jasa, atau sertifikasi medris misalnya CRNO, itu kan biayanya mahal mas. Kalau mereka enggak mengol kan ya sudah, kami mundur, enggak jadi. Kan seperti itu. Jadi kami itu tergantung kalau untuk yang eksternal tergantung banget dengan BKPP. Pengembangan kompetensi yang eksternal dalam arti butuh sertifikasi ya. Harus buktinya <i>nanti</i> mengikuti ini kita lulus dengan sertifikasi itu bergantung banget lagi kalau di pelatihan kantor sendiri di internal cukup dengan inspektorat</p> <p>Rno betul, ya kita pandai-pandai lah misalnya terpaksa enggak bisa yuk, <i>nanti</i> ngikut Youtube kan bisa diputar</p>	
--	---	--	--	--	--	--	---	--

							<p>ulang. Belajarnya kan tidak harus di pagi itu. Cuma kan diakuinya karena sertifikat atau kehadiran itu kan diakuinya pada saat pelaksanaan yang live itu. Nah kalau itu ilmu masuk tapi kehadiran nggak diakui, padahal itu sebuah kebutuhan dua-duanya. Nah itu kan bisa saja antara saya dengan mas Reza atau dengan yang lain mengendorkan semangat. Aku itu butuh pemahaman, pengembangan kompetensi. Tapi karena aku gak diakui males ah belajar ngapain di luar waktu jam kerjaan. Kan seperti itu, kadang itu kan kita gak bisa memungkir hal-hal itu dan kita gak bisa mengendalikan, sementara saat ini 28 auditor kan kami itu udah 28 auditor kan saya</p>	
--	--	--	---	--	--	--	--	--

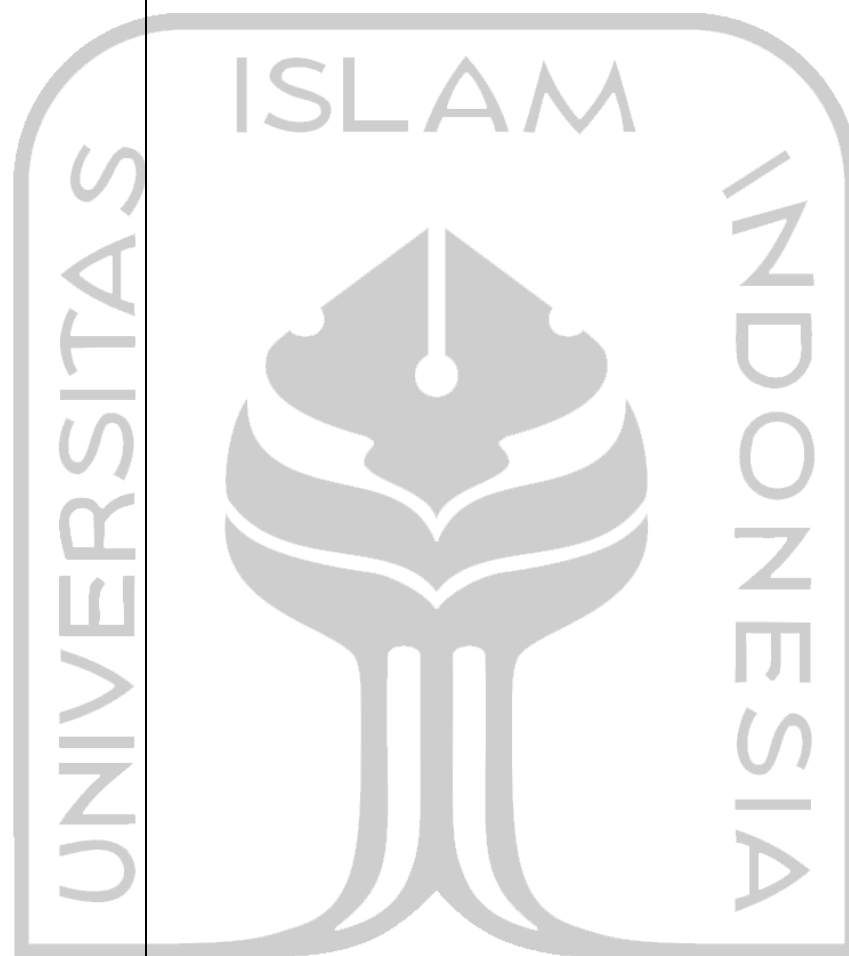
				<p>dengan yang satunya yang setingkat saya ada 9 Nah, Nah mungkin yang 8 kan pemahamannya gak sama dengan saya. Mungkin beliau-beliau, yang penting kompetensi saya terpenuhi. Artinya, ah yang penting ilmu saya serap. Perkara kehadiran, ah gak masalah. Tapi bagi saya, dua-duanya. Karena apa? Misalnya karena saya butuh naik pangkat. Mungkin dia gak penting karena dia habis naik pangkat. Nggak bisa disamaratakan kalau seperti itu.</p>	
--	--	---	--	---	--

الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

Narasumber	8. Berusaha menajemen waktu sendiri	3. Menyadari Kebutuhan pengembangan profesi
1 : Heri Setyawati, S.E., M.Acc.		
2 : Hery Dwi Kuryanto, S.H., M.Hum.	<p>Hy Iya, bagaimana memanage waktu. Kemudian bagaimana kita punya tanggung jawab. Ya kan? Tanggung jawab itu harus, artinya disiplin untuk memanfaatkan waktu. Jadi kita itu, sebelumnya kan bekerja itu tanpa diperintah. Disiplin tanpa diawasi. Jadi disiplin itu tanpa diawasi. Kalau sudah jalan, disiplin tanpa diawasi, bekerja tanpa diperintah, terus tanggung jawab itu tanpa diminta. Jadi tanggung jawab itu gak usah diminta, pekerjaan selesai sini. Gak usah tanggung jawabmu menyelesaikan pekerjaan ini,</p>	



tanpa kita minta mereka menyerahkan pekerjaan. Itu yang kita harapkan. Iya.



الجامعة الإسلامية  
الاستد بالاندو

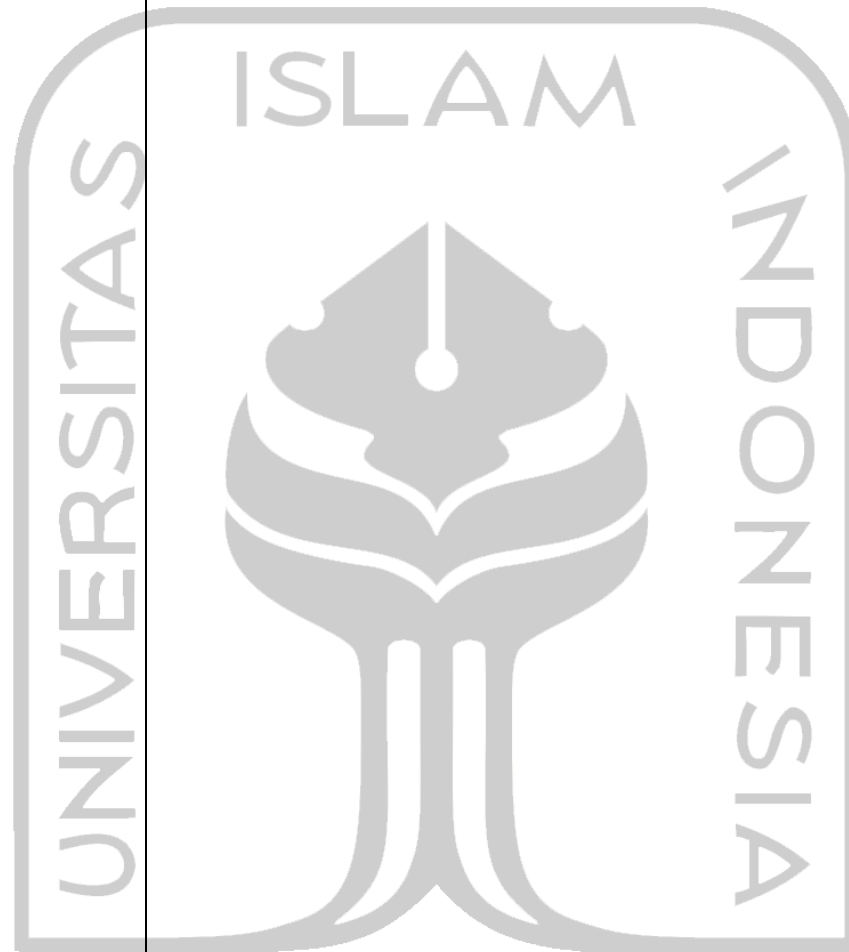


<p>3 : Ika Sulistyio Devi</p>	<p>I Kendalanya karena banyak ketugasan di kami, Jadi kalau misalnya harus satu auditor itu misalnya 2 bulan sekali harus mengikuti diklat gitu, waktunya ya nggak ada.</p> <p>Rz Oh Dampaknya. kalau Solusinya untuk biar nggak kayak gitu, efektif dan waktunya mengembangkan kompetensi cukup? Dan kerja juga cukup bagaimana bu? I Selama ini saya rasa ya <i>nanti</i> terus lembur mas.</p> <p>I Iya lembur. Kayak kemarin Bu Heri itu karena diklat 5 hari audit investigasi atau apa gitu di BPK, ada evaluasi LKJIP itu yang memang harus mereka kerjakan hari Rabu, hari Minggu, hari Libur, mereka</p>	<p>I Kalau pelatihan kantor sendiri jelas mereka ikut. Kalau e-learning itu kan berdasarkan surat tugas tadi, penugasan. Karena untuk auditor itu ada pengembangan kompetensi untuk yang di angka kredit itu. Jadi PKS, pelatihan kantor sendiri itu mereka harus ikut. Kalau enggak mereka enggak bisa terpenuhi <i>nanti</i> kredit poinnya. Mereka kan dinilai berdasarkan angka kredit. Harus mencapai pengembangan profesi berapa gitu</p>
-------------------------------	---	---



harus masuk mengerjakan itu. Jadi, solusinya ya harus mereka waktu ekstra di hari Libur pun harus mengerjakan.

1 Cara mengatasinya dibawa pulang Di rumah pun masih ngerjain laporan



الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

<p>4 : Ir. Sri Puji Lestari</p>		<p>Pj : Sebenarnya enggak sih ya, kalau untuk manajemen kan bagaimana caranya kita meningkatkan mereka-mereka semua itu paham sehingga membantu lembaga juga pada saat kita memang mempunyai program, kita juga diminta untuk membantu OPD, itu dari pihak manajemen, disamping itu juga itu merupakan juga karena itu keahlian bagi mereka karena mereka itu fungsional, mereka juga perlu angka kredit ya itu juga semakin banyak kegiatan juga mereka kan angka kredit nya semakin banyak. Angka kredit untuk pengembangan profesi mereka, untuk <i>nanti</i> akhirnya untuk menaikkan angka fungsi dalam kerja. Sebenarnya</p>
---------------------------------	--	--



	<p>gak ada perbedaan sih.</p> <p>Pj : Sertifikasi nya kalau sertifikasi harus mengikuti diklat pembentukan, kalau auditor pembentukan auditor, kalau OPD pembentukan OPD. Itu syarat mendasar. Supaya mengikuti diklat tersebut ya harus bekerja di inspektorat, berarti harus mengikuti itu, lulus, baru <i>nanti</i> bisa mendapatkan sertifikat baru <i>nanti</i> diangkat menjadi auditor, setelah diangkat menjadi auditor ya <i>nanti</i> ada bukti-bukti pekerjaan, dan bukti-bukti pekerjaan itu salah satu syaratnya adalah pengembangan profesi. Pengembangan profesionalitas itu seperti diklat diklat segala macam itu kan masuk pengembangan</p>
--	---



profesionalitas dan itu mereka itu harus. Makanya kalau yang kreatif dia mengikuti seminar, diklat-diklat online itu, pelatihan-pelatihan online itu cepat dia mendapatkan kredit pengembangan profesional

Rz : Oh itu sebagai bukti tadi bu?

Pj : Iya, sebagai bukti *nanti* untuk pengisian angka kredit gitu

Pj : Penyebabnya apa ya, kalau bilang apa ya, bahasa kasarnya apa ya malas atau apa ya, jadi belum tergugah untuk apa ya meningkatkan dengan kemauan sendiri gitu loh.

Jadi kadang-kadang harus kita paksa. Emang pertama ya memang harus dipaksa mengikuti ini, mengikuti ini, yang kedua mungkin kalau udah, tadi ada beberapa sih, dia



tidak usah disuruh, dia mengikuti, ada, "bu saya sudah mengikuti ini, ini, ini, ini, terkait dengan pengawasan, ini buktinya" nah baru saya berikan surat keterangan kalau dia sudah mengikuti gitu. Nah itu sebagai dasar untuk mendapatkan angka kredit, ada juga yang seperti itu, luar biasa, iya tapi orang seperti itu satu diantara 10 ternyata

Pj : Kalau di undang-undangnya ASN itu kan memang ada aturan setiap pegawai itu setiap pegawai itu harus mendapatkan pelatihan atau pengembangan kompetensi itu sekurang-kurangnya 20 JPL, harus 20 JPL, kalau untuk kita semuanya pake, ada beberapa sih gak semuanya pegawai kita kirim ke luar tapi ada

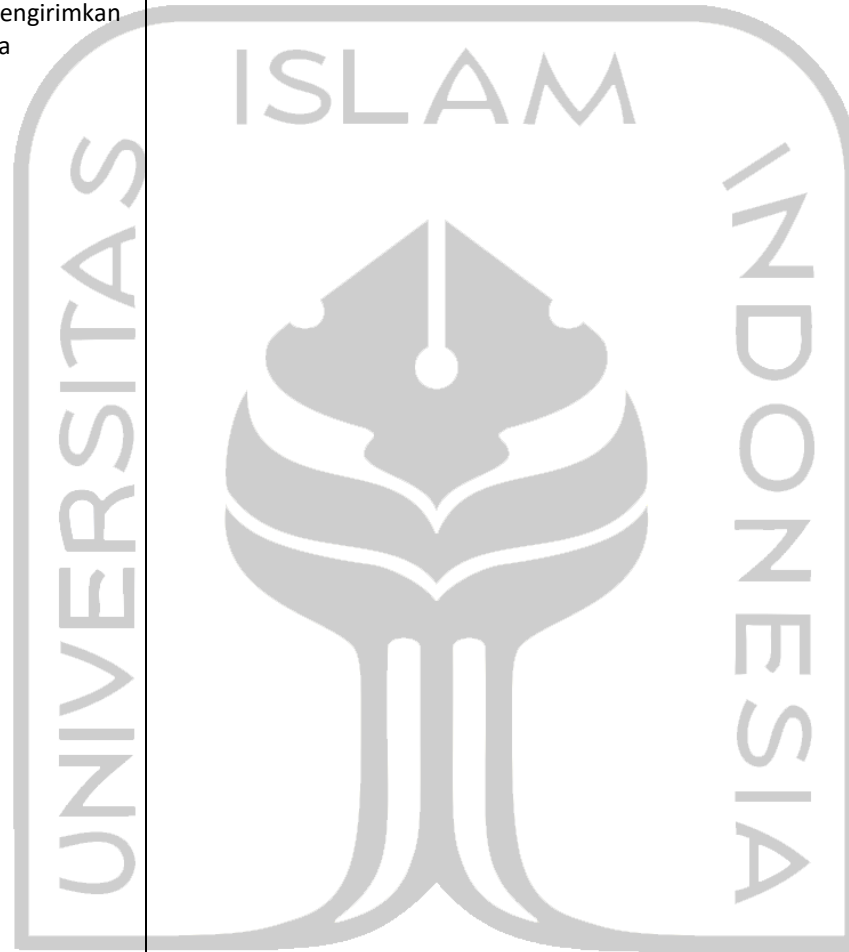


juga kita mengadakan sendiri untuk seluruhnya termasuk sekretariat, karena untuk memenuhi minimal 20 JPL itu. Terus yang ketiga juga teman-teman pada saat ada sosialisasi dari luar ,OPD itu juga pengembangan kompetensi juga, itu juga sesuai dengan bidangnya masing-masing sih itu. Kemudian ya kita menggalakkan itu webinar yang dari online-online itu

Pj : Penyebabnya apa ya, aku itu jarang buka anu ya, buka informasi di web, tapi sebetulnya kekurangan saya itu sudah saya lemparkan ke teman-teman yang muda-muda. Kalau muda-muda kan kalau ada informasi segera informasikan. Kalau ada seminar, tapi khusus seminar



		terkait yang berhubungan dengan pengawasan, baru bisa mengirimkan peserta
--	--	---



الجامعة الإسلامية  
الاستد بالاندو



<p>5 : Ngatiyah, S.H.</p>	<p>G Ya itu tadi kita terus kebanyakan terus kita jadi lembur-lembur seperti itu terus kita juga pakai ini juga sih kalau bisa pakai aplikasi-aplikasi seperti itu lah kayak evaluasi LKJIP itu kemarin kita manual-manual maksudnya manual excel sih excel manual terus kita buat aplikasi biar kita lebih cepet lebih memudahkan seperti itu.</p>	<p>G Kalau kami memang anu sih sangat antusias ya, terutama untuk diklat, untuk apa itu, terus sekarang kan memang dari kepegawaian di pemda sini juga mensyaratkan ya untuk pengembangan kompetensi tiap pegawai. Kalau di auditor itu harus memenuhi setahunnya harus 120 JPL jam pelajaran, berarti kita memang harus meningkatkan kompetensi kita, soalnya harus lapor kan lewat aplikasi itu 120 JPL itu harus terpenuhi, kan 1 JPL nya 45 menit ya, berarti 45 menit kalikan 120 berarti berapa ya setahun itu. Jadi disamping tuntutan itu kita memang butuh ilmunya juga sih, jadi memang dari bpkp sini mensyaratkan seperti itu</p>
-------------------------------	---	---



	<p>G Kalau itu sih anu kita memang walaupun banyak yang, kalau yang muda-muda sih gak masalah ya kalau yang udah tua kayak aku itu sih tetap berusaha mengikuti sih karena sekarang semuanya udah banyak aplikasi tapi tetap mau belajar sih dari temen-temennya dari yang muda dari yang apa kayak gitu, kalau keinginan belajar sih masih ada ya tapi kebanyakan dari kita sih udah ini bisa mengikuti lah sampai dengan sekarang itu masih bisa mengikuti masih ini lah keinginan belajarnya ada walaupun semua pakai aplikasi tetep kita berusaha kesitu asalkan gak terlalu rumit-rumit sih. Tapi selama ini kalau pemeriksaan masih ini sih masih bisa lah itu</p>
--	--



<p>6 : Pipit Tyas Ratna Puspita, S.H., MPA.</p>		<p>P : Kalau SDMnya berarti kan peningkatan kompetensi kami selaku auditor yang melakukan pengawasan kan biasanya sekarang juga ada kewajiban untuk apa pemenuhan jam diklat dan lain-lain, jadi diklat rutin itu pasti sih. Terus baru tahun ini sudah berapa yang bu yang kaitannya dengan investigasi ini? Dua</p> <p>P : Harapannya berarti anu ya mas ketika perkembangannya pesat maka auditornya juga mau gak mau harus juga lebih pesat, mungkin saya dan temen-temen juga mau gak mau harus, mungkin bu puji yang disampaikan bu puji tadi, inisiatif kami sebagai yang pelaksana bakal turun ke lapangan mungkin memang diharuskan lebih</p>
---	--	--

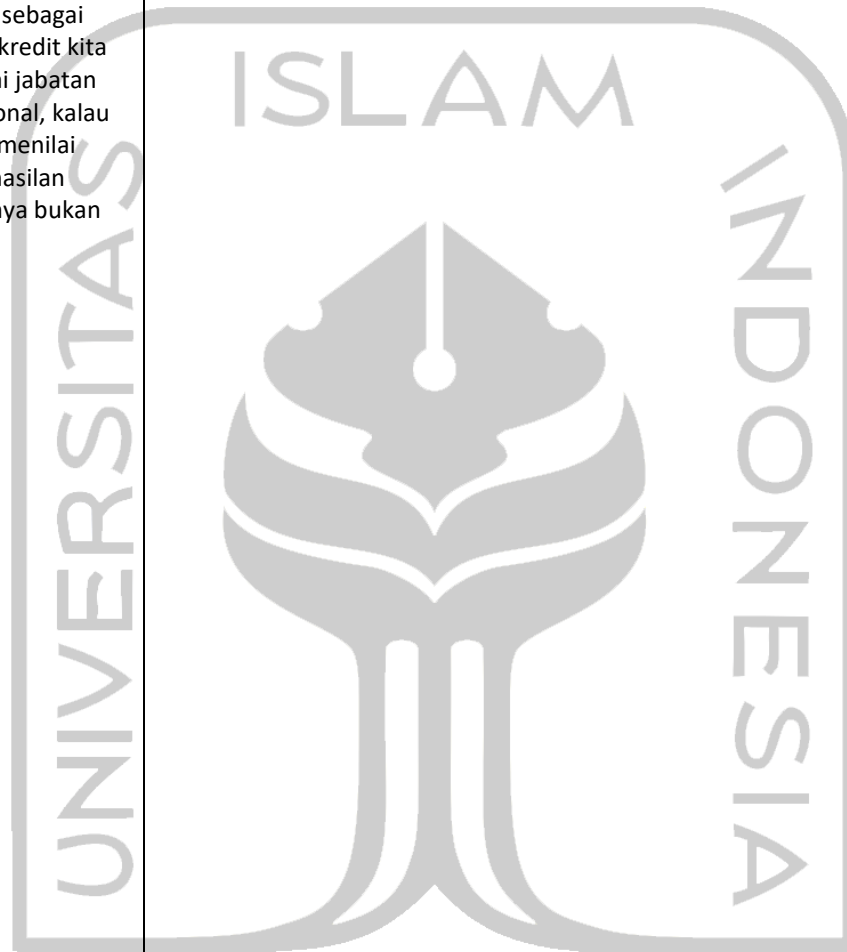


berniat lagi, terus mau belajar dan itu mengikuti perkembangan, jadi tidak boleh cuman mengikuti apa yang ada terus ya udah, bisanya cuma segini, padahal kan kita tuntutan juga banyak kek gitu. Kalau pribadi sih itu, jadi mau gak mau memang saya harus belajar, belajar dan berusaha mengikuti arus, karena memang tuntunnya seperti itu kek gitu

P : Kalau angka kredit itu bukan untuk mengukur keberhasilan sih mas, kalau itu kan cuman karna kami fungsional kami harus mengumpulkan angka kredit, nah pengembangan kompetensi dari pengembangan profesi itu kan termasuk, eh pengembangan kompetensi itu kan dari kami bisa dilihat dari pengembangan



		profesi disitu kalau kita ikut diklat kita dapat angka kredit sekian sebagai angka kredit kita sebagai jabatan fungsional, kalau untuk menilai keberhasilan kayaknya bukan itu sih.
--	--	--



الجمعة الإسلامية بالاندونيسيا

<p>7 : Retno Isni Satiti</p>	<p>Rno Iya, betul. Iya, betul. Kalau Dinas Kesehatan bicara tentang standar pelayanan minimal, tentang standar pelayanan minimal nya Kementerian kesehatan gimana? Kita harus baca standar-standar itu pada saat kita melakukan pemeriksaan yang berkorelasi dengan atau berkaitan itu, ya mau tidak mau kita harus tahu kan itulah salah satu pengembangan kompetensi, tidak hanya melalui media formal, maksudnya formal kita duduk bersama, baik internasional, tapi juga kreatifitas kita bisa melihat sambil duduk bahkan mungkin sambil nunggu bis, nunggu grab, atau nunggu kereta atau</p>	<p>Rno Memang kan ada kewajiban auditor itu untuk meningkatkan kompetensi. Bahkan dalam kami kenaikan peran dari seorang anggota tim, keketua tim, pengendali teknis, itu memang dituntut untuk mengembangkan namanya pengembangan profesi. Kalau kemarin dalam setiap pengajuan, setiap satu semester kami kan harus menilaikan berapa sih dalam satu semester melakukan pengawasan, berapa sih dalam satu semester melakukan pengembangan profesi, Atau terus berapa sih dalam satu semester kita melakukan pengembangan kompetensi, penunjang pendukung. Kalau pendukung itu misalnya ikut seminar atau kita menjadi</p>
------------------------------	--	---



	<p>pesawat Youtube itu mbah Google banyak sekali, apa sih SPM nya?</p> <p>Rno iya betul. Harus pinter-pinter alokasi waktu. Memanfaatkan peluang yang ada</p> <p>Rno iya skala prioritas, hidup kan harus ada skala prioritas gak harus semuanya sama <i>nanti</i> malah pusing sendiri kalau skala prioritasnya sama.</p>	<p>narasumber tapi tidak berkaitan dengan pemeriksaan. Kadang seperti itu. Tapi kalau pengembangan profesi itu menunjang atas peran kita jabatan kita selaku fungsional auditor jadi kalau kita nggak mengembangkan kalau kemarin sebelum ada, jadi kemarin ada aplikasi namanya si Bijak, kita itu baru tahun ini masih debatable, sampai sekarang belum keluar. Yang mulai 1 Januari 2023 itu kita masih menunggu regulasinya dari Kemenpan kaitannya dengan penilaian angka kredit tapi untuk yang kemarin sebelum-sebelumnya kami itu tetap pakai yang penilaian angka kredit si bijak itu, lah kalau kita nggak mengembangkan kompetensi kita, nggak bakalan</p>
--	--	---



naik pangkat. Bisa seorang-seorang yang sudah bertahun-tahun, sudah senior, bahkan sudah mau pensiun bisa jadi anggota tim terus iya

Rno Oh, sangat anu Saya merasa terdukung ya, apalagi dari internal. Karena gini, satu karena memang auditor itu butuh pengembangan profesi. Itu butuh sekali kalau kita bicara tentang kenaikan pangkat, itu kita harus selalu mengembangkan. Terus untuk pengembangan untuk karena tadi untuk pemenuhan, seketika gini, jadi auditor itu kan dituntut serba tahu. Serba tahu di semua lini. Artinya bahwa menjadi rujukan bagi para pelaksana di dinas-dinas itu untuk bertanya kepada kami, auditor. Misalnya,





	<p>saya kebetulan dari akuntansi, saya bisa saja tiba-tiba ditanyai tentang teknik. Nah, teman-teman teknik kuliah 5 tahun, mereka familiar dengan itu. Nah, saya juga harus belajar tentang apa itu HPS, apa itu tentang proses lelang Sementara teman-teman dari juga harus belajar tentang apa itu laporan keuangan pemerintah daerah apalagi laporan keuangan setiap tahun kan kita diaudit oleh BPK untuk diberikan opini, nah itu kan tidak semua auditor itu berlatar belakang akuntansi nah padahal kami ada Ini contoh ya, kita harus ada melakukan review sebelum diserahkan ke BPK, laporan keuangan pemerintah daerah itu harus di review oleh Inspektorat. Kalau kita mengandalkan</p>
--	---



	<p>tenaga akuntansi yang di inspektorat, sedikit, Saya tuh, karena dari UII, ada teman itu UII, mungkin yang dari ekonomi akuntansi mungkin sekitar nggak sampai 10. Padahal tim big size review laporan keuangan itu bisa 16 orang. Nah dari mana kalau nggak menghire dari yang lain, seperti itu. Menghire dari yang lain itu disiplin ilmu lain. Jadi kalau ditanya bagaimana supporting dari internal, internal sangat men-support untuk pengembangan kompetensi, bagaimana dari sisi auditor apakah perlu? Sangat perlu sekali, itu saya jawab seperti itu. nggih</p> <p>Rno Jelas, karena kami itu butuh, Kami itu jelas butuh pengembangan profesi. Jadi dari</p>
--	---



	<p>awal tahun itu sudah mapping kemana. Jadi kami, karena ya bagaimanapun tuh sesuai dengan apa yang dishare oleh BPKP, sekiranya yang masuk bisa diikuti auditor madya, ya auditor madya. Yang diikuti auditor ahli muda, ya ahli muda atau yang terampil cuma ya itu mas, memang pengembangan kompetensi bagi saya pribadi itu sebuah kebutuhan malu rasanya mas kalau ditanya sampai nggak bisa jawab oleh dinas gitu, makanya harus mengasah terus.</p>
--	---

	<p>Rno Iya, betul. Iya, betul. Kalau Dinas Kesehatan bicara tentang standar pelayanan minimal, tentang standar pelayanan minimal nya Kementerian kesehatan gimana? Kita harus baca standar-standar itu pada saat kita</p>
--	---



		<p>melakukan pemeriksaan yang berkorelasi dengan atau berkaitan itu, ya mau tidak mau kita harus tahu kan itulah salah satu pengembangan kompetensi, tidak hanya melalui media formal, maksudnya formal kita duduk bersama, baik internasional, tapi juga kreatifitas kita bisa melihat sambil duduk bahkan mungkin sambil nunggu bis, nunggu grab, atau nunggu kereta atau pesawat Youtube itu mbah Google banyak sekali, apa sih SPM nya?</p>
--	--	---



الجمعة الإسلامية الأندلسية